



PEMERINTAH PROVINSI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tahun 2023 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan



7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis



Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II Informasi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Indikator Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)
 - 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.6 Inflasi
 - 2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- 2.4 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Tahun 2023
 - 2.4.1. Bidang Pendidikan
 - 2.4.2. Bidang Kesehatan
 - 2.4.3. Bidang Infrastruktur
 - 2.4.4. Bidang Pengawasan dan APIP
 - 2.4.5. Bidang Kapasitas Aparatur
 - 2.4.6. Bidang Inflasi (Belanja Wajib Perlinsos)

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah



ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah, BLUD, dan Perusahaan Daerah
 - 4.1.1 Entitas Pelaporan
 - 4.1.2 Entitas Akuntansi
 - 4.1.3 BLUD
 - 4.1.4 Perusahaan Daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD
- 4.4 Ringkasan penerapan Kebijakan Akuntansi akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - 4.4.1 Kas dan Setara Kas
 - 4.4.2 Piutang
 - 4.4.3 Persediaan
 - 4.4.4 Aset Investasi
 - 4.4.5 Aset Tetap
 - 4.4.6 Properti Investasi
 - 4.4.7 Dana Cadangan
 - 4.4.8 Aset Lain-lain
 - 4.4.9 Kewajiban
 - 4.4.10 Ekuitas
 - 4.4.11 Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO
 - 4.4.12 Belanja dan Beban

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.1.5 SiLPA
- 5.2 Pos-pos LP-SAL
 - 5.2.1 LP-SAL awal periode
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Tahun Berjalan
 - 5.2.3 SAL Tahun Berjalan
 - 5.2.4 LP-SAL akhir periode
- 5.3 Pos-pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus Non Operasional



- 5.4.4 Defisit Non Operasional
- 5.4.5 Surplus (Defisit)-LO
- 5.5 Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Jumlah Kas Akhir Periode
- 5.6 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Perubahan Ekuitas
 - 5.6.3 Ekuitas Akhir
- 5.7 Pengungkapan Informasi Untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja
- 5.8 Pengungkapan Informasi Untuk Kejadian Setelah Tahun Pelaporan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2023 sudah mulai membaik seiring pulihnya pariwisata Bali. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,25%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,69%.
3. Gini Ratio sebesar 0,362.
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.01.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,71%.
6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,54%.
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp274,36 triliun.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran

orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2023)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2022-2023
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,53	4,57	4,25	Turun 0,32
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	201,97	205,68	193,78	Turun 11,9
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	10,14	9,54	9,36	Turun 0,18
4	Peringkat Provinsi	1	3	1	Naik 2

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2021, 2022, dan per Maret 2023*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2023 (keadaan Maret 2023) sebesar 4,25% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin tercatat 4,57%. Peningkatan kinerja pariwisata pada tahun 2023 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2023)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,682	0,625	0,553	Turun 0,072
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,714	1,586	1,528	Turun 0,058
3	Peringkat Provinsi	4	2	1	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali*

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2023)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,154	0,129	0,102	Turun 0,027
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,424	0,395	0,377	Turun 0,018
3	Peringkat Provinsi	4	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2021, 2022, dan per Maret 2023*

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 2,69%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2023)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	Turun 2,11
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	Turun 0,54
3	Peringkat Provinsi	19	20	3	Naik 17

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Provinsi Bali 2021, 2022, dan per Agustus 2023*

TPT di Provinsi Bali Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,69%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,80% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 0,362 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 *Gini Ratio* Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2023)

No	Gini Ratio	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,362	Turun 0,001
2	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388	Naik 0,004
3	Peringkat Provinsi	25	21	21	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali 2021, 2022, dan per Maret 2023*

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (> 80).

Pada tahun 2023, BPS melakukan *update* angka salah satu komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). UHH dilakukan *update* menyusul telah selesainya penghitungan UHH berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Jembrana	73,57	74,38	74,80	Naik 0,42
2	Tabanan	76,95	77,22	77,87	Naik 0,65
3	Badung	81,84	82,13	83,00	Naik 0,87
4	Gianyar	78,21	78,87	79,69	Naik 0,82
5	Klungkung	72,98	73,77	74,18	Naik 0,41
6	Bangli	70,60	71,47	71,99	Naik 0,52
7	Karangasem	68,58	69,48	70,09	Naik 0,61
8	Buleleng	73,60	74,48	74,87	Naik 0,39

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
9	Denpasar	84,04	84,39	84,68	Naik 0,29
10	Provinsi Bali	76,69	77,40	78,01	Naik 0,61
11	Indonesia/Nasional	73,16	73,77	74,39	Naik 0,62
12	Peringkat Provinsi	5	4	5	Turun 1

Catatan: penghitungan menggunakan Umur Harapan Hidup hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar 78,01, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 77,40 mengalami kenaikan sebesar 0,61%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya UHH saat lahir, harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. UHH saat lahir mencapai 74,88 tahun pada Tahun 2023, lebih panjang 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,45 tahun dengan harapan lama sekolah 13,58 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp14.382 ribu atau meningkat Rp440 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	8,89	9,16	9,49
	Tabanan	14,52	14,94	15,47
	Badung	29,05	31,95	35,55
	Gianyar	17,26	17,96	18,87
	Klungkung	5,60	5,77	6,04
	Bangli	4,38	4,51	4,67
	Karangasem	10,57	10,84	11,18

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Buleleng	21,79	22,46	23,28
	Denpasar	32,44	34,07	36,00
	Provinsi Bali	143,87	150,83	159,45
	Indonesia	11.120,06	11.710,25	12.301,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-0,65	2,98	3,66
	Tabanan	-1,98	2,93	3,56
	Badung	-6,74	9,97	11,29
	Gianyar	-1,05	4,04	5,06
	Klungkung	-0,23	3,12	4,70
	Bangli	-0,33	2,80	3,50
	Karangasem	-0,56	2,58	3,10
	Buleleng	-1,27	3,11	3,64
	Denpasar	-0,92	5,02	5,69
	Provinsi Bali	-2,46	4,84	5,71
	Indonesia	3,70	5,31	5,05
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	4	6	5
	Tabanan	8	7	7
	Badung	9	1	1
	Gianyar	6	3	3
	Klungkung	1	4	4
	Bangli	2	8	8
	Karangasem	3	9	9
	Buleleng	7	5	6
	Denpasar	5	2	2
4	Peringkat Nasional	34	22	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 5,71%. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, baru pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mengalami percepatan kembali pada tahun 2023. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2023 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (Transportasi dan Pergudangan), kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan kategori D (Pengadaan listrik dan Gas). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 25,29%, diikuti kategori I yang tumbuh sebesar 16,16%, serta kategori D tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut



kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

1. Inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
2. Inflasi Sedang (*Gallopig Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2023 adalah sebesar 2,54% untuk Kota Denpasar dan 4,31% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,01	6,44	2,54	Turun 3,90
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	Turun 0,32
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	Turun 2,90
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1	2	Turun 1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	48	26	57	Turun 31

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2021, 2022, dan per Desember 2023*

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 6,44%. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.1 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.070.582,96	3.189.288,61	3.383.130,98
	2. Pertambangan dan Penggalian	119.317,96	123.082,36	130.296,98
	3. Industri Pengolahan	716.617,94	775.281,70	826.377,27



No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.752,65	21.388,48	23.839,96
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.839,67	11.085,03	11.363,43
	6. Konstruksi	1.458.174,00	1.560.610,00	1.590.389,71
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.376.928,59	1.515.979,77	1.647.699,89
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.832.219,19	1.992.432,14	2.281.484,63
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.488.190,25	1.725.726,48	1.913.853,52
	10. Informasi dan Komunikasi	932.303,72	920.103,44	962.912,12
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	466.840,86	564.164,82	642.046,66
	12. Real Estate	646.295,81	686.321,83	711.528,20
	13. Jasa Perusahaan	107.653,88	121.414,09	131.173,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	393.766,62	408.829,98	407.500,36
	15. Jasa Pendidikan	325.998,71	329.302,20	326.228,55
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346.488,60	359.633,80	375.560,11
	17. Jasa Lainnya	198.663,54	227.611,00	247.491,35
	PDRB ADH Berlaku	13.510.634,96	14.532.255,74	15.612.876,95
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.189.685,00	5.423.615,00	5.730.945,40
	2. Pertambangan dan Penggalian	255.255,70	268.642,56	280.999,77
	3. Industri Pengolahan	1.307.413,40	1.420.241,95	1.518.608,39
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.403,50	27.812,16	31.261,63
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36.266,10	37.610,48	39.832,49
	6. Konstruksi	2.271.017,70	2.416.304,08	2.501.179,21
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.951.250,90	2.133.918,14	2.316.325,21
	8. Transportasi dan Pergudangan	319.072,80	361.380,95	424.495,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.446.784,40	4.051.051,59	4.739.339,60
	10. Informasi dan Komunikasi	1.435.394,70	1.437.157,09	1.480.998,95
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	857.344,10	1.012.001,46	1.158.586,29
	12. Real Estate	1.175.116,00	1.243.819,43	1.290.459,70
	13. Jasa Perusahaan	235.148,20	261.980,08	283.012,53
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.930.091,80	1.903.670,09	1.964.653,99
	15. Jasa Pendidikan	466.050,00	472.511,89	470.255,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641.802,20	664.021,58	693.729,77
	17. Jasa Lainnya	479.045,60	545.559,37	606.245,20
	PDRB ADH Berlaku	22.021.142,10	23.681.297,92	25.530.928,95
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817.979,06	3.958.842,15	4.160.349,32



No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	2. Pertambangan dan Penggalian	162.834,67	173.454,78	176.424,08
	3. Industri Pengolahan	2.149.637,85	2.340.266,80	2.447.355,08
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	69.460,68	86.470,56	98.010,62
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	122.318,12	126.000,66	133.721,84
	6. Konstruksi	5.225.361,78	5.682.997,77	5.831.279,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	3.838.160,37	4.320.982,49	4.738.448,09
	8. Transportasi dan Pergudangan	5.734.099,42	11.477.866,06	19.131.742,25
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.415.394,46	13.034.218,24	16.870.404,33
	10. Informasi dan Komunikasi	4.073.862,12	4.133.369,68	4.216.549,63
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487.860,16	1.753.186,88	2.043.883,80
	12. Real Estate	2.064.844,15	2.204.535,95	2.278.749,26
	13. Jasa Perusahaan	402.669,59	458.276,24	508.423,39
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.229,44	2.086.235,78	2.184.119,45
	15. Jasa Pendidikan	1.946.425,97	1.965.509,23	1.980.372,32
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	905.962,18	942.239,86	986.583,93
	17. Jasa Lainnya	463.980,15	545.547,02	611.145,40
	PDRB ADH Berlaku	44.882.080,18	55.290.000,16	68.397.561,91
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.471.186,95	3.510.636,94	3.678.039,89
	2. Pertambangan dan Penggalian	368.119,17	391.638,87	400.329,48
	3. Industri Pengolahan	3.144.587,50	3.435.572,11	3.702.588,93
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	26.068,24	31.302,85	35.993,58
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	34.394,36	34.784,60	36.914,45
	6. Konstruksi	3.393.155,41	3.622.140,00	3.748.697,89
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.113.841,94	2.315.521,87	2.518.946,62
	8. Transportasi dan Pergudangan	211.261,08	239.273,09	278.927,26
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.669.744,42	5.511.589,61	6.807.742,28
	10. Informasi dan Komunikasi	1.926.282,61	1.934.235,55	2.022.467,54
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.099.702,95	1.306.803,62	1.470.144,23
	12. Real Estate	1.237.177,72	1.302.343,47	1.348.206,25
	13. Jasa Perusahaan	324.094,10	368.103,38	407.992,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.545.599,71	1.594.599,03	1.603.134,89
	15. Jasa Pendidikan	688.812,66	698.609,27	694.994,47
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.037.936,36	1.074.711,90	1.127.533,03
	17. Jasa Lainnya	496.261,86	572.339,60	646.762,67
	PDRB ADH Berlaku	25.788.227,04	27.944.205,76	30.529.416,26

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.941.865,17	2.026.791,81	2.195.486,74
	2. Pertambangan dan Penggalian	257.303,63	279.591,68	295.100,51
	3. Industri Pengolahan	831.797,37	903.301,57	951.253,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.453,77	10.932,89	12.862,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.663,81	17.998,95	19.316,40
	6. Konstruksi	910.109,32	979.637,48	1.007.661,23
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	713.517,95	804.462,79	873.010,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.018,76	200.723,00	255.309,30
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	751.304,82	923.819,00	1.207.561,79
	10. Informasi dan Komunikasi	874.940,80	876.961,00	913.977,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	351.455,38	417.685,00	474.210,75
	12. Real Estate	210.352,77	223.019,00	232.428,12
	13. Jasa Perusahaan	84.122,06	94.768,00	103.802,93
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	533.140,49	527.576,00	553.753,78
	15. Jasa Pendidikan	224.908,84	229.617,00	230.940,31
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	440.604,63	459.000,00	484.075,44
	17. Jasa Lainnya	199.873,34	234.324,00	269.463,75
	PDRB ADH Berlaku	8.529.432,93	9.210.209,00	10.080.215,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.928.381,09	2.035.006,00	2.159.562,75
	2. Pertambangan dan Penggalian	125.207,55	131.510,24	139.860,70
	3. Industri Pengolahan	603.798,52	641.512,30	681.839,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.875,69	3.059,12	3.481,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.733,26	4.773,48	4.879,57
	6. Konstruksi	613.097,08	654.650,77	675.513,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	672.881,83	738.882,07	807.988,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	72.459,32	79.728,61	89.153,81
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	704.725,08	821.596,16	964.549,92
	10. Informasi dan Komunikasi	329.754,70	338.265,01	354.235,97
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	189.423,47	222.152,25	257.966,62
	12. Real Estate	220.625,91	232.396,17	241.140,91
	13. Jasa Perusahaan	36.887,17	40.360,77	42.964,87
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	811.021,28	843.307,07	895.256,27
	15. Jasa Pendidikan	177.016,51	179.632,29	181.363,75

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.037,49	119.671,79	124.989,83
	17. Jasa Lainnya	219.632,41	251.486,23	283.561,43
	PDRB ADH Berlaku	6.825.558,37	7.337.990,33	7.908.309,50
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.521.819,64	4.692.140,04	4.888.232,90
	2. Pertambangan dan Penggalian	554.412,55	614.611,50	676.062,20
	3. Industri Pengolahan	684.233,95	740.475,76	774.052,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.350,51	17.178,66	19.350,10
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	21.951,57	22.691,01	24.557,10
	6. Konstruksi	1.180.143,24	1.270.811,10	1.318.015,90
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	906.871,86	1.005.922,35	1.077.719,70
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.591.359,50	2.789.763,23	3.070.993,40
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.222.597,98	1.427.387,30	1.739.410,30
	10. Informasi dan Komunikasi	622.129,03	634.616,08	653.175,20
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	749.128,47	901.446,44	1.062.929,80
	12. Real Estate	687.830,33	721.175,79	754.932,90
	13. Jasa Perusahaan	128.621,81	142.518,15	152.030,40
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.501,78	1.365.652,50	1.365.395,50
	15. Jasa Pendidikan	456.813,96	464.023,50	467.122,00
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	403.183,08	420.578,37	442.879,10
	17. Jasa Lainnya	383.675,62	438.499,58	487.816,80
	PDRB ADH Berlaku	16.506.624,87	17.669.491,36	18.974.675,40
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.520.875,91	7.713.940,52	8.016.353,88
	2. Pertambangan dan Penggalian	301.179,51	316.017,83	327.936,72
	3. Industri Pengolahan	2.030.754,00	2.202.415,92	2.364.120,60
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	55.482,06	60.525,06	67.514,94
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	38.754,73	39.269,31	42.908,86
	6. Konstruksi	3.199.938,74	3.450.497,17	3.541.541,69
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	3.963.925,12	4.332.078,71	4.721.116,99
	8. Transportasi dan Pergudangan	353.101,78	389.627,59	454.042,28
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.398.861,06	5.209.229,73	6.193.370,94
	10. Informasi dan Komunikasi	2.119.345,35	2.141.119,70	2.198.163,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.820,58	1.657.123,69	1.931.174,90
	12. Real Estate	1.614.750,34	1.697.749,64	1.763.266,42
	13. Jasa Perusahaan	227.301,45	255.125,00	281.872,31
	14. Administrasi Pemerintahan,	1.958.299,81	1.998.931,25	2.001.994,79



No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib			
	15. Jasa Pendidikan	2.713.608,64	2.741.409,33	2.726.839,41
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	857.362,87	888.702,34	927.592,07
	17. Jasa Lainnya	622.926,34	711.521,40	791.295,42
	PDRB ADH Berlaku	33.363.288,29	35.805.284,19	38.351.106,10
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.666.116,48	3.787.130,03	3.949.625,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.310.754,44	3.653.694,27	3.875.731,94
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	246.822,80	294.961,88	347.657,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	134.003,59	133.996,87	136.499,25
	6. Konstruksi	6.012.565,41	6.520.700,87	6.689.585,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.897.543,85	5.468.721,49	6.041.481,81
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.242.527,75	1.453.809,78	1.773.632,76
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.426.092,65	11.432.033,63	14.328.513,00
	10. Informasi dan Komunikasi	2.740.925,13	2.765.656,56	2.844.638,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.115.594,91	3.654.675,52	4.210.391,02
	12. Real Estate	2.239.723,84	2.372.487,01	2.457.089,19
	13. Jasa Perusahaan	966.740,93	1.106.931,48	1.225.422,18
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.956.508,25	2.978.879,20	2.997.349,63
	15. Jasa Pendidikan	6.460.636,23	6.562.279,44	6.587.509,19
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.490.848,25	1.552.815,68	1.636.171,17
	17. Jasa Lainnya	779.222,35	895.053,48	999.003,56
	PDRB ADH Berlaku	49.686.626,87	54.633.827,19	60.100.301,66
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.766.739,70	35.994.540,86	37.677.683,01
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.147.972,67	2.312.139,37	2.436.619,10
	3. Industri Pengolahan	14.724.275,85	16.143.831,20	17.106.709,37
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	468.453,78	553.539,86	640.751,91
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	414.723,58	421.646,34	447.224,31
	6. Konstruksi	24.175.488,91	26.133.998,09	26.815.328,53
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	20.322.902,26	22.559.827,16	24.603.029,20
	8. Transportasi dan Pergudangan	12.438.126,50	18.894.553,60	27.658.696,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.601.871,41	44.112.103,06	54.683.173,97
	10. Informasi dan Komunikasi	14.836.631,89	15.028.830,69	15.517.170,16
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.686.120,02	11.486.409,28	13.277.201,87
	12. Real Estate	10.091.662,07	10.683.388,28	11.055.527,30

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	13. Jasa Perusahaan	2.533.790,91	2.866.674,70	3.164.354,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.689.630,59	13.647.640,99	13.888.797,80
	15. Jasa Pendidikan	13.453.377,21	13.614.504,84	13.669.131,84
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.238.286,77	6.485.858,10	6.805.150,01
	17. Jasa Lainnya	3.876.375,67	4.423.392,89	4.909.174,98
	PDRB ADH Berlaku	220.466.429,79	245.362.879,31	274.355.724,40

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 Kebijakan Keuangan

Kuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

 - 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
 - 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

 - 1) Retribusi jasa umum;
 - 2) Retribusi jasa usaha; dan
 - 3) Retribusi perizinan tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

- 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 2) Insentif Fiskal.
- b. Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT Jasa Raharja;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;

- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*; dan
 - 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana transfer tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Perubahan belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber

daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan

pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 7 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2: Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 5: Pariwisata

Prioritas 6: Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.4 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Tahun 2023

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

2.4.1 Bidang Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4). Total alokasi anggaran bidang pendidikan tahun 2023 di Provinsi Bali sebesar Rp1.848.481.858.694,00 dengan realisasi sebesar Rp1.596.432.760.406,52 atau 86,36%. Rasio alokasi anggaran untuk bidang pendidikan terhadap belanja daerah telah terealisasi sebesar 20,12%, rasio tersebut lebih besar 0,12% dari minimum alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4). Alokasi anggaran dan realisasi untuk bidang pendidikan TA 2023, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Belanja Wajib Bidang Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan		Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan :	1.794.909.512.933,00	1.526.952.383.128,52	85,07	
	1)	Belanja Operasi:	1.418.068.154.778,00	1.300.224.843.180,43	91,69	
		a.	belanja pegawai;	1.034.212.288.768,00	891.425.479.093,00	86,19
		b.	belanja barang dan jasa;	289.767.876.010,00	316.423.030.991,43	109,20
		c.	belanja hibah;	94.087.990.000,00	92.376.333.096,00	98,18
		d.	belanja bantuan sosial.	-	-	-
		2)	Belanja Modal:	376.841.358.155,00	226.727.539.948,09	60,17
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan:	22.477.633.200,00	22.112.554.200,00	98,38	
		1)	Belanja Operasi:	22.477.633.200,00	22.112.554.200,00	98,38
		a.	belanja pegawai;	-	-	-
		b.	belanja barang dan jasa;	22.477.633.200,00	22.112.554.200,00	98,38
		c.	belanja hibah;	-	-	-
		d.	belanja bantuan sosial.	-	-	-
		2)	Belanja Modal:	-	-	-
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan:	587.451.764,00	448.397.304,00	76,33	
		1)	Belanja Operasi:	512.451.764,00	448.397.304,00	87,50
		a.	belanja pegawai;	-	-	-
		b.	belanja barang dan jasa;	512.451.764,00	448.397.304,00	87,50
		c.	belanja hibah;	-	-	-
		d.	belanja bantuan sosial.	-	-	-
		2)	Belanja Modal:	75.000.000,00	-	-
	d.	Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	25.294.876.403,00	22.124.635.948,00	87,47	
		1)	Belanja Operasi:	25.072.543.803,00	21.906.983.948,00	87,37
	a.	belanja pegawai;	-	-	-	
	b.	belanja barang dan jasa;	14.297.543.803,00	11.131.985.997,00	77,86	
	c.	belanja hibah;	10.775.000.000,00	10.774.997.951,00	100,00	
	d.	belanja bantuan sosial.	-	-	-	
	2)	Belanja Modal:	222.332.600,00	217.652.000,00	97,89	

No.	Komponen Perhitungan		Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		5.212.384.394,00	24.794.789.826,00	475,69
	1)	Belanja Transfer:	-	-	-
	2)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.075.628.100,00	1.057.294.496,00	98,30
	3)	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.962.718.006,00	23.586.060.872,00	595,20
	4)	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan pada Dinas Pariwisata	174.038.288,00	151.434.458,00	87,01
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		1.848.481.858.694,00	1.596.432.760.406,52	86,36
3.	Total Belanja Daerah		7.932.886.363.138,00	7.932.886.363.139,00	
	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		23,30%	20,12%	

Salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang pendidikan ditunjukkan melalui peningkatan dimensi pengetahuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat tanggal 1 Desember 2023, Peningkatan IPM Bali tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak mengalami peningkatan terbesar. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,88 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2022. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (LF SP2020).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2023 sebesar 13,58 tahun meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,45 tahun, meningkat 0,06 tahun dibandingkan dengan tahun 2022. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 440 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Sumber data pengeluaran riil per kapita menggunakan hasil Susenas Maret.

Pada tahun 2023, seluruh kabupaten/kota di Bali telah berada pada capaian status pembangunan “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) atau “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

2.4.2 Bidang Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 ayat (2). Total alokasi anggaran bidang kesehatan tahun 2023 di Provinsi Bali sebesar Rp800.625.871.280,00 dengan realisasi sebesar Rp661.249.121.268,20 atau 82,59%. Rasio alokasi anggaran untuk bidang kesehatan terhadap belanja daerah diluar gaji ASN telah terealisasi sebesar 11,37%, rasio tersebut lebih besar 1,37% dari minimum alokasi anggaran untuk bidang kesehatan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 171 ayat (2). Alokasi anggaran dan realisasi untuk bidang kesehatan TA 2023, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Belanja Wajib Bidang Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:	661.018.482.643,00	581.843.549.847,20	88,02
	1) Belanja Operasi:	580.062.665.036,00	511.942.574.643,30	88,26
	a. belanja pegawai;	301.208.087.973,00	276.894.887.327,00	91,93
	b. belanja barang dan jasa;	278.854.577.063,00	235.047.687.316,30	84,29
	c. belanja hibah;	-	-	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	0,00
	2) Belanja Modal;	80.955.817.607,00	69.900.975.203,90	86,34
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	139.607.388.637,00	79.405.571.421,00	56,88
	1) Belanja Transfer:	80.977.038.508,00	25.990.966.400,00	32,10
	Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka Sharing Pembiayaan JKN	80.977.038.508,00	25.990.966.400,00	32,10
	2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Seluruh OPD diluar dinas Kesehatan	57.799.213.773,00	52.742.625.437,00	91,25
	3) Belanja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas PMD	537.575.276,00	398.396.584,00	74,11

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Dukcapil 4) Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan	293.561.080,00	273.583.000,00	93,19
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	800.625.871.280,00	661.249.121.268,20	82,59
3.	Total Belanja Daerah	7.932.886.363.138,00	5.964.647.579.324,31	75,19
4.	Gaji ASN	893.010.318.528,00	773.692.772.445,00	86,64
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	7.039.876.044.610,00	5.190.954.806.879,31	73,74
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	11,37%	12,74%	

Salah satu program bidang kesehatan yang menjadi indikator keberhasilan peningkatan kesejahteraan bidang kesehatan yaitu program penurunan angka stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Bali berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 10,9% (SSGI Tahun 2021) menjadi 8% dan tetap mempertahankan posisi dengan kasus stunting terendah se-Indonesia. Kedepannya untuk keberhasilan percepatan penurunan stunting, Provinsi Bali diharapkan dapat membentuk komitmen bersama dengan perangkat daerah terkait untuk mencapai target 7,71% pada tahun 2023.

2.4.3 Bidang Infrastruktur

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib, Belanja Wajib yang Bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) ditetapkan paling sedikit 25% dari DTU.

Transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum dalam APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa target persentase belanja infrastruktur adalah sebesar Rp2.072.741.907.897,00 atau 35,13% dari anggaran DTU. Sedangkan besaran realisasi adalah sebesar Rp1.221.189.647.602,99 atau 28,83% dari realisasi DTU pada Tahun 2023. Rincian perhitungan persentase Belanja Infrastruktur terhadap Dana Transfer Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Belanja Wajib Bidang Infrastruktur terhadap DTU

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Total Belanja Daerah	7.932.886.363.138,00	5.964.647.579.324,31	75,19
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a) Belanja Bagi Hasil	1.510.092.952.736,00	1.444.364.532.966,00	95,65
	b) Bantuan Keuangan	522.374.803.508,00	285.161.996.258,00	54,59
	Jumlah (a + b)	2.032.467.756.244,00	1.729.526.529.224,00	
3	Selisih (1 -2)	5.900.418.606.894,00	4.235.121.050.100,31	
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	2.360.167.442.757,60	1.694.048.420.040,12	
1	a) Belanja Modal	1.409.820.872.741,00	920.164.759.244,99	65,27
	1) Tanah	177.579.673.369,00	154.513.167.813,00	87,01
	2) Peralatan dan Mesin	207.939.759.226,00	140.375.288.069,62	67,51
	3) Bangunan dan Gedung	693.957.200.084,00	361.028.180.271,00	52,02
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	273.674.962.322,00	232.452.964.088,00	84,94
	5) Aset tetap lainnya	55.769.277.740,00	30.899.659.003,37	55,41
	6) Aset lainnya	900.000.000,00	895.500.000,00	99,50
	b) Belanja pemeliharaan	36.526.229.751,00	24.379.228.608,00	66,74
2	a) Belanja Hibah	288.894.805.405,00	276.645.659.750,00	95,76
	b) Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	337.500.000.000,00	-	0,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	2.072.741.907.897,00	1.221.189.647.602,99	58,92
	Persentase Belanja Infrastruktur	35,13%	28,83%	

2.4.4 Bidang Pengawasan dan APIP

Dalam hal penguatan Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah serta untuk mendukung peningkatan integritas, Permendagri 27 Tahun 2021 mengatur anggaran dalam bidang pengawasan dan APIP adalah senilai 0,60% untuk anggaran belanja daerah diantara Rp4.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00. APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 menganggarkan sebesar Rp43.271.815.993,00 atau sebesar 0,55% dari total anggaran Belanja Daerah dan berdasarkan data realisasi didapatkan angka sebesar Rp34.098.259.053,00 atau sebesar 0,43% dari keseluruhan realisasi belanja daerah. Persentase anggaran dan realisasi telah memenuhi batas minimal yang disyaratkan Permendagri. Rincian anggaran dan realisasi terkait Bidang Pengawasan dan APIP bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Belanja Wajib Bidang Pengawasan dan APIP

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
-----	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.023.554.156,00	3.228.858.039,00	53,60
	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.923.517.586,00	2.118.139.311,00	53,99
	2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.100.036.570,00	1.110.718.728,00	52,89
	b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	4.206.511.802,00	2.993.233.056,00	71,16
	1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.257.780.864,00	1.858.224.750,00	82,30
	2) Pendampingan Dan Asistensi	1.948.730.938,00	1.135.008.306,00	58,24
	c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.041.750.035,00	27.876.167.958,00	84,37
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.757.200,00	75.927.676,00	90,65
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.296.862.514,00	19.695.014.242,00	97,03
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.224.629.040,00	861.915.232,00	70,38
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.697.093.301,00	1.882.530.000,00	50,92
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.058.935.676,00	2.967.850.814,00	97,02
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.680.472.304,00	2.392.929.994,00	51,13
2.	Alokasi Anggaran Pengawasan (a+b+c)	43.271.815.993,00	34.098.259.053,00	78,80
3.	Total Belanja Daerah	7.932.886.363.138,00	7.932.886.363.138,00	
4.	Rasio Alokasi Anggaran Pengawasan Terhadap Belanja Daerah (2:3) x 100%	0,55%	0,43%	

2.4.5 Bidang Kapasitas Aparatur

Permendagri mensyaratkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah. Berdasarkan data Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun

Anggaran 2023 telah dianggarkan belanja untuk Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar Rp46.227.650.602,00 atau 0,58% dari total anggaran. Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp34.798.511.148,90 atau sebesar 75,28% dari total realisasi belanja. Berikut adalah tabel penjelasannya.

Tabel 2.14 Belanja Wajib Kapasitas Aparatur

No.	Komponen Perhitungan		Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.716.688.036,00	19.179.048.339,00	84,43
		1 Pengembangan Kompetensi ASN	277.379.584,00	212.317.044,00	76,54
		2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	536.780.384,00	344.680.337,00	64,21
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	615.511.350,00	478.957.517,00	77,81
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.667.500,00	267.327.000,00	95,59
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.535.193.472,00	1.281.427.762,00	83,47
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.523.161.852,00	1.252.179.044,00	82,21
		7 Peningkatan Pelayanan BLUD	10.002.824.000,00	8.881.827.766,00	88,79
		8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	157.176.104,00	83.611.616,00	53,20
		9 Pengelolaan Promosi ASN	956.000.000,00	56.000.000,00	5,86
		10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.832.993.790,00	6.320.720.253,00	92,50
	b.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD	14.136.069.554,00	8.215.880.147,00	58,12
		Peningkatan Kapasitas DPRD	14.136.069.554,00	8.215.880.147,00	58,12
	c.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja	67.502.000,00	1.909.000,00	2,83
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	67.502.000,00	1.909.000,00	2,83
	b.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Inspektorat	1.772.536.576,00	1.287.249.634,00	72,62
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.772.536.576,00	1.287.249.634,00	72,62
	e.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.424.679.100,00	319.584.222,00	22,43
		1 Peningkatan Kapasitas	16.547.900,00	8.829.900,00	53,36

No.	Komponen Perhitungan		Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	292.540.000,00	46.688.810,00	15,96
	3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	42.994.700,00	13.768.800,00	32,02
	4	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600,00	237.877.212,00	73,43
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	748.663.900,00	12.419.500,00	1,66
	f	Kegiatan/Sub Kegiatan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	6.110.175.336,00	5.794.839.806,90	94,84
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.298.948,00	304.162.550,00	93,22
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.845.088,00	1.036.609.298,00	98,55
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.681.300,00	352.928.722,00	64,91
	4	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.176.000.000,00	4.088.789.236,90	97,91
	5	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	12.350.000,00	12.350.000,00	100,00
2	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN		46.227.650.602,00	34.798.511.148,90	75,28
3	Total Belanja Daerah		7.932.886.363.138,00	7.932.886.363.138,00	
Rasio anggaran pendidikan dan Pelatihan (2:3) x 100%			0,58%	0,44%	

2.4.6 Stunting

Permendagri mensyaratkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penurunan *stunting*. Berdasarkan data Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan belanja untuk penanganan *stunting* sebesar Rp626.844.276,00 Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp472.747.134,00 atau sebesar 75,42%. Berikut adalah tabel penjelasannya.

Tabel 2.15 Belanja Penurunan *Stunting*

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
-----	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.999.000,00	6.872.650,00	34,36
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	19.999.000,00	6.872.650,00	34,36
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	19.999.000,00	6.872.650,00	34,36
2	Dinas Kesehatan	69.270.000,00	67.477.900,00	97,41
	Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	69.270.000,00	67.477.900,00	97,41
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	69.270.000,00	67.477.900,00	97,41
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.490.000,00	36.034.500,00	98,75
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32.780.000,00	31.443.400,00	95,92
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	537.575.276,00	398.396.584,00	74,11
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	537.575.276,00	398.396.584,00	74,11
	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	537.575.276,00	398.396.584,00	74,11
	Sub. Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	537.575.276,00	398.396.584,00	74,11
	TOTAL ANGGARAN PENANGANAN STUNTING	626.844.276,00	472.747.134,00	75,42

2.4.7 Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan data Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan belanja untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp5.278.465.468,00. Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp4.489.855.524,00 atau sebesar 85,06%. Berikut tabel penjelasannya.

Tabel 2.16 Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	PROGRAM REHABILITASI	4.538.992.968,00	4.098.523.026,00	90,30

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	SOSIAL			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	56.284.300,00	29.136.800,00	51,77
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.242.468.568,00	995.251.520,00	80,10
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	835.952.800,00	759.008.517,00	90,80
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.397.037.800,00	2.307.915.489,00	96,28
5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.249.500,00	7.210.700,00	99,46
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	739.472.500,00	391.332.498,00	52,92
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	739.472.500,00	391.332.498,00	52,92
TOTAL		5.278.465.468,00	4.489.855.524,00	85,06

2.4.8 Pengendalian Inflasi

Berdasarkan data Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan belanja untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp5.278.465.468,00 Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp4.489.855.524,00 atau sebesar 85,06%. Berikut tabel penjelasannya.

Tabel 2.17 Pengendalian Inflasi

No.	SKPD/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
I.	Kelancaran Distribusi	74.832.028.315,00	72.399.518.993,00	60.637.803.317,00	83,75
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	74.832.028.315,00	72.399.518.993,00	60.637.803.317,00	83,75
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	74.832.028.315,00	72.399.518.993,00	60.637.803.317,00	83,75
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	74.832.028.315,00	72.399.518.993,00	60.637.803.317,00	83,75
	- Pemeliharaan Berkala Jalan	68.972.053.391,00	65.194.832.069,00	53.813.271.417,00	82,54
	- Pemeliharaan Rutin Jalan	2.299.766.741,00	2.299.766.741,00	2.233.218.000,00	97,11
	- Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.560.208.183,00	4.904.920.183,00	4.591.313.900,00	93,61

No.	SKPD/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
II.	Keterjangkuan Harga	32.680.000,00	32.680.000,00	27.360.000,00	83,72
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.680.000,00	32.680.000,00	27.360.000,00	83,72
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	32.680.000,00	32.680.000,00	27.360.000,00	83,72
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	32.680.000,00	32.680.000,00	27.360.000,00	83,72
	- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	32.680.000,00	32.680.000,00	27.360.000,00	83,72
III.	Ketersediaan Pasokan	23.172.044.340,00	26.158.758.932,00	24.930.413.348,00	95,30
	Dinas Kelautan dan Perikanan	723.766.600,00	1.423.767.892,00	1.388.416.442,00	97,52
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	525.000.000,00	1.225.001.292,00	1.197.817.442,00	97,78
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	525.000.000,00	1.225.001.292,00	1.197.817.442,00	97,78
	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	525.000.000,00	1.225.001.292,00	1.197.817.442,00	97,78
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	198.766.600,00	198.766.600,00	190.599.000,00	95,89
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	198.766.600,00	198.766.600,00	190.599.000,00	95,89
	- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	198.766.600,00	198.766.600,00	190.599.000,00	95,89
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.448.277.740,00	24.734.991.040,00	23.541.996.906,00	95,18
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	100,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	100,00

No.	SKPD/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Pasokan dan Harga Pangan				
	- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	100,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	19.960.278.300,00	22.209.758.800,00	21.502.646.200,00	96,82
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	10.175.000.000,00	10.235.000.000,00	10.168.140.000,00	99,35
	- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	10.175.000.000,00	10.235.000.000,00	10.168.140.000,00	99,35
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	4.185.383.900,00	4.191.664.400,00	3.796.530.700,00	90,57
	- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	1.674.498.700,00	1.674.498.700,00	1.329.365.000,00	79,39
	- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1.549.165.200,00	1.626.895.700,00	1.626.895.700,00	100,00
	- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	397.820.000,00	326.370.000,00	326.370.000,00	100,00
	- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	563.900.000,00	563.900.000,00	513.900.000,00	91,13
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	224.089.900,00	224.089.900,00	219.939.000,00	98,15
	- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro organisme	224.089.900,00	224.089.900,00	219.939.000,00	98,15
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.375.804.500,00	7.559.004.500,00	7.318.036.500,00	96,81
	- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.424.300.000,00	6.607.500.000,00	6.457.500.000,00	97,73
	- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	951.504.500,00	951.504.500,00	860.536.500,00	90,44

No.	SKPD/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Kewenangan Provinsi				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00
	Penataan Prasarana Pertanian	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00
	- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.278.499.440,00	2.315.732.240,00	1.829.850.706,00	79,02
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2.278.499.440,00	2.315.732.240,00	1.829.850.706,00	79,02
	- Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.256.099.440,00	2.292.172.140,00	1.826.798.606,00	79,70
	- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	22.400.000,00	23.560.100,00	3.052.100,00	12,95
IV.	Komunikasi efektif	5.520.680.000,00	5.871.430.000,00	5.265.135.000,00	89,67
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	69.180.000,00	65.580.000,00	23.795.000,00	36,28
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	69.180.000,00	65.580.000,00	23.795.000,00	36,28
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	69.180.000,00	65.580.000,00	23.795.000,00	36,28
	- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	69.180.000,00	65.580.000,00	23.795.000,00	36,28
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.451.500.000,00	5.805.850.000,00	5.241.340.000,00	90,28
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.451.500.000,00	5.805.850.000,00	5.241.340.000,00	90,28
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5.451.500.000,00	5.805.850.000,00	5.241.340.000,00	90,28
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.451.500.000,00	5.805.850.000,00	5.241.340.000,00	90,28
V.	Penanganan Dampak Inflasi	35.888.233.000,00	9.962.128.000,00	6.412.840.354,00	64,37
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	18.750.000.000,00	2.842.136.600,00	2.647.942.552,00	93,17

No.	SKPD/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Olahraga				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	18.750.000.000,00	2.842.136.600,00	2.647.942.552	93,17
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8.339.250.000,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.339.250.000,00	-	0,00	0,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	9.898.500.000,00	2.842.136.600,00	2.647.942.552,00	93,17
	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	9.898.500.000,00	2.842.136.600,00	2.647.942.552,00	93,17
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	512.250.000,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	512.250.000,00	-	0,00	0,00
	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	775.168.000,00	772.768.000,00	571.880.000,00	74,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	775.168.000,00	772.768.000,00	571.880.000,00	74,00
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	775.168.000,00	772.768.000,00	571.880.000,00	74,00
	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	775.168.000,00	772.768.000,00	571.880.000,00	74,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.059.450.000,00	3.043.608.400,00	0,00	0,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.059.450.000,00	3.043.608.400,00	0,00	0,00
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di	3.059.450.000,00	3.043.608.400,00	0,00	0,00

No.	SKPD/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	- Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.059.450.000,00	3.043.608.400,00	0,00	0,00
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.303.615.000,00	3.303.615.000,00	3.193.017.802,00	96,65
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.303.615.000,00	3.303.615.000,00	3.193.017.802,00	96,65
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.303.615.000,00	3.303.615.000,00	3.193.017.802,00	96,65
	- Pelayanan Informasi Publik	3.303.615.000,00	3.303.615.000,00	3.193.017.802,00	96,65
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.000.000.000,00	-	0,00	0,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.000.000.000,00	-	0,00	0,00
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	10.000.000.000,00	-	0,00	0,00
	- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10.000.000.000,00	-	0,00	0,00
VI.	Pengendalian Inflasi dan Dampaknya	9.550.701.338,00	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.550.701.338,00	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.550.701.338,00	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.550.701.338,00	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03
	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.550.701.338,00	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03
	TOTAL ANGGARAN UNTUK	148.996.366.993,00	130.252.972.908,00	106.458.252.019,54	81,73

No.	SKPD/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
PENGENDALIAN INFLASI					

2.4.9 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Permendagri mensyaratkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan data Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebesar Rp432.811.410.294,00 atau 5,46% dari total anggaran. Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp312.775.330.048,00 atau sebesar 72,27% dari total realisasi belanja. Berikut adalah tabel penjelasannya.

Tabel 2.18 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

No.	SPM	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(5)
1	PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
		a Pembangunan USB (Unit . Sekolah Baru)	105.485.926.900,00	68.858.983.115,00	65,28
		b Penambahan Ruang . Kelas Baru	11.400.662.900,00	7.463.970.215,00	65,47
		c Rehabilitasi Sedang/Berat . Ruang Kelas Sekolah	11.838.410.841,00	5.182.725.000,00	43,78
		d Rehabilitasi Sedang/Berat . Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.919.960.930,00	365.255.000,00	19,02
		e Rehabilitasi Sedang/Berat . Ruang Laboratorium Fisika	614.200.000,00	614.200.000,00	100,00
		f Rehabilitasi Sedang/Berat . Ruang Laboratorium Kimia	614.200.000,00	614.200.000,00	100,00
		g Rehabilitasi Sedang/Berat . Ruang Laboratorium Bahasa	381.582.000,00	381.582.000,00	100,00
		h Rehabilitasi Sedang/Berat . Perpustakaan Sekolah	497.892.000,00	497.892.000,00	100,00
		i Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.333.023.000,00	1.528.580.000,00	45,86
		j Pengadaan Perlengkapan . Peserta Didik	2.121.899.750,00	1.782.996.600,00	84,03

No.	SPM	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		k Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.333.752.772,00	44.942.674.264,00	84,27
		l Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	129.726.800,00	79.850.000,00	61,55
		m Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.883.900,00	28.886.890,00	72,43
		n Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600,00	237.877.212,00	73,43
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
		a Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	54.752.103.700,00	37.257.688.289,00	68,05
		b Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.533.000.000,00	2.319.786.296,00	41,93
		c Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.090.716.000,00	2.587.164.636,00	83,71
		d Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.000.000,00	157.900.216,00	70,18
		e Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.842.136.600,00	2.647.942.552,00	93,17
		f Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12.612.745.000,00	12.239.726.901,00	97,04
		g Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	78.611.000,00	49.347.000,00	62,77
		h Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	47.036.478.472,00	37.570.275.308,00	79,87
		i Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	748.663.900,00	12.419.500,00	1,66
		j Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	532.053.600,00	400.264.820,00	75,23
		k Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	118.635.500,00	86.237.000,00	72,69
		l Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.083.100,00	35.667.678,00	96,18
		m Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600,00	237.877.212,00	73,43

No.	SPM	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus			
		a . Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.076.957.200,00	-	0,00
		b . Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.253.036.589,00	864.241.700,00	68,97
		c . Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.565.117.012,00	5.399.569.180,00	97,03
		d . Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.629.500,00	39.698.700,00	78,41
		e . Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600,00	14.029.850,00	79,90
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
		Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			
		a . Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.762.500,00	16.427.000,00	51,72
		b . Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	30.500.400,00	14.959.700,00	49,05
		Sub Total	336.991.776.666,00	234.530.895.834,00	69,60
		Total Belanja Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.820.204.389.336,00	1.820.204.389.336,00	
		Rasio Belanja SPM	18,51%	12,88%	
2	KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
		a . Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.951.458.880,00	1.021.713.877,00	34,62
		b . Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.012.557.500,00	6.364.565.620,00	70,62
		Sub Total	11.964.016.380,00	7.386.279.497,00	61,74

No.	SPM	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Total Belanja Pada Dinas Kesehatan		661.018.482.643,00	661.018.482.643,00	
	Rasio Belanja SPM		1,81%	1,12%	
3	PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
		a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.574.184.584,00	1.505.836.740,00	95,66
		b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	507.872.130,00	393.990.195,00	77,58
		c. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	9.434.382.600,00	7.088.993.617,00	75,14
		d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	965.365.200,00	549.303.675,00	56,90
		e. Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	31.814.936.672,00	30.878.634.003,00	97,06
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			
		a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	290.289.860,00	288.025.460,00	99,22
		b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	977.579.200,00	952.517.016,00	97,44
		c. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	163.309.790,00	134.450.710,00	82,33
		d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.504.884.800,00	3.055.176.800,00	26,56
	Sub Total		57.232.804.836,00	44.846.928.216,00	78,36
	Total Belanja Pada Dinas PUPR PERKIM		900.459.413.781,00	900.459.413.781,00	
	Rasio Belanja SPM		6,36%	4,98%	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKI	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau			

No.	SPM	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	MAN	Relokasi Program Provinsi				
		a .	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	10.244.700,00	6.690.779,00	65,31
		b .	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	305.680.338,00	264.841.057,00	86,64
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
		a .	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	406.763.766,00	404.778.807,00	99,51
		Sub Total		722.688.804,00	676.310.643,00	93,58
		Total Belanja pada Dinas PUPR PERKIM		900.459.413.781,00	900.459.413.781,00	
	Rasio Belanja SPM		0,08%	0,08%		
5	KETENTE RAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
		a .	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.001.331.216,00	3.974.907.666,00	99,34
		b .	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	198.675.300,00	178.468.622,00	89,83
		c .	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.565.896,00	37.565.896,00	100,00
		d .	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	37.565.896,00	37.565.896,00	100,00
		e .	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan	16.769.802.032,00	16.757.312.052,00	99,93

No.	SPM	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		. Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			
		a Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	67.502.000,00	1.909.000,00	2,83
		Sub Total	21.112.442.340,00	20.987.729.132,00	99,41
		Total Belanja Pada Satuan Polisi Pamong Praja	44.660.448.129,00	44.660.448.129,00	
		Rasio Belanja SPM	47,27%	46,99%	
6	SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			
		a Penyediaan Permakanan	28.469.700,00	22.683.800,00	79,68
		b Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	27.814.600,00	6.453.000,00	23,20
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			
		a Pengasuhan	40.000.000,00	39.368.400,00	98,42
		b Penyediaan Makanan	644.230.000,00	614.599.300,00	95,40
		c Penyediaan Sandang	89.750.000,00	34.950.000,00	38,94
		d Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	7.244.460,00	72,44
		e Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	256.950.000,00	196.870.460,00	76,62
		f Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.914.000,00	44.051.400,00	91,94
		g Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.140.668,00	35.942.000,00	35,89
		h Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.140.000,00	4.180.000,00	24,39
		i Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	36.343.900,00	18.045.500,00	49,65
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
		a Penyediaan Permakanan	465.000.000,00	464.418.875,00	99,88
		b Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	15.568.800,00	15.568.800,00	100,00
		c Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	125.998.800,00	116.608.542,00	92,55
		d Pemberian Pelayanan	85.651.000,00	47.801.500,00	55,81

No.	SPM	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		. Penelusuran Keluarga			
		e Pemulasaraan	143.734.200,00	114.610.800,00	79,74
		. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
		a Pemulangan ke Daerah Asal	2.397.037.800,00	2.307.915.489,00	96,28
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
		. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
		a Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.937.800,00	255.874.400,00	99,98
		Sub Total	4.787.681.268,00	4.347.186.726,00	90,80
		Total Belanja Pada Dinas Sosial	34.629.470.194,00	34.629.470.194,00	100,00
		Rasio Belanja SPM	13,83%	12,55%	
		TOTAL BELANJA SPM	432.811.410.294,00	312.775.330.048,00	72,27
		TOTAL BELANJA DAERAH	7.932.886.363.138,00	7.932.886.363.138,00	
		RASIO BELANJA SPM TERHADAP BELANJA DAERAH	5,46%	3,94%	

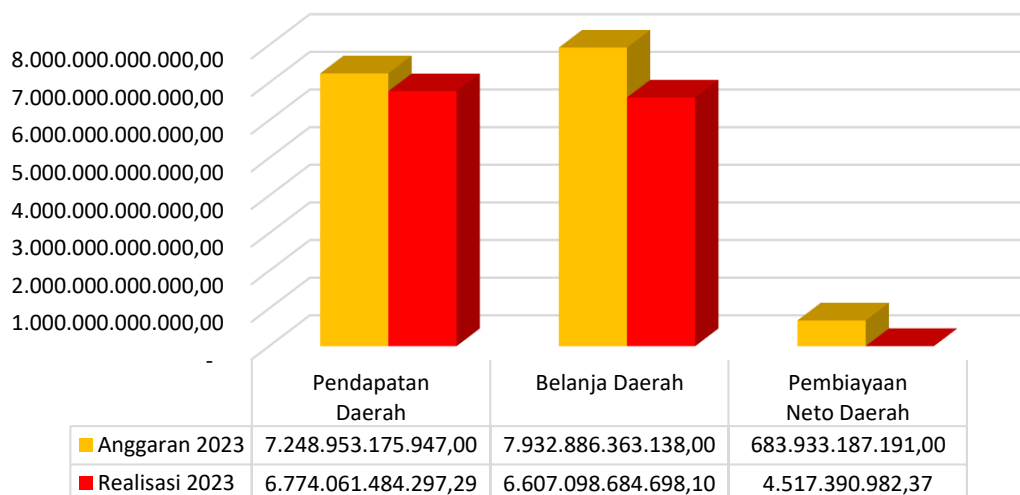
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2023.

Tabel 3.1 Realisasi APBD TA 2023

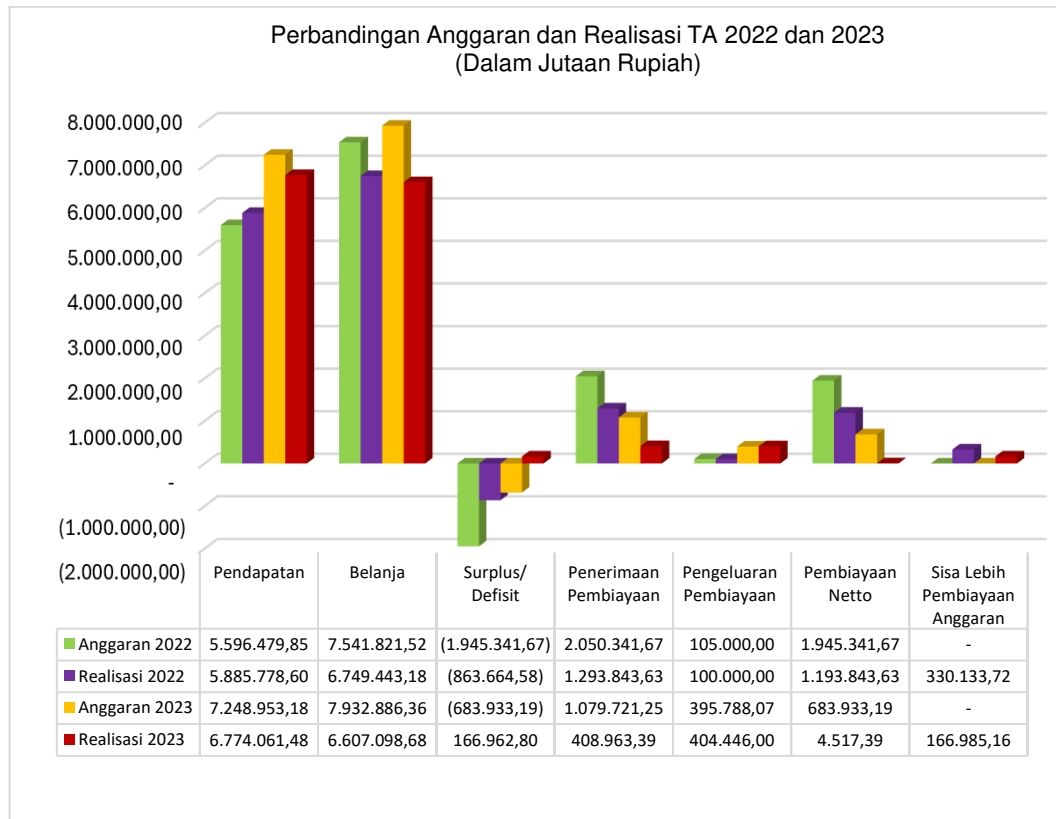
No	Uraian	2023			2022
		Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Daerah	7.248.953.175.947,00	6.774.061.484.297,29	93,45	5.885.778.601.466,34
2	Belanja Daerah	7.932.886.363.138,00	6.607.098.684.698,10	83,29	6.749.443.182.109,59
3	Surplus (Defisit)	(683.933.187.191,00)	166.962.799.599,19	(24,41)	(863.664.580.643,25)
4	Penerimaan Pembiayaan	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	1.293.843.632.369,52
5	Pengeluaran Pembiayaan	395.788.065.929,00	404.445.999.643,00	102,19	100.000.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	683.933.187.191,00	4.517.390.982,37	0,66	1.193.798.304.068,62
7	Koreksi SiLPA	0,00	0,00		(45.328.300,90)
	SiLPA/SiKPA	0,00	171.480.190.581,56	0,00	330.133.723.425,37



Gambar 3.1 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Pada bagian pendapatan terjadi peningkatan target anggaran dari TA 2022 sebesar Rp1.652.473.325.255,00 atau 29,53% dan realisasinya mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp888.282.882.830,95 atau 15,09%. Dari sisi anggaran Belanja dan Transfer terjadi peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp391.064.840.677,00 atau 5,19%. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp142.344.497.411,49 atau 2,15%.

Akibat dari peningkatan target pendapatan dan efisiensi belanja dari anggarannya, pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali mengalami Surplus Anggaran sebesar Rp166.962.799.599,19 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp683.933.187.191,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 defisit sebesar Rp863.664.580.643,25. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 adalah sebesar Rp4.517.390.982,37 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.193.798.304.068,62 mengalami penurunan sebesar Rp1.189.280.913.086,25 atau 99,62%. Tidak tercapainya anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp171.480.190.581,56. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.



Gambar 3.2 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 dan 2023

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2023 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan bidang dan fungsi yang terkait adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan TA 2023 Sesuai Bidang dan Fungsi

Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
1	2	3	4	5
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	302.624.158.500,00	299.900.716.785,49	99,10
1.01.	Pendidikan	1.464.000.000,00	1.807.861.000,00	123,49
1.01.2.19.0.00.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.464.000.000,00	1.807.861.000,00	123,49
1.02.	Kesehatan	266.329.867.500,00	256.324.223.024,78	96,24
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	266.329.867.500,00	256.324.223.024,78	96,24
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.820.691.000,00	41.759.032.760,71	119,93
1.03.1.04.2.10.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.820.691.000,00	41.759.032.760,71	119,93
1.06.	Sosial	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
1.06.2.08.0.00.06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	6.712.292.000,00	8.770.977.675,00	130,67
2.07.	Tenaga Kerja	4.503.600.000,00	5.884.917.575,00	130,67
2.07.3.29.3.32.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.503.600.000,00	5.884.917.575,00	130,67
2.15.	Perhubungan	219.600.000,00	183.962.100,00	83,77
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	219.600.000,00	183.962.100,00	83,77
2.18.	Penanaman Modal	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
2.22.	Kebudayaan	1.985.492.000,00	2.698.498.000,00	135,91
2.22.0.00.0.00.01	Dinas Kebudayaan	1.985.492.000,00	2.698.498.000,00	135,91
3.	Urusan Pilihan	46.523.220.500,00	4.560.564.970,00	9,80
3.25.	Kelautan dan Perikanan	44.458.600.000,00	2.575.116.000,00	5,79
3.25.0.00.0.00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.458.600.000,00	2.575.116.000,00	5,79
3.27.	Pertanian	815.150.500,00	1.136.252.570,00	139,39
3.27.2.09.0.00.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	815.150.500,00	1.136.252.570,00	139,39
3.28.	Kehutanan	1.223.470.000,00	827.796.400,00	67,66
3.28.2.11.0.00.01	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.223.470.000,00	827.796.400,00	67,66
3.31.	Perindustrian	26.000.000,00	21.400.000,00	82,31



Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.000.000,00	21.400.000,00	82,31
4.	Urusan Pendukung	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	19,57
4.01.2.23.2.24.01	Sekretariat Daerah	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	19,57
5.	Urusan Penunjang	6.084.973.485.625,00	6.302.709.205.544,48	103,58
5.02.	Keuangan	6.073.327.661.625,00	6.289.459.449.596,97	103,56
5.02.0.00.0.00.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.783.784.585.996,00	2.182.749.337.637,97	78,41
5.02.0.00.0.00.03	Badan Pendapatan Daerah	3.289.543.075.629,00	4.106.710.111.959,00	124,84
5.03.	Kepegawaian	11.595.824.000,00	13.172.105.947,51	113,59
5.03.5.04.0.00.02	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.595.824.000,00	13.172.105.947,51	113,59
5.07.	Penghubung	50.000.000,00	77.650.000,00	155,30
5.07.0.00.0.00.01	Badan Penghubung	50.000.000,00	77.650.000,00	155,30
	Jumlah	7.248.953.175.947,00	6.774.061.484.297,29	93,45

Secara garis besar realisasi pendapatan daerah tahun 2023 telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.774.061.484.297,29 atau 93,45%. Beberapa realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai realisasi 80% dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar 3,44% disebabkan oleh rendahnya capaian realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD yaitu sebesar 1,29%. Hal ini terjadi karena tidak terealisasinya hasil kerjasama pemanfaatan dengan PT NII sebesar Rp0,00;
2. Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 19,57% disebabkan tidak tercapainya target pada hasil dari pengelolaan PKB oleh Perseroda Bali Santhi karena belum adanya pengelolaan; dan
3. Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar 28,67% disebabkan oleh rendahnya capaian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum yaitu sebesar 9,46% dan 25,00%. Rendahnya capaian pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terjadi karena tingkat kerjasama pengusaha wisata bahari (*dive operator*) dalam penerapan Peraturan Daerah Retribusi Jasa Usaha masih sangat rendah.

Penjelasan lebih lanjut terkait realisasi yang kurang dari target dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian LRA poin 5.1.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja TA 2023 Sesuai Bidang dan Fungsi

Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
1	2	3	4	5
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	3.485.122.745.036,00	3.041.208.205.036,15	87,26
1.01.	Pendidikan	1.820.204.389.336,00	1.549.077.019.076,52	85,10
1.01.2.19.0.00.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.820.204.389.336,00	1.549.077.019.076,52	85,10

Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
1.02.	Kesehatan	661.018.482.643,00	581.843.168.147,20	88,02
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	661.018.482.643,00	581.843.168.147,20	88,02
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	900.459.413.781,00	812.228.960.485,43	90,20
1.03.1.04.2.10.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	900.459.413.781,00	812.228.960.485,43	90,20
1.05.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	68.810.989.082,00	66.305.688.008,00	96,36
1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	44.660.448.129,00	43.693.481.519,00	97,83
1.05.0.00.0.00.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.150.540.953,00	22.612.206.489,00	93,63
1.06.	Sosial	34.629.470.194,00	31.753.369.319,00	91,69
1.06.2.08.0.00.06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	34.629.470.194,00	31.753.369.319,00	91,69
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	1.245.959.262.246,00	813.115.998.665,41	65,26
2.07.	Tenaga Kerja	32.647.278.270,00	30.957.700.859,00	94,82
2.07.3.29.3.32.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	32.647.278.270,00	30.957.700.859,00	94,82
2.13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.141.185.895,00	31.374.928.453,00	94,67
2.13.2.12.2.14.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.141.185.895,00	31.374.928.453,00	94,67
2.15.	Perhubungan	48.309.852.629,00	36.227.533.690,00	74,99
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	48.309.852.629,00	36.227.533.690,00	74,99
2.16.	Komunikasi dan Informatika	470.201.344.430,00	221.272.148.793,41	47,06
2.16.2.20.2.21.02	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	470.201.344.430,00	221.272.148.793,41	47,06
2.17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.543.645.124,00	19.378.257.240,00	89,95
2.17.0.00.0.00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.543.645.124,00	19.378.257.240,00	89,95
2.18.	Penanaman Modal	18.450.969.438,00	17.035.892.530,00	92,33
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.450.969.438,00	17.035.892.530,00	92,33
2.22.	Kebudayaan	621.664.986.460,00	456.869.537.100,00	73,49
2.22.0.00.0.00.01	Dinas Kebudayaan	135.230.757.125,00	127.850.616.992,00	94,54
2.22.0.00.0.00.05	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	486.434.229.335,00	329.018.920.108,00	67,64
3.	Urusan Pilihan	226.138.054.696,00	202.664.141.491,00	89,62



Rekening	Urusan/Dinas Pelaksana	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	%
3.25.	Kelautan dan Perikanan	27.668.412.255,00	26.487.606.284,00	95,73
3.25.0.00.0.00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.668.412.255,00	26.487.606.284,00	95,73
3.26.	Pariwisata	14.188.468.756,00	13.639.016.077,00	96,13
3.26.0.00.0.00.01	Dinas Pariwisata	14.188.468.756,00	13.639.016.077,00	96,13
3.27.	Pertanian	94.796.935.211,00	91.293.204.130,00	96,30
3.27.2.09.0.00.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	94.796.935.211,00	91.293.204.130,00	96,30
3.28.	Kehutanan	60.878.038.470,00	45.698.498.366,00	75,07
3.28.2.11.0.00.01	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	60.878.038.470,00	45.698.498.366,00	75,07
3.31.	Perindustrian	28.606.200.004,00	25.545.816.634,00	89,30
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.606.200.004,00	25.545.816.634,00	89,30
4.	Urusan Pendukung	466.446.879.632,00	389.886.901.804,00	83,59
4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRD	213.080.890.557,00	160.650.025.881,00	75,39
4.01.2.23.2.24.01	Sekretariat Daerah	253.365.989.075,00	229.236.875.923,00	90,48
5.	Urusan Penunjang	2.352.372.159.779,00	2.013.823.462.793,54	85,61
5.01.	Perencanaan	24.650.120.464,00	20.164.186.635,00	81,80
5.01.0.00.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.650.120.464,00	20.164.186.635,00	81,80
5.02.	Keuangan	2.247.456.943.753,00	1.922.019.450.633,54	85,52
5.02.0.00.0.00.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.080.952.836.735,00	1.766.635.960.662,54	84,90
5.02.0.00.0.00.03	Badan Pendapatan Daerah	166.504.107.018,00	155.383.489.971,00	93,32
5.03.	Kepegawaian	49.836.657.323,00	43.785.390.859,00	87,86
5.03.5.04.0.00.02	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.836.657.323,00	43.785.390.859,00	87,86
5.05.	Penelitian dan Pengembangan	21.300.966.174,00	19.980.427.417,00	93,80
5.05.0.00.0.00.02	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.300.966.174,00	19.980.427.417,00	93,80
5.07.	Penghubung	9.127.472.065,00	7.874.007.249,00	86,27
5.07.0.00.0.00.01	Badan Penghubung	9.127.472.065,00	7.874.007.249,00	86,27
6.	Urusan Pengawasan	43.271.815.993,00	34.098.259.053,00	78,80
6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat	43.271.815.993,00	34.098.259.053,00	78,80
8.	Unsur Pemerintahan Umum	113.575.445.756,00	112.301.715.855,00	98,88
8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	113.575.445.756,00	112.301.715.855,00	98,88
	Jumlah	7.932.886.363.138,00	6.607.098.684.698,10	83,29



Realisasi Belanja pada seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar Rp6.607.098.684.698,10 atau 83,29% dari target yang ditetapkan pada TA 2023. Dari tabel di atas terdapat beberapa perangkat daerah yang realisasi belanjanya dibawah 80%. Capaian realisasi Belanja Daerah yang kurang dari target merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Surat Edaran Nomor 8004 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 diutamakan untuk kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas dengan memperhatikan ketersediaan dana di Kas Daerah.

Penjelasan lebih lanjut terkait realisasi yang kurang dari target dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian LRA poin 5.1.

3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Penyusunan informasi kinerja keuangan merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD (SA SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing perangkat daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan rekonsiliasi antara pembukuan Perangkat Daerah dengan PPKD setiap bulannya dan rekonsiliasi antara pembukuan PPKD dengan B IX/rekening koran Kas Umum Daerah.

3.4 Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Dalam pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023, terdapat beberapa kali perubahan dan penyesuaian belanja karena adanya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya TA 2023, Pedoman Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus TA 2023, serta adanya kebutuhan anggaran belanja yang bersifat mendesak maka secara garis besarnya Pergeseran dan Perubahan Anggaran terhadap APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023.

Adapun yang dilakukan dalam Pergeseran APBD antara lain :

- a. Pergeseran alokasi anggaran belanja antar subkegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- b. Pergeseran antar kode rekening belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- Provinsi Bali;
- c. Pergeseran dan penambahan alokasi anggaran paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
 - d. Tambahan alokasi anggaran pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang dilaksanakan melalui pergeseran Belanja Tidak Terduga; dan
 - e. Pergeseran antar kode rekening belanja pada beberapa perangkat daerah untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023.
- Adapun pergeseran yang dilakukan yaitu:
- a. Perubahan/penyesuaian nomenklatur pada beberapa Subunit SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - b. Penyesuaian belanja DAK Fisik Pendidikan SMK melalui pergeseran pagu anggaran antar subkegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali; dan
 - c. Pergeseran dan penambahan pagu anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas pada beberapa perangkat daerah.
3. Pergeseran Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023.
- Adapun pergeseran yang dilakukan antara lain:
- a. Pergeseran antar jenis belanja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dikarenakan adanya penyesuaian terhadap rincian belanja yang bersumber dari DAK Nonfisik;
 - b. Pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja pada Subkegiatan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan Upacara *Pamahayu Jagat* atau *Pamarisudha Bumi*; dan
 - c. Pergeseran anggaran pada beberapa perangkat daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja prioritas dan mendesak yang belum teralokasikan anggarannya.
4. Pergeseran Keempat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023.
- Adapun pergeseran yang dilakukan antara lain:
- a. Pergeseran antar Kelompok Belanja pada beberapa Subkegiatan pada UPTD Museum Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan DAK Nonfisik;
 - b. Menindaklanjuti Persetujuan Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap penyesuaian rencana penggunaan belanja DAK Nonfisik Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali melakukan pergeseran antar Subrincian Objek Belanja; dan

- c. Pergeseran antar Kelompok Belanja, Objek Belanja, dan perubahan uraian belanja pada beberapa perangkat daerah untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 entitas akuntansi yang meliputi 29 Perangkat Daerah dan 1 Perangkat Daerah yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 Entitas Pelaporan

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan perangkat daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan

- b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
- a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
- a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

4.1.3.1 UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD Pengelolaan Air Minum (UPTD-PAM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD Pengelolaan Air Minum, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Instalasi SPAM terdiri dari 4 unit SPAM dengan total kapasitas 1.100 l/dt, dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, sebagai berikut:

- a. SPAM Petanu dari Direktorat Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 November 2013.

- b. SPAM Telagawaja dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
 - c. SPAM Guyangan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
 - d. SPAM Penet dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Februari 2015, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
 - e. SPAM Burana dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Februari 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
 - f. Pada tanggal 21 Juli 2017, UPTD Pengelolaan Air Minum ditetapkan sebagai Unit Kerja PD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dengan Status Penuh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1479/04-d/HK/2017 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.
2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Minum
- a. Visi UPTD Pengelolaan Air Minum
“Terwujudnya Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan yang Profesional.”
 - b. Misi UPTD Pengelolaan Air Minum
 - 1) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Bali secara berkesinambungan melalui pelayanan prima;
 - 2) Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan air minum yang memadai;
 - 3) Memproduksi air minum sesuai dengan standar yang berlaku;
 - 4) Menyelenggarakan pengelolaan air minum dengan menerapkan teknologi yang tepat;
 - 5) Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 6) Memberikan pelayanan air minum dengan tarif yang terjangkau;
 - 7) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara profesional;
 - 8) Menjalankan aktivitas usaha dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baku.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
- UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan air minum di Provinsi

Bali, dengan praktek bisnis yang sehat, dan tetap menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menetapkan organisasi tata laksana dan akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif. Tugas UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam pengembangan SPAM meliputi: penyelenggaraan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan, antara lain:

- a. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Provinsi Bali;
- b. Optimalisasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan;
- c. Percepatan cakupan pelayanan air minum;
- d. Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum.

Hasil produksi air minum dari UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disalurkan melalui Jaringan Distribusi Utama sampai ke pelanggan atau dijual secara curah ke PDAM maupun lembaga penyelenggara air minum lainnya. UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali saat ini telah mengelola 5 (lima) SPAM terdiri dari:

- a. SPAM Petanu, mengambil air baku dari sungai Petanu terletak di Kabupaten Gianyar melayani PDAM Kota Denpasar, PDAM Kab. Badung dan PDAM Kab. Gianyar.
- b. SPAM Penet, mengambil air baku dari sungai Penet yang terletak di Kabupaten Badung, melayani PDAM Badung dan PDAM Denpasar.
- c. SPAM Telaga Waja, mengambil air baku dari mata air Surya yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk melayani wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Karangasem.
- d. SPAM Guyangan, mengambil air baku dari mata air Guyangan terletak di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk melayani masyarakat di Kecamatan Nusa Penida bagian atas.
- e. SPAM Burana, mengambil air baku dari Bendungan Titab yang terletak di Desa Ularan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk melayani masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan mengelola dua IPA yaitu IPA Atas dengan kapasitas 165 liter/detik dan IPA Bawah dengan kapasitas 185 liter/detik.

4.1.3.2 UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas lingkungan di Daerah Bali sangat penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya semakin meningkat, selain itu juga dimaksudkan agar Bali tetap baik di mata dunia Internasional, mengingat Bali merupakan pintu gerbang wisata Internasional. Perkembangan pariwisata di daerah Bali mengakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dimana dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan

kesehatan lingkungan, oleh karena itu Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan membangun sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat, diawali dengan pelaksanaan Master Plan dan Studi Kelayakan oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*) pada tahun 1992-1993, yang kemudian dikeluarkannya dana bantuan Loan IP-431 dari Pemerintah Jepang (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) secara efektif pada tanggal 15 Desember 1994, dengan batas waktu pinjaman sampai dengan tahun 2008. Pelaksanaan pekerjaan survey, investigasi dan penyusunan Program Perencanaan serta Desain telah dimulai sejak tahun 1994, dan kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jaringan perpipaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pompa *booster* baru dimulai pada tahun 2004, Pembangunan DSDP (*Denpasar Sewerage Development Project*) untuk tahap I telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan DSDP tahap II yang dimulai tahun 2010 – 2014 untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

a. Visi UPTD Pengelolaan Air Limbah

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpolo Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”.

b. Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

Misi yang diemban oleh UPTD PAL adalah Misi Gubernur Bali yaitu Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok: Terwujudnya Bali sebagai Daerah Pariwisata Budaya yang Bersih, Sehat Nyaman dan Lestari.

b. Fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem jaringan perpipaan dan pengelolaan air limbah.
- 2) Menyusun dan melaksanakan program survei, pendataan, menganalisis dan menyusun pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan sistem pengolahan air limbah.
- 3) Mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang telah memenuhi syarat baku mutu.



- 4) Melayani permohonan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya.
- 5) Mengawasi dan mengendalikan kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditetapkan.
- 6) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat rencana-rencana pemerintah daerah di bidang pembangunan sistem jaringan air limbah dan pengolahannya.
- 7) Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan air limbah dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

4.1.3.3 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas-tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas meningkatkan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali Serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan Dan Masyarakat (Bapelkesmas) yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017, UPTD Bapelkesmas mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. UPTD Bapelkesmas beralamat di Jalan Gemitir Nomor 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar timur.

2. Visi dan Misi UPTD Bapelkesmas

a. Visi UPTD Bapelkesmas

“UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai pusat Pelatihan Yang Berkualitas Dalam Bidang Kesehatan Menuju Krama Bali Sejahtera Melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

b. Misi UPTD Bapelkesmas

- 1) Meningkatkan sumber daya, keterampilan dan profesionalisme SDM Kesehatan Provinsi Bali;
- 2) Sebagai pusat informasi, Konsultasi dan memfasilitasi pendidikan pelatihan bidang kesehatan;

- 3) Mengembangkan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam proses pelatihan;
- 4) Mengembangkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok UPTD Bapelkesmas sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD Bapelkesmas mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- 2) Mengkoordinasikan program kerja subbagian dan seksi;
- 3) Mengkoordinasikan kepala subbagian, kepala seksi dan pejabat fungsional;
- 4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala subbagian, kepala seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan;
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 7) Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 8) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan tingkat daerah di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- 9) Menghadiri advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan
- 10) Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan, mengawasi evaluasi sistem informasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- 11) Membimbing pelaksanaan laboratorium lapangan dan pembangunan kemitraan
- 12) Mengoreksi pengendalian mutu pelatihan;
- 13) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan
- 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

b. Kepala Subbagian tata Usaha mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja subbagian;
- 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;



- 3) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - 4) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan subbagian untuk disampaikan kepada kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
 - 5) Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
 - 6) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada subbagian dan seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
 - 7) Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis dinas;
 - 8) Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
 - 9) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - 10) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - 11) Melaksanakan pengawasan keuangan;
 - 12) Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 13) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
 - 14) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
 - 15) Melaksanakan administrasi pegawai ASN;
 - 16) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - 17) Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - 18) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
 - 19) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.
- c. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - 4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;

- 5) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 6) Menyiapkan bahan kajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kurikulum pendidikan dan pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 7) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 8) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;
- d. Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana mempunyai tugas:
- 1) Menyusun Rencana dan Program Kerja Seksi;
 - 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - 4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 7) Menyiapkan bahan kerjasama dan informasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 8) Melakukan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 9) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.



4.1.3.4 UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

1. Gambaran umum

UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (UPTD PKSDM) merupakan unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. UPTD PKSDM saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 30 Desember 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 885/04-E/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD PKSDM, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

2. Visi dan Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Visi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”.

b. Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Peran UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan salah satu penggerak dalam tercapainya Misi ke-22 Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok: UPTD PKSDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. UPTD PKSDM.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi SDM;
- 2) Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM; dan
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM.

4.1.3.5 UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dimulai dengan didirikannya “Verpleeghuis voor krankzinnigen op Bangli” dalam bentuk rumah perawatan orang sakit jiwa di Bangli pada tahun 1933 yang diprakarsai oleh dr. K. Loedin Pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 1 Juli 1952 dikeluarkan izin operasional rumah sakit oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.135/Menkes/SK/IV/78 RS Jiwa kelas A dan Tahun 1992/1993 RSJP Bangli. Selanjutnya berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1732/Menkes-Kessos/XII/2000 dan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002, maka Rumah Sakit Jiwa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Bali. Walaupun prioritas pelayanan Rumah Sakit Jiwa adalah pasien dengan gangguan jiwa, tetapi juga dilengkapi pelayanan pendukung lain seperti Rehabilitasi Narkoba, Rehabilitasi Mental, Fisioterapi, Laboratorium, dll. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Sebagai langkah awal komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memberikan pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terbaik dan profesional, saat ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah terakreditasi Paripurna dan telah bersertifikat ISO 9001-2008. Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

2. Visi dan Misi UPTD Rumah Sakit Jiwa

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategi Kebijakan, Moto, serta Janji Layanan sebagai berikut:

a. Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

“Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Utama Berstandar Internasional dengan Filosofi Nangun Sat Kerti Loka Bali Menuju Atma Kertih lan Jnana Kertih”.

b. Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan menuju pelayanan yang paripurna dan prima;
- 2) Memanfaatkan aset, alat kesehatan, sarana prasarana bagi pelayanan dan penelitian dengan utilitas yang terukur;

- 3) Memanfaatkan validitas dan *update* informasi digital bagi tata kelola sumber daya manusia, alat kesehatan, dan sarana prasarana;
 - 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan penelitian kepada pelanggan internal dan eksternal berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
- a. Tugas Pokok
 - 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
 - 2) RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.
 - b. Fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
 - 3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
 - 9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
 - 10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset; dan
 - 11) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.6 UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dahulu bernama Rumah Sakit Indera berawal dari adanya Rumah Sakit Kusta/Rehabilitasi Medik Provinsi Bali sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Sakit Kusta sudah ada sejak tahun 1957, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali yang menderita kusta. Dalam perkembangan di Rumah Sakit Kusta tidak hanya penyakit kusta saja yang dilayani tetapi justru muncul kasus kasus

penyakit lainnya seperti Mata dan THT. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendirikan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali (UPT BKMM) khusus memberikan pelayanan kesehatan mata.

Dengan adanya perubahan kelembagaan maka kedua UPT ini yaitu UPT Rumah Sakit Kusta dan UPT BKMM diubah menjadi satu kelembagaan yang disebut Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali (BPRSI), berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. BPRSI Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Maruti No.10 Denpasar dan diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Beratha tanggal 28 Februari 2003. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus memberikan pelayanan kesehatan indera yang terdiri dari pelayanan kesehatan Indera Penglihatan (Mata), Indera Pendengaran (THT), dan Indera Peraba (Kulit dan Kelamin). Pasca terjadinya bom di Bali tahun 2002, maka pada tanggal 15 Februari 2003 Perdana Menteri Australia setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia mengumumkan paket bantuan, untuk membantu sistem kesehatan di Bali, sebagai kenangan abadi dalam mengenang mereka yang menjadi korban pemboman tanggal 12 Oktober 2002.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka pada tanggal 14 November 2003 telah ditandatangani MOU atau *Subsidiary Arrangement* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, yang juga merupakan kelanjutan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dan dibuat sesuai ayat IV mengenai Perjanjian Umum Kerjasama Pembangunan *General Agreement of Development Cooperation* (GADC) yang berlaku sejak tanggal 12 Juli 1999.

Salah satu bagian dari paket yang telah diumumkan melalui MOU tersebut adalah pengembangan pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Rumah Sakit Indera melalui proyek kerjasama yang disebut *Australia Bali Memorial Eye Centre* (ABMEC).

Dengan terbatasnya lokasi yang dimiliki Rumah Sakit Indera yang berlokasi di Jl. Maruti No. 10 Denpasar maka untuk pengembangan jenis pelayanan mata beserta infrastrukturnya atas bantuan Gubernur Bali, maka diberikan lahan tanah di Jalan Angsoka Denpasar dan sejak tahun 2005 mulai dibangun sarana/fisik Rumah Sakit Indera Provinsi Bali/ Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli 2007, dan operasionalnya secara resmi dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2007.

Dengan kondisi ini maka secara otomatis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan/ Mata tidak lagi dilayani di Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar namun dilaksanakan di Rumah Sakit Indera, Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC Jalan Angsoka Nomor 8 Denpasar.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka BPRSI resmi berubah menjadi Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Untuk memperkuat status kelembagaan Rumah Sakit Indera telah memiliki Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 456/Menkes/SK/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Indera Milik Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06./III/886/09 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar Provinsi Bali.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 nama RS Indera Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.03/I/1328/2015 tanggal 15 Mei 2015 maka RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyandang kelas sebagai Rumah Sakit Khusus Mata Kelas A.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2018 Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai organisasi bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Visi dan Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

a. Visi UPTD RS Mata Bali Mandara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit, Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah “Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata yang Unggul dan Terpilih dalam Pelayanan dan Pendidikan Tahun 2023”.

b. Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat yang bermutu, terakreditasi, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata; dan
- 3) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung pendidikan di bidang kesehatan mata.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

- 1) RS Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
- 2) RS Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan mata;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
- 3) penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan mata;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan medik;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;
- 9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan
- 10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.7 UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yang perencanaan pembangunannya sudah dimulai pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 bangunan fisiknya sudah berdiri berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor 02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran berasal dari APBD Provinsi Bali. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 115 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang setara dengan Rumah Sakit Kelas B dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Direktur UPTD

RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Perintah Gubernur Bali Nomor 238 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini didirikan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan empat pelayanan spesialis dasar yaitu: Pelayanan Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pelayanan Kesehatan Anak dan Pelayanan Penyakit Dalam, ditambah dengan Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan Penyakit THT, Pelayanan Penyakit Gigi Mulut, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Ruang Operasi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan Pelayanan Penunjang antara lain: Radiologi dan Laboratorium.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari 2018 Unit Pelaksana Teknis UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan proses menjadi BLUD dengan status penuh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1850/04-D/HK/2017, tanggal 9 November 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD RSUD Bali Mandara

Berdasarkan Bab IV Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

"Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025".

b. Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- 4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegrasi dan memiliki budaya kerja; dan
- 5) Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

- 1) RSBM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan RSBM sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- b. Fungsi
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - 3) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 8) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;
 - 9) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
 - 10) Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4.1.3.8 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

1. Gambaran Umum

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 12 Januari 2023 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 116/04-E/HK/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali TMT 2 Januari 2023.

2. Visi dan Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

a. Visi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

“Menjadi UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Profesional, Memberikan Pelayanan Prima melalui ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ dalam rangka mewujudkan Bali Era Baru”

- b. Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
 - 1) Menerapkan sistem manajemen mutu secara profesional.
 - 2) Memberi pelayanan prima yang profesional kepada masyarakat bidang laboratorium kesehatan.
 - 3) Memberikan pelayanan informasi kualitas kesehatan masyarakat.
 - 4) Meningkatkan kapasitas dan mutu sumber daya secara berkesinambungan.
 - 5) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan secara berkelanjutan.
 - 6) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
 - a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi :
 - 1) Menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan; dan
 - 2) Sebagai wahana penelitian dan pengembangan kapasitas dalam pelayanan laboratorium serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan; dan
 - c. sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan laboratorium maupun pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan.

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

4.1.4.1 Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan Daerah Bali yang didirikan pada Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali

Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 105 Seri D Nomor 35). Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perumda Kerta Bali Saguna berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. Wilayah kerja Perumda Kerta Bali Saguna berada di Provinsi Bali dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi Bali, serta dapat mendirikan cabang/perwakilan atau unit usaha di tempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dan Memperoleh laba atau keuntungan. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100%. Bidang usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi pengelolaan aset dan infrastruktur serta jasa, industri dan perdagangan, energi dan ketenagalistrikan.

Jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda Kerta Bali Saguna meliputi:

1. Kegiatan Jasa Pariwisata, Jasa Alih Daya (*Outsourcing*), dan Jasa Lainnya;
2. Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
3. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih;
4. Kegiatan Pengolahan Limbah;
5. Kegiatan Pembangunan perumahan/Permukiman (*Real Estate*); dan
6. Kegiatan Pengelolaan Transportasi.

Dalam melaksanakan usaha, Perumda Kerta Bali Saguna dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan dan membuat laporan tahunan Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Laporan Keuangan, laporan mengenai kegiatan Perumda Kerta Bali Saguna, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kerta Bali Saguna, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas. Laporan Keuangan yang harus dilaporkan Perumda Kerta Bali Saguna antara lain:

1. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
2. Laporan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.4.2 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank BPD Bali didirikan berdasarkan akta Nomor 131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. Kemudian dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490), Bank BPD Bali mengalami perubahan status badan hukum.

Status hukum Bank BPD Bali berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah dan hal tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Nomor No.6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No.Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Kemudian status badan hukum Bank BPD Bali kembali berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank BPD Bali tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali) (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Hal ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor C-12858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan Nomor 6004.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) tahun 2004 yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 49 tanggal 31 Agustus 2004. Dan sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh I Made Widiada, SH., Notaris di Denpasar, mengubah anggaran dasar perseroan menjadi Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Visi PT BPD Bali yaitu menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi PT BPD Bali yaitu:

1. Memberikan Solusi Produk, Layanan, dan/atau Jasa Keuangan yang Inovatif melalui Pengembangan Ekosistem Digital;
2. Memberdayakan Sektor UMKM dalam rangka Menggerakkan Pembangunan Daerah;

3. Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Perusahaan;
4. Meningkatkan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dalam Operasional Organisasi; dan
5. Meningkatkan Kepedulian Sosial bagi Komunitas dan Lingkungan.

4.1.4.3 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT Jamkrida Bali)

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Dasar Hukum pendirian perusahaan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Modal Perusahaan sesuai dengan Akta RUPS-LB PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 1 Tanggal 5 April 2021 yaitu sebesar Rp148.475.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Visi Perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Penjaminan yang Sehat, Kompetitif, Terpercaya dan Berkembang dalam Penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Menuju Terciptanya Struktur Perekonomian Daerah Bali yang Seimbang dan Mantap”. Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi:

1. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh;
2. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (*share holders*); dan
3. Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan terkait (*Stakeholder*).

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan antara lain melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya pemenuhan agunan (*belum bankable*). Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (penerima jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan jaminan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

4.1.4.4 PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali ini didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pusat Kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan; Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (*Central Business District/ CBD*); Pelabuhan Penyeberangan dan Marina; *Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)*; Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (*Transit Oriented Development/ TOD*); dan Wahana Wisata Alam diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel serta profesional. Dasar Hukum pendirian PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Namun sampai Laporan ini dibuat PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) masih dalam tahap pembangunan.

4.1.4.5 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut perusahaan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022. Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi telah memiliki pedoman melakukan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan menggunakan prinsip-prinsip antara lain: Transparansi, Akuntabilitas, *Responsibility*, *Independence* dan Keadilan.

Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi juga menggunakan konsep *Environmental, Social and Governance (ESG)* yang mengedepankan konsep suatu kegiatan usaha dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu Environmental (Lingkungan) Perumda KBS memanfaatkan kendaraan listrik sebagai alat bantu transportasi, *Social* (sosial) Perumda KBS mengembangkan produk di bidang pariwisata digital dengan filosofi yang diambil dari kearifan budaya dengan cara melakukan edukasi digitalisasi terpadu kepada masyarakat luas dengan menyelenggarakan event workshop, *Governance* (Tata Kelola) salah satu faktor yang turut diperhatikan dalam penerapan aktivitas perusahaan menggunakan Eats dan microsoft untuk mendukung dari adanya ESG. Kerthi Bali Santhi *Employe Activity Tracking System (KBS EATS)* Suatu Aplikasi berbasis online yang digunakan oleh Perumda KBS untuk mempermudah operasional karyawan dalam melakukan kegiatan kerja yang meliputi absensi online, pengajuan lembur, perhitungan payroll atau penggajian secara otomatis, dan pengawasan kinerja pegawai.

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022, Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara profesional, akuntabel, dan transparan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada Pendapatan-Laporan Operasional (LO) dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
- a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo Anggaran Lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus Kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.



6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui dengan ketentuan :

1. diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
2. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
3. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
4. dalam transaksi *online* atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan Pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.



2. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - a. Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - b. Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan-LO. Sedangkan Pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
3. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan Pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
5. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
6. Khusus Pendapatan-LO pada PD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya Pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
7. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
8. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai Piutang Transfer dan Pendapatan Transfer-LO.
9. Mutasi aset antar PD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi PD penerima.

Pengukuran



1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam LRA menyebutnya dengan belanja, sedangkan LO menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.
3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah atau kas di Bendahara Pengeluaran.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai Belanja Dibayar Dimuka.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
3. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
4. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdikmen Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
5. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Satdikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
6. Penyaluran Hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdikmen swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran



Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap selain tanah, dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme LS dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan UP setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

1. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya Penerimaan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah provinsi.
2. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

1. Beban Transfer
 - a. Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Beban Bantuan Keuangan
 - 1) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - 2) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - 3) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
2. Pendapatan Transfer-LO
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - b) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

- c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
- 2) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
 - 1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - 2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - 3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - 3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- 4. Pendapatan Transfer-LRA
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA
 - b) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LRA
 - 2) Dana Intensif Daerah (DID)-LRA
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA
 - 1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - 2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - 3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.

3. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah Beban Transfer.
4. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang Beban Transfer.

Pengukuran

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
2. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh UP yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam



Neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan Setara Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan Setara Kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

1. Saldo Rekening Kas Umum Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2. Setara Kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUD.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan
 - a. Piutang Pajak Daerah;
 - b. Piutang Retribusi Daerah;
 - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
2. Perikatan

- a. Pemberian Pinjaman;
 - b. Penjualan;
 - c. Kemitraan; dan
 - d. Pemberian fasilitas.
3. Transfer antar Pemerintahan
 - a. Piutang Dana Bagi Hasil;
 - b. Piutang Dana Alokasi Umum;
 - c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - d. Piutang Transfer Lainnya;
 - e. Piutang Bagi Hasil;
 - f. Piutang Transfer Antar Daerah; dan
 - g. Piutang Kelebihan Transfer.
 4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - a. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - b. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. jumlah piutang dapat diukur;
3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

1. Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi

hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2. Piutang Dana Alokasi Umum

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut peraturan presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, apabila pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

3. Piutang Dana Alokasi Khusus

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

4. Piutang Transfer Lainnya

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

5. Piutang Bagi Hasil

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.

6. Piutang Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya Transfer Antar Daerah. Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut surat keputusan kepala daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

7. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi) TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan);
- b. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut; dan
- c. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; dan
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian Piutang Tidak Tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.

Penilaian kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur Piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas Piutang didasarkan pada kondisi Piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas Piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung Penyisihan Piutang, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas macet 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai penyisihan Piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas Piutang.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat Aset Lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
2. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat Barang Tak Habis Pakai dalam bentuk komponen pipa.
3. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat Barang Bekas Dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan Persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam Aset Lain-Lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan keputusan gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu memutakhirkan nilai Persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama PD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di rumah sakit dan bahan material untuk pemeliharaan Aset Tetap di Dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai Persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan PD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali; dan
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya; dan
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - c. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - 1) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:
 - a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana kooperatif.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;



- dan/atau
- (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Dana bergulir dengan *executing agency*:
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- 3) Dana bergulir dengan *channeling agency*:

- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - c) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- d. Besaran Penyisihan dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan

4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran Kas atau Aset Lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya

dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, Jaringan, dan Irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;



2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
5. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
6. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/Aset Lainnya.

1. Komponen Biaya

- a. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- b. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya; dan
- c. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset Lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Kapitalisasi Aset Tetap

- a. Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi;

Tabel 4.1 Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- b. Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah peraturan gubernur ini diundangkan, maupun terhadap Aset Tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. Khusus Aset Tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan *output* berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

7. Pengeluaran setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

8. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat Aset Tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan Aset Tetap setelah *overhaul* dan renovasi adalah nilai buku pada saat Aset Tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai *overhaul* dan renovasi Aset Tetap, dibagi dengan masa manfaat Aset Tetap setelah *overhaul* dan renovasi, dimana masa manfaat Aset Tetap setelah *overhaul* dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat Aset Tetap sebelum *overhaul* dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat *overhaul* dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

b. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- 1) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.

- 3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- 4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- 5) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 6) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan keputusan gubernur.
- 7) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan Aset Tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke Aset Lain-Lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan keputusan gubernur.

9. Aset Bersejarah

Aset Bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam LO sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan Aset Bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

11. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal Aset Tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan

BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan (Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Aset Tetap Lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki

properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi Properti Investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi Properti Investasi.

- b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
- c. Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan Properti Investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa Aset Tetap.
- d. Berikut adalah contoh Properti Investasi:
 - 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan Properti Investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

- 1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) Properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai Properti Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki Properti Investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti Investasi tersebut tidak memenuhi definisi Properti Investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai Properti Investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersial. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai Properti Investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- j. Properti Investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian Properti Investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti Investasi diklasifikasikan dalam Aset Nonlancar.

2. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan **yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun** anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan Dana Cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

1. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
4. Sumber Dana Cadangan; dan
5. Tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Dana Cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan Dana Cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

1. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan Dana Cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke Dana Cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil Dana Cadangan diukur

sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan apabila Dana Cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan Aset Lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok Aset Lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

- a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

- b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud terdiri atas:

a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Lisensi dan Franchise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c. Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penemuan gagasan atau informasi tertentu.

d. Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

e. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

f. Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

g. Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu

tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

i. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tak Berwujud yang ada.

4. Aset Lain-Lain

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain.

5. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

a. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 - 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
- c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun

biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a. Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b. Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

5. Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (*Goodwill*) dan Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos Kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman

Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian

para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan Kewajiban Jangka Pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan Kewajiban Jangka Pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang Kewajiban Jangka Pendek bersangkutan. Penghapusan Kewajiban Jangka Panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO. Penghapusan Kewajiban Jangka Panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang Kewajiban Jangka Panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila Kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran Kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos Kewajiban.

Pengukuran Kewajiban atau Utang Jangka Pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran Kewajiban untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

Utang Transfer adalah Kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya



Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau Utang Jangka Panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. Koreksi kesalahan mendasar dari persen yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b. Perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap.
4. Ekuitas akhir.

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

1. Surplus-LO pada periode pelaporan;

2. Koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan Kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
3. Koreksi pengurangan saldo awal Akumulasi Penyisihan Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya; dan
4. Adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

1. Defisit-LO pada periode pelaporan;
2. Koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan Kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
3. Koreksi penambahan saldo awal Akumulasi Penyisihan Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya; dan
4. Adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, maupun Beban.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan PD/Unit Kerja PD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

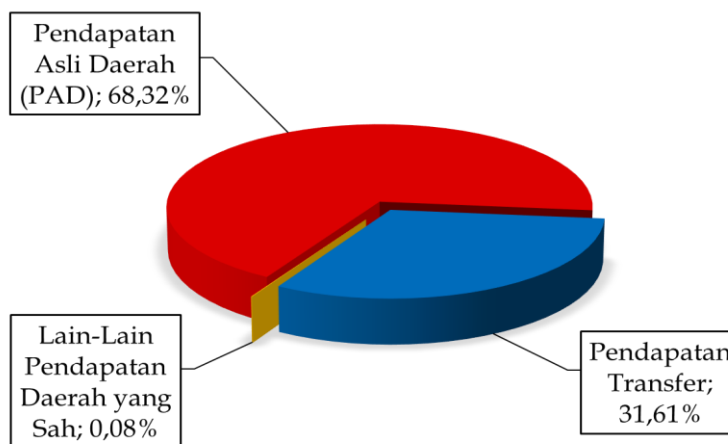
Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2023 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.041.446.320.153,00	4.627.741.217.667,29	91,79	3.863.191.406.848,23
Pendapatan Transfer	2.152.312.055.794,00	2.141.120.289.130,00	99,48	2.017.662.417.846,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.194.800.000,00	5.199.977.500,00	9,42	4.924.776.772,11
Jumlah	7.248.953.175.947,00	6.774.061.484.297,29	93,45	5.885.778.601.466,34

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah TA 2023 mengalami kenaikan dari TA 2022 sebesar Rp888.282.882.830,95 atau 15,09%. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023

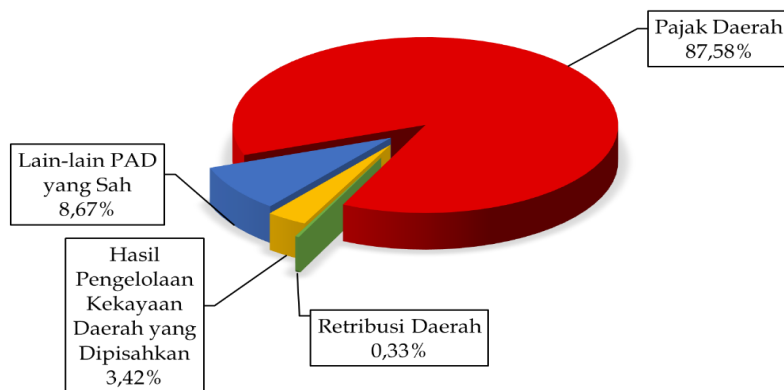
Uraian masing-masing jenis pendapatan daerah tersebut diungkapkan sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

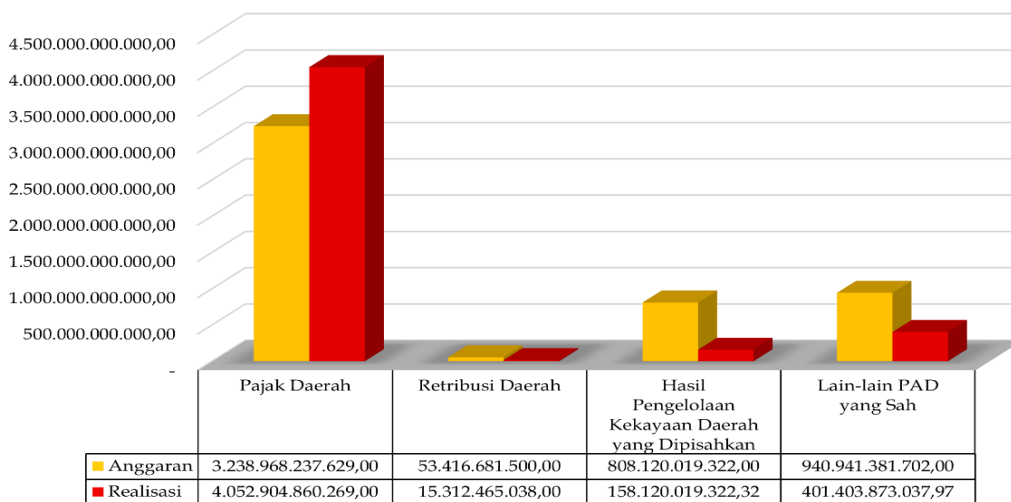
Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	3.238.968.237.629,00	4.052.904.860.269,00	125,13	3.230.839.407.191,00
Retribusi Daerah	53.416.681.500,00	15.312.465.038,00	28,67	14.348.341.509,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	19,57	220.323.008.247,47
Lain-lain PAD yang Sah	940.941.381.702,00	401.403.873.037,97	42,66	397.680.649.900,76
Jumlah	5.041.446.320.153,00	4.627.741.217.667,29	91,79	3.863.191.406.848,23

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp764.549.810.819,06 atau 19,79%. Komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran di TA 2023 digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023



Gambar 5.3 Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Berikut ini adalah Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besar anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.495.870.827.460,00	1.742.228.994.500,00	116,47	1.691.067.147.050,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	30.252.299.597,00	33.895.240.000,00	112,04	38.863.454.900,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	118.867.502.109,00	135.884.157.700,00	114,32	140.910.303.600,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	749.314.625.208,00	868.787.506.600,00	115,94	850.302.705.150,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	12.295.648.828,00	15.044.021.400,00	122,35	15.703.181.100,00
PKB-Mobil Bus-Bus	1.599.077.395,00	2.169.641.200,00	135,68	3.277.525.100,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	91.358.108.247,00	109.240.606.000,00	119,57	105.652.881.400,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	50.989.312.440,00	61.343.569.200,00	120,31	60.075.617.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	25.214.389.220,00	31.662.987.000,00	125,58	29.310.243.300,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.444.070.008,00	2.801.877.000,00	114,64	2.546.037.100,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	413.500.533.819,00	481.380.893.000,00	116,42	444.425.197.900,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	35.260.589,00	18.495.400,00	52,45	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	985.019.675.880,00	1.416.376.206.600,00	143,79	790.440.045.700,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	5.990.344.813,00	8.330.750.000,00	139,07	3.486.890.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	39.384.575.860,00	59.613.838.400,00	151,36	52.208.415.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	445.024.930.085,00	631.530.663.000,00	141,91	353.764.894.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	7.236.393.151,00	11.344.022.000,00	156,76	5.353.220.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	498.081.088,00	748.098.000,00	150,20	232.143.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	40.642.520.610,00	60.100.537.500,00	147,88	41.179.533.200,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	11.632.624.543,00	17.042.944.000,00	146,51	11.863.486.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	10.963.634.861,00	16.649.015.000,00	151,86	10.469.145.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.937.491.957,00	2.419.640.000,00	124,89	2.420.440.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	421.437.422.406,00	608.438.988.700,00	144,37	309.461.879.500,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	271.656.506,00	157.710.000,00	58,05	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	400.000.000.000,00	564.730.129.155,00	141,18	411.061.253.416,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	73.619.417.494,00	105.009.719.269,00	142,64	78.412.698.238,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	326.380.582.506,00	459.720.409.886,00	140,85	332.648.555.178,00
Pajak Air Permukaan	3.200.000.000,00	4.094.857.640,00	127,96	3.384.913.300,00
Pajak Air Permukaan	3.200.000.000,00	4.094.857.640,00	127,96	3.384.913.300,00
Pajak Rokok	354.877.734.289,00	325.474.672.374,00	91,71	334.886.047.725,00
Pajak Rokok	354.877.734.289,00	325.474.672.374,00	91,71	334.886.047.725,00
Jumlah	3.238.968.237.629,00	4.052.904.860.269,00	125,13	3.230.839.407.191,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp822.065.453.078,00 atau 25,44%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pajak Daerah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Adanya kebijakan relaksasi pajak dalam 2 tahap, mampu meningkatkan respon masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tahap pertama dilaksanakan tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya. Kemudian tahap kedua dilaksanakan tanggal 11 September 2023 sampai dengan 30 November 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya;
 - b. Peningkatan target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sejalan dengan meningkatnya pembelian jenis kendaraan tertentu yang didorong oleh semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat serta adanya inovasi proses pembayaran kendaraan baru (BBN I) secara digital (Mitra VAST) dengan *dealer* sehingga mempercepat proses pembayaran BBN I;
 - c. Peningkatan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) disebabkan adanya peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat dibidang transportasi sehingga meningkatkan penggunaan Bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - d. Peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan air permukaan baik untuk sarana pariwisata maupun untuk industri sebagai dampak dari semakin melonjaknya kunjungan wisatawan.
2. Pemungutan Pajak Daerah di atas didasarkan pada Peraturan Daerah sebagai berikut:
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Rincian masing-masing anggaran dan realisasi dari pendapatan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok di atas dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	140.500.000,00	200.045.000,00	142,38	4.817.071.200,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	140.500.000,00	200.045.000,00	142,38	4.817.071.200,00
Retribusi Jasa Usaha	48.995.181.500,00	9.709.163.463,00	19,82	5.609.155.659,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.876.704.500,00	4.287.327.520,00	149,04	3.039.119.313,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	77.150.000,00	154,30	56.750.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.269.402.000,00	4.281.423.000,00	9,46	1.486.731.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	799.075.000,00	1.063.262.943,00	133,06	1.026.555.346,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.281.000.000,00	5.403.256.575,00	126,21	3.922.114.650,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.000.000,00	1.500.000,00	25,00	3.000.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	275.000.000,00	291.979.000,00	106,17	614.893.000,00
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	3.299.646.650,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.000.000.000,00	5.109.777.575,00	127,74	0,00
Jumlah	53.416.681.500,00	15.312.465.038,00	28,67	14.348.341.509,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp964.123.529,00 atau 6,72%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Daerah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Umum

Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 namun lebih rendah dari realisasi TA 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kunjungan serta adanya pengukuran kebugaran dengan pihak BPD pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional (UPTD KESTRAD).
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Capaian realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdapat penambahan Jumlah Kantin Sekolah;
 - b) Pada Dinas Kesehatan (UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan) terdapat peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pengujian bahan baku tanaman obat sehingga pemakaian laboratorium juga meningkat;
 - c) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat peningkatan penyewa baru pada penyewaan laboratorium dan alat berat;

- d) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja) terdapat peningkatan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disebabkan oleh hal-hal berikut:
- UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja menerima tambahan 9 orang tenaga baru dari jalur PPPK pada medio tahun 2023 tepatnya bulan Agustus 2023. Tambahan personil ini memungkinkan Hyperkes untuk meningkatkan jumlah layanan pengujian kepada masyarakat, yang berimbas pada peningkatan total layanan pengujian dan parameter uji yang bisa diberikan. Pada tahun 2022 jumlah pengujian yang bisa dilakukan selama 1 tahun maksimal sebanyak 120 Perusahaan. Sedangkan hingga akhir tahun 2023, jumlah pengujian yang dapat dilakukan adalah sebanyak 169 Perusahaan di seluruh Bali. Terjadi peningkatan kapasitas pelayanan kepada pemohon sebanyak 40,83% dibandingkan tahun 2022;
 - Proyeksi perencanaan pendapatan tahun 2023 dibuat dengan didasari oleh kondisi eksisting personil teknis di tahun 2022, di mana jumlah personil saat itu hanya terdiri dari 3 orang penguji lapangan. Selain itu keterbatasan sarana alat pengujian membatasi kemampuan jumlah pengujian yang dapat dilakukan oleh laboratorium; dan
 - Kenaikan jumlah pendapatan juga ditunjang oleh penerapan secara efektif Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang mana harga satuan biaya pengujian relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelum Perda tersebut diberlakukan.
- e) Pada Dinas Kebudayaan terdapat peningkatan pemakaian gedung dan ruangan; dan
- f) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat penambahan ruang lingkup pengujian (Uji Pullorum) dan penggunaan sisa bahan kimia yang bersumber dari APBN.
- 2) Capaian realisasi Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh meningkatnya kunjungan ASN dari Pemerintah Provinsi Bali pada akhir TA 2023;
- 3) Capaian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun lebih tinggi dari realisasi TA 2022. Penyebabnya dapat diuraikan sebagai berikut:
- a) Penetapan target wisatawan pada kawasan konservasi perairan terlalu tinggi dengan asumsi wisatawan yang berkunjung rata-rata lebih dari 1.200 orang/hari;
 - b) Banyak pintu masuk wisatawan/pemanfaat obyek ke KKP Nusa Penida yaitu langsung dari Pulau Bali atau masuk dari Nusa Penida, Lembongan Ceningan;
 - c) Ketaatan pengunjung/wisatawan dalam membeli tiket masih sangat rendah;
 - d) Tingkat kerjasama pengusaha wisata bahari (*dive operator*) dalam penerapan Perda Retribusi Jasa Usaha masih sangat rendah;
 - e) Belum disiapkan mekanisme pembayaran untuk wisatawan asing di Atixbali.com yaitu berupa fitur pembayaran internasional *Visa Card*, *Master Card* yang dapat digunakan melalui pembayaran *online* (MDR);

- f) Belum efektifnya patroli pengawasan baik dari segi frekuensi pelaksanaan maupun tindaklanjut kepada pemanfaat di kawasan konservasi;
 - g) Sumber Daya Manusia sebagai pengelola kawasan masih terbatas baik jumlah dan kompetensi sesuai bidang tugasnya; dan
 - h) Sosialisasi belum maksimal dan menyeluruh seperti *travel agent*, *dive operator*, dan wisatawan.
- 4) Capaian realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh hal-hal berikut:
- a) Pada Dinas Kesehatan (UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan) terdapat peningkatan jumlah pesanan produk dan jasa dari masyarakat;
 - b) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat peningkatan pemakaian laboratorium dan peningkatan penjualan produksi hasil benih ikan; dan
 - c) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat peningkatan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - Tanaman Kopi yang umurnya sudah diatas 40 tahun dan mengalami kekeringan ternyata masih dapat berproduksi dengan baik.
 - Untuk mencegah penularan penyakit ASF dan PMK, peternak yang biasanya menggunakan kawin alam beralih mengawinkan babinnya ke kawin suntik.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- 1) Capaian realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum lebih rendah dari anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 karena sampai dengan Desember 2023 hanya terdapat 1 (satu) pemohon ijin penyelenggaraan ASK baru a.n. PT TASA yang terbit tanggal 30 Agustus 2023;
 - 2) Capaian realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan lebih tinggi dari anggaran TA 2023 karena adanya peningkatan pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan di TA 2023. Namun realisasi tersebut masih lebih kecil dari realisasi TA 2022;
 - 3) Capaian realisasi Retribusi Pengendalian Lalu Lintas pada TA 2023 tidak ada karena berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, jenis Retribusi Perizinan Tertentu hanya terdiri dari 3 jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi PTKA;
 - 4) Capaian realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada TA 2023 tidak ada karena pencatatannya dialihkan ke Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan berlakunya PP tersebut maka istilah Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) diganti menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Retribusi PTKA). Pernyataan tersebut juga diuraikan pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan

- 5) Capaian realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih tinggi dari anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 karena tingkat perekonomian di Bali kian membaik pasca pandemi Covid-19 diikuti oleh membaiknya kondisi operasional perusahaan yang membutuhkan TKA untuk bekerja kembali. Disamping hal tersebut, perkiraan nilai tukar kurs USD terhadap mata uang rupiah pada saat penetapan target sebesar Rp13.700,00, namun pada akhir TA 2023 mencapai kisaran Rp15.500,00.
2. Pemungutan Retribusi Daerah diatas didasarkan pada Peraturan Daerah sebagai berikut:
- Retribusi Jasa Umum yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Retribusi Jasa Usaha yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
 - Retribusi Perizinan Tertentu diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Rincian masing-masing anggaran dan realisasi dari pendapatan pada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu di atas dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	202.455.499,00	202.455.499,00	100,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	202.455.499,00	202.455.499,00	100,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	807.471.097.464,00	157.471.097.464,32	19,50	217.612.463.893,35
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	157.139.903.784,00	157.139.903.784,32	100,00	142.612.463.893,35

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	650.331.193.680,00	331.193.680,00	0,05	75.000.000.000,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	446.466.359,00	446.466.359,00	100,00	2.710.544.354,12
Jumlah	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	19,57	220.323.008.247,47

Tabel di atas menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp62.202.988.925,15 atau 28,23%, berikut penjelasannya:

1. Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas Penyertaan Modal berupa tanah berstatus SHP pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) sebesar Rp650.000.000.000,00 tidak terealisasi pada Tahun 2023. Pemerintah Provinsi Bali tidak mempertimbangkan jangka waktu proses perubahan legalitas aset tanah dari SHP menjadi HPL pada saat penyusunan anggaran, yang berdampak kepada operasional Perseroda PKB.
2. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran TA 2023 yaitu sebesar Rp202.455.499,00 dibagikan oleh PT Asuransi Bangun Askrida. Tidak adanya realisasi pada TA 2022 disebabkan oleh pencatatan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida pada TA 2022 dicatat pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran TA 2023 dan lebih tinggi dari realisasi TA 2022 yaitu sebesar Rp1.297.540.665,00 dibagikan oleh PT Jamkrida Bali mandara dan Rp155.842.363.119,32 dibagikan oleh PT Bank BPD Bali;
 - c. Capaian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran TA 2023 dan lebih rendah dari realisasi TA 2022 karena Perseroda Pusat Kebudayaan Bali yang berada di Kabupaten Klungkung belum dapat membagikan dividen karena masih dalam proses pengembangan. Realisasi masih rendah meskipun Perumda Kerta Bali Saguna telah membagikan dividen sebesar Rp331.193.680,00. Nilai tersebut merupakan sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi Bali dari TA 2022. Besaran dividen yang seharusnya diterima Pemerintah Provinsi Bali di TA 2022 adalah sebesar Rp75.331.193.680,00 dengan rincian kewajiban dividen TA 2017 sebesar Rp951.680.759,70 dan deviden TA 2022

sebesar Rp74.379.512.920,30 dimana sebesar Rp75.000.000.000,00 telah ditransfer ke RKUD pada TA 2022 sehingga sisanya sebesar Rp331.193.680,00 ditransfer pada TA 2023; dan

- d. Capaian realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran TA 2023 namun lebih rendah dari realisasi TA 2022 yaitu sebesar Rp446.466.359,00 dibagikan oleh PT Rumah Sakit Puri Raharja.
3. Rincian penerimaan atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	202.455.499,00	202.455.499,00	100,00	0,00
<i>PT Askrida</i>	<i>202.455.499,00</i>	<i>202.455.499,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	157.139.903.784,00	157.139.903.784,32	100,00	142.612.463.893,35
<i>PT Jamkrida Bali mandara</i>	<i>1.297.540.665,00</i>	<i>1.297.540.665,00</i>	<i>100,00</i>	<i>924.579.942,00</i>
<i>PT Bank BPD Bali</i>	<i>155.842.363.119,00</i>	<i>155.842.363.119,32</i>	<i>100,00</i>	<i>141.503.624.614,35</i>
<i>PT Askrida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184.259.337,00</i>
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	650.331.193.680,00	331.193.680,00	0,05	75.000.000.000,00
<i>Perumda Kerta Bali Saguna</i>	<i>331.193.680,00</i>	<i>331.193.680,00</i>	<i>100,00</i>	<i>75.000.000.000,00</i>
<i>Perseroda Pusat Kebudayaan Bali</i>	<i>650.000.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	446.466.359,00	446.466.359,00	100,00	2.710.544.354,12
<i>Rs Puri Raharja</i>	<i>446.466.359,00</i>	<i>446.466.359,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.710.544.354,12</i>
Jumlah	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	19,57	220.323.008.247,47

4. Pencatatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 didasarkan pada:
- Perumda Kerta Bali Saguna, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 432/01-C/HK/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna yang ditetapkan tanggal 12 April 2023.
 - PT Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Beria Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 47 Tanggal 22 Februari 2023 dengan Akta Notaris I Made Widiada, SH.
 - PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), berdasarkan Beria Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 4 Tanggal 03 Maret 2023 dengan Akta Notaris I Made Pria Dharsana, SH.

- d. PT Puri Raharja, berdasarkan Beria Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 6 Tanggal 12 Juli 2023 dengan Akta Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH.
- e. PT Asuransi Bangun Askrida, berdasarkan Beria Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 20 Maret 2023 dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini adalah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.000.000,00	1.586.088.063,00	406,69	1.827.094.745,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.628.726.953,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	198.367.792,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	390.000.000,00	1.586.088.063,00	406,69	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	568.717.578.000,00	19.544.753.225,00	3,44	68.267.195.947,00
Hasil Sewa BMD	4.392.578.000,00	12.247.240.576,00	278,82	14.551.758.100,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	564.325.000.000,00	7.297.512.649,00	1,29	53.715.437.847,00
Hasil Kerja Sama Daerah	2.209.600.000,00	2.743.862.100,00	124,18	1.745.891.400,00
Hasil Kerja Sama Daerah	2.209.600.000,00	2.743.862.100,00	124,18	1.745.891.400,00
Jasa Giro	4.248.832.612,00	8.275.751.573,57	194,78	14.226.586.069,98
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.248.832.612,00	6.164.375.981,56	145,08	14.226.586.069,98
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	281.710.192,57	0,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	1.829.665.399,44	0,00	0,00
Pendapatan Bunga	1.691.989.308,00	4.563.650.828,34	269,72	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.691.989.308,00	4.563.650.828,34	269,72	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.500.000,00	18.000.000,00	171,43	18.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	10.500.000,00	18.000.000,00	171,43	18.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	529.844.530,00	1.208.006.636,81	227,99	2.303.307.072,50
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	529.844.530,00	1.208.006.636,81	227,99	2.303.307.072,50
Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.473.991.000,00	53.661.511.340,00	106,32	22.058.220.040,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50.000.000.000,00	53.133.197.300,00	106,27	21.769.403.600,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	473.936.000,00	528.093.600,00	111,43	288.651.800,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	55.000,00	220.440,00	400,80	164.640,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.784.900,00	3.935.100,00	220,47	3.109.800,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.520.000,00	3.440.000,00	226,32	2.524.500,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	264.900,00	495.100,00	186,90	585.300,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.461.578.852,00	1.881.520.418,25	128,73	1.676.445.399,57
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	677.333.417,00	514.498.236,94	75,96	1.676.445.399,57
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.042.300,00	3.942.300,00	193,03	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	11.190.999,00	10.190.999,00	91,06	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	529.182.349,00	578.183.709,00	109,26	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	13.750.069,00	116.525.902,29	847,46	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.723.520,00	42.723.520,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.869.872,00	31.551.625,00	105,63	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	11.130.000,00	88.775.000,00	797,62	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	69.597.904,00	425.316.704,02	611,11	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	2.359.222,00	1.359.222,00	57,61	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.000.000,00	54.000,00	5,40	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	18.399.200,00	18.399.200,00	100,00	0,00
Pendapatan BLUD	311.205.682.500,00	307.901.426.955,00	98,94	285.554.799.426,71
Pendapatan BLUD	311.205.682.500,00	307.901.426.955,00	98,94	285.554.799.426,71
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	15.366.798,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	15.366.798,00	0,00	0,00
Jumlah	940.941.381.702,00	401.403.873.037,97	42,66	397.680.649.900,76

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp3.723.223.137,21 atau 0,94%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Namun realisasi tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut juga diungkapkan dalam Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dalam Catatan atas Laporan Operasional pada *point 5.4.3. dan 5.4.4*;
 - b. Capaian realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 karena tidak terealisasinya hasil kerjasama pemanfaatan dengan PT Narenda Interpacific Indonesia (NII). Berdasarkan surat Gubernur Bali Nomor B.13.032/6069/set/BPKAD tanggal 7 Agustus 2023 Pemerintah Provinsi Bali menyatakan mengakhiri perjanjian kerja sama sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan PT NII tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tanggal 23 Desember 2022. Pengakhiran kerjasama tersebut terjadi karena PT NII dinilai telah gagal/lalai dalam melunasi kewajiban pembayaran kontribusi tetap atas sewa lahan yang terletak di Jalan Terompong, Desa

Peminge, Kecamatan Benoa, Kabupaten Badung. Pembayaran tersebut paling lambat dilunasi tanggal 31 Mei 2023, namun sampai akhir TA 2023 PT NII belum dapat melunasinya;

- c. Capaian realisasi Hasil Kerja Sama Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Bentuk Kerjasama Daerah tersebut berupa kerjasama pemanfaatan hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, kerjasama penyelenggaraan angkutan umum trans SARBAGITA yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan kerjasama penilaian kompetensi dengan pihak eksternal pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
- d. Capaian realisasi Jasa Giro lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 karena penerimaan Jasa Giro tergantung pada perputaran jumlah uang di RKUD. Jadi, Pendapatan Jasa Giro tidak bisa diprediksi dengan tepat karena tergantung ketersediaan kas di RKUD. Namun realisasi tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan realisasi TA 2022 karena adanya penurunan *idle cash* dari TA 2022 yaitu sebesar Rp260.052.388.640,23 menjadi Rp90.752.218.379,35 di TA 2023. Jasa Giro pada Kas di Bendahara merupakan jasa giro dari rekening yang ada di bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah yang sebelumnya dicatat pada akun Jasa Giro pada Kas Daerah, dan Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan merupakan Jasa Giro dari Dana Cadangan sebesar Rp250.000.000.000,00 yang sebelumnya dicatat pada akun Jasa Giro pada Kas Daerah;
- e. Capaian realisasi Pendapatan Bunga lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Pemerintah Provinsi Bali memiliki rekening dana cadangan yang ditempatkan dalam bentuk giro pada BPD Bali, Deposito dilakukan terhadap dana cadangan yang masih belum digunakan sesuai yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Pembentukan deposito dimulai dari Bulan Februari dan mulai memperoleh pendapatan bunga secara berkala pada Bulan Maret sampai dengan Desember TA 2023. Selama TA 2023 pendapatan bunga yang diperoleh dari deposito jangka pendek atas Dana Cadangan adalah sebesar Rp4.083.333.333,34 sisanya sebesar Rp480.317.495,00 berasal dari penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF);
- f. Capaian realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Namun besaran realisasi TA 2023 sama dengan realisasi TA 2022 karena realisasi tersebut merupakan pelunasan TGR atas nama Wiyantara;
- g. Capaian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - 1) Kondisi lapangan pada lalu lintas yang tinggi sehingga menyebabkan metode kerja yang mengharuskan kerja lebih pada malam hari dan tidak efektif pada pagi dan siang hari;
 - 2) *Supply* bahan yang terlambat baik produksi dan pengiriman material;
 - 3) Tenaga kerja yang tidak maksimal; dan
 - 4) adanya pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 79 (ayat) 4.

Namun realisasi pada TA 2023 masih lebih kecil dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

- h. Capaian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh hal-hal berikut:
- 1) Adanya kebijakan relaksasi pajak dalam 2 tahap yang mampu meningkatkan respon masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu:
 - a) Tahap pertama dilaksanakan tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya; dan
 - b) Tahap kedua dilaksanakan tanggal 11 September 2023 sampai dengan 30 November 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya.
 - 2) Peningkatan realisasi Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terjadi karena penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan melibatkan Kepolisian, Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan. Serta penerapan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 92 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, dimana didalamnya mengatur mengenai pelaksanaan razia *door to door* dengan melakukan penjajakan langsung ke rumah wajib pajak serta menginformasikan berbagai layanan samsat yang dapat dilakukan secara cepat dan mudah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu;
 - 3) Peningkatan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terjadi karena kondisi pariwisata yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19 sehingga penggunaan kendaraan baru makin meningkat. Selain itu; dan
 - 4) Peningkatan Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan terjadi karena semakin intensifnya penagihan tunggakan atas pembayaran dari pemanfaatan air permukaan.
- i. Capaian realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dipengaruhi oleh penerapan penggunaan Sistem Pendapatan Daerah (SIPEDA) dalam pemungutan Retribusi Daerah sehingga meningkatkan kesadaran wajib Retribusi dalam melakukan kewajibannya dengan tepat waktu. Penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa denda sewa kantin dan rumah dinas;
- j. Capaian realisasi Pendapatan dari Pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022. Selama TA 2023 pada rekening Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terdapat STS atau transaksi penerimaan tidak bertuan atau belum teridentifikasi yang seharusnya dicatat oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Transaksi tersebut ditampung BPKAD dalam rekening Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan. Adapun rincian STS tak bertuan diungkapkan sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Referensi	Jumlah
30/01/2023	STR. MENGANI K01.19 MELALUI TRANSFER VIA INTERNET BANKING	13193/TRF-Rektitipan/5.02.0.00.0.00.02/2022	1.000.000,00
21/12/2023	TRF DR BRINIDJA 041701009516502 ANDI LUXBINATUR VIA (BI- FAST)	34413/Rek.titipan/5.02.0.00.0.00.02./2022	600.000,00
Jumlah			1.600.000,00

Upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mengidentifikasi penerimaan tersebut adalah dengan melaksanakan rekonsiliasi Kas di Kasda bulanan, konfirmasi kepada Bank BPD Bali, dan konfirmasi kepada seluruh perangkat daerah di Provinsi Bali. Upaya konfirmasi kepada perangkat daerah dilaksanakan oleh BPKAD melalui WAG Perbendaharaan untuk meneruskan informasi STS tak bertuan pada seluruh bendahara penerimaan PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 18 Januari 2024; dan

- k. Capaian realisasi Pendapatan BLUD lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022, berikut rinciannya:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
RSUD Bali Mandara	150.000.000.000,00	133.430.115.570,58	88,95	145.250.437.925,41
Rumah Sakit Jiwa	24.500.000.000,00	24.803.122.179,49	101,24	28.140.117.765,95
Rumah Sakit Mata Bali Mandara	80.000.000.000,00	86.053.305.409,69	107,57	69.406.362.233,71
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	5.585.767.500,00	6.103.949.897,20	109,28	0,00
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	6.000.000.000,00	5.587.904.189,82	93,13	1.827.348.117,08
UPTD Pengelolaan Air Limbah	8.400.000.000,00	11.108.812.267,83	132,25	6.129.821.286,44
UPTD Pengelolaan Air Minum	25.917.091.000,00	29.399.231.492,88	113,44	23.657.750.372,59
UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	10.802.824.000,00	11.414.985.947,51	105,67	11.142.961.725,53
Jumlah	311.205.682.500,00	307.901.426.955,00	98,94	285.554.799.426,71

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan BLUD dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Capaian realisasi Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a) Adanya peningkatan kunjungan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
 - b) Adanya peningkatan pendapatan dari pelatihan yang bekerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - c) Adanya peningkatan pendapatan jasa giro dan AFI Deposito, sesuai dengan peningkatan jumlah nominal yang tersimpan pada rekening bank.
- 2) Capaian realisasi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 karena adanya penambahan kerjasama pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan

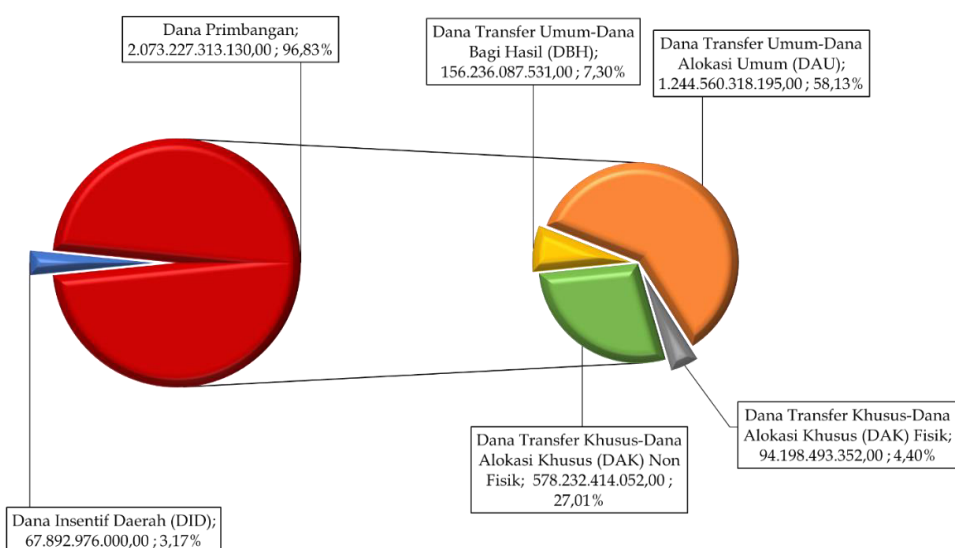
Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dinyatakan bahwa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan telah menjadi BLUD mulai tanggal 14 Februari 2023, maka pada TA 2022 belum ada pelaporan realisasi Pendapatan BLUD pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan;

- 3) Capaian realisasi UPTD Pengelolaan Air Minum (PAM) lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif air curah SPAM Guyangan dan peningkatan serapan di SPAM Guyangan dan Telagawaja; dan
 - 4) Capaian realisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah (PAL) lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 karena telah dilakukan penyebaran invoice/tagihan oleh UPTD PAL secara gencar kepada pelanggan, sehingga banyak pelanggan yang melakukan pembayaran tunggakan. Selain itu peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh penetapan tarif layanan pelanggan UPTD PAL per bulan September 2023 untuk kategori hotel dan restoran yang dikembalikan ke tarif normal pasca dicabutnya status pandemi Covid-19.
1. Capaian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan denda atas rumah dinas yang sebelumnya dicatat pada Hasil Sewa BMD.
 2. Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer yang dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 yang digambarkan dalam diagram berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.152.312.055.794,00	2.141.120.289.130,00	99,48	2.017.662.417.846,00



Gambar 5.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	2.084.419.079.794,00	2.073.227.313.130,00	99,46	1.967.302.754.846,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	136.760.061.000,00	156.236.087.531,00	114,24	160.646.015.977,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.335.247.000,00	1.625.748.585,00	121,76	2.488.074.203,00
DBH PPh Pasal 21	134.104.208.000,00	142.926.427.442,00	106,58	141.678.643.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPPDN	0,00	10.235.252.000,00	0,00	14.572.386.169,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.320.544.000,00	1.448.576.419,00	109,70	1.906.717.605,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	62.000,00	83.085,00	134,01	195.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.243.564.753.000,00	1.244.560.318.195,00	100,08	1.194.632.100.845,00
DAU	1.243.564.753.000,00	1.244.560.318.195,00	100,08	1.194.632.100.845,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	115.523.529.794,00	94.198.493.352,00	81,54	67.884.679.735,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	14.955.550.000,00	14.949.966.700,00	99,96	14.292.088.875,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	10.705.457.000,00	0,00	0,00	4.772.310.150,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	24.594.636.000,00	24.046.460.036,00	97,77	16.231.990.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	1.369.949.960,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.302.713.000,00	3.402.441.690,00	79,08	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	286.250.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.098.945.000,00	0,00	0,00	7.348.028.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	11.471.379.146,00	0,00	14.025.640.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	21.254.232.000,00	13.588.183.030,00	63,93	4.436.048.820,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	5.122.373.930,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	27.611.996.794,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	26.740.062.750,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	588.570.736.000,00	578.232.414.052,00	98,24	544.139.958.289,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	344.539.400.000,00	337.755.483.534,00	98,03	323.257.076.670,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.431.250.000,00	6.293.710.300,00	97,86	2.290.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	215.706.720.000,00	215.706.720.000,00	100,00	205.276.104.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.237.500.000,00	2.118.000.000,00	49,98	2.439.250.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	4.000.000.000,00	3.705.462.699,00	92,64	3.231.235.325,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.864.132.625,00	93,21	1.810.126.450,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.178.942.000,00	5.826.577.336,00	94,30	1.431.403.916,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	3.439.891.425,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	946.500.000,00	888.202.000,00	93,84	743.068.533,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	155.647.086,00	41,51	221.801.970,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	4.155.424.000,00	3.918.478.472,00	94,30	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	67.892.976.000,00	67.892.976.000,00	100,00	50.359.663.000,00
DID	67.892.976.000,00	67.892.976.000,00	100,00	50.359.663.000,00
DID	67.892.976.000,00	67.892.976.000,00	100,00	50.359.663.000,00
Jumlah	2.152.312.055.794,00	2.141.120.289.130,00	99,48	2.017.662.417.846,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp123.457.871.284,00 atau 6,12%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dana Perimbangan

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Capaian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Namun realisasi tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan realisasi TA 2022;

2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Capaian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 karena terdapat transfer DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah. Penyaluran tersebut tidak tercantum dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 yang menjadi dasar penetapan anggaran Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp115.523.529.794,00, tidak sesuai dengan rincian transfer pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah yaitu sebesar Rp119.564.650.000,00. Hal ini terjadi karena terdapat penyesuaian pagu belanja dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali oleh Kementerian Kesehatan RI saat proses penyusunan rencana kegiatan. Kemudian, terkait capaian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada TA 2023 belum dapat mencapai target anggaran TA 2023. Namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022, berikut penjelasannya:

- a) DAK Fisik - Bidang Pendidikan Reguler - SLB yang dianggarkan sebesar Rp10.745.457.000,00, tidak terealisasi karena adanya perubahan terhadap lokus Rencana Pembangunan USB SLB dari yang semula ditetapkan di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, diusulkan dipindahkan ke lokasi Unit Sekolah Baru (USB) ke Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Namun usulan tersebut tidak dapat disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta DJPK, sehingga pelaksanaan pembangunan USB SLB yang tidak terlaksana dan alokasi dana tidak direalisasikan oleh Pemerintah Pusat;
- b) Sesuai Lampiran Perpres 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, DAK Fisik Bidang Jalan yang diterima oleh Provinsi Bali adalah DAK Fisik - Bidang Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas. Karena tidak disebutkan apakah DAK Fisik Bidang Jalan ini masuk kategori Reguler atau Penugasan, maka kami dan Bapenda sepakat untuk menganggarkannya pada akun rekening DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler-Jalan. Namun ternyata Pemerintah Pusat merealisasikannya melalui DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan – Jalan; dan
- c) Sesuai Lampiran Perpres 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Provinsi Bali mendapatkan alokasi anggaran DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp27.611.996.794,00, Namun karena pada saat proses penginputan ke dalam Sistem SIPD RI, kami tidak menemukan akun rekening tersebut, sehingga kami memilih menggunakan akun rekening yang kami pandang paling mendekati yaitu DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB- Reguler Peningkatan Kesiapan sistem kesehatan.

4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik

Capaian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

1) Dan Insentif Daerah (DID)

Capaian realisasi Dan Insentif Daerah (DID) telah mencapai target anggaran TA 2023 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Jumlah penyaluran DID atas kinerja tahun 2023 sebesar Rp67.892.976.000,00. Berikut rincian realisasi pendapatan dan belanjanya:

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%	Sisa
1.	Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindag)	5.396.083.016,00	5.363.040.000,00	99,39	33.043.016,00
2.	Infrastruktur (PUPRKIM)	31.382.338.984,00	25.680.833.346,00	81,83	5.701.505.638,00
3.	Perlindungan Sosial (Dinsos)	24.188.439.000,00	4.040.021.075,00	16,70	20.148.417.925,00
4.	Bidang Lainnya	6.926.115.000,00	6.635.517.802,00	95,80	290.597.198,00
Jumlah		67.892.976.000,00	41.719.412.223,00	61,45	26.173.563.777,00

Capaian realisasi pada kegiatan Perlindungan Sosial di Dinas Sosial hanya mencapai 16,70%. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, dilakukanlah rasionalisasi anggaran pada DID. Sehingga anggaran DID dialokasikan untuk membiayai kegiatan prioritas lainnya yang lebih mendesak.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022.

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Berikut ini adalah Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.194.800.000,00	5.194.800.000,00	100,00	4.898.040.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	5.194.800.000,00	5.194.800.000,00	100,00	4.898.040.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	50.000.000.000,00	5.177.500,00	0,01	26.736.772,11
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	50.000.000.000,00	5.177.500,00	0,01	26.736.772,11
Jumlah	55.194.800.000,00	5.199.977.500,00	9,42	4.924.776.772,11

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hibah TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp275.200.727,89 atau 5,59%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Hibah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri telah mencapai target anggaran TA 2023 dan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan

realisasi TA 2022. Pendapatan Hibah tersebut merupakan setoran kontribusi biaya operasional kantor bersama samsat bulan Januari sampai dengan Desember dari PT Jasa Raharja (Persero) di TA 2023 yang telah disahkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PT Jasa Raharja dan Gubernur Bali dengan Nomor P/67/SP/2023 (1568 Tahun 2023) pada tanggal 5 Juni tahun 2023, tentang Hibah Uang kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap; dan

- b. Capaian realisasi Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 karena sumbangan tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari kontribusi wisatawan. Dalam Pasal 4 (ayat) 2 Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali serta dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali dinyatakan bahwa kontribusi wisatawan dapat berupa barang dan/atau uang yang bersifat sukarela, hal ini menjadi penyebab rendahnya penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dari kontribusi wisatawan. Pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali yang mencabut Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam Dan Budaya Bali. Peraturan baru tersebut mulai berlaku tanggal 14 Februari 2024 dan didalamnya mengatur bahwa kontribusi wisatawan tidak lagi berupa barang dan/atau uang yang bersifat sukarela melainkan berupa uang dengan tarif pungutan sebesar Rp150.000,00 dengan pembayaran secara elektronik (*e-payment*). Teknis tata cara pembayaran pungutan ditetapkan dalam Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing yang mulai berlaku tanggal 7 Februari 2024.

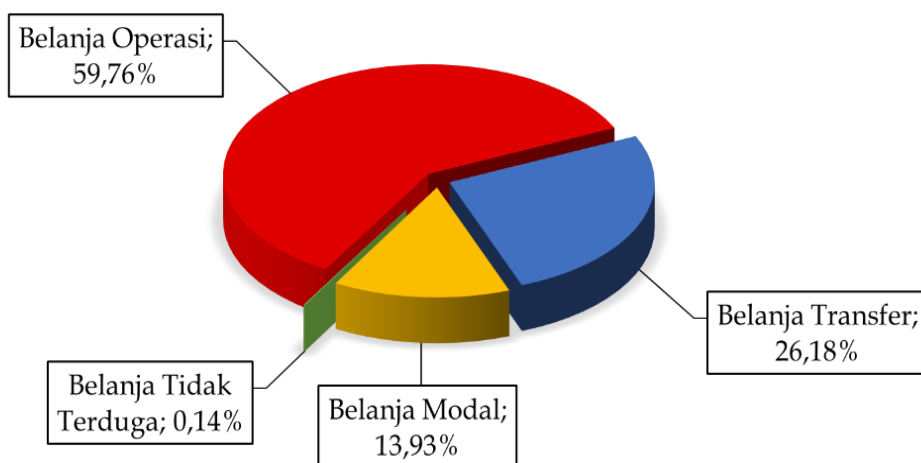
5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini adalah Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

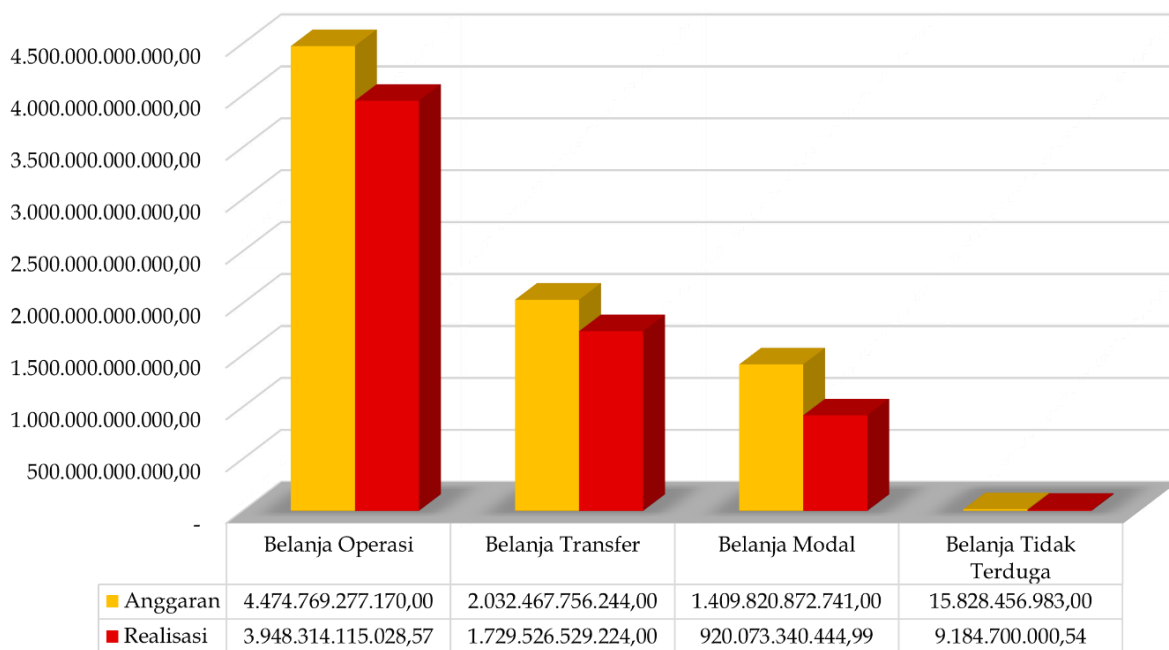
Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	4.474.769.277.170,00	3.948.314.115.028,57	88,24	3.791.897.703.325,73
Belanja Modal	1.409.820.872.741,00	920.073.340.444,99	65,26	1.452.064.568.386,86
Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03	4.759.779.107,00
Belanja Transfer	2.032.467.756.244,00	1.729.526.529.224,00	85,09	1.500.721.131.290,00
Jumlah	7.932.886.363.138,00	6.607.098.684.698,10	83,29	6.749.443.182.109,59

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Daerah TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp142.344.497.411,49 atau 2,11%. Capaian realisasi Belanja Daerah merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Surat Edaran Nomor 8004 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023. Pelaksanaan belanja daerah diutamakan untuk kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas dengan memperhatikan ketersediaan dana di Kas Daerah. Komposisi realisasi

Belanja Daerah TA 2023 dan capaian realisasi Belanja Daerah terhadap anggaran di TA 2023 digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023



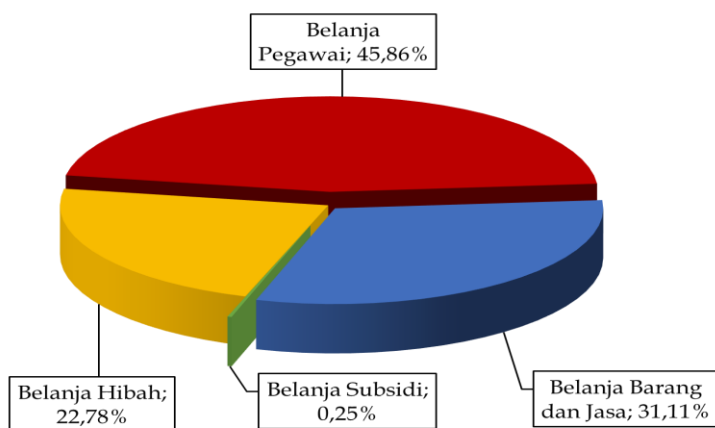
Gambar 5.6 Capaian Realisasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023

5.1.2.1. Belanja Operasi

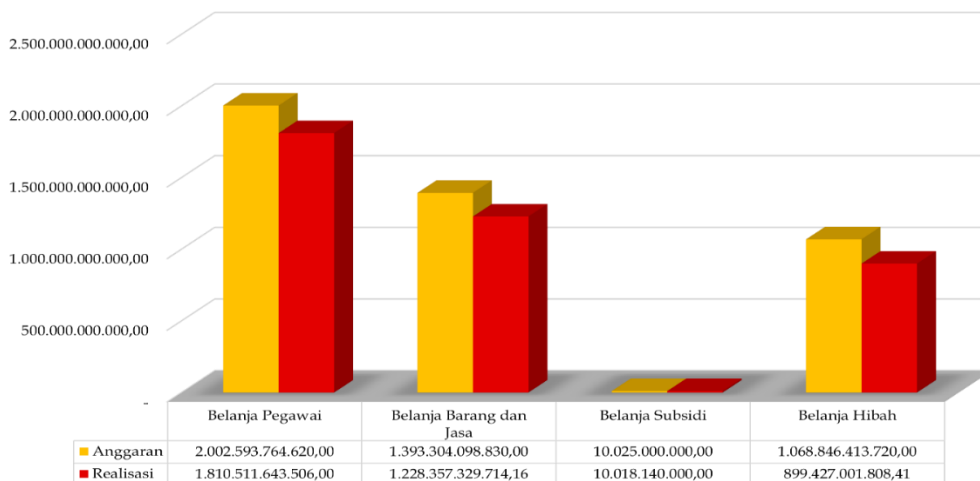
Berikut ini adalah Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	2.002.593.764.620,00	1.810.511.643.506,00	90,41	1.740.899.431.377,08
Belanja Barang dan Jasa	1.393.304.098.830,00	1.228.357.329.714,16	88,16	1.690.049.421.497,65
Belanja Subsidi	10.025.000.000,00	10.018.140.000,00	99,93	4.372.945.000,00
Belanja Hibah	1.068.846.413.720,00	899.427.001.808,41	84,15	356.436.889.451,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	139.016.000,00
Jumlah	4.474.769.277.170,00	3.948.314.115.028,57	88,24	3.791.897.703.325,73

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp156.416.411.702,84 atau 4,13%. Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan capaian realisasi Belanja Operasi terhadap anggaran di TA 2023 digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023



Gambar 5.8 Capaian Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	893.010.318.528,00	773.692.772.445,00	86,64	763.555.173.694,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	617.582.408.384,00	599.294.041.491,00	97,04	526.131.724.965,12
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	335.646.959.382,00	287.200.117.606,00	85,57	262.437.236.145,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	58.289.033.531,00	57.245.402.550,00	98,21	57.173.208.355,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	247.336.742,00	188.395.271,00	76,17	238.960.128,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	7.922.169.480,00	6.115.000.000,00	77,19	5.600.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	89.895.538.573,00	86.775.914.143,00	96,53	125.763.128.089,96
Jumlah	2.002.593.764.620,00	1.810.511.643.506,00	90,41	1.740.899.431.377,08

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp69.612.212.128,92 atau 4,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, dan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN. Sedangkan penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan dari Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, dan Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - b. Capaian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN. Sedangkan penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
 - c. Capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD. Sedangkan penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN dan Belanja Honorarium;

- d. Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Uang Representasi DPRD, Belanja Uang Paket DPRD, Belanja Tunjangan Jabatan DPRD, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Reses DPRD, Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Pembulatan Gaji DPRD, Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Belanja Tunjangan Transportasi DPRD. Sedangkan penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Tunjangan Keluarga DPRD, Belanja Tunjangan Beras DPRD, dan Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- e. Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH, Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- f. Capaian realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH; dan
- g. Capaian realisasi Belanja Pegawai BLUD lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	189.612.767.301,00	164.485.495.551,00	86,75	141.559.477.929,90
Belanja Jasa	677.369.874.376,00	593.123.116.378,60	87,56	620.465.098.450,46
Belanja Pemeliharaan	36.526.229.751,00	24.379.228.608,00	66,74	33.773.526.561,91
Belanja Perjalanan Dinas	158.016.103.896,00	84.189.449.621,00	53,28	64.659.573.191,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.736.759.676,00	27.227.732.547,18	88,58	521.971.488.757,52
Belanja Barang dan Jasa BOS	132.357.265.076,00	185.455.598.978,25	140,12	177.097.819.085,08
Belanja Barang dan Jasa BLUD	168.685.098.754,00	149.496.708.030,13	88,62	130.522.437.521,78
Jumlah	1.393.304.098.830,00	1.228.357.329.714,16	88,16	1.690.049.421.497,65

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp461.692.091.783,49 atau 27,32%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Barang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Capaian realisasi Belanja Jasa lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi. Sedangkan peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Jasa Konsultansi NonKonstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud;
 - c. Capaian realisasi Belanja Pemeliharaan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Sedangkan peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dan Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud;
 - d. Capaian realisasi Belanja Perjalanan Dinas lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - e. Capaian realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini terjadi karena penetapan anggaran TA 2023 didasarkan pada data siswa TA 2022. Sedangkan realisasi/belanja menggunakan data siswa (tahun pelajaran) dengan *cut off* dapodiknya tanggal 31 Agustus Tahun 2023. Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 sesuai Pasal 25 (ayat) 1 disebutkan bahwa dalam hal alokasi Dana BOS yang dianggarkan pada Perda tentang APBD provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan alokasi penyaluran Tahun Anggaran sebelumnya tidak sama dengan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satuan

Pendidikan (satdik) yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD. Namun penyampaian telaahan tersebut dilakukan pada tanggal 24 November 2023 sedangkan APBD Perubahan TA 2023 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Jadi penyesuaian pergeseran anggaran tersebut tidak dapat diakomodir pada APBD Perubahan TA 2023; dan

- g. Capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Berikut ini adalah Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	289.850.000,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	10.000.000.000,00	9.993.140.000,00	99,93	4.058.095.000,00
Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Jumlah	10.025.000.000,00	10.018.140.000,00	99,93	4.372.945.000,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Subsidi TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp5.645.195.000,00 atau 129,09%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Subsidi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD TA 2023 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2022 karena tidak terdapat penetapan anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD di TA 2023;
 - b. Capaian realisasi Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan jumlah realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) karena ada 3 (tiga) kelompok petani yang membutuhkan pupuk organik lebih sedikit dari penetapan di SK. Namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022; dan
 - c. Capaian realisasi Belanja Subsidi kepada Koperasi telah mencapai target anggaran TA 2023 dan realisasi tersebut sama dengan realisasi TA 2022.
2. Berikut adalah rincian daftar penerima dan dasar hukum pemberian hibah:
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMD diberikan kepada Kelompok Tani/*Subak* didasarkan pada SK Gubernur Bali Nomor 397/03-F/HK/2023 tentang Penunjukan Kelompok Tani/*Subak* Penerima Pupuk Organik yang Disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 yang ditetapkan tanggal

28 Maret 2023, pemberian subsidi kepada badan usaha milik swasta merupakan pemberian subsidi kepada:

No .	Nama Kelompok Tani/Subak	SKPD Pengampu	Nilai
1.	Yayasan Pemilahan Sampah Temesi, Desa Temesi, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.464.000.000,00
2.	CV. Satya Loka Parama Sidhi, Desa Menanga, Kec. Karangasem	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	566.000.000,00
3.	CV. Ananta Winangun Desa Penarukan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.159.820.000,00
4.	Yayasan Pemilahan Sampah Temesi, Desa Temesi, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.436.000.000,00
5.	CV. Satya Loka Parama Sidhi, Desa Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	634.000.000,00
6.	CV. Ananta Winangun Desa Penarukan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.733.320.000,00
Jumlah			9.993.140.000,00

3. Berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 718/03-H/HK/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Koperasi yang Mendapatkan Subsidi Pembuatan Akta Koperasi Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2023, pemberian subsidi kepada koperasi merupakan pemberian subsidi kepada:

No .	Nama Koperasi	SKPD Pengampu	Nilai
1.	Koperasi Jasa Pusaka Teknik Indonesia di Kota Denpasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
2.	Koperasi Konsumen Tugu Sari Utama di Kabupaten Tabanan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
3.	Koperasi Jasa Muda Artha Swaha di Kabupaten Badung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
4.	Koperasi Pemasaran Tani Lestari Puregai di Kabupaten Karangasem	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
5.	Koperasi Konsumen Sari Gumitir Besakih di Kabupaten Karangasem	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
6.	Koperasi Pemasaran Mitra Jembrana Bahagia di Kabupaten Jembrana	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
7.	Koperasi Pemasaran Bhakti Petani Mandiri di Kota Denpasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
8.	Koperasi Pemasaran Laksmi Padu Sejahtera di Kabupaten Karangasem	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
9.	Koperasi Konsumen Yowana Dharma Sedana di Kabupaten Badung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
10.	Koperasi Produsen Buana Merta Abadi di Kabupaten Jembrana	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.500.000,00
Jumlah			25.000.000,00

4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi pada masing-masing PD dapat dilihat pada *lampiran 7*.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	79.753.807.200,00	79.595.067.200,00	99,80	299.700.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	78.829.667.200,00	78.829.667.200,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	924.140.000,00	765.400.000,00	82,82	299.700.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	924.140.000,00	765.400.000,00	82,82	299.700.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	878.536.761.520,00	710.987.746.512,41	80,93	239.635.424.756,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	479.177.090.756,00	325.263.389.315,41	67,88	21.174.712.606,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	8.847.332.110,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	375.606.895.359,00	367.511.510.537,00	97,84	193.805.815.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	23.652.775.405,00	18.112.846.660,00	76,58	15.657.565.040,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	94.087.990.000,00	92.376.333.096,00	98,18	100.033.909.695,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	94.087.990.000,00	91.440.313.797,00	97,19	99.275.235.545,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	936.019.299,00	0,00	758.674.150,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	936.019.299,00	0,00	758.674.150,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	16.467.855.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	16.467.855.000,00
Jumlah	1.068.846.413.720,00	899.427.001.808,41	84,15	356.436.889.451,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp542.990.112.357,41 atau 152,34%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Peningkatan yang signifikan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam hal pendanaan Pemilukada serentak Tahun 2024;
 - b. Capaian realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Sedangkan penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan Belanja Hibah kepada Koperasi;
 - c. Capaian realisasi Belanja Hibah Dana BOS lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta dan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta; dan
 - d. Capaian realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah mencapai target anggaran TA 2023 dan nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari TA 2022.
2. Berikut adalah rincian daftar penerima dan dasar hukum pemberian hibah:
 - a. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah berupa:
 - 1) Hibah uang yang diberikan kepada:
 - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Tjok Agung Tresna Nomor 8 Denpasar Bali. Pemberian hibah berupa uang sebesar Rp62.392.938.400,00 pada tahap I atau 40% dari Rp155.982.346.000,00 sesuai dengan NPHD Nomor450.U/04-H/2023 (1715/PP.01.2-PKS/51/2023), digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali tahun 2024 yang didasarkan pada SK Gubernur Bali Nomor 305/04-H/HK/2023 tentang Penerima Hibah Pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan; dan

- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Prof Moh. Yamin Nomor.17, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Pemberian hibah berupa uang sebesar Rp16.436.728.800,00 pada tahap I atau 40% dari Rp41.091.822.000,00 sesuai dengan NPHD Nomor 449.U/04-H/2023 (036.1/PR.03.00/K.BA/11/2023), digunakan untuk penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali tahun 2024 yang didasarkan pada SK Gubernur Bali Nomor 364/04-H/HK/2023 tentang Penerima Hibah Pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.

2) Hibah barang yang diberikan kepada:

- Komando Daerah Militer IX/Udayana Komando Resor Militer 163/Wira Satya yang beralamat di Jl. PB Sudirman, Kelurahan Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Pemberian hibah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G M/T Bensin Vin 2023 seharga Rp382.700.000,00 yang didasarkan pada SK Gubernur Bali Nomor 260/01-C/HK/2023 tentang Penerima Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat; dan
- Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar yang beralamat di Jl. Airport Ngurah Rai Nomor 12, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pemberian hibah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G M/T Bensin Vin 2023 seharga Rp382.700.000,00 yang didasarkan pada SK Gubernur Bali Nomor 261/01-C/HK/2023 tentang Penerima Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat.

b. Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah kepada:

- 1) Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- 3) Koperasi; dan
- 4) Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

c. Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah kepada satuan pendidikan menengah (satdikmen) swasta sebesar Rp91.440.313.797,00 dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) swasta sebesar Rp936.019.299,00 selama TA 2023 yang disalurkan secara langsung ke masing-masing satuan Pendidikan.

c. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi



Partai Hanura	439.515.000,00	439.515.000,00	100,00	439.515.000,00
Partai Solidaritas Indonesia	330.367.500,00	330.367.500,00	100,00	330.367.500,00
Partai Gerindra	1.233.907.500,00	1.233.907.500,00	100,00	1.233.907.500,00
Partai Golkar	2.386.575.000,00	2.386.575.000,00	100,00	2.386.575.000,00
Partai Nasional Demokrat	950.355.000,00	950.355.000,00	100,00	950.355.000,00
Partai Demokrat	1.309.515.000,00	1.309.515.000,00	100,00	1.309.515.000,00
Partai PDI Perjuangan	9.817.620.000,00	9.817.620.000,00	100,00	9.817.620.000,00
Jumlah	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	16.467.855.000,00

Pemberian hibah tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 220/04-H/HK/2023 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali TA 2023.

3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Sosial (Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu) yang tidak dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, terakhir direalisasikan pada TA 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	139.016.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	139.016.000,00

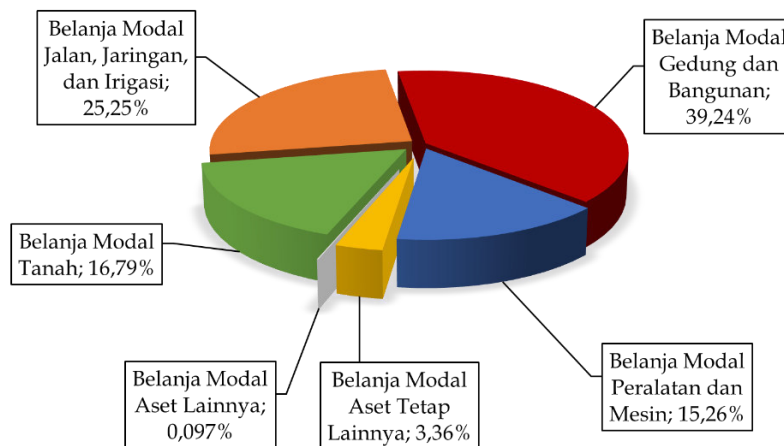
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

5.1.2.2. Belanja Modal

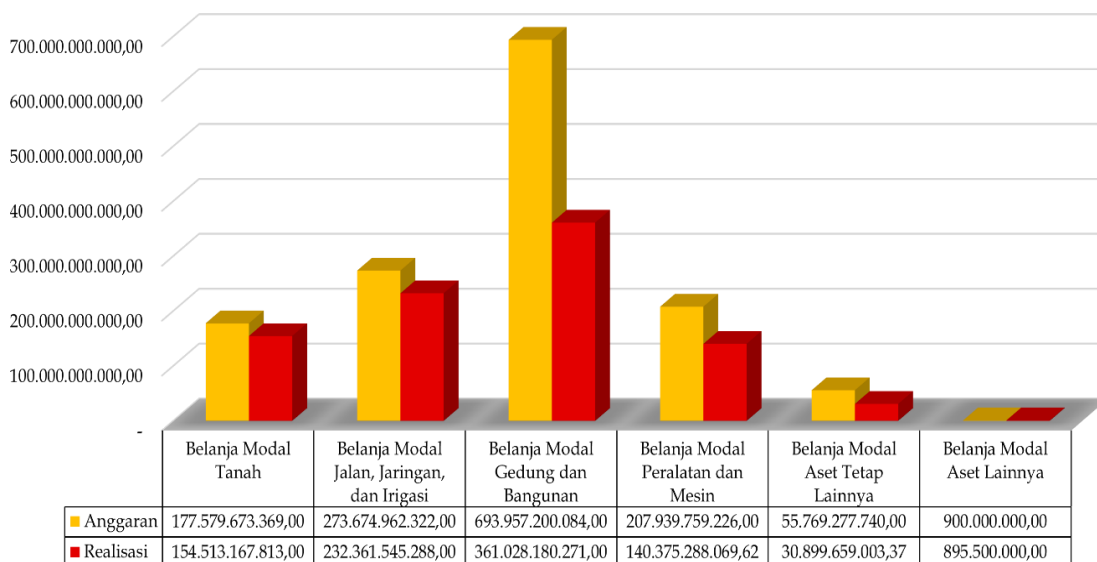
Berikut ini adalah Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	177.579.673.369,00	154.513.167.813,00	87,01	623.975.476.572,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.939.759.226,00	140.375.288.069,62	67,51	109.213.603.835,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	693.957.200.084,00	361.028.180.271,00	52,02	340.651.767.017,86
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.674.962.322,00	232.361.545.288,00	84,90	354.881.755.251,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.769.277.740,00	30.899.659.003,37	55,41	23.276.736.561,00
Belanja Modal Aset Lainnya	900.000.000,00	895.500.000,00	99,50	65.229.150,00
Jumlah	1.409.820.872.741,00	920.073.340.444,99	65,26	1.452.064.568.386,86

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp531.991.227.941,87 atau 36,64%. Komposisi realisasi Belanja Modal TA 2023 dan capaian realisasi Belanja Modal terhadap anggaran di TA 2023 digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 5.9 Komposisi Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023



Gambar 5.10 Capaian Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Berikut ini adalah Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	177.579.673.369,00	154.513.167.813,00	87,01	623.975.476.572,00
Belanja Modal Tanah Persil	174.983.773.369,00	152.116.297.257,00	86,93	464.442.414.150,00
Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	2.094.000.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	17.892.665.300,00	16.303.449.500,00	91,12	65.230.249.946,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	157.081.108.069,00	135.812.847.757,00	86,46	397.118.164.204,00
Belanja Modal Lapangan	2.595.900.000,00	2.396.870.556,00	92,33	159.533.062.422,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.545.900.000,00	2.396.870.556,00	94,15	132.533.371.572,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	50.000.000,00	0,00	0,00	26.999.690.850,00
Jumlah	177.579.673.369,00	154.513.167.813,00	87,01	623.975.476.572,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal Tanah TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp469.462.308.759,00 atau 75,24%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Tanah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal Tanah Persil lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022; dan
 - b. Capaian realisasi Belanja Modal Lapangan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	799.000.000,00	792.375.000,00	99,17	952.140.018,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	593.000.000,00	593.000.000,00	100,00	827.000.000,00
Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00	827.000.000,00
Belanja Modal Compacting Equipment	593.000.000,00	593.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	206.000.000,00	199.375.000,00	96,78	125.140.018,00
Belanja Modal Pompa	11.000.000,00	6.000.000,00	54,55	125.140.018,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	195.000.000,00	193.375.000,00	99,17	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	13.956.537.000,00	6.614.740.000,00	47,40	2.318.963.040,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	13.956.537.000,00	6.614.740.000,00	47,40	2.318.963.040,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.468.115.000,00	4.163.100.000,00	93,17	1.278.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	7.996.000.000,00	1.867.500.000,00	23,36	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.452.422.000,00	584.140.000,00	40,22	893.329.040,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.000.000,00	0,00	0,00	147.634.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	21.581.200,00	0,00	0,00	14.935.750,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	14.935.750,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	13.680.750,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	772.200,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	772.200,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	20.809.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	20.809.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	3.956.719.640,00	3.146.200.120,00	79,52	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	3.956.719.640,00	3.146.200.120,00	79,52	0,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	943.188.000,00	779.107.500,00	82,60	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	3.013.531.640,00	2.367.092.620,00	78,55	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.397.034.985,00	14.514.885.750,00	64,81	16.273.240.310,00
Belanja Modal Alat Kantor	2.349.669.760,00	1.466.621.070,00	62,42	3.801.300.122,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	900.700.000,00	470.457.000,00	52,23	173.330.550,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.448.969.760,00	996.164.070,00	68,75	3.627.969.572,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.485.164.225,00	12.698.314.680,00	65,17	12.259.136.242,00
Belanja Modal Mebel	15.200.493.925,00	9.983.599.087,00	65,68	5.863.483.600,00
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	497.835,00
Belanja Modal Alat Pembersih	12.999.600,00	12.700.000,00	97,70	937.973.500,00
Belanja Modal Alat Pendingin	2.627.744.500,00	2.033.704.750,00	77,39	2.039.246.734,00
Belanja Modal Alat Dapur	167.000.000,00	11.626.000,00	6,96	98.704.846,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.462.926.200,00	649.476.843,00	44,40	2.374.340.227,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	7.208.000,00	51,49	944.889.500,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	562.201.000,00	349.950.000,00	62,25	212.803.946,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	49.960.000,00	47.750.000,00	95,58	24.250.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	26.582.250,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	328.511.000,00	245.200.000,00	74,64	19.350.000,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	183.730.000,00	57.000.000,00	31,02	38.553.196,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	104.068.500,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.969.031.180,00	2.168.509.315,00	54,64	2.614.078.451,00
Belanja Modal Alat Studio	2.449.657.180,00	732.304.315,00	29,89	2.587.142.901,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	373.010.000,00	58.250.200,00	15,62	1.092.881.900,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	972.793.180,00	468.434.115,00	48,15	1.393.164.891,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	3.820.000,00	0,00	0,00	8.824.500,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	6.600.000,00	0,00	0,00	23.914.950,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.082.152.000,00	205.620.000,00	19,00	68.356.660,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	1.519.374.000,00	1.436.205.000,00	94,53	26.935.550,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	49.374.000,00	26.172.000,00	53,01	12.500.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	1.470.000.000,00	1.410.033.000,00	95,92	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.435.550,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	29.498.590.894,00	27.841.562.750,00	94,38	1.361.294.505,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	29.496.790.894,00	27.840.062.750,00	94,38	1.359.794.505,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	767.214.500,00	0,00	0,00	46.567.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	283.500.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	17.105.111.117,00	16.930.062.750,00	98,98	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.117.579.600,00	1.100.000.000,00	98,43	988.357.505,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	10.506.885.677,00	9.810.000.000,00	93,37	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	41.370.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33	1.500.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33	1.500.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	8.154.818.280,00	7.701.714.460,00	94,44	1.853.606.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	77.000.000,00	56.115.000,00	72,88	188.606.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	0,00	0,00	172.955.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	15.651.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	77.000.000,00	56.115.000,00	72,88	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	2.200.000.000,00	2.120.652.000,00	96,39	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	2.200.000.000,00	2.120.652.000,00	96,39	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	5.799.097.000,00	5.449.252.035,00	93,97	1.665.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	5.799.097.000,00	5.449.252.035,00	93,97	1.665.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00	7.169.250,00	89,62	0,00
Belanja Modal System/Power Supply	8.000.000,00	7.169.250,00	89,62	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	70.721.280,00	68.526.175,00	96,90	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	70.721.280,00	68.526.175,00	96,90	0,00
Belanja Modal Komputer	13.890.878.588,00	11.386.414.236,00	81,97	7.278.358.338,00
Belanja Modal Komputer Unit	11.168.056.074,00	9.649.532.100,00	86,40	3.520.044.981,00
Belanja Modal Personal Computer	11.043.056.074,00	9.534.557.100,00	86,34	3.503.321.981,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	125.000.000,00	114.975.000,00	91,98	16.723.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	2.722.822.514,00	1.736.882.136,00	63,79	3.758.313.357,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	15.531.200,00	15.200.000,00	97,87	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.839.338.000,00	1.170.198.917,00	63,62	1.242.376.297,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	90.000.000,00	86.094.000,00	95,66	1.995.481.650,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	777.953.314,00	465.389.219,00	59,82	520.455.410,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	272.176.000,00	3.663.000,00	1,35	0,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	272.176.000,00	3.663.000,00	1,35	0,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	272.176.000,00	3.663.000,00	1,35	0,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	70.000.000,00	65.000.000,00	92,86	0,00
Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	70.000.000,00	65.000.000,00	92,86	0,00
Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	70.000.000,00	65.000.000,00	92,86	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	132.611.600,00
Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	19.991.000,00
Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.991.000,00
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	112.620.600,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Air	0,00	0,00	0,00	112.620.600,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	19.892.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	19.892.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.892.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	868.507.750,00	820.213.000,00	94,44	222.523.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	868.507.750,00	820.213.000,00	94,44	222.523.000,00
Belanja Modal Rambu Bersuar	793.300.000,00	745.837.000,00	94,02	222.523.000,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	75.207.750,00	74.376.000,00	98,89	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	217.332.600,00	212.892.000,00	97,96	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	217.332.600,00	212.892.000,00	97,96	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	19.478.000,00	18.960.000,00	97,34	0,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	31.596.600,00	30.690.000,00	97,13	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	166.258.000,00	163.242.000,00	98,19	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.414.359.045,00	42.292.176.305,72	53,26	36.036.554.907,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.414.359.045,00	42.292.176.305,72	53,26	36.036.554.907,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.414.359.045,00	42.292.176.305,72	53,26	36.036.554.907,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	30.453.192.064,00	22.814.942.132,90	74,92	40.135.405.916,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	30.453.192.064,00	22.814.942.132,90	74,92	40.135.405.916,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	30.453.192.064,00	22.814.942.132,90	74,92	40.135.405.916,00
Jumlah	207.939.759.226,00	140.375.288.069,62	67,51	109.213.603.835,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp31.161.684.234,62 atau 28,53%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Besar lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Alat Besar Darat. Sedangkan peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Alat Bantu.
 - b. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Angkutan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
 - c. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 karena Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin, Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin, dan Belanja Modal Alat Ukur tidak direalisasikan.
 - d. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Pertanian lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan

realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Alat Pengolahan;

- e. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Alat Kantor. Sedangkan peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Alat Rumah Tangga dan Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- f. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Alat Studio. Sedangkan Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Alat Komunikasi;
- g. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- h. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir, Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah, Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika, dan Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup. Sedangkan penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
- i. Capaian realisasi Belanja Modal Komputer lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Komputer Unit. Sedangkan Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Peralatan Komputer;
- j. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika;
- k. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Pengeboran lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin;
- l. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian tidak ada, karena belanja tersebut tidak dianggarkan di TA 2023. Jadi, capaian realisasi TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 yang disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Sumur dan Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian;

- m. Capaian realisasi Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi tidak ada, karena belanja tersebut tidak dianggarkan di TA 2023. Jadi, capaian realisasi TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022;
 - n. Capaian realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;
 - o. Capaian realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022;
 - p. Capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022; dan
 - q. Capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batas bawah nilai perolehan (kapitalisasi) aset tetap, telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakomptabel sebesar Rp59.670.379.827,67. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	667.510.576.989,00	338.201.684.738,00	50,67	327.249.133.297,31
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	667.469.852.989,00	338.201.684.738,00	50,67	327.249.133.297,31
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17.903.225.571,00	10.803.279.418,00	60,34	6.580.026.590,74
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	781.000.000,00	565.602.720,00	72,42	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	42.987.419.313,00	40.342.043.563,00	93,85	152.216.745.870,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	276.702.700,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	224.331.417.300,00	139.700.646.922,00	62,27	60.360.100.735,57
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	712.000.000,00	606.265.853,00	85,15	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	189.447.800,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan	678.892.650,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.499.798.699,00	952.784.167,00	63,53	945.546.590,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00	79.288.547,00	99,11	1.172.878.560,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	372.520.595.046,00	140.622.358.452,00	37,75	104.622.218.625,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	579.323.950,00	178.925.972,00	30,89	105.214.800,00
Belanja Modal Taman	1.529.749.625,00	689.434.125,00	45,07	780.251.026,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.726.430.835,00	3.661.054.999,00	98,25	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40.724.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	40.724.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Monumen	5.798.522.446,00	3.870.101.325,00	66,74	0,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5.798.522.446,00	3.870.101.325,00	66,74	0,00
Belanja Modal Bangunan Peninggalan	5.798.522.446,00	3.870.101.325,00	66,74	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	198.910.000,00	99,46	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	198.910.000,00	99,46	0,00
Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	198.910.000,00	99,46	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	20.448.100.649,00	18.757.484.208,00	91,73	13.402.633.720,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	20.448.100.649,00	18.757.484.208,00	91,73	13.402.633.720,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	20.448.100.649,00	18.757.484.208,00	91,73	13.402.633.720,55
Jumlah	693.957.200.084,00	361.028.180.271,00	52,02	340.651.767.017,86

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp20.376.413.253,14 atau 5,98%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 karena Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal tidak direalisasikan. Namun realisasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Capaian realisasi Belanja Modal Monumen lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti;
 - c. Capaian realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas; dan

- d. Capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi, telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakomptabel sebesar Rp7.352.462.211,90. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	236.674.136.345,00	206.903.899.747,00	87,42	342.140.567.251,00
Belanja Modal Jalan	236.674.136.345,00	206.903.899.747,00	87,42	340.520.687.651,00
Belanja Modal Jalan Provinsi	157.256.682.296,00	133.423.115.226,00	84,84	20.127.665.000,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	79.417.454.049,00	73.480.784.521,00	92,52	320.393.022.651,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	1.619.879.600,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	1.619.879.600,00
Belanja Modal Bangunan Air	24.138.559.047,00	15.815.348.127,00	65,52	6.387.427.600,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	21.668.894.000,00	14.004.340.380,00	64,63	4.108.086.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	21.668.894.000,00	14.004.340.380,00	64,63	4.108.086.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.235.915.171,00	1.688.095.171,00	75,50	2.279.341.600,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.235.915.171,00	1.688.095.171,00	75,50	2.279.341.600,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	233.749.876,00	122.912.576,00	52,58	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	233.749.876,00	122.912.576,00	52,58	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Instalasi	2.009.773.420,00	1.547.831.790,00	77,02	1.871.286.650,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	77.475.000,00	70.037.550,00	90,40	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	77.475.000,00	70.037.550,00	90,40	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.229.679.930,00	1.171.606.250,00	95,28	1.834.785.150,00
Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.195.679.930,00	1.171.606.250,00	97,99	1.834.785.150,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	99.465.090,00	99.465.090,00	100,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	99.465.090,00	99.465.090,00	100,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Lain	403.153.400,00	206.722.900,00	51,28	36.501.500,00
Belanja Modal Instalasi Lain	403.153.400,00	206.722.900,00	51,28	36.501.500,00
Belanja Modal Jaringan	10.672.493.510,00	7.988.440.200,00	74,85	4.422.482.750,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	10.007.393.510,00	7.557.076.200,00	75,51	4.087.631.550,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	10.007.393.510,00	7.557.076.200,00	75,51	4.087.631.550,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	491.500.000,00	298.513.000,00	60,74	275.852.100,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	491.500.000,00	298.513.000,00	60,74	275.852.100,00
Belanja Modal Jaringan Telepon	173.600.000,00	132.851.000,00	76,53	58.999.100,00
Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	170.100.000,00	132.851.000,00	78,10	58.999.100,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	180.000.000,00	106.025.424,00	58,90	59.991.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	180.000.000,00	106.025.424,00	58,90	59.991.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	180.000.000,00	106.025.424,00	58,90	59.991.000,00
Jumlah	273.674.962.322,00	232.361.545.288,00	84,90	354.881.755.251,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp122.520.209.963,00 atau 34,52%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Jalan dan Belanja Modal Jembatan;
 - b. Capaian realisasi Belanja Modal Bangunan Air lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Bangunan Air Irigasi dan Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku. Sedangkan penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Capaian realisasi Belanja Modal Instalasi lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Instalasi Air Kotor. Sedangkan peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku, Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah, Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik, dan Belanja Modal Instalasi Lain;
 - d. Capaian realisasi Belanja Modal Jaringan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Jaringan Air Minum, Belanja Modal Jaringan Listrik, dan Belanja Modal Jaringan Telepon; dan
 - e. Capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	115.000.000,00	114.455.000,00	99,53	218.587.500,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	100.000.000,00	99.955.000,00	99,96	189.787.500,00
Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	157.800.000,00
Belanja Modal Lukisan	100.000.000,00	99.955.000,00	99,96	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	19.987.500,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
Belanja Modal Tanda Penghargaan	15.000.000,00	14.500.000,00	96,67	0,00
Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	15.000.000,00	14.500.000,00	96,67	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	557.328.000,00	56.827.989,00	10,20	717.009.683,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	557.328.000,00	56.827.989,00	10,20	717.009.683,00
Belanja Modal Software	157.328.000,00	56.827.989,00	36,12	441.030.483,00
Belanja Modal Kajian	400.000.000,00	0,00	0,00	275.979.200,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	52.942.906.030,00	28.780.994.900,37	54,36	21.776.916.439,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	52.942.906.030,00	28.780.994.900,37	54,36	21.776.916.439,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	52.942.906.030,00	28.780.994.900,37	54,36	21.776.916.439,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.079.043.710,00	1.947.381.114,00	93,67	564.222.939,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.079.043.710,00	1.947.381.114,00	93,67	564.222.939,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.079.043.710,00	1.947.381.114,00	93,67	564.222.939,00
Jumlah	55.769.277.740,00	30.899.659.003,37	55,41	23.276.736.561,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp7.622.922.442,37 atau 32,75%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan di TA 2023 dan TA 2022 tidak ada, karena Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak tidak direalisasikan dalam rangka efisiensi belanja;
 - b. Capaian realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan tidak dianggarkannya kembali Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan di TA 2023. Sedangkan, peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Tanda Penghargaan;
 - c. Capaian realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh tidak terealisasinya pengadaan akta notaris perjanjian kerjasama dengan PT NII senilai Rp400.000.000,00 pada kegiatan di UPTD PBMD karena pagunya berasal dari Belanja Modal yang digeser pada APBD perubahan sehingga waktu pelaksanaannya terbatas;
 - d. Capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022; dan
 - e. Capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi, telah dicatat sebagai Aset Tetap ekstrakomptabel sebesar Rp33.508.381.260,57. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini adalah Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	900.000.000,00	895.500.000,00	99,50	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	900.000.000,00	895.500.000,00	99,50	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	65.229.150,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	65.229.150,00
Jumlah	900.000.000,00	895.500.000,00	99,50	65.229.150,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp830.270.850,00 atau 1272,85%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - b. Capaian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya BLUD tidak ada, karena belanja tersebut tidak dianggarkan di TA 2023. Jadi, capaian realisasi TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022.
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 16*.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Berikut ini adalah Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03	4.759.779.107,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Tidak Terduga TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp4.424.920.893,54 atau 92,96%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tidak Terduga dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian realisasi Belanja Tidak Terduga lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Belanja Tidak Terduga direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Pada TA 2023 Belanja Tidak Terduga digunakan untuk melakukan hal-hal berikut:

 - a. Pengembalian sisa dana BOS ke RKUN yang sebelumnya disetorkan ke RKUD;
 - b. Pengembalian pendapatan tahun sebelumnya;
 - c. Pengembalian pendapatan tahun berjalan yang tidak bisa dilakukan melalui mekanisme restitusi di SIPD; dan

- d. Pelaksanaan bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk korban bencana/musibah.
2. Rincian Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada *Lampiran 17*.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Berikut ini adalah Belanja Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil	1.510.092.952.736,00	1.444.364.532.966,00	95,65	1.231.251.353.817,00
Belanja Bantuan Keuangan	522.374.803.508,00	285.161.996.258,00	54,59	269.469.777.473,00
Jumlah	2.032.467.756.244,00	1.729.526.529.224,00	85,09	1.500.721.131.290,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Transfer TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp228.805.397.934,00 atau 15,25%.

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Berikut ini adalah Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.510.092.952.736,00	1.444.364.532.966,00	95,65	1.231.251.353.817,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.269.962.832.697,00	1.214.417.693.582,00	95,63	1.040.748.655.648,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	240.130.120.039,00	229.946.839.384,00	95,76	190.502.698.169,00
Jumlah	1.510.092.952.736,00	1.444.364.532.966,00	95,65	1.231.251.353.817,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Bagi Hasil TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp213.113.179.149,00 atau 17,31%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bagi Hasil dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten dan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kota.

2. Pemerintah Provinsi Bali dalam menyalurkan Dana Transfer-Bagi Hasil Pajak Daerah didasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Tata Cara Belanja Bagi Hasil. Rincian kabupaten/kota penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 18*.

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini adalah Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	446.304.403.508,00	220.146.503.858,00	49,33	226.546.177.473,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	446.304.403.508,00	220.146.503.858,00	49,33	226.546.177.473,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	446.304.403.508,00	220.146.503.858,00	49,33	226.546.177.473,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.070.400.000,00	65.015.492.400,00	85,47	42.923.600.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.070.400.000,00	65.015.492.400,00	85,47	42.923.600.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	76.070.400.000,00	65.015.492.400,00	85,47	42.923.600.000,00
Jumlah	522.374.803.508,00	285.161.996.258,00	54,59	269.469.777.473,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp15.692.218.785,00 atau 5,82%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023. Demikian halnya dengan realisasi TA 2023, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah provinsi ke kabupaten/kota karena terdapat penghentian pembayaran belanja tersebut, mengingat posisi saldo Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke kabupaten/kota yang dihentikan pembayarannya telah diseleksi kembali untuk menjadi kewajiban pada tahun 2024; dan
 - b. Capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023, namun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Peningkatan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Provinsi Bali dalam menyalurkan Dana Transfer-Bantuan Keuangan didasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. Rincian kabupaten/kota dan desa penerima Bantuan Keuangan Khusus dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Bali baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Jumlah tersebut merupakan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	1.293.843.632.369,52
Pengeluaran Pembiayaan	395.788.065.929,00	404.445.999.643,00	102,19	100.000.000.000,00
Jumlah	683.933.187.191,00	4.517.390.982,37	0,66	1.193.843.632.369,52

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pembiayaan Daerah TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp1.189.280.913.086,25 atau 99,62%.

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini adalah Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	330.133.723.425,00	330.133.723.425,37	100,00	850.341.671.769,52
Pencairan Dana Cadangan	78.829.667.200,00	78.829.667.200,00	100,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	670.757.862.495,00	0,00	0,00	443.501.960.600,00
Jumlah	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	1.293.843.632.369,52

Tabel di atas menunjukkan bahwa Penerimaan Pembiayaan TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp884.880.241.744,15 atau 68,39%.

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada TA 2023 dan TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	343.472.539.850,00	453.037.799.939,28	131,90	(60.949.395.063,24)
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	351.281.600.703,00	351.281.600.703,00	100,00	(181.681.218.275,00)
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	3.610.089.009,00	3.720.489.009,00	103,06	1.806.811.691,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	147,00	373.354.547,20	253.982.685,17	0,73
Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	(11.419.150.009,00)	97.662.355.680,08	(855,25)	118.925.011.520,03
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(29.803.974.274,00)	(29.803.974.274,00)	100,00	(10.553.704.175,00)
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	(29.803.974.274,00)	(29.803.974.274,00)	100,00	(10.553.704.175,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(49.973.263.228,00)	(49.973.263.227,89)	100,00	(811.000.004,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	(49.973.263.228,00)	(49.973.263.227,89)	100,00	(811.000.004,00)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(756.498.039.400,00)	(756.498.307.593,95)	100,00	(710.000.268.193,95)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	(756.498.039.400,00)	(756.498.307.593,95)	100,00	(710.000.268.193,95)
Penghematan Belanja	775.465.501.366,00	747.002.955.823,94	96,33	1.632.656.039.205,71
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	293.104.845.302,00	264.452.846.760,46	90,22	358.402.206.129,92
Penghematan Belanja-Belanja Modal	322.568.104.742,00	322.757.557.741,89	100,06	896.396.986.105,20
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	3.089.096.264,00	3.089.096.264,00	100,00	77.615.012.819,00
Sisa Belanja Transfer	156.703.455.058,00	156.703.455.057,59	100,00	300.241.834.151,59
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	42.470.959.111,00	(38.631.487.242,01)	(90,96)	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	37.972.467.843,00	(73.900.592.971,03)	(194,62)	0,00
Sisa Dana BOS	4.498.491.268,00	35.269.105.729,02	784,02	0,00
Jumlah	330.133.723.425,00	330.133.723.425,37	100,00	850.341.671.769,52

Tabel di atas menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp520.162.620.043,25 atau 61,17%.

5.1.3.1.2. Pencairan Dana Cadangan

Berikut ini adalah Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pencairan Dana Cadangan	78.829.667.200,00	78.829.667.200,00	100,00	0,00
Jumlah	78.829.667.200,00	78.829.667.200,00	100,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencairan Dana Cadangan TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022. Penganggaran Dana Cadangan di TA 2023 tersebut ditujukan untuk mendanai Pemilukada Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Dana Cadangan telah dicairkan dengan bukti STS Nomor 0001/6.1.02.01.01.0001/BPKAD/2023.

5.1.3.1.3. Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini adalah Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan tidak direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	443.501.960.600,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	443.501.960.600,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	443.501.960.600,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	670.757.862.495,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	670.757.862.495,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	670.757.862.495,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	670.757.862.495,00	0,00	0,00	443.501.960.600,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Capaian realisasi Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat tidak ada, karena pinjaman tersebut tidak dianggarkan di TA 2023. Jadi, capaian realisasi TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022. Penurunan realisasi TA 2023 dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh adanya penurunan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang karena telah selesai ditransfer ke RKUD pada TA 2022. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah yang berasal dari Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian

Pinjaman Nomor PERJ-201/SMI/1221 Tentang Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020, ditentukan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pinjaman setinggi-tingginya Rp1.500.000.000.000,00 (Limit Pinjaman);
- 2) Jangka waktu pinjaman 96 (Sembilan puluh enam) bulan termasuk masa tenggang 24 (dua puluh empat) bulan. Masa tenggang dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali;
- 3) Masa pencairan pinjaman adalah sejak tanggal pencairan pertama pinjaman sampai dengan tanggal 30 Juni 2022; dan
- 4) Bunga dan biaya pinjaman. Bunga sebesar 0,00%. Biaya Pinjaman yang wajib dibayar:
 - a) Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185%
 - Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari limit pembayaran sebelum efektifnya perjanjian.
 - Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan.
 - b) Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayar saat pencairan tahap ketiga pinjaman atau sebelum tanggal terakhir masa pencairan.

Alokasi anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah dibagi pada 2 (dua) rekening yaitu:

- 1) Rekening Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang dengan anggaran sebesar Rp450.000.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp443.501.960.600,00 atau 98,56% pada pencairan tahap ke III pinjaman PEN tanggal 28 Oktober 2022. Sehingga total Pinjaman PEN yang terealisasi adalah Rp1.479.848.366.741,00; dan
- 2) Rekening Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah dengan anggaran sebesar Rp750.000.000.000,00 tidak terealisasi selama TA 2023. Sehingga menyebabkan realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah secara keseluruhan menjadi kecil yaitu sebesar 36,96%.

Karena terdapat dinamika yang berkembang dalam proses perencanaan fisik Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, maka Pemerintah Provinsi Bali mengajukan permohonan Adendum. Sampai dengan akhir TA 2023 Pemerintah Provinsi Bali telah mengajukan permohonan Adendum sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Adendum I

Berdasarkan Surat Nomor T.29.600/13814/CK/PUPRKIM tanggal 18 Oktober 2021 terdapat dua hal yang dimohonkan adendum yaitu terkait revisi KAK Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dan perpanjangan masa pencairan pinjaman (*Availability period*) sampai dengan paling lambat bulan Juni 2022. Permohonan adendum disetujui pada tanggal 24 Desember 2021 melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-201/SMI/1221 tentang Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 tanggal 28 Desember 2020;

2) Adendum II

Berdasarkan Surat Nomor T.29.600/8768/CK/PUPRKIM tanggal 27 Mei 2022, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan permohonan revisi KAK untuk perpanjangan waktu pencairan pinjaman sampai dengan 30 Oktober 2022. Permohonan adendum disetujui pada tanggal 12 Oktober 2022 melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-136/SMI/1022 tentang Perjanjian Perubahan Kedua terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 tanggal 28 Desember 2020; dan

3) Adendum III

Berdasarkan Surat Nomor T.29.600/8768/CK/PUPRKIM tanggal 27 Mei 2022, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan permohonan agar dapat memanfaatkan dana sisa hasil tender pinjaman yang bersumber dari dana sisa pengadaan lahan dan pematangan lahan untuk kegiatan perencanaan dan pematangan lahan lanjutan dari Pusat Kebudayaan Bali. Permohonan adendum disetujui pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-147/SMI/1022 tentang Perjanjian Perubahan Kedua terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 tanggal 28 Desember 2020.

- b. Capaian realisasi Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) tidak ada, karena Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang tidak direalisasikan, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Nomor 8004 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 yang menyatakan adanya penghematan belanja sehingga tidak perlu lagi melakukan pinjaman daerah.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini adalah Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	145.788.065.929,00	154.445.999.643,00	105,94	0,00
Jumlah	395.788.065.929,00	404.445.999.643,00	102,19	100.000.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Penerimaan pembiayaan TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp304.445.999.643,00 atau 304,45%.

5.1.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Berikut ini adalah Penyisihan Pendapatan untuk Dana Cadangan Pemilukada Tahun 2024 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Jumlah	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pembentukan Dana Cadangan TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 50,00%. Jumlah kenaikan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pembentukan dana Cadangan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama dilakukan pada TA 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 dan tahap kedua dilakukan pada TA 2023 sebesar Rp150.000.000.000,00. Rencana pencairan dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei untuk hibah pengamanan dan pada minggu pertama bulan Juni untuk hibah KPU.

5.1.3.2.2. Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini adalah Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan TA 2023. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Penyertaan Modal Daerah TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022. Rincian Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai berikut:

No.	Nama BUMD	Dasar Peraturan	Nilai
1	PT Bank BPD Bali	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 249/01-C/HK/2023, tanggal 20 Februari 2023	75.000.000.000,00
2	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 239/01-C/HK/2023 tanggal 15 februari 2023	15.000.000.000,00
3	Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 294/01-C/HK/2023 tanggal 28 februari 2023	10.000.000.000,00
Jumlah			100.000.000.000,00

5.1.3.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini adalah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	145.788.065.929,00	154.445.999.643,00	105,94	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	145.788.065.929,00	154.445.999.643,00	105,94	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	145.788.065.929,00	154.445.999.643,00	105,94	0,00
Jumlah	145.788.065.929,00	154.445.999.643,00	105,94	0,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TA 2023 karena terdapat pengembalian sisa dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp8.093.758.714,00 pada tanggal 27 Juni 2023 dan Rp21.893.734.253,00 pada tanggal 28 November 2023. Pembayaran cicilan utang bagian lancar PEN PT SMI dilakukan melalui pemotongan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari alokasi Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah Tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024. Pemotongan tersebut dimulai dari dari bulan Juli sampai dengan Desember TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Pengembalian sisa dana pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PERSERO)	8.093.758.714,00
2	Penyesuaian Pembayaran Cicilan PEN melalui Potongan DAU Bulan Juli 2023 yang diterima akhir bulan Juni 2023	20.743.084.446,00
3	Penyesuaian Pembayaran Cicilan PEN melalui Potongan DAU Bulan Agustus 2023 yang diterima akhir bulan Juli 2023	20.743.084.446,00
4	Penyesuaian Pembayaran Cicilan PEN melalui Potongan DAU Bulan September 2023 yang diterima akhir bulan Agustus 2023	20.743.084.446,00
5	Penyesuaian Pembayaran Cicilan PEN melalui Potongan DAU Bulan Oktober 2023 yang diterima akhir bulan September 2023	20.890.555.251,00

No	Uraian	Nilai
6	Penyesuaian Lanjutan Pembayaran Cicilan PEN melalui Potongan DAU Bulan Oktober 2023 yang diterima akhir bulan September 2023 (Pengembalian DAK Non Fisik)	(147.470.805,00)
7	Penyesuaian Pembayaran Cicilan PEN melalui Potongan DAU Bulan November 2023 yang diterima akhir bulan Oktober 2023	20.743.084.446,00
8	Pengembalian sisa dana PEN Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahap II kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PERSERO)	21.893.734.253,00
9	Penyesuaian Pembayaran Cicilan PEN melalui Potongan DAU Bulan Desember 2023 yang diterima akhir bulan November 2023	20.743.084.446,00
Jumlah		154.445.999.643,00

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi

Berikut ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi yang terealisasi TA 2022. Berikut rinciannya:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi	0,00	0,00	0,00	330.179.051.726,27

5.1.5 Koreksi SiLPA

Berikut ini adalah Koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya yang terealisasi TA 2022. Berikut rinciannya:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	(45.328.300,90)

Koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp45.328.300,90 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi saldo awal Kas Dana BOS *audited* sebesar Rp45.328.160,90 disebabkan oleh sisa dana BOS SMAN Satu Tejakula yang telah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 420/1044/IZIN C/DISPMPT tanggal 17 Maret 2020, namun masih dilaporkan menjadi bagian Kas Dana BOS per 31 Desember 2021. Sampai akhir tahun 2022 rekening Bendahara BOS SMAN 1 Tejakula belum ditutup dan sisa dana belum disetor ke kas negara seperti yang dijelaskan pada CaLK Laporan Arus Kas poin 5.5.8. Saldo Akhir Kas.
2. Koreksi saldo awal Kas Dana BOS *audited* sebesar Rp400,00 pada SMAN 10 Denpasar. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp197.922,00 yang seharusnya Rp197.522,00. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Kas Dana BOS antara sekolah dengan Dinas Dikpora Provinsi Bali.

3. Koreksi saldo awal Kas Dana BOS *audited* sebesar Rp260,00 pada SMKN 1 Bebandem. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp5.165.690,57 yang seharusnya Rp5.165.950,57. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Kas Dana BOS antara sekolah dengan Dinas Dikpora Provinsi Bali.

Penjelasan perbedaan ini juga dijelaskan pada Catatan atas LPSAL point 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dan poin 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berikut ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 dan TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Daerah	7.248.953.175.947,00	6.774.061.484.297,29	93,45	5.885.778.601.466,34
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.041.446.320.153,00	4.627.741.217.667,29	91,79	3.863.191.406.848,23
Pendapatan Transfer	2.152.312.055.794,00	2.141.120.289.130,00	99,48	2.017.662.417.846,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55.194.800.000,00	5.199.977.500,00	9,42	4.924.776.772,11
Belanja Daerah	7.932.886.363.138,00	6.607.098.684.698,10	83,29	6.749.443.182.109,59
Belanja Operasi	4.474.769.277.170,00	3.948.314.115.028,57	88,24	3.791.897.703.325,73
Belanja Modal	1.409.820.872.741,00	920.073.340.444,99	65,26	1.452.064.568.386,86
Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03	4.759.779.107,00
Belanja Transfer	2.032.467.756.244,00	1.729.526.529.224,00	85,09	1.500.721.131.290,00
Belanja Bagi Hasil	1.510.092.952.736,00	1.444.364.532.966,00	95,65	1.231.251.353.817,00
Belanja Bantuan Keuangan	522.374.803.508,00	285.161.996.258,00	54,59	269.469.777.473,00
Pembiayaan Daerah	683.933.187.191,00	4.517.390.982,37	0,66	1.193.843.632.369,52
Penerimaan Pembiayaan	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	1.293.843.632.369,52
Pengeluaran Pembiayaan	395.788.065.929,00	404.445.999.643,00	102,19	100.000.000.000,00
Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	(45.328.300,90)
Jumlah	0,00	171.480.190.581,56	0,00	330.133.723.425,37

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp171.480.190.581,56 dari SiLPA Terikat dan SiLPA NonTerikat yang diuraikan sebagai berikut :

Sisa SiLPA Terikat	Nilai
1. Sisa Dana DAK Fisik	33.061.201,00
2. Sisa Dana DAK Non Fisik yang terdiri dari :	36.758.022.138,71
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	7.540.825.755,71
b. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	392.239.311,00
c. Dana Tunjangan Profesi Guru	26.533.156.605,00
d. Dana Tambahan Penghasilan PNSD	704.250.000,00
e. Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	85.972.694,00
f. BOP Museum	272.774.001,00
g. Taman Budaya	40.221.894,00

h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	103.978.550,00
i. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.020.127.328,00
j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	64.476.000,00
Jumlah	36.791.083.339,71

SiLPA tersebut terdiri dari saldo akun-akun dibawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Uraian SiLPA	Nilai
1. Kas di Kas Daerah (Rekening Giro pada Bank BPD Bali)	93.261.463.025,33
2. Kas di BLUD:	65.789.692.069,52
a. Kas pada BLUD UPTD Rumah Sakit Bali Mandara	23.106.882.669,81
b. Kas pada BLUD UPTD RS Mata Bali Mandara	13.955.324.668,78
c. Kas pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa	9.421.039.081,34
d. Kas pada BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	4.803.618.256,49
e. Kas pada BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	4.820.767.557,36
f. Kas pada BLUD UPTD Balai Pelatihan dan Kesehatan Masyarakat	2.215.539.343,00
g. Kas pada BLUD UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4.199.692.447,04
h. Kas pada BLUD Balai Laboratorium Kesehatan	3.266.828.045,70
3. Kas di Bendahara Penerimaan	4.495.970.420,00
4. Kas Lainnya di Bendahara BOS SMA/SMK Negeri	7.933.065.066,71
Jumlah	171.480.190.581,56

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	330.133.723.425,37	850.341.671.769,52

Saldo anggaran lebih awal di atas merupakan saldo akhir Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	260.570.333.845,77	678.376.581.522,36
Kas di BLUD		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55
- Kas di BLUD UPTD Bapelkesmas	716.424.390,08	0,00
- Kas di BLUD UPTD PKSDM	2.593.434.150,53	0,00
Kas Dana BOS	12.776.669.413,05	22.220.121.170,03
Jumlah	330.133.723.425,37	850.341.671.769,52
Selisih dengan Saldo Awal Kas 2022	-	-

Saldo di atas merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 dan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali. Nilai saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan SiLPA pada tahun anggaran berkenaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	330.133.723.425,37	850.296.343.468,62

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023 dan 2022. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Tahun 2023 sama dengan SiLPA TA 2022.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	171.480.190.581,56	330.133.723.425,37

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2023 dan 2022. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berkenaan.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	(45.328.300,90)

Saldo tersebut adalah koreksi atas pengakuan SiLPA Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 dan TA 2022. Tidak terdapat koreksi SiLPA TA 2023. Koreksi SiLPA TA 2022 sejumlah Rp45.328.300,90 diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp45.328.160,90 disebabkan oleh sisa dana BOS SMAN Satu Tejakula yang telah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus No.420/1044/IZIN C/DISPMPPT tanggal 17 Maret 2020, namun masih dilaporkan menjadi bagian Kas BOS per 31 Desember 2021. Sampai akhir Tahun 2022, rekening Bendahara BOS SMAN Satu Tejakula belum ditutup dan sisa dana belum disetor ke kas negara.
2. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp400,00 pada SMAN 10 Denpasar. Pada saldo *audited* tahun 2021, sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp197.922,00 yang seharusnya Rp197.522,00. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Dinas Dikpora Provinsi Bali.
3. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp260,00 pada SMKN 1 Bebandem. Pada saldo *audited* tahun 2021, sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp5.165.690,57 yang seharusnya Rp5.165.950,57. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Dinas Dikpora Provinsi Bali.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Anggaran Lebih Akhir	171.480.190.581,56	330.133.723.425,37

Saldo Anggaran Lebih Akhir di atas diuraikan berdasarkan komponen kas terdiri dari:

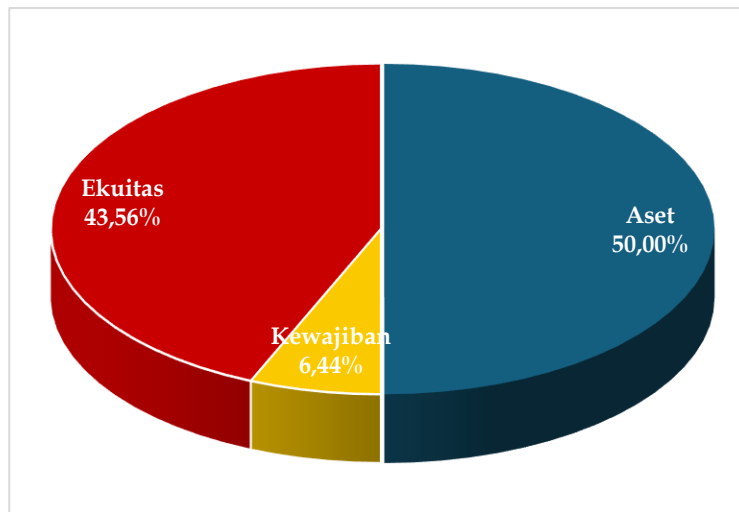
Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	93.261.463.025,33	260.570.333.845,77
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara	23.106.882.669,81	29.891.626.119,88
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	13.955.324.668,78	6.473.748.705,99
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	9.421.039.081,34	12.849.418.115,50
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	4.803.618.256,49	2.825.225.551,09
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	4.820.767.557,36	1.436.843.133,48
- Kas di BLUD UPTD BAPELKES	2.215.539.343,00	716.424.390,08
- Kas di BLUD UPTD PKSDM	4.199.692.447,04	2.593.434.150,53
- Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan	3.266.828.045,70	-
Kas di Bendahara Penerimaan	4.495.970.420,00	-
Kas Dana BOS	7.933.065.066,71	12.776.669.413,05

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Jumlah	171.480.190.581,56	330.133.723.425,37
Selisih dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir	-	-

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 sebesar Rp171.480.190.581,56 sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran pada poin **5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**.

5.3 Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.11 Komposisi Neraca Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Saldo Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(Penurunan)nya terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	822.663.146.998,27	560.861.122.073,85	261.802.024.924,42	46,68
Investasi Jangka Panjang	6.851.124.152.537,51	1.621.888.174.723,26	5.229.235.977.814,25	322,42
Aset Tetap	9.196.574.447.919,61	9.973.672.644.716,35	(777.098.196.796,74)	(7,79)
Properti Investasi	647.976.208.448,03	0,00	647.976.208.448,03	0,00
Dana Cadangan	173.517.943.404,98	100.517.945.205,54	72.999.998.199,44	72,62
Aset Lainnya	272.722.880.246,43	852.639.945.658,00	(579.917.065.411,57)	(68,01)
Jumlah	17.964.578.779.554,80	13.109.579.832.377,00	4.854.998.947.177,80	37,03

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Saldo Aset Lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	169.132.579.976,58	329.676.506.380,73	(160.543.926.404,15)	(48,70)
Piutang Pajak Daerah	52.151.207.987,00	49.755.902.471,00	2.395.305.516,00	4,81
Piutang Retribusi Daerah	156.460.000,00	232.621.000,00	(76.161.000,00)	(32,74)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	880.979.582.565,95	31.338.240.632,47	849.641.341.933,48	2711,20
Piutang Lainnya	19.397.418.583,00	40.568.111.707,00	(21.170.693.124,00)	(52,19)
Penyisihan Piutang	(441.486.542.337,58)	(16.574.488.835,69)	(424.912.053.501,89)	2563,65
Beban Dibayar Dimuka	471.686.083,46	510.373.969,85	(38.687.886,39)	(7,58)
Persediaan	141.860.754.139,86	125.353.854.748,49	16.506.899.391,37	13,17
Jumlah	822.663.146.998,27	560.861.122.073,85	261.802.024.924,42	46,68

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	90.752.218.379,35	260.052.388.640,23	(169.300.170.260,88)	(65,10)
Kas di Bendahara Penerimaan	4.495.970.420,00	0,00	4.495.970.420,00	0,00
Kas di BLUD	65.789.692.069,52	56.786.720.166,55	9.002.971.902,97	15,85
Kas Dana BOS	7.933.065.066,71	12.776.669.413,05	(4.843.604.346,34)	(37,91)
Kas Lainnya	161.634.041,00	60.728.160,90	100.905.880,10	166,16
Jumlah	169.132.579.976,58	329.676.506.380,73	(160.543.926.404,15)	(48,70)

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah Nomor 010.01.00.00000-1 di PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	90.752.218.379,35	260.052.388.640,23	(169.300.170.260,88)	(65,10)

Penjelasan:

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 menurut BKU Kas di Kas Daerah Rp90.752.218.379,35 sedangkan saldo menurut Rekening Koran sebesar Rp93.261.463.025,33 sehingga terdapat selisih Rp2.509.244.645,98. Selisih tersebut disebabkan oleh:

1. Saldo jasa giro dana cadangan yang dicatat pada BKU dana cadangan Rp2.347.610.604,98; dan
2. Reklasifikasi ke kas lainnya atas sisa Dana BOS sebesar Rp161.634.041,00.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta Kenaikan/(Penurunan) dan persentasenya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	4.495.970.420,00	0,00	4.495.970.420,00	0,00

Penjelasan:

1. Saldo sebesar Rp940.000,00 merupakan saldo pada rekening Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, dan Kawasan Permukiman berupa pendapatan retribusi pada tanggal 29 Desember 2023 yang dilimpahkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024; dan
2. Saldo di rekening perantara penerimaan retribusi daerah yang masih memiliki saldo sisa senilai Rp17.803.420,00 dan rekening perantara penerimaan Pajak Daerah yang masih memiliki saldo sisa senilai Rp4.478.167.000,00 pada 31 Desember 2023. Rincian atas saldo tersebut terdiri dari:

Nomor Rekening	Nilai (Rp)
010-093602329539	4.568.420,00
010-093602329717	13.235.000,00
010-093602329523	3.917.570.900,00
010-093602321041	560.596.100,00
Jumlah	4.495.970.420,00

5.3.1.1.1.3 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
RS Bali Mandara	23.106.882.669,81	29.891.626.119,88	(6.784.743.450,07)	(22,70)
RS Mata Bali Mandara	13.955.324.668,78	6.473.748.705,99	7.481.575.962,79	115,57
RS Jiwa Provinsi Bali	9.421.039.081,34	12.849.418.115,50	(3.428.379.034,16)	(26,68)
UPTD Pengelolaan Air Limbah	4.803.618.256,49	2.825.225.551,09	1.978.392.705,40	70,03
UPTD Pengelolaan Air Minum	4.820.767.557,36	1.436.843.133,48	3.383.924.423,88	253,51
UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4.199.692.447,04	2.593.434.150,53	1.606.258.296,54	61,94
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	2.215.539.343,00	716.424.390,08	1.499.114.952,92	209,25
UPTD Laboratorium Kesehatan	3.266.828.045,70	0,00	3.266.828.045,70	0,00
Jumlah	65.789.692.069,52	56.786.720.166,55	9.002.971.903,00	15,85

Penjelasan:

Saldo tersebut merupakan Kas di BLUD Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

1. RS Bali Mandara oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan nomor Laporan Auditor Independen Nomor 00058/2.1274/AU.5/11/0463-5/1/IV/2024 tanggal 16 April 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Rumah Sakit Jiwa oleh Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00030/2.1266/AU.5/11/1612-1/1/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
3. RS Mata Bali Mandara oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00020/2.1274/AU.5/11/0463-6/1/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
4. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00030/2.1274/AU.5/11/0463-2/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
5. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00029/2.1274/AU.5/11/0463-1/1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
6. UPTD Pengelolaan Air Limbah oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00011/2.1274/AU.5/11/0463-3/1/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
7. UPTD Pengelolaan Air Minum: Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00012/2.1274/AU.5/11/0463-3/1/III/2024 tanggal 21 Februari 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
8. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00018/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Rincian perhitungan saldo Kas di BLUD diuraikan sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Transfer ke Kasda	Saldo Akhir
1	BLUD RS Bali Mandara	29.891.626.119,88	133.430.115.570,58	135.214.859.020,65	5.000.000.000,00	23.106.882.669,81
2	BLUD RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99	86.053.305.409,69	73.571.729.446,90	5.000.000.000,00	13.955.324.668,78
3	BLUD RS Jiwa	12.849.418.115,50	24.803.122.179,49	23.231.501.213,65	5.000.000.000,00	9.421.039.081,34
4	BLUD UPTD. Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09	11.108.812.267,83	7.130.419.562,43	2.000.000.000,00	4.803.618.256,49
5	BLUD UPTD. Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48	29.399.231.492,88	25.015.307.069,00	1.000.000.000,00	4.820.767.557,36
6	BLUD UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2.593.434.150,53	11.414.985.947,51	9.808.727.651,00	0,00	4.199.692.447,04
7	BLUD UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	716.424.390,08	5.587.904.189,82	4.088.789.236,90	0,00	2.215.539.343,00
8	BLUD UPTD. Laboratorium Kesehatan	0,00	6.103.949.897,70	1.837.121.852,00	1.000.000.000,00	3.266.828.045,70

Rincian posisi saldo Kas di BLUD pada masing-masing rekening bank dapat dijabarkan sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Bank
BLUD RS Bali Mandara	Bank BPD Bali	010.01.05.01677-1	1.722.272.511,81
	Bank Mandiri	145-00-6669000-5	20.355.233.442,23
	Bank BRI	036801002471304	489.194.862,77
	Bank BNI	0652074797	481.589.312,00
	Kas Tunai Bendahara Penerimaan		58.592.541,00
	Total Saldo		
BLUD RS Mata Bali Mandara	Bank BPD Bali	010.01.05.02691-1	9.450.455.768,94
	Bank Mandiri	145-00-6005600-5	4.504.868.899,84
	Total Saldo		13.955.324.668,78
BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	Bank BPD Bali	020.01.05.00146-9	8.998.013.490,22
	Bank Mandiri	145-00-1297540-1	417.037.878,12
	Kas Tunai Bendahara Penerimaan		5.987.713,00
	Total Saldo		9.421.039.081,34
BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	Bank BPD Bali	010.01.05.01672-7	4.803.618.256,49
BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	Bank BPD Bali	010.05.01677-2	4.820.767.557,36
BLUD UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	Bank BPD Bali	010.01.05.00084-9	2.215.539.343,00
BLUD UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Bank BPD Bali	010.01.05.00081-3	4.199.692.447,04
BLUD UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	Bank BPD Bali	010.01.05.00085-0	3.266.828.045,70

5.3.1.1.1.4 Kas Dana BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS pada SLBN, SMAN dan SMKN milik Pemerintah Provinsi Bali pada 31 Desember 2023 dan 2022 beserta Kenaikan/(Penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Dana BOS	7.933.065.066,71	12.776.669.413,05	(4.843.604.346,34)	(37,91)

Penjelasan:

Saldo Kas Dana BOS tersebut tersebar pada 12 SLBN sebesar Rp125.325.202,64, 87 SMAN sebesar Rp5.323.509.266,12, dan 54 SMKN sebesar Rp2.484.230.597,95.

Rincian Kas Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta Kenaikan/(Penurunan) dan persentasenya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Lainnya	161.634.041,00	60.728.160,90	100.905.880,10	166,16

Penjelasan:

Kas Lainnya sebesar Rp161.634.041,00 disebabkan oleh reklasifikasi Kas di Kas Daerah menjadi Kas Lainnya karena terdapat pengembalian Sisa Dana BOS yang sudah diterima Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sampai dengan akhir tahun anggaran 2023. Berdasarkan Pasal 31 ayat (5) PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, pengembalian Sisa Dana BOS dilakukan oleh BUD setelah mendapat verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah seperti yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Neraca poin 5.5.9 Saldo Akhir Kas.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta Kenaikan/(Penurunan) dan persentasenya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	126.767.000,00	141.462.300,00	(14.695.300,00)	(10,39)
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	277.695.000,00	277.695.000,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.369.828.554,00	48.978.753.989,00	2.391.074.565,00	4,88
Piutang Pajak Air Permukaan	376.917.433,00	357.991.182,00	18.926.251,00	5,29
Jumlah	52.151.207.987,00	49.755.902.471,00	2.395.305.516,00	4,81

Penjelasan:

Saldo Awal Piutang Pajak Daerah per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp49.755.902.471,00. Dari jumlah tersebut terdapat mutasi penambahan piutang pajak sebesar Rp51.746.746.015,00 dan pengurangan piutang pajak karena adanya penghapusan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp14.695.300,00 dan pembayaran sebesar Rp49.336.745.171,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Adanya Keputusan Gubernur Bali Nomor 1062/04-E/HK/2023 tentang Penghapusan secara bersyarat piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali atas nama Sholehan dkk (2 debitur) sebesar Rp14.695.300,00;
2. Penambahan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) karena hasil penetapan pajak sebesar Rp51.369.828.555,00 dan pengurangan Piutang Pajak karena adanya pembayaran sebesar Rp48.978.753.989,00; dan
3. Penambahan Piutang Pajak Air Permukaan (AP) karena hasil penetapan pajak Rp376.917.460,00 dan pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp376.917.460,00.

Upaya-upaya untuk pengidentifikasian status kendaraan telah dilaksanakan, seperti kegiatan *door-to-door* yang merupakan pendataan ulang terhadap status kendaraan bermotor ke wajib pajak kendaraan

bermotor kemudian selanjutnya dihimbau untuk melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara lebih rinci Piutang Pajak Daerah dan rincian penghapusan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 21** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	75.961.000,00	(75.961.000,00)	(100,00)
Piutang Retribusi Jasa Usaha	148.935.000,00	149.135.000,00	(200.000,00)	(0,13)
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00
Jumlah	156.460.000,00	232.621.000,00	(76.161.000,00)	(32,74)

Penjelasan:

- Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan adanya reklas piutang dari Piutang Retribusi Jasa Umum ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, karena per 1 Januari 2023 sudah beralih status menjadi BLUD;
- Piutang Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa piutang sewa sebagian tanah dan gedung Eks BLPP Denpasar dengan *Focus Caribbean College*. *Focus Caribbean College* belum membayar sewa untuk tahun ke-5 yang seharusnya dilunasi paling lambat tanggal 28 Februari 2021, karena adanya pandemi Covid-19 sebesar Rp147.635.000,00; dan
- Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp7.525.000,00, merupakan Piutang dari Tahun 2015 yang terjadi karena dalam rentang waktu 1 April 2015-10 Juni 2015 belum menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2015. Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015, Retribusi Izin Perikanan mengalami pengembangan objek pemungutan yaitu SIPI dan penghapusan dua objek yaitu SIUP dan Tanda Pendaftaran Kembali SIUP. Perda baru yaitu Perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2015 berlaku mulai tanggal diundangkan 1 April 2015 namun baru diterima tanggal 10 Juni 2015 sehingga dalam kurun waktu 1 April 2015 - 10 Juni 2015 masih menggunakan tarif lama.
- Secara lebih rinci Piutang Retribusi Daerah dan rincian penghapusan Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 21** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	851.805.399.747,20	10.531.544.237,60	841.273.855.509,60	7.988,13
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga	0,00	4.747.549,12	(4.747.549,12)	(100,00)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	10.570.000,00	0,00	10.570.000,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	28.763.612.818,75	20.801.948.845,75	7.961.663.973,00	38,27
Jumlah	880.979.582.565,95	31.338.240.632,47	849.641.341.933,48	2.711,20

Penjelasan:

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:
 - a. Piutang PT Narenda Interpacific Indonesia (NII) per 31 Desember 2023 sebesar Rp843.666.096.797,83. Piutang tersebut terdiri dari:
 - 1) Piutang atas kontribusi tetap Triwulan II, III, dan IV TA 2022 sebesar Rp6.861.546.058,20 yaitu tagihan pokok sebesar Rp6.370.213.776,83; dan
 - 2) Piutang atas kontribusi tetap sesuai Perjanjian Kerja Sama baru Nomor 10 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp837.295.883.021,00 untuk masa 16 tahun 5 bulan sejak 1 Januari 2023 s.d 30 Mei 2039.

Sesuai Surat Direktur PT NII Nomor 040/NII.DIR-Pemprov/IX/2023 tanggal 1 September 2023 kepada Gubernur Bali perihal tanggapan atas surat Gubernur Nomor B.13.032/2457/UPTD.PBMD/BPKAD. Hasil penelusuran surat tersebut diketahui bahwa saat ini PT NII sedang dalam proses hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tertanggal 29 Agustus 2023. Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa terhadap utang yang sudah ada sebelum proses PKPU tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembayaran selama berlangsungnya proses PKPU, yang menyebabkan PT NII untuk sementara waktu tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Adanya kontribusi tambahan, kontribusi tetap, kontribusi pembagian keuntungan, kontribusi pembagian keuntungan pihak ketiga, dan kontribusi pembagian keuntungan tambahan yang belum dapat dihitung karena UPTD BMD BPKAD belum menerima Laporan Keuangan PT NII dan data pengalihan unit Tahun 2023 sebagai dasar menghitung kontribusi pembagian keuntungan, kontribusi pembagian keuntungan pihak ketiga dan kontribusi pembagian keuntungan tambahan. Sehingga Pemerintah Provinsi Bali tidak dapat menyajikan Piutang dan tidak dapat melakukan penagihan.
 - b. Piutang hasil sewa BMD pada Dinas Kebudayaan adalah piutang sewa *basement* oleh PT Kreasi Bumi Nusantara pada UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali sebesar Rp593.654.005,00. Penurunan nilai piutang disebabkan karena adanya koreksi nilai piutang sebesar Rp13.650.382,00
 - c. Piutang hasil sewa BMD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.054.316.663,00 berupa sewa tanah dan sewa rumah dinas.
2. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp400.000.000,00 merupakan piutang yang timbul karena adanya Perjanjian Kerja Sama antara UPTD. Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Provinsi Bali dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/*Indonesia Tourism Development* (ITDC) tentang Pembangunan Strategis yang tidak dapat dihindari berupa pemanfaatan Kawasan Tahura Ngurah Rai untuk Lagoon dan *Sustainable Utilities Center*;
3. Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp10.570.000,00 merupakan piutang yang timbul karena adanya kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar daerah tahun 2023 pada UPTD PAM;
4. Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp28.763.612.818,75 terdiri dari:
 - a. Reklas Piutang dari Piutang Retribusi Jasa Umum ke Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp75.961.000,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, karena per 1 Januari 2023 sudah beralih status menjadi BLUD;

- b. Penambahan Piutang baru pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp22.335.000,00, Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebesar Rp62.282.761.920,00, Rumah Sakit Bali Mandara sebesar Rp14.679.346.020,00, RS Jiwa sebesar Rp1.995.906.518,00, UPTD PAL sebesar Rp1.999.615.000,00 dan UPTD PAM sebesar Rp3.202.211.482,00;
- c. Pelunasan Piutang pada RS Mata Bali Mandara sebesar Rp61.138.268.120,00, Rumah Sakit Bali Mandara sebesar Rp8.681.232.844,00, RS Jiwa sebesar Rp1.902.352.783,00, UPTD PAL sebesar Rp2.109.275.000,00 dan UPTD PAM sebesar Rp2.415.615.220,00;

Secara lebih rinci Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan rincian penghapusan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 21** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.5 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.727.104.636,00	3.807.604.636,00	(80.500.000,00)	(2,11)
Uang Muka	15.670.313.947,00	36.760.507.071,00	(21.090.193.124,00)	(57,37)
Jumlah	19.397.418.583,00	40.568.111.707,00	(21.170.693.124,00)	(52,19)

Secara lebih rinci Piutang Lainnya dan rincian penghapusan Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 21** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

5.3.1.1.5.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Bendahara yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.727.104.636,00	3.807.604.636,00	(80.500.000,00)	(2,11)

Penjelasan:

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut, merupakan kasus kas tekor di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai Tuntutan Perbendaharaan sesuai SK BPK RI Nomor 10.TP.07-2018/VIII/2018.SKP dan SK BPK RI Nomor 09.TP.07-2018/VIII/2018.SKP tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp4.100.211.518,00 dan telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.373.106.882,00.

Terhadap kasus kas tekor tersebut, telah ditetapkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps dan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps yang antara lain memuat:

- 1 Putusan pidana penjara terhadap terdakwa yang merupakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2004; dan
- 2 Putusan untuk membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara.

Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara sebagai pelaksanaan sanksi pidana, sedangkan untuk pembayaran uang pengganti kerugian masih dilakukan pemotongan uang tunjangan pensiun dan gaji pensiun sambil menunggu proses sita dan lelang harta oleh jaksa.

5.3.1.1.5.2 Uang Muka

Saldo uang muka per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Uang Muka	15.670.313.947,00	36.760.507.071,00	(21.090.193.124,00)	(57,37)

Saldo tersebut merupakan uang muka pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika dalam rangka pengadaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum pada Kegiatan Pengelolaan *e-Government* di lingkup pemerintah daerah provinsi pada Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.

No.	Tanggal	Termin	Nomor SP2D	Nilai (Rp)
1	27 April 2023	IV	22.00/04.0/000140/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.02/4/2023	2.125.216.815,00
2	27 April 2023	V	22.00/04.0/000141/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.02/4/2023	2.125.216.815,00
3	16 Juni 2023	VI	22.00/04.0/000229/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.03/6/2023	2.125.216.815,00
4	23 Agustus 2023	VII	22.00/04.0/000346/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.04/8/2023	2.125.216.815,00
5	23 Agustus 2023	VIII	22.00/04.0/000347/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.04/8/2023	2.125.216.815,00
6	30 Oktober 2023	IX	22.00/04.0/000440/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.04/10/2023	2.125.216.815,00
7	17 Nopember 2023	X	22.00/04.0/000483/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.05/11/2023	2.125.216.815,00
8	12 Desember 2023	XI	22.00/04.0/000543/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.05/12/2023	2.125.216.815,00
9	22 Desember 2023	XII	22.00/04.0/000584/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.05/12/2023	2.125.216.815,00
10	22 Desember 2023	XIII	22.00/04.0/000714/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/P.05/12/2023	1.331.420.577,00
Jumlah				20.458.371.912,00

Penjelasan:

Penurunan saldo uang muka sebesar Rp21.090.193.124,00 disebabkan oleh pembayaran termin di atas sebesar Rp20.458.371.912,00 dan penyesuaian PPN atas Uang Muka Tahun 2022 sebesar Rp631.821.215,00.

5.3.1.1.6 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pendapatan	(437.681.086.131,84)	(12.583.081.664,33)	(425.098.004.467,51)	3.378,33
- Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(483.147.529,94)	(485.306.825,86)	2.159.295,78	(0,44)
- Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(155.166.500,00)	(188.182.600,00)	33.016.100,00	(17,54)
- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(437.042.772.101,90)	(11.909.592.238,47)	(425.133.179.863,43)	3.569,67
Penyisihan Piutang Lainnya	(3.805.456.205,74)	(3.991.407.171,36)	185.950.965,62	(4,66)
- Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(3.727.104.636,00)	(3.807.604.636,00)	80.500.000,00	(2,11)
- Penyisihan Uang Muka	(78.351.569,74)	(183.802.535,36)	105.450.965,62	(57,37)
Jumlah	(441.486.542.337,58)	(16.574.488.835,69)	(424.912.053.501,89)	2.563,65

Penjelasan:

1. Penurunan penyisihan Piutang Pajak Daerah disebabkan karena adanya penghapusan Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp14.695.300,00 sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 1062/04-E/HK/2023 tanggal 29 Desember 2023;
2. Penurunan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah disebabkan karena adanya pelunasan piutang retribusi sebesar Rp33.016.100,00; dan
3. Kenaikan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah disebabkan karena adanya penambahan Piutang Baru pada PT NII;
4. Penurunan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disebabkan karena adanya pembayaran piutang sebesar Rp80.500.000,00; dan
5. Penurunan Penyisihan Uang Muka disebabkan karena adanya pembayaran uang muka pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika sebesar Rp105.450.965,62.

Rincian piutang dan penyisihan piutang dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

5.3.1.1.7 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	471.686.083,46	510.373.969,85	(38.687.886,39)	(7,58)

Penjelasan:

1. Saldo Beban Jasa Asuransi Dibayar Dimuka yang belum jatuh tempo pada BPKAD Provinsi Bali berupa Asuransi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp471.684.083,46 yang berlaku dari tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 11 Juni 2024 (365 hari) dengan nilai sebesar Rp1.069.345.903,50 sesuai dokumen B.13.027/1582/UPTD.PBMD/BPKAD.
2. Setoran kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar Rp2.000,00.

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

5.3.1.1.8 Persediaan

Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Barang Pakai Habis	141.743.368.069,26	125.226.706.702,49	16.516.661.366,77	13,19
1	Bahan	26.310.844.945,54	28.023.553.054,28	(1.712.708.108,74)	(6,11)
2	Suku Cadang	90.696.863,00	87.938.943,80	2.757.919,20	3,14
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	14.408.603.055,36	15.120.020.779,03	(711.417.723,67)	(4,71)
4	Obat-obatan	19.864.729.836,58	6.295.392.087,98	13.569.337.748,60	215,54
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	74.899.252.962,53	70.530.143.618,56	4.369.109.343,97	6,19
6	Natura dan Pakan	254.217.505,50	179.300.544,18	74.916.961,32	41,78
7	Persediaan Penelitian	2.371.188.255,75	2.006.090.376,66	365.097.879,09	18,20
8	Persediaan dalam Proses	3.543.834.645,00	2.984.267.298,00	559.567.347,00	18,75

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Barang Tak Habis Pakai	117.386.070,60	127.148.046,00	(9.761.975,40)	(7,68)
1	Komponen	117.386.070,60	127.148.046,00	(9.761.975,40)	(7,68)
	Jumlah	141.860.754.139,86	125.353.854.748,49	16.506.899.391,37	13,17

Rincian daftar masing-masing jenis Persediaan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 23*.

Penjelasan:

Persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas pada akhir Tahun yang didokumentasikan dalam berita acara *stock opname*. Selain itu terdapat persediaan kedaluwarsa, dalam keadaan rusak dan tidak berlaku dengan rincian sebagai berikut:

1. Persediaan Kedaluwarsa

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kedaluwarsa (*expired*) dikeluarkan dari akun persediaan dengan cara mendebit RK PPKD dan mengkredit beban persediaan berdasarkan berita acara *opname* persediaan atau laporan mutasi persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar persediaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Persediaan kedaluwarsa tercatat pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali senilai Rp29.846.968,25, Rumah Sakit Mata Bali Mandara senilai Rp4.066.556,89, Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara senilai Rp248.093.193,00, dan UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional senilai Rp2.833.392.947,62 dengan rincian persediaan kedaluwarsa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Saldo (Rp)
1	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Bahan Lainnya APBD	1.254.770,00
		Obat-Obatan APBD	28.592.198,25
2	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Bahan Lainnya BLUD	1.915.150,69
		Obat-obatan BLUD	2.151.406,20
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara	Bahan Lainnya BLUD	49.279.667,32
		Obat-obatan BLUD	198.813.525,68
4	UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional	Bahan Lainnya APBD	26.107.872,12
		Obat-obatan APBD	68.738.134,00
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.738.546.941,50
	Jumlah		3.115.399.665,76

2. Persediaan Barang Kuasi

Persediaan barang kuasi berupa meterai Rp3.000 dan Rp6.000 tercatat berdasarkan *opname* persediaan per 31 Desember 2023 pada 10 (sepuluh) perangkat daerah untuk meterai Rp3.000 dan 8 (delapan) perangkat daerah untuk meterai Rp6.000 sejumlah Rp88.968.050,26, di antaranya:

Perangkat Daerah	Rp3000		Rp6000	
	Lembar / Pcs	Total	Lembar / Pcs	Total
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	531	1.551.050,26	1372	8.232.000,00
Dinas Kesehatan	587	1.761.000	6.578	39.468.000
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	129	387.000	129	774.000

Perangkat Daerah	Rp3000		Rp6000	
	Lembar / Pcs	Total	Lembar / Pcs	Total
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.251	11.040.000,00	2.347	14.076.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	135	405.000,00	0	0,00
Dinas Pariwisata	48	144.000,00	50	300.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	966	2.904.000,00	0	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	188	564.000,00	132	792.000,00
Sekretariat Daerah	41	123.000,00	152	912.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	357	1.071.000,00	744	4.464.000,00
Jumlah	7.233	19.950.050,26	11.504	69.018.000,00

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.851.124.152.537,51	1.621.888.174.723,26	5.229.235.977.814,25	322,42
1. Penyertaan Modal kepada BUMD				
a. Perumda Kerta Bali Saguna	101.999.149.613,50	101.197.433.708,50	801.715.905,00	0,79
b. PT BPD Bali	1.400.904.637.647,77	1.222.082.447.471,49	178.822.190.176,28	14,63
c. PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	191.441.956.249,81	155.532.342.759,70	35.909.613.490,11	23,09
d. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali	5.004.744.704.585,27	0,00	5.004.744.704.585,27	0,00
e. Perumda Kerthi Bali Santhi	7.938.249.959,00	0,00	7.938.249.959,00	0,00
Jumlah Penyertaan Modal BUMD	6.707.028.698.055,35	1.478.812.223.939,69	5.228.216.474.115,66	353,54
2. Penyertaan Modal kepada BUMN				
a. PT Rumah Sakit Puri Raharja	42.945.454.482,16	41.925.950.783,57	1.019.503.698,59	2,43
b. PT Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00
c. PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Penyertaan Modal BUMN	144.095.454.482,16	143.075.950.783,57	1.019.503.698,59	0,71
Jumlah	6.851.124.152.537,51	1.621.888.174.723,26	5.229.235.977.814,25	322,42

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Perumda Kerta Bali Saguna

Saldo Penyertaan Modal pada Perumda Kerta Bali Saguna per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perumda Kerta Bali Saguna	101.999.149.613,50	101.197.433.708,50	801.715.905,00	0,79

Penjelasan:

Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar **100,00%**. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan penambahan/pengurangan nilai Tahun 2022 dari tahun lalu sesuai Laporan Rugi Laba Tahun 2023. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Laporan Nomor 00017/3.0225/AU.2/05/1756-1/1/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Pengecualian disebabkan oleh penghitungan investasi yang tidak menggunakan metode ekuitas.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2023:

Modal Disetor	5.282.769.658,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian Pemprov. Bali	95.914.664.050,50
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	1.132.909.585,00
Deviden yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2022	(331.193.680,00)
Jumlah	101.999.149.613,50

2. PT BPD Bali

Saldo Penyertaan Modal pada PT BPD Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT BPD Bali	1.400.904.637.647,77	1.222.082.447.471,49	178.822.190.176,28	14,63

Penjelasan:

Nilai penyertaan modal pada PT BPD Bali disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT BPD Bali sebesar 35,11%. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan Laporan Nomor 00001/2.1127/AU.1/07/0336-1/1/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Nilai penyertaan modal pada PT BPD Bali Tahun 2023 diperoleh dari perhitungan persentase kepemilikan dari Laba PT BPD Bali Tahun 2022 (*audited*) dikurangi dengan dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2022. Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penambahan penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 249/01-C/HK/2023 pada tanggal 20 Pebruari 2023.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT BPD Bali Tahun 2023:

Modal Disetor	719.912.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	577.170.447.471,49
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	739.574.347.182,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(479.909.793.886,40)
Dividen yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2022	(155.842.363.119,32)
Jumlah	1.400.904.637.647,77

3. Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi

Saldo Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perumda Kerthi Bali Santhi	7.938.249.959,00	0,00	7.938.249.959,00	0,00

Penjelasan:

Perumda Kerthi Bali Santhi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022, Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara professional, akuntabel dan transparan. Nilai penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perumda sebesar **100,00%**. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00005/2.1266/AU.2/05/1612-1/1/II/2024 tanggal 5 Pebruari 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada Perumda Kerthi Bali Santhi Tahun 2023:

Modal Disetor	10.000.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	0,00
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(2.061.750.041,00)
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	0,00
Dividen yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2022	0,00
Jumlah	7.938.249.959,00

4. PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali

Saldo Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	191.441.956.249,81	155.532.342.759,70	35.909.613.490,11	23,09

Penjelasan:

Nilai penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT **Penjamin** Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar **90,48%**. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba Tahun 2023 sesuai Laporan Laba (Rugi) *Unaudited* 2023 dan telah dikurangi nilai dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2022 sesuai penyetoran tanggal 11 April 2023. Pada Tahun 2023,

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penambahan penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Laporan Nomor 00005/3.0225/AU.1/09/1756-1/1/II/2024 tanggal 19 Pebruari 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali Tahun 2023:

Modal Disetor	167.846.200.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu	20.532.342.759,70
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	4.819.799.022,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(458.844.866,89)
Dividen yang dibagikan atas laba Tahun Buku 2022	(1.297.540.665,00)
Jumlah	191.441.956.249,81

5. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali

Saldo Penyertaan Modal pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perseroda Pusat Kebudayaan Bali	5.004.744.704.585,27	0,00	5.004.744.704.585,27	0,00

Penjelasan:

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pusat kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan; Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (*Central Business District/CBD*); Pelabuhan Penyebrangan dan Marina; *Meeting Incentive Convention and Exhibiton (MICE)*; Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (*Transit Oriented Development/TOD*); dan Wahana Wisata Alam di atur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Pemerintah Provinsi Bali melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda berupa inbreng atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali.

5.3.1.2.1.2. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. PT Rumah Sakit Puri Raharja

Saldo Penyertaan Modal pada PT Rumah Sakit Puri Raharja per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beserta Kenaikan/(Penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Rumah Sakit Puri Raharja	42.945.454.482,16	41.925.950.783,57	1.019.503.698,59	2,43

Penjelasan:

Nilai penyertaan modal pada PT Rumah Sakit Puri Raharja disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT Rumah Sakit Puri Raharja sebesar 58,24%. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT Rumah Sakit Puri Raharja

Tahun 2023 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba Tahun 2023 sesuai Laporan Rugi Laba dan telah dikurangi nilai dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2022 sesuai pembagian dividen Tahun Anggaran 2023 tertanggal 5 Juni 2023. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Nomor 00014/2.1274/AU.2/05/0463-3/1/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Rumah Sakit Puri Raharja Tahun 2023:

Modal Disetor	8.736.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu	33.189.950.783,57
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	2.527.534.582,05
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(1.061.564.524,46)
Dividen yang dibagikan atas laba Tahun Buku 2022	(446.466.359,00)
Jumlah	42.945.454.482,16

2. PT Asuransi Bangun Askrida

Saldo Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Nilai penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar 0,39%. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan Laporan Nomor 00060/3.0260/AU.1/08/1660-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

3. PT Jasa Marga Bali Tol

Saldo Penyertaan Modal pada PT Jasa Marga Bali Tol per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Nilai Penyertaan Modal pada PT Jasa Marga Bali Tol disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT Jasa Marga Bali Tol sebesar 8,01%. Nilai Penyertaan Modal pada PT Jasa Marga Bali Tol yang disajikan sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 yang dikeluarkan berdasarkan Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporan Nomor 00121/2.1030/AU.1/06/0181-2/1/II/2024 tanggal 16 Pebruari 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Rincian daftar Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada *Lampiran 24*.

5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31

Desember 2023, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	4.907.796.884.852,40	6.002.433.873.184,76	(1.094.636.988.332,36)	(18,24)
Peralatan dan Mesin	2.046.115.176.574,25	1.903.061.497.591,23	143.053.678.983,02	7,52
Gedung dan Bangunan	3.208.051.168.977,71	2.802.017.384.613,55	406.033.784.364,16	14,49
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.476.544.508.140,82	3.439.564.896.158,92	36.979.611.981,90	1,08
Aset Tetap Lainnya	83.879.383.673,69	71.537.786.207,25	12.341.597.466,44	17,25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	266.126.280.404,04	119.528.622.700,55	146.597.657.703,49	122,65
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.791.938.954.703,30)	(4.364.471.415.739,91)	(427.467.538.963,39)	9,79
Jumlah	9.196.574.447.919,61	9.973.672.644.716,35	(777.098.196.796,74)	(7,79)

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023, sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	6.002.433.873.184,76	5.134.800.321.481,19	867.633.551.703,57	16,90
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Belanja Modal	154.513.167.813,00	623.975.476.572,00	(469.462.308.759,00)	(75,24)
- Penerimaan Hibah	51.789.529.773,00	80.740.281.393,00	(28.950.751.620,00)	(35,86)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	308.518.827.650,00	0,00	308.518.827.650,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	38.225.315.345,00	66.713.118.818,00	(28.487.803.473,00)	(42,70)
- Pembayaran Piutang	0,00	88.430.526.213,00	(88.430.526.213,00)	(100,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	216.820.100.358,00	373.117.331.835,00	(156.297.231.477,00)	(41,89)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	1.263.804.763.540,00	163.847.789.333,36	1.099.956.974.206,64	671,33
Jumlah Mutasi Tambah	2.033.671.704.479,00	1.396.824.524.164,36	636.847.180.314,64	45,59
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Penghapusan	(1.174.708.731.765,00)	0,00	(1.174.708.731.765,00)	0,00
- Pengeluaran Hibah	(131.524.654.938,36)	(258.347.573.443,43)	126.822.918.505,07	(49,09)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(178.545.138.200,00)	(3.698.008.000,00)	(174.847.130.200,00)	4.728,14
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(95.687.180.400,00)	(54.963.405.899,00)	(40.723.774.501,00)	74,09
- Reklasifikasi ke Properti Investasi	(42.088.105.050,00)	0,00	(42.088.105.050,00)	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(241.950.118.918,00)	(48.334.195.785,00)	(193.615.923.133,00)	400,58
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(1.263.804.763.540,00)	(163.847.789.333,36)	(1.099.956.974.206,64)	671,33
Jumlah Mutasi Kurang	(3.128.308.692.811,36)	(529.190.972.460,79)	(2.599.117.720.350,57)	491,15
Saldo Akhir	4.907.796.884.852,40	6.002.433.873.184,76	(1.094.636.988.332,36)	(18,24)

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing–masing perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang pada Tanah antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

1. Terdapat Penerimaan Hibah pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp51.252.600.000,00 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan;
2. Terdapat Koreksi Pencatatan Saldo Awal pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp129.588.134.446,00 diantaranya berupa Tanah Untuk Jalan Provinsi dan Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya yang dikarenakan adanya perhitungan ulang beserta penerbitan sertifikat.

Mutasi Kurang

1. Terdapat Penghapusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.105.369.731.765,00 yang dihapus dikarenakan telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, yaitu berupa Tanah Bangunan Gedung Kesenian;
2. Terdapat Pengeluaran Hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 131.524.654.938,00 diantaranya berupa Tanah Tegalan dan Tanah Sawah Irigasi pada Kantor Dinas Pertanian, BPP Kecamatan Denpasar Timur;
3. Terdapat Koreksi Pencatatan Saldo Awal pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp4.179.449.750,00 diantaranya karena ada pencatatan ganda yang berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Tanah Usaha.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini:

1. Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali melakukan Belanja Modal Tanah sebesar Rp154.513.167.813,00, tercatat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digunakan untuk pembelian tanah pembangunan infrastruktur perlindungan kawasan suci Besakih, pengembangan Pusat Kebudayaan dan pembangunan jalan dan jembatan pada ruas jalan Provinsi SP Buruan, Senganan, Pacung Bali, sebesar Rp144.552.426.344,00 dan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk Pembangunan Tower di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebesar Rp9.960.741.469,00. Terjadi pengurangan nilai signifikan disebabkan adanya penyertaan modal pada PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) berupa 70 bidang tanah dengan nilai Rp1.105.369.731.765
2. Dari saldo tersebut terdapat tanah yang disewakan dan dipinjamkan sebagian dari keseluruhan luasnya, masih tercatat di Aset Tetap. Daftar tanah yang disewakan dan dipinjamkan sebagian dari keseluruhan luasnya dapat dilihat pada **Lampiran 26**.
3. Sebanyak 595 Bidang Tanah yang belum bersertifikat terdiri dari 78 bidang tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 504 bidang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 10 bidang tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana dan Desa, 2 bidang tercatat di Dinas Kelautan Dan Perikanan, dan 1 bidang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
4. Pemerintah Provinsi Bali memiliki permasalahan terkait dengan Aset Tetap Tanah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Tanah Eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran**, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m² (246,5 Ha). Tanah tersebut diklaim oleh PT M selaku pemegang HGU Nomor 1 Desa Pemuteran yang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, hasil dari Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Bali menang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 591PK/Pdt/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 yang sudah *inkracht*. Proses selanjutnya melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Singaraja yang difasilitasi oleh Biro Hukum. Pada tanggal 10 Juni 2021 Perbekel Pemuteran telah membentuk tim melalui Keputusan Perbekel Pemuteran Nomor 140/25/VI/2021 disebut dengan Tim Tiga Belas, selanjutnya Tim tersebut mohon audiensi dengan Gubernur Bali melalui Surat Nomor 02/TIM PKPT/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021. Permohonan audiensi difasilitasi melalui rapat tanggal 17 Desember 2021 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dengan hasil:
- 1) Pemerintah Provinsi Bali bersama Tim Tiga Belas sepakat untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tanah eks HGU Nomor 1 / Desa Pemuteran secara damai.
 - 2) Tim Tiga Belas akan segera menyiapkan data masyarakat yang bertempat tinggal dan/atau menggarap tanah tersebut sesuai permintaan Pemerintah Provinsi Bali, dan akan segera menyampaikannya bersama surat permohonan kepada Gubernur Bali;
 - 3) Tim Tiga Belas siap mensosialisasikan kepada masyarakat agar ikut mendukung dan kooperatif jika dilaksanakan pendataan dan pemetaan langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali ke tanah tersebut.

BPKAD Provinsi Bali telah mendaftarkan permohonan pengukuran dan pemetaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Pada tanggal 1 November 2022 telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama pihak BPN, didapat luas total 2.406.835 m² sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 1063/2022 tanggal 15 Desember 2022. Hasil pengukuran dan pemetaan tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Gubernur Bali.

Tanggal 30 Januari 2023 dilakukan audiensi antara Tim Tigabelas dengan Gubernur Bali, namun belum juga ada kesepakatan mengenai luas lahan yang akan didistribusikan.

Tanggal 27 Agustus 2023 dilaksanakan rapat bertempat di Jaya Sabha antara Gubernur Bali, Pj. Bupati Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan Perwakilan Tim Tiga Belas menyepakati:

- 1) Menyepakati realokasi tanah eks HGU 1 Pemuteran seluas 85,76 Hektar yang digunakan untuk: Desa Dinas, Desa Adat, Kawasan Pura dan Kuburan, warga penggarap tahun 1963, warga penggarap tahun 1992, TNI (Arhanud), fasilitas umum dan peternakan.
- 2) Realokasi sebagaimana dimaksud akan dibicarakan lebih lanjut oleh Tim 13 dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pj. Bupati Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Pada tanggal 3 September 2023 dilaksanakan pertemuan langsung antara Gubernur dengan Tim Tigabelas dan warga penggarap bertempat di Kantor Desa Pemuteran untuk menyampaikan hasil pertemuan tanggal 27 Agustus 2023 (poin 1 di atas) secara langsung kepada warga penggarap. Namun pada hari itu Tim Tigabelas meminta waktu kepada Gubernur untuk mensosialisasikan terlebih dahulu kepada warga penggarap karena pada pertemuan itu tidak semua warga penggarap hadir. Gubernur memberikan waktu paling lambat tanggal 4 September 2023 harus sudah ada jawaban dari Tim Tigabelas atas opsi pemberian lahan seluas 85,76 Ha kepada warga. Sesuai batas waktu yang diberikan, maka

Tim Tigabelas menghadap kepada Gubernur di Jayasabha tanggal 4 September 2023. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati luas tanah yang akan dilepaskan hak oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk didistribusikan kepada warga penggarap, Desa Adat Pemuteran, Desa Dinas Pemuteran, kawasan pura dan kuburan serta fasilitas umum adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas hasil ukur terbaru, atau seluas 120,3 Ha. Sedangkan 50% sisanya seluas 120,3 Ha adalah untuk Pemerintah Provinsi Bali termasuk alokasi untuk TNI (Arhanud).

Terhadap kesepakatan tersebut, selanjutnya BPKAD Provinsi Bali melaksanakan rapat pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk membahas tindaklanjut penyelesaian permasalahan tanah eks HGU 1, yang bertujuan untuk mendengar secara langsung dari Tim Tigabelas terkait kesepakatan yang telah disetujui bersama Gubernur Bali di Jayasabha. Tim Tigabelas menjelaskan bahwa mereka sudah membuat konsep peta posisi tanah sesuai kesepakatan tanggal 4 September 2023 di Jayasabha. Dalam rapat tersebut juga terdapat usulan dari anggota Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali agar dilakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 591/PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (Putusan Peninjauan Kembali yang memenangkan Pemerintah Provinsi Bali dalam perkara melawan PT M). Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Atas laporan hasil rapat tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menugaskan Kepala Biro Hukum untuk membahas terkait usulan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga pada tanggal 3 November 2023 Biro Hukum melaksanakan rapat bersama Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali, dan Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

- b. Tanah Pemerintah Provinsi Bali SHP Nomor 4 Desa Sidakarya**, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar seluas 3.000 m² (0,3 Ha). Di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik a.n INSA yang telah dijual dan dijadikan perumahan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali menggugat Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan INSA ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun gugatan tidak dikabulkan karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili jenis perkara ini yang semestinya diajukan ke PTUN Denpasar. Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dengan hasil bahwa untuk tindak lanjut permasalahan tanah SHP Nomor 4 Desa Sidakarya, Kota Denpasar, BPKAD Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali akan segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk meminta data para pemegang sertifikat hak milik yang berada di atas tanah SHP Nomor 4 Desa Sidakarya sebagai bahan penyusunan gugatan. Hasil rapat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk dapat diberikan data dan informasi yang memuat nama pemegang hak, nomor sertifikat, dan luas bidang tanah/sertifikat yang terbit di atas bidang tanah SHP Nomor 4 / Desa Sidakarya yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun upaya hukum penyelesaian permasalahan tanah dimaksud (Surat Nomor B.13.593/1778/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 13 Juni 2022). Sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, untuk memenuhi Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali tersebut, Kantor Pertanahan Kota Denpasar akan

memanggil pihak Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi. Dalam mediasi tersebut akan diuraikan asal-mula tanah SHP Nomor 4 / Sidakarya sampai pada tersebutnya beberapa hak milik di atasnya, serta akan disebutkan nomor dan nama pemegang haknya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Nomor B.13.032/1287/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11 Mei 2023) untuk meminta agar segera dilakukan mediasi sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah mengundang Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi penyelesaian permasalahan akibat indikasi tumpang tindih SHP Nomor 4/Sidakarya pada tanggal 13 Desember 2023. Hasil mediasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor IP.02.02/4051-51.71/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 yang isinya memberikan daftar nama pemegang hak dan nomor sertifikat/hak yang terbit di atas tanah aset Pemerintah Provinsi Bali SHP 4 Sidakarya.

c. Tanah Sertifikat HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu Denpasar seluas 120.450 m² dalam proses pemanfaatan kerjasama dengan PT GNA terdapat kendala yaitu di atas bidang tanah tersebut telah terbit 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :

- SHM Nomor 4476 seluas 2.000 m² a.n Pura Watu Lumut
- SHM Nomor 4434 seluas 4.000 m² a.n Pura Praja Pati Buitan
- SHM Nomor 4433 seluas 3.000 m² a.n Laba Pura Praja Pati Buitan

Pada tahun 1994, izin pemanfaatan HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu diberikan kepada KPN Praja dan dikerjasamakan dengan PT GNA untuk pembangunan sarana pariwisata dalam jangka waktu 30 tahun, yang kemudian diajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT GNA dan terbit sebanyak 5 (lima) sertifikat HGB, berlaku selama waktu 30 tahun dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2027. Karena PT GNA tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu menyelesaikan pembangunan sarana pariwisata tersebut dalam jangka 3 tahun dengan tambahan waktu 1 tahun apabila pembangunan belum selesai dan permasalahan lainnya, maka pada tanggal 8 Januari 2009, Gubernur Bali mencabut izin pemanfaatan yang diberikan kepada KPN Praja dengan SK Gubernur Nomor 3/01-1/HK/2009. Pada tanggal 9 September 2009 Ketua KPN Praja Kantor Gubernur Bali menyerahkan kembali hak pengelolaan atas tanah inventaris Pemerintah Provinsi Bali tersebut kepada Gubernur Bali. Karena izin pemanfaatan yang diberikan kepada KPN Praja telah dicabut, maka KPN Praja tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut. Sejak saat itu maka pengelolaan tanah tersebut menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Bali. Dalam perjalanan lebih lanjut, PT GNA kembali mengajukan permohonan untuk melanjutkan pemanfaatan tanah tersebut sesuai HGB untuk 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Perjanjian sewa dilakukan dengan perubahan subyek perjanjian yang semula antara KPN Praja dengan PT GNA menjadi Pemerintah Provinsi Bali dengan PT GNA disertai perubahan lainnya. Disposisi Gubernur tanggal 15 Maret 2013 pada Nota Dinas tanggal 18 Desember 2012, addendum subyek perjanjian yakni langsung antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT GNA, dengan catatan PT GNA membayar kewajiban/tunggakan sewa tanah sampai dengan tanggal perjanjian sebesar Rp2.477.035.140,00. Addendum II Perjanjian telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 dengan nomor 593.1/1864/PPA.Aset. Pembangunan yang dilakukan PT GNA terhambat dengan adanya permasalahan tumpang tindih sertifikat HPL dengan 3 (tiga) bidang

sertifikat hak milik. Permasalahan tersebut diduga terjadi akibat adanya cacat administrasi dalam penerbitan ketiga SHM dimaksud. Pemerintah Provinsi Bali telah menindaklanjuti dengan mengajukan pembatalan 3 buah sertifikat Hak Milik tersebut kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali sesuai Surat Nomor 593/6927/Pml.Aset tanggal 8 Oktober 2015, kemudian disusuli dengan Surat Nomor 593/5595/UPT.P2.BPKAD tanggal 14 Desember 2017. Permohonan tersebut kemudian dijawab dengan Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Nomor 0118/17-51/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 bahwa pembatalan tiga buah sertifikat Hak Milik tersebut masih dalam proses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI. Atas informasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah beberapa kali bersurat kepada Menteri ATR / Kepala BPN RI untuk meminta informasi tindak lanjut permohonan pembatalan 3 SHM di atas HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu, terakhir melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 593/2554/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Desember 2020. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Menteri ATR / Kepala BPN RI. Selain itu, Kepala BPKAD Provinsi Bali juga meminta kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali agar melakukan upaya-upaya hukum untuk penyelesaian permasalahan terbitnya tiga SHM di atas HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu melalui gugatan PTUN, sesuai Surat Nomor 593/1302 /UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 Juli 2020. Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dengan hasil bahwa untuk tindak lanjut permasalahan tanah HPL Nomor 1 Kesiman Kertalangu, BPKAD Provinsi Bali bersama Biro Hukum akan mengupayakan untuk menghubungi pihak PT GNA dan akan melaksanakan pertemuan dengan pihak PT GNA bersama pihak Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan serta Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Pada tanggal 22 Februari 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali melaksanakan rapat bersama pihak-pihak terkait termasuk Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil BPN Provinsi Bali, Desa Adat Kesiman, Kelihan Adat Banjar Tangtu, Kelihan Dinas Banjar Tangtu, dan Direktur PT GNA, dengan kesimpulan bahwa perwakilan masyarakat Banjar Adat Tangtu menyetujui solusi penyelesaian permasalahan tumpang tindih sertifikat terhadap HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu sebagai berikut :

- 1) Masyarakat Banjar Adat Tangtu setuju melakukan pencabutan/pembatalan terhadap 3 (tiga) bidang sertifikat hak milik, yang terbit di atas HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu, sehingga permasalahan hukum terhadap tumpang tindih sertifikat tersebut dapat terselesaikan.
- 2) Terhadap lahan yang di atasnya berdiri Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati, masyarakat Banjar Adat Tangtu akan mengajukan permohonan hibah kepada Gubernur Bali, sehingga memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat pengempon dan keberadaan pura-pura tersebut.
- 3) Bahwa perlu dilakukan perhitungan ulang terhadap batas dan luasan dari Tanah Aset Pemerintah Provinsi Bali HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu.

Pada tanggal 5 April 2022 telah dilakukan rapat dengan Inspektur Daerah Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, Bendesa Adat Kesiman, Bendesa Adat Sanur, Kelihan Banjar Adat Tangtu, Desa Kesiman Kertalangu, Direksi PT GNA membahas kesepakatan tindak lanjut penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali HPL Nomor 1 / Desa Kesiman

Kertalangu. Adapun kesepakatan yang dicapai pada rapat tersebut yakni Terhadap adanya *overlap* / tumpang tindih 3 (tiga) SHM atas nama Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan diatas tanah HPL Nomor 1 / Desa Kesiman, Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan bersedia untuk mencabut / membatalkan ketiga SHM dimaksud setelah adanya kejelasan dan kepastian hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan.

Pada bulan Juni 2022, Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan telah mengajukan permohonan hibah kepada Gubernur Bali. Saat ini permohonan tersebut telah mendapat persetujuan Gubernur Bali, namun dengan syarat ketiga SHM yang terbit di atas tanah HPL Nomor 1 / Desa Kesiman terlebih dahulu dibatalkan oleh Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan selaku pemegang hak.

Saat ini pembatalan ketiga SHM dimaksud sudah tuntas namun terdapat permasalahan yaitu di atas HPL Nomor 1 / Desa Kesiman Kertalangu terbit HGB berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT GNA, sehingga belum dapat dilakukan proses hibah kepada Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan.

Terhadap permasalahan tersebut, Bidang Pengelolaan BMD telah melakukan rapat pada tanggal 9 Mei 2023 dengan Pengempon Pura Prajapati dan Pura Ratu Lumut dengan didampingi Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Biro Hukum Setda Provinsi Bali dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Proses hibah tetap dilanjutkan hingga persetujuan DPRD agar ada kepastian dari pihak pemohon hibah.
- 2) Secara paralel melakukan pemutusan perjanjian sewa dengan PT GNA sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Diproses permohonan pembatalan HGB a.n. PT GNA ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

PT GNA melalui Surat Nomor 0238/Prov.Bali/Dir/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 menyampaikan bahwa pihak PT GNA bersedia untuk berkomitmen dalam melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan menyelesaikan permasalahan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Bali tersebut. Untuk selanjutnya apabila PT GNA berkenan untuk membatalkan HGB serta melakukan pengembalian pengelolaan tanah HPL Nomor 1 maka akan dikoordinasikan kembali terkait kerjasama pemanfaatan yang baru dengan PT GNA. Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Gubernur Nomor B.13.032/2480/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 1 September 2023 telah menyampaikan kepada PT GNA untuk menindaklanjuti kerjasama pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi Bali HPL nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu tersebut. Adapun rencana/langkah-langkah penyelesaian permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Pembatalan HGB milik PT GNA di atas HPL Nomor 1 secara sukarela ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar oleh PT GNA.
- 2) Mengajukan permohonan pemisahan bidang HPL Nomor 1 ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- 3) Melanjutkan proses hibah kepada Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan.



- 4) Melakukan pembahasan terkait kerjasama pemanfaatan lahan sesuai dengan luasan yang terbaru (*Addendum* Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT GNA) dan pembahasan penerbitan HGB baru atas nama PT GNA

d. Tanah Sertifikat HPL Nomor 2 Desa Kesiman Kertalangu Denpasar seluas 170.750 m² yang di atasnya telah terbit Sertifikat HGB Nomor 80 seluas 89.000.000 (8,9 Ha) atas nama PT APN yang saat ini dimiliki oleh HBH dari hasil lelang di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun sejak lelang tersebut dimenangkan oleh HBH, bangunan dan HGB tersebut tidak dimanfaatkan dan dikelola oleh yang bersangkutan sehingga terkesan ditelantarkan dan kewajiban PT APN kepada Perusda yang semestinya jatuh kepada Pemerintah Provinsi Bali tidak dipenuhi. Setelah beberapa kali dilakukan mediasi tidak dicapai kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan HBH selaku pemegang Sertifikat HGB Nomor 80, sehingga saat ini tanah dalam kondisi terlantar. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengajukan gugatan perdata pembatalan sertifikat HGB Nomor 80 namun tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan permasalahan ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Pada Tahun 2018 Pemprov Bali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80. Dalam Perkara ini Pemerintah Provinsi Bali kalah dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini (kewenangan *absolute*). Terhadap Sertifikat HGB Nomor 80 pada Tahun 2019 kembali digugat oleh HBH yang ditujukan kepada Gubernur Bali dalam Perkara Nomor 585/Pdt.G/2019/PN.Dps. Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu penguasaan secara fisik tanah dan bangunan atas aset Pemerintah Provinsi Bali yaitu Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan, dengan luas 8,98 Ha (Hektar) yang terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Dalam perkara ini Gubernur Bali menang.

Kepala BPKAD Provinsi Bali juga bersurat kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali agar melakukan upaya-upaya hukum untuk penyelesaian permasalahan Sertifikat HGB Nomor 80 di atas Sertifikat HPL Nomor 2 Desa Kesiman Kertalangu melalui gugatan PTUN pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80 (Surat Nomor 593/1300/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 14 Juli 2020).

Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali dimaksud di atas dijawab dengan Surat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Nomor 180/3431/Bag.III/B.Hk Tanggal 6 Agustus 2020, Hal: Penyelesaian Kasus Sertifikat HGB Nomor 80 yang menjadi temuan BPK, pada intinya bahwa BPKAD Provinsi Bali diminta bersurat lagi kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali untuk mohon pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan. Apabila sudah ada surat jawaban dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali bahwa Sertifikat HGB tersebut tidak dapat dibatalkan surat tersebut akan digunakan sebagai dasar yang kuat untuk melakukan gugatan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan.

Sesuai saran dalam surat Kepala Biro Hukum dimaksud di atas, Pemerintah Provinsi Bali telah bersurat kembali kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali untuk mohon pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 593/1849/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Oktober 2020, Hal Pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Desa Kesiman Petilan. Melalui Surat Nomor 022/HBHRM/IV/2021, tanggal 26 April 2021 HBH mengajukan permohonan dukungan dan petunjuk untuk balik nama sertifikat HGB Nomor 80/Desa Kesiman Petilan. Maksud dan

tujuan rencana balik nama HGB Nomor 80 / Desa Kesiman Petilan a.n PT APN adalah untuk mengusahakan kembali tanah tersebut untuk hotel, villa serta melanjutkan usaha yang sudah dirintis oleh PT APN untuk tempat rekreasi taman festival. Permohonan HBH sudah dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapat keputusan.

Tanggal 24 Mei 2022, HBH mengajukan permohonan sewa baru terhadap tanah HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu dan Hak Guna Bangunan Nomor 80, selama 30 tahun untuk dibangun Taman Bung Karno dengan konsep terbuka, dilengkapi dengan Wedding Garden dan stand UMKM. Permohonan tersebut saat ini sedang dikaji oleh BPKAD Provinsi Bali.

Permohonan HBH tidak mendapat persetujuan Gubernur Bali, dan saat ini menunggu berakhirnya masa berlaku HGB Nomor 80 / Kesiman Petilan yaitu tanggal 27 Februari 2026.

- e. **Sesuai catatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Pemerintah Provinsi Bali memiliki tanah aset seluas 1.080 m² yang digunakan untuk SMKN 1 Sukawati**, terletak di Jalan Kampus SMK Bali Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setelah dilakukan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan pihak SMKN 1 Sukawati tanah tersebut ternyata berlokasi di Jalan Noja Denpasar. Tanah tersebut adalah hasil pembelian dari perorangan atas nama IWR melalui Kuasanya yang bernama IWM tahun 1972. Sesuai informasi dari pihak sekolah bahwa di atas tanah tersebut saat ini sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama KT. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah seluas 1.080 m² dari luas keseluruhan 1.750 m² Pipil Nomor 901 Persil 4e Klas IV, yang dicap jempol oleh IWR selaku yang melepaskan hak, dan ditandatangani oleh Drs. IGBNP (Pemimpin Proyek Konservatori Bali) selaku pihak yang memberi ganti rugi. Berdasarkan dokumen tersebut, kami dan Kepala SMKN 1 Sukawati telah melakukan pengecekan lapangan, dan ditemukan bahwa tanah objek jual beli dimaksud adalah tanah yang berlokasi di Jalan Noja Denpasar, dan sesuai pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar saat ini di atas tanah tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2651 / Desa Kesiman Petilan seluas 990 m² atas nama IKTD. Saat ini tanah tersebut tercatat sebagai aset dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu dasar untuk menghapuskannya dari daftar aset adalah adanya Putusan Pengadilan berketetapan hukum tetap. Saat ini sedang ditangani oleh Biro Hukum untuk menempuh proses hukum.
- f. **Tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di Desa Puhu**, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang digunakan untuk Pos Pemantauan Hasil Hutan Payangan, di atasnya telah terbit SHM Nomor 781 a.n IT. Berdasarkan data yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Bali, tanggal 31 Mei 1977 Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan Bali Timur di Bangli (sebagai pihak pembeli), membeli tanah seluas 20 meter x 12,5 meter= 2,5 are di Banjar Ponggang, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan sertifikat hak milik Nomor 52 tanggal 28 Mei 1975 atas nama IT (sebagai pihak penjual). Tanggal 4 Desember 1984 Nomor 593.33/1796 kebda Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Bali bersurat kepada Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan Jembrana dan Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan lainnya, bahwa dalam tahun anggaran 1984/1985 tidak ada anggaran untuk pemersertifikat tanah. Untuk itu segera mengirimkan rencana biaya secara terinci untuk bahan usulan dalam TA 1985/1986. Selanjutnya tanggal 30 Januari 1985 Nomor 189/V/7 Kabag Kesatuan Pemukiman Hutan Bali Timur bersurat kepada KRPH Payangan agar berkonsultasi ke Kantor Agraris Gianyar untuk penyelesaian

administrasi dan rencana anggaran biaya persetifikatan tanah di RPH Payangan. Tanggal 20 Februari 1985 Nomor 20/V/7.KRPH Payangan bersurat ke Kantor Agraria Gianyar, menanyakan anggaran biaya persetifikatan tanah di RPH Payangan untuk diusulkan pada tahun anggaran 1985/1986. Tanggal 1 April 1985 Nomor 593.82/818/Agr.G Kepala Kantor Agraris Gianyar bersurat kepada KRPH Payangan untuk datang ke Kantor Agraria Gianyar pada tanggal 15 April 1985 dengan membawa semua bukti surat-surat tanah dan bukti pembelian. Pada tanggal 21 Mei 1985 Nomor 74/V/7.KRPH Payangan bersurat ke Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan Bali Timur, masalah persetifikatan tanah milik Dinas. Tanggal 21 Juli 1995 tanah yang dibeli seluas 2,5 are disertifikat oleh pemilik lama IT dengan luas menjadi 3 are dengan Sertifikat Nomor 781.AG.542383. Pada tanggal 20 Agustus 2001 surat Nomor 522/125/RPH.PY KRPH Payangan bersurat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Tingkat I Bali menyatakan:

- Tanah kantor RPH Payangan sudah atas nama pemilik lama (IT) dengan luas 3 are
- Dari keterangan pewaris pemilik tanah, dia rela menyerahkan tanah+sertifikatnya asal diberi ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 termasuk:
 - 1) Kelebihan tanah sebanyak 0,5 are;
 - 2) Pembayaran pajak dari tahun 1977 sampai dengan sekarang; dan
 - 3) Penyelesaian administrasi dan lain sebagainya.

Pada tanggal 6 Februari 2002 syarat Nomor 522/47/RPHPY, KRPH Payangan bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, mengenai persetifikatan tanah Kantor RPH Payangan. Tanggal 4 Juni 2002 kepada RPH Payangan kembali bersurat kepada Kepala Kantor/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, menanyakan kenapa pada saat pengukuran dari pihak BPN tidak menyertakan penyanding/pihak Dinas Kehutanan yang tahu akan batas-batas yang telah dijual oleh IT. Setelah dimediasi oleh Kejati Bali, ahli waris IT (I Senter) sudah bersedia menghapus SHM Nomor 781 agar dapat disertifikatkan oleh Pemprov Bali seluas 250 m².

- g. Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali,** terdapat tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 400 m², tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan kode barang/register 01.01.11.04.01/0001. Dinas Perikanan Darat membeli tanah tersebut dari PGM berdasarkan Padol tanggal 9 Desember 1953, Nomor 174/1953, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Singaraja tanggal 2 Februari 1988 Nomor S.083/WPJ.08/KI. (*Sumber: Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/11/Um/93.K. Tanggal 12 Januari 1994*). Sejak tanggal 1 Januari 1969, tanah tersebut ditempati dan dihasili oleh I Nengah Saban dari Banjar Banyuasri berdasarkan Surat Perjanjian Mengerjakan Tanah Tanggal 1 Juni 1969. Pada tahun 1991, tanah tersebut dipinjamkan kepada Made Tirtayasa (ipar dari pengelola UD Taman Dewata yang bernama Ketut Arta) untuk lokasi pembibitan tanaman hias. (*Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/334/Um/93 Tanggal 12 Januari 1994*). Pada tahun 1992, tanah yang sama dijual lagi oleh PG Cs (cucu alm. PGM) kepada KA (Pengelola UD. Taman Dewata) di depan PPAT pada tanggal 3 Desember 1992 dengan Akta Jual-Beli Nomor 690/Ket.BII/98 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama Ketut Arta. Padahal tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan pembangunan 1 (satu) unit kerja / Rumah Jabatan. Pada tanggal 9 Maret 1994 dilakukan pertemuan yang diselenggarakan dan

dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Buleleng, di mana para pihak akan diupayakan untuk bermusyawarah yang nantinya sebagai dasar penyelesaian masalahnya. Tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Juli 1994 yang dilakukan di ruangan Asisten I Setwilda Tk. II Buleleng yaitu :

Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 400 m², tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan kode barang/register 01.01.11.04.01/0001. Dinas Perikanan Darat membeli tanah tersebut dari PGM berdasarkan Padol tanggal 9 Desember 1953, Nomor 174/1953, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Singaraja Tanggal 2 Februari 1988 Nomor S.083/WPJ.08/KI. (Sumber: Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/11/Um/93.K. Tanggal 12 Januari 1994). Sejak tanggal 1 Januari 1969, tanah tersebut ditempati dan dihasili oleh INS dari Banjar Banyuasri berdasarkan Surat Perjanjian Mengerjakan Tanah Tanggal 1 Juni 1969. Pada tahun 1991, tanah tersebut dipinjamkan kepada MT (ipar dari pengelola UD TD yang bernama KA) untuk lokasi pembibitan tanaman hias. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/334/Um/93 Tanggal 12 Januari 1994). Pada tahun 1992, tanah yang sama dijual lagi oleh Putu Gunawan Cs (cucu alm. PGM) kepada Ketut Arta (Pengelola UD TD) di depan PPAT pada tanggal 3 Desember 1992 dengan Akta Jual-Beli Nomor 690/Ket.BII/98 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama KA. Padahal tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan pembangunan 1 (satu) unit kerja/rumah jabatan. Pada tanggal 9 Maret 1994 dilakukan pertemuan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Buleleng, di mana para pihak akan diupayakan untuk bermusyawarah yang nantinya sebagai dasar penyelesaian masalahnya. Tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Juli 1994 yang dilakukan di ruangan Asisten I Setwilda Tk. II Buleleng yaitu :

- 1) Pada pertemuan tersebut telah berhasil dirumuskan bahwa tanah Dinas Perikanan di Jalan A. Yani Singaraja akan diganti dengan tanah milik Pemda Tk. II Buleleng yang berlokasi di sebelah barat Gedung Kesenian (di belakang Kantor Departemen Keuangan) Singaraja, seluas ± 4 are.
- 2) Setelah pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penijauan ke lapangan, ternyata tanah yang direncanakan sebagai ganti tersebut poin 1 di atas, ada oknum yang menguasainya, di samping itu tanah tersebut bentuknya kecil memanjang.

Dalam upaya tertib pengelolaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penelusuran dokumen dan pengecekan lapangan tanggal 29 Mei 2013 ditemukan bahwa:

- 1) Tanah yang lokasinya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kaliuntu, Buleleng ternyata luasnya bukan 400 m² melainkan 350 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 853 tanggal 22 Februari 1993 atas nama IKA (almarhum) yang dibeli pada tahun 1992 dari cucu PGM (GCS).
- 2) Di atas tanah tersebut sudah didirikan bangunan oleh I Ketut Arta (almarhum) dan disewa oleh perusahaan FIF.

Untuk mengetahui kepastian terbitnya SHM Nomor 853 dimaksud di atas, BPKAD Provinsi Bali telah mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan telah dilakukan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2022, didapat hasil ukur 400 m²

dengan keterangan berada pada SHM 00853, GS 00011/1993. Hasil ukur tersebut akan dilaporkan kepada Sekda.

Saat ini sedang pengumpulan dokumen pendukung (asli) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali untuk proses gugatan.

h. Tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan untuk Asrama Mahasiswa Gunung Agung Malang terletak di Jalan Kartini Nomor 30, Kelurahan Klojen, Kota Malang, adalah tanah bekas Hak Eigendom Nomor 4573 seluas 677 m² yang diperoleh dari pembelian namun belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Bali, sehingga menjadi Temuan BPK RI Tahun 2018 dan menjadi pantauan dalam *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK RI. Pemerintah Provinsi Bali telah mengajukan permohonan pensertipikatan tanah tersebut ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur pada bulan Oktober 2019. Pada tanggal 27 Oktober 2021 Pemerintah Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui progres permohonan pensertipikatan tersebut, diterima oleh RP selaku Korsub pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Dalam koordinasi tersebut, RP menjelaskan bahwa :

- 1) Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran Hak atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda, dalam Pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa penetapan objek P3MB (Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda)/Prk. 5 (Peraturan Presidium Kabinet Dwikora) dilimpahkan/ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Terkait dengan hal tersebut artinya bahwa Kepala Kanwil BPN harus membentuk susunan Panitia P3MB/Prk. 5 terlebih dahulu untuk melanjutkan proses dari objek P3MB (objek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda), yang anggotanya juga terdiri dari unsur pejabat di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur masih terkendala dalam membentuk panitia dimaksud karena pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang sudah disurati namun belum memberikan nama pejabat untuk anggota panitia.
- 4) Kanwil BPN Jawa Timur mohon arahan ke Kementerian ATR/BPN mengenai rujukan aturan yang akan digunakan melalui Surat Nomor HP.01.02/1024-35/IX/2022 Tanggal 1 September 2022, perihal Mohon Petunjuk.

Rincian permasalahan Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	1.903.061.497.591,23	1.789.516.395.160,59	113.545.102.430,64	6,35
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Belanja Modal	140.375.288.069,62	109.213.603.835,00	31.161.684.234,62	28,53
- Hutang	3.060.263.152,00	40.282.000,00	3.019.981.152,00	7.497,10
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	16.645.000,00	422.087.190,00	(405.442.190,00)	(96,06)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
- Penerimaan Hibah	14.457.203.939,00	15.470.151.785,00	(1.012.947.846,00)	(6,55)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	10.587.114.197,58	3.055.428.026,04	7.531.686.171,54	246,50
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	201.115.000,00	10.572.750,00	190.542.250,00	1.802,20
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	9.647.981.179,80	11.946.751.510,75	(2.298.770.330,95)	(19,24)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	6.585.374.700,00	26.946.067.835,48	(20.360.693.135,48)	(75,56)
Jumlah Mutasi Tambah	184.930.985.238,00	167.104.944.932,27	17.826.040.305,73	10,67
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non-Modal)	(573.321.200,00)	(362.434.527,70)	(210.886.672,30)	58,19
- Pengeluaran Hibah	0,00	(2.068.081.927,00)	2.068.081.927,00	(100,00)
- Penghapusan	(986.969.200,00)	(2.280.229.835,00)	1.293.260.635,00	(56,72)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(7.231.623.060,90)	(18.680.111.407,94)	11.448.488.347,04	(61,29)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(22.859.220.827,70)	(82.521.000,01)	(22.776.699.827,69)	27.601,10
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(238.591.555,00)	(3.100.113.968,50)	2.861.522.413,50	(92,30)
- Dibawah Kapitalisasi	(3.402.205.711,38)	(26.946.067.835,48)	23.543.862.124,10	(87,37)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(6.585.374.700,00)	(2.068.081.927,00)	(4.517.292.773,00)	218,43
Jumlah Mutasi Kurang	(41.877.306.254,98)	(53.559.842.501,63)	11.682.536.246,65	(21,81)
Saldo Akhir	2.046.115.176.574,25	1.903.061.497.591,23	143.053.678.983,02	7,52

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing–masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Penjelasan:

Saldo di atas belum termasuk Aset Tetap Peralatan dan mesin yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai Aset Tetap *ekstrakompabel* sebesar Rp59.670.379.827,67 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin. sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang pada Peralatan dan Mesin antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

1. Terdapat Hutang pada Dinas Kesehatan, pada Rumah Sakit Bali Mandara sebesar Rp3.060.263.152,00 dengan menggunakan dasar pendanaan BLUD yang masih belum dicairkan tetapi barang sudah diterima, diantaranya berupa *Roos Chamber Detector* PTW dan *Schiller Electrocardiograph*;
2. Terdapat Penerimaan Hibah pada Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.145.305.000,00 dari Kementerian PUPR, diantaranya berupa *Crawler Excavator*; dan

3. Terdapat Penerimaan Hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.432.019.800,00 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yaitu berupa CCTV.

Mutasi Kurang

1. Terdapat Penghapusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp986.969.200,00 yang dihapus dikarenakan telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, yaitu berupa lampu jalan;
2. Terdapat Koreksi Pencatatan Saldo Awal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp238.591.555,00 karena ada koreksi nilai perolehan Barang Milik Daerah pada tahun sebelumnya.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	2.802.017.384.613,55	2.326.090.962.276,73	475.926.422.336,82	20,46
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Belanja Modal	360.865.620.932,00	340.651.767.017,86	20.213.853.914,14	5,93
- Kapitalisasi	0,00	7.896.355.354,89	(7.896.355.354,89)	(100,00)
Belanja Non Modal				
- Hutang	57.142.325.540,03	0,00	57.142.325.540,03	0,00
- Pembayaran di Muka	21.090.193.124,00	0,00	21.090.193.124,00	0,00
- Penerimaan Hibah	134.954.914.896,00	122.676.271.597,91	12.278.643.298,09	10,01
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	25.206.551.513,44	64.685.511.049,00	(39.478.959.535,56)	(61,03)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	6.747.144.940,00	3.945.518.230,00	2.801.626.710,00	71,01
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	12.718.023.955,00	71.655.555.630,06	(58.937.531.675,06)	(82,25)
- Reklasifikasi dari Aset Ekstra	92.446.563,14	6.885.890,00	85.560.673,14	1.242,55
- Mutasi antar Perangkat Daerah	14.354.261.589,00	67.451.641.679,85	(53.097.380.090,85)	(78,72)
- Jumlah Mutasi Tambah	633.171.483.052,61	678.969.506.449,57	(45.798.023.396,96)	(6,75)
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Salah Pos Belanja Modal	(1.480.820.943,00)	(414.065.043,00)	(1.066.755.900,00)	257,63
- Penghapusan	(10.871.206.000,00)	0,00	(10.871.206.000,00)	0,00
- Pembayaran Hutang	0,00	(9.742.611.245,28)	9.742.611.245,28	(100,00)
- Pengeluaran Hibah	(5.964.259.528,00)	(15.310.974.418,92)	9.346.714.890,92	(61,05)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(178.111.900.069,61)	(56.217.862.997,04)	(121.894.037.072,57)	216,82
- Reklasifikasi ke	(6.487.254.674,00)	(12.419.876.964,02)	5.932.622.290,02	(47,77)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lainnya				
- Reklasifikasi ke	(25.000.000,00)	0,00	(25.000.000,00)	0,00
Properti Investasi				
- Koreksi	(9.728.021.884,84)	(4.477.291.283,64)	(5.250.730.601,20)	117,27
Pencatatan Saldo Awal				
- Dibawah	(114.974.000,00)	(248.253.410,00)	133.279.410,00	(53,69)
Kapitalisasi				
- Pembayar di Muka	0,00	(36.760.507.071,00)	36.760.507.071,00	(100,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(14.354.261.589,00)	(67.451.641.679,85)	53.097.380.090,85	(78,72)
- Jumlah Mutasi Kurang	(227.137.698.688,45)	(203.043.084.112,75)	(24.094.614.575,70)	11,87
Saldo Akhir	3.208.051.168.977,71	2.802.017.384.613,55	406.033.784.364,16	14,49

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 29**.

Penjelasan:

Saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai Aset Tetap ekstrakompabel sebesar Rp7.352.462.211,90 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

1. Terdapat Hutang pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp51.339.956.013,00 untuk Pembangunan Bangunan dan Gedung Sekolah dan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebesar Rp4.736.317.557,00 untuk Pembangunan Menara Turyapada;
2. Terdapat Pembayaran di muka pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp21.090.193.124,00 berupa Pembangunan Menara Turyapada; dan
3. Terdapat penerimaan hibah pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp129.828.291.645,00 dari Kementerian PUPR, diantaranya berupa Taman *Ecopark* Suwung.

Mutasi Kurang

1. Terdapat Penghapusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp10.871.206.000,00 yang dihapus dikarenakan telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, berupa Candi dan Taman di PKB Klungkung;
2. Terdapat Pengeluaran Hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp5.964.259.528,00 kepada Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dan Kementrian Kelautan dan Perikanan;

3. Terdapat Koreksi Pencatatan Saldo Awal pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp8.849.252.884,70 diantaranya berupa penggabungan empat Gedung Pendidikan menjadi satu Gedung pada SLBN 1 Denpasar.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	3.439.564.896.158,92	3.039.139.885.102,56	400.425.011.056,36	13,18
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Belanja Modal	232.361.545.288,00	354.881.755.251,00	(122.520.209.963,00)	(34,52)
- Hutang	23.335.518.117,00	0,00	23.335.518.117,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	588.621.998,00	7.073.883.640,00	(6.485.261.642,00)	(91,68)
- Penerimaan Hibah	128.744.076.042,00	0,00	128.744.076.042,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	182.929.700.109,00	4.217.341.552,00	178.712.358.557,00	4.237,56
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	35.463.647.499,90	64.973.266.583,36	(29.509.619.083,46)	(45,42)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	258.083.369.750,00	20.393.420.870,00	237.689.948.880,00	1.165,52
Jumlah Mutasi Tambah	861.506.478.803,90	451.539.667.896,36	409.966.810.907,54	90,79
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Salah pos Belanja Modal	(394.854.222,00)	(15.073.800,00)	(379.780.422,00)	2.519,47
- Penghapusan	(255.927.737.150,00)	0,00	(255.927.737.150,00)	0,00
- Pembayaran Hutang	0,00	(8.751.942.400,00)	8.751.942.400,00	(100,00)
- Pengeluaran Hibah	0,00	(777.094.600,00)	777.094.600,00	(100,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(310.017.710.900,00)	(74.301.800,00)	(309.943.409.100,00)	417.141,19
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	(21.102.823.370,00)	21.102.823.370,00	(100,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(103.194.800,00)	0,00	(103.194.800,00)	0,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(258.083.369.750,00)	(20.393.420.870,00)	(237.689.948.880,00)	1.165,52
Jumlah Mutasi Kurang	(824.526.866.822,00)	(51.114.656.840,00)	(773.412.209.982,00)	1.513,09
Saldo Akhir	3.476.544.508.140,82	3.439.564.896.158,92	36.979.611.981,90	1,08

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 30*.

Penjelasan:

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

1. Terdapat Hutang sebesar Rp23.335.518.117,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berupa jalan provinsi;
2. Terdapat Penerimaan Hibah sebesar Rp2.155.632.600,00 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral berupa PLTS *Rooftop* dan sebesar Rp125.913.885.442,00 pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, diantaranya berupa Jalan dan Saluran Pembuangan Air;
3. Terdapat Koreksi pencatatan saldo awal sebesar Rp31.497.885.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Penerimaan Hibah tahun 2022 yang baru dicatat dari Pemerintah Kabupaten Badung berupa Dermaga dan Pemecah Gelombang.

Mutasi Kurang

1. Terdapat Penghapusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp255.927.737.150,00 yang dihapus dikarenakan telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, berupa Jalan, Jembatan, Instalasi Air Kotor dan Jaringan di PKB Klungkung;
2. Terdapat Koreksi Pencatatan Saldo Awal pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp103.194.800,00 yang awalnya berupa Jalan kemudian dikoreksi menjadi Jalan dan Jembatan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	71.537.786.207,25	63.417.158.098,25	8.120.628.109,00	12,81
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Belanja Modal	30.899.659.003,37	23.276.736.561,00	7.622.922.442,37	32,75
- Kapitalisasi Belanja Non-Modal	0,00	13.919.000,00	(13.919.000,00)	(100,00)
- Penerimaan Hibah	259.980.000,00	512.576.100,00	(252.596.100,00)	(49,28)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.574.966.767,00	128.391.200,00	2.446.575.567,00	1.905,56
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	225.112.500,00	405.005.963,00	(179.893.463,00)	(44,42)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	3.787.500,00	375.708.218,00	(371.920.718,00)	(98,99)
Jumlah Mutasi Tambah	33.963.505.770,37	24.712.337.042,00	9.251.168.728,37	37,44
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non-Modal)	(13.288.365.765,00)	(1.555.671.027,00)	(11.732.694.738,00)	754,19
- Pengeluaran Hibah	(37.800.000,00)	(537.196.000,00)	499.396.000,00	(92,96)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(2.836.226.720,00)	(1.369.240.820,00)	(1.466.985.900,00)	107,14
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(505.530.835,00)	(4.242.260.193,00)	3.736.729.358,00	(88,08)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	(451.156.965,00)	451.156.965,00	(100,00)
- Dibawah Kapitalisasi	(4.950.197.483,93)	(8.060.475.710,00)	3.110.278.226,07	(38,59)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(3.787.500,00)	(375.708.218,00)	371.920.718,00	(98,99)
Jumlah Mutasi Kurang	(21.621.908.303,93)	(16.591.708.933,00)	(5.030.199.370,93)	30,32
Saldo Akhir	83.879.383.673,69	71.537.786.207,25	12.341.597.466,44	17,25

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

Penjelasan:

Saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Lainnya yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp33.508.381.260,57 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat Penerimaan Hibah sebesar Rp255.980.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa Alat Musik Gong; dan
2. Terdapat Salah Pos Belanja Modal sebesar Rp11.490.784.651,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diantaranya berupa buku yang seharusnya menjadi Belanja Barang/Jasa.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	119.528.622.700,55	125.916.935.211,51	(6.388.312.510,96)	(5,07)
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Kapitalisasi Belanja Non-Modal	0,00	1.739.054.495,54	(1.739.054.495,54)	(100,00)
- Penerimaan Hibah	0,00	4.025.560.000,00	(4.025.560.000,00)	(100,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	161.582.561.661,03	55.108.086.331,00	106.474.475.330,03	193,21
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	657.517.475,00	(657.517.475,00)	(100,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00	4.025.560.000,00	(4.025.560.000,00)	(100,00)
- Jumlah Mutasi Tambah	161.582.561.661,03	65.555.778.301,54	96.026.783.359,49	146,48
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Penghapusan	(154.675.000,00)	(337.856.106,50)	183.181.106,50	(54,22)
- Pengeluaran Hibah	(173.106.010,00)	0,00	(173.106.010,00)	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(14.657.122.947,54)	(63.555.114.706,00)	48.897.991.758,46	(76,94)
- Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	0,00	(4.025.560.000,00)	4.025.560.000,00	(100,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00	(4.025.560.000,00)	4.025.560.000,00	(100,00)
- Jumlah Mutasi Kurang	(14.984.903.957,54)	(71.606.234.706,00)	56.621.330.748,46	(79,07)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Akhir	266.126.280.404,04	119.528.622.700,55	146.597.657.703,49	122,65

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 32*.

Penjelasan:

Saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp14.400.000,00 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Tambahan informasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dengan nama kontrak “Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum” dengan Nomor Dokumen B.24.027/10227/IAI/D.KOMINFOS dengan nilai kontrak sebesar Rp283.362.242.000,00 yang masih dilanjutkan hingga 4 Juli 2024.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang pada Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

1. Terdapat Reklasifikasi antar Aset Tetap pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp156.351.359.326,00 dikarenakan terdapat konstruksi proyek pembangunan Menara Turyapada yang sekarang berjumlah Rp200.326.260.845,00. Konstruksi ini mempunyai Surat Perjanjian dengan nomor dokumen B.24.027/10227/IAI/D.KOMINFOS yang mempunyai nilai kontrak sebesar Rp283.362.242.000, yang akan diselesaikan pada Kamis, 4 Juli 2024.

Mutasi Kurang

1. Terdapat Penghapusan pada Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp154.675.000,00 dengan dokumen SK Penghapusan Nomor. B.13.028/5956/P.BMD/BPKAD, diantaranya berupa perencanaan pembangunan Gedung Wantilan;
2. Terdapat Pengeluaran Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp173.106.010 dengan dokumen B.29.032/19762/SEKRET/PUPRKIM berupa pembangunan Pura Tegal Suci Pegenian dan Pura Beji Telaga Geni Besakih dan renovasi Pura Munduk Angker/Pura Munduk Dawu Besakih;
3. Terdapat Reklasifikasi antar Aset Tetap pada Dinas Kesehatan, pada Rumah Sakit Bali Mandara sebesar Rp13.310.741.782,54 dikarenakan terdapat pembangunan Gedung Kanker yang telah selesai sesuai dokumen B.37.028/25428/AKA/RSBM.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	(4.364.471.415.739,91)	(3.994.414.579.981,36)	(370.056.835.758,55)	9,26
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Beban Penyusutan	(450.315.454.274,60)	(400.888.010.243,86)	(49.427.444.030,74)	12,33
- Koreksi Pencatatan	(2.745.584.828,00)	(17.985.067.647,08)	15.239.482.819,08	(84,73)
Saldo Awal				

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
- Penyusutan Barang Hibah	(18.681.782.676,00)	(432.529.360,00)	(18.249.253.316,00)	4.219,19
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	(1.050.041.307,60)	(674.704.311,40)	(375.336.996,20)	55,63
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(5.302.912.749,00)	(57.907.498.819,50)	52.604.586.070,50	(90,84)
Jumlah Mutasi Tambah	(478.095.775.835,20)	(477.887.810.381,84)	(207.965.453,36)	0,04
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihilangkan	2.582.553.441,00	5.696.005.974,00	(3.113.452.533,00)	(54,66)
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	25.070.963.194,70	11.447.391.550,52	13.623.571.644,18	119,01
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	5.722.513.201,11	32.780.078.279,27	(27.057.565.078,16)	(82,54)
- Penghapusan	11.925.752.619,00	0,00	11.925.752.619,00	0,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	5.302.912.749,00	57.907.498.819,50	(52.604.586.070,50)	(90,84)
Jumlah Mutasi Kurang	50.604.695.204,81	107.830.974.623,29	(57.226.279.418,48)	(53,07)
Saldo Akhir	(4.791.938.954.703,30)	(4.364.471.415.739,91)	(427.467.538.963,39)	9,79

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing perangkat daerah disajikan pada *Lampiran 33*.

5.3.1.4 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Properti Investasi - Tanah	645.797.102.195,00	0,00	645.797.102.195,00	0,00
Properti Investasi -Gedung dan Bangunan	4.014.568.478,00	0,00	4.014.568.478,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.835.462.224,97)	0,00	(1.835.462.224,97)	0,00
Jumlah	647.976.208.448,03	0,00	647.976.208.448,03	0,00

Rincian Properti Investasi pada masing-masing perangkat daerah disajikan pada *Lampiran 34*.

Penjelasan:

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Properti Investasi baru dilakukan di tahun 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang

Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2023, Properti Investasi masih dalam proses verifikasi aset yang bertujuan untuk memastikan bahwa Aset Tanah maupun Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan sebagai Properti Investasi atau tetap menjadi Aset Tetap.

5.3.1.4.1 Properti Investasi – Tanah

Saldo tersebut merupakan saldo Properti Investasi – Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023, sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	42.088.105.050,00	0,00	42.088.105.050,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	603.708.997.145,00	0,00	603.708.997.145,00	0,00
- Jumlah Mutasi Tambah	645.797.102.195,00	0,00	645.797.102.195,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
- Saldo Akhir	645.797.102.195,00	0,00	645.797.102.195,00	0,00

Penjelasan:

Reklasifikasi dari aset tetap berupa 42 bidang tanah sebesar Rp42.088.105.050,00 dan Reklasifikasi dari aset lainnya berupa aset yang disewakan sebesar Rp603.708.997.145,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

5.3.1.4.2 Properti Investasi – Gedung dan Bangunan

Saldo tersebut merupakan saldo Properti Investasi – Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2023, sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	3.989.568.478,00	0,00	3.989.568.478,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	4.014.568.478,00	0,00	4.014.568.478,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Bruto	4.014.568.478,00	0,00	4.014.568.478,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	1.835.462.224,97	0,00	1.835.462.224,97	0,00

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Properti Investasi				
Saldo Akhir Neto	2.179.106.253,03	0,00	2.179.106.253,03	0,00

Penjelasan:

Reklasifikasi dari Aset Tetap berupa bangunan sebesar Rp25.000.000,00 dan reklasifikasi dari aset lainnya berupa gedung yang disewakan senilai Rp3.989.568.478,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

5.3.1.4.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023, sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	268.718.797,00	0,00	268.718.797,00	0,00
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Tetap	23.541.667,00	0,00	23.541.667,00	0,00
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	1.543.201.760,97	0,00	1.543.201.760,97	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.835.462.224,97	0,00	4.014.568.478,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir	1.835.462.224,97	0,00	1.835.462.224,97	0,00

5.3.1.5 Dana Cadangan

Saldo tersebut merupakan saldo Dana Cadangan milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Cadangan	173.517.943.404,98	100.517.945.205,54	72.999.998.199,44	72,62

Penjelasan:

Kenaikan disebabkan karena adanya penambahan Dana Cadangan sebesar Rp150.000.000.000 dan penambahan dari jasa giro sebesar Rp2.347.610.604,98 dikurangi pencairan Dana Cadangan dalam rangka penyelenggaraan Pilpres sebesar Rp78.829.667.200,00. Dana cadangan dibentuk bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 21 Desember 2021 yang disimpan pada Rekening BPD Nomor 0100105000837 a.n Dana Cadangan PPKD. Dana cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali dari:

1. Dana Alokasi Khusus;
2. Pinjaman Daerah; dan

3. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penyisihan atas penerimaan Daerah, dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran, dihitung mulai TA 2022 sampai dengan TA 2023. Besaran Dana Cadangan, ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:

- TA 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- TA 2023 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

5.3.1.6 Aset Lainnya

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	645.000.593.463,00	(645.000.593.463,00)	(100,00)
Aset Tidak Berwujud	25.490.762.758,65	24.352.871.621,65	1.137.891.137,00	4,67
Aset Lain – Lain	348.901.073.824,66	313.819.212.494,00	35.081.861.330,66	11,18
Amortisasi ATB	(17.950.219.235,17)	(14.523.595.547,00)	(3.426.623.688,17)	23,59
Ak. Penyusutan Aset Lainnya	(110.960.679.101,71)	(135.584.203.704,65)	24.623.524.602,93	18,16
Treasury Deposit Facility (TDF)	27.241.942.000,00	19.575.067.331,00	7.666.874.669,00	39,17
Jumlah	272.722.880.246,43	852.639.945.658,00	(579.917.065.411,57)	(68,01)

5.3.1.6.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 dan saldo Tahun 2022 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal				
- Tanah (Sewa)	562.602.744.520,00	559.540.245.850,00	3.062.498.670,00	0,55
- Gedung dan Bangunan (Sewa)	4.869.786.178,00	4.392.904.178,00	476.882.000,00	10,86
- Tanah (Pinjam Pakai)	50.979.467.145,00	100.245.285.318,00	(49.265.818.173,00)	(49,15)
- Peralatan dan Mesin (Pinjam Pakai)	970.385.327,00	970.385.327,00	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan (Pinjam Pakai)	23.762.057.443,00	26.976.685.673,00	(3.214.628.230,00)	(11,92)
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Pinjam Pakai)	1.816.152.850,00	1.816.152.850,00	0,00	0,00
- Jumlah Saldo Awal	645.000.593.463,00	693.941.659.196,00	(48.941.065.733,00)	(7,05)
Mutasi Tambah:				
<i>Reklasifikasi dari Aset Tetap</i>				
- Tanah	50.219.819.625,00	21.344.369.315,00	28.875.450.310,00	135,28
- Gedung dan Bangunan	295.700.000,00	1.115.482.000,00	(819.782.000,00)	(73,49)
- Jumlah Mutasi Tambah	50.515.519.625,00	22.459.851.315,00	28.055.668.310,00	124,91

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Mutasi Kurang:				
- Penghapusan				
- Tanah	(519.729.000,00)	0,00	(519.729.000,00)	0,00
- Gedung dan Bangunan	(1.061.147.700,00)	0,00	(1.061.147.700,00)	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap				
- Tanah	0,00	(66.713.118.818,00)	66.713.118.818,00	(100,00)
- Gedung dan Bangunan	(114.770.000,00)	(3.853.228.230,00)	3.738.458.230,00	(97,02)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap				
- Tanah	(8.573.838.000,00)	0,00	(8.573.838.000,00)	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Lain-lain				
- Tanah (Pinjam Pakai)	(50.979.467.145,00)	0,00	(50.979.467.145,00)	0,00
- Peralatan dan Mesin (Pinjam Pakai)	(970.385.327,00)	0,00	(970.385.327,00)	0,00
- Gedung dan Bangunan (Pinjam Pakai)	(23.762.057.443,00)	0,00	(23.762.057.443,00)	0,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Pinjam Pakai)	(1.816.152.850,00)	0,00	(1.816.152.850,00)	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal				
- Tanah	(20.000.000,00)	(834.570.000,00)	814.570.000,00	(97,60)
- Reklasifikasi ke Properti Investasi				
- Tanah	(603.708.997.145,00)	0,00	(603.708.997.145,00)	0,00
- Gedung dan Bangunan	(3.989.568.478,00)	0,00	(3.989.568.478,00)	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	(695.516.113.088,00)	(71.400.917.048,00)	(624.115.196.040,00)	874,10
Saldo Akhir				
- Tanah (Sewa)	0,00	562.602.744.520,00	(562.602.744.520,00)	(100,00)
- Gedung dan Bangunan (Sewa)	0,00	4.869.786.178,00	(4.869.786.178,00)	(100,00)
- Tanah (Pinjam Pakai)	0,00	50.979.467.145,00	(50.979.467.145,00)	(100,00)
- Peralatan dan Mesin (Pinjam Pakai)	0,00	970.385.327,00	(970.385.327,00)	(100,00)
- Gedung dan Bangunan (Pinjam Pakai)	0,00	23.762.057.443,00	(23.762.057.443,00)	(100,00)
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Pinjam Pakai)	0,00	1.816.152.850,00	(1.816.152.850,00)	(100,00)
Jumlah Bruto	0,00	645.000.593.463,00	(645.000.593.463,00)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	(8.195.216.865,07)	8.195.216.865,07	(100,00)
Jumlah Neto	0,00	636.805.376.597,93	(636.805.376.597,93)	(100,00)

Penjelasan:

Terdapat tambahan informasi atas Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

menjadi Properti Investasi sebesar Rp607.698.565.623,00.

Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa dapat dilihat pada *Lampiran 35*.

5.3.1.6.2 Aset Tidak Berwujud

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal	24.352.871.621,65	18.588.690.787,65	5.764.180.834,00	31,01
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Belanja Modal	895.500.000,00	65.229.150,00	830.270.850,00	1.272,85
- Kapitalisasi Belanja Non-Modal	0,00	1.405.450.000,00	(1.405.450.000,00)	(100,00)
- Penerimaan Hibah	6.275.000,00	0,00	6.275.000,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	403.811.687,00	2.590.596.900,00	(2.186.785.213,00)	(84,41)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	2.282.753.284,00	(2.282.753.284,00)	(100,00)
- Mutasi Antar Perangkat Daerah	0,00	488.877.160,00	(488.877.160,00)	(100,00)
Jumlah Mutasi Tambah	1.305.5586.687,00	6.832.906.494,00	6.222.680.193,00	91,07
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Penghapusan	(167.695.550,00)	(579.848.500,00)	412.152.950,00	(71,08)
- Mutasi Antar Perangkat Daerah	0,00	(488.877.160,00)	488.877.160,00	(100,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(167.695.550,00)	(1.068.725.660,00)	901.030.110,00	(84,31)
Saldo Akhir Bruto	25.490.762.758,65	24.352.871.621,65	1.137.891.137,00	4,67
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.950.219.235,17)	(14.523.595.547,00)	(3.426.623.688,17)	23,59
Saldo Akhir Neto	7.540.543.523,48	9.829.276.074,65	(2.288.732.551,17)	(23,28)

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 36*.

Saldo Akhir tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lisensi dan <i>Frenchise</i>	1.577.602.149,00	1.366.274.160,00
Hak Cipta	1.730.750.050,00	1.044.425.000,00
<i>Software</i>	18.873.380.559,65	19.202.617.461,65
Kajian	2.820.450.000,00	1.924.950.000,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	488.580.000,00	814.605.000,00
Subjumlah ATB	25.490.762.758,65	24.352.871.621,65
Akumulasi Amortisasi - Lisensi dan <i>Frenchise</i>	(923.810.410,00)	(374.223.675,00)
Akumulasi Amortisasi - Hak Cipta	(798.520.355,17)	0,00
Akumulasi Amortisasi - <i>Software</i>	(15.423.078.738,00)	(13.990.407.289,00)
Akumulasi Amortisasi - Kajian	(572.943.067,00)	(158.964.583,00)
Akumulasi Amortisasi - Aset Tidak Berwujud Lainnya	(231.866.665,00)	0,00
Subjumlah Amortisasi	(17.950.219.235,17)	(14.523.595.547,00)
Jumlah Neto	7.540.543.523,48	9.829.276.074,65

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang serta informasi lainnya pada Aset Tidak Berwujud antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Terdapat Penerimaan Hibah sebesar Rp6.275.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga berupa *Software* pada SMAN 2 Abiansemal;
2. Terdapat Penghapusan sebesar Rp167.695.550,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa empat *Software*;
3. Terdapat Aset Tidak Berwujud yang umurnya melebihi 10 tahun yaitu *software* SIMPEG pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang masih digunakan sampai saat ini;
4. Terdapat Aset Tidak Berwujud sejumlah tujuh buah *software* dengan pengadaan Tahun 2009 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah tidak digunakan dan akan diusulkan untuk penghapusan;
5. Terdapat dua buah Aset Tidak Berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai signifikan, yaitu *programmable logic controller* dengan nilai masing-masing sebesar Rp1.594.993.961,00 dan Rp2.282.753.284,00. Selain itu juga terdapat dua buah Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kesehatan berupa sistem operasi server dengan nilai sebesar Rp1.627.550.000,00. Sedangkan untuk sistem informasi laboratorium sebesar Rp1.965.251.069,65 sudah tidak digunakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, yang rencananya diusulkan untuk dihapus;
6. Terdapat tiga buah Kajian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu:
 - a. Kajian Risiko Bencana Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang diadakan Tahun 2021 sebesar Rp249.026.000,00;
 - b. Kajian/Penelitian Teknologi Pengolahan Jeruk Siam dalam Menunjang Agrowisata yang diadakan Tahun 2022 sebesar Rp159.987.000,00; dan
 - c. Kajian/Penelitian Pemetaan Potensi Unggulan Pangan Bali Sub. Kajian Agro Ekosistem, Pasca Panen dan Rantai Pemasaran Komoditas Salak yang diadakan Tahun 2022 sebesar Rp159.987.000,00;

Selain itu, juga terdapat empat buah Kajian pada Dinas Perhubungan yang diadakan pada Tahun 2022 dan 2023 dengan nilai total sebesar Rp2.251.450.000,00;
7. Dari total Aset Tidak Berwujud, sebanyak 102 Aset Tidak Berwujud yang telah habis masa manfaatnya namun masih digunakan hingga saat ini.

5.3.1.6.3 Aset Lain-lain

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	31.179.638.048,61	37.049.408.706,37	(5.869.770.657,76)	(15,84)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(24.064.854.777,71)	(27.442.495.310,55)	3.377.640.532,84	(12,31)
Subjumlah Aset Rusak Berat/Usang	7.114.783.270,90	9.606.913.395,82	(2.492.130.124,92)	(25,94)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	317.721.435.776,05	276.769.803.787,63	40.951.631.988,42	14,80
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(86.895.824.324,00)	(99.946.491.529,03)	13.050.667.205,03	(13,06)
Subjumlah Aset Tetap	230.825.611.452,05	176.823.312.258,60	54.002.299.193,45	30,54

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tidak Digunakan				
Jumlah	237.940.394.722,95	186.430.225.654,42	51.510.169.068,53	27,63

Rincian mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2023 dan penjelasannya sebagai berikut:

5.3.1.6.3.1 Aset Tetap Rusak Berat

Saldo tersebut merupakan Aset Rusak Berat/Usang pada Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal				
- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	24.766.183.505,97	35.377.742.720,45	(10.611.559.214,48)	(30,00)
- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	6.637.369.050,40	6.638.377.800,00	(1.008.749,60)	(0,02)
- Jalan, Jaringan dan Irigasi Rusak Berat	166.173.650,00	219.151.500,00	(52.977.850,00)	(24,17)
- Aset Tetap Lainnya	5.479.682.500,00	3.609.688.607,00	1.869.993.893,00	51,80
Jumlah Saldo Awal	37.049.408.706,37	45.844.960.627,45	(8.795.551.921,08)	(19,19)
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Penerimaan Hibah:				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	83.265.000,00	0,00	83.265.000,00	0,00
- Reklasifikasi dari:				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	22.423.989.429,70	18.680.111.407,47	3.743.878.022,23	20,04
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.576.464.724,00	6.000.832.394,02	(4.424.367.670,02)	(73,73)
✓ Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	2.278.695.350,00	(2.278.695.350,00)	(100,00)
✓ Aset Tetap Lainnya	177.677.746,00	1.807.063.293,00	(1.629.385.547,00)	(90,17)
- Reklasifikasi Antar Aset				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	15.375.000,00	103.502.575,00	(88.127.575,00)	(85,15)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	79.212.265,00	47.608.000,00	31.604.265,00	66,38
✓ Aset Tetap Lainnya	0,00	286.887.000,00	(286.887.000,00)	(100,00)
- Mutasi Antar Perangkat Daerah				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	125.144.000,00	(80.144.000,00)	(64,04)
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	415.755.720,00	0,00	415.755.720,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	24.816.739.884,70	29.329.844.019,49	(4.513.104.134,79)	(15,39)
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Pengeluaran Hibah				

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(415.755.720,00)	(47.100.000,00)	(368.655.720,00)	782,71
- Penghapusan:				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(25.250.508.259,46)	(25.664.956.761,95)	414.448.502,49	(1,61)
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(3.612.634.820,00)	(5.889.097.143,62)	2.276.462.323,62	(38,66)
✓ Jalan, Jaringan dan Irigasi	(10.890.000,00)	(2.331.673.200,00)	2.320.783.200,00	(99,53)
✓ Aset Tetap Lainnya	(506.032.373,00)	(223.956.400,00)	(282.075.973,00)	125,95
- Reklasifikasi Ke				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(201.115.000,00)	0,00	(201.115.000,00)	0,00
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	(92.290.000,00)	92.290.000,00	(100,00)
- Reklasifikasi Antar Aset				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(15.375.000,00)	(103.502.575,00)	88.127.575,00	(85,15)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(95.000.000,00)	(3.627.221.860,00)	3.532.221.860,00	(97,38)
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(65.270.000,00)	(20.454.000,00)	(44.816.000,00)	219,11
✓ Jalan, Jaringan dan Irigasi	(53.173.650,00)	0,00	(53.173.650,00)	0,00
- Mutasi Antar Perangkat Daerah				
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(45.000.000,00)	(125.144.000,00)	80.144.000,00	(64,04)
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(415.755.720,00)	0,00	(415.755.720,00)	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	(30.686.510.542,46)	(38.125.395.940,57)	7.438.885.398,11	(19,51)
Saldo Akhir Bruto	31.179.638.048,61	37.049.408.706,37	(5.869.770.657,76)	(15,84)
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	21.806.026.941,21	24.766.183.505,97	(2.960.156.564,76)	(11,95)
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	4.120.173.234,40	6.637.369.050,40	(2.517.195.816,00)	(37,92)
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	102.110.000,00	166.173.650,00	(64.063.650,00)	(38,55)
- Aset Tetap Lainnya	5.151.327.873,00	5.479.682.500,00	(328.354.627,00)	(5,99)
- Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(24.064.854.777,71)	(27.442.495.310,55)	3.377.640.532,84	(12,31)
Saldo Akhir Neto	7.114.783.270,90	9.606.913.395,82	(2.492.130.124,92)	(25,94)

Rincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat/Usang pada masing-masing perangkat daerah disajikan pada *Lampiran 37*.

Penjelasan:

Terdapat 16 hewan ternak mati tercatat di UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, nilai perolehan sebesar Rp245.620.000,00 diusulkan penghapusan dengan surat permohonan Nomor B.33.028/7896/SEKRET/DISTANPANGAN tanggal 17 April 2023 dalam proses penghapusan dan SK Penghapusan keluar tanggal 17 April 2024 dengan Nomor B.15.000.2.4/6364/SEKRET/DISTANPANGAN.

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang pada Aset Tetap Rusak Berat/Usang antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

1. Terdapat Koreksi Pencatatan Saldo Awal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp79.212.265,00 karena ada koreksi nilai perolehan Barang Milik Daerah pada tahun sebelumnya.

Mutasi Kurang

1. Terdapat Pengeluaran Hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp415.755.720,00 kepada Pemerintah Kabupaten Bangli berupa Bangunan Rumah Sakit dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah;
2. Terdapat Koreksi Pencatatan Saldo Awal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp65.270.000,00 berupa Rumah Negara dikarenakan SK Hapus terbit pada tahun 2022.

5.3.1.6.3.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terdiri dari Aset yang Dioperasionalkan Pihak Lain, Aset Pinjam Pakai, Aset Tetap yang Akan D hibahkan, serta Aset Lain-lain Lainnya (Kas yang Dibatasi Penggunaannya, Aset tetap lainnya berupa Buku yang tidak ditemukan fisiknya dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang masih dalam proses pemindahtanganan dan penghapusan, Hibah Tanah Bangunan Dermaga dan Tanah Jalan Khusus Lain-lain, dan Aset Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya yang direklasifikasi dari Aset Tetap).

Saldo Aset Lainnya milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset yang Dioperasionalkan Pihak Lain	30.807.460.109,54	22.915.375.000,00	7.892.085.109,54	34,44
Aset Pinjam Pakai	68.979.643.130,00	0,00	68.979.643.130,00	0,00
Aset Tetap yang Akan D hibahkan	214.291.605.999,00	239.827.247.173,00	(25.535.641.174,00)	(10,65)
Aset Lain-lain Lainnya	3.642.726.537,51	14.027.181.614,63	(10.384.455.077,12)	(74,03)
Jumlah Bruto	317.721.435.776,05	276.769.803.787,63	40.951.631.988,42	14,80
Akumulasi Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(86.895.824.324,00)	(99.946.491.529,03)	13.050.667.205,03	(13,06)
Jumlah Neto	230.825.611.452,05	176.823.312.258,60	54.002.299.193,45	30,54

Penjelasan:

1. Aset yang dioperasikan pihak lain:

Aset yang dioperasikan pihak lain sebesar Rp30.807.460.109,54 terdiri atas :

- a. Tanah yang dioperasikan pihak lain sebesar Rp24.699.370.359,54
Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tanah yang dioperasikan pihak lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp12.328.229.609,54 sebanyak 173.887 m2 bidang yang dioperasikan oleh 86 Pemerintah Desa diwilayah Provinsi Bali pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebesar Rp1.557.447.500,00 sebanyak 9.430 m2 bidang yang dioperasikan oleh 10 pihak pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.112.008.000,00 sebanyak 9.244 m2 bidang yang dioperasikan oleh tiga pihak pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.283.467.250,00 sebanyak 33.180m2 bidang yang dioperasikan oleh tiga pihak dan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp418.218.000,00 sebanyak 516 m2 bidang yang dioperasikan oleh satu pihak.
- b. Gedung dan Bangunan yang dioperasikan pihak lain sebesar Rp5.748.816.950,00
Saldo tersebut merupakan nilai Aset Gedung dan Bangunan yang akan dioperasikan pihak lain pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.527.035.000,00 dan Dinas Pendidikan Rp3.221.781.950,00.
- c. Peralatan dan Mesin yang dioperasikan pihak lain sebesar Rp359.272.800,00
Saldo tersebut merupakan nilai Aset Peralatan dan mesin yang dioperasikan pihak lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp359.272.800,00.

Rincian Aset Tanah, Gedung dan Peralatan Mesin yang dioperasikan pihak lain dapat dilihat pada **Lampiran 38**.

2. Aset Pinjam Pakai

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Pinjam Pakai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 dan saldo Tahun 2022 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Awal				
- Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Tambah:				
<i>Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga</i>				
Tanah	50.979.467.145,00	0,00	50.979.467.145,00	0,00
Peralatan dan Mesin	970.385.327,00	0,00	970.385.327,00	0,00
Gedung dan Bangunan	23.762.057.443,00	0,00	23.762.057.443,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.816.152.850,00	0,00	1.816.152.850,00	0,00
<i>Reklasifikasi dari Aset Tetap</i>				
- Tanah	32.912.184.650,00	0,00	32.912.184.650,00	0,00

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
- Gedung dan Bangunan	1.393.308.000,00	0,00	1.393.308.000,00	0,00
<i>Koeksi Pencatatan Saldo Awal</i>				
- Tanah	843.750.000,00	0,00	843.750.000,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	112.677.305.415,00	0,00	112.677.305.415,00	0,00
Mutasi Kurang:				
<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap</i>				
- Tanah	(36.260.405.345,00)	0,00	(36.260.405.345,00)	0,00
- Gedung dan Bangunan	(6.632.374.940,00)	0,00	(6.632.374.940,00)	0,00
<i>Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan</i>				
- Gedung dan Bangunan	(804.882.000,00)	0,00	(804.882.000,00)	0,00
<i>Koreksi Pencatatan Saldo Awal</i>				
- Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	(43.697.662.285,00)	0,00	(43.697.662.285,00)	0,00
Saldo Akhir				
- Tanah	48.474.996.450,00	0,00	48.474.996.450,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	970.385.327,00	0,00	970.385.327,00	0,00
- Gedung dan Bangunan	17.718.108.503,00	0,00	17.718.108.503,00	0,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.816.152.850,00	0,00	1.816.152.850,00	0,00
- Jumlah Bruto	68.979.643.130,00	0,00	68.979.643.130,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa	(6.347.890.049,00)	0,00	(6.347.890.049,00)	0,00
- Jumlah Neto	62.631.753.081,00	0,00	62.631.753.081,00	0,00

Rincian Aset Pinjam Pakai dapat dilihat pada *Lampiran 39*.

Penjelasan:

3. Aset Tetap yang Akan D hibahkan:

Aset Tetap yang Akan D hibahkan sebesar Rp214.291.605.999,00 terdiri atas:

a. Tanah yang akan dihibahkan sebesar Rp8.172.496.000,00

Saldo tersebut merupakan Nilai Aset Tetap Tanah yang dihibahkan kepada Kementerian PUPR Republik Indonesia dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Nomor B.13.032/9682/PBMD/BPKAD tanggal 18 Desember 2023 dan sudah keluar SK Penghapusan Hibah Nomor 71/04-E/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024. Rincian Aset Tetap Tanah yang akan dihibahkan dapat dilihat pada *Lampiran 40*.

b. Gedung dan Bangunan yang akan D hibahkan Sebesar Rp487.528.000,00

Saldo tersebut merupakan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu sebesar Rp442.028.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa sebelas unit Bangunan Terminal dan Ibadah Lain-lain dan sebesar Rp45.500.000,00 pada Pengelola Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan D hibahkan Sebesar Rp178.583.075.999,00

Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp178.583.075.999,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Unit	Nilai	Keterangan
1	Jalan dan konstruksi pelengkapannya	41	56.367.895.454,00	PUPRKIM
2	Instalasi jaringan	1	809.950.000,00	PUPRKIM
3	Saluran Induk	46	105.911.620.545,00	PUPRKIM
4	Jembatan Beton dan Baja	169	8.588.819.000,00	PUPRKIM
5	Bangunan Pengaman Irigasi dan Sungai	3	6.904.791.000,00	PUPRKIM
Jumlah		260	178.583.075.999,00	

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta gedung yang akan dihibahkan dapat dilihat pada *Lampiran 41*.

- d. **Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan Dihibahkan sebesar Rp27.048.506.000,00**
Konstruksi dalam pengerjaan yang akan dihibahkan merupakan konstruksi Pelabuhan Gunaksa senilai Rp27.048.506.000,00 masih dalam proses untuk dihibahkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 224 Tahun 2016 bahwa Pelabuhan Gunaksa ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi. Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan dihibahkan dapat di lihat pada *Lampiran 42*.

4. Aset Lain-lain Lainnya

Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp3.642.726.537,51 terdiri atas:

a. Kas yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp3.600.521.037,51

Kas yang dibatasi Penggunaannya merupakan jaminan reklamasi dan pasca tambang TAHUN 2023 yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali. Jaminan tersebut dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp3.600.521.037,51

b. Aset tetap lainnya berupa Buku yang tidak ditemukan fisiknya sebesar Rp22.501.500,00

Saldo tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya berupa buku yang tidak ditemukan fisiknya tercatat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali sebesar Rp22.501.500,00 sudah diajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan surat Nomor B.31.028/2144/UK/DIKPORA, tanggal 30 Januari 2024. Rincian Aset Tetap Lainnya – Buku yang tidak ditemukan fisiknya dapat dilihat pada *Lampiran 43*.

c. Kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp19.704.000,00

Kapal Penangkap Ikan \geq 30GT sebanyak 4 unit dan alat penangkap ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan dimana kapal tersebut diadakan di tahun 2014, namun dikarenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan saran dari konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan tersebut diputus kontrak. Pada saat pemutusan kontrak fisik pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 55,64% dengan nilai Rp3.320.595.200,00 ($55,64\% \times Rp5.968.000.000,00$), namun yang dibayarkan sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp2.984.000.000,00 ($50\% \times Rp5.968.000.000,00$). Pada APBD-P TA 2015,

Dinas Kelautan dan Perikanan mengusulkan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dengan menggunakan sisa anggaran DAK Tahun 2014 dan telah disetujui dalam APBD-P. Dalam rangka persiapan proses pelelangan, dilakukan inspeksi fisik pekerjaan tersebut diketahui terdapat sebagian dari peralatan dari kapal tersebut telah hilang dan telah dilaporkan ke Kepolisian (Polres Banyuwangi) dengan Tanda Bukti Lapor Nomor STTLP/167/VI/2015/JTM/RES.BWI tanggal 9 Juli 2015. Sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan, karena mekanisme untuk melanjutkan pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan terkendala ketentuan yang berlaku saat ini terkait dengan pedoman penggunaan SILPA DAK.

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 739 K/Pid.Sus/2020 tanggal 12 Mei 2020, dilakukan koreksi berkurang dengan Berita Acara Koreksi Nomor 523.1/2724/Sekret/Dislautkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga nilai menjadi sebesar Rp2.520.595.200,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Dinas Kelautan dan Perikanan dengan surat nomor 523.1/2725/Sekret/Dislautkan tanggal 19 Oktober 2020 mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah, dan telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Desember 2020, dan dalam proses penilaian/appraisal untuk mendapatkan nilai wajar. Hasil penilaian dari KJPP Nomor 00830/3.0061-00/PI/11/0397/1/XI/2022, tanggal 30 November 2022 diperoleh nilai *Scrap* Rp66.509.742,- (enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) untuk 4 (empat) unit kapal kayu penangkap ikan dan 1 (satu) buah alat penangkap ikan dalam proses pemindahtanganan di Pengelola Barang BPKAD Provinsi Bali. 1 (satu) buah alat penangkap ikan sudah dilakukan pemindahtanganan dengan proses lelang dan sudah keluar Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : B.13.028/3979/P.BMD/BPKAD tanggal 19 Mei 2023. Sedangkan 4 (empat) unit kapal proses lelang dilakukan melalui KPKNL Jember pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan hasil yang diperoleh yaitu Tidak Ada Peminat (TAP). Selanjutnya dilakukan penilaian ulang berdasarkan surat dari BPKAD Nomor B.13.028/6981/BPKAD, tanggal 05 September 2023. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersurat kepada KJPP Tjandra Kasih agar dilakukan penilaian ulang terhadap kapal tersebut sesuai surat B.22.027/1496/sekret/dislautkan tanggal 13 September 2023. Hasil nilai ulang yang dilakukan oleh KJPP Tjandra Kasih dituangkan pada laporan Nomor : 00710/3.0061-00/PI/11/0397/1/IX/2023 tanggal 20 September 2023 diperoleh Nilai Sekrap sebesar Rp. 19.704.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) untuk 4 (empat) unit Kapal Penangkap ikan. Selanjutnya dilakukan koreksi pencatatan nilai 4 (empat) unit Kapal Penangkap Ikan sesuai penilaian ulang yang dilakukan oleh appraisal KJPP Tjandra Kasih dengan Nomor Berita Acara B.22.032/2077/Sekret/Diskelkan tanggal 22 Desember 2023.

Rincian Kapal Penangkap Ikan dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

Rincian Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Provinsi Bali dapat dilihat pada **Lampiran 45**.

5.3.1.6.4 Treasury Deposit Facility (TDF)

Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
---------	------------------	------------------	----------------------	---

Treasury Deposit Facility (TDF)	27.241.942.000,00	19.575.067.331,00	7.666.874.669,00	39,17
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------

Penjelasan:

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Jumlah tersebut merupakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) secara nontunai yang disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023. Jumlah tersebut diatas belum termasuk remunerasi Bulan Desember sebesar Rp4.747.549,12. Saldo dan remunerasi tersimpan di Kantor Pusat Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000542980. Sesuai surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 13 Maret 2023 yang menyatakan dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF, pemda mencatat sebagai Aset Lainnya di Neraca pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum (LO).

PMK Nomor 90 Tahun 2023 yang diatur lebih lanjut pada KMK Nomor 38 Tahun 2023 berkaitan dengan penyaluran TDF atas Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar dengan rincian sebagai berikut:

1. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp120.341.000,00;
2. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp1.887.922.000,00; dan
3. DBH PBB sebesar Rp443.949.000,00.

PMK Nomor 159 Tahun 2023 berkaitan dengan penyaluran TDF atas alokasi tambahan DBH dengan rincian sebagai berikut:

1. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp24.276.938.000,00
2. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp287.874.000,00; dan
3. DBH PBB sebesar Rp224.918.000,00.

5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	1.217.203.360.639,22	566.202.341.952,92	651.001.018.686,30	114,98
Kewajiban Jangka Panjang	1.099.191.683.906,51	1.352.247.744.892,63	(253.056.060.986,12)	(18,71)
Jumlah	2.316.395.044.545,73	1.918.450.086.845,55	397.944.957.700,18	20,74

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada *Lampiran 46*.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	161.434.041,00	60.728.160,90	100.705.880,10	165,83
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	243.464.798.088,00	145.201.591.122,00	98.263.206.966,00	67,67
Pendapatan Diterima Dimuka	19.013.940.968,10	93.259.015.787,91	(74.245.074.819,81)	(79,61)
Utang Belanja	954.563.187.542,12	327.681.006.882,11	626.882.180.660,01	191,31
Jumlah	1.217.203.360.639,22	566.202.341.952,92	651.001.018.686,30	114,98

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	161.434.041,00	60.728.160,90	100.705.880,10	165,83

Penjelasan:

Saldo tersebut merupakan kewajiban penyeteroran ke Kas Negara atas sisa dana Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula yang telah ditutup dan disetor ke Kas Daerah pada tanggal 15 Februari 2023.

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	243.464.798.088,00	145.201.591.122,00	98.263.206.966,00	67,67

Penjelasan:

Saldo tersebut merupakan jumlah pembayaran pokok yang jatuh tempo tahun 2023 dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai berita acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2020 ("PEN APBN 2020") Pemerintah Provinsi Bali Nomor BA-030/SMI/DPPPP/DPPU-1/0223 tanggal 13 Pebruari 2023. Sesuai berita acara diatas, pembayaran pokok utang dimulai tanggal 30 Juni 2023 masing-masing perbulan sebesar Rp20.743.084.446,00 atau seluruhnya sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp145.201.591.122,00.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	3.434.260.325,90	93.259.015.787,91	(89.825.843.199,63)	96,32
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	14.411.732.740,57	0,00	14.411.732.740,57	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	1.167.947.901,63	0,00	1.169.035.639,25	0,00
Jumlah	19.013.940.968,10	93.259.015.787,91	(74.245.074.819,81)	(79,61)

Penjelasan:

Saldo tersebut merupakan jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri dari 9 (sembilan) perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Jenis Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	Pendapatan BLUD	120.895.719,77	229.428.401,84	(108.532.682,07)	(47,31)

Perangkat Daerah	Jenis Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Perhubungan	Sewa BMD	751.629.244,25	956.666.668,00	(205.037.423,75)	(21,43)
Badan Pendapatan Daerah	Sewa BMD	4.969.051,23	0,00	4.969.051,23	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	(retribusi)	173.953.434,38	0,00	173.953.434,38	0,00
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM	IMTA (retribusi)	3.233.102.891,59	0,00	3.233.102.891,59	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IMTA	0,00	2.386.183.629,92	(2.386.183.629,92)	(100,00)
	Izin Perikanan	0,00	243.802.860,16	(243.802.860,16)	(100,00)
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sewa BMD	27.204.000,00	27.204.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	Sewa BMD	148.834.039,78	242.541.572,32	(93.707.532,54)	(38,64)
Sekretariat Daerah	Deviden	0,00	74.048.319.240,30	(74.048.319.240,30)	(100,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa BMD	14.553.352.587,10	15.124.869.415,37	(571.516.828,27)	(3,78)
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		19.013.940.968,10	93.259.015.787,91	(74.245.074.819,81)	(79,61)

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 47*.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	129.235.006.728,09	83.529.914.256,12	45.705.092.471,97	54,72
Utang Belanja Barang dan Jasa	28.048.317.006,00	7.448.427.873,99	20.599.889.132,01	276,57
Utang Belanja Hibah	149.648.189.345,00	891.277.020,00	148.756.912.325,00	16.690,31
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.060.263.152,00	0,00	3.060.263.152,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.142.325.540,03	0,00	57.142.325.540,03	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.335.518.117,00	0,00	23.335.518.117,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	362.814.553.542,00	235.811.387.732,00	127.003.165.810,00	53,86
Utang Belanja Bantuan Keuangan	201.279.014.112,00	0,00	201.279.014.112,00	0,00
Jumlah	954.563.187.542,12	327.681.006.882,11	626.882.180.660,01	191,31

5.3.2.1.4.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta Kenaikan/(Penurunan) dan persentasenya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.897.743.546,31	981.175.948,92	916.567.597,39	93,42
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47.516.650.518,00	36.837.597.430,00	10.679.053.088,00	28,99
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.820.612.663,78	45.711.140.877,20	34.109.471.786,58	74,62
Jumlah	129.235.006.728,09	83.529.914.256,12	45.705.092.471,97	54,72

Penjelasan:

Utang belanja pegawai diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN berupa Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terlambat diajukan pencairan terhadap kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala serta kenaikan jabatan fungsional, utang dimaksud sudah dibayarkan berdasarkan usulan dimasing-masing Perangkat Daerah.
2. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN berupa Beban Tambahan Penghasilan ASN bulan Desember 2023 yang penganggarannya pada anggaran induk tahun berikutnya dan sudah dibayarkan keseluruhan di bulan Januari 2024.
3. Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN berupa Beban Insentif bagi ASN dan Insentif Pungutan Retribusi Daerah Triwulan IV yang penganggarannya di Tahun berikutnya dan sampai saat ini sudah dibayarkan keseluruhannya di bulan Januari. Sedangkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp22.693.814.280,00 sudah terealisasi sebesar Rp22.656.233.480,00 sisanya masih menunggu SK *carryover* dan hasil rekonsiliasi. Sedangkan Jasa Pelayanan Kesehatan berupa beban jasa pelayanan yang ada di masing-masing BLUD. Terhadap beban jasa pelayanan kesehatan dimaksud sudah dibayarkan kecuali pada Rumah Sakit Jiwa Bangli sebesar Rp2.346.099.000,00 yang belum dapat dibayarkan karena masih menunggu peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Gubernur Nomor 809/04-C/HK/2022 tentang Besaran *Basic* dan Perhitungan Akhir Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Rincian Utang Belanja Pegawai dapat dilihat pada *Lampiran 48*.

5.3.2.1.4.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Barang	16.559.067.647,00	2.027.001.826,99	14.532.065.820,01	716,92
Utang Belanja Jasa	4.726.135.795,00	4.767.139.031,00	(41.003.236,00)	(0,86)
Utang Belanja Pemeliharaan	4.110.234.716,00	0,00	4.110.234.716,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.652.878.848,00	654.287.016,00	1.998.591.832,00	305,46
Jumlah	28.048.317.006,00	7.448.427.873,99	20.599.889.132,01	276,57

Penjelasan:

Utang Belanja Barang dan Jasa diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Barang berupa bahan kimia dan obat-obatan pada Rumah Sakit (BLUD) di samping belanja Barang Habis Pakai Lainnya yang mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya karena:
 - a. Terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan pasien rawat inap yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2022.
 - b. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada layanan Kemoterapi.
 - c. Kebutuhan mendesak obat untuk pelayanan baik rawat inap ataupun rawat jalan;
 - d. Pagu anggaran yang terbatas pada tahun 2023 dan adanya penambahan layanan dan penambahan jumlah pasien terutama pada layanan kanker terpadu; dan

- e. Untuk BMHP implan tidak membuffer (menyetok) di farmasi karena sesuai dengan kebutuhan pasien yang dibutuhkan saat itu (pasien dengan kecelakaan yang memerlukan implan baik orthopedi, bedah saraf atau bedah plastik).

Terkait Utang Belanja Barang diatas, sudah dibayarkan tahun 2024 dengan sumber dana dari Kas BLUD.

2. Utang Belanja Jasa berupa tagihan atas Jasa Listrik, Air dan Telepon bulan Desember telah dibayarkan awal Januari 2024 dengan sumber dana dari PAD.
3. Utang Belanja Pemeliharaan berupa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang mengalami peningkatan di tahun 2023 karena keterbatasan dana di RKUD dan sudah dibayarkan tahun 2024 dengan sumber dana dari PAD.
4. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat berdasarkan tabel diatas meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya karena keterbatasan dana RKUD dan sudah dibayarkan tahun 2024 dengan sumber dana dari PAD.

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada *Lampiran 49*.

5.3.2.1.4.3 Utang Belanja Hibah

Saldo Utang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Hibah	149.648.189.345,00	891.277.020,00	148.756.912.325,00	16.690,31

Penjelasan:

1. Saldo Utang Belanja Hibah Desa Adat pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp148.500.000.000,00. Hal ini didasarkan pada hasil rapat TAPD Provinsi Bali tanggal 22 Desember 2023 yang diteruskan dengan Surat Sekretariat Daerah Nomor B.13.900/9800/PAPKD/BPKAD tanggal 22 Desember 2023 pada poin 3 yang menyebutkan bahwa Belanja Hibah Desa Adat yang belum direalisasi agar dialokasikan kembali tahun anggaran 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan audit Inspektorat Provinsi Bali, pembayaran kewajiban Dana Hibah Desa Adat Tahap III Tahun 2023 direncanakan sejumlah 1.485 Desa Adat masing-masing sebesar Rp100.000.000,-. Realisasi Pembayaran kewajiban Dana Hibah Desa Adat Tahap III Tahun 2023 per 19 Mei 2024 sejumlah 1.484 Desa Adat. Terdapat satu Desa Adat yang belum merealisasikan Dana Hibah Desa Adat Tahap III Tahun 2023, yaitu Desa Adat Tembawu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Hal ini disebabkan Desa Adat Tembawu belum memenuhi salah satu persyaratan administrasi pencairan dana hibah, yaitu belum memiliki Keputusan MDA Provinsi Bali tentang penetapan dan pengukuhan Prajuru Desa Adat. Saat ini Desa Adat Tembawu sedang berproses untuk melengkapi administrasi pengajuan keputusan sesuai mekanisme di MDA Provinsi Bali. Pembayaran kewajiban Dana Hibah Desa Adat Tahap III Tahun 2023 kepada Desa Adat Tembawu akan direalisasikan setelah kelengkapan dokumen pencairan dana hibah lengkap dipenuhi.
2. Saldo Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebesar Rp1.148.189.345,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) di Area Pura Penataran Lempuyang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem sebesar Rp1.049.665.175,00;

- b. Pembangunan Wantilan dan Penataan Areal Tempat Melasti di Pantai Padang Galak Desa Kesiman Denpasar (Lanjutan) sebesar Rp35.167.560,40; dan
- c. Rehabilitasi Balai Banjar Besakih Kangin Kab. Karangasem sebesar Rp63.356.609,60.

5.3.2.1.4.4 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.060.263.152,00	0,00	3.060.263.152,00	0,00

Penjelasan:

Saldo tersebut merupakan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada RSUD Bali Mandara dan telah dilakukan pelunasan selama periode Januari-Mei 2024.

5.3.2.1.4.5 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	56.096.078.970,00	0,00	56.096.078.970,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.046.246.570,03	0,00	1.046.246.570,03	0,00
Jumlah	57.142.325.540,03	0,00	57.142.325.540,03	0,00

Penjelasan:

1. Saldo Utang Belanja Modal Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.319.010.178,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp51.019.278.958,00 yang bersumber dari PAD.
2. Saldo Utang Belanja Modal Bangunan Gedung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp19.805.400,00.
3. Saldo Utang Belanja Modal Bangunan Gedung pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp4,736,317,557.00.
4. Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada Rumah Sakit Umum Bali Mandara sebesar Rp1.046.246.570,03.

5.3.2.1.4.6 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	22.787.698.117,00	0,00	22.787.698.117,00	0,01
Utang Belanja Modal Bangunan Air	547.820.000,00	0,00	547.820.000,00	0,00
Jumlah	23.335.518.117,00	0,00	23.335.518.117,00	0,00

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Bali per 31

Desember 2023 sebesar Rp23.335.518.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Sumber Dana	Tanggal Pembayaran	Nilai Sisa
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pendapatan Asli Daerah	26/02/2024 07/03/2024 03/04/2024 01/03/2024	0,00

5.3.2.1.4.7 Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023. Utang transfer tersebut merupakan utang atas Transfer Bagi Hasil Pajak yang belum disalurkan per 31 Desember 2023. Rincian saldo Utang Transfer Pemerintah Provinsi Bali atas saldo Tahun 2023 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kabupaten Buleleng	49.167.263.532,00	31.869.041.403,00	17.298.222.129,00	54,28
Kabupaten Jembrana	30.815.807.780,00	20.065.798.396,00	10.750.009.384,00	53,57
Kabupaten Tabanan	38.920.094.097,00	25.298.853.381,00	13.621.240.716,00	53,84
Kabupaten Badung	53.886.676.895,00	34.974.517.717,00	18.912.159.178,00	54,07
Kabupaten Gianyar	40.641.665.817,00	26.400.489.509,00	14.241.176.308,00	53,94
Kabupaten Bangli	26.889.942.750,00	17.540.579.457,00	9.349.363.293,00	53,30
Kabupaten Klungkung	26.280.090.593,00	17.139.604.502,00	9.140.486.091,00	53,33
Kabupaten Karangasem	37.462.447.417,00	24.347.665.130,00	13.114.782.287,00	53,86
Kota Denpasar	58.750.564.661,00	38.174.838.237,00	20.575.726.424,00	53,90
Jumlah	362.814.553.542,00	235.811.387.732,00	127.003.165.810,00	53,86

Rincian Utang Belanja Bagi Hasil per jenis pajak dapat dilihat pada *Lampiran 50*.

Penjelasan:

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil sesuai tabel diatas sudah dibayarkan di tahun 2024 dengan sumber dana dari Pendapatan Pajak/PAD.

5.3.2.1.4.8 Utang Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota	190.578.614.112,00	0,00	190.578.614.112,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	10.700.400.000,00	0,00	10.700.400.000,00	0,00
Jumlah	201.279.014.112,00	0,00	201.279.014.112,00	0,00

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada kabupaten/kota per 31 Desember 2023 sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/9931/PADFE/BPKAD, tanggal 29 Desember 2023 perihal Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota se-Bali, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	Nomor BA
Kabupaten Buleleng	18.570.568.080,00	B.31.900.1.6.3/2710/Set/BPKAD
Kabupaten Jembrana	19.396.731.966,00	B.31.900.1.6.3/2706/Set/BPKAD
Kabupaten Tabanan	45.377.611.375,00	B.31.900.1.6.3/2705/Set/BPKAD
Kabupaten Gianyar	2.100.000.000,00	B.31.900.1.6.3/2704/Set/BPKAD
Kabupaten Bangli	46.287.352.230,00	B.31.900.1.6.3/2703/Set/BPKAD
Kabupaten Klungkung	22.507.318.924,00	B.31.900.1.6.3/2708/Set/BPKAD
Kabupaten Karangasem	35.336.593.397,00	B.31.900.1.6.3/2709/Set/BPKAD
Kota Denpasar	1.002.438.140,00	B.31.900.1.6.3/2707/Set/BPKAD
Jumlah	190.578.614.112,00	

Penjelasan:

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan diatas sudah anggarkan pada APBD Induk 2024, dan sampai saat laporan ini disusun Utang Belanja Bantuan Keuangan dikasud sudah dibayarkan sebesar Rp147.343.461.991,00 sisa masih berproses karena Pemerintah Kabupaten masih berproses kontrak ulang dan belum melakukan pengamprahan pada tahun 2024 per tanggal laporan ini disusun. Dibayarkan tanggal 22 April 2024.

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp10.722.600.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 1/03-D/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 2/03-D/HK/2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Desa untuk Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa se-Bali dalam TA 2023.

Uraian	31 Desember 2023	Nomor BA
Kabupaten Buleleng	1.970.100.000,00	B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD
Kabupaten Jembrana	664.500.000,00	B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD
Kabupaten Tabanan	2.251.200.000,00	B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD
Kabupaten Badung	863.100.000,00	B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD
Kabupaten Gianyar	1.183.500.000,00	B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD
Kabupaten Bangli	1.072.200.000,00	B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD
Kabupaten Klungkung	806.100.000,00	B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD
Kabupaten Karangasem	1.351.800.000,00	B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD
Kota Denpasar	537.900.000,00	B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD
Jumlah	10.700.400.000,00	

Penjelasan:

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan diatas sudah anggarkan pada APBD Induk 2024, dan sampai saat laporan ini disusun Utang Belanja Bantuan Keuangan dimaksud sudah dibayarkan sebesar Rp10.686.300.000,00 kurang bayar untuk 1 (satu) desa, yaitu Desa Dadakputih karena kendala administrasi adanya perubahan nama desa, akan dibayarkan pada APBD Perubahan. Utang tersebut dibayarkan sejak 6 Februari sampai April 2024. di bulan Mei 2024 dengan sumber dana dari PAD.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang kepada Pemerintah Pusat	1.095.591.162.869,00	1.348.300.369.478,00	(252.709.206.609,00)	(18,74)
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.600.521.037,51	3.947.375.414,63	(346.854.377,12)	(8,79)
Jumlah	1.099.191.683.906,51	1.352.247.744.892,63	(253.056.060.986,12)	(18,71)

5.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	1.095.591.162.869,00	1.348.300.369.478,00	(252.709.206.609,00)	(18,74)

Penjelasan:

Saldo tersebut merupakan saldo Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-201/SMI/1221 Tentang Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember

2020. Sesuai dengan Akta Perjanjian tersebut, total biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan proses pinjaman mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp22.415.498.233,00 dan dicatat sebagai Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan. Selain itu, Jangka waktu pinjaman 96 (sembilan puluh enam) bulan termasuk masa tenggang 24 bulan.

-Pembayaran Biaya Pengelolaan (Syarat Efektif)	2.775.000,00	11 Mei 2021
-Pembayaran Biaya Pengelolaan 2022	1.942.500.000,00	16 Juni 2022
-Pembayaran Biaya Provisi	14.935.019.606,00	28 Oktober 2022
-Pembayaran Biaya Pengelolaan 2023	2.762.978.627	7 Maret 2023
Jumlah	22.415.498.233	

5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Saldo Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 beserta kenaikan/(penurunan) dan persentasenya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta	3.600.521.037,51	3.947.375.414,63	(346.854.377,12)	(8,79)

Penjelasan:

Jaminan reklamasi adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan kepada pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan reklamasi atau pemulihan lahan yang telah ditambang. Tujuan Jaminan Reklamasi adalah untuk memastikan bahwa lahan yang telah dieksploitasi akan dipulihkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Jaminan reklamasi diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan reklamasi dan jaminannya.

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023. Saldo tersebut merupakan Utang Jangka Panjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp3.600.521.037,51, yang merupakan jaminan reklamasi dan paska tambang. Saldo tersebut adalah saldo yang disajikan sebagai Aset Lain-lain bagian dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada poin 5.3.1.5.3.2. Penurunan Utang disebabkan karena adanya pencairan jaminan reklamasi sebesar Rp346.854.377,12. Data Nominal Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Per Akhir Tahun 2023 (Pokok+Bunga) dapat dilihat pada *Lampiran 51*.

5.3.3 Ekuitas

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	15.648.183.735.009,10	11.191.129.745.531,45	4.457.053.989.477,70	39,83

Saldo tersebut saldo merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah per tanggal 31 Desember 2023. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam

5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan Operasional

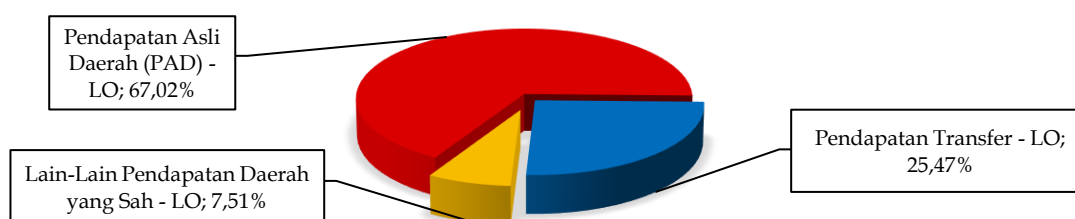
5.4.1 Pendapatan Daerah – LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
8.436.572.126.174,97	6.156.319.615.291,08	2.280.252.510.883,89	37,04

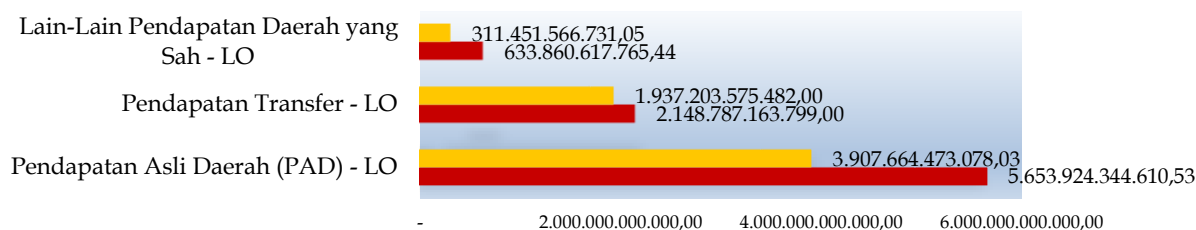
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah	5.653.924.344.610,53	3.907.664.473.078,03	1.746.259.871.532,50	44,69
Pendapatan Transfer	2.148.787.163.799,00	1.937.203.575.482,00	211.583.588.317,00	10,92
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	633.860.617.765,44	311.451.566.731,05	322.409.051.034,39	103,52
Jumlah	8.436.572.126.174,97	6.156.319.615.291,08	2.280.252.510.883,89	37,04

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan perbandingan realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:



Gambar 5.12 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023



Gambar 5.13 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
5.653.924.344.610,53	3.907.664.473.078,03	1.746.259.871.532,50	44,69

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pajak Daerah-LO	4.055.314.861.085,00	3.250.612.970.939,00	804.701.890.146,00	24,76
Retribusi Daerah-LO	14.534.082.587,68	13.986.275.999,34	547.806.588,34	3,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	340.875.161.832,60	308.850.018.007,74	32.025.143.824,86	10,37
Lain-lain PAD yang Sah-LO	1.243.200.239.105,25	334.215.208.131,95	908.985.030.973,30	271,98
Jumlah	5.653.924.344.610,53	3.907.664.473.078,03	1.746.259.871.532,50	44,69

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
4.055.314.861.085,00	3.250.612.970.939,00	804.701.890.146,00	24,76

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	1.742.228.994.500,00	1.691.013.543.150,00	51.215.451.350,00	3,03
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1.416.376.206.600,00	790.439.145.700,00	625.937.060.900,00	79,19
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	567.121.203.720,00	430.793.504.138,00	136.327.699.582,00	31,65
Pajak Air Permukaan-LO	4.113.783.891,00	3.480.730.226,00	633.053.665,00	18,19
Pajak Rokok-LO	325.474.672.374,00	334.886.047.725,00	(9.411.375.351,00)	(2,81)
Jumlah	4.055.314.861.085,00	3.250.612.970.939,00	804.701.890.146,00	24,76

Penjelasan:

Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Peningkatan Penerimaan dari Pajak Daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp822.065.453.078,00
- Penurunan Pergerakan dari Piutang Pajak Daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp17.363.562.932,00

Pengakuan Pajak Daerah Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Pajak Daerah-LRA TA 2023 sebesar Rp2.410.000.816,00 (Rp4.055.314.861.085,00 - Rp4.052.904.860.269,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	2.410.000.816,00
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Piutang Pajak Tahun 2023 (Neraca)	52.151.207.987,00
✓ Penghapusan Piutang Pajak pada Bapenda sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1062/04-E/HK/2023 Tanggal 29 Desember 2023	14.695.300,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Piutang Pajak Tahun 2022 (Neraca)	(49.755.902.471,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	2.410.000.816,00

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
14.534.082.587,68	13.986.275.999,34	547.806.588,34	3,92

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Retribusi Jasa Umum-LO	200.045.000,00	4.813.344.200,00	(4.613.299.200,00)	(95,84)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	200.045.000,00	4.813.344.200,00	(4.613.299.200,00)	(95,84)
Retribusi Jasa Usaha-LO	9.708.963.463,00	5.609.455.659,00	4.099.507.804,00	73,08
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.287.127.520,00	3.039.419.313,00	1.247.708.207,00	41,05
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila-LO	77.150.000,00	56.750.000,00	20.400.000,00	35,95
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	4.281.423.000,00	1.486.731.000,00	2.794.692.000,00	187,98

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.063.262.943,00	1.026.555.346,00	36.707.597,00	3,58
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	4.625.074.124,68	3.563.476.140,34	1.061.597.984,34	29,79
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	1.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	360.715.811,35	448.724.456,52	(88.008.645,17)	(19,61)
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	0,00	4.575.000,00	(4.575.000,00)	(100,00)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00	3.107.176.683,82	(3.107.176.683,82)	(100,00)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	4.262.858.313,33	0,00	4.262.858.313,33	100,00
Jumlah	14.534.082.587,68	13.986.275.999,34	547.806.588,34	3,92

Penjelasan:

Perubahan nilai Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Peningkatan Penerimaan dari Retribusi Daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp964.123.529,00
- Penurunan Penerimaan dari Piutang Retribusi Daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp76.161.000,00
- Penurunan Pergerakan Penerimaan dari Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp845.831.524,05

Pengakuan Retribusi Daerah Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Retribusi Daerah-LRA TA 2023 sebesar Rp778.382.450,32 (Rp14.534.082.587,68 - Rp15.312.465.038,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(778.382.450,32)
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 (Neraca)	156.460.000,00
✓ Retribusi Daerah Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	2.629.986.553,08
✓ Reklas Piutang pendapatan BLUD menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	75.961.000,00
✓ Koreksi LO atas penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum dilimpahkan dari rekening penampungan Bank BPD Bali ke rekening Kasda Pemerintah Provinsi Bali	13.610.000,00
✓ Koreksi LO atas penerimaan Retribusi Daerah pada BPKAD yang belum dilimpahkan dari rekening penampungan Bank BPD Bali ke rekening Kasda Pemerintah Provinsi Bali	600.000,00
✓ Koreksi LO atas penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan-UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional yang belum dilimpahkan dari rekening penampungan Bank BPD Bali ke rekening Kasda Pemerintah Provinsi Bali	710.000,00
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka, Pendapatan LO, dan Koreksi Ekuitas setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (IMTA Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM)	71.684,36
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka dan Pendapatan LO setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan	68.736.811,35

Uraian	Nilai
menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (Dinas Perikanan dan Kelautan)	
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2022 (Neraca)	(232.621.000,00)
✓ Retribusi Daerah Diterima Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	(3.475.818.014,13)
✓ Koreksi LRA atas penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum dilimpahkan dari rekening penampungan Bank BPD Bali ke rekening Kasda Pemerintah Provinsi Bali	(13.610.000,00)
✓ Koreksi LRA atas penerimaan Retribusi Daerah pada BPKAD yang belum dilimpahkan dari rekening penampungan Bank BPD Bali ke rekening Kasda Pemerintah Provinsi Bali	(600.000,00)
✓ Koreksi LRA atas penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan-UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional yang belum dilimpahkan dari rekening penampungan Bank BPD Bali ke rekening Kasda Pemerintah Provinsi Bali	(710.000,00)
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka, Pendapatan LO, dan Koreksi Ekuitas setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (PTKA Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM)	(1.159.421,98)
Jumlah Penjelasan Selisih	(778.382.387,32)

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
340.875.161.832,60	308.850.018.007,74	32.025.143.824,86	10,37

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	202.455.499,00	184.259.337,00	18.196.162,00	100,00
- PT Asuransi Bangun Askrida	202.455.499,00	184.259.337,00	18.196.162,00	(100,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	339.206.736.276,01	307.312.830.310,63	31.893.905.965,38	10,38
- Perumda Kerta Bali Saguna	75.181.228.825,30	100.948.087.752,30	(25.766.858.927,00)	(25,52)
- PT BPD Bali	259.664.553.295,60	201.864.729.333,37	57.799.823.962,23	28,63
- PT Jamkrida Bali Mandara	4.360.954.155,11	4.500.013.224,96	(139.059.069,85)	(3,09)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	1.465.970.057,59	1.352.928.360,11	113.041.697,48	(4,63)
- PT Rumah Sakit Puri Raharja	1.465.970.057,59	1.352.928.360,11	113.041.697,48	8,36
Jumlah	340.875.161.832,60	308.850.018.007,74	32.025.143.824,86	10,37

Penjelasan:

Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Penurunan Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp62.202.988.925,15; dan
- Penurunan Pergerakan Penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Diterima Dimuka dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp74.048.319.240,30.

Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2023 sebesar Rp182.755.142.510,28 (Rp340.875.161.832,60 - Rp158.120.019.322,32). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	182.755.142.510,28
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	74.048.319.240,30
✓ Bagian Laba Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2023	1.093.422.585,00
✓ Bagian Laba PT BPD Bali Tahun 2023	259.664.553.295,60
✓ Bagian Laba PT Jamkrida Bali Mandara Tahun 2023	4.618.947.126,43
✓ Bagian Laba PT Puri Raharja Tahun 2023	2.872.586.045,68
✓ Koreksi atas perhitungan Penyertaan Modal BUMD pada Perumda Kerta Bali Saguna dengan menyesuaikan Laporan Audit KAP	39.487.000,00
> Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Pembagian Deviden Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2023	(331.193.680,00)
✓ Pembagian Deviden PT BPD Bali Tahun 2023	(155.842.363.119,32)
✓ Pembagian Deviden PT Jamkrida Bali Mandara Tahun 2023	(1.297.540.665,00)
✓ Pembagian Deviden PT Puri Raharja Tahun 2023	(446.466.359,00)
✓ Bagian Rugi Perumda Kerthi Bali Santhi Tahun 2023	0,00
✓ Koreksi atas perhitungan Penyertaan Modal BUMD pada PT Jamkrida Bali dengan menyesuaikan Laporan Audit KAP	(257.992.971,32)
✓ Koreksi atas perhitungan Penyertaan Modal BUMD pada RS Puri Raharja dengan menyesuaikan Laporan Audit KAP	(1.406.615.988,09)
Jumlah Penjelasan Selisih	182.755.142.510,28

Nilai yang tersaji pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Provinsi Bali selama tahun 2023 dapat dilihat pada kolom penambahan dan pengurangan pada *Lampiran 24*.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.243.200.239.105,25	334.215.208.131,95	908.985.030.973,30	271,98

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Lain-

lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	855.232.343.800,27	26.274.992.319,12	828.957.351.481,15	3.154,93
Hasil Sewa BMD-LO	13.812.041.123,87	8.967.422.105,93	4.844.619.017,94	54,02
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	841.420.302.676,40	17.307.570.213,19	824.112.732.463,21	4.761,57
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	3.143.862.100,00	1.345.891.400,00	1.797.970.700,00	133,59
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	3.143.862.100,00	1.345.891.400,00	1.797.970.700,00	133,59
Jasa Giro-LO	8.275.751.573,57	14.226.586.069,98	(5.950.834.496,41)	(41,83)
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	6.164.375.981,56	14.226.586.069,98	(8.062.210.088,42)	(56,67)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	281.710.192,57	0,00	281.710.192,57	100,00
Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	1.829.665.399,44	0,00	1.829.665.399,44	100,00
Pendapatan Bunga-LO	4.558.903.279,22	4.747.549,12	4.554.155.730,10	95.926,46
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	4.558.903.279,22	4.747.549,12	4.554.155.730,10	95.926,46
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.208.006.636,81	2.303.307.072,50	(1.095.300.435,69)	(47,55)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.208.006.636,81	2.303.307.072,50	(1.095.300.435,69)	(47,55)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	53.661.511.340,00	22.058.220.040,00	31.603.291.300,00	143,27
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	53.132.302.600,00	21.769.403.600,00	31.362.899.000,00	144,07
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	528.988.300,00	288.651.800,00	240.336.500,00	83,26
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	220.440,00	164.640,00	55.800,00	33,89
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	3.935.100,00	3.109.800,00	825.300,00	26,54
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	3.440.000,00	2.524.500,00	915.500,00	36,26
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	495.100,00	585.300,00	(90.200,00)	(15,41)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.720.086.377,25	1.338.300.433,57	381.785.943,68	28,53
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	353.064.195,94	1.338.300.433,57	(985.236.237,63)	(73,62)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	3.942.300,00	0,00	3.942.300,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	10.190.999,00	0,00	10.190.999,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	578.183.709,00	0,00	578.183.709,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	116.525.902,29	0,00	116.525.902,29	100,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	42.723.520,00	0,00	42.723.520,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	31.551.625,00	0,00	31.551.625,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-LO	88.775.000,00	0,00	88.775.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	425.316.704,02	0,00	425.316.704,02	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	1.359.222,00	0,00	1.359.222,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	18.399.200,00	0,00	18.399.200,00	100,00
Pendapatan dari BLUD-LO	315.380.472.100,13	266.660.053.447,66	48.720.418.652,47	18,27
Pendapatan dari BLUD-LO	773.349.573,59	266.660.053.447,66	(265.886.703.874,07)	(99,71)
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	311.709.759.568,32	0,00	311.709.759.568,32	100,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	1.392.386.975,54	0,00	1.392.386.975,54	100,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	1.504.975.982,68	0,00	1.504.975.982,68	100,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	15.366.798,00	0,00	15.366.798,00	100,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	15.366.798,00	0,00	15.366.798,00	100,00
Jumlah	1.243.200.239.105,25	334.215.208.131,95	908.985.030.973,30	271,98

Penjelasan:

Perubahan nilai Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Peningkatan Penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp3.723.223.137,21;
- Penurunan Pergerakan nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp849.565.380.933,48; dan
- Pergerakan Pada Pendapatan Diterima Dimuka Lain-Lain PAD yang Sah Rp32.174.578.789,40.

Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2023 sebesar Rp841.796.366.067,28 (Rp1.243.200.239.105,25 - Rp401.403.873.037,97). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain PAD yang Sah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	841.796.366.067,28
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 (Neraca)	880.979.582.565,95
✓ Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	16.580.710.057,53
✓ Koreksi PAD-LO dan Kas di Bendahara Penerimaan atas penerimaan PAD berupa Pajak Daerah pada Bapenda yang belum dilimpahkan dari rekening penampungan Bank BPD Bali ke rekening Kasda Pemerintah Provinsi Bali s.d 31 Desember 2023	144.338.500,00
✓ Penerimaan PAD atas Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Pendidikan yang ditempatkan pada rekening penampungan Bank BPD Bali belum diakui sebagai PAD-LO dan Kas di Bendahara Penerimaan	60.000,00
✓ Penerimaan PAD atas Lain-lain PAD yang Sah pada BPKAD yang ditempatkan pada rekening penampungan Bank BPD Bali belum diakui sebagai PAD-LO dan Kas di Bendahara Penerimaan	138.000,00
✓ Bapenda - Reklas atas Pendapatan Diterima Dimuka yang pada LK Unaudited semua dicatat pada akun Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	4.982.627,87
✓ Reklasifikasi Pendapatan Diterima Dimuka yang pada LK Unaudited semua dicatat pada akun Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III- BPKAD	14.540.115.654,52
✓ Reklas atas Pendapatan Diterima Dimuka yang pada LK Unaudited semua dicatat pada akun Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III (Dinas Kesehatan - RSUD Bali Mandara)	108.995.375,03
✓ Reklas atas Pendapatan Diterima Dimuka yang pada LK Unaudited semua dicatat pada akun Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III Dinas Kesehatan - RS Mata Bali Mandara)	12.026.286,96
✓ Reklas atas Pendapatan Diterima Dimuka yang pada LK Unaudited semua dicatat pada akun Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III (Dinas Perhubungan)	751.629.245,75
✓ Reklas atas Pendapatan Diterima Dimuka yang pada LK Unaudited semua dicatat pada akun Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III (Sekretariat Daerah Provinsi Bali Total)	148.915.541,74
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka, Pendapatan LO, dan Koreksi Ekuitas setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (BPKAD)	19.735.153,82
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka, Pendapatan LO, dan Koreksi Ekuitas setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (Dinas Kesehatan - RS Mata Bali Mandara)	39.365,74
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka, Pendapatan LO, dan Koreksi Ekuitas setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (PTKA Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM)	1.159.421,98
✓ Membalik jurnal penghapusan untuk ARB dan reklasifikasi Hasil Penjualan ke Surplus/Defisit pada BPKAD (JU yang sudah diinput saat unaudited)	1.586.088.063,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	

Uraian	Nilai
✓ Piutang Lain-lain PAD yang Sah diterima dimuka Tahun 2022 (Neraca)	(31.338.240.632,47)
✓ Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	(31.174.637.111,69)
✓ Pelunasan Piutang Lain-Lain berupa Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(18.000.000,00)
✓ Reklasifikasi menjadi Surplus Kegiatan NonOperasional (Penjualan Aset RB)	(1.586.088.063,00)
✓ Reklas akun Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis UPTD Labkes ke Lain-Lain Pendapatan yang sah karena per tahun 2023, UPTD Labkes sudah berstatus BLUD	(75.961.000,00)
✓ Koreksi Ekuitas - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka (Dinas Perhubungan)	(149.691,00)
✓ Koreksi Ekuitas - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka (Sekretariat Daerah)	(93.626.030,58)
✓ Koreksi Ekuitas - Piutang Dinas kebudayaan	(13.650.382,00)
✓ Koreksi PAD-LRA dan LPSAL atas penerimaan PAD berupa Pajak Daerah pada Bapenda yang belum dilimpahkan dari rekening penampungan Bank BPD Bali ke rekening Kasda Pemerintah Provinsi Bali s.d 31 Desember 2023	(144.338.500,00)
✓ Penerimaan PAD atas Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Pendidikan yang ditempatkan pada rekening penampungan Bank BPD Bali belum diakui sebagai PAD-LRA dan Estimasi Perubahan SAL	(60.000,00)
✓ Penerimaan PAD atas Lain-lain PAD yang Sah pada BPKAD yang ditempatkan pada rekening penampungan Bank BPD Bali belum diakui sebagai PAD-LRA dan Estimasi Perubahan SAL	(138.000,00)
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka, Pendapatan LO, dan Koreksi Ekuitas setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (BPKAD)	(17.192.924,02)
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka, Pendapatan LO, dan Koreksi Ekuitas setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (Dinas Kesehatan - RSUD Bali Mandara)	(224.875,67)
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka, Pendapatan LO, dan Koreksi Ekuitas setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (IMTA Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM)	(71.684,36)
✓ Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka, Pendapatan LO, dan Koreksi Ekuitas setelah dilakukan perhitungan matematis ulang dengan menggunakan data tanggal mulai dan berakhir perjanjian serta nilai pendapatan yang telah disesuaikan atas dokumen pendukung (Dinas Perikanan dan Kelautan)	(132.735,62)
✓ Koreksi kurang catat pengakuan utang pihak ketiga atas Kas Lainnya berupa sisa dana BOS yang seharusnya disetorkan ke kas negara	(161.434.041,00)
✓ Jurnal Koreksi KAP pada BLUD UPTD PAM atas kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar daerah tahun 2023	(10.570.000,00)
✓ Piutang PT NII yang belum diakui pada Neraca yaitu sebesar Rp6.861.546.058,20 atas kontribusi tetap TW II, III dan IV TA 2022	0,00
✓ Reklasifikasi atas Temuan BPK (PD TT 2023) terkait temuan Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil (Belanja Modal Jalan) yang seharusnya dicatat sebagai contra-post karena pengembalian di tahun berjalan tetapi tercatat sebagai pendapatan	(6.861.546.058,20)
✓ Pencatatan Surplus Penjualan Bongkaran Gedung TA 2023	(104.659.000,00)
✓ Pencatatan Surplus Penjualan ARB Porsi Ekstrakomptabel TA 2023	(64.858.813,02)



Uraian	Nilai
✓ Pencatatan Surplus Penjualan ARB Porsi Intrakomptabel TA 2023	(704.745.357,64)
✓ Pencatatan Defisit Penjualan ARB Porsi Intrakomptabel TA 2023	(711.824.892,34)
Jumlah Penjelasan Selisih	841.796.366.067,28

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
2.148.787.163.799,00	1.937.203.575.482,00	211.583.588.317,00	10,92

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.148.787.163.799,00	1.937.203.575.482,00	211.583.588.317,00	10,92
Jumlah	2.148.787.163.799,00	1.937.203.575.482,00	211.583.588.317,00	10,92

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
2.148.787.163.799,00	1.937.203.575.482,00	211.583.588.317,00	10,92

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Dana Perimbangan-LO	2.080.894.187.799,00	1.886.843.912.482,00	194.050.275.317,00	10,28
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	163.902.962.200,00	180.221.083.308,00	(16.318.121.108,00)	(9,05)
DBH PBB-LO	2.004.114.000,00	2.778.575.788,00	(774.461.788,00)	(27,87)
DBH PPh Pasal 21-LO	148.266.235.000,00	159.204.279.594,00	(10.938.044.594,00)	(6,87)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	12.411.048.000,00	16.104.221.017,00	(3.693.173.017,00)	(22,93)
DBH CHT-LO	1.221.503.200,00	2.133.790.824,00	(912.287.624,00)	(42,75)
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	62.000,00	216.085,00	(154.085,00)	(71,31)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.244.560.318.195,00	1.194.632.100.845,00	49.928.217.350,00	4,18
DAU-LO	1.244.560.318.195,00	1.194.632.100.845,00	49.928.217.350,00	4,18
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	94.198.493.352,00	67.884.679.735,00	26.313.813.617,00	38,76
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	14.949.966.700,00	14.292.088.875,00	657.877.825,00	4,60

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Reguler-SMA-LO				
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	0,00	4.772.310.150,00	(4.772.310.150,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	24.046.460.036,00	16.231.990.000,00	7.814.470.036,00	48,14
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	1.369.949.960,00	(1.369.949.960,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	3.402.441.690,00	0,00	3.402.441.690,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	286.250.000,00	(286.250.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	7.348.028.000,00	(7.348.028.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	11.471.379.146,00	14.025.640.000,00	(2.554.260.854,00)	(18,21)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	13.588.183.030,00	4.436.048.820,00	9.152.134.210,00	206,31
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	0,00	5.122.373.930,00	(5.122.373.930,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	26.740.062.750,00	0,00	26.740.062.750,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	578.232.414.052,00	444.106.048.594,00	134.126.365.458,00	30,20
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	337.755.483.534,00	223.313.166.975,00	114.442.316.559,00	51,25
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	6.293.710.300,00	2.200.000.000,00	4.093.710.300,00	186,08
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	215.706.720.000,00	205.276.104.000,00	10.430.616.000,00	5,08
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.118.000.000,00	2.439.250.000,00	(321.250.000,00)	(13,17)
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	3.705.462.699,00	3.231.235.325,00	474.227.374,00	14,68
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	1.864.132.625,00	1.810.126.450,00	54.006.175,00	2,98
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	5.826.577.336,00	1.431.403.916,00	4.395.173.420,00	307,05
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	3.439.891.425,00	(3.439.891.425,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	888.202.000,00	743.068.533,00	145.133.467,00	19,53
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	155.647.086,00	221.801.970,00	(66.154.884,00)	(29,83)
DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	3.918.478.472,00	0,00	3.918.478.472,00	100,00
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	67.892.976.000,00	50.359.663.000,00	17.533.313.000,00	34,82
DID-LO	67.892.976.000,00	50.359.663.000,00	17.533.313.000,00	34,82
DID-LO	67.892.976.000,00	50.359.663.000,00	17.533.313.000,00	34,82
Jumlah	2.148.787.163.799,00	155.483.750.928,00	53.157.504.630,00	34,19

Penjelasan:

Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Peningkatan Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp123.457.871.284,00; dan
- Pergerakan nilai *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp7.666.874.669,00.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2023 sebesar Rp7.666.874.669,00 (Rp2.148.787.163.799,00 -

Rp2.141.120.289.130,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	7.666.874.669,00
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Penerimaan TDF Bagi Hasil pada Aset Lainnya Tahun 2023 (Neraca)	(19.575.067.331,00)
> Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Penerimaan TDF Bagi Hasil pada Aset Lainnya Tahun 2023 (Neraca)	27.241.942.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	7.666.874.669,00

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
633.860.617.765,44	311.451.566.731,05	322.409.051.034,39	103,52

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Hibah-LO	633.860.617.765,44	311.451.566.731,05	322.409.051.034,39	103,52
Jumlah	633.860.617.765,44	311.451.566.731,05	322.409.051.034,39	103,52

Berikut adalah rincian dari Pendapatan Hibah – LO:

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
633.860.617.765,44	311.451.566.731,05	322.409.051.034,39	103,52

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	578.772.516.862,25	134.958.716.858,03	443.813.800.004,22	328,85
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	32.999.048.788,19	23.753.798.178,00	9.245.250.610,19	38,92
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	3.695.333.394,00	293.463.400,00	3.401.869.994,00	1.159,21
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	18.388.541.221,00	152.418.851.522,91	(134.030.310.301,91)	(87,94)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	5.177.500,00	26.736.772,11	(21.559.272,11)	(80,64)
Jumlah	633.860.617.765,44	311.451.566.731,05	322.409.051.034,39	103,52

Penjelasan:

Perubahan nilai Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Peningkatan Penerimaan dari Pendapatan Hibah dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp7.666.874.669,00;
- Kenaikan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp443.813.800.004,22;
- Kenaikan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp9.245.250.610,19;
- Kenaikan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp3.401.869.994,00;
- Penurunan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp131.407.656.901,91;
- Penurunan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO sebesar Rp131.400.000,00;
- Penurunan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO sebesar Rp2.491.253.400,00; dan
- Penurunan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO sebesar Rp21.559.272,11.

Pengakuan Pendapatan Hibah Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah-LRA TA 2023 sebesar Rp628.660.640.265,44 (Rp633.860.617.765,44 - Rp5.199.977.500,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	628.660.640.265,44
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Pemerintah Pusat	576.627.211.862,25
✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Pemerintah Daerah lainnya	32.999.048.788,19
✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	3.695.333.394,00
✓ Penerimaan Hibah berupa Barang dari Badan/Lembaga, Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri	1.829.705.357,00
✓ Kekurangan Catat Penerimaan Hibah dari Kementerian PUPR pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sesuai BAST BMN No. 028/2469/UPTD.PS/DKLH, tanggal 24 November 2023	2.145.305.000,00

Uraian	Nilai
✓ Koreksi Kurang catat atas Penerimaan Hibah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) pada Bapenda Prov. Bali, sesuai BAST Hasil Pekerjaan No. 1647/BA/DIR/UMA/2023 dan B.14.011/2950/SET/BAPENDA, Tgl. 20/9/2023.	355.035.000,00
✓ Koreksi Kurang catat atas Penerimaan Hibah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) pada Bapenda Prov. Bali, sesuai BAST Barang & Hasil Pekerjaan No. 1868/BA/DIR/UMA/2023 dan 2636 Tahun 2023, Tgl. 25/10/2023	293.689.300,00
✓ Koreksi atas Koreksi ekuitas yang seharusnya dicatat sebagai Pendapatan Hibah - LO atas penyerahan tanah HPL 23 oleh Kertha Bali Saguna kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk kemudian dihibahkan ke Kementerian ATR BPN	10.450.000.000,00
✓ Koreksi atas kekurangan pencatatan penerimaan hibah Aset Tetap pada SMAN 1 Bangli	265.311.564,00
Jumlah Penjelasan Selisih	628.660.640.265,44

Informasi terkait rincian nilai Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Bali pada masing-masing perangkat daerah juga dapat dilihat pada *Lampiran 52*.

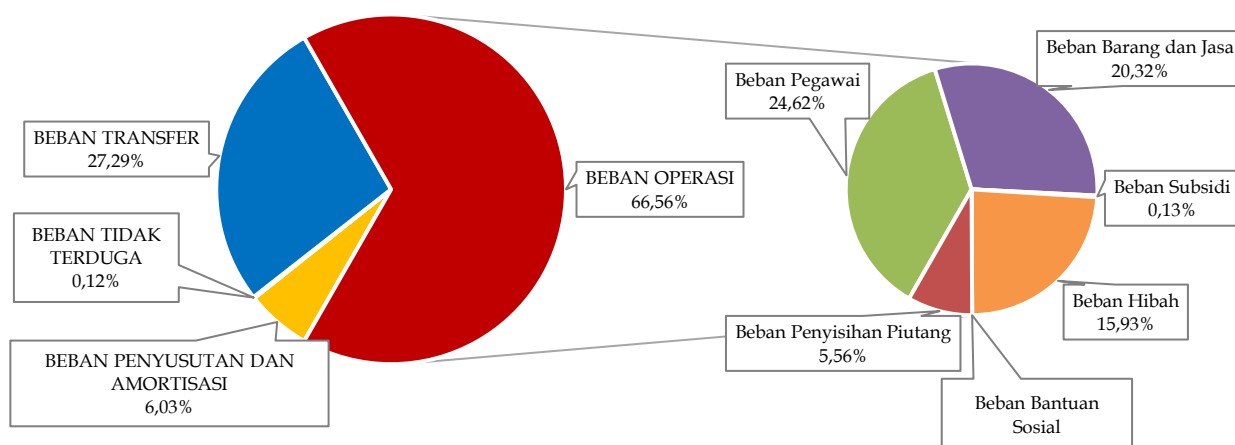
5.4.2 Beban

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
7.530.731.340.942,04	5.971.635.391.945,66	1.559.095.948.996,38	26,11

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	5.472.922.631.796,04	4.434.400.790.113,66	1.038.521.841.682,38	23,42
Beban Transfer	2.057.808.709.146,00	1.537.234.601.832,00	520.574.107.314,00	33,86
Jumlah	7.530.731.340.942,04	5.971.635.391.945,66	1.559.095.948.996,38	26,11

Komposisi realisasi Beban Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:



Gambar 5.14 Komposisi Realisasi Beban pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
5.472.922.631.796,04	4.434.400.790.113,66	1.038.521.841.682,38	23,42

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	1.856.238.593.870,38	1.699.591.084.689,25	156.647.509.181,13	9,22
Beban Barang dan Jasa	1.531.987.850.098,87	1.805.100.026.218,37	(273.112.176.119,50)	(15,13)
Beban Subsidi	10.018.140.000,00	4.372.945.000,00	5.645.195.000,00	129,09
Beban Hibah	1.201.225.356.179,75	514.802.805.138,35	686.422.551.041,40	133,34
Beban Bantuan Sosial	0,00	4.748.916.000,00	(4.748.916.000,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang	418.961.251.782,45	2.246.382.213,55	416.714.869.568,90	18.550,49
Beban Penyusutan dan Amortisasi	454.491.439.864,59	403.538.630.854,14	50.952.809.010,45	12,63
Jumlah	5.472.922.631.796,04	4.434.400.790.113,66	1.038.521.841.682,38	23,42

Masing-masing saldo di atas dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.856.238.593.870,38	1.699.591.084.689,25	156.647.509.181,13	9,22

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	774.819.477.736,38	762.907.228.649,84	11.912.249.086,54	1,56
Beban Tambahan Penghasilan ASN	609.973.094.579,00	521.548.617.210,12	88.424.477.368,88	16,95
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	407.897.223.734,00	352.123.070.346,29	55.774.153.387,71	15,84
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	57.245.402.550,00	57.173.208.355,00	72.194.195,00	0,13
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	188.395.271,00	238.960.128,00	(50.564.857,00)	(21,16)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	6.115.000.000,00	5.600.000.000,00	515.000.000,00	9,20
Jumlah	1.856.238.593.870,38	1.699.591.084.689,25	156.647.509.181,13	9,22

Penjelasan:

Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Peningkatan Penerimaan dari Belanja Pegawai dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp69.612.212.128,92
- Peningkatan Pergerakan dari Utang Belanja Pegawai dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp87.036.936.881,62

Pengakuan Beban Pegawai Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai-LRA TA 2023 sebesar Rp45.726.950.364,38 (Rp1.856.238.593.870,38 - Rp1.810.511.643.506,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	45.726.950.364,38
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO	
✓ Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 (Neraca)	129.235.006.728,09
✓ Koreksi Ekuitas-Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Dinas Kesehatan)	21.913.369,32
✓ Koreksi Ekuitas-Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pariwisata)	1.597.195,00
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO	
✓ Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 (Neraca)	(83.529.914.256,12)
✓ Koreksi Ekuitas-Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	(0,49)
✓ Koreksi Ekuitas-Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Dinas Kesehatan)	(0,01)
✓ Koreksi Ekuitas-Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (BKPSDM)	(12.842,00)
✓ Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan)	(1.639.829,41)
Jumlah Penjelasan Selisih	45.726.950.364,38

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.531.987.850.098,87	1.805.100.026.218,37	(273.112.176.119,50)	(15,13)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang	598.565.519.398,41	407.026.316.747,39	191.539.202.651,02	47,06
Beban Jasa	722.283.762.028,60	726.025.568.582,29	(3.741.806.553,69)	(0,52)
Beban Pemeliharaan	89.105.373.852,68	76.732.997.469,57	12.372.376.383,11	36,85
Beban Perjalanan Dinas	90.037.746.079,00	67.579.534.013,00	22.458.212.066,00	33,23
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.993.748.740,18	527.735.609.406,12	(495.741.860.665,94)	(93,94)
Beban Barang dan Jasa BOS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
Jumlah	1.531.987.850.098,87	1.805.100.026.218,37	(273.112.176.119,50)	(15,13)

Penjelasan:

Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Penurunan Penerimaan dari Belanja Barang dan Jasa dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp461.692.091.783,49
- Peningkatan Penerimaan dari Utang Belanja Barang dan Jasa dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp18.467.305.887,02
- Peningkatan Pergerakan dari Persediaan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp44.391.089.083,57

Pengakuan Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa-LRA TA 2023 sebesar Rp303.630.520.384,71 (Rp1.531.987.850.098,87 - Rp1.228.357.329.714,16). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	303.630.520.384,71
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO	
✓ Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Neraca)	28.048.317.006,00
✓ Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	510.373.969,85
✓ Persediaan Barang Tahun 2022 (Neraca)	125.353.854.748,49
✓ Pemberian Hibah Persediaan pada Dinas Kesehatan	117.684.276.952,94
✓ Pemberian Hibah Persediaan pada Satpol PP	8.000.000,00
✓ Pemberian Hibah barang persediaan dari BNPB	156.267.501.686,50
✓ Pemberian Hibah barang persediaan - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.874.788,00
✓ Pemberian Hibah barang persediaan - Kertas dan Cover pada DKLH	4.084.800,00
✓ Pemberian Hibah barang persediaan - Alat Tulis Kantor	4.773.000,00

Uraian	Nilai
pada DKLH	
✓ Direklas dari KDP menjadi Barang Persediaan sesuai jurnal No.51/09.0/006234/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.2.10.01.0000/03/2023	173.106.010,00
✓ Koreksi saldo awal - Pakan	89.560.000,00
✓ Koreksi saldo awal - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	485.250.000,00
✓ Koreksi Saldo Awal-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.500.000,00
✓ Reklas Belanja Modal dibawah Kapitalisasi menjadi Belanja Barang	8.506.917.195,32
✓ Reklas Belanja Modal yang merupakan Belanja Barang dan Jasa	15.928.781.469,00
✓ Penyesuaian Koma pada Disdik	0,18
✓ Jurnal Koreksi atas Utang Belanja Hibah Barang - Dinas PUPRKIM	1.148.189.345,00
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO	
✓ Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 (Neraca)	(7.448.427.873,99)
✓ Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	(471.686.083,46)
✓ Persediaan Barang Tahun 2023 (Neraca)	(141.860.754.139,86)
✓ Dikapitalisasi menjadi Aset (Jalan Nasional) sesuai jurnal No.51/09.0/005717/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.2.10.01.0000/02/2023	(588.621.998,00)
✓ Koreksi saldo awal - Bahan Cetak	(36.236.190,00)
✓ Koreksi Ekuitas-Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon pada Disnaker	(2.406.561,00)
✓ Koreksi Ekuitas-Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik pada Disnaker	(1.124.190,00)
✓ Koreksi Ekuitas-Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air pada Dinas Kelautan	(500,00)
✓ Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap	(16.645.000,00)
✓ Beban Barjas BOS Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00
✓ Koreksi atas salah pos belanja Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali	(68.400.000,00)
✓ Koreksi persediaan materai nominal Rp3.000 dan Rp6.000 yang tidak berlaku pada 10 PD	(88.968.050,26)
✓ Koreksi KAP pada BLUD UPTD PAM atas kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar daerah	(10.570.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	303.630.520.384,71

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
10.018.140.000,00	4.372.945.000,00	5.645.195.000,00	129,09

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Subsidi kepada BUMD	0,00	289.850.000,00	(289.850.000,00)	(100,00)
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	9.993.140.000,00	4.058.095.000,00	5.935.045.000,00	146,25
Beban Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	10.018.140.000,00	4.372.945.000,00	5.645.195.000,00	129,09

Penjelasan:

Perubahan nilai Beban Subsidi Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi Peningkatan Penerimaan dari Belanja Subsidi dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp5.645.195.000,00

Pengakuan Beban Subsidi Tahun 2023 ini sama dengan saldo Belanja Subsidi-LRA TA 2023 yaitu sebesar Rp10.018.140.000,00.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.201.225.356.179,75	514.802.805.138,35	686.422.551.041,40	133,34

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	134.460.981.333,00	48.214.864.334,87	86.246.116.998,13	178,88
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	42.181.308.424,34	208.626.641.509,48	(166.445.333.085,14)	(79,78)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	915.738.878.326,41	241.493.444.294,00	674.245.434.032,41	279,20
Beban Hibah Dana BOS	92.376.333.096,00	0,00	92.376.333.096,00	100,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.201.225.356.179,75	514.802.805.138,35	686.422.551.041,40	133,34

Penjelasan:

Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Peningkatan Penerimaan dari Belanja Hibah dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp542.990.112.357,41
- Peningkatan Penerimaan dari Utang Belanja Hibah dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp136.889.765.385,00

Pengakuan Beban Hibah Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Hibah-LRA TA 2023 sebesar Rp301.798.354.371,34 (Rp1.201.225.356.179,75 - Rp899.427.001.808,41). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	301.798.354.371,34
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO	
✓ Utang Belanja Hibah tahun 2023 (Neraca)	149.648.189.345,00
✓ Pemberian Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.190.557.500,00
✓ Pemberian Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	53.951.851.334,00

Uraian	Nilai
✓ Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	
✓ Pemberian Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	42.181.308.424,34
✓ Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	54.865.914.133,00
➢ Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO	
✓ Utang Belanja Hibah tahun 2022 (Neraca)	(891.277.020,00)
✓ Jurnal Koreksi atas Utang Belanja Hibah Barang - Dinas PUPRKIM	(1.148.189.345,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	301.798.354.371,34

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
0,00	4.748.916.000,00	(4.748.916.000,00)	(100,00)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	4.748.916.000,00	(4.748.916.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	4.748.916.000,00	(4.748.916.000,00)	(100,00)

Penjelasan:

Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dari Tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan karena hal-hal berikut:

- Penurunan Penerimaan dari Belanja Bantuan Sosial dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp139.016.000,00; dan
- Pergerakan penurunan dari Konversi BTT ke Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu di Tahun 2022 ke 2023 sebesar Rp4.609.900.000,00.

Berikut adalah rincian objek Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	4.609.900.000,00	(4.609.900.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	4.609.900.000,00	(4.609.900.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	139.016.000,00	(139.016.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	139.016.000,00	(139.016.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	4.748.916.000,00	(4.748.916.000,00)	(100,00)

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
418.961.251.782,45	2.246.382.213,55	416.714.869.568,90	18.550,49

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	259.219.729,94	648.984.775,04	(389.765.045,10)	(60,06)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	6.500,00	143.839.325,00	(143.832.825,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	418.623.673.982,77	1.269.755.578,15	417.353.918.404,62	32.868,84
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	78.351.569,74	183.802.535,36	(105.450.965,62)	(57,37)
Jumlah	418.961.251.782,45	2.246.382.213,55	416.714.869.568,90	18.550,49

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp910.744.338,76 (Rp412.099.705.724,25 - (Rp427.763.450.221,18 - Rp16.574.488.835,69)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Penyisihan Piutang-Neraca yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyisihan dengan Perubahan Nilai Penyisihan Piutang	910.744.338,76
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Nilai Penyisihan terhadap Beban Penyisihan	
✓ Penghapusan Piutang Pajak pada Bapenda sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1062/04-E/HK/2023 Tanggal 29 Desember 2023	14.695.300,00
✓ Surplus dari Kegiatan NonOperasional - Pengurangan Penyisihan Piutang	847.175.683,01
✓ Koreksi ekuitas peenyisihan piutang TGR BPKAD	62.500.000,00
Koreksi atas Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Jasa Giro atas Remunerasi TA 2022 sebesar Rp4.747.549,12 dan TA 2023 TW I s.d IV TA 2023 sebesar Rp480.317.495,00 yang telah dibayarkan pemerintah pusat pada tanggal 26 April, 8 Agustus, 21 November, dan 20 Desember 2023	23.737,75
➢ Pengurangan Nilai Penyisihan terhadap Beban Penyisihan	
✓ Koreksi ekuitas penyisihan piutang - Disbud	(13.650.382,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	910.744.338,76

Rincian Objek Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

5.4.2.1.6.1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah yang diakui oleh

Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	486.000,00	35.681.440,00	(35.195.440,00)	(98,64)
Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	173.564.750,00	(173.564.750,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	256.849.142,77	128.217.235,33	128.631.907,44	100,32
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	1.884.587,17	479.084,63	1.405.502,54	293,37
Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok	0,00	311.042.265,08	(311.042.265,08)	(100,00)
Jumlah	259.219.729,94	648.984.775,04	(389.765.045,10)	(60,06)

Penjelasan:

Saldo Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 ini terdapat pada Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp261.379.025,86 (Rp259.219.729,94 - (Rp483.147.529,94 - Rp485.306.825,86)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Penyisihan Piutang Pajak Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyisihan dengan Perubahan Nilai Penyisihan Piutang	261.379.025,86
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Nilai Penyisihan terhadap Beban Penyisihan	
✓ Penghapusan Piutang Pajak pada Bapenda sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1062/04-E/HK/2023 Tanggal 29 Desember 2023	14.695.300,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non Operasional - Pengurangan Penyisihan Piutang	246.683.725,86
Jumlah Penjelasan Selisih	261.379.025,86

5.4.2.1.6.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	143.356.325,00	(143.356.325,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	6.500,00	483.000,00	(476.500,00)	(100,00)
Jumlah	6.500,00	143.839.325,00	(143.832.825,00)	(100,00)

Penjelasan:

Saldo Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 ini terdapat pada Perangkat BKPSDM Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.022.600,00 (Rp6.500,00 - (Rp155.166.500,00 - Rp188.182.600,00)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyisihan dengan Perubahan Nilai Penyisihan Piutang	33.022.600,00
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Nilai Penyisihan terhadap Beban Penyisihan	
✓ Surplus dari Kegiatan NonOperasional - Pengurangan Penyisihan Piutang	33.022.600,00
Jumlah Penjelasan Selisih	33.022.600,00

5.4.2.1.6.3 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	417.594.622.291,06	375.609.300,00	417.219.012.991,06	111.077,92
Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	0,00	23.737,75	(23.737,75)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.027.051.691,71	894.122.540,40	132.929.151,31	14,87
Jumlah	418.623.673.982,77	1.269.755.578,15	417.353.918.404,62	32.868,84

Penjelasan:

Saldo Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 ini terdapat pada Perangkat Dinas Kebudayaan, BPKAD Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPRKIM.

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.509.505.880,66 (Rp418.623.673.982,77 - (Rp437.042.772.101,90 - Rp11.909.592.238,47)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyisihan dengan Perubahan Nilai Penyisihan Piutang	(6.509.505.880,66)
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Nilai Penyisihan terhadap Beban Penyisihan	
✓ Surplus dari Kegiatan NonOperasional - Pengurangan Penyisihan Piutang	365.666.821,79
✓ Koreksi atas Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Jasa Giro atas Remunerasi TA 2022 sebesar Rp4.747.549,12 dan TA 2023 TW I s.d IV TA 2023 sebesar Rp480.317.495,00 yang telah dibayarkan pemerintah pusat pada tanggal 26 April, 8 Agustus, 21 November, dan 20 Desember 2023	23.737,75
➢ Pengurangan Nilai Penyisihan terhadap Beban Penyisihan	
✓ Koreksi ekuitas penyisihan piutang - Disbud	(13.650.382,00)
Koreksi Penyisihan Piutang PT NII	(6.861.546.058,20)
Jumlah Penjelasan Selisih	(6.509.505.880,66)

5.4.2.1.6.4 Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang Lainnya yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyisihan Uang Muka	78.351.569,74	183.802.535,36	(105.450.965,62)	(57,37)
Jumlah	78.351.569,74	183.802.535,36	(105.450.965,62)	(57,37)

Penjelasan:

Saldo Beban Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2023 ini terdapat pada Perangkat BPKAD Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik.

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyisihan Piutang Lainnya dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp264.302.535,36 (Rp78.351.569,74 - (Rp3.805.456.205,74 - Rp3.991.407.171,36)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Penyisihan Piutang Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyisihan dengan Perubahan Nilai Penyisihan Piutang	264.302.535,36
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Nilai Penyisihan terhadap Beban Penyisihan	
✓ Surplus dari Kegiatan Non Operasional - Pengurangan Penyisihan Piutang	201.802.535,36
✓ Koreksi ekuitas peenyisihan piutang TGR BPKAD	62.500.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	264.302.535,36

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
454.491.439.864,59	403.538.630.854,14	50.952.809.010,45	12,63

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	162.494.365.224,19	185.267.500.568,12	(22.773.135.343,93)	(12,29)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.690.114.682,74	50.238.674.362,00	8.451.440.320,74	16,82
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	228.638.797.450,66	163.509.717.261,02	65.129.080.189,64	39,83
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.618.958.981,00	1.882.530.707,00	(263.571.726,00)	(14,00)
Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	3.049.203.526,00	2.640.207.956,00	408.995.570,00	15,49
Jumlah	454.491.439.864,59	403.538.630.854,14	50.952.809.010,45	12,63

Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari Tahun 2023 ke Tahun 2022 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam Catatan terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.3.1.3.7**.

5.4.2.1.7.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
162.494.365.224,19	185.267.500.568,12	(22.773.135.343,93)	(12,29)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Alat Besar	4.830.884.942,00	4.039.234.085,00	791.650.857,00	19,60
Beban Penyusutan Alat Angkutan	10.532.559.942,00	13.547.949.164,00	(3.015.389.222,00)	(22,26)
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.689.140.978,27	3.801.116.581,67	(111.975.603,40)	(2,95)
Beban Penyusutan Alat Pertanian	939.957.435,00	1.026.409.615,00	(86.452.180,00)	(8,42)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.261.985.575,80	43.157.111.921,04	10.104.873.654,76	23,41
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.169.244.012,00	9.819.514.512,71	(650.270.500,71)	(6,62)
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.231.994.630,77	54.606.976.208,02	(15.374.981.577,25)	(28,16)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	12.406.979.280,00	12.502.172.426,00	(95.193.146,00)	(0,76)
Beban Penyusutan	555.960.193,00	884.919.132,00	(328.958.939,00)	(37,17)
Beban Penyusutan Komputer	26.668.429.469,35	40.806.535.941,31	(14.138.106.471,96)	(34,65)
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	2.953.450,00	2.032.000,00	921.450,00	45,35
Beban Penyusutan Alat Pengeboran	1.083.334,00	0,00	1.083.334,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	46.074.860,00	35.745.768,00	10.329.092,00	28,90
Beban Penyusutan Alat Bantu	0,00	63.680,00	(63.680,00)	(100,00)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Eksplorasi				
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	447.057.478,00	340.196.536,33	106.860.941,67	31,41
Beban Penyusutan Alat Peraga	154.706.820,00	153.929.820,00	777.000,00	0,50
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	262.309.899,00	154.287.267,04	108.022.631,96	70,01
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	54.150.411,00	54.150.411,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	238.892.514,00	335.155.499,00	(96.262.985,00)	(28,72)
Jumlah	162.494.365.224,19	185.267.500.568,12	(22.773.135.343,93)	(12,29)

Pengakuan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.645.054.733,79 (Rp162.494.365.224,19 - (Rp1.645.364.294.009,82 - Rp1.501.514.983.519,42)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyusutan dan Perubahan Akumulasi Penyusutan	18.645.054.733,79
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Beban Penyusutan	
✓ Penyusutan Barang Terima Hibah	(3.683.530.411,00)
✓ Koreksi Catat Saldo Awal	(4.577.318,00)
✓ Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(201.115.000,00)
➢ Pengurangan Beban Penyusutan	
✓ Reklas ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	22.366.447.246,70
✓ Koreksi Catat Saldo Awal	102.032.276,09
✓ Penghapusan Akumulasi Aset Tetap	65.797.940,00
Jumlah Penjelasan Selisih	18.645.054.733,79

5.4.2.1.7.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
58.690.114.682,74	50.238.674.362,00	8.451.440.320,74	16,82

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	55.982.801.947,74	49.211.790.464,00	6.771.011.483,74	13,76
Beban Penyusutan Monumen	944.805.640,00	882.028.039,00	62.777.601,00	7,12
Beban Penyusutan Bangunan Menara	45.812.302,00	45.812.302,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.716.694.793,00	99.043.557,00	1.617.651.236,00	1.633,27
Jumlah	58.690.114.682,74	50.238.674.362,00	8.451.440.320,74	16,82

Pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.885.169.723,25 (Rp58.690.114.682,74 - (Rp629.030.459.829,35 - Rp564.455.175.423,36)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyusutan dan Perubahan Akumulasi Penyusutan	(5.885.169.723,25)
Penjelasan Selisih	
➢ Penambahan Beban Penyusutan	
✓ Koreksi Catat Saldo Awal	(2.734.452.028,00)
✓ Penyusutan Hibah Barang	(12.688.013.432,00)
✓ Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(848.926.307,60)
➢ Pengurangan Beban Penyusutan	
✓ Koreksi Catat Saldo Awal	5.058.624.880,83
✓ Akumulasi Penyusutan Aset yang Dihilangkan	2.544.753.441,00
✓ Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	2.686.827.348,00
✓ Penghapusan	72.474.707,34
✓ Penyesuaian Koma	0,18
✓ Reklasifikasi atas Penyusutan 1 aset yang tercecer yang direklasifikasi sebagai properti investasi (tanah rumah dinas di Anyelir)	23.541.667,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(5.885.169.723,25)

5.4.2.1.7.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
228.638.797.450,66	163.509.717.261,02	65.129.080.189,64	39,83

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	181.353.127.090,66	117.915.211.975,00	63.437.915.115,66	53,80
Beban Penyusutan Bangunan Air	24.987.157.147,00	8.480.471.176,02	16.506.685.970,98	194,64
Beban Penyusutan Instalasi	8.853.758.494,00	22.778.290.154,00	(13.924.531.660,00)	(61,13)
Beban Penyusutan Jaringan	13.444.754.719,00	14.335.743.956,00	(890.989.237,00)	(6,22)
Jumlah	228.638.797.450,66	163.509.717.261,02	65.129.080.189,64	39,83

Pengakuan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 ini lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.710.934.764,66 (Rp228.638.797.450,66 -

(Rp2.497.846.772.546,73 - Rp2.279.918.909.860,73)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyusutan dan Perubahan Akumulasi Penyusutan	10.710.934.764,66
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Beban Penyusutan	
✓ Koreksi Catat Saldo Awal	(6.555.482,00)
✓ Akumulasi Penyusutan Barang Terima Hibah	(1.183.456.769,00)
> Pengurangan Beban Penyusutan	
✓ Koreksi Catat Saldo Awal	113.467.044,00
✓ Akumulasi Penyusutan Barang yang Dihilangkan	11.787.479.971,66
Jumlah Penjelasan Selisih	10.710.934.764,66

5.4.2.1.7.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.618.958.981,00	1.882.530.707,00	(263.571.726,00)	(14,00)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.500.114.322,00	1.759.133.428,00	(259.019.106,00)	(14,72)
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	118.844.659,00	123.397.279,00	(4.552.620,00)	(3,69)
Jumlah	1.618.958.981,00	1.882.530.707,00	(263.571.726,00)	(14,00)

Pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp503.877.600,00 (Rp1.618.958.981,00 - (Rp19.697.428.317,40 - Rp18.582.346.936,40)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyusutan dan Perubahan Akumulasi Penyusutan	503.877.600,00
Penjelasan Selisih	
> Pengurangan Beban Penyusutan	
✓ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihilangkan	37.800.000,00
✓ Reklas ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	17.688.600,00
✓ Koreksi Catat Saldo Awal	448.389.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	503.877.600,00

5.4.2.1.7.5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
3.049.203.526,00	2.640.207.956,00	408.995.570,00	15,49

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.049.203.526,00	2.640.207.956,00	408.995.570,00	15,49
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	293.139.497,00	160.331.712,00	132.807.785,00	82,83
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	2.336.240.695,00	2.351.659.111,00	(15.418.416,00)	(0,66)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	419.823.334,00	128.217.133,00	291.606.201,00	227,43
Jumlah	3.049.203.526,00	2.640.207.956,00	408.995.570,00	15,49

Pengakuan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 ini lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp377.420.162,17 (Rp3.049.203.526,00 - (Rp17.950.219.235,17 - Rp14.523.595.547,00)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih Beban Amortisasi dan Perubahan Akumulasi Amortisasi	(377.420.162,17)
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban Penyusutan	
✓ Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.466.044,00)
✓ Koreksi Catat Saldo Awal	(540.171.918,17)
➤ Pengurangan Beban Penyusutan	
✓ Terdapat Aset Tidak Berwujud yang Dihibahkan Tahun Berjalan	165.217.800,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(377.420.162,17)

5.4.2.3 Beban Transfer

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
2.057.808.709.146,00	1.537.234.601.832,00	520.574.107.314,00	33,86

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bagi Hasil	1.571.367.698.776,00	1.267.764.824.359,00	303.602.874.417,00	23,95
Beban Bantuan Keuangan	486.441.010.370,00	269.469.777.473,00	216.971.232.897,00	80,52
Jumlah	2.057.808.709.146,00	1.537.234.601.832,00	520.574.107.314,00	33,86

Penjelasan dari masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.571.367.698.776,00	1.267.764.824.359,00	303.602.874.417,00	23,95

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.571.367.698.776,00	1.267.764.824.359,00	303.602.874.417,00	23,95
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.320.845.132.968,00	1.068.569.898.716,00	252.275.234.252,00	23,61
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	250.522.565.808,00	199.194.925.643,00	51.327.640.165,00	25,77
Jumlah	1.571.367.698.776,00	1.267.764.824.359,00	303.602.874.417,00	23,95

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2023 dan 2022. Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Bagi Hasil-LRA TA 2023 Rp127.003.165.810,00 (Rp1.571.367.698.776,00 - Rp1.444.364.532.966,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bagi Hasil-

LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	127.003.165.810,00
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 (Neraca)	362.814.553.542,00
> Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2022 (Neraca)	(235.811.387.732,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	127.003.165.810,00

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
486.441.010.370,00	269.469.777.473,00	216.971.232.897,00	80,52

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	410.725.117.970,00	226.546.177.473,00	184.178.940.497,00	81,30
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	75.715.892.400,00	42.923.600.000,00	32.792.292.400,00	76,40
Jumlah	486.441.010.370,00	269.469.777.473,00	216.971.232.897,00	80,52

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bantuan Keuangan Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2023 dan 2022. Pengakuan Beban Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Bantuan Keuangan-LRA TA 2023 Rp201.279.014.112,00 (Rp486.441.010.370,00 - Rp285.161.996.258,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bagi Hasil-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	201.279.014.112,00
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO	
✓ Utang Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 (Neraca)	201.279.014.112,00
> Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO	
✓ Utang Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 (Neraca)	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	201.279.014.112,00

Kegiatan Non-Operasional

5.4.3 Surplus Non Operasional

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.720.340.257,43	38.289.409.476,32	(36.569.069.218,89)	(95,51)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	873.140.836,67	1.745.834.531,00	(872.693.694,33)	(49,99)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	847.199.420,76	36.543.574.945,32	(35.696.375.524,56)	(97,68)
Jumlah	1.720.340.257,43	38.289.409.476,32	(36.569.069.218,89)	(95,51)

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
873.140.836,67	1.745.834.531,00	(872.693.694,33)	(49,99)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	873.140.836,67	1.745.834.531,00	(872.693.694,33)	(49,99)
Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	0,00	42.005.000,00	(42.005.000,00)	(100,00)
Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO	873.140.836,67	1.703.829.531,00	(830.688.694,33)	(48,78)
Jumlah	873.140.836,67	1.745.834.531,00	(872.693.694,33)	(49,99)

Saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 bernilai Rp873.140.836,67 adalah pengakuan selisih nilai buku aset yang dijual dengan nilai lelang serta merupakan nilai dari penjualan aset ekstrakomptabel dan bongkaran gedung.

5.4.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
847.199.420,76	36.543.574.945,32	(35.696.375.524,56)	(97,68)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	847.199.420,76	36.543.574.945,32	(35.696.375.524,56)	(97,68)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	847.199.420,76	36.543.574.945,32	(35.696.375.524,56)	(97,68)
Jumlah	847.199.420,76	36.543.574.945,32	(35.696.375.524,56)	(97,68)

Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 ini berasal dari penyesuaian-penyesuaian terkait penyisihan piutang tahun 2022 yang berhasil ditagih di tahun 2023.

5.4.4 Defisit Non Operasional

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
12.751.193.781,59	11.319.761.946,66	1.431.431.834,93	12,65

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Defisit Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	10.689.443.740,59	2.107.510.056,04	8.581.933.684,55	407,21
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.061.750.041,00	9.212.251.890,62	(7.150.501.849,62)	(77,62)
Jumlah	12.751.193.781,59	11.319.761.946,66	1.431.431.834,93	12,65

5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
10.689.443.740,59	2.107.510.056,04	8.581.933.684,55	407,21

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.794.304.148,59	2.107.510.056,04	1.686.794.092,55	80,04
Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	3.794.304.148,59	2.107.510.056,04	1.686.794.092,55	80,04
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	6.895.139.592,00	0,00	6.895.139.592,00	100,00
Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud	2.477.750,00	0,00	2.477.750,00	100,00
Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	6.892.661.842,00	0,00	6.892.661.842,00	100,00
Jumlah	10.689.443.740,59	2.107.510.056,04	8.581.933.684,55	407,21

Saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 ini berasal dari selisih kurang antara nilai penjualan BMD aset rusak berat dengan nilai buku aset serta nilai penghapusan aset rusak berat pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali.

5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
2.061.750.041,00	9.212.251.890,62	(7.150.501.849,62)	(77,62)

Saldo tersebut adalah pengakuan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.061.750.041,00	9.212.251.890,62	(7.150.501.849,62)	(77,62)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.061.750.041,00	9.212.251.890,62	(7.150.501.849,62)	(77,62)
Jumlah	2.061.750.041,00	9.212.251.890,62	(7.150.501.849,62)	(77,62)

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 ini berasal dari pengakuan nilai investasi Perumda Bali Shanti yang sebelumnya diakui sebagai pengurang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO namun sekarang dicatat sebagai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
9.184.700.000,54	5.765.723,00	9.178.934.277,54	159.198,32

Saldo tersebut adalah pengakuan Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

5.4.5.1 Beban Tidak Terduga

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
9.184.700.000,54	5.765.723,00	9.178.934.277,54	159.198,32

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2023 dan 2022. Pengakuan Beban Tidak Terduga Tahun 2023 ini sama dengan saldo Belanja Tidak Terduga TA 2023. Untuk Saldo Beban Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2022, sebelumnya di sajikan pada Beban Luar Biasa.

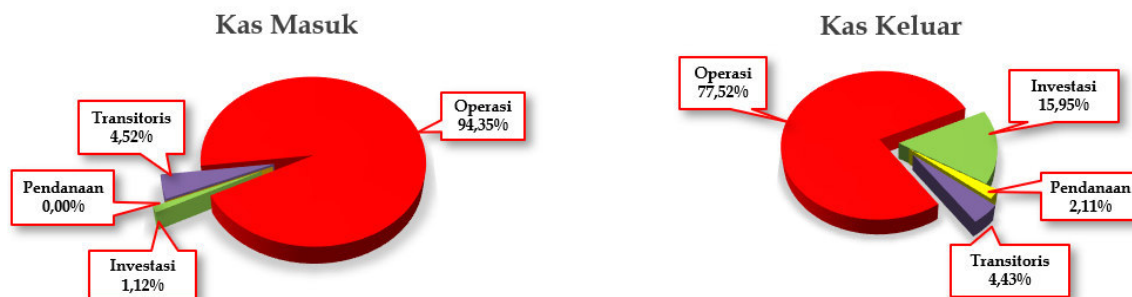
5.4.6 Surplus/(Defisit)-LO

Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
885.625.231.708,23	211.648.105.152,08	673.977.126.556,15	318,44

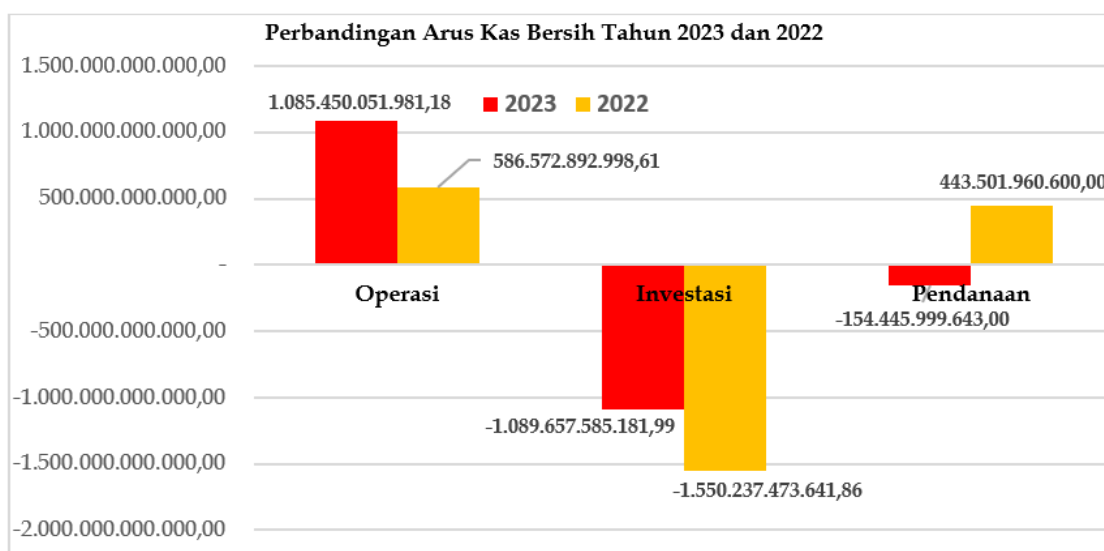
Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2023 dan 2022. Saldo Surplus/(Defisit)-LO tersebut telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas *point* 5.6.2.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang memengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Berikut gambar diagram pengaruh keempat aktivitas tersebut terhadap perubahan Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Provinsi Bali.



Gambar 5.15 Diagram Pengaruh Empat Aktivitas Arus Kas Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas TA 2023



Gambar 5.16 Diagram Perbandingan Tiga Aktivitas Arus Kas Bersih Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Dampak kumulatif keempat aktivitas arus kas TA 2023 menyebabkan kenaikan Kas sejumlah Rp657.486.079.748,47. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk	6.772.475.396.234,29	5.883.951.506.721,34
Arus Kas Keluar	5.687.025.344.253,11	5.297.378.613.722,73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.085.450.051.981,18	586.572.892.998,61

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Daerah	4.052.904.860.269,00	3.230.839.407.191,00
Retribusi Daerah	15.312.465.038,00	14.348.341.509,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	158.120.019.322,32	220.323.008.247,47
Lain-lain PAD yang Sah	399.817.784.974,97	395.853.555.155,76
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.141.120.289.130,00	2.017.662.417.846,00
Pendapatan Hibah	5.199.977.500,00	4.924.776.772,11
Jumlah	6.772.475.396.234,29	5.883.951.506.721,34

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Pegawai	1.810.511.643.506,00	1.740.899.431.377,08
Belanja Barang dan Jasa	1.228.357.329.714,16	1.690.049.421.497,65
Belanja Subsidi	10.018.140.000,00	4.372.945.000,00
Belanja Hibah	899.427.001.808,41	356.436.889.451,00
Belanja Bantuan Sosial	-	139.016.000,00
Belanja Tak Terduga	9.184.700.000,54	4.759.779.107,00
Bagi Hasil	1.444.364.532.966,00	1.231.251.353.817,00
Bantuan Keuangan	285.161.996.258,00	269.469.777.473,00
Jumlah	5.687.025.344.253,11	5.297.378.613.722,73

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk	80.415.755.263,00	1.827.094.745,00
Arus Kas Keluar	1.170.073.340.444,99	1.552.064.568.386,86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.089.657.585.181,99)	(1.550.237.473.641,86)



Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.586.088.063,00	1.827.094.745,00
Pencairan Dana Cadangan	78.829.667.200,00	-
Jumlah	80.415.755.263,00	1.827.094.745,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Modal Tanah	154.513.167.813,00	623.975.476.572,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.375.288.069,62	109.213.603.835,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	361.028.180.271,00	340.651.767.017,86
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	232.361.545.288,00	354.881.755.251,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.899.659.003,37	23.276.736.561,00
Belanja Modal Aset Lainnya	895.500.000,00	65.229.150,00
Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	-
Jumlah	1.170.073.340.444,99	1.552.064.568.386,86

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk	-	443.501.960.600,00
Arus Kas Keluar	154.445.999.643,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(154.445.999.643,00)	443.501.960.600,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk dari pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	443.501.960.600,00
Jumlah	-	443.501.960.600,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	154.445.999.643,00	-
Jumlah	154.445.999.643,00	-

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Provinsi Bali. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk	324.789.289.814,60	377.025.429.131,43
Arus Kas Keluar	324.789.289.814,60	377.025.429.131,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Pertambahan Nilai	101.599.970.486,00	120.042.779.784,61
Pajak Penghasilan Pasal 21	95.050.522.716,00	100.352.876.127,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	6.508.520.261,00	3.945.999.487,78
Pajak Penghasilan Pasal 23	4.628.535.383,60	2.688.268.346,04
Pajak Penghasilan Pasal 25	19.820,00	-
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	17.739.608.950,00	22.763.534.073,00
Pajak Penjualan Barang Mewah Dalam Negeri	197.671.803,00	-
Potongan BPJS	48.331.304.595,00	58.268.713.048,00
IWP 8%	40.035.410.752,00	41.180.045.831,00
IWP 1%	5.916.229.592,00	5.815.517.193,00
Penerimaan PPh 21	-	4.210.882.268,00
Potongan JKK	1.183.771.430,00	1.984.709.110,00
Potongan JKM	3.597.724.026,00	15.772.103.863,00
Jumlah	324.789.289.814,60	377.025.429.131,43

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Pertambahan Nilai	101.599.970.486,00	120.042.779.784,61
Pajak Penghasilan Pasal 21	95.050.522.716,00	100.352.876.127,00
Pajak Penghasilan Pasal 22	6.508.520.261,00	3.945.999.487,78
Pajak Penghasilan Pasal 23	4.628.535.383,60	2.688.268.346,04
Pajak Penghasilan Pasal 25	19.820,00	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	17.739.608.950,00	22.763.534.073,00
Pajak Penjualan Barang Mewah Dalam Negeri	197.671.803,00	0,00
Potongan BPJS	48.331.304.595,00	58.268.713.048,00
IWP 8%	40.035.410.752,00	41.180.045.831,00
IWP 1%	5.916.229.592,00	5.815.517.193,00
Penerimaan PPh 21	0,00	4.210.882.268,00
Potongan JKK	1.183.771.430,00	1.984.709.110,00
Potongan JKM	3.597.724.026,00	15.772.103.863,00
Jumlah	324.789.289.814,60	377.025.429.131,43

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris secara rinci pada *Lampiran 53*.

5.5.5 Kenaikan /(Penurunan) Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	(158.653.532.843,81)	(520.162.620.043,25)

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	1.085.450.051.981,18	586.572.892.998,61
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(1.089.657.585.181,99)	(1.550.237.473.641,86)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	(154.445.999.643,00)	443.501.960.600,00
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	-	-
Jumlah	(158.653.532.843,81)	(520.162.620.043,25)

5.5.6 Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	330.194.451.586,27	850.341.671.769,52

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana yang disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada *poin 5.2.1* dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Di Kas Daerah	260.570.333.845,77	678.376.581.522,36
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55
- Kas di BLUD UPTD Bapelkesmas	716.424.390,08	-
- Kas di BLUD UPTD PKSDM	2.593.434.150,53	-
Kas Dana BOS	12.776.669.413,05	22.220.121.170,03
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	60.728.160,90	-
Jumlah	330.194.451.586,27	850.341.671.769,52

5.5.7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	-	(45.328.300,90)

Tidak terdapat Koreksi SiLPA Tahun Lalu sebagaimana telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran pada poin 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan.

5.5.8. Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)-Terkait PFK

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	(60.728.160,90)	60.728.160,90

Terdapat penyetoran Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) ke Rekening Kas Umum Negara sejumlah Rp60.728.160,90 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 543/04-

E/HK/2023 tentang Besaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Sisa Dana BOS Atas Penutupan Rekening SMAN Satu Atap Tejakula Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar Ke Rekening Kas Umum Negara Tanggal 23 Mei 2023.

5.5.9. Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Akhir kas	171.480.190.581,56	330.194.451.586,27

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan rincian kas sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Di Kas Daerah	93.261.463.025,33	260.570.333.845,77
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPTD RS Bali Mandara	23.106.882.669,81	29.891.626.119,88
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	13.955.324.668,78	6.473.748.705,99
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	9.421.039.081,34	12.849.418.115,50
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	4.803.618.256,49	2.825.225.551,09
- Kas di BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	4.820.767.557,36	1.436.843.133,48
- Kas di BLUD UPT Bapelkesmas	2.215.539.343,00	716.424.390,08
- Kas di BLUD UPT PKSDM	4.199.692.447,04	2.593.434.150,53
- Kas di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan	3.266.828.045,70	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	4.495.970.420,00	0,00
Kas Dana BOS	7.933.065.066,71	12.776.669.413,05
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	60.728.160,90
Jumlah	171.480.190.581,56	330.194.451.586,27

Saldo diatas sama dengan saldo pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Saldo Kas Akhir Laporan Arus Kas yakni sebesar Rp171.480.190.581,56.

Terdapat Selisih Saldo akhir Kas di Kas Daerah antara **Catatan atas Laporan Arus Kas** dengan yang dijelaskan dalam **Catatan atas Laporan Neraca poin 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas sejumlah Rp2.509.244.645,98:**

- Selisih sejumlah Rp2.347.610.604,98 disebabkan oleh jasa giro atas dana cadangan TA 2022 sejumlah Rp517.945.205,54 dan TA 2023 sejumlah Rp1.829.665.399,44 yang seharusnya menjadi bagian dari Dana Cadangan, namun disetor ke rekening kas daerah seperti yang dijelaskan dalam **Catatan atas Laporan Neraca poin 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah**.
- Selisih sejumlah Rp161.634.041,00 disebabkan oleh reklasifikasi Kas di Kas Daerah menjadi Kas Lainnya karena terdapat pengembalian Sisa Dana BOS yang sudah diterima Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sampai dengan 31 Desember 2023. Berdasarkan Pasal 31 ayat (5) PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, pengembalian Sisa Dana BOS dilakukan oleh BUD setelah mendapat verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah. Berikut daftar Sisa Dana BOS yang belum disetor ke RKUN:
 - Setoran sebesar Rp88.325.954,00 Berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor B.09.700/17405/IR.IV/ITPROV tanggal 21 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Reviu Dana BOS atas Hasil Audit Dana BOS Inspektorat Jenderal

Kemendikbudristek Tahun 2022;

- b. Setoran sebesar Rp15.614.000 berdasarkan LHR Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor B.09.700/473/IR.IV /ITPROV tanggal 11 Januari 2024 tentang Laporan Hasil Reviu Saldo Dana BOS SMAS PGRI Negara yang telah disetor ke RKUD;
- c. Setoran sebesar Rp33.454.087 berdasarkan LHR Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor B.09.700/466/IR.IV/ITPROV tanggal 11 Januari 2024 tentang Laporan Hasil Reviu Saldo Dana BOS Reguler SMK CIS Bali yang Telah Disetorkan ke RKUD; dan
- d. Setoran Sisa BOS Reguler SMK Nusa Dua Tanggal 28 November 2023 sebesar Rp24.240.000,00 sesuai Surat Nomor B.10.900/9751/KEU/DIKPORA tanggal 5 Maret 2024 tentang Catatan Hasil Reviu Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2023 SMK Nusa Dua yang telah disetorkan ke RKUD.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA NonTerikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan NonTerikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada poin **5.16 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**.



5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	11.191.129.745.531,45	10.517.452.914.777,86

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2021.

5.6.2 Surplus /(Defisit) LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Surplus /(Defisit) LO	885.625.231.708,23	211.648.105.152,08

Saldo tersebut di atas merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Bali.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

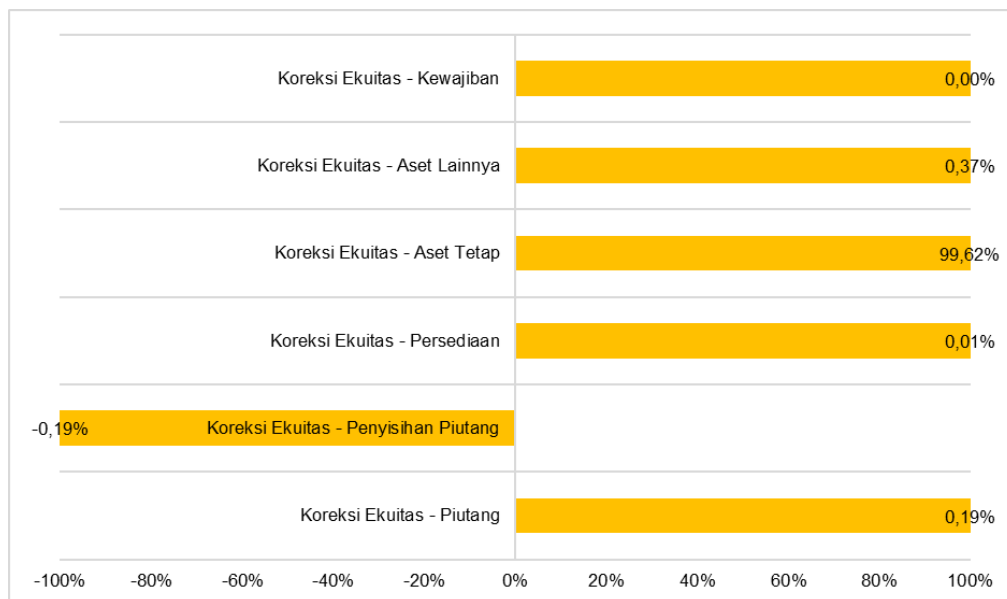
Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	3.571.428.757.768,87	462.028.725.601,51

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali melakukan penyesuaian. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Koreksi Ekuitas Kas dan Setara Kas	0,00	(45.328.300,90)
Koreksi Ekuitas Persediaan	457.105.759,74	(234.976.608,85)
Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.875.196.440,20	(9.725.200,00)
Koreksi Ekuitas Piutang Lainnya	(62.500.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	(6.812.696.440,20)	445.757.247,07
Koreksi Ekuitas Tanah	3.503.161.561.675,00	323.465.988.050,00
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	9.409.389.689,02	18.897.188.803,99
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	2.813.731.621,43	54.603.708.760,81
Koreksi Ekuitas Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.474.240.886,02	64.948.029.573,36
Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya	225.112.500,00	240.735.998,00
Koreksi Ekuitas Konstruksi Dalam Pengerjaan	(154.675.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	14.804.217.625,10	41.869.561,97
Koreksi Ekuitas Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	(74.200.000,00)
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya	13.505.102.445,00	(107.543.080,00)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(542.637.962,17)	(205.014.878,00)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(113.049.445,00)	(5.191.396,00)
Koreksi Ekuitas Pendapatan Diterima Dimuka	92.664.351,83	16.827.049,51
Koreksi Ekuitas Utang Belanja	18.326.641,40	50.600.020,55
Jumlah	3.571.151.090.787,37	462.028.725.601,51

Komposisi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2023 dan 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.17 Komposisi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023

5.6.4 Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas Akhir	15.648.183.735.009,10	1.191.129.745.531,45

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji pada Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada catatan atas Neraca pada *point* 5.3.3.

BAB VI**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN****6.1. Naskah Hibah Dalam Proses**

Pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Denpasar, sesuai Naskah Hibah antara Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya dengan Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.13.032/5562/PBMD/BPKAD dan 10/YDURM/VII/out/DPSS/2023 tentang Hibah Aset dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya milik Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya, Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa bangunan, peralatan medis, inventaris nonmedis, kendaraan, inventaris elektronik, inventaris komputer, inventaris *furniture*, dan inventaris kantor beserta pengelolaan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya (manajemen dan operasional) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Naskah Hibah ini. Naskah Hibah tersebut diatas didukung dengan Berita Acara Serah Terima Nomor B.13.032/5563/PBMD/BPKAD dan 11/YDURM/VII/out/DPS/2023 tanggal 18 Juli 2023.

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan, secara umum ada perubahan data nilai perolehan dan nilai buku sesuai Nota Dinas Nomor B.13.027/8662/P.BMD/BPKAD tanggal 10 November 2023 Perihal Hasil Inventarisasi Aset yang dihibahkan Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya dengan Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.13.032/5562/PBMD/BPKAD dan 10/YDURM/VII/out/DPSS/2023 tentang Hibah Aset dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya milik Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun pengungkapan secara lengkap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini sambil menunggu proses penetapan status Naskah Hibah dimaksud.

6.2. Informasi Daftar Aplikasi Pemerintah Provinsi Bali

Sesuai kondisi perkembangan revolusi industri 4.0, teknologi informasi memegang peranan penting khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem pembangunan termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa sistem aplikasi yang terdaftar dan digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali di Tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

A. Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Aplikasi SIPD secara terintegrasi mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

SIPD merupakan sebuah sistem perencanaan yang didalamnya terintegrasi empat aplikasi, yaitu *e-Database*, *e-Planning*, *e-Monev*, dan *e-Reporting*. Sistem informasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Sistem Informasi Lainnya

1. *Virtual Reality* Pura Pulaki

Merupakan sebuah aplikasi *virtual reality* yang memberikan pengalaman unik dalam mengunjungi Pura Pulaki di Bali. Dengan menggunakan teknologi tiga dimensi, pengguna dapat menjelajahi dan mengunjungi Pura Pulaki secara virtual. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk merasakan suasana dan keindahan Pura Pulaki dengan detail yang mendalam, seperti melihat arsitektur dan ornamen-ornamen pura secara nyata, mendengar suara-suara lingkungan sekitar, dan bahkan berinteraksi dengan lingkungan virtual tersebut. *Virtual reality* Pulaki menghadirkan sensasi baru dalam menjelajahi dan menghargai keindahan Pura Pulaki, serta memberikan alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengunjungi tempat tersebut secara fisik.

2. *Virtual Reality* Gamelan Tradisional Rindik, Kecek, dll

Merupakan sebuah aplikasi yang memberikan pengalaman baru dalam bermain gamelan Bali khususnya rindik Bali, kecek dan beberapa gamelan lainnya dalam bentuk tiga dimensi. Dengan menggunakan teknologi *virtual reality*, pengguna dapat merasakan sensasi bermain alat musik tradisional secara virtual. Aplikasi ini menghadirkan lingkungan virtual yang menampilkan gambar dan suara yang realistis, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan instrumen rindik dan gamelan lainnya, mengatur irama dan nada, serta mengeksplorasi variasi bunyi yang dihasilkan. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk merasakan keindahan musik rindik Bali serta gamelan lainnya secara mendalam, bahkan jika mereka tidak memiliki akses langsung ke instrumen fisiknya.

3. *Game Virtual Reality Nyomia Bhutakala*

Merupakan sebuah *game virtual reality* yang menggabungkan konsep *beat* dan budaya Bali. Dalam *game* ini, pemain akan memasuki dunia virtual yang dipenuhi dengan *bhutakala* dan elemen budaya Bali lainnya. Tujuan utama *game* ini adalah untuk mengendalikan *bhutakala*, entitas spiritual dalam kepercayaan Bali, yang terdapat dalam diri pemain. Pemain akan menggunakan *controller virtual reality* sebagai senjata untuk “Nyomia Bhutakala” dan melawan kekuatan jahat yang mewakili *bhutakala*. Setiap gerakan dan serangan harus dilakukan dengan tepat mengikuti irama musik yang dimainkan, sehingga menguji ketepatan dan keterampilan pemain dalam mengikuti *beat*. Dengan konsep yang unik dan pengalaman virtual yang mendalam, *virtual reality Nyomia Bhutakala* memberikan sensasi bermain yang menghibur sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Bali kepada pemain.

4. *Virtual Tour 360 Experience*

Website pameran 360 yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebuah *platform* interaktif yang memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi keindahan dan keberagaman Bali dalam tampilan 360 derajat. Dengan menggabungkan teknologi fotografi panorama dan pengalaman *virtual reality*, *website* ini menawarkan pengalaman mendalam bagi pengguna untuk menjelajahi pameran penuh warna yang mencakup keajaiban alam, budaya, seni, dan kehidupan sehari-hari di Bali.



Dari pantai pasir putih yang indah hingga pura-pura yang megah, *website* ini menghadirkan pandangan menyeluruh tentang kekayaan dan pesona pulau ini kepada pengunjung dari seluruh dunia. Dengan navigasi yang intuitif dan antarmuka yang menarik, pengunjung dapat dengan mudah menjelajahi berbagai pameran, memperbesar gambar, dan merasakan sensasi berada di tempat-tempat tersebut. *Website* pameran 360 Pemerintah Provinsi Bali adalah jendela digital yang menakjubkan ke dalam keindahan dan keajaiban Bali, memperluas daya tarik pulau ini melalui pengalaman *online* yang menarik dan imersif.

5. *Augmented Reality* Daerah Tujuan Wisata

Augmented Reality DTW merupakan aplikasi berbasis *Augmented Reality* yang dapat menampilkan informasi seputar DTW yang ada di Bali. Selain itu juga dapat menampilkan *event-event* penting di Bali, seperti festival, konser, atau acara budaya lainnya. Dengan menggunakan teknologi *Augmented Reality*, pengguna dapat melihat informasi lengkap seputar daerah tujuan wisata tersebut, termasuk penjelasan/deskripsi, jadwal, dan lokasi.

6. *Augmented Reality* Instagram Filter Bali Era Baru

Merupakan kumpulan filter Instagram yang terintegrasi dengan mengangkat tema kebudayaan Bali dan program pembangunan pemerintah yang sedang berlangsung. AR ini menawarkan pengalaman visual yang unik dan menyenangkan bagi para pengguna media sosial.

Setiap filter dalam *Augmented Reality* ini memberikan pengguna kesempatan untuk merasakan keindahan dan keunikan budaya Bali secara langsung melalui *platform* Instagram. Setiap *filter* dirancang dengan cermat untuk mencerminkan nuansa dan estetika Bali yang khas. Pengguna dapat memilih *filter* yang sesuai dengan *preferensi* mereka dan dengan mudah mengaplikasikannya pada foto atau video mereka.

7. Sistem Informasi, Pendataan dan Penyelenggaraan Pungutan Bagi Wisatawan Asing “LOVE BALI”

LoveBali merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan wisatawan mancanegara dalam melakukan pembayaran pungutan bagi wisatawan asing dengan cepat dan efisien, dengan dukungan berbagai metode pembayaran yang memungkinkan pembayaran dalam mata uang asing. LoveBali terdiri dari aplikasi LoveBali berbasis *website*, LoveBali *Mobile* (Android & iOS), LoveBali *Endpoint* berbasis *website*, serta *dashboard* admin.

Melalui LoveBali, wisatawan asing dapat memberikan kontribusi mereka dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan pariwisata Bali. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai informasi terkait destinasi wisata (DTW), *event-event* terbaru, serta berita dan artikel seputar alam dan budaya Bali. Sistem ini juga memberikan informasi yang relevan mengenai kepariwisataan di Bali. Dengan LoveBali, wisatawan dapat dengan mudah menjelajahi dan memahami keindahan

dan keunikan Bali, serta berkontribusi dalam melestarikan dan mempromosikan destinasi wisata di pulau Bali.

8. *Dashboard* Monitoring Pimpinan Birokrasi Berdampak

Merupakan pengembangan dari Sistem Bali Satu Data yang sudah ada sebelumnya yang dirancang khusus untuk para pimpinan di lingkungan Provinsi Bali. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan satu titik akses terpadu ke semua *dashboard* aplikasi yang ada di Provinsi Bali, serta menyoroti *dashboard* yang terkait dengan isu-isu terkini.

Dengan adanya *dashboard* monitoring pimpinan, para pimpinan di Provinsi Bali dapat dengan mudah mengakses dan menganalisis data dari berbagai sumber melalui satu aplikasi yang terpadu dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan informasi yang terkini dan akurat.

9. Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali

Portal Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Bali atau Bali Satu Data merupakan layanan tata kelola data di Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, terintegrasi dan dapat dibagipakaikan antar instansi di daerah provinsi, kabupaten/kota se-Bali.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Melalui SDI Provinsi Bali, seluruh data daerah provinsi, kabupaten/kota se-Bali dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali (<https://balisatudata.baliprov.go.id>). Selanjutnya, terintegrasi ke tingkat nasional dengan Satu Data Indonesia (<https://data.go.id/>).

Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dikelola oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Melalui Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.

Aplikasi Bali Satu Data ini, kini telah digunakan oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, selain data yang diinput secara manual, data yang disajikan pada Aplikasi Bali Satu Data menggunakan data yang diintegrasikan oleh beberapa aplikasi yang sudah terintegrasi.

10. Sistem Pendataan Data Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota

Merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mengakomodir proses pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan diseminasi data statistik sektoral beserta metadata indikatornya. Fitur tersebut membantu walidata untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Data yang dikelola pun sesuai dengan prinsip SDI, yaitu memiliki kode referensi, dilengkapi dengan standar data, disertai metadata, dan memenuhi sifat interoperabilitas. Data yang dikelola di sistem ini disajikan dalam tabulasi yang

bersifat fleksibel. Beragam jenis format tabel dapat disajikan di dalam sistem sesuai dengan kebutuhan produsen data.

Setiap produsen data memiliki satu orang perwakilan yang menjadi operator untuk menginput datanya di sistem. Walidata memberikan akses kepada operator untuk dapat mengakses data yang ada di instansinya.

11. Sistem ini juga memfasilitasi walidata untuk memeriksa dan memvalidasi data dan metadata yang telah terinput oleh operator. Selanjutnya data dan metadata yang telah valid dipublikasikan ke Portal Bali Satu Data dengan API.
12. Sistem Pengelolaan Data “CERAKEN” Kebudayaan Bali

Ceraken Kebudayaan Bali adalah sistem pengelolaan dan pangkalan data kebudayaan Bali yang terintegrasi secara digital. Sistem ini bertujuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya yang ada di Provinsi Bali dengan melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pemutakhiran data kebudayaan Bali, sehingga tercipta pangkalan data yang komprehensif dan terkini mengenai kebudayaan Bali. Dengan adanya Ceraken Kebudayaan Bali, diharapkan dapat mempermudah akses informasi dan pengelolaan kebudayaan Bali, serta mendukung upaya pelestarian dan promosi warisan budaya yang kaya di Provinsi Bali.

13. *Knowledge Based System “INSIGHT”*

Merupakan sebuah sistem *knowledge based system* yang didesain untuk mempermudah mendapatkan informasi yang saat ini sumber informasi pada aplikasi *insight* berasal dari surat dan dokumen pada aplikasi yang sudah berjalan pada lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain menjadi sumber informasi, *insight* juga menjadi layanan *cloud storage* untuk pegawai Pemerintahan Provinsi Bali yang dimana setiap *user* akan mendapatkan kapasitas *storage* sebesar 2 GB per *user* dan dapat di-*upgrade* nantinya.

Dengan menggunakan *design knowledge based*, ini dapat memudahkan *user* untuk mencari dokumen karena bisa mencari dokumen berdasarkan isi dari dokumen tersebut yang sudah di *extract* dengan teknologi OCR.

14. Sistem *Single Sign On “SSO”*

SSO (*Single Sign On*) adalah sistem *login* terintegrasi yang menghubungkan berbagai aplikasi yang digunakan di lingkup Pemerintah Provinsi Bali menjadi satu *login*. Dengan SSO, pengguna hanya perlu mengingat satu *login* untuk dapat mengakses semua aplikasi yang sesuai dengan kewenangannya.

Sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan aplikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Sebelum adanya SSO, pengguna mungkin harus mengingat login yang berbeda untuk setiap aplikasi yang digunakan. Namun, dengan SSO pengguna hanya perlu melakukan *login* sekali dan dapat mengakses semua aplikasi yang terhubung dengan sistem ini.

Selain kemudahan, SSO juga meningkatkan keamanan. Dengan adanya satu *login* tunggal, pengguna dapat lebih mudah mengelola akses dan izin penggunaan aplikasi. Hal ini membantu mengurangi risiko keamanan seperti kehilangan atau penyalahgunaan informasi *login*.

SSO juga mempercepat proses kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Dengan *login* yang cepat dan mudah, pengguna dapat mengakses aplikasi yang dibutuhkan dengan lebih efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya SSO, Pemerintah Provinsi Bali menciptakan lingkungan kerja yang terintegrasi dan efisien dalam penggunaan aplikasi. Sistem ini merupakan solusi yang inovatif dan memberikan nilai tambah dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

15. Sistem Layanan Kepegawaian “SIMPEG”

Merupakan sistem informasi kepegawaian yang dirancang untuk melakukan pendataan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sistem ini merupakan satu kesatuan yang mencakup pengumpulan dan pengelolaan dokumen elektronik pegawai, seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, pelatihan, kinerja, dan lainnya. Melalui SIMPEG, proses pendataan pegawai menjadi lebih efisien dan terstruktur, memungkinkan instansi pemerintah untuk mengakses informasi pegawai dengan mudah dan akurat. Dengan adanya SIMPEG, diharapkan dapat tercipta pengelolaan kepegawaian yang lebih terintegrasi, transparan, dan efektif dalam mendukung kebutuhan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi Bali.

16. Kantor Virtual

Merupakan sebuah sistem yang memungkinkan seluruh pegawai, baik ASN maupun nonASN, untuk melakukan berbagai aktivitas terkait surat-menyurat dan tugas melalui *platform* digital. Dalam sistem ini, pegawai dapat mengajukan draft surat kepada pimpinan, menerima disposisi dari pimpinan, melaporkan penugasan, serta mengakses agenda elektronik pegawai dan unit perangkat daerah. Sistem juga terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang digunakan oleh seluruh pimpinan perangkat daerah, Kepala UPTD, dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di seluruh Bali. Dengan *tagline* "Pasti Bisa Kerja", kantor virtual memperluas cakupan *e-office* ke seluruh pegawai, dari tingkat staf hingga pimpinan, dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara sistematis, fleksibel, dan kapan saja, dimanapun mereka berada.

17. Sistem Absensi berbasis Pengenalan Wajah dan Lokasi

Sistem Absensi adalah sebuah *platform* yang memungkinkan pegawai, termasuk ASN dan NonASN di lingkungan Provinsi Bali, untuk melakukan absensi berdasarkan jadwal dinamis yang telah ditentukan. Sistem ini menggunakan teknologi pengenalan wajah dan juga memungkinkan penentuan radius lokasi khusus untuk setiap pegawai. Selain itu, sistem absensi ini dilengkapi dengan fitur *pop-up* yang dapat menampilkan pengumuman penting atau informasi lainnya saat aplikasi dibuka. Dengan menggunakan sistem absensi ini, pegawai

dapat secara efisien mencatat kehadiran mereka dan memperoleh informasi terkait dengan mudah.

18. Sistem Manajemen Talenta “SIMATA”

Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) merupakan sebuah sistem yang menjadi landasan dalam pencarian dan pengelolaan talenta di Pemerintah Provinsi Bali. Dalam filosofi SIMATA, sistem ini diibaratkan sebagai "mata" yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melihat kualifikasi, kompetensi, dan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Bali. Melalui SIMATA, diharapkan dapat mengidentifikasi dan menempatkan talenta-talenta yang potensial pada jabatan strategis, sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

SIMATA memiliki peran penting dalam proses pencarian dan penempatan talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan menggunakan sistem ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat secara efektif dan efisien melihat dan menganalisis profil serta potensi para ASN. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, SIMATA membantu dalam mengidentifikasi talenta-talenta yang memiliki kemampuan dan potensi untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan adanya SIMATA, diharapkan terwujudnya sinergi antara kebutuhan organisasi dan potensi individu, sehingga dapat menciptakan struktur organisasi yang kuat dan berkinerja tinggi. Melalui pengelolaan talenta yang baik, Pemerintah Provinsi Bali dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. SIMATA menjadi alat yang efektif dalam mengelola talenta-talenta yang ada, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkompeten dan berintegritas tinggi untuk memajukan Pemerintah Provinsi Bali.

19. Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online “SIKEPO”

Sistem Informasi Kinerja Pegawai *Online* (Sikepo) adalah sebuah sistem yang memungkinkan penginputan dan pemantauan capaian kinerja pegawai secara online setiap bulannya. Sistem ini juga menjadi dasar perhitungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan menggunakan Sikepo, proses pengukuran dan evaluasi kinerja pegawai menjadi lebih efisien dan transparan, serta memudahkan dalam penghitungan TPP sesuai dengan capaian kinerja yang dicapai.

20. Sistem Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Pemerintahan Provinsi Bali adalah sebuah solusi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pemerintahan Provinsi Bali dalam mengelola dan melacak aset-aset yang dimiliki. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk pengelolaan aset-aset pemerintah, termasuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset Lainnya.

21. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “SAKIP”

E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan sebuah sistem elektronik yang dirancang khusus untuk membantu instansi pemerintah dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Sistem ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dengan adanya E-SAKIP, diharapkan bahwa instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Melalui sistem yang terintegrasi ini, pengguna dapat memantau progres kinerja, mengevaluasi capaian hasil, dan melaporkan kinerja dengan lebih cepat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, E-SAKIP menjadi alat penting dalam mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan mengoptimalkan penggunaan sistem ini, diharapkan instansi pemerintah dapat mengelola kinerja mereka secara lebih efektif dan menyeluruh.

22. Sistem Strategi Penguatan Manajemen Resiko Berkualitas “SUPERMANKUAT”

Strategi Penguatan Penerapan Manajemen Risiko Berkualitas Melalui Aplikasi Terintegrasi (Supermankuat) adalah sebuah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan tujuan untuk memperkuat penerapan manajemen risiko dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini mengadopsi kerangka manajemen risiko dan melibatkan tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dalam pengelolaan risiko. Tiga lini pertahanan tersebut meliputi pemilik risiko (*risk owner*), pengawas risiko (*risk overseer*), dan penyedia pemastian independen (*independent assurance provider*). Aplikasi Supermankuat diharapkan dapat memudahkan proses pengelolaan risiko bagi tiga lini pertahanan tersebut.

23. Sistem Pemantauan Internal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat “PETI EMAS”

PETI EMAS merupakan aplikasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Pemerintah Provinsi Bali dalam mempermudah melaksanakan pemenuhan dokumen hasil pemeriksaan melalui sistem yang telah dibangun. Aplikasi ini bertujuan memudahkan perangkat daerah untuk mengontrol pergerakan dari tindak lanjut atas aduan yang diterima sekaligus mengomentari apakah tindak lanjut yang diberikan sudah sesuai atau belum atau perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya dan meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan.

24. Layanan Smartlink

Layanan Smartlink "balikom.info" yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebuah *platform* yang memungkinkan pengguna untuk memperpendek dan mengelola link atau tautan dengan mudah. Selain itu, *platform* ini juga memungkinkan pembuatan *microsite* atau halaman khusus yang berisi kumpulan *link* terkait.

Dengan menggunakan Smartlink Pemerintah Provinsi Bali, pengguna dapat membuat tautan yang pendek dan mudah diingat, sehingga dapat dengan cepat diakses oleh pengguna lain. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur *generate QR code*, yang memungkinkan tautan tersebut dapat diakses melalui pemindaian *QR code* menggunakan perangkat *smartphone* masing-masing pengguna.

Smartlink Pemerintah Provinsi Bali memberikan solusi praktis dalam mengelola tautan dan mempermudah proses berbagi informasi atau promosi melalui *platform* digital. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan kemudahan akses melalui *QR code*, Smartlink Pemerintah Provinsi Bali merupakan alat yang efektif dalam mengoptimalkan penggunaan tautan dan memperluas jangkauan komunikasi digital di Pemerintah Provinsi Bali.

25. Sistem Notifikasi Terintegrasi

Sistem Notifikasi Terintegrasi adalah sebuah sistem yang menyediakan layanan pengiriman pesan melalui email, SMS, dan pesan *WhatsApp* secara langsung, serta berfungsi sebagai penghubung atau gateway untuk mengirim pesan dari sistem lain yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan integrasi yang baik dengan sistem lainnya, Sistem Notifikasi Terintegrasi memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dengan mudah dari berbagai aplikasi atau sistem yang digunakan di Pemerintah Provinsi Bali, sehingga mempercepat alur komunikasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyebaran informasi serta sudah dimanfaatkan sebagai layanan pengiriman OTP (*One Time Password*) atau *password* sekali pakai di berbagai sistem yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan fitur-fitur yang lengkap dan kemampuan untuk mengirim pesan melalui email, SMS, dan *WhatsApp*, Sistem Notifikasi Terintegrasi menjadi alat yang penting dalam mendukung operasional dan komunikasi yang efektif di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

26. Sistem Pendataan Koperasi (*Online Data Koperasi*)

Data Koperasi yang tersedia dalam *Online Data System* (ODS) yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI saat ini bersifat umum dan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kebijakan perkoperasian di Provinsi Bali. Oleh karena itu, Provinsi Bali merasa perlu memiliki sistem khusus untuk mengumpulkan dan menampilkan data koperasi secara detail baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah mengembangkan *Online Data Koperasi* (ODK) Provinsi Bali. ODK merupakan sebuah sistem data digital berbasis *web* yang memuat informasi yang lebih detail mengenai koperasi di Bali. Sistem ini mencakup data koperasi binaan tingkat provinsi/kabupaten/kota dan juga binaan nasional yang beroperasi di wilayah Bali.

ODK dibangun secara terpisah dari *Online Data System* (ODS) yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI, namun menjadi pelengkap dengan

menawarkan data detail yang belum tersedia di ODS. ODK juga melibatkan koperasi secara aktif dalam proses penginputan dan pengolahan data, sehingga menjadikannya sebuah sistem yang berpartisipasi aktif dari para pelaku koperasi di Bali.

27. Sistem pendataan IKM dan UMKM

Sistem yang diberi nama *Office* UMKM adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk melakukan pendataan UMKM/IKM dan Koperasi dengan tujuan membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan UMKM/IKM dan Koperasi di Bali.

Melalui *Office* UMKM, Pemerintah Provinsi Bali dapat secara efisien dan efektif mengumpulkan informasi terkait UMKM/IKM dan Koperasi di wilayahnya. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam proses pendataan, termasuk pengumpulan data demografis, data usaha, dan informasi lainnya yang relevan.

Dengan memiliki data yang komprehensif dan terkini, Pemerintah Provinsi Bali dapat menganalisis kondisi UMKM/IKM & Koperasi secara lebih akurat dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sektor tersebut. *Office* UMKM menjadi alat penting dalam mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan dukungan yang efektif kepada UMKM/IKM dan Koperasi di Bali guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

28. Marketplace bagi Produk Koperasi, UMKM dan IKM Bali “MadeInBali”

Madeinbali, sebuah aplikasi yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Dinas Koperasi UMKM, Disperindag dan Diskominfo Provinsi Bali, merupakan *marketplace* digital yang dirancang khusus untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM), dan Koperasi di Bali. Aplikasi ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha lokal tersebut untuk memasarkan produk-produk mereka secara lebih luas.

Dengan menggunakan aplikasi Madeinbali, para pelaku UMKM, IKM, dan Koperasi di Bali dapat memanfaatkan kekuatan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas dan daya jual produk mereka. Aplikasi ini menyediakan *platform* yang memudahkan proses pemasaran, memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau konsumen potensial tidak hanya di dalam Bali, tetapi juga di luar pulau Bali.

Melalui fitur-fitur yang inovatif, Madeinbali memungkinkan para pengguna untuk membuat toko *online* mereka sendiri di dalam aplikasi. Hal ini memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk memamerkan produk-produk mereka dengan tampilan yang menarik dan profesional. Dengan demikian, mereka dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan secara signifikan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, aplikasi Madeinbali juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menemukan dan membeli produk-produk lokal Bali dengan cepat dan mudah. Konsumen dapat menjelajahi

berbagai kategori produk, membandingkan harga, dan melihat ulasan dari pelanggan lain sebelum melakukan pembelian. Hal ini menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dengan adanya aplikasi Madeinbali, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi para pelaku UMKM, IKM, dan Koperasi di Bali, serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal dalam skala nasional maupun internasional. Aplikasi ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan industri lokal Bali.

29. Integrasi Pembayaran Layanan Aplikasi/ *One Payment Gateway* “SiPAY”

Single/One Payment Gateway adalah solusi terbaru yang dikembangkan dengan tujuan utama mendorong penggunaan pembayaran nontunai dan mendukung akuntabilitas pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam upaya mempermudah transaksi elektronik, *One Payment Gateway* berkolaborasi dengan lembaga perbankan terkemuka dan telah melalui serangkaian audit keamanan ketat guna memastikan sistemnya aman dan terpercaya.

Sistem ini telah berhasil terintegrasi dengan berbagai layanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dalam kerangka integrasi ini, *One Payment Gateway* menyediakan proses transaksi keuangan yang dapat diakses oleh pengguna melalui platform yang telah dibangun. Sebagai hasilnya, pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran dan transaksi keuangan secara online melalui berbagai layanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan keamanan yang terjamin dan integrasi yang komprehensif, *One Payment Gateway* menjadi solusi yang tangguh dan andal dalam memfasilitasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui penggunaan pembayaran nontunai, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan memungkinkan pengembangan fitur pembayaran yang lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

30. Kantor Virtual Publik

Masyarakat umum dan instansi publik di luar Pemerintah Provinsi Bali kini dapat melakukan korespondensi dan memantau status surat secara *online* kepada Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya sistem ini, tidak perlu lagi mengirimkan surat fisik atau menghubungi langsung Kantor Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk menanyakan status surat.

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan surat secara elektronik dan melacak prosesnya secara *real-time*. Pengguna dapat mengisi formulir elektronik, mengunggah dokumen pendukung, dan mengirimkannya melalui *platform* yang disediakan. Selain itu, pengguna juga dapat melihat status surat mereka, mulai dari proses verifikasi hingga persetujuan akhir.

Dengan adanya sistem ini, interaksi antara masyarakat umum/instansi publik dengan Pemerintah Provinsi Bali menjadi lebih efisien dan transparan. Surat-surat dapat diproses dengan cepat dan secara *online*, menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengirimkan surat secara fisik.

31. Pameran Virtual Pembangunan Bali

Pameran Pembangunan Virtual adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk acara Pameran Pembangunan Bali yang diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Bali. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi alternatif mengingat tidak mungkin untuk melakukan pameran secara langsung saat pandemi COVID-19. Dengan adanya pameran pembangunan virtual, pengunjung tetap dapat mengakses informasi terkait pembangunan di Bali tanpa perlu berkumpul di satu tempat secara fisik.

Aplikasi ini telah berhasil diimplementasikan di *platform web* dengan desain yang responsif, sehingga dapat diakses melalui perangkat *mobile* dan *desktop*. Pengunjung dapat merasakan pengalaman yang nyata saat memasuki Pameran Virtual ini berkat adanya grafik 3D yang menawan.

32. Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis “SIGAPURA”

SiGapura merupakan sebuah aplikasi yang didesain untuk mempermudah dan mempercepat penyajian informasi terkait harga dan neraca pangan dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Bali, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Aplikasi ini memiliki fitur penginputan data harian dan mingguan yang terkait dengan harga pangan utama strategis dan neraca pangan.

Aplikasi SiGapura Provinsi Bali menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang harga pangan utama strategis, yang berasal dari berbagai pasar tradisional dan modern di seluruh kecamatan, kabupaten, dan kota di Bali. Dengan demikian, pengguna aplikasi dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini tentang harga bahan makanan yang strategis dan penting dalam kegiatan sehari-hari.

Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi neraca pangan yang memberikan gambaran tentang kebutuhan dan ketersediaan pangan di setiap kabupaten dan kota. Informasi ini penting untuk memonitor dan mengendalikan pasokan pangan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan pangan di wilayah Provinsi Bali.

Dengan kehadiran aplikasi SiGapura Provinsi Bali, para pengguna, termasuk masyarakat umum, petani, pedagang, dan pihak berkepentingan lainnya, dapat mengakses informasi harga pangan dan neraca pangan dengan cepat dan efisien. Hal ini akan membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian inflasi, serta memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi di seluruh wilayah Provinsi Bali.

33. Sistem Perizinan Elektronik “PRESTISE”

Aplikasi "Prestise" merupakan solusi inovatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan menggunakan *Prestise*, proses pengajuan izin dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui *platform online*. Keunggulan mengurus perizinan menggunakan layanan *Prestise* ini mencakup beberapa fitur unggulan, antara lain:



- Pengajuan Permohonan Izin Secara *Online*: Masyarakat dapat mengajukan permohonan izin dengan mudah melalui aplikasi ini. Tidak perlu lagi mengurus izin secara konvensional yang memakan waktu dan tenaga.
- Pemantauan Proses Izin Secara *Realtime*: Dengan *prestise*, masyarakat dapat memantau proses pengajuan izin secara *realtime*. Mereka akan mendapatkan informasi terkini tentang status dan perkembangan izin yang diajukan.
- Verifikasi Berkas oleh Petugas Secara *Online*: Proses verifikasi berkas dilakukan secara *online* oleh petugas yang berwenang. Hal ini mempercepat proses izin dan menghindari kebingungan atau keterlambatan yang mungkin terjadi.
- Fitur Notifikasi Proses Izin Melalui Email: *Prestise* juga menyediakan fitur notifikasi melalui email. Masyarakat akan menerima pemberitahuan mengenai perkembangan izin mereka, sehingga mereka tetap terinformasi dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan.
- Izin Terbit Secara *Online* Menggunakan Tanda Tangan Elektronik: Izin yang diterbitkan melalui *prestise* memiliki keabsahan resmi dan telah ditandatangani secara elektronik. Dengan fitur ini, masyarakat tidak perlu datang ke DPMPTSP Provinsi Bali hanya untuk mengambil izin yang sudah terbit. Kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) memastikan validitas dan keaslian dokumen elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Dengan adanya aplikasi *Prestise*, masyarakat Provinsi Bali dapat mengajukan izin dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Proses pengurusan izin yang transparan dan terintegrasi secara *online* memberikan kenyamanan dan kepraktisan bagi masyarakat. Inovasi ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap izin-izin yang diperlukan.

34. Permohonan Informasi Publik dalam Portal Bali Satu Data

"Permohonan Informasi Publik" merupakan bagian dari Bali Satu Data, sebuah *platform* yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan memberikan pelayanan informasi yang maksimal kepada masyarakat. Dalam hal ini, Permohonan Informasi Publik di Portal Bali Satu Data menggantikan layanan sebelumnya yang dikenal sebagai Sistem Keterbukaan Informasi (SiKI), yang dikembangkan secara mandiri pada tahun 2017. SiKI diciptakan sebagai inovasi dalam manajemen informasi dan koordinasi internal serta sebagai sistem yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik secara *online*.

Melalui Bali Satu Data, data dan informasi yang disediakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga ditampilkan dalam bentuk grafik statistik, tabel angka, dan pelaporan dokumen yang terintegrasi dengan tingkat nasional melalui Satu Data Indonesia. Hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan mendalam mengenai berbagai aspek di Provinsi Bali.

Dalam layanan Permohonan Informasi Publik di Bali Satu Data, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui portal yang disediakan. Dengan proses migrasi dari SiKI ke Bali Satu Data, pengajuan permohonan informasi menjadi lebih efisien dan transparan. Data dan informasi yang diminta akan ditindaklanjuti dengan cepat dan secara terperinci, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Platform Bali Satu Data membuktikan komitmen Diskominfos Provinsi Bali dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas dan memenuhi standar transparansi. Dengan akses mudah, presentasi data yang menarik, dan integrasi tingkat nasional, pelayanan informasi publik menjadi lebih terjangkau dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

35. Sistem Perpustakaan Digital “Pustaka Bali”

Pustaka Bali adalah sistem informasi perpustakaan yang menyediakan akses lengkap ke koleksi buku yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dengan pemanfaatan teknologi terkini, Pustaka Bali mempermudah akses dan memperkaya pengalaman para pengguna dalam menjelajahi dunia literatur yang kaya dan beragam.

Dalam Pustaka Bali, pengguna dapat dengan mudah mencari dan menemukan buku-buku yang mereka cari. Pengunjung dapat menjelajahi katalog digital yang terdiri dari berbagai *genre*, mulai dari fiksi hingga buku referensi, dan dari sastra Bali hingga literatur internasional. Informasi rinci tentang setiap buku, termasuk sinopsis, penulis, dan tahun terbit, disajikan secara komprehensif untuk membantu pengguna membuat pilihan yang tepat.

Selain itu, Pustaka Bali juga menyediakan layanan peminjaman dan reservasi buku secara *online*. Pengunjung dapat memanfaatkan fitur ini untuk memesan buku yang mereka inginkan, dan dengan cepat mengetahui ketersediaan buku tersebut.

Dengan Pustaka Bali, akses ke pengetahuan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam buku-buku menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat Bali. Sebagai sumber daya informasi yang penting, perpustakaan ini tidak hanya melayani kebutuhan pembaca, tetapi juga memainkan peran penting dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Dengan dedikasi untuk memberikan layanan berkualitas, Pustaka Bali berkomitmen untuk menjadi pusat pengetahuan yang memperkaya budaya dan kreativitas di Provinsi Bali.

36. Portal Layanan Belajar-Mengajar “BALI MELAJAH”

Portal Bali Melajah merupakan sebuah *platform* layanan pembelajaran elektronik (*e-learning*) berbasis *web* dan *mobile* yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa pada satuan pendidikan jenjang menengah di Provinsi Bali. Portal Bali Melajah memiliki empat tingkat pengguna, yaitu admin, operator sekolah, guru, dan siswa. Masing-masing tingkat pengguna tersebut memiliki hak akses dan *dashboard*.

Dengan adanya Portal Bali Melajah, guru dan siswa pada satuan jenjang pendidikan menengah di Provinsi Bali dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan lebih mudah, dimana saja, dan kapan saja.

37. Sistem Antrean Layanan Publik

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS), Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan SIK-KBS sebagai sistem informasi yang memberikan akses mudah bagi Krama Bali dan Fasilitas Kesehatan (Faskes) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. SIK-KBS memberikan informasi mengenai lokasi faskes, fasilitas dan pelayanan yang tersedia di faskes, pendaftaran pasien, ketersediaan tempat tidur rawat inap di Faskes, serta riwayat kesehatan Krama Bali. SIK-KBS merupakan misi ketiga dari Gubernur Bali dalam percepatan pengembangan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi berbasis aplikasi di seluruh Bali.

Untuk mendukung fitur pendaftaran *online* pada setiap faskes di Bali dan memenuhi kebutuhan SIK-KBS, pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali telah merancang dan membangun aplikasi antrean. Aplikasi antrean ini telah terintegrasi dengan sistem BPJS untuk mencari data pasien BPJS, serta terhubung dengan riwayat kesehatan individu pada sistem *Mobile* JKN BPJS Kesehatan. Saat ini, Aplikasi antrean yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali telah digunakan di faskes di sembilan kabupaten/kota di seluruh Bali.

38. Website Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bung Karno

Website Bulan Bung Karno Provinsi Bali adalah *platform* khusus yang mempromosikan dan mengakomodasi acara Bulan Bung Karno di Provinsi Bali. Pengunjung dapat menemukan informasi lengkap tentang lomba, jadwal kegiatan, dan latar belakang kegiatan tersebut. *Website* ini juga berfungsi sebagai sarana bagi peserta lomba dengan dapat membuat akun dan mengunggah hasil karya mereka, memperlihatkan kreativitas secara online kepada panitia penyelenggara.

Website Bulan Bung Karno Provinsi Bali memastikan acara ini dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan geografis dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengunjung dapat dengan mudah memperoleh informasi, terlibat dalam lomba, dan menyaksikan perkembangan kegiatan melalui *platform online* yang nyaman dan aman. *Website* ini menjadi sumber daya berharga bagi semua pihak yang terlibat, memperkaya budaya dan kesenian di Provinsi Bali, serta menghormati warisan Bung Karno.

39. Bali Media Centre “BMC” : Portal Berita, Survei, Konsultasi/*HelpDesk*, Kontak dan Informasi Publik lainnya.

BMC (Bali Media Center) adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Tujuan utama BMC adalah menyediakan akses berita yang terpercaya serta berfungsi sebagai *helpdesk* atau media konsultasi bagi pengguna layanan dan masyarakat umum. Dengan menggunakan BMC, pengguna dapat menyampaikan pengaduan mereka dengan mudah dan efisien.

Salah satu fitur yang tersedia di aplikasi BMC adalah kemampuan untuk melakukan survei. Fitur ini memfasilitasi pelaksanaan survei-survei yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali secara mandiri, tanpa perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dengan adanya fitur ini, pemerintah dapat mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat dengan lebih efektif dan efisien, serta melakukan analisis data yang lebih terperinci.

BMC memberikan kemudahan akses kepada pengguna dengan antarmuka yang intuitif dan navigasi yang mudah dipahami. Selain itu, BMC juga menyediakan berita terkini yang berkaitan dengan pemerintahan dan perkembangan di Provinsi Bali. Dengan adanya BMC, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan aplikasi BMC, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dalam hal komunikasi dengan pemerintah, pelaporan pengaduan, serta berpartisipasi dalam survei-survei yang penting bagi pembangunan di Provinsi Bali. Dengan terus mengembangkan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendukung kemajuan dan transparansi pemerintahan.

40. Sistem Informasi Ketenagakerjaan “SISNAKER”

Salah satu aksi nyata Pemerintah Provinsi Bali dalam mengentaskan kemiskinan yaitu membuat dan mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) dengan salah satu tujuan utama yaitu meningkatkan kompetensi masyarakat umum khususnya yang kurang mampu untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan kerampilan, pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan diklat bersertifikasi secara gratis dalam berbagai bidang jurusan. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan akan berdampak pada meningkatnya peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi risiko kemiskinan.

41. Sistem Pelayanan Perikanan “SIMPELKAN”

Pengembangan sistem pelayanan publik digital tentu memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat perikanan pada khususnya. Keuntungan bagi pemerintah diantaranya adalah efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, transparan dan akuntabel. Produktivitas pekerja juga akan meningkat. Pelayanan publik digital juga menjadi media promosi pemerintah yang tepat terutama untuk mensosialisasikan kinerja dan program pemerintah. Kepuasan masyarakat yang meningkat atas kinerja pelayanan publik yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bagi masyarakat perikanan, pelayanan publik digital akan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam pengaplikasiannya, pelayanan publik digital akan melahirkan mekanisme layanan dengan kemudahan proses dan ketelusuran. Jangkauan pengguna juga akan semakin besar. Proses transaksi atau pengurusan akan berjalan lebih cepat, dapat diakses dari mana saja dengan tingkat kesalahan yang lebih kecil, sehingga dapat

dikatakan bahwa dengan beralih ke sistem pelayanan berbasis digital maka seluruh rangkaian proses pelayanan publik akan berjalan dengan lebih lancar.

Sistem layanan SIMPELKAN ini meliputi enam ruang lingkup layanan, diantaranya layanan pengurusan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP), Surat Tanda Keterangan Andon (STKA), Surat Keterangan Asal (SKA) Produk Kelautan dan Perikanan, Layanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Penerbitan Sertifikat Kesesuaian SNI Produk Perikanan dan Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI pada Produk Perikanan. Dalam sistem yang diusulkan, akan ada 3 (tiga) entitas yang saling berhubungan, diantaranya pemohon/*End User*, *administrator*, dan *approver*. Pemohon akan diberikan fasilitas informasi layanan dan penelusuran untuk memudahkan dalam memantau permohonan. Baik *administrator* maupun *approver* akan juga diberikan *single access* untuk melakukan verifikasi permohonan dan memberikan persetujuan.

42. Layanan Bali Digital Festival

Layanan Website Bali Digital Festival telah dirancang sebagai platform yang menyediakan informasi lengkap seputar penyelenggaraan Bali Digital Festival. Melalui *website* ini, pengunjung dapat menemukan informasi umum, jadwal kegiatan, daftar acara, profil pembicara, serta informasi terkait lomba dan hal-hal lainnya yang terkait dengan festival ini.

Selain sebagai sumber informasi, *website* ini juga menyediakan fasilitas pendaftaran untuk peserta lomba/kompetisi, pameran, serta *tenant* kuliner. Khusus untuk acara *pre-event* di Tahun 2023, terdapat pendaftaran khusus untuk *campus roadshow*. Semua proses pendaftaran dan seleksi peserta Bali Digital Festival dapat dilakukan melalui fitur yang terintegrasi dalam menu admin.

Dengan adanya fitur kurasi dalam menu admin, semua kebutuhan terkait informasi, registrasi, dan seleksi peserta dapat dilakukan secara efisien dan terpusat dalam satu layanan. Hal ini memberikan kemudahan bagi panitia dalam mengelola peserta dan memastikan proses festival berjalan dengan lancar.

Website Bali Digital Festival hadir sebagai sarana komunikasi yang efektif antara panitia dan peserta, serta untuk memperluas jangkauan festival ini kepada masyarakat luas. Dengan desain yang *user-friendly* dan informasi yang lengkap, *website* ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman *online* yang memudahkan, menyenangkan, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam Bali Digital Festival.

43. Sistem Penyelenggaraan *Event* “EVENTID” : Registrasi, Absensi, Piagam Elektronik

EventID adalah layanan inovatif yang memudahkan pengguna dalam mengatur dan mengelola berbagai acara atau *event*. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan *user-friendly*, sistem ini menyediakan solusi yang efisien dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan acara dengan lancar.

Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah untuk membuat event atau acara dengan mudah serta fitur manajemen *event*. Pengguna dapat dengan cepat membuat deskripsi acara, menentukan tanggal, waktu, dan lokasi, serta menyertakan informasi detail seperti jadwal kegiatan. Dengan antarmuka yang

intuitif, pengguna dapat dengan cepat memasukkan semua detail yang diperlukan untuk acara mereka.

Sistem Pengelolaan Event juga menyediakan fitur registrasi peserta acara yang mudah digunakan. Peserta dapat mendaftar secara *online* dan mengisi formulir pendaftaran. Informasi peserta dapat dengan mudah diakses dan dikelola oleh panitia melalui sistem ini.

Selain itu, sistem ini juga mencakup fitur untuk mengisi daftar hadir dengan mudah. Panitia acara dapat menggunakan sistem ini untuk mencatat kehadiran peserta secara digital, menghemat waktu dan usaha yang diperlukan dalam proses administrasi.

Terakhir, sistem pengelolaan event ini juga menawarkan fitur sertifikat elektronik. Setelah acara selesai, peserta yang memenuhi syarat dapat secara otomatis menerima sertifikat elektronik yang dihasilkan melalui sistem. Hal ini memberikan kepraktisan dan efisiensi dalam proses penerbitan sertifikat.

Dengan layanan “EventID”, pengguna dapat merencanakan, mengelola, dan melaksanakan acara dengan lebih terstruktur dan efisien. Fitur-fitur yang ada mempermudah proses pengorganisasian acara, mulai dari pembuatan *event*, manajemen acara, registrasi peserta, hingga pengelolaan daftar hadir dan sertifikat elektronik. Dengan *platform* ini, pengguna dapat fokus pada pengalaman yang tak terlupakan bagi peserta acara mereka.

44. Layanan Pemanfaatan Aset

Merupakan bagian dari sistem aset yang dikembangkan oleh Tim SPBE Diskominfo Provinsi Bali. Modul layanan pemanfaatan aset pada sistem aset ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan sewa Aset Pemerintah Provinsi Bali (khususnya tanah) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan bantuan pengelolaan oleh UPTD. BMD. Dengan adanya *platform* ini, pengguna dapat melakukan penyewaan aset secara *online*, bahkan mengetahui dimana saja lokasi aset yang masih kosong atau belum disewakan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui aset mana yang tersedia dan dapat dijadikan pilihan untuk keperluan sewa yang mereka butuhkan. Dengan adanya Pemanfaatan Aset, proses penyewaan aset Pemerintah Provinsi Bali menjadi lebih efisien dan transparan. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor atau mengurus secara konvensional, tetapi dapat menggunakan *platform* ini untuk melakukan proses penyewaan secara *online*. Hal ini memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu dalam mencari dan menyewa aset yang diperlukan.

Keunggulan layanan ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi lengkap tentang aset yang tersedia untuk disewa, termasuk lokasi dan status ketersediaan. Dengan adanya sistem *online*, proses penyewaan aset menjadi lebih efisien, menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan proses konvensional. Selain itu, *platform* ini juga membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan aset, dengan sistem pengelolaan terintegrasi yang memudahkan pemantauan status penyewaan aset. Seluruh informasi terkait dengan aset, termasuk kontrak penyewaan dan pembayaran, dicatat dan terdokumentasi secara digital, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Selain itu, *platform* ini juga memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan aset, dengan sistem pengelolaan terintegrasi yang memudahkan pemantauan status penyewaan. Pemanfaatan Aset secara digital juga membawa penghematan dokumen fisik, fleksibilitas aksesibilitas, kemampuan monitoring *real-time*, kolaborasi efisien, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

45. Layanan *Bug Bounty*

Bali *Bug Bounty* adalah sebuah *platform* aplikasi yang dikembangkan oleh Tim SPBE Diskominfo Provinsi Bali bertujuan untuk memberikan sarana bagi pengguna dalam melaporkan masalah *bug*, *error*, dan celah keamanan terkait dengan layanan digital yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya platform ini, pengguna dapat berperan aktif dalam meningkatkan keamanan sistem digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Salah satu keunggulan dari Bali *Bug Bounty* adalah kemampuannya untuk memfasilitasi pelaporan atas beberapa jenis masalah keamanan. Pengguna dapat melaporkan pelanggaran data, akses tidak sah ke data, celah keamanan, dan masalah sejenisnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan yang ada.

Dengan adanya *platform* ini, Pemerintah Provinsi Bali dapat mengumpulkan laporan-laporan dari masyarakat secara efisien dan merespon dengan cepat untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan. Ini adalah langkah yang positif dalam memperkuat keamanan dan privasi data dalam lingkungan digital pemerintah.

Bali *Bug Bounty* memberikan kesempatan bagi masyarakat Bali untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan data dan sistem digital di Provinsi Bali. Dengan menyediakan *platform* yang mudah digunakan dan fokus pada laporan masalah keamanan, aplikasi ini menjadi alat yang efektif dalam membangun kepercayaan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan digital.

46. Sistem Keuangan Desa Adat “SIKUAT”

Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT) adalah sebuah sistem tata kelola keuangan yang diterapkan di desa adat, yang mencakup pengelolaan alokasi keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali, pendapatan asli desa adat, serta sumber pendapatan lain yang sah. SIKUAT dirancang untuk mengelola dan mengawasi keuangan desa adat dengan efektif dan transparan.

Salah satu komponen utama dari SIKUAT adalah manajemen perencanaan anggaran tahunan. Setiap tahun, rancangan anggaran disusun terlebih dahulu oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA). Rancangan tersebut mencakup alokasi dana yang akan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan di desa adat.

Selanjutnya, rancangan anggaran dan belanja diajukan sesuai dengan penetapan dari Dinas PMA. Setelah persetujuan, pencatatan realisasi keuangan dilakukan dengan seksama. Hal ini mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta pembukuan yang akurat dan terperinci.

SIKUAT juga melibatkan proses rekapitulasi dan pelaporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan desa adat, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan saldo yang tersedia. Laporan tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan dan sebagai alat pemantauan bagi pihak terkait.

Dengan adanya Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT), diharapkan pengelolaan keuangan di desa adat menjadi lebih teratur dan akuntabel. SIKUAT memastikan bahwa alokasi keuangan yang diterima digunakan dengan tepat sasaran dan diarahkan untuk memajukan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa adat. Dengan manajemen keuangan yang baik, desa adat dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan bersama dan pemeliharaan nilai-nilai budaya yang kaya.

47. Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat “JIDHAT”

Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat adalah sebuah aplikasi *online* yang didesain khusus untuk desa adat di Provinsi Bali. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah menjadi pangkalan data yang komprehensif mengenai produk hukum adat di wilayah tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada desa adat dengan menyediakan informasi hukum adat yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan cepat.

Dengan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih efisien dan terorganisir terhadap produk hukum adat. Aplikasi ini mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai informasi hukum adat yang relevan.

Kelebihan utama dari aplikasi ini adalah kemudahan akses dan pencarian informasi. Pengguna dapat dengan cepat mencari dan mengakses informasi yang mereka butuhkan secara spesifik dan terperinci. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat menghemat waktu dan usaha dalam memperoleh informasi hukum adat yang diperlukan.

Selain itu, Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat juga memberikan jaminan keakuratan dan kevalidan informasi. Data yang disediakan melalui aplikasi ini telah melalui proses verifikasi, sehingga desa adat dapat mengandalkan informasi tersebut sebagai acuan yang sah dalam mengelola urusan hukum adat di wilayah mereka.

Dengan adanya aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat, diharapkan pelayanan hukum adat di Provinsi Bali dapat ditingkatkan secara signifikan. Desa adat akan merasakan manfaat dalam hal akses informasi yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan efisiensi dalam administrasi hukum adat. Ini merupakan langkah maju dalam memperkuat dan melestarikan warisan budaya hukum adat di Bali, sekaligus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat yang kaya dan beragam.

48. Sistem Sensus Desa Adat

Sistem Sensus Desa Adat, yang disebut juga sebagai Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat, merupakan sebuah inisiatif untuk mengembangkan dan

memberdayakan desa adat di Bali. Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal di Bali. Dalam upaya menjaga keberadaan dan kelestariannya, Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat dilaksanakan untuk mendata kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada di setiap desa adat di Bali.

Sensus ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang perkembangan jumlah penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, serta atribut sosial penduduk dalam suatu wilayah desa adat. Data yang terkumpul dari sensus ini diyakini menjadi dasar dalam menentukan pembangunan dan merumuskan program-program kebijakan oleh berbagai pihak, baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Sensus ini mencakup pemerintahan, kelembagaan, parahyangan, palemahan, dan pawongan di 1.493 desa adat yang ada di Bali.

Dalam rangka mewujudkan visi Nangun Sat Kertih Loka Bali, Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat menjadi langkah penting dalam mendukung program prioritas Gubernur Bali. Melalui sensus ini, diharapkan tercipta pangkalan data berbasis desa adat yang valid dan lengkap guna memperkuat peran, tugas, dan fungsi desa adat dalam menjaga kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan.

Dengan tersedianya sistem dan *database* sumber daya desa adat, data terpadu desa adat yang mencakup parahyangan, pawongan, dan palemahan dapat diakses dengan mudah. Informasi yang terkumpul dari sensus ini akan memudahkan pengambilan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk pengembangan potensi desa adat serta pembangunan desa adat di masa depan.

Dalam rangka memenuhi sasaran tersebut, kegiatan sensus ini bertujuan untuk menyusun *database* akses data terpadu desa adat dan menganalisis hasil Sensus Sat Kerthi Semesta Bali Berbasis Desa Adat. Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang komprehensif dan melakukan kajian terhadap data tersebut, yang meliputi aspek parahyangan, pawongan, dan palemahan dalam desa adat.

49. Sistem Informasi Krama Desa Adat “KRAMA”

Sistem Informasi Krama Desa Adat adalah sebuah inovasi yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait dengan krama (penduduk) desa adat di Bali. Dengan sistem ini, manajemen informasi mengenai krama menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Sistem ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan krama desa adat, seperti data kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, *meperas*, serta pencetakan kartu penduduk krama dan kartu keluarga krama. Data tersebut dikumpulkan dan diintegrasikan secara elektronik, memungkinkan pengelolaan yang lebih baik dan pemrosesan yang cepat.

Melalui sistem ini, pemerintah dan desa adat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai data krama di Bali. Data-data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pemantauan kondisi sosial masyarakat desa adat.

Selain itu, sistem ini juga memudahkan penerbitan kartu penduduk krama dan kartu keluarga krama. Dengan adanya kartu-kartu ini, identitas dan hubungan keluarga setiap krama dapat tercatat dengan jelas, serta dapat membantu dalam administrasi desa adat.

Dengan Sistem Informasi Krama Desa Adat, desa adat di Bali memiliki alat yang kuat untuk mengelola data krama dengan efisien dan efektif. Sistem ini memastikan integritas data, meningkatkan kualitas pelayanan kepada krama, dan membantu dalam mengambil keputusan yang berdasarkan data yang valid. Sebagai hasilnya, kehidupan masyarakat desa adat dapat dikelola dengan lebih baik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

50. Sistem Manajemen Aset Desa Adat “PADRUWEN”

Padruwen Desa Adat adalah salah satu modul pada sistem aset yang telah dikembangkan sebelumnya dimana sistem ini dirancang khusus untuk membantu desa adat dalam mengelola dan melacak aset-aset yang dimiliki. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk pengelolaan aset-aset desa adat, termasuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

51. Sistem Manajemen Lembaga Usaha Milik Desa Adat “BUPDA”

Baga Utsaha Padruwen Masyarakat Adat, atau yang dikenal sebagai BUPDA, merupakan lembaga usaha yang beroperasi dalam sektor riil, jasa, dan/atau pelayanan umum. Lembaga ini didirikan berdasarkan hukum adat dan dikelola dengan tata kelola modern, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian krama desa adat. BUPDA menjadi wadah yang memungkinkan masyarakat adat untuk mengembangkan usaha mereka dengan dukungan dan pengelolaan yang baik.

Sistem Pendaftaran dan Monitoring BUPDA adalah sebuah platform yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran BUPDA dari setiap Desa Adat secara *online*, sehingga tidak diperlukan lagi pendaftaran secara *offline* dengan datang langsung ke dinas terkait. Melalui sistem ini, proses pendaftaran menjadi lebih efisien dan dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini meminimalisir hambatan administratif dan meningkatkan aksesibilitas bagi desa adat.

Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai alat manajemen dan monitoring BUPDA. Data umum BUPDA, tata kelola lembaga dan pengurus, tata kelola keuangan, serta data terkait usaha yang dimiliki oleh BUPDA dapat terdokumentasi dengan baik dalam sistem ini. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap kinerja dan perkembangan BUPDA secara keseluruhan. Dengan adanya sistem pendaftaran dan monitoring yang terintegrasi, pihak terkait dapat melacak dan mengelola informasi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan BUPDA.

Dengan Sistem Pendaftaran dan Monitoring BUPDA, diharapkan pengelolaan BUPDA menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini memberikan kemudahan akses bagi desa adat dalam mendaftarkan BUPDA dan memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kinerja lembaga. Dengan tata

kelola yang baik, BUPDA dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat, serta menjaga dan memperkaya kekayaan budaya dan warisan adat yang dimiliki oleh desa adat.

52. Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat “SIK-KBS”

Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat (SIK KBS) adalah sistem yang digunakan oleh masyarakat Bali untuk mengakses informasi kesehatan, memberikan masukan terkait JKN KBS, mendapatkan antrian *online*, serta mengetahui informasi mengenai tanaman obat dan *akupresur* melalui menu kesehatan tradisional. SIK KBS terdiri dari dua antarmuka pengguna, yaitu *Web* dan Aplikasi *Mobile*.

Fitur yang tersedia pada *Web* SIK KBS meliputi Informasi Puskesmas, Informasi Klinik, Informasi Rumah Sakit, Data Riwayat Kesehatan berdasarkan SIKDA Generik dan PIS PK per kecamatan/kabupaten/provinsi, serta Data Antrean pasien. Sementara itu, Aplikasi *Mobile* SIK KBS menyediakan fitur pendaftaran antrian Puskesmas/Rumah Sakit kesehatan tradisional, penanganan keluhan JKN KBS, dan menampilkan profil Puskesmas dan Rumah Sakit.

53. Sistem Inventori “SIRI”

Sistem Inventori (SIRI) adalah sebuah aplikasi yang telah dikembangkan untuk mencatat pergerakan barang masuk, barang keluar, dan pengembalian barang di Pemerintah Provinsi Bali. Dalam aplikasi ini, terdapat penggabungan dari beberapa aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Sistem Inventori Covid dan Inventori O2. Hal ini memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan terpadu dalam manajemen inventori di berbagai lembaga dan organisasi di Provinsi Bali.

Awalnya, Sistem Inventori Covid dan Inventori O2 dikembangkan khusus untuk digunakan oleh Dinas Kesehatan dalam mengelola inventori terkait dengan penanganan Covid-19. Namun, dengan perkembangan dan perluasan fungsionalitasnya, dikembangkanlah SIRI yang tidak hanya digunakan oleh Dinas Kesehatan, tetapi juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang membutuhkan pencatatan stok/inventori.

Dalam SIRI, pengguna dapat mencatat dan memantau dengan mudah pergerakan barang, termasuk barang masuk, barang keluar, dan pengembalian barang. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengelola inventori, sehingga pengguna dapat dengan cepat melacak dan memantau ketersediaan barang serta mengoptimalkan penggunaannya.

Dengan adanya SIRI, manajemen inventori di Pemerintah Provinsi Bali menjadi lebih teratur, terintegrasi, dan transparan. Aplikasi ini memungkinkan lembaga dan organisasi terkait untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang persediaan barang yang dimiliki, serta dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam penggunaan barang dan pengadaan kebutuhan baru.

SIRI memberikan solusi yang komprehensif dalam manajemen inventori, menjadikan proses pencatatan dan pengelolaan stok barang lebih efisien dan

akurat. Dengan keberadaan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan inventori, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan ketersediaan barang yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

54. Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan

SISLABKES (Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan) adalah sebuah sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan untuk memudahkan dan mendigitalisasi proses administrasi dan pendataan laporan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Dalam SISLABKES, terdapat berbagai fitur yang tersedia, termasuk Pelayanan Covid dan Pelayanan Umum, yang mencakup proses pendaftaran pasien hingga pengiriman hasil pemeriksaan kepada pasien.

Selain itu, SISLABKES juga dilengkapi dengan fitur Paket Layanan yang memungkinkan Admin CS untuk membuat dan mengelola paket layanan yang digunakan pada pendaftaran pasien. Fitur ini mencakup langkah-langkah seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus paket yang telah dibuat. Terdapat juga fitur Nomor Register yang digunakan untuk mendaftarkan nomor register layanan pemeriksaan manual di luar sistem SISLABKES, sehingga nomor register tetap teratur baik di dalam maupun di luar sistem.

Dengan SISLABKES, diharapkan pelayanan laboratorium kesehatan di Provinsi Bali dapat meningkat dengan adanya proses administrasi dan pendataan yang lebih efisien dan terintegrasi. *Platform* ini memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan informasi dan hasil pemeriksaan kepada pasien, serta memungkinkan pemantauan dan pengelolaan data yang lebih baik melalui fitur-fitur yang lengkap dan terstruktur.

55. Sistem Monitoring Kemiskinan dan Stunting

Dashboard Kemiskinan dan Stunting adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk memonitor data kemiskinan dan stunting dengan cara yang terstruktur dan informatif. Aplikasi ini mengumpulkan informasi data agregat dan data detail mengenai stunting yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan data keluarga berisiko yang dikelola oleh BKKBN. Data tersebut kemudian ditampilkan secara visual dalam sebuah *dashboard* monitoring yang dapat diakses oleh pimpinan.

Melalui *dashboard* stunting, pimpinan dapat melihat gambaran menyeluruh mengenai masalah stunting di wilayah yang terkait. Data-data stunting yang terkumpul mencakup berbagai aspek, seperti jumlah anak yang teridentifikasi sebagai stunting, distribusi geografis, karakteristik keluarga berisiko, dan faktor-faktor risiko yang terkait. Informasi ini membantu pimpinan dalam memahami skala dan lingkup masalah stunting yang perlu ditangani.

Dashboard stunting menjadi alat yang sangat berharga dalam membantu pimpinan dalam mengelola program-program kesehatan terkait stunting. Dengan informasi yang terstruktur dan terintegrasi, pimpinan dapat melihat gambaran komprehensif, menganalisis data dengan lebih baik, dan mengambil keputusan yang didukung oleh fakta. Hal ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan

efisiensi upaya pencegahan stunting, serta mengarahkan sumber daya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

56. Sistem Informasi dan Pelayanan *Online* Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan “SILEBAH”

"Silebah" adalah Sistem Informasi dan Pelayanan *Online* Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan. Sistem ini dibangun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi dan layanan secara *online* guna memenuhi kebutuhan yang terkait dengan kesehatan hewan dan bahan pangan asal hewan. Beberapa layanan yang disediakan melalui "Silebah" antara lain:

Pengujian Penyakit Hewan:

"Silebah" menyediakan layanan pengujian penyakit hewan yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan permohonan pengujian secara *online*.

Pengujian Organoleptik:

Layanan pengujian *organoleptik* pada "Silebah" memungkinkan pengguna untuk meminta pengujian terhadap produk bahan pangan asal hewan. Pengujian *organoleptik* ini melibatkan penilaian sensorik terhadap produk, seperti rasa, aroma, tekstur, dan penampilan visual. Dengan menggunakan sistem ini, pihak yang terkait dengan produksi bahan pangan asal hewan dapat memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengujian Cemar Mikroba:

"Silebah" juga menyediakan layanan pengujian cemaran mikroba pada bahan pangan asal hewan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan produk bebas dari kontaminasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

Melalui "Silebah", diharapkan proses pengujian laboratorium penyakit hewan dan bahan pangan asal hewan menjadi lebih efisien, transparan, dan terjangkau. Sistem ini memungkinkan akses yang mudah bagi para pemilik hewan, peternak, dan produsen bahan pangan asal hewan untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan kesehatan dan keamanan produk. Dengan menggunakan teknologi informasi dan layanan *online*, "Silebah" menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk hewan serta bahan pangan asal hewan.

57. *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali

JDIH Provinsi Bali merupakan *platform* elektronik yang menyediakan akses komprehensif ke berbagai dokumen hukum termasuk peraturan, perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan. Layanan ini telah berkembang mulai dari menyediakan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses, hingga menawarkan fitur interaksi seperti pencarian dan pengunduhan dokumen, layanan transaksi termasuk CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) dokumen hukum, analitik data, dan forum diskusi. JDIH Provinsi Bali mengintegrasikan sistemnya dengan layanan elektronik lain, termasuk *dashboard* Pimpinan Bali Satu Data dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (BPHN) melalui API, mendukung inisiatif Revitalisasi Hukum Jilid II pemerintah. Dengan berbagai peningkatan dan

integrasi, termasuk penambahan fitur-fitur baru dan pengembangan aplikasi *mobile*, JDIH Provinsi Bali tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas akses informasi hukum bagi pengguna tetapi juga mencerminkan komitmen Provinsi Bali dalam penataan regulasi dan pengembangan sistem informasi hukum yang terpadu, sejalan dengan kebijakan nasional dan mendapatkan pengakuan berupa penghargaan dari BPHN.

58. *Website* Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana (PIKBS)

Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana merupakan sebuah sistem untuk mendata dan mempublikasi terkait dengan data potensial proyek, data potensial aset, data UMKM, Data Desa Wisata, Data Pariwisata Bali, Data Realisasi Investasi, Data Peraturan Investasi di Bali. *Website* Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali untuk mewujudkan data yang berkualitas.

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023.

Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca luas sehingga laporan yang disampaikan bersifat informatif dan dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya.

Informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran dan posisi keuangan selaku entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing perangkat daerah sebagai entitas akuntansi sehingga seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta telah berupaya secara maksimal memenuhi acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dan perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali menuju ke arah transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mudah-mudahan pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bali, 17 Mei 2024

Pj. GUBERNUR BALI

S. M. MAHENDRA JAYA



**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Lampiran 1

No.	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	3.238.968.237.629,00	4.052.904.860.269,00	125,13	3.230.839.407.191,00
I	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.495.870.827.460,00	1.742.228.994.500,00	116,47	1.691.067.147.050,00
1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	30.252.299.597,00	33.895.240.000,00	112,04	38.863.454.900,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	29.605.600.111,00	33.106.060.900,00	111,82	37.566.460.500,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	520.874.499,00	635.950.700,00	122,09	1.130.577.300,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	32.653.192,00	45.125.400,00	138,20	31.783.900,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	93.171.795,00	108.103.000,00	116,03	134.633.200,00
2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	118.867.502.109,00	135.884.157.700,00	114,32	140.910.303.600,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	118.681.556.895,00	135.684.881.800,00	114,33	140.716.381.800,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	73.990.245,00	78.122.100,00	105,58	65.655.700,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	111.954.969,00	121.153.800,00	108,22	128.266.100,00
3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	749.314.625.208,00	868.787.506.600,00	115,94	850.302.705.150,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	745.727.690.982,00	864.311.488.100,00	115,90	845.847.981.600,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	974.504.355,00	1.383.261.800,00	141,95	1.137.198.050,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	427.866.929,00	558.344.400,00	130,49	513.919.200,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.184.562.942,00	2.534.412.300,00	116,01	2.803.606.300,00
4	PKB-Mobil Bus-Microbus	12.295.648.828,00	15.044.021.400,00	122,35	15.703.181.100,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	10.649.411.875,00	13.112.208.200,00	123,13	13.311.558.200,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.461.360.449,00	1.653.497.700,00	113,15	2.104.002.700,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	62.975.073,00	75.735.500,00	120,26	60.596.300,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	121.901.431,00	202.580.000,00	166,18	227.023.900,00
5	PKB-Mobil Bus-Bus	1.599.077.395,00	2.169.641.200,00	135,68	3.277.525.100,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	459.941.542,00	609.207.100,00	132,45	866.278.000,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	1.117.973.866,00	1.537.233.700,00	137,50	2.387.394.500,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	2.798.232,00	6.490.000,00	231,93	7.012.500,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	18.363.755,00	16.710.400,00	91,00	16.840.100,00
6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	91.358.108.247,00	109.240.606.000,00	119,57	105.652.881.400,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	90.788.041.908,00	108.342.120.100,00	119,34	104.792.563.400,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	154.998.273,00	181.244.000,00	116,93	166.681.800,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	103.566.632,00	137.762.400,00	133,02	105.020.900,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	311.501.434,00	579.479.500,00	186,03	588.615.300,00
7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	50.989.312.440,00	61.343.569.200,00	120,31	60.075.617.500,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	44.800.690.382,00	53.914.284.600,00	120,34	49.956.634.400,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	6.085.042.909,00	7.214.955.100,00	118,56	9.883.751.000,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	3.720.354,00	20.150.000,00	541,62	20.540.000,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	99.858.795,00	194.639.500,00	194,91	214.692.100,00
8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	25.214.389.220,00	31.662.987.000,00	125,58	29.310.243.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	18.226.694.569,00	22.675.980.400,00	124,41	19.579.761.000,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	6.538.494.447,00	8.192.577.900,00	125,30	8.948.214.700,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	24.343.750,00	33.910.000,00	139,30	27.075.800,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	424.856.454,00	760.518.700,00	179,01	755.191.800,00
9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.444.070.008,00	2.801.877.000,00	114,64	2.546.037.100,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.440.340.434,00	2.792.374.700,00	114,43	2.540.188.900,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.131.185,00	835.500,00	73,86	1.291.200,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	2.598.389,00	8.666.800,00	333,55	4.557.000,00
10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	413.500.533.819,00	481.380.893.000,00	116,42	444.425.197.900,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	412.887.514.543,00	480.509.789.800,00	116,38	443.549.908.000,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	78.539.104,00	103.042.400,00	131,20	95.255.900,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	534.480.172,00	768.060.800,00	143,70	780.034.000,00
11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	35.260.589,00	18.495.400,00	52,45	0,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	35.260.589,00	18.401.400,00	52,19	0,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	0	94.000,00	0,00	0,00
II	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	985.019.675.880,00	1.416.376.206.600,00	143,79	790.440.045.700,00
	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	5.990.344.813,00	8.330.750.000,00	139,07	3.486.890.000,00
	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	39.384.575.860,00	59.613.838.400,00	151,36	52.208.415.000,00
	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	445.024.930.085,00	631.530.663.000,00	141,91	353.764.894.000,00
	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	7.236.393.151,00	11.344.022.000,00	156,76	5.353.220.000,00
	BBNKB-Mobil Bus-Bus	498.081.088,00	748.098.000,00	150,20	232.143.000,00
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	40.642.520.610,00	60.100.537.500,00	147,88	41.179.533.200,00
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	11.632.624.543,00	17.042.944.000,00	146,51	11.863.486.000,00
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	10.963.634.861,00	16.649.015.000,00	151,86	10.469.145.000,00
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.937.491.957,00	2.419.640.000,00	124,89	2.420.440.000,00
	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	421.437.422.406,00	608.438.988.700,00	144,37	309.461.879.500,00
	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	271.656.506,00	157.710.000,00	58,05	0,00
III	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	400.000.000.000,00	564.730.129.155,00	141,18	411.061.253.416,00
	PBBKB-Bahan Bakar Solar	73.619.417.494,00	105.009.719.269,00	142,64	78.412.698.238,00
	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	326.380.582.506,00	459.720.409.886,00	140,85	332.648.555.178,00
IV	Pajak Air Permukaan	3.200.000.000,00	4.094.857.640,00	127,96	3.384.913.300,00
V	Pajak Rokok	354.877.734.289	325.474.672.374,00	91,71	334.886.047.725,00



**Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No.	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	53.416.681.500,00	15.312.465.038,00	28,63	14.348.341.509,00
I	Retribusi Pelayanan Kesehatan	140.500.000	200.045.000,00	142,38	4.817.071.200,00
1	Dinas Kesehatan	140.500.000	200.045.000,00	142,38	4.817.071.200,00
II	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.876.704.500	4.287.327.520,00	149,04	3.039.119.313,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.106.400.000	1.220.850.000,00	110,34	515.450.000,00
2	Dinas Kesehatan	41.100.000	54.656.050,00	132,98	97.779.268,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	503.600.000	1.250.989.000,00	248,41	767.832.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.600.000	3.600.000,00	100,00	0,00
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	503.600.000	770.340.000,00	152,97	612.775.000,00
6	Dinas Perhubungan	3.600.000	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	112.604.500	217.172.070,00	192,86	141.739.045,00
11	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	16.200.000	19.246.400,00	118,80	18.853.000,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.000.000	21.400.000,00	82,31	36.900.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43.200.000	52.200.000,00	120,83	43.800.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	76.100.000	76.100.000,00	100,00	74.100.000,00
15	Badan Penghubung	0	500.000,00	0,00	1.500.000,00
III	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000	77.150.000,00	154,30	56.750.000,00
1	Badan Penghubung	50.000.000	77.150.000,00	154,30	56.750.000,00
IV	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.269.402.000	4.281.423.000,00	9,46	1.486.731.000,00
1	Dinas Kebudayaan	1.468.732.000	2.515.998.000,00	171,30	1.439.200.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	43.800.000.000	1.764.755.000,00	4,03	21.205.000,00
3	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	670.000	670.000,00	100,00	26.326.000,00
V	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	799.075.000	1.063.262.943,00	133,06	1.026.555.346,00
1	Dinas Kesehatan	37.500.000	57.345.443,00	152,92	21.750.846,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	80.000.000	107.808.000,00	134,76	80.289.000,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	681.575.000	898.109.500,00	131,77	924.515.500,00
VI	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.000.000	1.500.000,00	25,00	3.000.000,00
1	Dinas Perhubungan	6.000.000	1.500.000,00	25,00	0,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	3.000.000,00
VII	Retribusi Izin Usaha Perikanan	275.000.000	291.979.000,00	106,17	614.893.000,00
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	614.893.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	275.000.000	291.979.000,00	106,17	0,00
VIII	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0	0,00	0,00	4.575.000,00
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	4.575.000,00
IX	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0	0,00	0,00	3.299.646.650,00
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	3.299.646.650,00
X	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.000.000.000	5.109.777.575,00	127,74	0,00
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.000.000.000	5.109.777.575,00	127,74	0,00

**Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Denda
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	51.005.620.430,00	54.888.819.874,81	107,61	24.364.636.912,50
I	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	529.844.530	1.208.006.636,81	227,99	2.303.307.072,50
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	529.844.530	1.208.006.636,81	227,99	2.303.307.072,50
II	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50.000.000.000	53.133.197.300,00	106,27	21.769.403.600,00
1	Badan Pendapatan Daerah	50.000.000.000	53.133.197.300,00	106,27	21.769.403.600,00
III	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	473.936.000	528.093.600,00	111,43	288.651.800,00
1	Badan Pendapatan Daerah	473.936.000	528.093.600,00	111,43	288.651.800,00
IV	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	55.000	220.440,00	400,80	164.640,00
1	Badan Pendapatan Daerah	55.000	220.440,00	400,80	164.640,00
V	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.520.000	3.440.000,00	226,32	2.524.500,00
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.520.000	3.440.000,00	226,32	2.488.500,00
2	Badan Pendapatan Daerah	0	0,00	0,00	36.000,00
VI	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	264.900	495.100,00	186,90	585.300,00
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	585.300,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	264.900	495.100,00	186,90	0,00
VII	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	15.366.798,00	0,00	0,00
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	15.366.798,00	0,00	0,00

**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No.	OPD	Anggaran					Realisasi				
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
	JUMLAH	2.002.593.764.620,00	1.393.304.098.830,00	10.025.000.000,00	1.068.846.413.720,00	-	1.810.511.643.506,00	1.228.357.329.714,16	10.018.140.000,00	899.427.001.808,41	-
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.034.212.288.768,00	304.065.419.813,00	-	104.862.990.000,00	-	891.425.479.093,00	327.555.016.988,43	-	103.151.331.047,00	-
2	Dinas Kesehatan	301.208.087.973,00	278.854.577.063,00	-	-	-	276.894.887.327,00	235.047.305.616,30	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.499.831.676,00	78.169.880.844,00	-	288.894.805.405,00	-	26.154.634.485,00	70.460.410.194,43	-	276.645.659.750,00	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	19.619.254.547,00	24.706.667.082,00	-	-	-	19.053.376.513,00	24.317.532.756,00	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.552.648.811,00	9.547.278.142,00	-	-	-	11.945.178.767,00	8.856.172.626,00	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	18.168.889.835,00	12.542.991.524,00	-	-	-	16.871.977.991,00	11.113.764.734,00	-	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	26.647.358.024,00	5.735.778.246,00	-	50.000.000,00	-	25.558.894.384,00	5.152.629.525,00	-	50.000.000,00	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	10.782.779.521,00	13.819.697.412,00	-	8.450.020.000,00	-	9.976.967.361,00	12.934.473.372,00	-	8.375.020.000,00	-
9	Dinas Perhubungan	16.555.575.000,00	16.473.081.679,00	-	3.190.000.000,00	-	15.994.132.603,00	13.033.074.287,00	-	2.965.000.000,00	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.424.182.325,00	66.504.959.192,00	-	5.035.000.000,00	-	12.354.689.809,00	57.855.708.923,00	-	5.033.738.008,41	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.142.384.786,00	8.269.320.338,00	25.000.000,00	50.000.000,00	-	11.632.298.785,00	7.622.458.455,00	25.000.000,00	50.000.000,00	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.401.576.350,00	5.459.823.088,00	-	-	-	11.637.860.158,00	4.956.637.288,00	-	-	-
13	Dinas Kebudayaan	20.785.203.099,00	78.805.595.126,00	-	32.979.100.000,00	-	19.928.381.586,00	72.814.848.630,00	-	32.818.100.000,00	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	9.390.526.983,00	10.026.596.396,00	-	465.902.090.756,00	-	8.311.851.434,00	7.630.890.318,00	-	311.989.653.356,00	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.971.643.714,00	5.211.768.541,00	-	1.125.000.000,00	-	18.598.034.336,00	4.585.136.901,00	-	1.125.000.000,00	-
16	Dinas Pariwisata	10.206.695.140,00	3.958.823.616,00	-	-	-	9.906.254.661,00	3.732.761.416,00	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.621.390.031,00	32.361.753.980,00	10.000.000.000,00	7.521.000.000,00	-	40.261.276.963,00	30.327.077.377,00	9.993.140.000,00	7.261.000.000,00	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	33.433.334.021,00	27.250.180.469,00	-	-	-	32.354.814.295,00	13.159.057.896,00	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.195.749.219,00	12.549.547.160,00	-	631.000.000,00	-	13.773.879.050,00	10.388.983.424,00	-	630.940.000,00	-
20	Sekretariat DPRD	68.043.883.441,00	143.871.938.466,00	-	-	-	66.376.055.384,00	93.865.996.497,00	-	-	-
21	Sekretariat Daerah	66.377.585.179,00	131.414.459.697,00	-	49.588.990.000,00	-	63.058.011.944,00	112.984.618.130,00	-	48.829.826.448,00	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.404.579.548,00	10.553.840.916,00	-	-	-	11.687.080.929,00	7.249.801.374,00	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.888.634.750,00	13.864.614.558,00	-	-	-	17.613.617.988,00	9.950.429.450,00	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	120.088.284.223,00	39.406.879.586,00	-	-	-	116.114.347.228,00	34.711.005.478,00	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.691.146.335,00	23.895.243.488,00	-	-	-	24.423.315.157,00	18.894.589.773,00	-	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.094.762.846,00	11.483.342.428,00	-	-	-	8.451.555.036,00	10.823.072.024,00	-	-	-
27	Badan Penghubung	2.857.809.812,00	5.517.248.254,00	-	-	-	2.539.168.504,00	4.921.510.689,00	-	-	-
28	Inspektorat	20.296.862.514,00	14.468.765.178,00	-	-	-	19.695.014.242,00	9.823.315.561,00	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.030.816.149,00	4.514.026.548,00	-	100.566.417.559,00	-	7.918.607.493,00	3.589.050.011,00	-	100.501.733.199,00	-

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023

Lampiran 5

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
JUMLAH		2.002.593.764.620,00	1.810.511.643.506,00	90,41	1.740.899.431.377,08
I	Belanja Gaji Pokok ASN	665.871.699.212,00	572.040.301.549,00	85,91	567.421.373.461,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	435.085.710.343,00	347.683.397.965,00	79,91	341.306.439.824,00
2	Dinas Kesehatan	66.683.056.572,00	65.700.010.480,00	98,53	57.013.819.850,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.999.135.640,00	8.356.743.673,00	92,86	8.845.760.400,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.135.598.995,00	6.017.037.195,00	98,07	6.168.855.181,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.954.900.272,00	3.719.050.792,00	94,04	3.943.646.835,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.726.975.472,00	5.520.863.641,00	96,40	5.868.186.468,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	7.351.918.573,00	7.217.309.660,00	98,17	7.414.676.498,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.090.253.143,00	2.854.562.527,00	92,37	3.160.324.138,00
9	Dinas Perhubungan	5.127.079.441,00	5.017.433.776,00	97,86	4.867.244.884,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.515.077.499,00	3.509.525.183,00	99,84	3.942.783.037,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.982.384.823,00	3.495.982.524,00	87,79	3.825.146.950,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.990.793.128,00	3.619.654.573,00	90,70	3.852.295.740,00
13	Dinas Kebudayaan	6.691.575.315,00	6.470.335.618,00	96,69	6.989.402.964,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.000.000.000,00	2.434.396.840,00	81,15	2.881.033.016,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.905.130.476,00	5.829.434.384,00	98,72	5.974.145.025,00
16	Dinas Pariwisata	3.061.816.144,00	2.999.157.943,00	97,95	3.241.280.413,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.978.105.994,00	12.920.830.856,00	99,56	14.105.409.821,00
18	Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup	10.398.353.893,00	10.398.353.893,00	100,00	11.083.660.560,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.276.625.990,00	4.244.047.725,00	99,24	4.717.638.830,00
20	Sekretariat DPRD	2.987.011.333,00	2.800.653.721,00	93,76	2.892.825.233,00
21	Sekretariat Daerah	16.232.971.545,00	15.712.613.437,00	96,79	17.045.953.784,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.502.300.600,00	3.322.120.538,00	94,86	3.745.657.087,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.688.882.037,00	5.654.664.606,00	99,40	5.943.070.654,00
24	Badan Pendapatan Daerah	19.595.712.817,00	19.113.415.800,00	97,54	20.529.241.868,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.832.963.790,00	6.815.675.653,00	99,75	6.770.555.193,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.680.503.954,00	2.415.153.037,00	90,10	2.654.725.396,00
27	Badan Penghubung	923.897.485,00	800.924.500,00	86,69	859.176.664,00
28	Inspektorat	5.096.554.038,00	5.036.164.976,00	98,82	5.173.982.212,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.376.380.300,00	2.360.786.033,00	99,34	2.604.434.936,00
II	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	58.970.366.648,00	52.426.649.462,00	88,90	52.002.487.461,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	37.667.472.794,00	32.043.767.335,00	85,07	31.364.336.574,00
2	Dinas Kesehatan	5.975.309.909,00	5.751.272.971,00	96,25	5.026.582.107,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	948.018.720,00	874.414.938,00	92,24	929.742.360,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	628.796.256,00	617.268.814,00	98,17	631.621.700,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	429.090.025,00	401.395.587,00	93,55	431.561.663,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	443.584.941,00	430.169.216,00	96,98	446.264.568,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	722.888.950,00	671.477.808,00	92,89	693.799.189,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	305.766.460,00	280.871.224,00	91,86	298.201.969,00
9	Dinas Perhubungan	493.542.502,00	473.113.690,00	95,86	490.150.074,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	320.521.712,00	319.405.012,00	99,65	355.751.382,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	367.362.114,00	327.173.374,00	89,06	355.385.998,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	329.557.522,00	299.680.846,00	90,93	341.441.130,00
13	Dinas Kebudayaan	625.770.131,00	606.042.520,00	96,85	621.928.224,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	290.000.000,00	222.068.848,00	76,58	281.015.446,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	509.190.196,00	498.833.692,00	97,97	526.413.456,00
16	Dinas Pariwisata	258.585.731,00	255.717.998,00	98,89	276.926.800,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.139.602.101,00	1.121.555.807,00	98,42	1.193.281.256,00
18	Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.000.034.120,00	995.904.500,00	99,59	1.084.811.138,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	376.646.288,00	369.254.068,00	98,04	396.932.980,00
20	Sekretariat DPRD	299.773.780,00	267.671.842,00	89,29	277.082.770,00
21	Sekretariat Daerah	1.484.338.624,00	1.450.312.034,00	97,71	1.562.182.703,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	349.943.552,00	314.419.136,00	89,85	346.228.502,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	488.085.136,00	475.624.838,00	97,45	498.710.748,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.893.652.916,00	1.837.984.822,00	97,06	1.981.604.861,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	636.396.076,00	630.694.772,00	99,10	590.043.090,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	218.781.930,00	195.436.476,00	89,33	232.054.566,00
27	Badan Penghubung	77.659.536,00	62.140.940,00	80,02	73.403.516,00
28	Inspektorat	531.522.972,00	479.886.536,00	90,29	516.559.392,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	158.471.654,00	153.089.818,00	96,60	178.469.299,00
III	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.383.739.256,00	7.091.155.762,00	96,04	7.035.194.950,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	244.470.000,00	227.920.000,00	93,23	231.700.000,00
2	Dinas Kesehatan	798.246.250,00	770.400.000,00	96,51	737.530.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	385.710.000,00	352.700.000,00	91,44	351.620.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	210.380.000,00	210.380.000,00	100,00	208.220.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	169.940.000,00	146.160.000,00	86,01	160.020.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	227.020.000,00	211.900.000,00	93,34	216.045.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	263.156.500,00	255.820.000,00	97,21	255.100.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	158.900.000,00	157.820.000,00	99,32	158.900.000,00
9	Dinas Perhubungan	362.415.000,00	350.415.000,00	96,69	353.640.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	154.103.750,00	153.860.000,00	99,84	156.380.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	218.810.000,00	195.180.000,00	89,28	181.440.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57.948.744,00	47.340.000,00	81,69	53.550.000,00
13	Dinas Kebudayaan	246.676.250,00	228.200.000,00	92,51	249.920.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	141.260.000,00	134.960.000,00	95,54	141.260.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	282.220.000,00	270.815.000,00	95,96	291.720.000,00
16	Dinas Pariwisata	144.141.500,00	142.520.000,00	98,88	133.700.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	314.060.000,00	312.980.000,00	99,66	274.270.000,00
18	Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup	378.080.762,00	378.080.762,00	100,00	388.105.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	210.200.000,00	203.980.000,00	97,04	206.500.000,00
20	Sekretariat DPRD	120.630.000,00	103.460.000,00	85,77	105.980.000,00
21	Sekretariat Daerah	725.400.500,00	712.880.000,00	98,27	711.114.950,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	142.160.000,00	142.160.000,00	100,00	132.440.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	205.380.000,00	200.700.000,00	97,72	178.920.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	496.580.000,00	473.020.000,00	95,26	454.300.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	234.220.000,00	232.960.000,00	99,46	227.920.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	148.830.000,00	138.740.000,00	93,22	129.920.000,00
27	Badan Penghubung	47.880.000,00	46.985.000,00	98,13	47.340.000,00
28	Inspektorat	156.380.000,00	156.380.000,00	100,00	158.900.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	138.740.000,00	132.440.000,00	95,46	138.740.000,00

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
IV	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.863.195.918,00	47.985.004.480,00	90,77	43.865.405.280,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	33.873.837.400,00	30.632.829.520,00	90,43	27.482.145.690,00
2	Dinas Kesehatan	8.477.603.550,00	7.478.240.000,00	88,21	6.174.234.080,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	156.540.000,00	145.920.000,00	93,22	135.500.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	695.062.000,00	676.967.000,00	97,40	695.048.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	189.849.900,00	123.430.900,00	65,01	123.460.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	177.380.000,00	146.000.000,00	82,31	165.734.950,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	982.236.000,00	928.330.000,00	94,51	906.274.600,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	220.920.000,00	178.920.000,00	80,99	221.664.850,00
9	Dinas Perhubungan	65.329.950,00	53.329.950,00	81,63	63.635.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	315.924.910,00	313.274.910,00	99,16	339.808.650,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	227.065.000,00	173.914.000,00	76,59	242.396.350,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	391.099.148,00	358.060.000,00	91,55	401.829.950,00
13	Dinas Kebudayaan	223.825.000,00	211.700.000,00	94,58	235.685.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	184.520.000,00	146.280.000,00	79,28	179.120.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	212.590.000,00	212.590.000,00	100,00	236.240.000,00
16	Dinas Pariwisata	107.257.000,00	102.880.000,00	95,92	112.870.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.078.530.000,00	1.068.670.000,00	99,09	1.096.364.050,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	870.833.920,00	870.833.920,00	100,00	900.002.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	285.820.000,00	281.800.000,00	98,59	340.340.000,00
20	Sekretariat DPRD	131.554.940,00	106.154.940,00	80,69	81.980.000,00
21	Sekretariat Daerah	1.502.423.200,00	1.466.754.550,00	97,63	1.450.944.430,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	401.608.000,00	346.844.000,00	86,36	328.635.620,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	87.680.000,00	75.440.000,00	86,04	77.064.950,00
24	Badan Pendapatan Daerah	83.580.000,00	72.580.000,00	86,84	80.760.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	810.398.000,00	789.355.840,00	97,40	750.122.160,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	211.968.000,00	173.200.000,00	81,71	203.754.950,00
27	Inspektorat	761.120.000,00	720.554.950,00	94,67	691.590.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	136.640.000,00	130.150.000,00	95,25	148.200.000,00
V	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.383.461.023,00	7.386.755.000,00	88,11	9.173.105.000,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.715.900.000,00	2.145.700.000,00	79,01	3.226.080.000,00
2	Dinas Kesehatan	707.850.532,00	699.350.000,00	98,80	887.205.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	326.800.000,00	303.470.000,00	92,86	337.100.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	63.510.000,00	59.485.000,00	93,66	66.250.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	142.045.000,00	129.520.000,00	91,18	142.740.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	182.155.000,00	179.210.000,00	98,38	190.775.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	174.020.000,00	118.660.000,00	68,19	137.645.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	88.910.000,00	86.135.000,00	96,88	94.540.000,00
9	Dinas Perhubungan	161.885.750,00	152.810.000,00	94,39	141.880.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	90.560.000,00	90.560.000,00	100,00	104.315.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	113.095.000,00	96.070.000,00	84,95	108.670.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	103.302.990,00	94.365.000,00	91,35	94.550.000,00
13	Dinas Kebudayaan	202.698.750,00	197.280.000,00	97,33	218.145.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	87.850.000,00	74.670.000,00	85,00	85.915.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	186.280.000,00	183.990.000,00	98,77	185.715.000,00
16	Dinas Pariwisata	97.051.001,00	96.055.000,00	98,97	108.235.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	333.165.000,00	330.115.000,00	99,08	418.650.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	285.274.000,00	237.015.000,00	83,08	262.710.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.950.000,00	105.255.000,00	94,87	115.805.000,00
20	Sekretariat DPRD	131.365.000,00	111.540.000,00	84,91	121.900.000,00
21	Sekretariat Daerah	394.043.000,00	386.385.000,00	98,06	453.150.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92.105.000,00	82.180.000,00	89,22	99.450.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	238.020.000,00	232.095.000,00	97,51	256.030.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	937.860.000,00	803.410.000,00	85,66	888.325.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	171.820.000,00	169.105.000,00	98,42	183.505.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	70.120.000,00	61.675.000,00	87,96	68.420.000,00
27	Badan Penghubung	39.535.000,00	30.500.000,00	77,15	33.890.000,00
28	Inspektorat	70.720.000,00	65.735.000,00	92,95	69.220.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.570.000,00	64.415.000,00	99,76	72.290.000,00
VI	Belanja Tunjangan Beras ASN	33.912.777.032,00	30.044.307.843,00	88,59	29.384.383.389,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	21.640.534.266,00	18.191.541.391,00	84,06	17.369.719.304,00
2	Dinas Kesehatan	3.793.614.482,00	3.750.052.440,00	98,85	3.262.303.740,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	518.130.400,00	477.899.580,00	92,24	512.443.920,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	321.968.820,00	314.375.220,00	97,64	327.845.340,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	235.377.080,00	215.304.660,00	91,47	234.061.440,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	256.837.530,00	249.342.060,00	97,08	263.391.540,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	404.859.840,00	373.107.740,00	92,16	382.377.573,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	165.696.960,00	154.182.180,00	93,05	168.948.618,00
9	Dinas Perhubungan	271.987.800,00	259.191.180,00	95,30	267.881.580,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	184.520.730,00	183.874.380,00	99,65	201.689.700,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	211.347.630,00	179.022.240,00	84,71	196.475.460,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	183.131.942,00	166.203.900,00	90,76	188.219.580,00
13	Dinas Kebudayaan	354.758.425,00	339.939.480,00	95,82	354.858.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	158.200.000,00	126.228.060,00	79,79	154.978.800,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	290.430.110,00	285.407.220,00	98,27	298.949.760,00
16	Dinas Pariwisata	154.269.083,00	152.154.420,00	98,63	165.841.800,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	649.317.344,00	637.223.204,00	98,14	677.198.694,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	509.185.020,00	509.185.020,00	100,00	603.258.600,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	205.919.658,00	194.592.540,00	94,50	210.524.940,00
20	Sekretariat DPRD	181.350.280,00	158.672.220,00	87,49	168.955.860,00
21	Sekretariat Daerah	819.765.432,00	800.023.740,00	97,59	872.733.420,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	191.967.360,00	174.894.300,00	91,11	201.327.600,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	282.082.100,00	276.571.980,00	98,05	288.738.540,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.023.149.760,00	1.012.866.120,00	98,99	1.104.961.180,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	358.188.480,00	356.958.180,00	99,66	346.819.380,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	130.000.000,00	107.181.600,00	82,45	123.910.620,00
27	Badan Penghubung	49.014.080,00	40.482.780,00	82,59	46.710.900,00
28	Inspektorat	271.722.860,00	265.636.560,00	97,76	285.262.380,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95.449.560,00	92.193.448,00	96,59	103.995.120,00
VII	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.659.510.523,00	3.725.052.169,00	79,95	3.932.799.374,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.983.690.745,00	2.189.816.688,00	73,39	2.351.845.141,00
2	Dinas Kesehatan	375.738.396,00	363.920.313,00	96,85	346.113.585,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	47.982.332,00	36.322.686,00	75,70	40.119.607,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	41.755.182,00	39.535.807,00	94,68	38.738.734,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.111.914,00	17.484.392,00	75,65	19.331.299,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	38.918.320,00	37.431.522,00	96,18	39.880.328,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	78.400.000,00	69.250.814,00	88,33	74.543.167,00

1

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	25.688.794,00	23.536.904,00	91,62	26.755.734,00
9	Dinas Perhubungan	37.201.385,00	34.381.043,00	92,42	33.052.368,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	23.144.957,00	22.506.377,00	97,24	28.042.896,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	40.338.356,00	30.060.089,00	74,52	32.903.495,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.578.204,00	35.698.179,00	78,32	39.017.015,00
13	Dinas Kebudayaan	43.786.540,00	39.983.735,00	91,32	42.023.884,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	23.480.000,00	18.721.186,00	79,73	22.415.968,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	45.940.649,00	44.476.154,00	96,81	47.545.135,00
16	Dinas Pariwisata	23.872.854,00	23.452.840,00	98,24	23.555.263,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	101.675.588,00	96.806.635,00	95,21	108.319.158,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	89.651.946,00	71.045.823,00	79,25	72.392.459,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47.280.000,00	43.539.287,00	92,09	49.870.646,00
20	Sekretariat DPRD	17.011.132,00	14.553.008,00	85,55	11.501.440,00
21	Sekretariat Daerah	158.853.156,00	155.867.145,00	98,12	159.935.503,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.083.855,00	29.732.713,00	84,75	30.165.893,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	33.960.107,00	32.250.892,00	94,97	33.889.687,00
24	Badan Pendapatan Daerah	93.788.703,00	89.149.190,00	95,05	90.759.799,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.097.950,00	65.802.507,00	98,07	64.258.706,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	35.812.400,00	26.152.477,00	73,03	28.855.930,00
27	Badan Penghubung	4.016.166,00	2.231.092,00	55,55	3.158.121,00
28	Inspektorat	56.426.593,00	51.542.746,00	91,34	49.502.394,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.224.299,00	19.799.925,00	97,90	24.306.059,00
VIII	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.042.791,00	7.478.253,00	37,31	7.628.770,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.511.656,00	4.404.494,00	79,91	4.531.759,00
2	Dinas Kesehatan	12.074.735,00	1.024.241,00	8,48	873.773,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	118.795,00	109.388,00	92,08	116.243,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	135.762,00	83.368,00	61,41	80.417,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71.708,00	41.210,00	57,47	48.514,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	63.312,00	63.293,00	99,97	66.349,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	107.863,00	96.283,00	89,26	101.350,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	39.388,00	37.182,00	94,40	41.050,00
9	Dinas Perhubungan	73.904,00	70.858,00	95,88	64.506,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	50.459,00	49.317,00	97,74	60.004,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	81.697,00	41.015,00	50,20	47.797,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.268,00	45.336,00	88,43	47.073,00
13	Dinas Kebudayaan	89.045,00	81.970,00	92,05	85.148,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	56.000,00	32.594,00	58,20	39.010,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	81.096,00	75.635,00	93,27	75.394,00
16	Dinas Pariwisata	53.123,00	39.279,00	73,94	43.849,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	189.685,00	173.368,00	91,40	197.285,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.649,00	130.375,00	98,29	142.817,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83.552,00	46.489,00	55,64	58.922,00
20	Sekretariat DPRD	61.264,00	31.734,00	51,80	32.766,00
21	Sekretariat Daerah	215.045,00	209.980,00	97,64	225.521,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.644,00	45.104,00	81,06	52.359,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	80.289,00	77.797,00	96,90	79.617,00
24	Badan Pendapatan Daerah	232.040,00	225.344,00	97,11	259.491,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	156.541,00	103.377,00	66,04	105.107,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	40.390,00	34.204,00	84,68	38.298,00
27	Badan Penghubung	13.652,00	9.642,00	70,63	12.209,00
28	Inspektorat	95.773,00	69.256,00	72,31	69.976,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.456,00	26.120,00	98,73	32.166,00
IX	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	52.803.434.732,00	48.265.100.385,00	91,41	46.079.119.406,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	31.126.115.196,00	28.209.457.135,00	90,63	26.192.493.188,00
2	Dinas Kesehatan	6.308.299.551,00	5.810.616.603,00	92,11	4.964.027.191,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	780.585.498,00	754.430.091,00	96,65	761.559.485,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	619.444.774,00	558.948.283,00	90,23	565.782.982,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	356.903.769,00	342.763.451,00	96,04	348.603.877,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	529.701.846,00	488.808.887,00	92,28	506.862.837,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	711.211.008,00	682.876.178,00	96,02	690.763.542,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	274.805.857,00	265.467.532,00	96,60	290.568.940,00
9	Dinas Perhubungan	490.940.906,00	451.827.543,00	92,03	433.580.976,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	324.996.937,00	324.861.436,00	99,96	375.324.272,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	368.482.906,00	321.956.076,00	87,37	345.458.429,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	344.363.352,00	318.545.171,00	92,50	341.534.566,00
13	Dinas Kebudayaan	619.605.007,00	590.634.199,00	95,32	624.388.343,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	288.000.000,00	222.343.958,00	77,20	256.376.371,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	543.119.836,00	527.516.622,00	97,13	531.901.902,00
16	Dinas Pariwisata	283.468.098,00	275.927.873,00	97,34	275.886.943,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.156.002.459,00	1.141.383.621,00	98,74	1.248.189.301,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	993.650.641,00	965.503.301,00	97,17	1.017.682.662,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	433.436.092,00	380.189.880,00	87,72	418.597.862,00
20	Sekretariat DPRD	299.160.384,00	257.061.959,00	85,93	265.719.227,00
21	Sekretariat Daerah	1.472.689.245,00	1.469.998.421,00	99,82	1.559.071.368,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	415.629.434,00	310.001.984,00	74,59	344.233.722,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	497.819.887,00	490.998.068,00	98,63	549.292.810,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.830.834.992,00	1.453.654.945,00	79,40	1.454.843.942,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	672.436.140,00	659.899.854,00	98,14	630.349.110,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	258.340.000,00	220.485.581,00	85,35	238.844.192,00
27	Badan Penghubung	87.634.316,00	72.532.178,00	82,77	76.551.375,00
28	Inspektorat	501.037.960,00	485.597.228,00	96,92	540.287.392,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	214.718.641,00	210.812.347,00	98,18	230.342.629,00
X	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.301.206.311,00	1.180.243.606,00	90,70	1.164.492.829,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	767.633.926,00	719.197.276,00	93,69	699.513.617,00
2	Dinas Kesehatan	143.610.574,00	135.887.750,00	94,62	117.079.551,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.292.920,00	17.126.899,00	99,04	18.111.748,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	13.580.448,00	12.304.403,00	90,60	12.675.022,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.410.873,00	7.622.561,00	90,63	8.099.007,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	11.789.914,00	11.295.244,00	95,80	12.025.407,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	16.008.480,00	14.870.777,00	92,89	15.201.665,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.336.954,00	5.814.971,00	91,76	7.563.297,00
9	Dinas Perhubungan	12.018.006,00	10.310.117,00	85,79	9.986.709,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.270.219,00	7.212.210,00	99,20	8.098.517,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.101.249,00	7.130.713,00	88,02	7.837.349,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.683.336,00	7.421.250,00	96,59	7.910.059,00
13	Dinas Kebudayaan	14.181.736,00	13.190.722,00	93,01	14.362.406,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	7.200.000,00	4.992.663,00	69,34	5.921.318,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.317.410,00	11.948.701,00	83,46	12.261.546,00
16	Dinas Pariwisata	6.296.481,00	6.146.100,00	97,61	6.661.474,00

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.173.751,00	26.549.478,00	94,23	28.917.589,00
18	Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup	44.277.213,00	21.250.223,00	47,99	22.701.254,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.703.240,00	8.641.102,00	80,73	9.653.472,00
20	Sekretariat DPRD	12.181.142,00	5.743.869,00	47,15	5.950.461,00
21	Sekretariat Daerah	33.600.904,00	32.223.629,00	95,90	34.939.939,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.716.839,00	6.828.394,00	63,72	7.696.348,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.739.723,00	11.619.520,00	91,21	12.209.291,00
24	Badan Pendapatan Daerah	47.029.212,00	39.113.984,00	83,17	42.118.949,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.225.345,00	14.040.227,00	92,22	13.869.311,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.208.052,00	4.964.405,00	68,87	5.441.068,00
27	Badan Penghubung	1.896.331,00	1.610.552,00	84,93	1.770.453,00
28	Inspektorat	10.819.621,00	10.342.480,00	95,59	10.579.479,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.902.412,00	4.843.386,00	98,80	5.336.523,00
XI	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.712.114.602,00	3.540.716.101,00	95,38	3.489.183.774,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.233.522.118,00	2.157.568.183,00	96,60	2.098.529.595,00
2	Dinas Kesehatan	415.556.881,00	407.666.679,00	98,10	351.240.080,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	51.878.860,00	51.380.904,00	99,04	54.335.714,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	38.741.920,00	36.913.722,00	95,28	38.025.311,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.832.637,00	22.867.709,00	85,22	24.297.157,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	35.369.896,00	33.885.885,00	95,80	36.076.212,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	48.057.678,00	44.612.437,00	92,83	45.605.132,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	19.010.882,00	17.444.923,00	91,76	18.399.788,00
9	Dinas Perhubungan	33.412.737,00	30.930.629,00	92,57	29.960.464,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	21.806.828,00	21.636.583,00	99,22	24.295.608,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.340.517,00	21.392.333,00	87,89	23.512.036,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.050.392,00	22.263.925,00	96,59	23.730.344,00
13	Dinas Kebudayaan	41.733.220,00	39.572.226,00	94,82	43.087.316,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	20.400.000,00	14.978.067,00	73,42	17.764.034,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	38.804.210,00	35.846.301,00	92,38	36.784.935,00
16	Dinas Pariwisata	18.889.628,00	18.438.488,00	97,61	19.984.462,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	81.521.451,00	79.648.368,00	97,70	86.753.090,00
18	Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup	64.819.314,00	63.750.938,00	98,35	68.104.112,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.892.680,00	25.923.452,00	92,94	28.960.476,00
20	Sekretariat DPRD	24.043.500,00	17.231.739,00	71,67	17.851.452,00
21	Sekretariat Daerah	99.747.802,00	96.671.121,00	96,92	104.819.994,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.550.590,00	20.485.290,00	80,18	23.089.280,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.919.558,00	34.858.906,00	94,42	36.628.375,00
24	Badan Pendapatan Daerah	141.089.172,00	117.343.127,00	83,17	126.357.464,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.468.714,00	42.121.105,00	94,72	41.608.206,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	18.812.444,00	14.893.385,00	80,02	16.323.436,00
27	Badan Penghubung	5.385.063,00	4.831.723,00	89,72	5.311.372,00
28	Inspektorat	35.948.574,00	31.027.699,00	86,31	31.738.699,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.707.336,00	14.530.254,00	98,80	16.009.630,00
XII	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.128.770.480,00	7.835,00	0,00	0,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.026.076.235,00	7.835,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	322.075.782,00	0,00	0,00	0,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	86.511.138,00	0,00	0,00	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.887.140,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	325.034.165,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	105.752.256,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	22.817.452,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	28.316.011,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.640.375,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.999.952,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kebudayaan	19.440.172,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	16.425.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.323.435,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata	18.432.632,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	34.737.495,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup	61.862.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.096.974,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat Daerah	121.716.038,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.672.017,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Pendapatan Daerah	714.883.759,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.679.504,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Penghubung	5.190.948,00	0,00	0,00	0,00
XIII	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	442.018.856.998,00	430.867.431.815,00	97,48	209.146.860.644,85
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	177.304.124.890,00	173.942.020.706,00	98,10	63.840.411.876,85
2	Dinas Kesehatan	75.209.825.097,00	73.801.398.391,00	98,13	30.860.201.021,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.859.148.590,00	8.733.180.640,00	98,58	5.220.274.201,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.845.190.606,00	6.687.825.301,00	97,70	4.093.285.529,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.290.606.835,00	4.192.302.008,00	97,71	2.632.028.886,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	6.284.266.047,00	5.907.218.768,00	94,00	3.844.633.484,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	10.113.268.256,00	9.760.324.606,00	96,51	5.704.605.069,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.869.094.044,00	3.570.473.548,00	92,28	2.440.782.359,00
9	Dinas Perhubungan	5.746.280.613,00	5.556.786.826,00	96,70	3.462.933.102,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.507.735.614,00	4.499.297.504,00	99,81	3.057.306.602,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.659.757.540,00	4.146.437.795,00	88,98	2.752.585.731,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.096.443.754,00	3.961.405.967,00	96,70	2.743.503.941,00
13	Dinas Kebudayaan	7.263.885.833,00	7.010.608.815,00	96,51	4.583.729.045,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.006.764.702,00	2.933.160.449,00	97,55	2.125.194.409,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.759.698.970,00	6.617.866.076,00	97,90	4.200.933.551,00
16	Dinas Pariwisata	3.762.856.515,00	3.674.452.310,00	97,65	2.323.826.328,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.676.263.092,00	14.595.937.582,00	99,45	8.912.393.416,00
18	Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup	12.279.589.564,00	11.857.144.595,00	96,56	7.440.507.251,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.920.083.377,00	4.785.160.947,00	97,26	3.388.495.066,00
20	Sekretariat DPRD	3.221.492.976,00	3.076.063.299,00	95,49	2.006.783.060,00
21	Sekretariat Daerah	20.454.430.356,00	20.075.384.224,00	98,15	13.782.826.567,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.495.594.412,00	4.324.164.151,00	96,19	2.958.842.582,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.169.759.432,00	6.057.734.937,00	98,18	4.189.259.421,00
24	Badan Pendapatan Daerah	19.062.357.795,00	17.460.019.607,00	91,59	7.379.024.112,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.549.702.375,00	9.485.373.237,00	99,33	5.270.476.406,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.193.422.494,00	3.056.056.263,00	95,70	2.065.942.292,00
27	Badan Penghubung	918.062.429,00	840.387.173,00	91,54	546.877.240,00
28	Inspektorat	7.660.379.581,00	7.443.718.408,00	97,17	5.372.615.821,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.838.771.209,00	2.815.527.682,00	99,18	1.946.582.276,00

1

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
XIV	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	121.647.250,00	121.647.250,00	100,00	1.556.967.000,00
1	Badan Penghubung	121.647.250,00	121.647.250,00	100,00	1.556.967.000,00
XV	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	46.000.883.002,00	44.303.669.753,00	96,31	475.368.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	14.381.584.314,00	13.857.403.634,00	96,36	0,00
2	Dinas Kesehatan	5.575.505.016,00	5.469.654.277,00	98,10	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.324.760.776,00	1.263.557.576,00	95,38	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	630.437.047,00	626.192.509,00	99,33	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	686.913.073,00	673.004.503,00	97,98	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.039.991.848,00	963.557.947,00	92,65	0,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	876.367.080,00	814.424.613,00	92,93	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	572.513.869,00	567.182.835,00	99,07	0,00
9	Dinas Perhubungan	1.005.127.755,00	985.257.371,00	98,02	0,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	702.379.684,00	701.745.077,00	99,91	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	663.211.695,00	639.294.012,00	96,39	0,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	754.727.662,00	726.508.344,00	96,26	0,00
13	Dinas Kebudayaan	1.028.625.818,00	989.730.461,00	96,22	0,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	647.933.801,00	554.140.720,00	85,52	0,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.008.470.410,00	985.450.397,00	97,72	0,00
16	Dinas Pariwisata	581.406.066,00	504.823.285,00	86,83	0,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.384.923.517,00	1.382.547.409,00	99,83	0,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.452.528.092,00	1.355.414.185,00	93,31	0,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	801.802.138,00	775.328.481,00	96,70	0,00
20	Sekretariat DPRD	522.719.217,00	489.032.673,00	93,56	0,00
21	Sekretariat Daerah	4.293.360.468,00	4.254.832.176,00	99,10	475.388.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	517.543.429,00	510.530.496,00	98,64	0,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	910.413.711,00	899.931.926,00	97,75	0,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.888.497.572,00	1.668.676.976,00	88,36	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	843.739.975,00	842.011.766,00	99,80	0,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	498.919.129,00	483.887.146,00	96,99	0,00
27	Badan Penghubung	136.127.310,00	128.348.897,00	94,29	0,00
28	Inspektorat	769.543.682,00	713.668.942,00	92,74	0,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	500.808.848,00	487.531.119,00	97,35	0,00
XVI	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	129.441.021.134,00	124.001.292.673,00	95,80	314.952.509.327,20
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	30.555.100.140,00	27.293.808.791,00	89,33	96.979.375.824,27
2	Dinas Kesehatan	19.211.045.006,00	19.137.749.831,00	99,62	46.290.301.945,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.869.397.572,00	3.788.698.337,00	97,91	7.830.405.075,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3.228.201.599,00	3.160.244.891,00	97,89	6.139.928.300,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.952.808.585,00	1.919.080.994,00	98,27	3.948.043.322,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.808.181.544,00	2.648.326.528,00	94,31	5.766.950.244,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.620.390.540,00	4.462.318.468,00	96,58	8.556.907.604,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.887.085.718,00	1.771.993.535,00	93,90	3.661.173.524,00
9	Dinas Perhubungan	2.633.453.240,00	2.568.549.620,00	97,54	5.194.399.665,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.143.739.026,00	2.140.281.820,00	99,84	4.585.959.903,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.158.350.884,00	1.958.569.614,00	90,74	4.128.878.583,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.920.094.956,00	1.865.917.667,00	97,18	4.115.255.912,00
13	Dinas Kebudayaan	3.233.576.345,00	3.123.461.840,00	96,59	6.875.590.493,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1.411.907.480,00	1.364.328.049,00	96,63	3.187.791.621,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.122.021.916,00	3.047.759.154,00	97,62	6.301.400.308,00
16	Dinas Pariwisata	1.631.899.284,00	1.621.589.125,00	99,37	3.499.247.708,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.455.522.554,00	6.424.380.635,00	99,52	13.368.590.118,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.839.140.887,00	4.533.961.760,00	93,69	11.160.760.885,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.390.709.630,00	2.323.495.079,00	97,19	5.082.842.496,00
20	Sekretariat DPRD	1.305.594.962,00	1.301.731.830,00	99,70	3.010.175.795,00
21	Sekretariat Daerah	10.489.673.642,00	10.338.436.216,00	98,56	20.673.671.932,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.138.140.833,00	2.068.599.843,00	96,75	4.438.263.875,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.639.600.753,00	2.611.634.518,00	98,94	6.283.889.142,00
24	Badan Pendapatan Daerah	876.260.000,00	812.046.828,00	92,67	11.068.963.994,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.276.723.445,00	4.246.938.639,00	99,30	7.905.714.601,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.558.344.053,00	1.518.390.462,00	97,44	3.098.913.439,00
27	Badan Penghubung	382.650.246,00	359.336.777,00	93,91	820.315.862,00
28	Inspektorat	4.300.700.860,00	4.193.074.461,00	97,50	8.058.923.736,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.400.705.434,00	1.396.587.361,00	99,71	2.919.873.414,00
XVII	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	70.978.415.485,00	70.978.415.485,00	100,00	55.065.332.505,00
1	Badan Pendapatan Daerah	70.978.415.485,00	70.978.415.485,00	100,00	55.065.332.505,00
XVIII	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	258.135.512,00	177.900.000,00	68,92	130.500.000,00
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	133.200.000,00	99.900.000,00	75,00	10.500.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	120.000.000,00
3	Dinas Kebudayaan	46.935.512,00	0,00	0,00	0,00
XIX	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	235.000.294.745,00	208.467.138.140,00	88,71	191.162.724.790,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	235.000.294.745,00	208.467.138.140,00	88,71	191.162.724.790,00
XX	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.380.500.000,00	2.543.250.000,00	47,27	1.654.500.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.380.500.000,00	2.543.250.000,00	47,27	1.654.500.000,00
XXI	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	17.822.023.640,00	1.507.173.981,00	8,46	8.704.773.850,00
1	Dinas Kesehatan	17.822.023.640,00	1.507.173.981,00	8,46	8.704.773.850,00
XXII	Belanja Honorarium	4.841.190.000,00	2.894.940.000,00	59,80	5.601.205.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.538.610.000,00	896.650.000,00	58,28	1.892.825.000,00
2	Dinas Kesehatan	241.895.000,00	130.810.000,00	54,12	389.200.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	254.550.000,00	101.225.000,00	39,77	218.680.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	41.940.000,00	25.315.000,00	60,36	59.400.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.900.000,00	24.650.000,00	58,83	72.600.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	54.020.000,00	30.605.000,00	56,65	90.920.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	31.515.000,00	31.515.000,00	100,00	86.350.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	56.940.000,00	32.025.000,00	56,24	81.550.000,00
9	Dinas Perhubungan	86.510.000,00	49.725.000,00	57,48	86.100.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	83.550.000,00	49.800.000,00	59,61	85.750.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	87.215.000,00	40.075.000,00	45,95	77.150.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.750.000,00	36.750.000,00	100,00	68.550.000,00

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
13	Dinas Kebudayaan	128.040.000,00	67.620.000,00	52,81	143.185.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	76.530.000,00	43.750.000,00	57,17	78.750.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.225.000,00	29.225.000,00	100,00	96.350.000,00
16	Dinas Pariwisata	56.400.000,00	32.900.000,00	58,33	62.600.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	150.800.000,00	88.175.000,00	58,47	241.700.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	122.720.000,00	72.040.000,00	58,70	193.700.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42.300.000,00	20.625.000,00	48,76	72.050.000,00
20	Sekretariat DPRD	120.900.000,00	61.050.000,00	50,50	115.950.000,00
21	Sekretariat Daerah	208.050.000,00	117.225.000,00	56,34	279.550.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	60.980.000,00	34.075.000,00	55,88	63.600.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	515.940.000,00	503.315.000,00	97,55	262.215.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	424.360.000,00	182.425.000,00	42,99	449.780.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	123.900.000,00	72.275.000,00	58,33	134.700.000,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	51.860.000,00	29.005.000,00	55,93	64.720.000,00
27	Badan Penghubung	57.200.000,00	27.200.000,00	47,55	0,00
28	Inspektorat	73.890.000,00	41.615.000,00	56,32	70.130.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.900.000,00	23.275.000,00	54,25	63.150.000,00
XXIII	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.366.400.000,00	631.300.000,00	46,20	118.200.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	681.600.000,00	219.600.000,00	32,22	0,00
2	Dinas Kesehatan	130.800.000,00	72.500.000,00	55,43	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	68.400.000,00	28.700.000,00	41,96	56.400.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	18.000.000,00	10.500.000,00	58,33	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.000.000,00	10.500.000,00	58,33	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	27.600.000,00	13.300.000,00	48,19	0,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	18.000.000,00	10.500.000,00	58,33	0,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	28.800.000,00	16.800.000,00	58,33	28.800.000,00
10	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	30.000.000,00	16.800.000,00	56,00	30.000.000,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58.800.000,00	34.300.000,00	58,33	0,00
13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.200.000,00	25.200.000,00	58,33	0,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.200.000,00	12.000.000,00	47,62	0,00
15	Sekretariat Daerah	76.800.000,00	44.800.000,00	58,33	3.000.000,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	75.600.000,00	66.100.000,00	87,43	0,00
17	Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.000.000,00	6.300.000,00	52,50	0,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.800.000,00	12.600.000,00	55,26	0,00
XXIV	Belanja Uang Representasi DPRD	1.749.300.000,00	1.742.550.000,00	99,61	1.740.300.000,00
1	Sekretariat DPRD	1.749.300.000,00	1.742.550.000,00	99,61	1.740.300.000,00
XXV	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	200.000.000,00	175.851.000,00	87,93	178.011.000,00
1	Sekretariat DPRD	200.000.000,00	175.851.000,00	87,93	178.011.000,00
XXVI	Belanja Tunjangan Beras DPRD	200.000.000,00	144.121.770,00	72,06	146.133.520,00
1	Sekretariat DPRD	200.000.000,00	144.121.770,00	72,06	146.133.520,00
XXVII	Belanja Uang Paket DPRD	150.000.000,00	149.265.000,00	99,51	149.265.000,00
1	Sekretariat DPRD	150.000.000,00	149.265.000,00	99,51	149.265.000,00
XXVIII	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.625.295.459,00	2.526.697.500,00	96,24	2.523.435.000,00
1	Sekretariat DPRD	2.625.295.459,00	2.526.697.500,00	96,24	2.523.435.000,00
XXIX	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	227.800.000,00	219.979.500,00	96,57	220.088.250,00
1	Sekretariat DPRD	227.800.000,00	219.979.500,00	96,57	220.088.250,00
XXX	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.855.000.000,00	99,55	9.855.000.000,00
1	Sekretariat DPRD	9.900.000.000,00	9.855.000.000,00	99,55	9.855.000.000,00
XXXI	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	100,00	2.430.000.000,00
1	Sekretariat DPRD	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	100,00	2.430.000.000,00
XXXII	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	45.000.000,00	42.521.544,00	94,49	42.167.130,00
1	Sekretariat DPRD	45.000.000,00	42.521.544,00	94,49	42.167.130,00
XXXIII	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	50.000,00	39.816,00	79,63	39.258,00
1	Sekretariat DPRD	50.000,00	39.816,00	79,63	39.258,00
XXXIV	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	25.916.588.072,00	25.298.376.420,00	97,61	25.272.769.197,00
1	Sekretariat DPRD	25.916.588.072,00	25.298.376.420,00	97,61	25.272.769.197,00
XXXV	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	14.800.000.000,00	14.616.000.000,00	98,76	14.616.000.000,00
1	Sekretariat DPRD	14.800.000.000,00	14.616.000.000,00	98,76	14.616.000.000,00
XXXVI	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.641.200,00	59.400.000,00	76,51	75.600.000,00
1	Sekretariat Daerah	77.641.200,00	59.400.000,00	76,51	75.600.000,00
XXXVII	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.489.480,00	7.260.000,00	76,51	9.240.000,00
1	Sekretariat Daerah	9.489.480,00	7.260.000,00	76,51	9.240.000,00
XXXVIII	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.754.160,00	106.920.000,00	76,51	136.080.000,00
1	Sekretariat Daerah	139.754.160,00	106.920.000,00	76,51	136.080.000,00
XXXIX	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	4.779.720,00	78,57	5.214.240,00
1	Sekretariat Daerah	6.083.280,00	4.779.720,00	78,57	5.214.240,00
XL	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.669.648,00	3.887.311,00	83,25	4.628.448,00
1	Sekretariat Daerah	4.669.648,00	3.887.311,00	83,25	4.628.448,00
XLI	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.500,00	880,00	58,67	960,00
1	Sekretariat Daerah	1.500,00	880,00	58,67	960,00
XLII	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.075.394,00	5.680.800,00	62,60	7.574.400,00
1	Sekretariat Daerah	9.075.394,00	5.680.800,00	62,60	7.574.400,00
XLIII	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	116.640,00	75,00	155.520,00
1	Sekretariat Daerah	155.520,00	116.640,00	75,00	155.520,00
XLIV	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	349.920,00	75,00	466.560,00
1	Sekretariat Daerah	466.560,00	349.920,00	75,00	466.560,00
XLV	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	360.000.000,00
1	Sekretariat DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	360.000.000,00
XLVI	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	7.562.169.480,00	5.755.000.000,00	76,10	5.240.000.000,00
1	Sekretariat Daerah	7.562.169.480,00	5.755.000.000,00	76,10	5.240.000.000,00
XLVII	Belanja Pegawai BLUD	89.895.538.573,00	86.775.914.143,00	96,53	125.763.128.089,96
1	Dinas Kesehatan	89.004.157.000,00	85.907.159.370,00	96,52	119.942.869.007,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	891.381.573,00	868.754.773,00	97,46	5.820.259.082,96

**Realisasi Anggaran dan Belanja Barang dan Jasa
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	1.393.304.098.830,00	1.228.357.329.714,16	88,16	1.690.049.421.497,65
I	Belanja Barang Pakai Habis	189.612.767.301,00	164.485.495.551,00	86,75	141.559.477.929,90
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	16.439.393.650,00	13.527.867.182,00	82,29	7.704.329.474,00
2	Dinas Kesehatan	17.324.799.995,00	13.639.089.444,00	78,73	5.925.722.861,90
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.853.081.486,00	6.404.857.054,00	93,46	15.265.124.400,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.337.590.810,00	1.299.511.250,00	97,15	1.097.795.963,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.331.964.840,00	1.307.738.750,00	98,18	209.542.294,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.871.402.000,00	2.399.028.187,00	83,55	1.889.410.910,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.190.516.120,00	1.151.528.316,00	96,73	1.070.644.108,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5.410.005.900,00	5.250.925.442,00	97,06	5.660.312.303,00
9	Dinas Perhubungan	1.662.213.000,00	1.286.776.790,00	77,41	796.459.601,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.841.193.696,00	2.229.429.823,00	78,47	2.118.033.601,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.009.702.668,00	946.035.281,00	93,69	3.071.077.979,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	644.036.600,00	609.175.250,00	94,59	550.062.990,00
13	Dinas Kebudayaan	8.057.871.690,00	6.974.622.557,00	86,56	6.588.711.406,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	2.921.981.696,00	2.292.246.435,00	78,45	3.119.688.808,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.206.336.200,00	1.073.104.433,00	88,96	3.244.645.737,00
16	Dinas Pariwisata	530.086.300,00	469.052.810,00	88,49	287.104.761,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.745.373.950,00	8.026.798.166,00	91,78	3.735.869.494,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.553.481.379,00	3.310.150.309,00	59,60	8.039.429.794,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.022.903.048,00	1.528.923.780,00	75,58	2.823.202.140,00
20	Sekretariat DPRD	31.312.329.200,00	30.401.871.305,00	97,09	23.561.571.343,00
21	Sekretariat Daerah	51.918.320.162,00	45.651.056.055,00	87,93	31.905.706.318,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.374.390.900,00	891.695.950,00	64,88	744.011.577,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.151.574.600,00	1.571.835.100,00	73,06	1.381.055.789,00
24	Badan Pendapatan Daerah	7.446.138.851,00	6.369.517.464,00	85,54	5.246.531.763,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.146.393.750,00	1.011.880.794,00	88,27	2.225.139.255,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.129.590.900,00	950.394.519,00	84,14	937.860.300,00
27	Badan Penghubung	873.502.800,00	769.274.500,00	88,07	744.598.228,00
28	Inspektorat	3.131.689.410,00	2.317.454.795,00	74,00	1.109.401.668,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.174.901.700,00	823.653.810,00	70,10	506.433.064,00
II	Belanja Jasa Kantor	563.179.163.974,00	492.179.019.185,60	87,39	510.799.725.189,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	114.190.492.800,00	95.228.037.985,00	83,39	92.903.589.756,00
2	Dinas Kesehatan	95.816.774.015,00	78.060.093.285,60	81,47	89.356.013.548,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.606.113.847,00	29.410.454.466,00	93,05	27.616.567.285,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	21.113.725.632,00	21.022.049.772,00	99,57	18.487.276.002,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.057.482.510,00	5.780.960.184,00	95,44	5.776.277.165,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.615.975.440,00	5.374.279.878,00	95,70	5.361.171.586,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	3.603.106.882,00	3.292.480.338,00	91,38	2.983.602.922,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.974.811.200,00	3.881.210.725,00	97,65	4.425.910.588,00
9	Dinas Perhubungan	5.662.854.945,00	5.457.598.504,00	96,38	5.302.309.768,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	55.436.947.260,00	50.131.325.479,00	90,43	41.826.544.740,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.228.390.450,00	5.092.002.643,00	97,39	4.965.120.578,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.869.978.800,00	2.760.215.811,00	96,18	2.785.288.359,00
13	Dinas Kebudayaan	54.108.369.500,00	51.094.946.230,00	94,43	48.590.675.795,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	5.412.313.500,00	4.224.644.151,00	78,06	11.861.155.964,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.127.310.213,00	2.967.748.968,00	94,90	2.693.598.637,00
16	Dinas Pariwisata	2.696.938.600,00	2.664.866.514,00	98,81	2.494.434.172,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.871.597.702,00	20.126.012.174,00	96,43	17.288.084.103,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	13.248.415.858,00	4.534.863.295,00	34,23	6.633.252.354,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.335.697.200,00	7.514.323.207,00	90,15	5.237.070.549,00
20	Sekretariat DPRD	13.942.576.400,00	12.381.154.687,00	88,80	12.035.815.157,00
21	Sekretariat Daerah	31.257.318.459,00	28.722.232.740,00	91,89	28.037.372.978,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.486.551.600,00	4.548.292.782,00	82,90	4.907.397.431,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.007.578.300,00	6.060.066.559,00	86,48	21.276.972.930,00
24	Badan Pendapatan Daerah	24.328.281.599,00	23.175.774.206,00	95,26	22.392.049.776,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.884.380.900,00	3.671.958.442,00	62,40	10.800.354.096,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.235.892.800,00	7.042.282.775,00	97,32	9.097.990.298,00
27	Badan Penghubung	4.153.307.018,00	3.777.372.735,00	90,95	2.346.984.018,00
28	Inspektorat	2.878.080.800,00	2.254.258.628,00	78,33	2.024.643.229,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.027.899.744,00	1.927.512.022,00	95,05	1.292.201.405,00
III	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	53.695.647.671,00	48.498.472.959,00	90,32	48.771.784.112,96
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.226.693.484,00	6.417.976.508,00	88,81	5.886.375.948,00
2	Dinas Kesehatan	30.297.260.948,00	27.200.777.863,00	89,78	28.359.861.324,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.456.683.456,00	1.428.611.940,00	98,07	1.399.733.388,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	257.966.640,00	257.966.640,00	100,00	216.594.144,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	369.834.192,00	361.787.664,00	97,82	361.404.380,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	297.412.416,00	297.412.416,00	100,00	258.941.072,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	183.442.944,00	182.009.796,00	99,22	172.164.576,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	206.373.312,00	206.373.312,00	100,00	195.536.380,00
9	Dinas Perhubungan	424.211.808,00	416.807.210,00	98,25	400.560.324,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	777.838.512,00	761.890.358,00	97,95	585.534.124,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	197.774.424,00	196.580.134,00	99,40	191.602.512,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	151.913.688,00	149.047.392,00	98,11	141.619.248,00
13	Dinas Kebudayaan	2.697.184.536,00	2.647.263.214,00	98,15	2.524.849.044,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	286.629.600,00	275.642.132,00	96,17	264.726.176,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	194.908.128,00	190.130.968,00	97,55	150.875.408,00
16	Dinas Pariwisata	174.844.056,00	173.410.908,00	99,18	127.040.796,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.191.281.328,00	1.170.500.682,00	98,26	1.132.361.728,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.042.766.232,00	315.204.656,00	30,23	293.972.752,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	134.715.912,00	132.327.332,00	98,23	110.148.298,00
20	Sekretariat DPRD	400.564.866,00	380.739.652,00	95,05	361.684.452,00
21	Sekretariat Daerah	1.686.901.401,00	1.651.643.397,00	97,91	1.573.227.626,00

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	275.164.416,00	272.298.120,00	98,96	251.767.552,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.372.353.658,00	1.209.316.691,00	88,12	1.281.940.311,96
24	Badan Pendapatan Daerah	1.573.596.504,00	1.538.245.382,00	97,75	1.411.795.768,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	363.780.734,00	216.405.348,00	59,49	686.399.790,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	123.250.728,00	123.250.728,00	100,00	119.404.464,00
27	Badan Penghubung	123.926.436,00	122.778.648,00	99,07	115.894.743,00
28	Inspektorat	137.582.208,00	133.521.622,00	97,05	129.817.644,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68.791.104,00	68.552.246,00	99,65	65.950.140,00
IV	Belanja Sewa Tanah	45.000.000,00	15.699.461,00	34,89	0,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	42.000.000,00	13.500.000,00	32,14	0,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.000.000,00	2.199.461,00	73,32	0,00
V	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.851.139.497,00	27.481.020.800,00	89,08	16.115.022.084,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.546.340.003,00	1.422.493.000,00	91,99	893.885.000,00
2	Dinas Kesehatan	141.901.068,00	92.346.000,00	65,08	57.300.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.000.000,00	35.209.200,00	23,47	37.495.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00	14.431.000,00	96,21	0,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	11.950.000,00	10.500.000,00	87,87	7.000.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	951.480.000,00	907.827.400,00	95,41	256.729.500,00
7	Dinas Perhubungan	75.000.000,00	58.425.000,00	77,90	0,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.163.500,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	64.161.000,00	0,00	0,00	259.730.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.000.000,00	8.400.000,00	52,50	0,00
11	Dinas Kebudayaan	4.568.717.000,00	4.339.888.500,00	94,99	2.325.977.260,00
12	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	39.996.000,00	32.450.000,00	81,13	0,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	66.000.000,00	36.000.000,00	54,55	5.500.000,00
14	Dinas Pariwisata	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	0,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0,00	0,00	217.160.000,00
16	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.601.980.000,00	2.960.242.000,00	64,33	377.802.375,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	141.879.000,00	133.375.000,00	94,01	116.250.000,00
18	Sekretariat DPRD	55.490.000,00	25.550.000,00	46,04	7.750.000,00
19	Sekretariat Daerah	17.920.851.926,00	17.385.713.700,00	97,01	11.523.737.349,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.760.000,00	1.600.000,00	90,91	2.800.000,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.000.000,00	0,00	0,00	799.200,00
22	Badan Pendapatan Daerah	1.600.000,00	0,00	0,00	1.006.400,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	427.550.000,00	0,00	0,00	24.100.000,00
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.500.000,00	6.750.000,00	23,68	0,00
VI	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.369.835.000,00	10.484.374.000,00	84,76	6.877.319.181,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.048.085.000,00	1.520.900.000,00	49,90	282.325.000,00
2	Dinas Kesehatan	243.000.000,00	81.999.000,00	33,74	20.966.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.500.000,00	4.500.000,00	60,00	1.800.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	44.850.000,00	8.075.000,00	18,00	0,00
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	36.000.000,00	29.250.000,00	81,25	35.765.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0,00	0,00	18.000.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	9.400.000,00
9	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0	0,00	0,00	31.400.000,00
10	Dinas Pariwisata	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0,00	0,00	81.120.000,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	77.700.000,00	77.700.000,00	100,00	433.500.000,00
13	Sekretariat DPRD	7.920.000.000,00	7.890.000.000,00	99,62	5.181.000.000,00
14	Sekretariat Daerah	92.600.000,00	9.450.000,00	10,21	16.600.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	870.000.000,00	841.000.000,00	96,67	765.443.181,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.400.000,00	4.800.000,00	88,89	0,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	0,00
VII	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	6.179.844,00	30,90	3.441.000,00
1	Dinas Kebudayaan	20.000.000,00	6.179.844,00	30,90	0,00
2	Sekretariat Daerah	0	0,00	0,00	3.441.000,00
VIII	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.379.100.000,00	1.221.780.000,00	88,59	5.120.630.680,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	197.000.000,00	146.550.000,00	74,39	0,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	335.000.000,00	292.500.000,00	87,31	154.725.000,00
4	Dinas Kebudayaan	604.100.000,00	546.950.000,00	90,54	506.850.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	160.000.000,00	157.500.000,00	98,44	138.955.680,00
6	Sekretariat DPRD	81.000.000,00	77.280.000,00	95,41	80.400.000,00
7	Sekretariat Daerah	0	0,00	0,00	4.239.700.000,00
IX	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.801.326.345,00	1.216.915.050,00	67,56	24.281.439.102,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	180.000.000,00	175.947.210,00	97,75	1.941.687.191,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.285.696.345,00	839.275.845,00	65,28	20.903.548.006,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	0	0,00	0,00	18.699.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	0,00	0,00	1.081.001.250,00
6	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	235.630.000,00	201.691.995,00	85,60	159.218.705,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0,00	0,00	98.673.450,00
8	Inspektorat	0	0,00	0,00	78.611.500,00
X	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.816.611.785,00	6.486.710.374,00	95,16	5.137.022.983,50
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0,00	0,00	29.548.200,00
2	Dinas Kesehatan	18.480.000,00	16.040.000,00	86,80	265.939.350,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.687.714.485,00	2.631.365.174,00	97,90	1.260.119.240,50
4	Dinas Perhubungan	0	0,00	0,00	1.355.950.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	250.000.000,00	249.650.100,00	99,86	400.000.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0,00	0,00	18.749.997,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	238.000.000,00	216.225.800,00	90,85	364.725.000,00
8	Dinas Kebudayaan	100.000.000,00	98.500.000,00	98,50	0,00
9	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	250.000.000,00	247.005.000,00	98,80	0,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	51.148.800,00
11	Dinas Pariwisata	52.500.000,00	32.375.000,00	61,67	0,00
12	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	382.729.000,00	380.513.550,00	99,42	0,00
13	Sekretariat DPRD	225.000.000,00	224.644.800,00	99,84	223.098.900,00
14	Sekretariat Daerah	8.802.300,00	8.802.300,00	100,00	100.000.000,00

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	404.136.000,00	371.244.300,00	91,86	147.760.000,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	378.250.000,00	223.194.950,00	59,01	546.119.496,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0,00	0,00	155.349.000,00
18	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.751.000.000,00	1.717.209.400,00	98,07	218.515.000,00
19	Inspektorat	70.000.000,00	69.940.000,00	99,91	0,00
XI	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	238.620.000,00	226.758.000,00	95,03	48.643.000,00
1	Dinas Kesehatan	238.620.000,00	226.758.000,00	95,03	48.643.000,00
XII	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.923.430.104,00	5.256.386.705,00	75,92	3.310.071.118,00
1	Satuan Polisi Pamong Praja	42.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	149.884.000,00	37.136.000,00	24,78	0,00
3	Sekretariat DPRD	1.606.000.000,00	1.302.500.118,00	81,10	1.763.000.118,00
4	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	20.550.000,00	41,10	155.100.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	21.645.000,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.015.236.104,00	2.907.169.587,00	72,40	1.191.616.000,00
7	Inspektorat	1.009.560.000,00	989.031.000,00	97,97	178.710.000,00
XIII	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	0,00
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	0,00
XIV	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.665.909.540,00	12.502.798.391,00	60,50	15.902.835.906,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	738.510.000,00	519.997.500,00	70,41	518.343.100,00
2	Dinas Kesehatan	979.510.000,00	402.014.424,00	41,04	580.170.995,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.449.599.400,00	922.162.275,00	63,61	1.259.983.534,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	543.110.000,00	531.153.090,00	97,80	640.937.056,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.063.576.000,00	899.608.850,00	84,58	1.231.879.682,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	324.260.000,00	109.055.500,00	33,63	97.986.011,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	386.503.300,00	188.667.050,00	48,81	396.226.408,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	210.400.000,00	208.838.000,00	99,26	284.528.860,00
9	Dinas Perhubungan	1.424.888.918,00	973.372.603,00	68,31	750.669.476,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	935.615.224,00	671.219.574,00	71,74	834.009.592,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	289.650.000,00	88.172.000,00	30,44	248.716.511,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	265.900.000,00	262.920.000,00	98,88	338.587.793,00
13	Dinas Kebudayaan	1.091.135.000,00	337.049.726,00	30,89	821.803.492,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	177.680.000,00	74.664.000,00	42,02	82.223.423,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	244.630.000,00	177.081.000,00	72,39	293.306.419,00
16	Dinas Pariwisata	50.163.960,00	30.492.100,00	60,78	95.365.766,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	752.265.000,00	497.904.000,00	66,19	606.377.485,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.820.530.000,00	1.270.126.818,00	69,77	1.596.900.484,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	369.960.000,00	247.355.466,00	66,86	288.677.005,00
20	Sekretariat DPRD	1.472.160.000,00	794.977.400,00	54,00	946.030.190,00
21	Sekretariat Daerah	2.534.967.082,00	1.393.062.883,00	54,95	1.480.045.027,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	377.150.000,00	119.539.883,00	31,70	156.191.920,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	388.710.000,00	122.114.000,00	31,42	156.757.339,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.347.705.000,00	739.693.290,00	54,89	784.699.100,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	257.720.000,00	164.930.000,00	64,00	504.031.007,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	264.570.000,00	207.409.359,00	78,39	234.226.108,00
27	Badan Penghubung	116.100.000,00	89.945.000,00	77,47	63.720.439,00
28	Inspektorat	593.570.656,00	315.741.000,00	53,19	287.421.398,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	195.370.000,00	143.531.600,00	73,47	323.020.286,00
XV	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.772.115.195,00	10.896.871.629,00	79,12	8.108.406.766,91
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.097.624.800,00	4.857.711.240,00	79,67	744.643.281,48
2	Dinas Kesehatan	150.000.000,00	67.364.651,00	44,91	409.190.934,25
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,00	0,00	74.507.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	130.000.000,00	129.465.300,00	99,59	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95.918.600,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	40.000.000,00	18.934.000,00	47,34	31.786.275,00
7	Dinas Perhubungan	0	0,00	0,00	349.428.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	230.000.000,00	207.649.587,00	90,28	149.989.000,00
9	Dinas Kebudayaan	1.114.985.400,00	1.105.959.806,00	99,19	2.061.986.948,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	139.661.048,64
11	Dinas Pariwisata	104.504.700,00	101.833.224,00	97,44	76.600.300,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58.726.000,00	46.015.964,00	78,36	29.237.845,00
13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0,00	0,00	193.226.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	62.000.000,00	58.806.640,00	94,85	40.566.507,00
15	Sekretariat DPRD	238.499.000,00	228.287.091,00	95,72	175.231.604,00
16	Sekretariat Daerah	3.635.809.959,00	3.002.265.645,00	82,57	1.975.858.872,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	275.000.000,00	50.997.522,00	18,54	99.305.704,54
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38.609.000,00	0,00	0,00	4.270.170,00
19	Badan Pendapatan Daerah	1.349.775.632,00	927.186.254,00	68,69	930.566.500,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0,00	0,00	275.961.390,00
21	Badan Riset dan Inovasi Daerah	23.370.000,00	22.600.925,00	96,71	221.225.187,00
22	Badan Penghubung	110.000.000,00	60.219.780,00	54,75	32.890.000,00
23	Inspektorat	17.292.104,00	11.574.000,00	66,93	41.138.200,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0,00	0,00	51.136.000,00
XVI	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.792.205.016,00	709.591.588,00	39,59	9.651.623.339,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	315.000.000,00	119.850.000,00	38,05	175.063.500,00
2	Dinas Kesehatan	80.950.000,00	51.202.000,00	63,25	74.718.355,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	675.209.108,00	50.405.837,00	7,47	8.584.018.200,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0,00	0,00	19.565.970,00
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0	0,00	0,00	48.373.900,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	0	0,00	0,00	9.949.400,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	294.200.000,00	282.217.855,00	95,93	67.899.070,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	7.351.864,00
9	Dinas Kebudayaan	0	0,00	0,00	199.716.000,00
10	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	21.000.000,00	14.988.000,00	71,37	0,00
11	Dinas Pariwisata	0	0,00	0,00	29.096.664,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0,00	0,00	59.645.091,00
13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	39.200.000,00	6.235.000,00	15,91	12.693.700,00
14	Sekretariat DPRD	45.000.000,00	20.035.500,00	44,52	35.490.450,00
15	Sekretariat Daerah	274.645.908,00	142.517.446,00	51,89	114.682.526,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.500.000,00	3.388.000,00	29,46	31.827.350,00
17	Badan Pendapatan Daerah	26.500.000,00	10.650.000,00	40,19	49.296.663,00

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0,00	0,00	58.248.070,00
19	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	0,00	0,00	59.658.050,00
20	Inspektorat	0	0,00	0,00	2.394.166,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.000.000,00	8.101.950,00	90,02	11.934.350,00
XVII	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	286.000.000,00	269.967.000,00	94,39	110.660.550,00
1	Dinas Kebudayaan	215.000.000,00	201.527.000,00	93,73	43.205.000,00
2	Sekretariat DPRD	55.000.000,00	52.440.000,00	95,35	49.135.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0,00	0,00	18.320.550,00
4	Badan Penghubung	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
XVIII	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
XIX	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	140.683.252.896,00	76.767.920.642,00	54,57	62.880.439.291,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.551.917.000,00	5.227.281.657,00	61,12	2.628.599.335,00
2	Dinas Kesehatan	3.792.572.000,00	2.646.911.587,00	69,79	657.700.136,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.241.766.000,00	1.020.360.441,00	45,52	905.072.721,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.166.524.000,00	1.062.955.704,00	91,12	587.725.470,00
5	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	628.502.000,00	506.077.178,00	80,52	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	720.901.000,00	464.549.764,00	64,44	406.758.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	319.009.000,00	305.810.025,00	95,86	159.940.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.190.627.000,00	1.652.548.493,00	75,44	1.314.369.690,00
9	Dinas Perhubungan	715.743.000,00	452.083.000,00	63,16	257.881.262,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.520.617.000,00	3.224.690.147,00	58,41	2.330.135.549,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.460.141.796,00	1.299.668.397,00	89,01	1.040.985.621,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.273.994.000,00	950.653.035,00	74,62	866.352.520,00
13	Dinas Kebudayaan	1.487.082.000,00	784.225.753,00	52,74	627.480.362,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	841.995.600,00	394.250.600,00	46,82	584.329.436,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	362.584.000,00	136.571.532,00	37,67	32.910.000,00
16	Dinas Pariwisata	339.786.000,00	250.730.860,00	73,79	144.773.100,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	742.510.000,00	459.846.391,00	61,93	637.695.243,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	318.448.000,00	173.385.273,00	54,45	234.463.650,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.208.692.000,00	526.671.999,00	43,57	652.317.718,00
20	Sekretariat DPRD	73.053.914.000,00	34.903.843.064,00	47,78	34.091.837.870,00
21	Sekretariat Daerah	16.759.646.500,00	11.393.067.865,00	67,98	9.287.534.388,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.359.688.000,00	994.132.817,00	42,13	790.797.598,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.958.039.000,00	735.928.089,00	37,58	545.846.910,00
24	Badan Pendapatan Daerah	2.413.282.000,00	1.108.938.882,00	45,95	776.408.004,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.741.958.000,00	1.103.470.846,00	63,35	1.176.915.439,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	894.348.000,00	698.604.318,00	78,11	543.991.543,00
27	Badan Penghubung	121.912.000,00	83.420.026,00	68,43	67.250.420,00
28	Inspektorat	6.630.990.000,00	3.731.794.516,00	56,28	1.203.148.736,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	866.064.000,00	475.448.383,00	54,90	327.218.570,00
XX	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	17.332.851.000,00	7.421.528.979,00	42,82	1.779.133.900,00
1	Dinas Kebudayaan	0	0,00	0,00	1.008.682.500,00
2	Sekretariat DPRD	13.464.405.000,00	5.182.672.880,00	38,49	0,00
3	Sekretariat Daerah	3.868.446.000,00	2.238.856.099,00	57,87	770.451.400,00
XXI	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.237.748.000,00	19.915.041.728,18	98,41	61.249.814.600,16
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	13.135.098.000,00	12.921.305.728,18	98,37	51.667.463.800,16
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	146.000.000,00	120.000.000,00	82,19	124.573.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	505.000.000,00	505.000.000,00	100,00	410.000.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	60.500.000,00	60.500.000,00	100,00	0,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.500.000,00	0,00	0,00	54.675.000,00
6	Dinas Kebudayaan	4.741.150.000,00	4.677.736.000,00	98,66	3.915.943.800,00
7	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	12.000.000,00
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0,00	0,00	6.000.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	25.659.000,00
11	Sekretariat Daerah	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	100,00	4.870.000.000,00
12	Badan Riset dan Inovasi Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	21.000.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133.500.000,00	133.500.000,00	100,00	67.500.000,00
XXII	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.499.011.676,00	7.312.690.819,00	69,65	460.721.674.157,36
1	Dinas Kesehatan	352.500.000,00	195.047.050,00	55,33	71.275.250,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	492.451.000,00	348.337.000,00	70,74	552.242.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.508.240.668,00	2.329.863.989,00	92,89	2.196.465.227,00
4	Dinas Perhubungan	6.508.170.008,00	4.388.011.180,00	67,42	2.468.883.704,00
5	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0	0,00	0,00	454.573.000.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	4.500.000,00	45,00	1.800.000,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0,00	0,00	392.505.000,00
8	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.000.000,00	6.645.000,00	94,93	0,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.000.000,00	0,00	0,00	34.800.000,00
10	Sekretariat Daerah	46.150.000,00	15.400.000,00	33,37	0,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	548.000.000,00	22.386.600,00	4,09	359.553.308,36
12	Badan Pendapatan Daerah	0	0,00	0,00	6.000.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0,00	0,00	4.180.000,00
14	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	0,00	0,00	58.580.000,00
15	Badan Penghubung	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.389.668,00
XXIII	Belanja Barang dan Jasa BOS	132.357.265.076,00	185.455.598.978,25	140,12	177.097.819.085,08
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	132.357.265.076,00	185.455.598.978,25	140,12	177.097.819.085,08
XXIV	Belanja Barang dan Jasa BLUD	168.685.098.754,00	149.496.708.030,13	88,62	130.522.437.521,78
1	Dinas Kesehatan	129.418.209.037,00	112.367.662.311,70	86,83	97.575.577.938,08
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.264.065.717,00	27.364.870.962,43	93,51	24.397.332.008,70
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.002.824.000,00	9.764.174.756,00	97,61	8.549.527.575,00

**Realisasi Anggaran dan Belanja Subsidi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Lampiran 7

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	10.025.000.000,00	10.018.140.000,00	99,93	4.372.945.000,00
I	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	289.850.000,00
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	289.850.000,00
II	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	10.000.000.000,00	9.993.140.000,00	99,93	4.058.095.000,00
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.000.000.000,00	9.993.140.000,00	99,93	4.058.095.000,00
III	Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00

**Realisasi Anggaran dan Belanja Hibah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	1.068.846.413.720,00	899.427.001.808,41	84,15	356.436.889.451,00
I	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	78.829.667.200,00	78.829.667.200,00	100,00	0,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.829.667.200,00	78.829.667.200,00	100,00	0,00
II	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	924.140.000,00	765.400.000,00	82,82	299.700.000,00
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	0,00	0,00	299.700.000,00
2	Sekretariat Daerah	924.140.000,00	765.400.000,00	82,82	0,00
III	yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	479.177.090.756,00	325.263.389.315,41	67,88	21.174.712.606,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	10.775.000.000,00	10.774.997.951,00	100,00	15.174.724.354,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.500.000.000,00	2.498.738.008,41	99,95	1.999.988.252,00
3	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	465.902.090.756,00	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
IV	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	0,00	0,00	8.847.332.110,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,00	0,00	8.847.332.110,00
V	Kemasyarakatan	399.259.670.764,00	385.624.357.197,00	96,58	209.463.380.040,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0,00	0,00	50.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	288.894.805.405,00	276.645.659.750,00	95,76	163.383.561.040,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	8.450.020.000,00	8.375.020.000,00	99,11	2.116.500.000,00
4	Dinas Perhubungan	3.190.000.000,00	2.965.000.000,00	92,95	1.770.000.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.535.000.000,00	2.535.000.000,00	100,00	1.244.500.000,00
6	Dinas Kebudayaan	32.979.100.000,00	32.818.100.000,00	99,51	15.952.000.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	100,00	558.000.000,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.521.000.000,00	7.261.000.000,00	96,54	5.571.319.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	631.000.000,00	630.940.000,00	99,99	50.000.000,00
10	Sekretariat Daerah	48.664.850.000,00	48.064.426.448,00	98,77	18.767.500.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.268.895.359,00	5.204.210.999,00	98,77	0,00
VI	Belanja Hibah kepada Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00
VII	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
VIII	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	94.087.990.000,00	91.440.313.797,00	97,19	99.275.235.545,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	94.087.990.000,00	91.440.313.797,00	97,19	99.275.235.545,00
IX	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0	936.019.299,00	0,00	758.674.150,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	936.019.299,00	0,00	758.674.150,00
X	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	16.467.855.000,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	16.467.855.000,00

**Realisasi Anggaran Dan Belanja Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Lampiran 9

No.	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	139.016.000,00
I	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	139.016.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	139.016.000,00

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Lampiran 10

No.	OPD	Anggaran					Realisasi						
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya
	JUMLAH	177.579.673.369,00	207.939.759.226,00	693.957.200.084,00	273.674.962.322,00	55.768.277.740,00	900.000.000,00	154.513.167.813,00	140.375.288.069,62	361.028.180.271,00	232.361.545.288,00	30.899.659.003,37	895.500.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	93.497.461.245,00	230.698.323.480,00	-	52.957.906.030,00	-	-	54.122.269.544,72	144.027.427.503,00	-	28.795.494.900,37	-
2	Dinas Kesehatan	-	58.966.544.958,00	21.596.944.849,00	180.000.000,00	212.328.000,00	-	-	49.811.145.700,90	19.777.176.090,00	106.025.424,00	206.627.989,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	158.951.197.948,00	9.588.714.100,00	63.530.706.176,00	271.950.233.922,00	1.874.043.710,00	-	144.552.426.344,00	6.424.693.317,00	54.838.474.789,00	231.404.590.492,00	1.748.081.114,00	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	136.526.500,00	198.000.000,00	-	-	-	-	127.979.250,00	194.593.000,00	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.889.114.000,00	150.500.000,00	11.000.000,00	-	-	-	1.721.033.000,00	79.221.596,00	10.600.500,00	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	101.138.000,00	3.771.450.835,00	45.000.000,00	-	-	-	19.113.750,00	3.705.012.844,00	43.500.000,00	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	51.182.000,00	40.831.600,00	122.128.400,00	-	-	-	42.531.000,00	40.255.000,00	113.990.950,00	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	78.688.962,00	-	10.000.000,00	-	-	-	78.608.720,00	-	9.859.000,00	-	-
9	Dinas Perhubungan	-	9.427.703.950,00	1.763.492.000,00	-	-	900.000.000,00	-	3.162.549.000,00	177.277.800,00	-	-	895.500.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	18.628.475.421,00	4.050.026.832,00	363.408.700.660,00	150.000.000,00	-	-	9.960.741.469,00	2.883.194.499,00	133.184.076.085,00	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	56.940.000,00	-	-	-	-	-	48.500.000,00	-	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	429.570.000,00	90.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	282.262.000,00	89.748.084,00	69.385.000,00	-	-
13	Dinas Kebudayaan	-	1.292.358.900,00	870.000.000,00	498.500.000,00	-	-	-	1.074.939.400,00	866.409.376,00	347.938.000,00	-	-
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	715.015.200,00	400.000.000,00	-	-	-	-	689.330.000,00	397.195.000,00	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	2.360.000.000,00	-	-	-	-	-	2.179.435.047,00	-	-	-	-
16	Dinas Pariwisata	-	22.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	4.202.791.200,00	30.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	3.263.069.790,00	29.504.000,00	58.136.000,00	-	-
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	194.523.980,00	-	-	-	-	-	184.626.175,00	-	-	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	1.029.903.625,00	200.000.000,00	-	-	-	-	703.030.000,00	48.984.160,00	-	-	-
20	Sekretariat DPRD	-	486.176.000,00	678.892.650,00	-	-	-	-	407.974.000,00	-	-	-	-
21	Sekretariat Daerah	-	5.124.929.574,00	444.624.625,00	241.000.000,00	175.000.000,00	-	-	3.727.078.954,00	440.878.225,00	96.507.222,00	99.955.000,00	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	564.750.000,00	1.097.450.000,00	29.500.000,00	-	-	-	259.729.000,00	965.625.332,00	1.950.000,00	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	462.650.200,00	40.724.000,00	-	400.000.000,00	-	-	360.684.000,00	-	-	-	-
24	Badan Pendapatan Daerah	-	5.080.353.800,00	1.878.589.409,00	50.000.000,00	-	-	-	3.262.937.675,00	1.272.036.890,00	23.162.700,00	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	729.667.500,00	450.000.000,00	20.600.000,00	50.000.000,00	-	-	217.527.000,00	192.358.929,00	8.100.000,00	49.500.000,00	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	472.860.900,00	250.000.000,00	-	-	-	-	458.074.248,00	247.726.109,00	-	-	-
27	Badan Penghubung	-	552.413.999,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	313.484.999,00	99.843.057,00	-	-	-
28	Inspektorat	-	6.125.493.301,00	2.208.895.900,00	72.000.000,00	100.000.000,00	-	-	4.293.930.000,00	217.599.250,00	68.400.000,00	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	249.310.500,00	149.875.900,00	65.000.000,00	-	-	-	155.568.000,00	136.757.152,00	-	-	-

L

**Realisasi Dan Anggaran Belanja Modal Tanah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	177.579.673.369,00	154.513.167.813,00	87,01	623.975.476.572,00
I	Belanja Modal Tanah Persil	174.983.773.369,00	152.116.297.257,00	86,93	464.442.414.150,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0,00	0,00	2.094.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	156.355.297.948,00	142.155.555.788,00	90,92	457.154.287.471,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	18.628.475.421,00	9.960.741.469,00	53,47	5.194.126.679,00
II	Belanja Modal Lapangan	2.595.900.000,00	2.396.870.556,00	92,33	159.533.062.422,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.595.900.000,00	2.396.870.556,00	92,33	159.533.062.422,00

**Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Lampiran 12

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	207.939.759.226,00	140.375.288.069,62	67,51	109.213.603.835,00
I	Belanja Modal Alat Besar Darat	593.000.000,00	593.000.000,00	100,00	827.000.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	593.000.000,00	593.000.000,00	100,00	827.000.000,00
II	Belanja Modal Alat Bantu	206.000.000,00	199.375.000,00	96,78	125.140.018,00
1	Dinas Kesehatan	0	0,00	0,00	5.995.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	195.000.000,00	193.375.000,00	99,17	20.293.020,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0	0,00	0,00	2.775.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	5.979.999,00
6	Dinas Kebudayaan	0	0,00	0,00	17.697.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	5.999.999,00
8	Sekretariat DPRD	0	0,00	0,00	66.400.000,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
III	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	13.956.537.000,00	6.614.740.000,00	47,40	2.318.963.040,00
1	Dinas Kesehatan	0	0,00	0,00	55.000.000,00
2	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Perhubungan	7.911.500.000,00	1.783.000.000,00	22,54	0,00
4	Sekretariat DPRD	0	0,00	0,00	92.634.000,00
5	Sekretariat Daerah	2289783000,00	1.751.700.000,00	76,50	1.639.900.000,00
6	Badan Pendapatan Daerah	1.068.354.000,00	470.140.000,00	44,01	531.429.040,00
7	Badan Penghubung	230.000.000,00	170.000.000,00	73,91	0,00
8	Inspektorat	2.428.400.000,00	2.411.400.000,00	99,30	0,00
IV	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	0,00	0,00	14.935.750,00
1	Dinas Kesehatan	0	0,00	0,00	1.255.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,00	0,00	13.680.750,00
V	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	772.200,00	0,00	0,00	0,00
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	772.200,00	0,00	0,00	0,00
VI	Belanja Modal Alat Ukur	20.809.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Inspektorat	20.809.000,00	0,00	0,00	0,00
VII	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.956.719.640,00	3.146.200.120,00	79,52	0,00
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.956.719.640,00	3.146.200.120,00	79,52	0,00
VIII	Belanja Modal Alat Kantor	2.349.669.760,00	1.466.621.070,00	62,42	3.801.300.122,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	343.766.000,00	293.240.000,00	85,30	76.677.499,00
2	Dinas Kesehatan	202.229.500,00	153.860.000,00	76,08	31.968.160,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.925.000,00	23.775.000,00	99,37	2.435.713.970,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0	0,00	0,00	6.904.200,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	115.500.000,00	65.650.000,00	56,84	42.476.800,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Kebudayaan	56.768.200,00	36.252.000,00	63,86	133.052.000,00
8	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0	0,00	0,00	227.104.104,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	124.271.560,00	99.674.870,00	80,21	0,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63.398.000,00	49.100.000,00	77,45	0,00
12	Sekretariat DPRD	9.496.000,00	6.720.000,00	70,77	91.015.975,00
13	Sekretariat Daerah	395.975.500,00	301.771.000,00	76,21	408.753.967,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.624.000,00	14.070.000,00	38,42	17.749.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	751.720.000,00	375.292.200,00	49,92	173.379.750,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.150.000,00	32.960.000,00	99,43	85.099.997,00
18	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	0,00	0,00	58.520.700,00
19	Badan Penghubung	0	0,00	0,00	12.884.000,00
20	Inspektorat	123.590.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.256.000,00	14.256.000,00	100,00	0,00
IX	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.485.164.225,00	12.698.314.680,00	65,17	12.259.136.242,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.417.750.600,00	4.812.551.204,00	74,99	3.844.675.061,00
2	Dinas Kesehatan	478.148.500,00	408.017.100,00	85,33	1.717.681.495,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.043.390.100,00	3.042.015.535,00	50,34	2.001.669.290,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	45.400.500,00	45.371.250,00	99,94	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.750.000,00	74.000.000,00	99,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	27.500.000,00	7.242.750,00	26,34	649.815.000,00
7	Dinas Perhubungan	275.829.200,00	259.726.000,00	94,16	12.996.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	135.410.800,00	117.813.000,00	87,00	25.765.500,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.070.000,00	11.600.000,00	96,11	0,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	174.000.000,00	148.719.000,00	85,47	248.666.499,00
11	Dinas Kebudayaan	594.479.800,00	431.637.400,00	72,61	608.145.000,00
12	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	288.658.000,00	279.400.000,00	96,79	142.131.835,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	95.500.000,00	58.783.047,00	61,55	0,00
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	81.500.000,00	77.200.000,00	94,72	24.816.200,00
15	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	123.802.700,00	116.100.000,00	93,78	15.373.500,00
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	408.725.425,00	371.330.000,00	90,85	711.362.899,00
17	Sekretariat DPRD	60.000.000,00	57.018.000,00	95,03	7.770.000,00
18	Sekretariat Daerah	1.053.688.800,00	569.105.837,00	54,01	1.666.761.621,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	136.000.000,00	59.750.000,00	43,93	46.342.500,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.582.200,00	20.554.000,00	99,86	24.255.000,00
21	Badan Pendapatan Daerah	2.237.666.800,00	1.582.478.560,00	70,72	242.211.589,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0,00	0,00	189.221.000,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.300.000,00	22.904.998,00	94,26	0,00
24	Badan Penghubung	101.278.999,00	27.584.999,00	27,24	4.389.000,00
25	Inspektorat	432.257.301,00	34.100.000,00	7,89	75.087.253,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	142.474.500,00	63.312.000,00	44,44	0,00
X	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	562.201.000,00	349.950.000,00	62,25	212.803.946,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	91.083.000,00	89.950.000,00	98,76	65.268.000,00
2	Dinas Kesehatan	0	0,00	0,00	6.000.000,00

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Dinas Perhubungan	16.690.000,00	12.250.000,00	73,40	0,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	33.749.996,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	293.346.000,00	172.800.000,00	58,91	43.600.000,00
6	Sekretariat DPRD	103.502.000,00	69.250.000,00	66,91	0,00
7	Sekretariat Daerah	0	0,00	0,00	55.335.950,00
8	Badan Pendapatan Daerah	28.600.000,00	0,00	0,00	8.850.000,00
9	Badan Penghubung	22.730.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Inspektoral	6.250.000,00	5.700.000,00	91,20	0,00
XI	Belanja Modal Alat Studio	2.449.657.180,00	732.304.315,00	29,89	2.587.142.901,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	41.299.000,00	0,00	0,00	14.820.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.689.000,00	9.450.000,00	88,41	0,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	7.126.000,00	3.230.000,00	45,33	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	128.364.000,00	24.800.000,00	19,32	0,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	19.157.000,00	11.300.000,00	58,99	0,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	813.703.680,00	237.246.199,00	29,16	1.124.384.560,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	182.570.000,00	107.371.000,00	58,81	0,00
9	Dinas Kebudayaan	167.320.000,00	167.320.000,00	100,00	19.000.000,00
10	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0	0,00	0,00	495.400.282,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	38.128.500,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57.000.000,00	0,00	0,00	29.208.000,00
13	Sekretariat Daerah	90.000.000,00	49.750.200,00	55,28	384.061.400,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.545.000,00	13.837.000,00	61,38	0,00
15	Badan Pendapatan Daerah	67.869.000,00	42.899.916,00	63,21	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	47.462.500,00	45.800.000,00	96,50	451.053.499,00
17	Badan Penghubung	56.555.000,00	18.300.000,00	32,36	0,00
18	Inspektoral	736.997.000,00	0,00	0,00	31.086.660,00
XII	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.519.374.000,00	1.436.205.000,00	94,53	26.935.550,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,00	0,00	14.435.550,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.470.000.000,00	1.410.033.000,00	95,92	0,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.000.000,00	26.172.000,00	79,31	0,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0,00	0,00	12.500.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.374.000,00	0,00	0,00	0,00
XIII	Belanja Modal Alat Kedokteran	29.496.790.894,00	27.840.062.750,00	94,38	1.359.794.505,00
1	Dinas Kesehatan	29.496.790.894,00	27.840.062.750,00	94,38	1.359.794.505,00
XIV	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33	1.500.000,00
1	Dinas Kesehatan	0	0,00	0,00	1.500.000,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33	0,00
XV	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	77.000.000,00	56.115.000,00	72,88	188.606.000,00
1	Dinas Kesehatan	77.000.000,00	56.115.000,00	72,88	15.651.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,00	0,00	172.955.000,00
XVI	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	2.200.000.000,00	2.120.652.000,00	96,39	0,00
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.200.000.000,00	2.120.652.000,00	96,39	0,00
XVII	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	5.799.097.000,00	5.449.252.035,00	93,97	1.665.000.000,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.799.097.000,00	5.449.252.035,00	93,97	1.665.000.000,00
XVIII	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00	7.169.250,00	89,62	0,00
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.000.000,00	7.169.250,00	89,62	0,00
XIX	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	70.721.280,00	68.526.175,00	96,90	0,00
1	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	70.721.280,00	68.526.175,00	96,90	0,00
XX	Belanja Modal Komputer Unit	11.168.056.074,00	9.649.532.100,00	86,40	3.520.044.981,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	967.774.000,00	862.900.000,00	89,16	410.100.000,00
2	Dinas Kesehatan	815.525.000,00	629.003.500,00	77,13	87.376.040,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	329.229.000,00	299.450.000,00	90,95	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000,00	59.200.000,00	98,67	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	216.000.000,00	212.200.000,00	98,24	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	57.638.000,00	11.871.000,00	20,60	41.847.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	22.682.000,00	14.031.000,00	61,86	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	26.580.000,00	26.500.000,00	99,70	0,00
9	Dinas Perhubungan	336.020.000,00	276.060.000,00	82,16	0,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.375.187.000,00	2.035.544.800,00	85,70	511.414.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	37.500.000,00	30.000.000,00	80,00	0,00
12	Dinas Kebudayaan	335.505.900,00	327.050.000,00	97,48	167.807.500,00
13	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	395.826.000,00	381.230.000,00	96,31	11.847.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pariwisata	22.950.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38.500.000,00	38.494.800,00	99,99	0,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	179.164.000,00	109.800.000,00	61,28	103.000.000,00
18	Sekretariat DPRD	243.178.000,00	208.590.000,00	85,78	189.188.000,00
19	Sekretariat Daerah	1.059.382.274,00	895.123.000,00	84,49	519.298.443,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	423.750.000,00	199.979.000,00	47,19	212.000.000,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	312.774.000,00	295.160.000,00	94,37	203.128.000,00
22	Badan Pendapatan Daerah	679.000.000,00	654.640.000,00	96,41	1.024.449.000,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125.000.000,00	114.975.000,00	91,98	38.589.998,00
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	440.560.900,00	428.000.000,00	97,15	0,00
25	Badan Penghubung	34.250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Inspektoral	1.505.000.000,00	1.479.730.000,00	98,32	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.580.000,00	60.000.000,00	80,45	0,00
XXI	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.722.822.514,00	1.736.882.136,00	63,79	3.758.313.357,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	205.000.000,00	109.308.000,00	53,32	142.119.900,00
2	Dinas Kesehatan	231.259.000,00	73.165.000,00	31,64	343.264.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.995.000,00	30.935.000,00	96,69	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	24.000.000,00	20.178.000,00	84,08	0,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	45.108.962,00	45.108.720,00	100,00	0,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	610.225.352,00	426.940.500,00	69,96	1.802.828.400,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.370.000,00	6.900.000,00	93,62	0,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00	0,00	263.669.496,00
10	Dinas Kebudayaan	138.285.000,00	112.680.000,00	81,48	18.450.000,00
11	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	30.531.200,00	28.700.000,00	94,00	4.950.000,00
12	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0,00	0,00	52.614.000,00

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.498.000,00	0,00	0,00	101.430.000,00
14	Sekretariat DPRD	70.000.000,00	66.396.000,00	94,85	56.034.000,00
15	Sekretariat Daerah	236.100.000,00	159.628.917,00	67,61	241.293.761,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48.751.000,00	17.063.000,00	35,00	105.982.900,00
17	Badan Pendapatan Daerah	247.144.000,00	137.486.999,00	55,63	585.417.300,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.055.000,00	23.792.000,00	98,91	0,00
19	Badan Penghubung	107.600.000,00	97.600.000,00	90,71	33.659.600,00
20	Inspektorat	603.900.000,00	363.000.000,00	60,11	0,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	6.600.000,00
XXII	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	272.176.000,00	3.663.000,00	1,35	0,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.886.000,00	3.663.000,00	94,26	0,00
2	Inspektorat	268.290.000,00	0,00	0,00	0,00
XXIII	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	70.000.000,00	65.000.000,00	92,86	0,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	70.000.000,00	65.000.000,00	92,86	0,00
XXIV	Belanja Modal Sumur	0	0,00	0,00	19.991.000,00
1	Dinas Kebudayaan	0	0,00	0,00	19.991.000,00
XXV	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0	0,00	0,00	112.620.600,00
1	Dinas Kebudayaan	0	0,00	0,00	112.620.600,00
XXVI	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	0,00	19.892.000,00
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	10.212.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	0,00	0,00	9.680.000,00
XXVII	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	868.507.750,00	820.213.000,00	94,44	222.523.000,00
1	Dinas Perhubungan	868.507.750,00	820.213.000,00	94,44	222.523.000,00
XXVIII	Belanja Modal Peralatan Olahraga	217.332.600,00	212.892.000,00	97,96	0,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	217.332.600,00	212.892.000,00	97,96	0,00
XXIX	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.414.359.045,00	42.292.176.305,72	53,26	36.036.554.907,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	79.414.359.045,00	42.292.176.305,72	53,26	36.036.554.907,00
XXX	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	30.453.192.064,00	22.814.942.132,90	74,92	40.135.405.916,00
1	Dinas Kesehatan	27.665.592.064,00	20.650.922.350,90	74,64	39.468.070.776,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.287.600.000,00	2.164.019.782,00	94,60	667.335.140,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	693.957.200.084,00	361.028.180.271,00	52,02	340.651.767.017,86
I	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	667.469.852.989,00	338.201.684.738,00	50,67	327.249.133.297,31
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	230.608.323.480,00	144.027.427.503,00	62,46	62.395.577.544,77
2	Dinas Kesehatan	1.448.844.000,00	1.064.244.777,00	73,45	256.102.247,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	57.732.183.730,00	50.968.373.464,00	88,28	177.676.060.867,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	198.000.000,00	194.593.000,00	98,28	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.500.000,00	79.221.596,00	52,64	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.771.450.835,00	3.705.012.844,00	98,24	163.712.614,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	40.831.600,00	40.255.000,00	98,59	109.791.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.763.492.000,00	177.277.800,00	10,05	0,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	363.408.700.660,00	133.184.076.085,00	36,65	80.535.601.488,85
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.000.000,00	89.748.084,00	99,72	29.690.000,00
11	Dinas Kebudayaan	870.000.000,00	866.409.376,00	99,59	863.278.300,00
12	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	400.000.000,00	397.195.000,00	99,30	397.341.226,00
13	Dinas Pariwisata	0	0,00	0,00	99.444.545,00
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.000.000,00	29.504.000,00	98,35	99.011.800,00
15	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0,00	0,00	226.615.760,00
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	48.984.160,00	24,49	7.375.000,00
17	Sekretariat DPRD	678.892.650,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	444.024.625,00	440.878.225,00	99,29	1.450.457.600,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	897.450.000,00	766.715.332,00	85,43	283.986.758,58
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	0,00	0,00	195.373.415,11
21	Badan Pendapatan Daerah	1.878.589.409,00	1.272.036.890,00	67,71	1.437.208.559,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150.000.000,00	147.806.034,00	98,54	298.014.242,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	250.000.000,00	247.726.109,00	99,09	0,00
24	Badan Penghubung	100.000.000,00	99.843.057,00	99,84	288.870.000,00
25	Inspektorat	2.208.695.000,00	217.599.250,00	9,85	435.620.330,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.875.000,00	136.757.152,00	91,25	0,00
II	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40.724.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40.724.000,00	0,00	0,00	0,00
III	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5.798.522.446,00	3.870.101.325,00	66,74	0,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.798.522.446,00	3.870.101.325,00	66,74	0,00
IV	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	198.910.000,00	99,46	0,00
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	198.910.000,00	99,46	0,00
V	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	20.448.100.649,00	18.757.484.208,00	91,73	13.402.633.720,55
1	Dinas Kesehatan	20.148.100.649,00	18.712.931.313,00	92,88	13.402.633.720,55
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	300.000.000,00	44.552.895,00	14,85	0,00

**Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Lampiran 14

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	273.674.962.322,00	232.361.545.288,00	84,90	354.881.755.251,00
I	Belanja Modal Jalan	236.674.136.345,00	206.903.899.747,00	87,42	340.520.687.651,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	236.568.136.345,00	206.824.292.525,00	87,43	340.298.020.651,00
2	Sekretariat Daerah	80.000.000,00	79.607.222,00	99,51	0,00
3	Badan Pendapatan Daerah	26.000.000,00	0,00	0,00	222.667.000,00
II	Belanja Modal Jembatan	0	0,00	0,00	1.619.879.600,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,00	0,00	1.619.879.600,00
III	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	21.668.894.000,00	14.004.340.380,00	64,63	4.108.086.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.668.894.000,00	14.004.340.380,00	64,63	4.108.086.000,00
IV	Alam	2.235.915.171,00	1.688.095.171,00	75,50	2.279.341.600,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.235.915.171,00	1.688.095.171,00	75,50	2.279.341.600,00
V	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	233.749.876,00	122.912.576,00	52,58	0,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.749.876,00	99.749.876,00	100,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Badan Pendapatan Daerah	24.000.000,00	23.162.700,00	96,51	0,00
VI	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	77.475.000,00	70.037.550,00	90,40	0,00
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	63.975.000,00	62.387.550,00	97,52	0,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	1.950.000,00	39,00	0,00
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.000.000,00	4.200.000,00	60,00	0,00
VII	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.229.679.930,00	1.171.606.250,00	95,28	1.834.785.150,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.195.679.930,00	1.171.606.250,00	97,99	1.834.785.150,00
2	Sekretariat Daerah	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	99.465.090,00	99.465.090,00	100,00	0,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.465.090,00	99.465.090,00	100,00	0,00
IX	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
X	Belanja Modal Instalasi Lain	403.153.400,00	206.722.900,00	51,28	36.501.500,00
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.000.000,00	4.939.500,00	98,79	0,00
2	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	58.153.400,00	51.003.400,00	87,70	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.000.000,00	5.859.000,00	97,65	0,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.000.000,00	69.385.000,00	99,12	0,00
6	Dinas Kebudayaan	0	0,00	0,00	12.000.000,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	60.000.000,00	58.136.000,00	96,89	0,00
8	Sekretariat Daerah	17.000.000,00	16.900.000,00	99,41	14.900.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.000.000,00	500.000,00	25,00	9.601.500,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
XI	Belanja Modal Jaringan Air Minum	10.007.393.510,00	7.557.076.200,00	75,51	4.087.631.550,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.882.393.510,00	7.517.041.200,00	76,06	4.087.631.550,00
2	Dinas Kebudayaan	125.000.000,00	40.035.000,00	32,03	0,00
XII	Belanja Modal Jaringan Listrik	491.500.000,00	298.513.000,00	60,74	275.852.100,00
1	Dinas Kesehatan	0	0,00	0,00	66.300.100,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.000.000,00	5.661.000,00	94,35	0,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5	Dinas Kebudayaan	235.000.000,00	201.752.000,00	85,85	125.117.000,00
6	Sekretariat DPRD	0	0,00	0,00	84.435.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.000.000,00	1.400.000,00	20,00	0,00
9	Badan Penghubung	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Inspektorat	72.000.000,00	68.400.000,00	95,00	0,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
XIII	Belanja Modal Jaringan Telepon	173.600.000,00	132.851.000,00	76,53	58.999.100,00
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	25.000.000,00	23.700.000,00	94,80	0,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Kebudayaan	138.500.000,00	106.151.000,00	76,64	53.526.800,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.500.000,00	0,00	0,00	5.472.300,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.600.000,00	2.000.000,00	43,48	0,00
XIV	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	180.000.000,00	106.025.424,00	58,90	59.991.000,00
1	Dinas Kesehatan	180.000.000,00	106.025.424,00	58,90	59.991.000,00

**Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	55.769.277.740,00	30.899.659.003,37	55,41	23.276.736.561,00
I	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
II	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	100.000.000,00	99.955.000,00	99,96	189.787.500,00
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0,00	0,00	3.787.500,00
2	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	99.955.000,00	99,96	0,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0,00	0,00	157.800.000,00
4	Badan Penghubung	0	0,00	0,00	28.200.000,00
III	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0	0,00	0,00	28.800.000,00
1	Badan Penghubung	0	0,00	0,00	28.800.000,00
IV	Belanja Modal Tanda Penghargaan	15.000.000,00	14.500.000,00	96,67	0,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	14.500.000,00	96,67	0,00
V	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	557.328.000,00	56.827.989,00	10,20	717.009.683,00
1	Dinas Kesehatan	7.328.000,00	7.327.989,00	100,00	193.518.243,00
2	Dinas Perhubungan	900.000.000,00	895.500.000,00	99,50	0,00
3	Sekretariat Daerah	0	0,00	0,00	65.550.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0,00	0,00	95.664.240,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	0,00	0,00	350.977.200,00
8	Inspektorat	100.000.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
VI	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	52.942.906.030,00	28.780.994.900,37	54,36	21.776.916.439,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	52.942.906.030,00	28.780.994.900,37	54,36	21.776.916.439,00
VII	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.079.043.710,00	1.947.381.114,00	93,67	564.222.939,00
1	Dinas Kesehatan	205.000.000,00	199.300.000,00	97,22	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.874.043.710,00	1.748.081.114,00	93,28	564.222.939,00

**Rincian Anggaran Dan Belanja Modal Aset Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	JUMLAH	900.000.000,00	895.500.000,00	99,50	65.229.150,00
I	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	557.328.000,00	56.827.989,00	10,20	717.009.683,00
1	Dinas Kesehatan	7.328.000,00	7.327.989,00	100,00	193.518.243,00
2	Dinas Perhubungan	900.000.000,00	895.500.000,00	99,50	0,00
3	Sekretariat Daerah	0	0,00	0,00	65.550.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0,00	0,00	95.664.240,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	0,00	0,00	350.977.200,00
8	Inspektorat	100.000.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
II	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0	0,00	0,00	65.229.150,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,00	0,00	65.229.150,00

**Belanja Tidak Terduga
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

BELANJA TIDAK TERDUGA		
Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Tahun Anggaran 2023	2.496.300.000,00	
Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Buleleng dan Karangasem Tahun Anggaran 2023	1.249.800.000,00	
Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023	411.500.000,00	
Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023	40.000.000,00	
Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian sisa dana BOS atas penutupan rekening SMAN Satu Atap Tejakula ke rekening Kas Umum Negara sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 543/04-E/HK/2023 tanggal 23 Mei 2023.	60.728.161,00	
Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023	482.000.000,00	
Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Buleleng, Karangasem, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023	797.100.000,00	
Belanja Tidak Terduga di Kota Denpasar, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kab. Bangli, dan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2023	195.500.000,00	
Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023	328.000.000,00	
Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian sisa dana BOS atas penutupan rekening SMAS PGRI 6 Denpasar dan SMAS Saraswati Melaya ke rekening Kas Umum Negara sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 715/04-E/HK/2023 tanggal 7 Agustus 2023.	201.820.326,00	
Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Karangasem dan Tabanan Tahun Anggaran 2023	55.000.000,00	
Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan untuk perbaikan fasilitas umum Pura Bukit Indrakila di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023	1.470.000.000,00	
Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Buleleng, Bangli, Tabanan dan Klungkung Tahun Anggaran 2023	1.659.500.000,00	
Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian sisa dana BOS Kinerja TA 2023 atas penutupan rekening SMAS Saraswati Singaraja dan atas kelebihan penerimaan pd SMKN 1 Kubu dan SMKN 1 Sukawati sesuai Kep.Ka.BPKAD Prov.Bali No.9411 Tahun 2023	72.539.700,00	
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		9.519.788.187,00
PENGEMBALIAN BELANJA TIDAK TERDUGA		
Reklasifikasi BTT ke Pengurangan Pendapatan (Restitusi), BTT sebelumnya digunakan sebagai fasilitasi tidak adanya menu restitusi pada SIPD Penatausahaan Penerimaan	60.728.160,90	
Reklasifikasi BTT ke Pengurangan Pendapatan (Restitusi), BTT sebelumnya digunakan sebagai fasilitasi tidak adanya menu restitusi pada SIPD Penatausahaan Penerimaan	201.820.325,56	
Reklasifikasi BTT ke Pengurangan Pendapatan (Restitusi), BTT sebelumnya digunakan sebagai fasilitasi tidak adanya menu restitusi pada SIPD Penatausahaan Penerimaan	72.539.700,00	
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA TIDAK TERDUGA		335.088.186,46
JUMLAH		9.184.700.000,54

**Bagi Hasil Kepada Kabupaten Dan Kota
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Bagi Hasil Kepada Kabupaten		
Badung		208.510.069.421,00
Kewajiban 2022		34.974.517.717,00
Kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sesuai daftar penerimaan terlampir		34.974.517.717,00
Pajak Rokok		27.815.001.151,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Badung untuk Pajak Rokok Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023		7.268.887.768,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Badung untuk Pajak Rokok Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023		6.241.447.327,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Badung untuk Pajak Rokok Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023		5.557.005.743,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Badung untuk Pajak Rokok Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023		4.702.057.143,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Badung untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2022		4.045.603.170,00
Reguler 2023		145.720.550.553,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Januari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.		14.084.013.926,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Maret Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.		15.740.277.827,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir		15.794.583.941,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir		15.969.932.471,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Pebruari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir		14.263.647.448,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan April Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir		14.520.822.250,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln Agustus Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.		20.354.078.285,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln September Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir		16.976.098.904,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Badung untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.		18.017.095.501,00
Bangli		106.999.308.955,00
Kewajiban 2022		17.540.579.457,00
Kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sesuai daftar penerimaan terlampir		17.540.579.457,00
Pajak Rokok		16.822.063.040,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bangli untuk Pajak Rokok Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023		4.396.105.814,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bangli untuk Pajak Rokok Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023		3.774.726.444,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bangli untuk Pajak Rokok Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023		3.360.787.239,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pajak Rokok Periode Triwulan IV TA 2023		2.843.728.147,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bangli untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2022		2.446.715.396,00
Reguler 2023		72.636.666.458,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Januari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.		6.918.315.768,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan April Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.		7.186.929.664,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir		7.882.163.596,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir		7.939.773.163,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Maret Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.		7.901.999.113,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Pebruari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir		7.074.990.250,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln Agustus Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.		10.251.108.096,00
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln September Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir		8.447.138.531,00

Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Bangli untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	9.034.248.277,00	
Buleleng	202.713.278.174,00	
Kewajiban 2022	31.869.041.403,00	
Kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sesuai daftar penerimaan terlampir	31.869.041.403,00	
Pajak Rokok	37.848.468.927,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Buleleng untuk Pajak Rokok Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023	9.890.931.563,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Buleleng untuk Pajak Rokok Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023	8.492.871.308,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Buleleng untuk Pajak Rokok Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023	7.561.536.958,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Buleleng untuk Pajak Rokok Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	6.398.190.053,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Buleleng untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2022	5.504.939.045,00	
Reguler 2023	132.995.767.844,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Maret Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	14.339.546.611,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	14.412.017.732,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan April Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	13.276.741.499,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	14.585.225.744,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	16.418.303.236,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Januari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	12.903.615.157,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Pebruari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	13.034.721.374,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln September Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	15.500.150.991,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab Buleleng untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln Agustus Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	18.525.445.500,00	
Gianyar	161.435.751.517,00	
Kewajiban 2022	26.400.489.509,00	
Kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sesuai daftar penerimaan terlampir	26.400.489.509,00	
Pajak Rokok	25.152.226.840,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gianyar untuk Pajak Rokok Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023	6.664.057.998,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gianyar untuk Pajak Rokok Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023	5.722.108.844,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gianyar untuk Pajak Rokok Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023	5.094.618.290,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gianyar untuk Pajak Rokok Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	4.310.808.272,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gianyar untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2022	3.360.633.436,00	
Reguler 2023	109.883.035.168,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Januari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	10.594.212.503,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	11.912.584.549,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	12.037.097.430,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Maret Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	11.883.601.456,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Pebruari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	10.746.792.137,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan April Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	10.936.521.822,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln Agustus Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	15.375.216.284,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln September Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	12.797.258.206,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Gianyar untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	13.599.750.781,00	
Jembrana	123.031.995.106,00	
Kewajiban 2022	20.065.798.396,00	

Kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sesuai daftar penerimaan terlampir	20.065.798.396,00	
Pajak Rokok	19.692.999.374,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jembrana untuk Pajak Rokok Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023	5.146.366.937,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jembrana untuk Pajak Rokok Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023	4.418.939.896,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jembrana untuk Pajak Rokok Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023	3.934.355.782,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jembrana untuk Pajak Rokok Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	3.329.052.833,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jembrana untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2022	2.864.283.926,00	
Reguler 2023	83.273.197.336,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Maret Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	9.036.775.231,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	9.110.760.789,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	10.335.641.590,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Januari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	7.972.956.867,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Pebruari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	8.125.085.004,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan April Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	8.259.745.013,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	9.033.221.891,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln Agustus Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	11.709.241.047,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Jembrana untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln September Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	9.689.769.904,00	
Karangasem	152.889.792.401,00	
Kewajiban 2022	24.347.665.130,00	
Kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sesuai daftar penerimaan terlampir	24.347.665.130,00	
Pajak Rokok	27.266.003.157,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Karangasem untuk Pajak Rokok Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023	7.125.418.250,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Karangasem untuk Pajak Rokok Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023	6.118.256.893,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Karangasem untuk Pajak Rokok Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023	5.447.324.460,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Karangasem untuk Pajak Rokok Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	4.609.250.390,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Karangasem untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2022	3.965.753.164,00	
Reguler 2023	101.276.124.114,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	11.091.327.275,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	12.542.047.277,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Maret Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	10.960.776.045,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Pebruari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	9.900.070.138,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Januari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	9.750.076.004,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan April Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	10.072.571.780,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	10.980.939.321,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln Agustus Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	14.185.638.420,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Karangasem untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln September Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	11.792.677.854,00	
Klungkung	103.794.221.756,00	
Kewajiban 2022	17.139.604.502,00	
Kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab.Klungkung untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sesuai daftar penerimaan terlampir	17.139.604.502,00	
Pajak Rokok	15.662.302.294,00	

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klungkung untuk Pajak Rokok Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023	4.093.025.808,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klungkung untuk Pajak Rokok Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023	3.514.486.095,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klungkung untuk Pajak Rokok Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023	3.129.085.033,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klungkung untuk Pajak Rokok Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	2.647.673.462,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klungkung untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2022	2.278.031.896,00	
Reguler 2023	70.992.314.960,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Klungkung untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan April Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	7.026.254.498,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Klungkung untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	7.760.808.159,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Klungkung untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	8.827.756.354,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Klungkung untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Maret Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	7.720.916.379,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Klungkung untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Pebruari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	6.916.136.751,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Klungkung untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	7.703.144.833,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Klungkung untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln Agustus Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	10.015.375.049,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Klungkung untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln September Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	8.256.615.745,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak, Kepada Kab. Klungkung Untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bln Januari TA 2023 Sesuai Daftar Terlampir.	6.765.307.192,00	
Tabanan	155.043.276.252,00	
Kewajiban 2022	25.298.853.381,00	
Kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sesuai daftar penerimaan terlampir	25.298.853.381,00	
Pajak Rokok	24.531.481.332,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tabanan untuk Pajak Rokok Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023	6.410.806.299,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tabanan untuk Pajak Rokok Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023	5.504.653.685,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tabanan untuk Pajak Rokok Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023	4.901.009.419,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tabanan untuk Pajak Rokok Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	4.146.986.240,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tabanan untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2022	3.568.025.689,00	
Reguler 2023	105.212.941.539,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Maret Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	11.389.649.794,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	11.521.506.124,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Januari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	10.124.765.326,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Pebruari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	10.283.278.012,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan April Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	10.461.520.427,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	11.408.700.167,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln Agustus Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	14.741.407.945,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln September Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	12.250.096.589,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Tabanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	13.032.017.155,00	
Jumlah Bagi Hasil Kepada Kabupaten		1.214.417.693.582,00
Bagi Hasil Kepada Kota		
Denpasar	229.946.839.384,00	
Kewajiban	38.174.838.237,00	
Kewajiban Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2022 sesuai daftar penerimaan terlampir	38.174.838.237,00	
Pajak Rokok	32.937.221.616,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Denpasar untuk Pajak Rokok Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023	8.607.476.448,00	

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Denpasar untuk Pajak Rokok Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023	7.390.829.599,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Denpasar untuk Pajak Rokok Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023	6.580.345.932,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Denpasar untuk Pajak Rokok Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	5.567.955.843,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Denpasar untuk Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember Tahun Anggaran 2022	4.790.613.794,00	
Reguler 2023	158.834.779.531,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Maret Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	17.184.054.213,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Pebruari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	15.530.181.290,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Bulan Januari Th Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	15.300.911.255,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan April Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	15.802.792.619,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	17.219.885.864,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan II Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	17.397.016.018,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln Agustus Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	22.238.198.094,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bln September Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	18.496.960.562,00	
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kota Denpasar untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir.	19.664.779.616,00	
Jumlah Bagi Hasil Kepada Kota	229.946.839.384,00	229.946.839.384,00
Jumlah Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Kota		1.444.364.532.966,00

**Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Belanja Bantuan Keuangan		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Karangasem untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota Denpasar untuk Pesta Kesenian Bali Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Bangli untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Badung untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus(BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2023	700.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan Januari s/d Maret 2023 Tahun Anggaran 2023	1.873.776.240,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bangli untuk Tim Penggerak PKK Tahun Anggaran 2023	600.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Sharing JKN dari bulan Januari s/d Pebruari Tahun Anggaran 2023	3.214.784.160,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Karangasem untuk Tim Penggerak PKK Tahun Anggaran 2023	950.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kota Denpasar untuk Pengendalian Penduduk Pendetang Tahun Anggaran 2023	150.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Sharing JKN-KBS Dari Bulan Januari s/d Maret 2023 Tahun Anggaran 2023	4.797.965.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Tabanan untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten BUIeleng untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan Januari s/d Maret 2023 Tahun Anggaran 2023	4.496.990.400,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus(BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2023	400.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus(BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk Tim penggerak PKK Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Klungkung untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Badung untuk Triwulan II (April-Juni) Tahun 2023, sesuai daftar rekapitulasi penerimaan terlampir	865.500.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Sharing JKN bulan April Tahun Anggaran 2023	624.592.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Buleleng untuk Pengendalian Penduduk Pendetang Tahun Anggaran 2023	300.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Karangasem untuk Pengendalian Penduduk Pendetang Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus(BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk Tim Penggerak PKK Tahun Anggaran 2023	400.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Sharing JKN bulan Mei Tahun Anggaran 2023	624.592.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Jembrana untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Sharing JKN dari bulan Maret s/d April Anggaran 2023	3.214.784.160,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Klungkung untuk Pembayaran Layanan Free Wifi Bulan Januari s/d Maret Tahun Anggaran 2023	239.610.492,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kota Denpasar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2023	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gianyar untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun Anggaran 2023	500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus(BKK) kepada Kabupaten Gianyar untuk Tim Penggerak PKK Tahun Anggaran 2023	250.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Bangli untuk Penyelenggaraan akses free Wifi dari bulan Januari s/d Maret Tahun Anggaran 2023	392.400.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan Januari s/d Juni 2023 Tahun Anggaran 2023	5.059.666.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Tabanan untuk Pembayaran Layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasangan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas,Obyek Wisata dan Fasilitas Umum Januari s/d April Tahun Anggaran 2023	943.200.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Jembrana untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2023	250.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Gianyar untuk Penyelenggaraan akses Free Wifi dari bulan Januari s/d Mei Tahun Anggaran 2023	1.150.797.188,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Bangli Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2023	230.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan April s/d Juni Tahun Anggaran 2023	4.496.990.400,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Jembrana untuk Pengendalian Penduduk Pendetang Tahun Anggaran 2023	750.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Sharing JKN Juni Tahun Anggaran 2023	624.592.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Karangasem untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2023	230.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Klungkung Untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2023	20.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Kontruksi penggantian jembatan Nusa Ceningan Tahun Anggaran 2023	493.802.400,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) rekonstruksi jalan ruas jalan Peninggaran-Taman (1 Km) Tahun Anggaran 2023	383.336.700,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Gambang - Ijo Gading Kec. Karangasem (1 km) Tahun Anggaran 2023	381.820.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Belong-Bakung Kec. manggis (1,3 km) Tahun Anggaran 2023	493.242.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Gianyar untuk pembayaran uang muka sebesar 30% atas pekerjaan pembangunan Boogduiker Ruas Jalan Bakkaban - Petak Tahun Anggaran 2023	900.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Bungaya - Telaga Mas Kec. Karangasem (1 km) Tahun Anggaran 2023	368.838.300,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Sharing JKN dari bulan Mei s/d Juni Tahun Anggaran 2023	3.060.117.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan jembatan Yehembang-Kedisian Tahun Anggaran 2023	934.329.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Tulamben - Ancak (lanjutan) Kec. Kubu (1,2 km) Tahun Anggaran 2023	444.088.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan Pembangunan Jembatan Marga - Apuan (30 m) Tahun Anggaran 2023	3.353.100.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan Januari s/d Juni 2023 Tahun Anggaran 2023	2.561.932.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab. Jembrana untuk Pembayaran Layanan Free Wifi serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemasangan Layanan Free Wifi pada Desa Adat, Puskesmas, Obyek Wisata dan Fasilitas Umum Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2023	330.960.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Buleleng Untuk Subak/Subak Abian Se-Bali Tahun Anggaran 2023	220.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk Sharing JKN-KBS Dari Bulan April s/d Juni Tahun Anggaran 2023	4.871.501.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pembayaran Sharing JKN Bulan Juli Tahun Anggaran 2023	624.592.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Uang Muka atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Srigati, Arjuna, Pelajar, Pemuda, dan Serma Arda (2,5 Km) Tahun Anggaran 2023	585.120.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Uang Muka atas pelaksanaan Pembetonan Jalan Subak Pengotan menuju Subak Anyar, Baturiti (1Km) Tahun Anggaran 2023	587.226.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Uang Muka atas pelaksanaan Pembetonan Jalan Subak Br. Bukit Catu Desa Candi Kuning Baturiti (0,5Km) Tahun Anggaran 2023	295.377.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Uang Muka atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Br. Bukit Catu, Baturiti (0,2Km) Tahun Anggaran 2023	192.793.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Uang Muka atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Br. Gunung Kangin, Baturiti (0,7Km) Tahun Anggaran 2023	295.840.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Uang Muka atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Br. Tegoh Baturiti, Baturiti (1,3 Km) Tahun Anggaran 2023	628.980.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Uang Muka atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Lingkar Margana (0,5Km) Tahun Anggaran 2023	217.600.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran uang muka sebesar 30% rekonstruksi jalan Susut-Selat peken, Penatahan-susut Tahun anggaran 2023	781.808.250,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Merita - Br. Bebayu Kec. Abang (1,040 km) Tahun Anggaran 2023	389.769.900,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Jalan Ruas Jalan Culik - Kebon Kec. Abang (2,432 km) Tahun Anggaran 2023	899.281.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Wates Kangin - Pateh Kec. Selat (1,480 km) Tahun Anggaran 2023	565.596.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Jalan Ruas Jalan Duda Utara - Jungutan Kec. Selat (2,540 km) Tahun Anggaran 2023	936.113.400,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Untung Surapati - Dukuh Meranggi Kec. Karangasem (0,57 km) Tahun Anggaran 2023	215.182.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran uang muka sebesar 30% rekonstruksi jalan Nyawah-Apip tukad, Belantih-Pangkung, Belantih-Sabang, Belantih pengejaran, Wanasari-Bonyoh Tahun Anggaran 2023	782.375.100,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Muncan - Susut Kec. Selat (1,6 km) Tahun Anggaran 2023	588.183.900,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Bunutan - Purwakerti Kec. Abang (2,73 km) Tahun Anggaran 2023	1.062.853.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Jungutan - Tiingan, Kec. Bebandem (1 Paket) Tahun Anggaran 2023	142.242.900,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran uang muka sebesar 30% rekonstruksi jalan Manikaji-Puraja, jalan Tingas-kubusuih tahun anggaran 2023	389.878.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Uang Muka atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Lingkar Di Desa Bengkel Kawan, Kediri (0,9 Km) Tahun Anggaran 2023	395.380.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pengadangan-Pasar Agung Kec. Bebandem (1 Paket) Tahun Anggaran 2023	244.506.300,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Abang - Kikian Kec. Abang (1,5 km) Tahun Anggaran 2023	558.031.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Jalan Ruas Jalan Bantas - Br. Dukuh (Lanjutan) Kec. Kubu (1 km) Tahun Anggaran 2023	367.419.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Mumbul - Pengadangan Kec. Bebandem (1 Paket) Tahun Anggaran 2023	149.663.100,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab. Bangli untuk Rekonstruksi Jalan Bangbang - Penaga Landih amprah uang muka 30%	500.215.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembnagunan Jalan Ruas Jalan Tepas - Pr. Dalem Ban Kec. Kubu (1 km) Tahun Anggaran 2023	367.844.400,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Jembatan / Box Culver Tukad Masi Ruas Jalan Banyu Campah - Kebung Kec.Sidemen (1 Paket) Tahun Anggaran 2023	407.999.700,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pura Kayu Sakti-Pura Maksan Kaja Kangin Kec. Abang (1 paket) Tahun Anggaran 2023	346.394.700,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Bangli untuk Pembangunan Mall Pelayanan Publik Amprah Uang Muka 5%	389.133.550,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sp. Bangli - Apuan, Baturiti di Kabupaten Tabanan (1,5 Km) Tahun Anggaran 2023	727.460.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Telaga Tunjung-Jegu, Penebel (4,8 Km) Tahun Anggaran 2023	2.262.860.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap II Kontruksi penggantian jembatan Nusa Ceningan Tahun Anggaran 2023	823.004.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Meliling-Kerambitan, Kerambitan (3,7Km) Tahun Anggaran 2023	2.692.320.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gluntung - Sp. Uma Bali (12m) Tahun Anggaran 2023	1.353.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Pancoran - Bangal (1,3Km) Tahun Anggaran 2023	879.990.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan Pembetonan jalan Tunjuk Legung - Bungan Kapal, Penebel (2Km) Tahun Anggaran 2023	1.177.629.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Samsam - Telaga Tunjung (3,8 Km) Tahun Anggaran 2023	1.767.360.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Langudu - Bengkel Kawan, Kediri (1,2Km) Tahun Anggaran 2023	592.060.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pelaksanaan rekonstruksi Jalan Ruas Kebon Padangan - Jelijih Gelunggang (2,5Km) Tahun Anggaran 2023	1.935.150.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk Sharing JKN-KBS dari bulan Juli s/d Agustus Tahun Anggaran 2023	1.686.545.280,00	
Belanja Bantuan Keuagan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rehabilitasi Bendung Kayu Puring Daerah Irigasi Selat Kec. Selat (1 paket) Tahun Anggaran 2023	59.660.610,00	
Belanja Bantuan Keuagan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi Mbah Api Kec. Bebandem (1 paket) Tahun Anggaran 2023	118.500.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Bangli untuk Rabat Beton Jalan Bakung-Pelisan, Satra-Yeh Song, Tambahan Kelod-Dalem Purwa, Penyebeh-Melet amprah uang muka 30%	394.118.700,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab. Bangli untuk Rekonstruksi Jalan Songan-Tabu, Jalan Puseh-Tabih amprah uang muka 30%	414.699.900,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kab. Bangli untuk Rekonstruksi Bahu Jalan Tegalalang-Tambahan amprah uang muka 30%	86.099.670,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Bangli untuk Pemeliharaan Ruas Jalan Pengotan-Penyebeh amprah uang muka 30%	120.662.340,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Bangli untuk Pembangunan Fasilitas Pendukung Sirkuit Drag Race amprah uang muka 30% Tahun Anggaran 2023	550.924.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Tabanan untuk Paket Pekerjaan Pavingisasi Jalan Br. Peneng, Baturiti (0,187Km) Tahun Anggaran 2023	199.000.262,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Pembetonan Jalan Subak Pengotan menuju Subak Anyar, Baturiri (1 Km) Tahun Anggaran 2023	391.484.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Bangli untuk Perkerasan Jalan Serokadan-Bangun Lemah, dan Jalan Melati amprah uang muka 30%	357.845.610,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Gedung 2A Tahun Anggaran 2023	1.250.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Tabanan untuk Pembayaran Rehab Ruang Keterampilan SMP N 1 Tabanan (1 Paket) Tahun Anggaran 2023	189.918.359,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Lingkar Margana (0,5Km) Tahun Anggaran 2023	326.400.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Br. Gunung Kangin, Baturiti (0,7Km) Tahun Anggaran 2023	443.760.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Br. Bukit Catu, Baturiti (0,2Km) Tahun Anggaran 2023	289.189.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap I (uang muka 30%) Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kelurahan Dauharu Tahun Anggaran 2023	145.950.778,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Pembetonan Jalan Subak Br. Bukit Catu Desa Candi Kuning Baturiti (0,5 Km) Tahun Anggaran 2023	196.918.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Buleleng untuk Tahap I (Uang Muka) Pembangunan Mall Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2023	1.047.600.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Langudu - Bengkel Kawan, Kediri (1,2Km) Tahun Anggaran 2023	888.090.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kota Denpasar untuk Penyelenggaraan Akses Free Wifi Triwulan I Tahun Anggaran 2023	104.430.731,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Rekonstruksi Jalan Susut-Selat Peken, Penatahan-Susut amprah termin sebesar 50% Tahun Anggaran 2023	521.205.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Srigati,Arjuna,Pelajar,Pemuda,dan Serma Arda (2,5 Km) Tahun Anggaran 2023	877.680.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk rekonstruksi Jalan Manikaji-Puraja, Jalan Tingas-Kubusuih Amprah Termin sebesar 50% Tahun Anggaran 2023	259.919.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Tabanan untuk Pembayaran Layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasangan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas,Obyek Wisata dan Fasilitas Umum Mei s/d Juni Tahun Anggaran 2023	580.517.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Pancoran - Bangal (1,3Km) Tahun Anggaran 2023	586.660.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Tahap II rekonstruksi jalan Nyawah-Apit tukad,Belantih-Pangkung, Belantih-Sabang,Belantih pengejaran, Wanasari-Bonyoh Tahun Anggaran 2023	521.583.400,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gluntung - Sp. Uma Bali (12m) Tahun Anggaran 2023	902.200.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Lingkar Di Desa Bengkel Kawan,Kediri (0,9 Km) Tahun Anggaran 2023	593.070.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan peningkatan Jalan Dawan Kelod-Dawan Kaler Tahun Anggaran 2023	623.985.254,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) sebesar 30% atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sampalan-Toyapakeh Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023	586.500.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk rekonstruksi jalan Bangbang-Penaga-Landih amprah termin sebesar 50% Tahun Anggaran 2023	333.477.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Br. Tegoh Baturiti, Baturiti (1,3 Km) Tahun Anggaran 2023	943.470.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Pembetonan Jalan Tunjuk Legung - Bungan Kapal, Penebel (2 Km) Tahun Anggaran 2023	785.086.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) sebesar 30% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunaksa-Dawan Kaler Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023	530.963.609,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) sebesar 1% atas Pekerjaan Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023	100.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Tabanan untuk Pembayaran Tahap I (Uang Muka) Pembangunan Mall Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2023	3.422.113.561,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Klungkung untuk Pembayaran Layanan Free Wifi Bulan April s/d Juni Tahun Anggaran 2023	315.599.684,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Meliling-Kerambitan, Kerambitan (3,7Km) Tahun Anggaran 2023	1.794.880.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Sharing JKN bulan Juli s/d Agustus Tahun Anggaran 2023	3.050.176.640,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Bangli untuk Penyelenggaraan Akses Free Wifi dari bulan April s/d Juni Tahun Anggaran 2023	401.540.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Sharing JKN bulan Agustus Tahun Anggaran 2023	624.592.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2023	3.221.894.480,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Tabanan untuk Pembayaran Tahap II Pembangunan Mall Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2023	1.996.232.911,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan rekonstruksi Jalan Ruas Kebon Padangan - Jelijih Gelunggang (2,5Km) Tahun Anggaran 2023	1.290.100.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Pembangunan Jembatan Marga - Apuan (30 m) Tahun Anggaran 2023	2.235.400.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Telaga Tunjung-Jegu, Penebel (4,8 Km) Tahun Anggaran 2023	3.394.290.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sp.Bangli - Apuan, Baturiti di Kabupaten Tabanan (1,5 Km) Tahun Anggaran 2023	1.091.190.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Tahap II atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Samsam - Telaga Tunjung (3,8 Km) Tahun Anggaran 2023	2.651.040.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan Juli s/d Agustus 2023 Tahun Anggaran 2023	2.997.993.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan September 2023 Tahun Anggaran 2023	624.592.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap II sebesar 75% atas Pekerjaan Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023	7.500.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kota Denpasar untuk Penyelenggaraan Akses Free Wifi Triwulan II Tahun Anggaran 2023	136.005.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran uang muka Pembangunan Balai Desa Belantih Tahun Anggaran 2023	154.179.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk uang muka Perkerasan bahu jalan Muhamad Hatta, Tirta Campuan, Tirta Alas Arum, Tirta Taman Sari/I, Tirta Geduh, Tirta Merku, Tirta Pebin/i, Tirta Pegat, Tirta Bulakan, Tirta Jaga Satru TA 2023	184.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Pura Kanjeng Ratu Kidul Tahun Anggaran 2023	272.368.800,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran uang muka Pembangunan Balai Desa Selulung Tahun Anggaran 2023	175.998.300,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Sharing JKN-KBS bulan September 2023 Tahun Anggaran 2023	1.611.414.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Gianyar untuk Subak/Subak Abian Tahun Anggaran 2023	380.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Lanjutan Pembangunan Jalan di Pura Segara Rupek, Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak Tahun Anggaran 2023	4.294.086.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Pura Luhur Pasatan Tahun Anggaran 2023	232.966.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Pura Kembar Perancak Tahun Anggaran 2023	174.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Karangasem untuk pembayaran tahap I (uang muka) Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik tahun Anggaran 2023	1.873.289.267,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab.Buleleng untuk sarana dan prasarana Pembangunan Mall Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2023	1.229.879.790,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Pura Pegunungan Tahun Anggaran 2023	110.193.900,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Sharing JKN bulan September s/d Oktober Tahun Anggaran 2023	2.997.993.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Peningkatan jalan paku - pertigaan banjar bingin Tahun Anggaran 2023	1.063.143.990,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Pura Segara Pengambangan Tahun Anggaran 2023	281.934.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Sharing JKN bulan Oktober Tahun Anggaran 2023	624.592.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Sharing JKN bulan September Tahun Anggaran 2023	1.397.937.520,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Tahap II Pembangunan jembatan Yehembang-Kedisian Tahun Anggaran 2023	1.743.723.100,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap II Pemeliharaan Berkala Jalan Sampalan - Toyapakeh Tahun Anggaran 2023	586.500.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap III atas pelaksanaan Pembetonan Jalan Subak Br. Bukit Catu Desa Candi Kuning Baturiti (0,5 Km) Tahun Anggaran 2023	492.295.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap III atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Br. Gunung Kangin, Baturiti (0,7Km) Tahun Anggaran 2023	739.600.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap III atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Lingkar Margana (0,5Km) Tahun Anggaran 2023	544.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap II Pembangunan Jalan Ruas Jalan Tulamben - Ancak (Lanjutan) Kec. Kubu (1,2 km) Tahun Anggaran 2023	1.036.205.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap II Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Bungaya - Telaga Mas Kec. Karangasem (1 km) Tahun Anggaran 2023	860.622.700,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap III atas pelaksanaan Pembetonan Jalan Subak Pengotan menuju Subak Anyar, Baturiti (1 Km) Tahun Anggaran 2023	978.710.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran tahap III atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Br. Bukit Catu, Baturiti (0,2Km) Tahun Anggaran 2023	481.982.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab. Tabanan untuk Pembayaran Tahap III atas pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Lingkar Di Desa Bengkel Kawan,Kediri (0,9 Km) Tahun Anggaran 2023	988.450.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BPBD Kab. Buleleng Tahun Anggaran 2023	1.595.271.900,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pesinggahan - Pangi Tahun Anggaran 2023	536.558.074,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Krematorium Kec. Abang (1 Paket) Tahun Anggaran 2023	2.372.089.065,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Jalan Ruas Jalan Junggul - Pr. Panggul Besi (Lanjutan) Kec. Rendang (1,1 KM) Tahun Anggaran 2023	425.142.900,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pakseballi - Lapangan Pakseballi Tahun Anggaran 2023	767.213.433,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Lanjutan penataan pedestrian penelokan kintamani tahap II Tahun Anggaran 2023	469.986.900,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tihingadi - Besan Tahun Anggaran 2023	167.254.416,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pikat - Pesinggahan Tahun Anggaran 2023	481.909.658,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap I (uang muka) Pembangunan Wantilan Budaya Kabupaten Karangasem (1 Unit) Tahun Anggaran 2023	1.486.221.133,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Olahraga Kecamatan Susut Tahun Anggaran 2023	118.492.500,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Buayang - Babung Tahun Anggaran 2023	860.697.364,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pesinggahan - Gelogor Tahun Anggaran 2023	1.410.190.563,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Dawan Kaler - Banjar Kayehan Tahun Anggaran 2023	786.663.778,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tihingadi - Gunaksa Tahun Anggaran 2023	512.417.195,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Klungkung untuk pembayaran Tahap I (uang muka) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kusamba - Dawan Tahun Anggaran 2023	541.282.214,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Tahap II Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Peninggaran - Taman Kec. Karangasem (1 km) Tahun Anggaran 2023	894.452.300,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Buleleng untuk Pembayaran Layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasangan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas,Obyek Wisata dan Fasilitas Umum Pebruari s/d Juni Tahun Anggaran 2023	926.088.566,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk Pembangunan Gedung Rawat Inap RSU Bangli (Gedung 2A RSU Bangli) Tahap II Tahun Anggaran 2023	7.125.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Sharing JKN bulan Oktober Tahun Anggaran 2023	1.545.466.160,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan September s/d Oktober 2023 Tahun Anggaran 2023	1.653.492.960,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Bangli untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan Nopember Tahun Anggaran 2023	624.592.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Bangli untuk Penyelenggaraan akses free Wifi dari bulan Juli s/d September Tahun Anggaran 2023	555.505.203,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Gianyar untuk Penyelenggaraan akses Free Wifi dari bulan Juni s/d September Tahun Anggaran 2023	929.535.088,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Tabanan untuk Pembayaran Layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasangan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas,Obyek Wisata dan Fasilitas Umum Juli s/d September Tahun Anggaran 2023	890.467.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kota Denpasar untuk Penyelenggaraan Akses Free Wifi Triwulan III Tahun Anggaran 2023	136.350.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Buleleng untuk Pembayaran Layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasangan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas,Obyek Wisata dan Fasilitas Umum Juli s/d September Tahun Anggaran 2023	726.199.728,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Tabanan untuk Pembayaran Layanan Free Wifi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasangan layanan free wifi pada Desa Adat,Puskesmas,Obyek Wisata dan Fasilitas Umum Oktober s/d Desember Tahun Anggaran 2023	890.300.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Sharing JKN-KBS Dari Bulan Desember 2023 Tahun Anggaran 2023	1.616.070.960,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kota Denpasar untuk renovasi Gedung Mall Pelayanan Publik, pengadaan peralatan dan meubeleur tahap I tahun Anggaran 2023	966.879.450,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Tabanan untuk pembayaran Sharing JKN-KBS Dari Bulan Oktober s/d November 2023 Tahun Anggaran 2023	3.236.178.960,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Sharing JKN-KBS Bulan Juli sampai Dengan Desember Tahun Anggaran 2023	2.561.932.800,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab.Klungkung Untuk Pembayaran Layanan Free Wifi Bulan Juli s/d September Tahun Anggaran 2023	294.479.711,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Karangasem untuk Penyelenggaraan akses free Wifi dari bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2023	651.288.300,00	
Belanja Bantuan keuangan Khusus Kepada Kota Denpasar untuk Penyelenggaraan Akses Free Wifi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.	136.290.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Bangli Untuk Pembayaran Sharing JKN Bulan Desember 2023.	624.592.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Bangli Untuk penyelenggaraan Akses Free Wifi Dari Bulan Oktober Sampai Dengan Desember Tahun Anggaran 2023	565.685.497,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Jembrana untuk Pembayaran Layanan Free Wifi serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemasangan Layanan Free Wifi pada Desa Adat,Puskesmas,Obyek Wisata dan Fasilitas Umum Juli s/d Desember Tahun Anggaran 2023	579.108.679,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Klungkung Untuk Pembayaran Layanan Free Wifi Bulan Oktober sampai dengan Desember 2023	298.431.321,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Jembrana untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan Nopember s/d Desember 2023 Tahun Anggaran 2023	1.653.492.960,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Buleleng untuk Pembayaran Layanan Free Wifi serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemasangan Layanan Free Wifi pada Desa Adat,Puskesmas,Obyek Wisata dan Fasilitas Umum oktober s/d Desember TA 2023	725.170.472,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali Kepada Kabupaten Gianyar Dalam Rangka Penyelenggaraan Akses Free Wifi Bulan Oktober s/d Desember Tahun Anggaran 2023.	684.844.655,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng untuk pembayaran Sharing JKN-KBS dari bulan Nopember s/d Desember 2023 Tahun Anggaran 2023	2.997.993.600,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten Karangasem untuk Penyelenggaraan akses free Wifi dari bulan Juli s/d Desember Tahun Anggaran 2023	780.866.959,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Sharing JKN Bulan Desember Tahun Anggaran 2023	1.607.392.080,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Karangasem untuk pembayaran Sharing JKN bulan Nopember Tahun Anggaran 2023	1.530.170.320,00	
Kesalahan pemilihan rekening STS Pengembalian BKK pada BKK Kabupaten/Kota seharusnya BKK Provinsi Kepada Desa	18.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		221.589.676.608,00
Reklasifikasi dan Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan		
Reklasifikasi Pencatatan Terkait Belanja Bantuan Keuangan		
22.00/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.0.02.0000/P.02/5/2023	865.500.000,00	
Pengembalian Kelebihan BKK Tahun 2023	300.000,00	
Pengembalian BKK Pengendalian Penduduk Pendaatang Tahun 2023	4.184.350,00	
Pengembalian Kelebihan BKK TA 2023	2.400.000,00	
Pengembalian Kelebihan BKK TA 2023	2.700.000,00	
Pengembalian Kelebihan BKK Tahun 2023	2.100.000,00	
Pengembalian Kelebihan BKK TA 2023	1.500.000,00	
Pengembalian Kelebihan BKK TA 2023	2.700.000,00	
Pengembalian Kelebihan BKK Tahun 2023	6.300.000,00	
Pengembalian kelebihan pembayaran 30% Pembangunan Krematorium Kec. Abang	555.488.400,00	
Jumlah Reklasifikasi dan Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan		1.443.172.750,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Bersih		220.146.503.858,00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	539.100.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	2.251.500.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	1.185.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	665.400.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	808.500.000,00	

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	18.000.000,00	
Jumlah Reklas dan Pengembalian Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		1.007.807.600,00
Jumlah Bersih Jumlah Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		65.015.492.400,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		285.161.996.258,00

Kas Dana Bos
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2023	PENDAPATAN BOS KINERJA 2023	KEMBALI KE KASDA TH. 2023	KOREKSI SALDO AUDITED 2022	PENGEMBALIAN BELANJA 2023	BELANJA BOS KINERJA 2023	BELANJA BOS REGULER 2023	BELANJA DARI SISA BOS 2021	SISA DANA BOS 2023	SISA DANA BOS REKENING KORAN
1	Badung	SLBN 1 Badung	0320105000946	132.222.399,00	1.008.027.374,00	160.000.000,00	-	-	-	139.068.159,00	978.948.781,00	100.817.136,00	81.415.697,00	81.415.697,00
2	Badung	SMAN 1 ABIANSEMAL	0400105000529	113.968.002,03	2.751.394.718,00	-	-	-	-	-	2.809.057.346,00	-	56.305.374,03	56.305.374,03
3	Badung	SMAN 1 KUTA	0330105000227	231.109.268,54	2.756.574.004,00	-	-	-	-	-	2.670.925.428,00	141.737.144,00	175.020.700,54	175.020.700,54
4	Badung	SMAN 1 KUTA SELATAN	0320105000050	0,01	1.899.450.000,00	90.000.000,00	-	-	-	90.000.000,00	1.899.450.000,00	-	0,01	0,01
5	Badung	SMAN 1 KUTA UTARA	0360105000040	240.081.605,00	3.055.888.395,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	3.242.676.608,00	-	53.293.392,00	53.293.392,00
6	Badung	SMAN 1 MENGWI	0260105000480	73.413.630,88	2.611.765.811,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	2.478.330.407,00	-	206.849.034,88	206.849.034,88
7	Badung	SMAN 1 PETANG	0400105000280	52.564.929,49	1.605.064.814,00	-	-	-	-	-	1.593.207.728,00	44.058.142,00	20.363.873,49	20.363.873,49
8	Badung	SMAN 2 ABIANSEMAL	0400105000883	59.858.364,00	2.045.601.636,00	-	-	-	-	-	2.072.594.167,00	-	32.865.833,00	32.865.833,00
9	Badung	SMAN 2 KUTA	0130105000410	1.892.652,97	1.931.592.364,00	-	-	-	-	-	1.926.970.481,00	-	6.514.535,97	6.514.535,97
10	Badung	SMAN 2 KUTA SELATAN	0320105000958	29.046.730,00	2.241.876.414,00	90.000.000,00	-	-	-	87.427.471,00	2.241.601.139,00	-	31.894.534,00	31.894.534,00
11	Badung	SMAN 2 KUTA UTARA	-	-	1.099.980.000,00	45.000.000,00	-	-	-	44.999.943,00	1.099.977.121,00	-	2.936,00	2.936,00
12	Badung	SMAN 2 MENGWI	0090105001860	18.670.958,84	2.297.923.820,00	90.000.000,00	-	-	-	90.000.000,00	2.190.844.039,00	-	125.750.739,84	125.750.739,84
13	Badung	SMKN 1 KUTA SELATAN	0320105000568	89.438.626,92	4.420.450.439,00	-	-	-	-	-	4.402.881.872,00	-	107.007.193,92	107.007.193,92
14	Badung	SMKN 1 PETANG	0400105000239	154.510.695,58	704.342.649,00	-	-	-	187.500,00	-	689.323.462,00	129.693.697,00	40.023.685,58	40.023.685,58
15	Bangli	SLBN 1 BANGLI	0200105001495	2.223.666,25	540.512.273,00	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	540.766.452,00	-	1.969.487,25	1.969.487,25
16	Bangli	SMAN 1 BANGLI	0200105001462	17.645.597,33	1.751.638.681,00	155.000.000,00	-	-	-	-	1.741.970.073,00	-	182.314.205,33	182.314.205,33
17	Bangli	SMAN 1 KINTAMANI	0480105000053	2.841.935,12	1.733.840.622,00	60.000.000,00	-	-	-	-	1.729.217.826,00	2.340.700,00	65.124.031,12	65.124.031,12
18	Bangli	SMAN 1 SUSUT	0200105001491	26.676.230,00	1.410.073.770,00	-	-	-	-	-	1.406.944.459,00	26.676.230,00	3.129.311,00	3.129.311,00
19	Bangli	SMAN 1 TEMBUKU	0200105001463	28.969.490,74	1.412.068.926,00	45.000.000,00	-	-	-	44.999.622,00	1.392.275.033,00	26.390.250,00	22.373.511,74	22.373.511,74
20	Bangli	SMAN 2 BANGLI	0200105001468	384.891,61	1.473.115.109,00	-	-	-	-	-	1.153.630.702,00	319.869.298,00	0,61	0,61
21	Bangli	SMKN 1 BANGLI	0200105001465	9,13	1.460.099.991,00	-	-	-	-	-	1.460.100.000,00	-	0,13	0,13
22	Bangli	SMKN 1 KINTAMANI	0480105000077	3.157.472,37	322.342.528,00	25.000.000,00	-	-	-	24.980.500,00	325.480.157,00	-	39.343,37	39.343,37
23	Bangli	SMKN 1 SUSUT	0200105001490	9.142.268,27	558.553.090,00	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00	563.365.796,00	-	4.329.562,27	4.329.562,27
24	Bangli	SMKN 1 TEMBUKU	0200105001501	2.632.003,93	1.617.501.280,00	-	-	-	-	-	1.617.270.509,00	-	2.862.774,93	2.862.774,93
25	Bangli	SMKN 2 BANGLI	0200105001452	20.084.344,85	1.653.039.632,00	-	-	-	-	-	1.669.347.757,00	-	3.776.219,85	3.776.219,85
26	Bangli	SMKN 2 KINTAMANI	0480105000089	69.241.879,97	828.400.879,00	45.000.000,00	-	-	-	42.543.000,00	812.465.537,00	-	87.634.221,97	87.634.221,97
27	Bangli	SMKN 3 BANGLI	0200105001464	0,32	438.960.000,00	-	-	-	-	-	438.960.000,00	-	0,32	0,32
28	Bangli	SMKN 3 KINTAMANI	0480105000065	66.625.944,57	1.215.331.427,00	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00	1.257.825.712,00	-	24.131.659,57	24.131.659,57
29	Bangli	SMKN 4 BANGLI	0200105001499	505.152,93	520.707.310,00	-	-	-	-	-	520.761.974,00	-	450.488,93	450.488,93
30	Buleleng	SLBN 1 BULELENG	0140105006581	570,77	554.400.000,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	554.400.000,00	-	570,77	570,77
31	Buleleng	SLBN 2 BULELENG	0140105005566	7.731.541,08	601.293.500,00	-	-	-	-	-	601.407.442,00	7.530.750,00	86.849,08	86.849,08
32	Buleleng	SMAN 1 BANJAR	0150105000962	18.850,84	1.466.993.997,00	-	-	-	-	-	1.466.511.778,00	-	501.069,84	501.069,84
33	Buleleng	SMAN 1 BUSUNGBIU	0150105001331	54.591.794,77	1.345.595.480,00	45.000.000,00	-	-	-	44.997.726,00	1.347.293.337,00	22.309.794,00	30.586.417,77	30.586.417,77
34	Buleleng	SMAN 1 GEROKGAK	0150105000960	13.451.247,87	1.532.748.752,00	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00	1.544.643.749,00	-	1.556.250,87	1.556.250,87
35	Buleleng	SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	0140105006223	157.892.010,97	1.456.357.684,00	-	-	-	-	-	1.511.422.308,00	78.935.000,00	23.892.386,97	23.892.386,97
36	Buleleng	SMAN 1 SAWAN	0140105006209	38.099.695,76	1.148.100.305,00	-	-	-	-	-	1.148.061.431,00	37.538.023,00	600.546,76	600.546,76
37	Buleleng	SMAN 1 SERIRIT	0150105001223	672.236,36	1.617.903.773,00	90.000.000,00	-	-	-	76.104.751,00	1.617.668.021,00	-	14.803.237,36	14.803.237,36
38	Buleleng	SMAN 1 SINGARAJA	0140105006235	529.791.569,27	2.051.248.988,00	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	2.048.216.655,00	528.830.687,00	3.993.215,27	3.993.215,27
39	Buleleng	SMAN 1 SUKASADA	0140105006210	1,44	817.200.000,00	-	-	-	-	-	817.199.901,00	-	100,44	100,44

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2023	PENDAPATAN BOS KINERJA 2023	KEMBALI KE KASDA TH. 2023	KOREKSI SALDO AUDITED 2022	PENGEMBALIAN BELANJA 2023	BELANJA BOS KINERJA 2023	BELANJA BOS REGULER 2023	BELANJA DARI SISA BOS 2021	SISA DANA BOS 2023	SISA DANA BOS REKENING KORAN
40	Buleleng	SMAN 1 TEJAKULA	0140105006194	8.991.689,18	1.422.008.759,00	-	-	-	-	-	1.416.510.258,00	8.885.250,00	5.604.940,18	5.604.940,18
41	Buleleng	SMAN 2 BANJAR	0150105001337	25.060.307,18	1.774.369.041,00	25.000.000,00	-	-	-	23.802.832,00	1.724.757.306,00	-	75.869.210,18	75.869.210,18
42	Buleleng	SMAN 2 BUSUNGBIU	0470105000074	37.698.801,94	661.047.485,00	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00	697.418.915,00	-	1.327.371,94	1.327.371,94
43	Buleleng	SMAN 2 GEROKGAK	0150105001333	86.835,19	676.722.143,00	90.000.000,00	-	-	-	70.006.038,00	676.722.143,00	-	20.080.797,19	20.080.797,19
44	Buleleng	SMAN 2 SINGARAJA	0140105006171	36.892.262,67	1.937.770.974,00	-	-	-	-	-	1.956.539.605,00	18.063.236,00	60.395,67	60.395,67
45	Buleleng	SMAN 2 TEJAKULA	0140105006302	2.550.330,18	740.924.775,00	-	-	-	-	-	743.392.900,00	-	82.205,18	82.205,18
46	Buleleng	SMAN 3 SINGARAJA	0140105006247	6.006.975,60	1.860.593.025,00	45.000.000,00	-	-	-	44.982.900,00	1.858.594.782,00	-	8.022.318,60	8.022.318,60
47	Buleleng	SMAN 4 SINGARAJA	0140105006285	279.041.201,00	2.234.556.018,00	90.000.000,00	-	-	-	74.307.710,00	1.990.668.026,00	137.405.581,00	401.215.902,00	401.215.902,00
48	Buleleng	SMAN BALI MANDARA	0460105000655	110.816.651,89	547.980.062,00	160.000.000,00	-	-	-	159.999.462,00	502.708.145,00	36.589.945,00	119.499.161,89	119.499.161,89
49	Buleleng	SMKN 1 BUSUNGBIU	0150105001227	39.650.153,47	763.921.984,00	-	-	-	-	-	732.710.447,00	10.000.000,00	60.861.690,47	60.861.690,47
50	Buleleng	SMKN 1 GEROKGAK	0150105001335	626.968,67	1.681.293.031,00	-	-	-	-	-	1.681.447.936,00	-	472.063,67	472.063,67
51	Buleleng	SMKN 1 KUBUTAMBAHAN	0140105006156	481.800,99	1.767.871.934,00	-	-	-	-	-	1.767.737.986,00	-	615.748,99	615.748,99
52	Buleleng	SMKN 1 SAWAN	0140105006168	191.353.787,04	1.704.112.422,00	-	-	-	-	-	1.817.606.210,00	50.870.847,00	26.989.152,04	26.989.152,04
53	Buleleng	SMKN 1 SERIRIT	0150105001229	55.907.868,37	2.039.100.599,00	-	-	-	-	-	2.042.557.793,00	7.489.745,00	44.960.929,37	44.960.929,37
54	Buleleng	SMKN 1 SINGARAJA	0140105006297	49.965,86	2.739.790.175,00	-	-	-	-	-	2.627.932.405,00	-	111.907.735,86	111.907.735,86
55	Buleleng	SMKN 1 SUKASADA	0140105006259	33.614.606,15	2.598.705.394,00	-	-	-	-	-	2.583.567.578,00	30.578.446,00	18.173.976,15	18.173.976,15
56	Buleleng	SMKN 1 TEJAKULA	0140105006273	90.210.363,53	1.563.897.243,00	25.000.000,00	-	-	-	24.541.799,00	1.514.117.146,00	2.803.700,00	137.644.961,53	137.644.961,53
57	Buleleng	SMKN 2 SERIRIT	0150105001225	5.384.406,58	1.352.057.380,00	-	-	-	-	-	1.348.476.348,00	5.382.390,00	3.583.048,58	3.583.048,58
58	Buleleng	SMKN 2 SINGARAJA	0140105006260	20.752.449,00	2.870.767.551,00	-	-	-	-	-	2.887.553.053,00	-	3.966.947,00	3.966.947,00
59	Buleleng	SMKN 2 Tejakula	0140105000097	341.083,00	316.492.242,00	45.000.000,00	-	-	-	44.882.872,00	316.051.194,00	-	899.259,00	899.259,00
60	Buleleng	SMKN 3 SINGARAJA	0140105006182	-	4.216.320.000,00	-	-	-	-	-	4.216.320.000,00	-	-	-
61	Buleleng	SMKN BALI MANDARA	0460105000667	124.843.931,00	638.907.430,00	-	-	-	-	-	654.077.177,00	-	109.674.184,00	109.674.184,00
62	Denpasar	SLBN 1 DENPASAR	0340105000152	109.315,34	956.230.698,00	70.000.000,00	-	-	-	68.728.977,00	949.394.253,00	-	8.216.783,34	8.216.783,34
63	Denpasar	SLBN 2 DENPASAR	0340105000151	943.727,67	852.673.325,00	36.250.000,00	-	-	-	36.175.187,00	852.417.783,00	-	1.274.082,67	1.274.082,67
64	Denpasar	SLBN 3 DENPASAR	0100105000277	222.237,00	923.220.000,00	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	919.218.045,00	-	4.224.192,00	4.224.192,00
65	Denpasar	SMAN 1 DENPASAR	0270105000091	842.205.855,14	2.673.153.625,00	90.000.000,00	-	-	4.856.190,00	89.868.086,00	2.501.079.606,00	890.965.426,00	128.302.552,14	128.302.552,14
66	Denpasar	SMAN 10 DENPASAR	0490105000147	21.059,00	1.240.770.000,00	-	-	-	-	-	1.240.770.000,00	10.977,00	10.082,00	10.082,00
67	Denpasar	SMAN 2 DENPASAR	0340105000153	193.079.242,00	2.889.338.491,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	2.789.852.212,00	65.099.750,00	227.465.771,00	227.465.771,00
68	Denpasar	SMAN 3 DENPASAR	0100105016788	2.491.109,11	1.566.811.164,00	100.000.000,00	-	-	-	99.965.900,00	1.566.996.861,00	-	2.339.512,11	2.339.512,11
69	Denpasar	SMAN 4 DENPASAR	0390105000041	628.298,76	2.594.352.276,00	45.000.000,00	-	-	-	44.975.800,00	2.591.429.899,00	-	3.574.875,76	3.574.875,76
70	Denpasar	SMAN 5 DENPASAR	0490105000018	69.080.052,41	2.388.766.620,00	-	-	-	-	-	2.402.783.465,00	2.856.672,00	52.206.535,41	52.206.535,41
71	Denpasar	SMAN 6 DENPASAR	0110105006211	24.672.133,12	1.816.625.536,00	-	-	-	-	-	1.814.405.049,00	2.232.973,00	24.659.647,12	24.659.647,12
72	Denpasar	SMAN 7 DENPASAR	0110105006201	2.627.820.874,16	2.885.350.578,00	90.000.000,00	-	-	-	89.985.200,00	2.887.590.838,00	1.050.678.235,00	1.574.917.179,16	1.574.917.179,16
73	Denpasar	SMAN 8 DENPASAR	0110105006195	318.136.707,91	2.811.415.401,00	-	-	-	7.448.910,00	-	2.985.336.361,00	-	151.664.657,91	151.664.657,91
74	Denpasar	SMAN 9 DENPASAR	0100105000344	222.832,00	1.334.442.139,00	-	-	-	-	-	1.333.270.846,00	-	1.394.125,00	1.394.125,00
75	Denpasar	SMAN 11 DENPASAR	0330105000377	-	856.680.000,00	-	-	-	-	-	853.385.800,00	-	3.294.200,00	3.294.200,00
76	Denpasar	SMKN 1 DENPASAR	0500105000210	52.150.257,00	5.101.879.743,00	-	-	-	-	-	5.063.998.082,00	38.275.257,00	51.756.661,00	51.756.661,00
77	Denpasar	SMKN 2 DENPASAR	0110105006277	33.688.881,22	2.389.291.119,00	-	-	-	-	-	2.363.134.534,00	33.688.881,00	26.156.585,22	26.156.585,22
78	Denpasar	SMKN 3 DENPASAR	0270105000088	56.288.085,00	3.133.494.957,00	-	-	-	-	-	3.119.813.288,00	14.583.042,00	55.386.712,00	55.386.712,00
79	Denpasar	SMKN 4 DENPASAR	0100105016789	36.234.410,42	2.132.989.198,00	-	-	-	-	-	2.093.581.283,00	-	75.642.325,42	75.642.325,42
80	Denpasar	SMKN 5 DENPASAR	0100105016895	1.352.649.912,10	3.881.596.590,00	-	-	-	-	-	3.912.317.356,00	1.236.265.599,00	85.663.547,10	85.663.547,10
81	Denpasar	SMKN 6 DENPASAR	0270105000052	-	109.620.000,00	-	-	-	-	-	109.573.495,00	-	46.505,00	46.505,00
82	Gianyar	SLBN 1 GIANYAR	0180105002681	1.327.890,00	981.502.087,00	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	982.079.399,00	379.977,00	370.601,00	370.601,00
83	Gianyar	SMAN 1 BLAHBATUH	0180105002685	369.005,76	2.222.083.480,00	-	-	-	-	-	2.222.212.706,00	212.485,00	27.294,76	27.294,76

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2023	PENDAPATAN BOS KINERJA 2023	KEMBALI KE KASDA TH. 2023	KOREKSI SALDO AUDITED 2022	PENGEMBALIAN BELANJA 2023	BELANJA BOS KINERJA 2023	BELANJA BOS REGULER 2023	BELANJA DARI SISA BOS 2021	SISA DANA BOS 2023	SISA DANA BOS REKENING KORAN
84	Gianyar	SMAN 1 GIANYAR	0180105002684	15.742.206,67	2.399.225.118,00	100.000.000,00	-	-	-	99.499.165,00	2.400.218.929,00	-	15.249.230,67	15.249.230,67
85	Gianyar	SMAN 1 PAYANGAN	0310105000084	138.614,00	971.663.622,00	-	-	-	-	-	971.575.000,00	2.236,00	225.000,00	225.000,00
86	Gianyar	SMAN 1 SUKAWATI	0300105000200	104.091.085,00	2.175.071.963,00	-	-	-	-	-	2.174.116.277,00	43.728.037,00	61.318.734,00	61.318.734,00
87	Gianyar	SMAN 1 TAMPAKSIRING	0520105000023	10.632.325,46	1.603.035.283,00	-	-	-	-	-	1.602.894.167,00	-	10.773.441,46	10.773.441,46
88	Gianyar	SMAN 1 TEGALLALANG	0190105000298	1.322.093,90	1.528.821.454,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	1.508.114.117,00	-	22.029.430,90	22.029.430,90
89	Gianyar	SMAN 1 UBUD	0190105000315	245.337,73	1.864.234.672,00	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00	1.864.480.000,00	-	9,73	9,73
90	Gianyar	SMAN 2 GIANYAR	0180105002542	-	772.280.000,00	-	-	-	-	-	718.859.766,00	-	53.420.234,00	53.420.234,00
91	Gianyar	SMAN 2 SUKAWATI	0300105000885	-	686.280.000,00	-	-	-	-	-	686.202.157,00	-	77.843,00	77.843,00
92	Gianyar	SMKN 1 GIANYAR	0180105002683	274.476,94	2.331.145.524,00	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00	2.331.420.000,00	-	0,94	0,94
93	Gianyar	SMKN 1 MAS UBUD	0190105000303	101.367.761,00	2.319.015.772,00	-	-	-	-	-	2.277.785.928,00	105.675.981,00	36.921.624,00	36.921.624,00
94	Gianyar	SMKN 1 SUKAWATI	0300105000201	3.542.638,71	1.095.415.788,00	180.000.000,00	20.000.000,00	-	-	159.732.136,00	1.098.152.550,00	-	1.073.740,71	1.073.740,71
95	Gianyar	SMKN 1 TAMPAK SIRING	0520105000010	42.146.298,00	2.797.650.000,00	-	-	-	-	-	2.781.070.076,00	15.139.790,00	43.586.432,00	43.586.432,00
96	Gianyar	SMKN 1 TEGALLALANG	0190105000327	67.890.005,00	2.014.608.687,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	1.990.439.021,00	13.210.656,00	78.849.015,00	78.849.015,00
97	Gianyar	SMKN 2 SUKAWATI	0300105000202	189.490.598,91	2.720.784.843,00	-	-	-	-	-	2.892.115.702,00	-	18.159.739,91	18.159.739,91
98	Gianyar	SMKN 2 TEGALLALANG	0190105000286	2.520.042,00	144.118.090,00	-	-	-	-	-	145.889.910,00	202.500,00	545.722,00	545.722,00
99	Gianyar	SMKN 3 SUKAWATI	0300105000203	6.498.717,33	1.013.055.507,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	1.014.240.797,00	3.500.000,00	1.813.427,33	1.813.427,33
100	Jembrana	SLBN 1 JEMBRANA	0160105000722	1.413.560,00	765.892.174,00	36.250.000,00	-	-	40.000,00	36.290.000,00	765.825.501,00	-	1.480.233,00	1.480.233,00
101	Jembrana	SMAN 1 MELAYA	0160105000735	62.459.162,48	1.598.226.612,00	155.000.000,00	-	-	-	151.147.719,00	1.560.409.594,00	12.848.055,00	91.280.406,48	91.280.406,48
102	Jembrana	SMAN 1 MENDOYO	0160105000720	144.735.994,22	1.455.064.006,00	-	-	-	-	-	1.506.313.606,00	-	93.486.394,22	93.486.394,22
103	Jembrana	SMAN 1 NEGARA	0160105000725	2.777.231,48	2.077.076.980,00	25.000.000,00	-	-	-	24.966.819,00	2.076.388.254,00	-	3.499.138,48	3.499.138,48
104	Jembrana	SMAN 1 PEKUTATAN	0420105000029	42.062.927,25	1.327.837.073,00	-	-	-	-	-	1.314.710.512,00	8.476.550,00	46.712.938,25	46.712.938,25
105	Jembrana	SMAN 2 MENDOYO	0160105000724	18.023.149,97	1.615.976.853,00	-	-	-	-	-	1.611.742.174,00	5.777.513,00	16.480.315,97	16.480.315,97
106	Jembrana	SMAN 2 NEGARA	0160105000734	4.064.707,75	1.986.812.926,00	-	-	-	-	-	1.987.400.000,00	-	3.477.633,75	3.477.633,75
107	Jembrana	SMAN 3 NEGARA	0160105003101	-	433.200.000,00	-	-	-	-	-	433.040.876,00	-	159.124,00	159.124,00
108	Jembrana	SMKN 1 NEGARA	0160105000890	1.862.586,23	2.253.554.856,00	-	-	-	-	-	2.236.736.335,00	1.036.500,00	17.644.607,23	17.644.607,23
109	Jembrana	SMKN 2 NEGARA	0160105000888	645.640.463,00	1.855.243.015,00	-	-	-	-	-	1.820.128.884,00	15.541.940,00	665.212.654,00	665.212.654,00
110	Jembrana	SMKN 3 NEGARA	0160105000726	55.585.588,14	724.226.547,00	-	-	-	-	-	754.486.679,00	14.156.314,00	11.169.142,14	11.169.142,14
111	Jembrana	SMKN 4 NEGARA	0160105000727	22.960.652,51	1.481.771.055,00	-	-	-	-	-	1.497.220.546,00	4.382.510,00	3.128.651,51	3.128.651,51
112	Jembrana	SMKN 5 NEGARA	0420105000030	211.199.650,99	1.305.239.073,00	-	-	-	-	-	1.253.571.693,00	35.342.526,00	227.524.504,99	227.524.504,99
113	Karangasem	SLBN 1 KARANGASEM	0220105002471	11.021.686,57	714.070.901,00	100.000.000,00	-	-	-	99.775.760,00	711.329.740,00	6.933.903,00	7.053.184,57	7.053.184,57
114	Karangasem	SMAN 1 ABANG	0220105000215	73.720.576,00	893.592.874,00	155.000.000,00	-	-	-	153.523.400,00	920.569.210,00	9.794.925,00	38.425.915,00	38.425.915,00
115	Karangasem	SMAN 1 AMLAPURA	0220105002470	139.601,89	1.823.042.979,00	-	-	-	-	-	1.821.281.913,00	-	1.900.667,89	1.900.667,89
116	Karangasem	SMAN 1 BEBANDEM	0220105002462	412.981,55	1.564.544.468,00	45.000.000,00	-	-	-	44.525.600,00	1.561.630.916,00	-	3.800.933,55	3.800.933,55
117	Karangasem	SMAN 1 KUBU	0220105002459	7.336.294,82	1.357.531.951,00	45.000.000,00	-	-	-	44.984.500,00	1.359.275.928,00	5.508.200,00	99.617,82	99.617,82
118	Karangasem	SMAN 1 MANGGIS	0220105002476	3.103.081,77	1.452.161.393,00	-	-	-	-	-	1.426.809.999,00	-	28.454.475,77	28.454.475,77
119	Karangasem	SMAN 1 RENDANG	0510105000066	24.172.509,87	1.537.551.689,00	-	-	-	-	-	1.469.005.327,00	10.021.214,00	82.697.657,87	82.697.657,87
120	Karangasem	SMAN 1 SELAT	0220105002473	168.870.300,33	1.626.239.611,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	1.608.527.592,00	61.273.332,00	125.308.987,33	125.308.987,33
121	Karangasem	SMAN 1 SIDEMEN	0220105002469	9.419.413,50	1.294.295.339,00	-	-	-	-	-	1.279.798.296,00	-	23.916.456,50	23.916.456,50
122	Karangasem	SMAN 2 AMLAPURA	0220105002457	142.649.771,56	1.673.592.113,00	45.000.000,00	-	-	-	44.994.200,00	1.742.950.930,00	44.332.594,00	28.964.160,56	28.964.160,56
123	Karangasem	SMAN 3 AMLAPURA	0530105000026	7.923.616,47	1.576.390.860,00	45.000.000,00	-	-	-	44.816.600,00	1.557.203.578,00	7.123.110,00	20.171.188,47	20.171.188,47
124	Karangasem	SMKN 1 ABANG	0220105002472	109.209.708,23	1.913.869.803,00	45.000.000,00	-	-	-	44.513.100,00	1.946.857.420,00	-	76.708.991,23	76.708.991,23
125	Karangasem	SMKN 1 AMLAPURA	0220105002490	32.992.564,32	2.629.331.893,00	-	-	-	-	-	2.611.308.554,00	31.931.324,00	19.084.579,32	19.084.579,32
126	Karangasem	SMKN 1 BEBANDEM	0220105002477	3.956.186,57	910.633.658,00	45.000.000,00	-	-	-	39.769.800,00	918.099.304,00	-	1.720.740,57	1.720.740,57
127	Karangasem	SMKN 1 KUBU	0220105002445	226.112,00	2.400.191.042,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	2.400.191.042,00	-	226.112,00	226.112,00

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2023	PENDAPATAN BOS KINERJA 2023	KEMBALI KE KASDA TH. 2023	KOREKSI SALDO AUDITED 2022	PENGEMBALIAN BELANJA 2023	BELANJA BOS KINERJA 2023	BELANJA BOS REGULER 2023	BELANJA DARI SISA BOS 2021	SISA DANA BOS 2023	SISA DANA BOS REKENING KORAN
128	Karangasem	SMKN 1 MANGGIS	0220105002479	89.617,24	1.967.400.383,00	-	-	-	-	-	1.943.977.703,00	-	23.512.297,24	23.512.297,24
129	Karangasem	SMKN 2 KUBU	0220105000227	491.972,00	437.889.428,00	-	-	-	-	-	437.250.955,00	-	1.130.445,00	1.130.445,00
130	Klungkung	SLBN 1 KLUNGKUNG	0210105002208	66.795.700,81	494.948.096,00	72.500.000,00	-	-	-	72.432.858,00	510.260.873,00	32.405.430,00	19.144.635,81	19.144.635,81
131	Klungkung	SMAN 1 BANJARANGKAN	0210105002215	160.782.469,00	1.314.897.477,00	-	-	-	-	-	1.400.022.628,00	-	75.657.318,00	75.657.318,00
132	Klungkung	SMAN 1 DAWAN	0210105002237	88.203.234,00	1.272.746.195,00	45.000.000,00	-	-	-	29.459.860,00	1.303.773.449,00	-	72.716.120,00	72.716.120,00
133	Klungkung	SMAN 1 NUSA PENIDA	0230105000111	15.699.906,61	928.283.496,00	-	-	-	-	-	940.500.000,00	-	3.483.402,61	3.483.402,61
134	Klungkung	SMAN 1 SEMARAPURA	0210105002204	108.087.264,00	1.719.647.091,00	155.000.000,00	-	-	-	150.572.383,00	1.728.325.654,00	11.251.452,00	92.584.866,00	92.584.866,00
135	Klungkung	SMAN 2 SEMARAPURA	0210105002226	9.536.610,68	131.852.991,00	-	-	-	-	-	131.940.594,00	-	9.449.007,68	9.449.007,68
136	Klungkung	SMAN SATU ATAP KLUMPU	0230105000344	153.764.479,23	352.895.397,00	-	-	-	-	-	276.465.205,00	-	230.194.671,23	230.194.671,23
137	Klungkung	SMAN SATU ATAP LEMBONGAN	0230105000357	129.577.018,67	1.797.660.142,00	90.000.000,00	-	-	-	90.000.000,00	1.871.063.304,00	-	56.173.856,67	56.173.856,67
138	Klungkung	SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA	0230105000348	6.455.920,96	301.147.950,00	45.000.000,00	-	-	-	44.912.140,00	302.798.775,00	-	4.892.955,96	4.892.955,96
139	Klungkung	SMKN 1 KLUNGKUNG	0210105002193	53.661.010,15	2.581.551.945,00	25.000.000,00	-	-	-	24.930.000,00	2.106.377.275,00	524.248.923,00	4.656.757,15	4.656.757,15
140	Klungkung	SMKN 1 NUSA PENIDA	0230105000343	159.136.277,88	1.517.432.006,00	-	-	-	-	-	1.593.133.760,00	-	83.434.523,88	83.434.523,88
141	Tabanan	SLBN 1 TABANAN	0120105001956	28.270.883,15	756.715.709,00	36.250.000,00	-	-	-	36.250.000,00	753.824.120,00	31.073.586,00	88.886,15	88.886,15
142	Tabanan	SMAN 1 BATURITI	0120105001951	476.541,34	1.283.819.052,00	-	-	-	24.406,66	-	1.284.315.334,00	-	4.666,00	4.666,00
143	Tabanan	SMAN 1 KEDIRI	0240100000157	110.824.807,47	1.648.726.317,00	-	-	-	-	-	1.626.053.681,00	95.946.088,00	37.551.355,47	37.551.355,47
144	Tabanan	SMAN 1 KERAMBITAN	0120105001957	116.831,22	1.146.319.988,00	-	-	-	-	-	1.145.911.788,00	-	525.031,22	525.031,22
145	Tabanan	SMAN 1 MARGA	0580105000020	9.188.686,90	977.077.016,00	-	-	-	-	-	986.142.516,00	-	123.186,90	123.186,90
146	Tabanan	SMAN 1 PENEHEL	0440105000013	582.244,74	1.219.911.025,00	-	-	-	-	-	1.192.936.936,00	-	27.556.333,74	27.556.333,74
147	Tabanan	SMAN 1 PUPUAN	0470105000086	3.795.684,42	1.421.823.932,00	45.000.000,00	-	-	-	44.575.414,00	1.392.326.103,00	-	33.718.099,42	33.718.099,42
148	Tabanan	SMAN 1 SELEMADEG	0410105000179	47.385.692,00	1.377.597.420,00	-	-	-	-	-	1.337.471.071,00	43.357.379,00	44.154.662,00	44.154.662,00
149	Tabanan	SMAN 1 TABANAN	1,20105E+11	211.605,18	2.710.237.586,00	70.000.000,00	-	-	-	70.000.000,00	2.710.320.000,00	-	129.191,18	129.191,18
150	Tabanan	SMAN 2 TABANAN	0120105001955	7.850.105,33	2.665.303.427,00	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	2.669.842.900,00	-	3.310.632,33	3.310.632,33
151	Tabanan	SMKN 1 TABANAN	0120105001955	176.201,23	2.416.505.401,00	45.000.000,00	-	-	-	44.995.300,00	2.416.557.365,00	-	128.937,23	128.937,23
152	Tabanan	SMKN 2 TABANAN	0580105000016	150.870.537,56	1.766.059.143,00	-	-	-	-	-	1.807.378.226,00	29.265.165,00	80.286.289,56	80.286.289,56
153	Tabanan	SMKN 3 TABANAN	0410105000166	178.933.237,77	2.680.136.929,00	-	-	-	-	-	2.703.668.358,00	152.347.329,00	3.054.479,77	3.054.479,77
TOTAL				12.776.669.413,05	247.381.610.738,00	4.356.250.000,00	65.000.000,00	-	12.557.006,66	3.964.010.689,00	246.079.131.075,00	6.485.880.327,00	7.933.065.066,71	7.933.065.066,71

L

Daftar Rinci Platang Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023

Table with columns: No, Revisi Platang, CPO, Nama Perusahaan/Wali, Alamat, Tanggal Penemuan Platang, Platang Per 1 Januari 2023, Nomor Saku Aspal (Revisi, Subrevisi), Jumlah Sumbu Kanan, Jumlah Sumbu Kiri, and various columns for 2023 (Revisi, Subrevisi, Platang, Aspal, Beton, Lembaran, Manpal, Pengaspalan, Perbaikan, Platang, Aspal, Beton, Lembaran, Manpal, Pengaspalan, Perbaikan) and 2024 (Lencir, Kurang Lencir, Digospon, Manpal, Platang 21 Des 2023, 60%, 70%, 80%, 100%, Total Platang, Total Platang, 60%, 70%, 80%, 100%, Total Platang, Keterangan). The table lists numerous entries for different types of road maintenance and materials across various districts in Bali.

No.	Rincian Pemasangan	C/D	Nama Pekerjaan/Werk Pemasangan/Urutan/WFO/Desain/Instalasi	Nomor	Tanggal Pemasangan	Kondisi Saat Ini		Luasan Sebelum Kondisi Sida Awal		Maret Tahun 2023											Total Pemasangan Di Das 2023	Penyisihan				Total Penyisihan (Membuka/Utang/Kelebihan)	Keterangan/Urut			
						Kerusakan	Sesuai	Pakem	Perbaikan				Penyisihan				Total			6,5%		10%	25%	100%						
									Pemeliharaan	Mutasi	Peningkatan	Relokasi	Mutasi	Penghapusan	Pelayanan	Leleh	Kurang Leleh	Daerah	Misc											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
LPFD	PPFD	Gayamsari	Geni-Banyuwangi	J. Raya Kedawenen, Pac. Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			48.230,00	-	48.230,00				48.230,00				48.230,00					48.230,00		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Vila Bangsari Jati	J. Raya Kedawenen, Pac. Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			2.501.680,00	-	2.501.680,00				2.501.680,00				2.501.680,00					2.501.680,00		19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Kampung Lela Band	Letak Tempelan, Temp. Narmah, Sukam. Kab. Ganyar, Bdl 80302			11.770,00	-	11.770,00				11.770,00				11.770,00					11.770,00		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Vila Puri Naga Tiga	Banjir Tegalluh, Des. Benda, Ganyar 80201			27.800,00	-	27.800,00				27.800,00				27.800,00					27.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LPFD	PPFD	Gayamsari	Seas Karasam Bad Vilar	D. Begawan Desa Manggha, Pac. Pagaragan, Ganyar, Bdl 80272			134.800,00	-	134.800,00				134.800,00				134.800,00					134.800,00		845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Complan Hotel	Dr. Jati, Des. Tegalluh, Pac. Pagaragan, Bdl 80272			3.216.400,00	-	3.216.400,00				3.216.400,00				3.216.400,00					3.216.400,00		8.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,75
LPFD	PPFD	Gayamsari	Plemania Hotel	Dr. Caring, Tegalluh, Pac. Pagaragan, Bdl 80272			84.200,00	-	84.200,00				84.200,00				84.200,00					84.200,00		65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Bad Zini Pak	Dr. Simpang, Bad. Naga, Pagaragan, Ganyar, Bdl 80272			526.440,00	-	526.440,00				526.440,00				526.440,00					526.440,00		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Tuesday Club Tanah Seng	J. Pura, Sukam. Bad. Naga, Ganyar, Bdl 80203			842.000,00	-	842.000,00				842.000,00				842.000,00					842.000,00		3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Klaim Pancing Tunjag Sepuluh	J. Raya Campuhan, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			498.226,00	-	498.226,00				498.226,00				498.226,00					498.226,00		2.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,13
LPFD	PPFD	Gayamsari	Klaim Pancing Wana Lela/Da Suthy	Amba, J. Raya Campuhan, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			81.620,00	-	81.620,00				81.620,00				81.620,00					81.620,00		308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,18
LPFD	PPFD	Gayamsari	Bad Golf And Mania Park Cik Suthy	Dr. Jati, Simpang, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			342.400,00	-	342.400,00				342.400,00				342.400,00					342.400,00		1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Ayung Resort (Apartment)	Sungai Kedawenen, Ayung, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			1.880.720,00	-	1.880.720,00				1.880.720,00				1.880.720,00					1.880.720,00		3.942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,23
LPFD	PPFD	Gayamsari	Topa Bad	J. Raya Kedawenen, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			126.000,00	-	126.000,00				126.000,00				126.000,00					126.000,00		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Karisma Park	J. Raya Kedawenen, Tegalluh, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80272			370.200,00	-	370.200,00				370.200,00				370.200,00					370.200,00		1.891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,10
LPFD	PPFD	Gayamsari	Bad Zini Pak 2	J. Raya Kedawenen, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			1.488.000,00	-	1.488.000,00				1.488.000,00				1.488.000,00					1.488.000,00		7.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Da Gunung Meruak Water	Dr. Pagaragan, Desa Manggha, Pac. Narmah, Pac. Pagaragan, Ganyar			3.872.200,00	-	3.872.200,00				3.872.200,00				3.872.200,00					3.872.200,00		17.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Habitat Kupa Benang	J. Raya Kedawenen, Kedawenen, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80272			7.797.600,00	-	7.797.600,00				7.797.600,00				7.797.600,00					7.797.600,00		18.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,10
LPFD	PPFD	Gayamsari	PT Uluw. Bad Libre	Dr. Tegalluh, Des. Kedawenen, Kedawenen, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80272			411.420,00	-	411.420,00				411.420,00				411.420,00					411.420,00		2.044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,28
LPFD	PPFD	Gayamsari	Bad Adventure Park	J. Raya Kedawenen, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			442.576,00	-	442.576,00				442.576,00				442.576,00					442.576,00		2.212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,88
LPFD	PPFD	Gayamsari	Ayung Dewata Rafing	Simpang, Sukam. Ganyar, Bdl 80203			360.000,00	-	360.000,00				360.000,00				360.000,00					360.000,00		1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Geni Rafing	Simpang, Sukam. Ganyar, Bdl 80203			480.300,00	-	480.300,00				480.300,00				480.300,00					480.300,00		2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Bad Bening Rafing	Simpang, Sukam. Ganyar, Bdl 80203			315.000,00	-	315.000,00				315.000,00				315.000,00					315.000,00		1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Melaksa Rafing	Sungai Kedawenen, Ayung, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			315.000,00	-	315.000,00				315.000,00				315.000,00					315.000,00		1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Surya Bening Adventure	Sungai Kedawenen, Ayung, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			540.000,00	-	540.000,00				540.000,00				540.000,00					540.000,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Vila Dhuasanti	J. Raya Bad. B. Mangrove, Mangrove, Bdl 80271			481.170,00	-	481.170,00				481.170,00				481.170,00					481.170,00		2.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,85
LPFD	PPFD	Gayamsari	Arwana Iah	J. Raya Buning, Des. Buning, Pac. Pagaragan, Ganyar, Bdl 80272			236.800,00	-	236.800,00				236.800,00				236.800,00					236.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Garaga Rafing	J. Raya Campuhan, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			315.000,00	-	315.000,00				315.000,00				315.000,00					315.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Habit Iah	J. Raya Campuhan, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			236.800,00	-	236.800,00				236.800,00				236.800,00					236.800,00		1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Pajung Rafing	Dr. Pagaragan, Manggha, Pac. Pagaragan, Ganyar, Bdl 80272			360.000,00	-	360.000,00				360.000,00				360.000,00					360.000,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Uluw Rafing	J. Kedawenen, Pac. Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			480.000,00	-	480.000,00				480.000,00				480.000,00					480.000,00		2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Harit Pacala	Amba, J. Raya Campuhan, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			315.000,00	-	315.000,00				315.000,00				315.000,00					315.000,00		1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Tanaka White Water Tubing	J. Raya Sida, Temp. Narmah, Pac. Pagaragan, Ganyar, Bdl 80203			150.075,00	-	150.075,00				150.075,00				150.075,00					150.075,00		750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,38
LPFD	PPFD	Gayamsari	PT Gelak Tubing Bad	J. Raya Campuhan, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			150.075,00	-	150.075,00				150.075,00				150.075,00					150.075,00		750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,38
LPFD	PPFD	Gayamsari	Rampal Lurah	J. Raya Campuhan, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			980.400,00	-	980.400,00				980.400,00				980.400,00					980.400,00		4.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	The Royal Phoenix (Air Kolat)	J. Kedawenen, Pac. Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			1.048.800,00	-	1.048.800,00				1.048.800,00				1.048.800,00					1.048.800,00		3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Karisma Butterfly Park	J. Raya Kedawenen, Pac. Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			102.720,00	-	102.720,00				102.720,00				102.720,00					102.720,00		513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,60
LPFD	PPFD	Gayamsari	Harit Bad Adventure	J. Raya Kedawenen, Uluw. Kab. Ganyar, Bdl 80271			315.000,00	-	315.000,00				315.000,00				315.000,00					315.000,00		1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
LPFD	PPFD	Gayamsari	Nakamu Adventure	Dr. Pagaragan, Manggha, Pac. Pagaragan, Ganyar, Bdl 80272			87.500,00	-	87.500,00				87.500,00				87.500,00	</												

No.	Rincian Pialang	GDO	Nama Pekerjaan/Waktu Peningkatan Jumlah/Waktu Berkas/Unit/Kelembagaan	Jenis Asm	Tanggal Penetapan Pialang	Pialang Per 1 Januari 2022		Korupsi Salvo Asai		Jumlah Salvo Korupsi Sido Awi	Mata Uang 2022	Salvo Awal					Korupsi				Total Pialang 31 Des 2022	Pembayaran				Total Pembayaran	Keterangan Biaya (Kategori/Unsur/Objek/kegiatan)		
						Revisi	Salvo	Paid	Unpaid			Unpaid	Paid	Unpaid	Paid	Unpaid	Unpaid	Paid	Unpaid	Unpaid		Paid	Unpaid	Unpaid	Paid			Unpaid	Unpaid
	LPFD PPKD Bangi	FMM Desa Tambokebangi	05.000 RUC TAMBOLU BANGI								20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Bangi	FMM Desa Aste Lela	05.000 RUC SILBEI BANGI								37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00			37.500,00	37.500,00			37.500,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Bangi	Panemas Desa Pengangan	05.000 RUC PANEMAS BANGI								486.100,00	486.100,00	486.100,00	486.100,00			486.100,00	486.100,00			486.100,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Bangi	Panemas Desa Cibir	05.000 RUC PANEMAS BANGI								50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00			50.200,00	50.200,00			50.200,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FDMM Karanggen	5.874.916,00			5.874.916,00					5.874.916,00	5.874.916,00	5.874.916,00	5.874.916,00			5.874.916,00	5.874.916,00			5.874.916,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FDMM Karanggen	3.487.377,00			3.487.377,00					3.487.377,00	3.487.377,00	3.487.377,00	3.487.377,00			3.487.377,00	3.487.377,00			3.487.377,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	PT Bai Agung Wakra	10.402.000,00			10.402.000,00					10.402.000,00	10.402.000,00	10.402.000,00	10.402.000,00			10.402.000,00	10.402.000,00			10.402.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Klaim Nangeng Tiga Larig	104.325,00			104.325,00					104.325,00	104.325,00	104.325,00	104.325,00			104.325,00	104.325,00			104.325,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Junggung/Bi Marna	217.000,00			217.000,00					217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00			217.000,00	217.000,00			217.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Klaim Nangeng Nera Hir	18.474,00			18.474,00					18.474,00	18.474,00	18.474,00	18.474,00			18.474,00	18.474,00			18.474,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Bedaden	125.000,00			125.000,00					125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00			125.000,00	125.000,00			125.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Mucan	188.400,00			188.400,00					188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00			188.400,00	188.400,00			188.400,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Sitan	97.000,00			97.000,00					97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00			97.000,00	97.000,00			97.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Budiwangi/Wi Adana	60.000,00			60.000,00					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Bungaya Kungri/Na	75.000,00			75.000,00					75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00			75.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Bungaya/Wi Sepang	150.000,00			150.000,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Anjagi/Wi Sarana	75.000,00			75.000,00					75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00			75.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Geping/Wi Buda	66.800,00			66.800,00					66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00			66.800,00	66.800,00			66.800,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Mananggal/Wi Raba	48.000,00			48.000,00					48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00			48.000,00	48.000,00			48.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Kampung Bangi	103.200,00			103.200,00					103.200,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00			116.700,00	116.700,00			116.700,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Tanah Relekas Telaga Surya	70.300,00			70.300,00					70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00			70.300,00	70.300,00			70.300,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Tanah Relekas Tiga Girang	1.433.907,00			1.433.907,00					1.433.907,00	1.433.907,00	1.433.907,00	1.433.907,00			1.433.907,00	1.433.907,00			1.433.907,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	400-Span Jaya Satri	82.500,00			82.500,00					82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00			82.500,00	82.500,00			82.500,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Bal Menei Winaa Reflag	540.000,00			540.000,00					540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00			540.000,00	540.000,00			540.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Bal Taling Reflag	540.000,00			540.000,00					540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00			540.000,00	540.000,00			540.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	PT Buidi Cih Reflag	540.000,00			540.000,00					540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00			540.000,00	540.000,00			540.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	PT Sotak Telaga Waga Reflag	450.000,00			450.000,00					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00			450.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Telaga Tiga Adentara	540.000,00			540.000,00					540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00			540.000,00	540.000,00			540.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Gasa Adentara Reflag	540.000,00			540.000,00					540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00			540.000,00	540.000,00			540.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Asah Reflag	315.000,00			315.000,00					315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00			315.000,00	315.000,00			315.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	FMM Desa Duda Ubra	81.700,00			81.700,00					81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00			81.700,00	81.700,00			81.700,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Klaim Nangeng La Grade	43.610,00			43.610,00					43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00			43.610,00	43.610,00			43.610,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Karanggen	Klaim Nangeng De Cark	25.017,00			25.017,00					25.017,00	25.017,00	25.017,00	25.017,00			25.017,00	25.017,00			25.017,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	Kampung Bayu Mir	125.000,00			125.000,00					125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00			125.000,00	125.000,00			125.000,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	PDMM	224.600,00			224.600,00					224.600,00	501.610,00	501.610,00	501.610,00			501.610,00	501.610,00			501.610,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	Pura Jem	40.000,00			40.000,00					40.000,00	-	-	-			-	-			-			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	LD Winda Jaya	160.500,00			160.500,00					160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00			160.500,00	160.500,00			160.500,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	Tanah Hala Wijaya	286.920,00			286.920,00					286.920,00	286.920,00	286.920,00	286.920,00			286.920,00	286.920,00			286.920,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	Tanah M. Yang/Yang Neph Huan	481.500,00			481.500,00					481.500,00	-	-	-			-	-			-			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	Tanah Pak Wija	160.500,00			160.500,00					160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00			160.500,00	160.500,00			160.500,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	Tanah Hidayat	40.125,00			40.125,00					40.125,00	-	-	-			-	-			-			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	Tanah Pak Widyad	80.250,00			80.250,00					80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00			80.250,00	80.250,00			80.250,00			100,00	100,00				
	LPFD PPKD Jember	Tanah Dama	160.500,00			160.500,00					160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00															

No.	Rencana Pelaksanaan	KPO	Nama Perusahaan/Wakil Pemegang Saham/Wakil Pemerintah/Instansi	Alamat	Tanggal Pelaksanaan	Maret Tahun 2023														Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Korupsi Safes Asin		Lampiran Silikon Korosi Silet Asin		Pembayaran		Zakat Asin		Rencana		Kebutuhan		Total		Pembelian				Keterangan Anggaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Keuntungan	Reservasi	Keuntungan	Reservasi	Keuntungan	Reservasi	Keuntungan	Reservasi	Keuntungan	Reservasi	Keuntungan	Reservasi	Keuntungan	Reservasi	Keuntungan	Reservasi	Keuntungan	Reservasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

2

Table with columns: No, Revisi, Rincian, Nama Pemenuhan/Wali, Tanggal Penunjan, Kinerja Saldo Awal, Jumlah Saldo Awal, Saldo Awal, Penunjan, and Total. The table lists various financial transactions and their statuses across multiple periods, including sub-headers for 'Maret 2023', 'April 2023', 'M Mei 2023', and 'Juni 2023'. It details items like 'Ruman Saki Masa Bal Mandi', 'Ruman Saki Umum Daerah Bal Mandi', and 'Ruman Saki Jasa Proteksi Bal Mandi' with corresponding financial values.

**Beban Dibayar Dimuka
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian	No. dan Tgl. Kontrak	Tgl Perjanjian		Masa Berlaku (Hari)	Belanja Dibayar Dimuka (Rp)	Beban per Hari (Rp)	Yang Telah Dibebankan s.d. 31 Desember 2022 (Hari)	Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	Dibebankan Tahun 2023 (Hari)	Beban Tahun 2023	Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2023
			Mulai	Berakhir								
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9	10	11	12 = 11 x 8	13 = 7 - (8 * 9) - 12
1	BPKAD					2.226.404.903,46	6.099.739,46		510.373.969,85		1.108.035.789,89	471.686.083,46
1	Jasa Asuransi Barang Milik Daerah TA 2022	B.13.027/1481/	11/6/2022	11/6/2023	365	1.157.058.999,96	3.170.024,66	204	510.373.969,85	161	510.373.969,85	0,00
2	Jasa Asuransi Barang Milik Daerah TA 2023	B.13.027/1582/	11/6/2023	11/6/2024	365	1.069.345.903,50	2.929.714,80	0	0,00	204	597.661.820,04	471.684.083,46
2	Bapenda Provinsi Bali					841.000.000,00	2.316.804,41		-		426.292.011,02	-
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Belanja Sewa Gedung untuk Pelayanan Gerai Samsat di Penatih, Jln. Padma No. 81 B, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.		02/01/2023	31/12/2023	363	35.000.000,00	96.418,73	179	0,00	184	17.741.046,83	0,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Belanja Sewa Gedung Gerai Dalung), Jln. Raya Padang Luwih No. 143 Blok F Pertokoan Jaya Kerthi Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung.		02/01/2023	31/12/2023	363	160.000.000,00	440.771,35	179	0,00	184	81.101.928,37	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Belanja Sewa Gedung Gerai Nusa Dua), Jln. Baypas Ngurah Rai Kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Provinsi Bali.		02/01/2023	31/12/2023	363	336.000.000,00	925.619,83	179	0,00	184	170.314.049,59	0,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Belanja Sewa Gedung), untuk Pelayanan Samsat Pembantu Ubud, Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.		02/01/2023	31/12/2023	363	175.000.000,00	482.093,66	179	0,00	184	88.705.234,16	0,00
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor, Sewa Gedung Kantor Samsat Pembantu Seririt.		02/01/2023	31/12/2023	363	135.000.000,00	371.900,83	179	0,00	184	68.429.752,07	0,00
3	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali											2.000,00
	Jumlah					3.067.404.903,46	8.416.543,87		510.373.969,85		1.534.327.800,91	471.686.083,46

**Rincian Persediaan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No.	OPD	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan Baku	Bahan Kimia Nuklir	Barang dalam Proses
		183.817.501,00	6.209.145.394,82	7.524.213.524,60	17.097.582,11	1.491.000,00	-
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.617.701,00	11.066.596,00	113.563.414,23	17.097.582,11	1.491.000,00	
2	Dinas Kesehatan		3.748.201.604,01	1.771.567.599,41			
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	181.199.800,00	2.346.748.959,50	704.485.115,98			
4	Satuan Polisi Pamong Praja						
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			50.798.000,00			
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			223.803.400,00			
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			28.070.400,00			
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil			904.200,00			
9	Dinas Perhubungan			103.084.300,00			
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			30.089.750,00			
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			704.000,00			
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			141.020.200,00			
13	Dinas Kebudayaan		1.090.000,00	44.980.600,00			
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat			974.823.100,00			
15	Dinas Kelautan dan Perikanan			24.991.700,00			
16	Dinas Pariwisata			11.955.600,00			
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		77.485.235,31	602.257.000,00			
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		13.097.900,00	499.682.522,98			
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		10.963.000,00	397.855.700,00			
20	Sekretariat Daerah			685.195.272,00			
21	Sekretariat DPRD		492.100,00	115.783.900,00			
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			157.906.000,00			
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			185.174.700,00			
24	Badan Pendapatan Daerah			444.273.000,00			
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			41.233.450,00			
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah			24.537.500,00			
27	Badan Penghubung			40.878.500,00			
28	Inspektorat			101.701.800,00			
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			2.892.800,00			

No.	OPD	Bahan/Bibit Tanaman	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Isi Tabung Gas	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Bahan Lainnya	Suku Cadang Alat Kedokteran
		238.000,00	8.569.000,00	26.780.307,89	-	12.339.492.635,12	6.722.870,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	238.000,00				1.291.325.101,33	
2	Dinas Kesehatan			26.780.307,89		9.061.538.588,28	6.722.870,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					1.866.382.916,51	
4	Satuan Polisi Pamong Praja						
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral						
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil						
9	Dinas Perhubungan						
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
13	Dinas Kebudayaan		8.569.000,00			665.001,00	
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat						
15	Dinas Kelautan dan Perikanan						
16	Dinas Pariwisata						
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					1.055.500,00	
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					597.778,00	
20	Sekretariat Daerah					115.727.750,00	
21	Sekretariat DPRD						
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					50.000,00	
24	Badan Pendapatan Daerah						
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					2.150.000,00	
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah						
27	Badan Penghubung						
28	Inspektorat						
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						

No.	OPD	Suku Cadang Alat Laboratorium	Suku Cadang Alat Pertanian	Suku Cadang Alat Bengkel	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak
		17.997.093,00	-	65.976.900,00	6.889.779.602,88	392.432.756,44	271.203.425,97
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	17.997.093,00			5.592.697.923,36	62.377.575,94	100.510.755,97
2	Dinas Kesehatan			65.976.900,00	688.244.646,85	95.709.177,00	28.856.940,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman				29.095.073,50	17.834.682,50	8.139.606,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja				1.208.000,00	143.600,00	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					2.895.000,00	
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak				16.611.831,00	5.217.625,00	
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral				2.821.000,00	5.777.000,00	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil				908.640,00	1.347.000,00	
9	Dinas Perhubungan				39.551.671,40	3.374.000,00	1.618.200,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				2.055.400,00	1.833.000,00	
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					139.800,00	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
13	Dinas Kebudayaan				4.615.680,00	1.116.440,00	7.442.000,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat				1.649.020,00	1.330.000,00	
15	Dinas Kelautan dan Perikanan				20.700,00	375.500,00	
16	Dinas Pariwisata				788.712,00	1.912.200,00	
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				13.020.330,77	16.195.350,00	
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup				41.708.914,00	4.791.850,00	
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				1.879.400,00	13.316.078,00	
20	Sekretariat Daerah				233.490.593,00	64.186.428,00	96.723.112,00
21	Sekretariat DPRD				99.950.998,00	22.126.800,00	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				7.155.860,00	2.739.500,00	
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				6.338.580,00	3.561.200,00	
24	Badan Pendapatan Daerah				49.723.859,00	51.337.750,00	27.912.812,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				25.396.070,00	7.669.500,00	
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah				1.335.000,00	2.147.200,00	
27	Badan Penghubung						
28	Inspektorat				580.000,00	746.000,00	
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				28.931.700,00	2.232.500,00	

No.	OPD	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor	Alat Listrik	Perlengkapan Dinas	Perlengkapan Pendukung Olahraga
		148.218.020,10	1.000.550.569,91	2.238.873.542,45	964.912.812,77	13.325.000,00	198.532.991,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	78.985.020,10	47.065.852,71	1.443.970.509,95	535.359.909,04		198.532.991,00
2	Dinas Kesehatan	9.100.000,00	138.939.584,20	597.170.009,34	269.604.671,16	11.825.000,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.350.000,00	24.815.830,00		6.040.892,00		
4	Satuan Polisi Pamong Praja	220.000,00					
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.581.000,00	798.790,00		415.000,00	1.500.000,00	
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.390.000,00	7.470.500,00		8.850.175,00		
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		4.877.000,00	5.405.000,00	2.135.000,00		
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	350.000,00	1.076.000,00				
9	Dinas Perhubungan	5.320.000,00	14.793.800,00	5.115.110,00	675.300,00		
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	950.000,00	2.022.000,00				
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	60.000,00	1.350.000,00				
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
13	Dinas Kebudayaan	2.460.000,00	12.156.200,00		24.816.000,00		
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	200.000,00	3.425.000,00	1.696.700,00			
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	150.000,00					
16	Dinas Pariwisata	1.622.000,00			1.092.000,00		
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.960.000,00	11.841.000,00	123.349.500,00	29.654.445,57		
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.220.000,00	14.116.750,00	680.600,00	4.888.925,00		
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.430.000,00	5.152.600,00	948.450,00	2.183.700,00		
20	Sekretariat Daerah	3.220.000,00	143.968.895,00	50.266.463,16	44.743.400,00		
21	Sekretariat DPRD	90.000,00	214.926.117,00	1.630.600,00			
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.630.000,00	120.500,00		3.655.700,00		
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.900.000,00	15.505.000,00	2.733.000,00	758.400,00		
24	Badan Pendapatan Daerah	3.370.000,00	274.596.801,00		23.311.695,00		
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.560.000,00	21.416.050,00	2.955.600,00	5.280.600,00		
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	100.000,00	2.595.000,00		290.000,00		
27	Badan Penghubung						
28	Inspektorat		5.125.000,00	2.952.000,00			
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		32.396.300,00		1.157.000,00		

No.	OPD	Suvenir/Cendera Mata	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Obat	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan
		428.438.894,00	1.862.335.439,84	19.773.565.105,58	91.164.731,00	27.514.560.662,00	47.369.304.200,53
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	172.500,00	1.234.628.605,22	171.278.565,65	43.787.966,00		
2	Dinas Kesehatan		244.442.456,00	17.358.903.193,78			39.805.485.266,78
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		195.738.610,00			27.463.897.082,00	195.622.610,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja						
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				45.055.200,00	8.250.000,00	6.882.946.323,75
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		9.290.500,00	14.188.413,00		1.200.000,00	
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		4.248.000,00				
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil						
9	Dinas Perhubungan		5.217.000,00				
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					39.713.580,00	
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
13	Dinas Kebudayaan						
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat		1.991.000,00				
15	Dinas Kelautan dan Perikanan						
16	Dinas Pariwisata						
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		94.681.468,62	2.228.659.358,15	2.321.565,00		485.250.000,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		4.329.900,00			1.500.000,00	
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		600.000,00				
20	Sekretariat Daerah	320.782.200,00	15.725.000,00				
21	Sekretariat DPRD	107.484.194,00	4.486.900,00				
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		6.025.000,00				
24	Badan Pendapatan Daerah						
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		5.364.000,00				
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah			535.575,00			
27	Badan Penghubung						
28	Inspektorat		35.567.000,00				
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						

No.	OPD	Persediaan untuk Tujuan	Natura	Pakan	Natura dan Pakan Lainnya	Persediaan Penelitian Lainnya	Persediaan Dalam Proses
		15.388.100,00	122.564.180,50	131.653.325,00	-	2.371.188.255,75	1.148.189.345,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.388.100,00				2.371.188.255,75	
2	Dinas Kesehatan		122.564.180,50				
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						1.148.189.345,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja						
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral						
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil						
9	Dinas Perhubungan						
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
13	Dinas Kebudayaan						
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat						
15	Dinas Kelautan dan Perikanan						
16	Dinas Pariwisata						
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			131.653.325,00			
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
20	Sekretariat Daerah						
21	Sekretariat DPRD						
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						
24	Badan Pendapatan Daerah						
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah						
27	Badan Penghubung						
28	Inspektorat						
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						

No.	OPD	Persediaan Dalam Proses Lainnya	Komponen Lainnya	Total Persediaan
		2.395.645.300,00	117.386.070,60	141.860.754.139,86
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			13.351.341.018,36
2	Dinas Kesehatan			74.051.632.995,20
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.395.645.300,00	117.386.070,60	36.704.571.893,59
4	Satuan Polisi Pamong Praja			1.571.600,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			6.997.239.313,75
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			288.022.444,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			53.333.400,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil			4.585.840,00
9	Dinas Perhubungan			178.749.381,40
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			76.663.730,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			2.253.800,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			141.020.200,00
13	Dinas Kebudayaan			107.910.921,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat			985.114.820,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan			25.537.900,00
16	Dinas Pariwisata			17.370.512,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			3.819.384.078,42
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			588.017.361,98
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			434.926.706,00
20	Sekretariat Daerah			1.774.029.113,16
21	Sekretariat DPRD			566.971.609,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			175.207.560,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			240.045.880,00
24	Badan Pendapatan Daerah			874.525.917,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			114.025.270,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah			31.540.275,00
27	Badan Penghubung			40.878.500,00
28	Inspektorat			146.671.800,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			67.610.300,00

**DAFTAR INVESTASI JANGKA PANJANG
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Perusahaan	Saldo Awal	Piutang Deviden 2023	% Kepemilikan	Laba/Rugi Tahun Berjalan	PENAMBAHAN		PENGURANGAN	Saldo Akhir	Metode Penilaian Investasi	Keterangan
						Bagian Laba / Rugi Tahun Berjalan	Penyertaan Modal	Pembagian Deviden 2023			
	Jumlah	1.621.888.174.723,26	-		802.282.038.717,05	260.400.092.016,09	5.122.590.904.585,27	158.120.019.322,32	6.851.124.152.537,51		
	BUMD	1.478.812.223.939,69	-		743.465.305.748,00	263.096.666.994,71	5.122.590.904.585,27	157.471.097.464,32	6.707.028.698.055,35		
1	Perumda Kerta Bali Saguna	101.197.433.708,50	-	100,00	1.132.909.585,00	1.132.909.585,00	-	331.193.680,00	101.999.149.613,50	Ekuitas	LK Audited
2	Perumda Kerti Bali Santhi	-	-	100,00	(2.061.750.041,00)	(2.061.750.041,00)	10.000.000.000,00	-	7.938.249.959,00	Ekuitas	LK Audited
3	Perseroda Pusat Kebudayaan Bali	-	-	100,00	-	-	5.004.744.704.585,27	-	5.004.744.704.585,27	Ekuitas	
4	PT. BPD Bali	1.222.082.447.471,49	-	35,11	739.574.347.182,00	259.664.553.295,60	75.000.000.000,00	155.842.363.119,32	1.400.904.637.647,77	Ekuitas	LK Audited
5	PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	155.532.342.759,70	-	90,48	4.819.799.022,00	4.360.954.155,11	32.846.200.000,00	1.297.540.665,00	191.441.956.249,81	Ekuitas	LK Audited
	SWASTA	143.075.950.783,57	-		58.816.732.969,05	(2.696.574.978,62)	-	648.921.858,00	144.095.454.482,16		
1	PT. Rumah Sakit Puri Raharja (BUMD)	41.925.950.783,57	-	58,00	2.527.534.582,05	1.465.970.057,59	-	446.466.359,00	42.945.454.482,16	Ekuitas	LK Audited
2	PT Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	-	0,39	130.076.198.387,00	500.793.363,79	-	202.455.499,00	1.150.000.000,00	Cost	LK Audited
3	PT. Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	-	6,32	(73.787.000.000,00)	(4.663.338.400,00)	-	-	100.000.000.000,00	Cost	LK Audited

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah							
				Belanja Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Reklasifikasi			
								Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Dari Aset Lainnya	UNIT
Jumlah		6.002.433.873.184,76	4.491	154.513.167.813,00	16	51.789.529.773,00	6	308.518.827.650,00	-	38.225.315.345,00	37
1	Sekretariat DPRD	52.595.040.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	12.915.320.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	2.084.389.783,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	92.070.617.000,00	6	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	16.022.800.000,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	13.298.993.463,00	4	9.960.741.469,00	2	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	48.788.465.254,57	3	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	196.031.405.000,00	6	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	74.818.783.250,00	25	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	4.553.815.000,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	6.689.550.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	28.893.273.500,00	17	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.149.992.189.713,76	3.707	-	-	60.000.000,00	1	-	-	38.171.055.345,00	34
14	Inspektorat	5.908.000.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	6.155.360.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	5.779.200.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	5.735.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.540.480.000,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	23.285.829.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	2.286.375.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	8.018.088.625,00	6	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	6.171.200.000,00	1	-	-	-	-	-	-	54.260.000,00	3
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.729.578.833.084,00	388	144.552.426.344,00	14	-	-	308.518.827.650,00	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	25.558.532.500,00	14	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	363.898.773.723,50	183	-	-	476.929.773,00	3	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	63.440.473.137,93	60	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	11.037.600.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.561.600.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	11.459.182.150,00	39	-	-	51.252.600.000,00	2	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6.164.704.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD										
		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Penghapusan	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT
	Jumlah	216.820.100.358,00	68	1.263.804.763.540,00	120	1.174.708.731.765,00	74	131.524.654.938,36	84	178.545.138.200,00	-
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	1.019.200.000,00	1	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	15.001.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	107.100.000,00	1	69.339.000.000,00	4	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	4.909.776.000,00	2	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	85.540.352.000,00	41	1.107.565.424.265,00	75	1.105.369.731.765,00	70	131.524.654.938,36	84	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	108.250.000,00	3	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	572.744.875,00	8	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	129.588.134.446,00	24	60.000.000,00	1	-	-	-	-	178.545.138.200,00	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	450.240.000,00	1	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.667.800.162,00	3	134.010.788.400,00	28	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	23.813.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang								Saldo Akhir
		Reklasifikasi				Pembayaran di Muka	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	
		Ke Aset Lainnya	UNIT	Ke Properti Investasi	UNIT					
	Jumlah	95.687.180.400,00	58	42.088.105.050,00	42	-	-	1.263.804.763.540,00	117	4.907.796.884.852,40
1	Sekretariat DPRD	-	-			-	-	-	-	52.595.040.000,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-			-	-	-	-	12.915.320.000,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-			-	-	-	-	2.084.389.783,00
4	Sekretariat Daerah	-	-			-	-	-	-	93.089.817.000,00
5	Dinas Perhubungan	-	-			-	-	-	-	16.022.800.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	418.218.000,00	1			-	-	-	-	22.841.516.932,00
7	Dinas Kesehatan	-	-			-	-	15.001.240.000,00	-	48.788.465.254,57
8	Dinas Kebudayaan	-	-			-	-	-	-	196.031.405.000,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-			-	-	-	-	5.586.883.250,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-			-	-	-	-	4.553.815.000,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-			-	-	-	-	6.689.550.000,00
12	Badan Pendapatan	-	-			-	-	991.500.000,00	1	32.811.549.500,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	91.304.500.275,00	41	42.088.105.050,00	42	-	-	137.608.434.275,00	34	1.826.598.112.770,40
14	Inspektorat	-	-			-	-	-	-	5.908.000.000,00
15	Dinas Pariwisata	-	-			-	-	-	-	6.155.360.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-			-	-	-	-	100.000.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-			-	-	-	-	5.779.200.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-			-	-	-	-	5.735.000.000,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-			-	-	-	-	18.540.480.000,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-			-	-	-	-	23.285.829.000,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-			-	-	-	-	2.286.375.000,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	108.250.000,00	3			-	-	-	-	8.018.088.625,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	572.744.875,00	8			-	-	54.260.000,00	3	6.171.200.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-			-	-	1.105.384.041.765,00	71	1.838.787.388.112,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-			-	-	1.019.200.000,00	1	24.989.572.500,00
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	3.283.467.250,00	5			-	-	-	-	495.417.291.337,50
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-			-	-	3.685.407.500,00	6	55.599.429.637,93
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-			-	-	-	-	11.037.600.000,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	-	-	-	10.561.600.000,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-			-	-	60.680.000,00	1	62.651.102.150,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-			-	-	-	-	6.164.704.000,00

No	SKPD	UNIT
Jumlah		4.317,00
1	Sekretariat DPRD	1,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	1,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	1,00
4	Sekretariat Daerah	7,00
5	Dinas Perhubungan	8,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	5,00
7	Dinas Kesehatan	3,00
8	Dinas Kebudayaan	6,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	22,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	3,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	1,00
12	Badan Pendapatan	18,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.559,00
14	Inspektorat	2,00
15	Dinas Pariwisata	1,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	2,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	2,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	1,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	6,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	1,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	347,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14,00
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	210,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	47,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	2,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	40,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1,00

**Daftar Tanah yang disewa dan dipinjamkan sebagian luas dari keseluruhan luas
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Disewakan

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Luas (M2)	Luas Disewa (M2)	Penyewa	Keterangan
Jumlah						221.139,00	86.280,72		
1	01.01.03.07.001	000080	Tanah Untuk Jalan Nasional	SHP 36	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Klod (Jl.Ir.H.Juanda)	7.602	7.550	Kerjasama Pengelolaan Parkir dg Kota Denpasar	
2	01.01.03.02.006	000001	Tanah Lapangan Apel/Upacara	SHP 88	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Dangin Puri Klod (Jalan Tantular)	3.725	3.265	IB Hartawan, Pengadilan Barus, A.A. Ngurah Manik Sumarajaya	
3	01.01.02.02.001	002085	Tanah Tegalan	SHP 24	Banjar Apuan Singapadu Sukawati Gianyar	15.422	11.622	Bali Zoo	
4	01.01.02.02.001	001894	Tanah Tegalan	SHP 35	Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan	7.103	2.924	PT. Wisnukarya Internasional, I Rai Putra Sudanta	
5	01.01.02.02.001	000687	Tanah Tegalan	SHP 7	Desa Temesi Kabupaten Gianyar	1.350	100	Koperasi Krama Subak Lumbung Sari	
6	01.01.02.02.001	001867	Tanah Tegalan	SHP 129	Denpasar \Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	909	467	Dewi Ayu Indah	
7	01.01.02.02.001	001654	Tanah Tegalan	SHP 20	Klungkung \Dawan\Ds. Sampalan Klod	1.947	947	Gede Putrawan	
8	01.01.02.02.001	001599	Tanah Tegalan	SHP 52	Klungkung\Dawan\Ds. Pesinggahan	375	102	Wayan Sudiarsana	
9	01.01.02.02.001	000938	Tanah Tegalan	SHP 2	Gianyar\Tampaksiring\Ds. Pejeng Kaja	770	250	PDAM Gianyar	
10	01.01.02.02.001	001805	Tanah Tegalan	SHP 12	Denpasar\Denpasar Barat\Ds. Padangsambian Klod	1.200	300	Ida Bagus Kompyang Gede	
11	01.01.02.01.005	001715	Tanah Sawah Irigasi	SHP 359	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	5.600	4.619	Gede Ray Ardian Mancini Yasa, , Heni Susilowati, Dewa Komang Indra, I Made Sugiantara, Angga Syafriel Prasetyo, Made Arie Satryawan	
12	01.01.02.01.005	001577	Tanah Sawah Irigasi	SHP 73	Desa Gelgel Klungkung	340	280	I Nengah Madra	
13	01.01.02.01.005	000139	Tanah Sawah Irigasi	SHP 125	Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Badung	1.720	300	Ida Bagus Pada Kesuma	
14	01.01.02.01.005	000433	Tanah Sawah Irigasi	SHP 34	Desa Takmung Banjarangkan Klungkung	832	500	Komang Artisti Sekar Linuwih	
15	01.01.01.02.007	000002	Tanah Bangunan Terminal Darat	SHP 33	Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan	15.000	280	Gapensi Tabanan	
16	01.01.01.01.002	000034	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	SHP 34	Jalan Nusa Indah Kelurahan Sumerta Denpasar	960	220	I Wayan Wide	
17	01.01.03.02.006	000002	Tanah Lapangan Apel/Upacara	SHP 89	Desa Dangin Puri Klod/Denpasar Timur/Denpasar	1.605	813	I Nyoman Nuryana, IB Oka Suyatra Wibawa	

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Luas (M2)	Luas Disewa (M2)	Penyewa	Keterangan
18	01.01.02.02.001	001913	Tanah Tegalan	SHP 29	Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan	6.135	635	Putu Witha, PDAM Tirta Amertha Buana	
19	01.01.02.02.001	001840	Tanah Tegalan	SHP 27	Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	858	407	I Ketut Kertayasa, Thomas Sutrisno	
20	01.01.02.02.001	000633	Tanah Tegalan	SHP 17	Desa Lebih Gianyar	2.260	200	Pemerintah Desa Lebih	
21	01.01.01.04.001	000104	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SHP 31	Jln. Juanda Renon Denpasar	2.760	2.800	DPD Partai Demokrat	
22	01.01.01.01.002	000029	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	SHP 47	Jalan Hayam Wuruk, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur	1.695	450	G. Manggala Perdana Jaya, SH, Desy Heryani Parwati	
23	01.01.01.02.003	000055	Tanah Bangunan Gudang	SHP 6	Batur Selatan Kintamani Bangli	1.490	1.390	I Ketut Sandra	
24	01.01.01.01.006	000002	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	SHP 4	Des.Candikuning/Kab.Tabanan	17.805	2	I Gusti Agung Ngurah Niryawan, Moh. Shodikin	
25	01.01.01.01.002	000052	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	SHP 37	Jln. Puduk No. 3 Denpasar	733	320	Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)	
26	01.01.02.02.001	001887	Tanah Tegalan	SHP 1	Denpasar\Denpasar Timur\Kel Dangin Puri Klod	10.023	1.000	I Made Kembang Hartawan	
27	01.01.03.01.025	000012	Tanah Lapangan Lainnya	SHP 16	Denpasar\Denpasar Barat\Kelurahan Tegal Kertha	2.030	1.100	Ni Luh Tuti Damayanti, I Wayan Wide	
28	01.01.02.01.005	001793	Tanah Sawah Irigasi	Persil 18	Badung\Mengwi\Ds. Kapal	1.700	200	Drs. I Made Gede Nuada	
29	01.01.02.01.005	001804	Tanah Sawah Irigasi	SHP 367	Badung\Kuta Utara\Desa Tibubeneng (Jl. Raya Semat)	1.300	1.230	Drs. Made Ngurah Artana	
30	01.01.02.02.001	000026	Tanah Tegalan	SHP 10	Badung\Kuta Utara\Ds. Tibubeneng	7.050	6.330	PT. Berawa bali Utama	
31	01.01.03.07.001	000076	Tanah Untuk Jalan Nasional	SHP 1	Klungkung\Dawan\Ds.Dawan Klod	19.285	100	Ni Luh Sutresni	
32	01.01.02.02.001	001817	Tanah Tegalan	SHP 13	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Penatih	1.990	600	Ida Bagus Ngurah Yama, Dewa Made Alit Suananda	
33	01.01.01.02.003	000006	Tanah Bangunan Gedung	SHP 12	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta\Jln. Hayam Wuruk No.151	4.700	2.300	PT. Klinik Semesta Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi	
34	01.01.02.01.005	001552	Tanah Sawah Irigasi	SHP 75	Denpasar\Denpasar Selatan\Ds. Pedungan	19.390	15.760	Perusahaan Daerah Provinsi Bali	
35	01.01.01.04.001	000244	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SHP 16	Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	1.250	353	Ketut Suartika	
36	01.01.03.02.006	000003	Tanah Lapangan Apel/Upacara	SHP 90	Denpasar\Denpasar Timur\Kel. Dangin Puri Klod	1.035	290	PT. Grita Artha Kreamindo	
37	01.01.02.02.001	001478	Tanah Tegalan	SHP 43	Klungkung\Klungkung\Ds. Akah	1.960	200	Badan Pengelola Air Minum Desa Akah	

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Luas (M2)	Luas Disewa (M2)	Penyewa	Keterangan
38	01.01.02.01.005	001799	Tanah Sawah Irigasi	SHP 48	desa ped nusa penida	275	120	I Made Sukarta	
39	01.01.02.02.001	001386	Tanah Tegalan	SHP 70	Karangasem\Kubu\Ds. Sukadana	13.550	225	PLN	
40	01.01.02.01.003	000011	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	SHP 28	Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan	22.375	5.000	Gde Ketut Nugrahita Pendit	
41	01.01.03.01.025	00007	Tanah Lapangan Lainnya	SHP 371	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	12.630	10.630	Ketut Dharma Satria Wicaksana, Pemerintah Desa Tibubeneng	
42	01.01.01.01.002	000002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	SHP 89	Jalan Anyelir Nomor 1	400	100	I Dewa Nyoman Rai Dharmadi	

**ASET TETAP TANAH YANG MASIH BERMASALAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2023**

No.	OPD	Jenis Aset	Kode	Register	Luas (M2)	Tahun	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Sertifikat	No. Sertifikat	Penggunaan	Asal-usul	Nilai (ribuan)
1	BPKAD	Tanah Kebun Entres	01.01.02.03.001	000001	2.465.000,00	1951	Des.Pemuteran/Kec.Grogak/Kab.Buleleng	Hak Pakai	31/12/1951	Akan Diproses/Akte jual beli no.14	Perkebunan	Pembelian	66.924.550,00
2	BPKAD	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	01.01.01.04.026	000006	3.000,00	1954	Densel/Desa Sidakarya Dps	Hak Pakai	31/12/1954	HP 4	Gedung PDI	Pembelian	2.007.000,00
3	BPKAD	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	01.01.01.02.006	000006	120.450,00	1993	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Kesiman Kertalangu	Hak Pakai	09/12/1993	22.03.02.12.5.00001	sarana pariwisata dan fasilitas rekreasi. tempat..	Hibah	4.336.200,00
4	BPKAD	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000023	170.750,00	1995	Dentim/Desa Kesiman Kertalangu Dps	Hak Pakai	15/12/1995	22.09.02.12.5.00002	Bangunan Gedung	Hibah	139.758.875,00
5	DISDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000002	1.080,00	1967	Jl. Kampus SMK Bali Desa Batubulan Kecamatan Sukawati		Belum Sertifikat		Bangunan Sekolah	Pembelian	393.660,00
6	DKLH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000004	250,00	1977	Jalan Raya Payangan-Kintamani,Desa Onggang, Kec.Payangan, Kab Gianyar		Proses Sertifikat		Bangunan kantor Pemerintah	Pembelian	26.250,00
7	DISKELKAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	400,00	1954	Jl A Yani Singaraja		Belum sertipikat		Bangunan Kantor Pemerintah	Pembelian	15.000,00
8	BPKAD	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.01.01.005	000028	677,00	1980	Jl. Kartini No. 30 Malang		Proses Sertifikat		Bekas Eigendom	Pembelian	135.400,00

**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah											
				Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Kapitaliasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Reklasifikasi			
												Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Dari Aset Lainnya	UNIT
	Jumlah	1.903.061.497.591,22	221.792	140.375.288.069,62	20.582	3.060.263.152,00	260	16.645.000,00	13	14.457.203.939,00	493	10.587.114.197,58	788	201.115.000,00	2
1	Sekretariat DPRD	35.687.841.825,00	2.578,00	407.974.000,00	84,00	-	-	-	-	-	-	48.300.000,00	10,00	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	9.895.553.450,80	785,00	156.397.500,00	34,00	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	10,00	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	839.710.464,00	81,00	19.200.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	75.241.902.381,84	5.604,00	3.551.481.454,00	156,00	-	-	5.145.000,00	3,00	-	-	303.449.200,00	17,00	-	-
5	Dinas Perhubungan	18.243.700.950,56	729,00	3.162.549.000,00	317,00	-	-	11.500.000,00	10,00	2.432.019.800,00	45,00	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	62.664.932.144,84	3.075,00	2.883.194.499,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	676.762.473.335,29	26.557,00	49.811.145.700,90	607,00	3.060.263.152,00	260,00	-	-	50.996.000,00	1,00	4.918.413.104,58	154,00	-	-
8	Dinas Kebudayaan	44.483.216.108,32	1.951,00	1.074.939.400,00	275,00	-	-	-	-	-	-	6.150.000,00	1,00	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	17.328.931.721,51	1.085,00	2.179.435.047,00	63,00	-	-	-	-	730.207.200,00	44,00	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	5.262.901.475,00	549,00	48.500.000,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	5.883.776.814,00	636,00	282.262.000,00	25,00	-	-	-	-	-	-	69.385.000,00	1,00	-	-
12	Badan Pendapatan	34.576.777.089,11	5.460,00	3.262.937.675,00	698,00	-	-	-	-	51.387.300,00	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	12.741.377.248,90	1.396,00	360.684.000,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	11.682.383.848,00	1.215,00	4.293.930.000,00	142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	3.231.507.792,00	291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.195.000,00	1,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.948.944.098,99	374,00	155.568.000,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	9.763.739.442,00	606,00	127.979.250,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.230.278.188,20	2.005,00	1.721.033.000,00	57,00	-	-	-	-	26.500.000,00	7,00	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.776.716.607,66	4.022,00	217.527.000,00	12,00	-	-	-	-	9.800.000,00	3,00	44.280.000,00	3,00	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	6.037.690.699,00	591,00	313.484.999,00	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	4.386.687.585,69	338,00	458.074.248,00	26,00	-	-	-	-	-	-	17.013.810,00	10,00	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	3.795.453.100,00	446,00	689.330.000,00	61,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	5.254.212.869,00	389,00	78.608.720,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Per	83.105.630.593,04	3.181,00	6.424.683.317,00	671,00	-	-	-	-	-	-	986.969.200,00	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.836.524.405,98	1.242,00	19.113.750,00	4,00	-	-	-	-	22.400.000,00	8,00	23.700.000,00	1,00	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	560.994.671.188,19	146.937,00	54.122.269.544,72	16.582,00	-	-	-	-	1.890.561.518,00	334,00	4.062.214.483,00	569,00	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	38.512.547.119,00	3.371,00	3.363.069.790,00	317,00	-	-	-	-	2.893.838.048,00	18,00	58.136.000,00	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	20.932.201.953,67	1.908,00	42.531.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	43.853.400,00	12,00	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.070.584.105,68	1.318,00	259.729.000,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	27.392.619.425,02	2.147,00	184.626.175,00	15,00	-	-	-	-	6.349.494.073,00	33,00	-	-	28.920.000,00	1,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7.496.009.560,93	925,00	703.030.000,00	132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD															
		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Reklasifikasi dari Aset Extra ke Intra	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Salah Pos Belanja Modal	UNIT	Penghapusan	UNIT	Pembayaran Hutang	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Antar Aset Tetap Tahun Berjalan
	Jumlah	9.647.981.179,804	1.187	-	-	6.585.374.700,00	73	573.321.200,00	604	986.969.200,00	20	-	-	-	-	7.231.623.060,90
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.300.000,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	179.500.000,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	56.713.500,00	-	-	-	-	-	-	-	274.729.200,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	2.780.565.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	800.660.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.587.277.465,90
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	560.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	574.000.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	986.969.200,00	20,00	-	-	986.969.200,00	20,00	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	32.520.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,004	-	-	-	15.940.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	343.000.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.000.000,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.280.000,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	152.392.500,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.013.810,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Per	-	-	-	-	-	-	2.910.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	962.626.965,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	42.100.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	9.435.731.179,800	1.159,00	-	-	856.668.000,00	18,00	500.812.700,00	572,00	-	-	-	-	-	-	4.292.145.620,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	12.885.000,00	31,00	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5.750.000,000	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1

No	SKPD	Mutasi Kurang										Saldo Akhir	UNIT	
		Reklasifikasi			Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Mutasi Antar OPD			UNIT
		UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT										
	Jumlah	706	22.859.220.827,70	1.851	238.591.555,002	194	3.402.205.711,38	3.465	-	-	6.585.374.700,00	83	2.046.115.176.574,25	238.267
1	Sekretariat DPRD	10,00	1.102.752.538,000	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.993.063.287,00	2.560,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	10,00	699.791.089,860	95,00	-	-	-	-	-	-	15.940.000,00	3,00	9.515.719.860,94	729,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	112.271.500,000	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	746.638.964,00	76,00
4	Sekretariat Daerah	10,00	2.989.615.265,333	33,00	-	-	2.249.992,00	10,00	-	-	2.507.468.000,00	23,00	73.271.202.078,50	5.704,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	820.213.000,00	203,00	-	-	-	-	23.029.556.750,56	898,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.328.691.643,84	3.219,00
7	Dinas Kesehatan	-	3.021.555.318,950	29,00	-	-	4.896.000,00	-	-	-	5.660.000,00	-	730.784.562.507,92	27.553,00
8	Dinas Kebudayaan	-	2.812.209.903,997	110,00	-	-	4.220.000,00	16,00	-	-	-	-	42.747.875.604,32	2.101,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	15.184.800,00	40,00	-	-	-	-	20.223.389.168,51	1.152,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.311.961.475,00	556,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	93.004.236,000	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.142.419.578,00	645,00
12	Badan Pendapatan	-	1.105.529.735,010	172,00	-	-	13.080.000,00	31,00	-	-	17.720.000,00	12,00	37.328.772.329,10	5.944,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	603.354.009,670	77,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.498.707.239,23	1.342,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.976.313.848,00	1.357,00
15	Dinas Pariwisata	-	575.037.100,000	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.861.185.692,00	264,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	195.237.950,000	26,00	-	-	-	-	-	-	2.780.565.000,00	4,00	6.144.649.149,00	368,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	409.656.049,000	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.825.062.643,00	589,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.977.811.188,20	2.069,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,00	501.774.500,000	153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.529.269.107,66	3.902,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	71.395.000,000	37,00	-	-	11.999.999,00	40,00	-	-	-	-	6.420.173.199,00	581,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	10,00	228.965.088,000	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.615.796.745,69	341,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	55.528.890,000	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.429.254.210,00	492,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	154.714.075,000	18,00	-	-	600.000,00	2,00	-	-	118.100.000,00	2,00	5.059.407.514,00	388,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Perumahan	7,00	819.880.827,000	181,00	-	-	193.375.000,00	65,00	-	-	986.969.200,00	20,00	87.551.521.118,04	3.578,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.943.838.155,98	1.256,00
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	656,00	4.924.046.568,550	398,00	238.591.555,000	194,00	2.088.334.065,38	3.029,00	-	-	-	-	619.318.185.404,78	160.750,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	881.860.900,000	110,00	-	-	3.655.000,00	13,00	-	-	560.000,00	1,00	43.928.630.057,00	3.551,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	408.387.833,330	59,00	0,002	-	420.900,00	-	-	-	-	-	20.609.777.620,33	1.863,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.330.313.105,68	1.338,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	1.067.652.450,000	119,00	-	-	243.536.955,00	15,00	-	-	-	-	32.644.470.268,02	2.062,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	25.000.000,000	1,00	-	-	440.000,00	1,00	-	-	152.392.500,00	18,00	8.026.957.060,93	1.039,00

1

**Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah									
				Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Kapitalisasi Belanja Non Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT
	Jumlah	2.802.017.384.613,55	3.901	360.865.620.932,00	1.727	57.142.325.540,03	10	21.090.193.124,00	-	-	-	134.954.914.896,00	32
1	Sekretariat DPRD	13.320.632.057,11	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	23.390.626.227,27	11,00	429.058.225,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	646.017.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	31.536.254.733,10	41,00	11.820.000,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	12.823.624.508,00	82,00	177.277.800,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	3.399.847.021,04	22,00	133.184.076.085,00	-	4.736.317.557,00	-	21.090.193.124,00	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	569.589.572.011,56	78,00	19.777.176.090,00	5,00	1.046.246.570,03	10,00	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	68.762.782.409,58	60,00	866.409.376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	21.775.007.480,94	116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	751.489.971,00	1,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	8.611.483.560,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pts	4.775.178.608,06	5,00	89.748.084,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	53.573.779.582,51	39,00	1.272.036.890,00	39,00	-	-	-	-	-	-	426.156.000,00	1,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	32.005.249.566,11	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	11.024.792.130,87	15,00	217.599.250,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	1.493.928.545,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.205.847.753,42	11,00	136.757.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1.762.441.000,00	3,00	194.593.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.778.644.456,00	11,00	79.221.596,00	1,00	19.805.400,00	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.037.008.340,40	36,00	192.358.929,00	1.326,00	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	8.252.198.102,43	26,00	99.843.057,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	1.118.135.382,00	7,00	247.726.109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7.526.458.691,20	13,00	397.195.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	1.256.805.518,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	392.442.915.053,60	85,00	54.675.915.450,00	17,00	-	-	-	-	-	-	1.208.109.000,00	1,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.440.267.758,00	48,00	3.705.012.844,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	1.354.006.802.550,04	2.692,00	144.027.427.503,00	315,00	51.339.956.013,00	-	-	-	-	-	1.327.441.440,00	11,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	82.007.426.555,05	164,00	29.504.000,00	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	2,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	32.771.449.321,83	17,00	40.255.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.657.279.540,94	12,00	965.625.332,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	10.128.294.237,42	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.541.718.485,00	16,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.896.634.912,07	7,00	48.984.160,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-

L

No	SKPD	Mutasi Tambah										Salah Pos Belanja Modal	
		Reklasifikasi				Koreksi Pencatatan Saldo Awal		Reklasifikasi dari Aset Extra ke Intra		Mutasi Antar OPD		Salah Pos Belanja Modal	UNIT
		Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Dari Aset Lainnya	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT		
	Jumlah	25.206.551.513,44	11	6.747.144.940,00	3	12.718.023.955,00	49	92.446.563,14	6	14.354.261.589,00	13	1.480.820.943,00	1.330
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.684.625,00	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1.142.119.000,00	1,00	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.396.700,00	1,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	743.586.480,00	1,00	-	-
7	Dinas Kesehatan	13.505.236.748,44	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.929.376,00	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	65.446.563,14	3,00	34.340.000,00	1,00	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	46.592.154,00	1,00	-	-	39.500.000,00	1,00	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.748.084,00	1,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	6.878.129.716,00	41,00	-	-	560.197.824,00	4,00	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	6.747.144.940,00	3,00	389.849.000,00	2,00	-	-	10.871.206.000,00	4,00	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.757.152,00	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.593.000,00	1,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.810.000,00	1.325,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	11.118.520.410,00	7,00	-	-	259.000,00	1,00	-	-	-	-	17.254.161,00	1,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	208.446.000,00	-	43.957.845,00	1,00
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	85.387.100,00	2,00	-	-	3.399.123.085,00	1,00	27.000.000,00	3,00	754.866.285,00	1,00	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.690.000,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.018.255,00	1,00	-	-	2.004.071.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	448.389.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L

No	SKPD	Mutasi Kurang												
		Penghapusan	UNIT	Pembayaran Hutang	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Reklasifikasi					Koreksi Pencatatan Saldo Awal	
								Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT	Ke Properti Investasi		UNIT
	Jumlah	10.871.206.000,00	4	-	-	5.964.259.528,00	26	178.111.900.069,61	19	6.487.254.674,00	9	25.000.000,00	1	9.728.021.884,84
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	11.820.000,00	6,00	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	156.351.359.326,00	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	4.327.277.207,61	1,00	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	59.341.989,00	1,00	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	13.936.000,00	-	261.050.464,00	4,00	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	10.871.206.000,00	4,00	-	-	5.964.259.528,00	26,00	-	-	1.689.008.000,00	2,00	25.000.000,00	1,00	41.390.000,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	183.899.250,00	2,00	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	99.026.996,00	1,00	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	99.843.057,00	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	16.686.922.469,00	6,00	-	-	-	-	837.379.000,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	229.489.615,00	1,00	4.537.196.210,00	3,00	-	-	8.849.252.884,70
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	48.984.160,00	1,00	-	-	-	-	-

L

No	SKPD							Saldo Akhir	UNIT	
		UNIT	Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Pembayar di Muka	UNIT	Mutasi Antar OPD			UNIT
	Jumlah	257	114.974.000,00	7	-	-	14.354.261.589,00	14	3.208.051.168.977,71	4.085,00
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	13.320.632.057,11	16,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	23.513.999.827,27	18,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	646.017.000,00	1,00
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	32.678.373.733,10	43,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	12.855.505.608,00	83,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	6.802.660.941,04	23,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	599.590.954.212,42	93,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	69.151.262.409,58	60,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	22.566.942.026,08	120,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	8.697.575.714,00	9,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pts	-	-	-	-	-	-	-	4.775.178.608,06	5,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	62.435.313.548,51	120,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1,00	-	-	-	-	1.145.337.304,00	4,00	30.277.248.674,11	159,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	11.058.492.130,87	15,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	1.493.928.545,00	13,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	3.205.847.753,28	11,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	1.762.441.000,00	3,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	6.778.644.456,00	11,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	21.180.557.269,40	37,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	8.252.198.102,43	26,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	1.365.861.491,00	7,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	7.923.653.691,20	13,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	1.256.805.518,00	10,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4,00	45.962.000,00	1,00	-	-	11.834.518.285,00	6,00	430.023.682.998,60	93,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	1.142.119.000,00	1,00	18.167.649.757,00	47,00
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	252,00	35.140.000,00	4,00	-	-	-	-	1.541.316.925.266,34	2.765,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	39.500.000,00	1,00	82.697.430.555,05	165,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	19.565.000,00	-	-	-	-	-	32.771.449.321,83	17,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	5.675.994.127,94	18,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	14.307.000,00	2,00	-	-	192.787.000,00	2,00	140.911.307.722,42	77,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	4.896.634.912,07	7,00

L

**Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah							
				Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Reklasifikasi	
										Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT
Jumlah		3.439.564.896.158,92	1.016	232.361.545.288,00	52	23.335.518.117,00	-	128.744.076.042,00	26	182.929.700.109,00	20
1	Sekretariat DPRD	2.096.630.480,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	333.387.032,17	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	3.220.356.777,00	25,00	96.507.222,00	2,00	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	11.688.506.858,00	79,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	17.280.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	10.901.712.265,61	36,00	106.025.424,00	2,00	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	3.073.609.650,00	19,00	347.938.000,00	9,00	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	7.620.982.364,69	22,00	-	-	-	-	-	-	59.341.989,00	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	149.181.650,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptp	131.691.734,00	5,00	69.385.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	2.084.267.420,00	11,00	23.162.700,00	-	-	-	391.181.000,00	1,00	13.936.000,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.923.959.975,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	61.060.000,00	3,00	68.400.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	190.834.765,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12.525.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	34.380.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	575.840.000,00	8,00	10.600.500,00	2,00	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.585.882.600,00	16,00	8.100.000,00	4,00	-	-	-	-	500.000,00	1,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	41.321.500,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	23.325.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	123.093.800,00	3,00	9.859.000,00	5,00	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.360.850.903.520,98	478,00	231.404.590.492,00	23,00	23.335.518.117,00	-	-	-	182.849.522.970,00	19,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	18.089.000,00	1,00	43.500.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	18.383.601.162,61	192,00	-	-	-	-	283.377.000,00	1,00	6.399.150,00	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	6.856.031.580,16	47,00	58.136.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	5.754.916.656,70	10,00	113.390.950,00	-	-	-	2.155.632.600,00	2,00	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	853.089.800,00	9,00	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	870.388.067,00	12,00	-	-	-	-	125.913.885.442,00	22,00	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	88.047.500,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD											Mutasi Kurang	
				Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	Salah Pos Belanja Modal	UNIT	Penghapusan	UNIT	Reklasifikasi	
		Dari Aset Lainnya	UNIT									Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT
	Jumlah	-	-	35.463.647.499,90	14	258.083.369.750,00	10	394.854.222,00	14	255.927.737.150,00	9	310.017.710.900,00	5
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	79.607.222,00	-	-	-	16.900.000,00	1,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	714.007.800,00	1,00	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	1.441.624.800,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	292.088.000,00	8,00	-	-	6.150.000,00	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	31.497.885.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.385.000,00	1,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	255.927.737.150,00	9,00	-	-	255.927.737.150,00	9,00	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	1,00	-	-	500.000,00	1,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	9.859.000,00	5,00	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	2.781.551.800,00	5,00	-	-	-	-	-	-	309.799.086.500,00	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.700.000,00	1,00
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-	-	1.184.210.699,90	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.136.000,00	1,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	7.150.000,00	-	-	-	43.853.400,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	1.950.000,00	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6

No	SKPD	Koreksi				Saldo Akhir	UNIT
		Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT		
	Jumlah	103.194.800,00	-	258.083.369.750,00	11	3.476.544.508.140,82	1.099
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	2.096.630.480,00	9,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	333.387.032,17	4,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	3.220.356.777,00	26,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	12.402.514.658,00	80,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	17.280.000,00	1,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	12.449.362.489,61	38,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	3.123.309.650,00	20,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	39.178.209.353,69	24,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	149.181.650,00	4,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	131.691.734,00	5,00
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	2.512.547.120,00	12,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	1.923.959.975,00	7,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	129.460.000,00	4,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	190.834.765,00	6,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	12.525.000,00	4,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	34.380.000,00	1,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	586.440.500,00	10,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	1.589.782.600,00	19,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	41.321.500,00	1,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	23.325.000,00	1,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	123.093.800,00	3,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	103.194.800,00	-	255.927.737.150,00	9,00	3.235.980.690.447,98	516,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	37.889.000,00	2,00
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	19.857.588.012,51	200,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	6.856.031.580,16	47,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	2.155.632.600,00	2,00	5.817.304.206,70	10,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	853.089.800,00	9,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	126.784.273.509,00	34,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	88.047.500,00	2,00

6

**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah										Salah Pos Belanja Modal
				Belanja Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	UNIT	Mutasi Antar OPD	UNIT	
								Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT					
	Jumlah	71.537.786.207,25	203.172	30.899.659.003,37	281.698	259.980.000,00	20	2.574.966.767,00	7.096	225.112.500,00	3.538	3.787.500,00	2	13.288.365.765,00
1	Sekretariat DPRD	396.341.550,00	635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	840.648.500,00	27,00	99.955.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	709.170.997,00	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	20.620.000,00	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	23.037.000,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	379.480.520,00	97,00	206.627.989,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	1.815.924.136,90	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	11.573.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	550.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	24.500.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	8.457.505,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	45.232.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.100.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	25.320.000,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.477.300,00	304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	844.819.140,00	268,00	49.500.000,00	2,00	4.000.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	49.500.000,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	1.564.330.000,00	57,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787.500,00	2,00	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	2.600.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	26.300.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasari	941.347.000,00	16,00	1.748.081.114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.748.081.114,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	163.263.277,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.853.216.480,45	200.260,00	28.795.494.900,37	281.694,00	255.980.000,00	16,00	2.525.982.607,00	7.095,00	225.112.500,00	3.538,00	-	-	11.490.784.651,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.897.260.364,90	118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	4.696.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	235.099.400,00	58,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	607.634.536,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	24.787.500,00	3,00	-	-	-	-	48.984.160,00	1,00	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang										Saldo Akhir	UNIT	
		UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT	Reklasifikasi				Dibawah Kapitalisasi	UNIT	Mutasi Antar OPD			UNIT
					Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT	Ke Aset Lainnya	UNIT						
	Jumlah	123.851	37.800.000,00	12	2.836.226.720,00	7.096	505.530.835,00	87	4.950.197.483,93	75.436	3.787.500,00	2	83.879.383.673,69	289.042
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.341.550,00	635,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940.603.500,00	28,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709.170.997,00	570,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.620.000,00	63,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.037.000,00	23,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	206.627.989,00	1,00	-	-	-	-	379.480.520,00	97,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.815.924.136,90	600,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.573.000,00	4,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	1,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000,00	2,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.457.505,00	2,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.232.000,00	2,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	1,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.320.000,00	5,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.477.300,00	304,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,00	37.800.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	811.019.140,00	260,00
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.117.500,00	59,00
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	2,00
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.300.000,00	2,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941.347.000,00	16,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.263.277,00	13,00
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	123.849,00	-	-	2.387.837.720,00	7.095,00	298.902.846,00	86,00	4.950.197.483,93	75.436,00	-	-	73.528.063.786,89	286.137,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.897.260.364,90	118,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.696.000,00	4,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.099.400,00	58,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	448.389.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	159.245.536,00	34,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787.500,00	2,00	69.984.160,00	2,00

**Rincian Mutasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang					
				Belanja Modal	UNIT	Hutang	UNIT	Reklasifikasi		Penghapusan	UNIT	Pengeluaran Hibah	UNIT
								Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT				
	Jumlah	119.528.622.700,55	110	-	-	-	-	161.582.561.661,03	21	154.675.000,00	3	173.106.010,00	-
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	99.415.800,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	43.974.901.519,00	1,00	-	-	-	-	156.351.359.326,00	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	13.560.306.449,84	1,00	-	-	-	-	801.646.603,03	1,00	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	154.675.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	154.675.000,00	3,00	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	179.168.660,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pts	114.345.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	79.608.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	83.858.835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	183.899.250,00	2,00	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	99.026.996,00	1,00	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	99.843.057,00	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	14.388.501.160,00	44,00	-	-	-	-	3.817.296.814,00	14,00	-	-	173.106.010,00	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	46.625.873.686,71	54,00	-	-	-	-	229.489.615,00	3,00	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	133.376.590,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	134.592.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Reklasifikasi		Saldo Akhir	UNIT
		Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	UNIT		
	Jumlah	14.657.122.947,54	11	266.126.280.404,04	117
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	99.415.800,00	1,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	200.326.260.845,00	1,00
7	Dinas Kesehatan	13.310.741.782,54	1,00	1.051.211.270,33	1,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	179.168.660,00	2,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pts	-	-	114.345.000,00	1,00
12	Badan Pendapatan	-	-	79.608.000,00	1,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	83.858.835,00	-
14	Inspektorat	-	-	183.899.250,00	2,00
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	99.026.996,00	1,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	99.843.057,00	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.297.362.910,00	9,00	16.735.329.054,00	49,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-	-	46.855.363.301,71	57,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.018.255,00	1,00	84.358.335,00	1,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	134.592.000,00	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-

6

**Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2023**

No	SKPD	Saldo Awal					Semester 1		
		Total	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ
	Jumlah	4.364.471.415.739,91	1.501.514.983.519,42	564.455.175.423,36	2.279.918.909.860,73	18.582.346.936,40	80.620.852.517,01	28.207.554.156,40	67.674.304.126,00
1	Sekretariat DPRD	37.680.403.891,00	30.936.173.057,00	6.196.517.037,00	426.912.131,00	120.801.666,00	924.804.524,00	117.690.954,00	36.173.326,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	11.833.171.540,80	7.658.507.377,80	3.718.579.736,00	35.476.718,00	420.607.709,00	570.790.283,00	225.182.366,00	11.033.342,00
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	776.298.697,00	651.411.368,00	124.887.329,00	-	-	59.307.104,00	11.998.522,00	-
4	Sekretariat Daerah	74.534.663.967,92	62.518.590.404,92	10.618.538.480,00	1.233.266.298,00	164.268.785,00	3.274.446.731,00	318.894.061,00	103.683.412,00
5	Dinas Perhubungan	30.143.788.978,00	14.581.281.491,00	10.373.965.774,00	5.175.306.713,00	13.235.000,00	709.437.298,00	282.543.285,00	162.298.017,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	55.677.866.321,00	54.929.390.403,00	725.399.918,00	9.576.000,00	13.500.000,00	1.496.116.582,00	41.864.578,00	432.000,00
7	Dinas Kesehatan	610.874.970.292,42	526.876.274.613,42	81.753.726.579,00	2.028.036.769,00	216.932.331,00	28.907.445.818,00	5.759.067.898,00	196.880.982,00
8	Dinas Kebudayaan	73.748.698.601,08	41.394.993.132,32	29.251.225.732,35	1.686.939.029,00	1.415.540.707,40	696.367.914,00	630.995.137,00	92.310.501,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	28.306.544.810,69	16.587.480.050,51	5.945.031.895,00	5.774.032.865,18	-	335.999.214,00	215.089.908,00	14.883.819.226,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	7.265.488.197,00	5.062.011.467,00	2.172.593.259,00	30.883.471,00	-	83.103.040,00	88.227.670,00	1.966.979,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	6.081.048.873,00	4.864.779.984,00	1.185.114.927,00	31.153.962,00	-	205.184.005,00	47.962.566,00	2.461.550,00
12	Badan Pendapatan	44.251.625.519,11	26.474.963.455,11	17.124.046.495,00	652.615.569,00	-	1.328.151.426,00	586.576.562,00	88.177.191,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	30.544.722.329,90	11.119.468.501,90	18.752.184.337,00	648.569.491,00	24.500.000,00	371.872.512,00	607.130.291,40	23.311.416,00
14	Inspektorat	12.224.141.076,00	10.448.331.905,00	1.765.602.064,00	10.207.107,00	-	340.726.775,00	104.024.280,00	828.333,00
15	Dinas Pariwisata	3.718.121.535,00	3.043.837.883,00	570.910.905,00	58.140.747,00	45.232.000,00	73.440.736,00	14.501.193,00	3.746.653,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.395.631.221,00	8.797.941.402,00	1.588.400.756,00	8.189.063,00	1.100.000,00	47.897.674,00	28.109.277,00	313.125,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	9.995.161.342,00	9.157.102.260,00	801.183.582,00	11.555.500,00	25.320.000,00	139.480.073,00	14.337.290,00	573.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.507.865.962,20	62.945.854.767,20	1.350.340.277,00	211.670.918,00	-	883.279.946,00	65.641.381,00	13.931.916,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	24.637.863.060,66	18.804.143.572,66	4.815.577.319,00	530.259.899,00	487.882.270,00	777.943.633,00	204.672.960,00	25.239.989,00
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	10.295.170.671,00	5.194.463.867,00	4.614.646.635,00	-	486.060.169,00	191.009.282,00	82.415.170,00	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	4.556.432.763,33	3.650.906.159,33	899.024.017,00	3.902.587,00	2.600.000,00	207.258.595,00	6.820.060,00	688.692,00
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7.892.008.207,00	2.922.567.999,00	4.968.128.177,00	1.312.031,00	-	219.162.141,00	72.618.118,00	291.563,00
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	5.488.182.143,00	4.900.984.575,00	515.714.714,00	45.182.854,00	26.300.000,00	115.445.631,00	12.873.662,00	1.738.160,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.347.120.026.875,59	61.764.131.561,04	33.403.654.439,00	2.251.930.157.542,55	22.083.333,00	2.809.274.776,00	3.908.228.367,00	51.118.838.855,00
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	18.091.447.542,98	7.839.217.052,98	10.089.455.770,00	5.476.943,00	157.297.777,00	196.676.424,00	149.528.115,00	301.483,00
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	705.515.414.411,97	400.689.312.879,96	287.460.549.893,01	3.802.046.554,00	13.563.505.085,00	32.834.727.755,00	13.280.384.562,00	502.914.091,00
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	52.874.849.933,00	34.487.573.901,00	14.055.837.031,00	3.702.441.897,00	628.997.104,00	1.258.950.367,00	826.689.032,00	232.219.949,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	25.709.777.560,57	19.384.350.278,57	4.862.391.171,00	1.463.036.111,00	-	376.542.153,00	327.931.186,00	137.647.725,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.551.895.108,67	14.163.499.184,67	982.927.541,00	178.274.383,00	227.194.000,00	212.448.938,01	26.364.377,00	12.572.826,00
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	26.850.615.221,02	23.737.932.196,02	2.429.728.275,00	184.565.750,00	498.389.000,00	702.644.319,00	94.430.334,00	18.325.803,00
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7.327.519.086,00	5.927.506.769,00	1.339.291.359,00	39.720.958,00	21.000.000,00	270.916.848,00	54.760.994,00	1.584.021,00

No	SKPD	Mutasi Tambah									
		B. Penyusutan					Koreksi Pencatatan Saldo Awal				
		Semester 2									
		ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM
	Jumlah	839.924.424,00	80.782.982.665,19	30.457.793.221,34	160.953.008.607,66	779.034.557,00	4.577.318,00	2.734.452.028,00	6.555.482,00	-	4.774.060.453,00
1	Sekretariat DPRD	12.216.000,00	932.378.883,00	117.690.955,00	36.173.324,00	10.469.334,00	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	53.724.850,00	380.547.336,00	225.387.989,00	11.033.343,00	55.390.767,00	-	7.350,00	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	45.679.923,00	11.998.522,00	-	-	-	19.191.495,00	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	20.617.100,00	2.630.507.918,20	318.894.063,00	103.329.618,00	20.617.100,00	-	210.933.202,00	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	633.388.928,00	262.209.236,00	162.298.017,00	-	-	-	-	-	526.937.629,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	1.684.461.236,80	41.864.584,00	432.000,00	-	-	18.825,00	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	8.678.000,00	28.920.105.141,50	6.004.271.023,00	198.951.935,00	8.678.000,00	-	12.383.598,00	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	4.999.000,00	669.793.974,00	639.183.028,00	87.480.782,00	4.999.000,00	-	537.212,00	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	404.676.341,00	215.089.914,00	925.826.875,00	-	-	5.402.193,00	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	46.024.912,00	88.460.631,00	1.966.978,00	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	197.475.186,00	47.962.566,00	2.461.550,00	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	1.387.349.450,00	592.654.521,00	88.225.447,00	-	-	1.997.761.100,00	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	423.024.276,00	386.031.475,34	11.810.791.387,66	-	-	387.333.728,00	-	-	-
14	Inspektorat	-	617.973.308,00	104.081.592,00	1.683.333,00	-	-	4.292.388,00	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	39.503.656,00	14.501.193,00	3.746.654,00	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	56.349.072,00	28.109.276,00	313.125,00	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	135.815.777,00	14.337.290,00	573.000,00	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	911.711.102,00	65.641.382,00	13.996.666,00	-	-	-	-	-	536.249,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	15.880.001,00	679.312.856,00	205.365.694,00	25.346.733,00	15.913.334,00	-	7.283.290,00	-	-	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	43.692.333,00	197.290.424,00	82.415.171,00	-	20.860.250,00	-	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	245.257.574,00	7.075.794,00	688.692,00	-	3.486.615,00	-	-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	262.267.148,00	73.412.187,00	291.562,00	-	-	662.274,00	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	92.655.918,00	12.873.662,00	1.738.160,00	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.650.000,00	3.004.998.523,00	3.964.101.380,00	146.611.446.097,00	1.766.667,00	-	-	-	-	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	171.356.080,00	152.286.589,00	548.983,00	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	618.248.911,00	33.431.225.262,00	13.971.804.527,00	475.871.791,00	580.713.675,00	1.090.703,00	70.219.711,00	6.555.482,00	-	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	59.218.229,00	1.109.572.630,00	826.989.578,00	217.382.322,00	59.218.229,00	-	18.425.662,00	-	-	860.822.317,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	300.888.682,69	327.931.188,00	137.927.582,00	-	-	-	-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	209.014.112,00	1.506.546.216,00	12.572.827,00	-	-	-	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	657.321.520,00	93.861.001,00	18.325.804,00	-	-	-	-	-	3.385.764.258,00
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	305.055.515,00	54.760.994,00	1.584.020,00	408.201,00	-	-	-	-	-

2

No	SKPD	Mutasi Kurang													
		nyusutan Barang Terima Hibah			Reklasifikasi dari akumulasi Aset Lainnya				Mutasi Antar OPD				Akumulasi Penyusutan Aset ya		
		GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ
	Jumlah	12.712.780.737,00	1.194.941.486,00	-	201.115.000,00	848.926.307,60	-	-	4.204.204.371,00	986.435.846,00	112.272.532,00	-	-	2.544.753.441,00	-
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	641.490.172,00	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	37.187.907,00	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	2.780.565.000,00	135.084.880,00	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	81.374.285,00	-	75.084.625,00	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.252.483,00	-	-	-	-	-	-	34.340.000,00	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	560.000,00	6.385.833,00	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	11.484.717,00	-	-	-	-	54.666.667,00	152.779.525,00	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	848.926.307,60	-	-	-	-	-	-	2.544.753.441,00	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	172.195.000,00	-	-	24.250.668,00	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	15.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	343.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	5.079.751,00	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.208.109.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	42.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	24.767.305,00	-	-	-	-	-	856.668.000,00	16.355.436,00	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	112.272.532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	11.471.651.949,00	1.071.184.237,00	-	28.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Kurang											
		Ang Dihilangkan	Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya				Reklasifikasi ke Akumulasi Properti Investasi				Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
			ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB
	Jumlah	37.800.000,00	22.366.447.246,70	2.686.827.348,00	-	17.688.600,00	-	23.541.667,00	-	-	102.032.276,09	5.058.624.881,02	113.467.044,00
1	Sekretariat DPRD	-	1.102.752.538,00	-	-	-	-	-	-	-	-	83.378.951,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	699.593.590,86	-	-	-	-	-	-	-	-	911.588,00	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	99.613.166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	2.608.381.930,33	-	-	-	-	-	-	-	-	245.232.619,00	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	2.951.412.769,95	-	-	-	-	-	-	-	-	178.157.269,00	-
8	Dinas Kebudayaan	-	2.812.209.904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	886.933.127,82	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.086.349,00	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	93.004.236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	1.103.656.548,01	160.420.691,00	-	-	-	-	-	1.300.000,00	-	41.092.876,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	603.354.009,67	1.436.861.493,00	-	-	-	23.541.667,00	-	-	-	267.690.905,00	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.087.788,00	-
15	Dinas Pariwisata	-	574.862.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	553.575,00	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	195.237.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.440.992,19	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	409.656.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.107.240,00	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.936.759,00	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	37.800.000,00	501.774.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.418.752,00	-
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	71.395.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	932.711,00	-
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	213.046.603,00	-	-	-	-	-	-	3.486.615,00	-	-	-
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	50.996.556,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	154.714.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.496.161,00	-
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	819.880.827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	466.637.420,00	113.467.044,00
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-	4.918.695.794,55	1.089.545.164,00	-	17.688.600,00	-	-	-	97.245.661,08	2.242.342.033,01	-	-
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	881.608.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.549.864,00	-
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	407.947.833,33	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	1.067.652.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.139.469,00	-
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	179.498.432,00	-

1

No	SKPD	Pembelian								PM	
		Penghapusan				Mutasi Antar OPD					
		ATL	PM	GB	JIJ	ATL	PM	GB	JIJ		ATL
	Jumlah	448.389.000,00	65.797.940,00	72.474.707,34	11.787.479.971,66	-	4.204.204.371,00	986.435.846,00	112.272.532,00	-	1.645.364.294.009,83
1	Sekretariat DPRD	-					-	-	-	-	31.690.603.926,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-					15.940.000,00	-	-	-	7.894.311.405,94
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-					-	-	-	-	656.785.229,00
4	Sekretariat Daerah	-					1.268.848.952,00	-	-	-	64.546.314.171,79
5	Dinas Perhubungan	-					-	-	-	-	16.451.045.346,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-					-	-	-	-	60.890.533.221,80
7	Dinas Kesehatan	-					5.660.000,00	-	-	-	581.828.127.087,97
8	Dinas Kebudayaan	-					-	-	-	-	39.948.945.116,32
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-					-	-	-	-	17.328.155.605,51
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-					-	-	-	-	5.191.699.419,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-					-	-	-	-	5.174.434.939,00
12	Badan Pendapatan	-					9.450.668,00	-	-	-	28.130.723.782,10
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	65.797.940,00	72.474.707,34	11.787.479.971,66	-	-	290.867.050,00	-	-	11.245.213.340,23
14	Inspektorat	-					-	-	-	-	11.407.031.988,00
15	Dinas Pariwisata	-					-	-	-	-	2.778.365.843,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-					2.780.565.000,00	-	-	-	5.942.325.198,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-					-	-	-	-	9.365.742.061,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-					-	-	-	-	64.741.382.064,20
20	Badan Kepegawaian Daerah	-					-	-	-	-	19.759.625.561,66
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	-					-	-	-	-	5.516.448.324,00
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-					-	-	-	-	3.890.375.725,33
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-					-	-	-	-	3.353.000.732,00
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-					118.100.000,00	-	-	-	4.836.272.049,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	16.355.436,00	-	-	66.758.524.033,04
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-					-	641.490.172,00	-	-	8.249.349.556,98
28	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-					-	-	-	-	462.797.083.144,33
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-					560.000,00	6.385.833,00	-	-	36.834.750.399,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-					-	-	112.272.532,00	-	19.653.833.280,92
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-					-	-	-	-	14.584.962.234,68
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	448.389.000,00					-	31.337.355,00	-	-	27.444.929.843,02
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-					5.079.751,00	-	-	-	6.473.399.381,00

2

No	SKPD	Saldo Akhir			
		GB	JIJ	ATL	TOTAL
Jumlah		629.030.459.829,34	2.497.846.772.546,73	19.697.428.317,40	4.791.938.954.703,30
1	Sekretariat DPRD	6.348.519.995,00	499.258.781,00	143.487.000,00	38.681.869.702,00
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	4.168.245.853,00	57.543.403,00	529.723.326,00	12.649.823.987,94
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	168.075.868,00	-	-	824.861.097,00
4	Sekretariat Daerah	11.863.517.359,00	1.440.279.328,00	205.502.985,00	78.055.613.843,79
5	Dinas Perhubungan	10.918.718.295,00	5.537.090.654,00	13.235.000,00	32.920.089.295,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	944.232.785,00	10.440.000,00	13.500.000,00	61.858.706.006,80
7	Dinas Kesehatan	93.351.291.829,00	2.498.954.311,00	234.288.331,00	677.912.661.558,97
8	Dinas Kebudayaan	29.635.007.981,53	1.866.730.312,00	1.425.538.707,40	72.876.222.117,26
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	6.160.120.044,00	21.583.678.966,18	-	45.071.954.615,69
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	2.355.667.393,00	34.817.428,00	-	7.582.184.240,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	1.281.040.059,00	36.077.062,00	-	6.491.552.060,00
12	Badan Pendapatan	20.252.304.636,00	840.502.924,00	-	49.223.531.342,10
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	16.345.416.876,00	695.192.323,00	24.500.000,00	28.310.322.539,23
14	Inspektorat	1.973.912.536,00	12.718.773,00	-	13.393.663.297,00
15	Dinas Pariwisata	599.359.716,00	65.634.054,00	45.232.000,00	3.488.591.613,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.600.178.316,81	8.815.313,00	1.100.000,00	7.552.418.827,81
17	Satuan Polisi Pamong Praja	805.750.922,00	12.701.500,00	25.320.000,00	10.209.514.483,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.469.686.281,00	239.599.500,00	-	66.450.667.845,20
20	Badan Kepegawaian Daerah	5.193.480.511,00	580.846.621,00	481.875.605,00	26.015.828.298,66
21	Badan Penghubung Provinsi Bali	4.778.544.265,00	-	550.612.752,00	10.845.605.341,00
23	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	912.919.871,00	5.279.971,00	2.600.000,00	4.811.175.567,33
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	5.114.820.756,00	1.895.156,00	-	8.469.716.644,00
25	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	539.965.877,00	48.659.174,00	26.300.000,00	5.451.197.100,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman	42.001.100.330,00	2.449.546.975.450,55	26.500.000,00	2.558.333.099.813,59
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.749.780.302,00	6.327.409,00	157.297.777,00	18.162.755.044,98
28	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	311.492.194.237,00	4.787.387.918,00	14.744.779.071,00	793.821.444.370,33
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	15.666.005.606,00	4.152.044.168,00	747.433.562,00	57.400.233.735,00
30	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	5.518.253.545,00	1.738.611.418,00	-	26.910.698.243,92
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.515.838.134,00	203.420.036,00	227.194.000,00	17.531.414.404,68
32	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	14.037.194.735,00	1.292.401.594,00	50.000.000,00	42.824.526.172,02
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.269.314.915,00	42.888.999,00	21.408.201,00	7.807.011.496,00

**Rincian Aset Properti Investasi
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
Jumlah Aset Tetap Dikerjasamakan								557.987.783.998,00	(1.429.982.867,97)	19.074.369,00	557.987.783.998,00	50.515.519.625,00	804.738.000,00	19.074.369,00	649.811.670.673,00	(1.788.378.890,97)	647.976.208.448,03
Jumlah Aset Tetap Tanah Dikerjasamakan								893.910,00	554.293.915.520,00	-	554.293.915.520,00	50.219.819.625,00	804.738.000,00	-	645.797.102.195,00	-	645.797.102.195,00
1	01.01.01.01.002	000027	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.09.02.07.4.00036	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kauh/Jalan PudaK/Kamboja		Perjanjian Sewa dengan DPW IMO (Kalan Media Online) No. 593.1/1665/UPTD.PBMD tgl 21 September 2020	130,00	DPW Kalan Media Online	91.455.000,00					91.455.000,00	91.455.000,00	
2	01.01.01.01.002	000042	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.09.03.04.4.00048	Jin. Gurita Sesetan Denpasar		Perjanjian Sewa dengan Ni Ketut Supadmi No. 593.1/928/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31-3-2021	301,00	Ni Ketut Supadmi	139.200.000,00					139.200.000,00	139.200.000,00	
3	01.01.01.01.002	000022	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.04.05.14.4.00086	Buleleng/Buleleng/Kel. Banjar Bali		Perjanjian Sewa dengan DPC Organda No. 593.1/4327/UPT.P2.BPKAD tanggal 13 Agustus 2018	1.800,00	DPC Organda	540.000.000,00					540.000.000,00	540.000.000,00	
4	01.01.01.01.002	000020	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.03.04.04.4.00122	Badung/Kuta/Kel. Kuta		Perjanjian Sewa dengan Gana Paramananda No. 593/1269/UPTD.PBMD tgl 10 Juni 2019	440,00	Gana Pramananda	1.647.800.000,00					1.647.800.000,00	1.647.800.000,00	
5	01.01.01.01.005	000018	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	21	Badung/Kuta/Ds. Kuta/Kel.Kuta ex asrama Transito Jin. Imambonjol		Perjanjian Sewa dengan Putu Kangen Disastra, perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	400,00	Putu Kangen Disastra	1.525.000,00					1.525.000,00	1.525.000,00	
6	01.01.01.01.005	000017	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	20	Badung/Kuta/Ds. Kuta/Kel.Kuta ex asrama Transito Jin. Imambonjol		Perjanjian Sewa dengan Putu Kangen Disastra, perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	600,00	Putu Kangen Disastra	2.913.000,00					2.913.000,00	2.913.000,00	
7	01.01.01.01.005	000015	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	18	Badung/Kuta/Ds. Kuta/Kel.Kuta Ex.Asrama Transito Jin. Imambonjol		Perjanjian Sewa dengan Putu Kangen Disastra, Perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	2.000,00	Putu Kangen Disastra	7.260.000,00					7.260.000,00	7.260.000,00	
8	01.01.01.01.005	000016	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	17	Badung/Kuta/Ds. Kuta/Kel.Kuta ex asrama Transito Jin. Imambonjol		Perjanjian Sewa dengan Putu Kangen Disastra, perubahan III nomor 593/4222/UPT.P2.BPKAD tgl 6 Agustus 2018	3.000,00	Putu Kangen Disastra	9.000.000,00					9.000.000,00	9.000.000,00	
9	01.01.01.01.005	000019	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	115	Tabanan/Baturiti/Ds.Candikuning		Perjanjian Sewa dengan Gde Ketut Nugraha Pendit, Perpanjangan I no B.13.593/1223/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 5 Mei 2023	7.050,00	Gde Ketut Nugraha Pendit	24.675.000,00					24.675.000,00	24.675.000,00	
10	01.01.01.01.005	000020	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	116	Tabanan/Baturiti/Ds.Candikuning		Perjanjian Sewa dengan Gde Ketut Nugraha Pendit, Perpanjangan I no B.13.593/1223/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 5 Mei 2023	14.300,00	Gde Ketut Nugraha Pendit	50.050.000,00					50.050.000,00	50.050.000,00	
11	01.01.01.01.006	000001	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage	22.03.08.02.5.00005	Badung/Kuta Utara/Ds. Canggu		Perjanjian Sewa dengan PT Citrakarya Sukses, Perpanjangan I no 593.1/1719/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 10 Agustus 2020	3.677,00	PT Citrakarya Sukses	3.677.000.000,00					3.677.000.000,00	3.677.000.000,00	
12	01.01.01.01.012	000003	Tanah Kaveling (dst)	22.03.04.15.4.00003	Badung/Kuta/Kel. Legian/Jln.Nakula (Depan Pura Ulun Tanjung)		Perjanjian Sewa dengan I Gede Rai Ardiana, Perpanjangan I nomor 593.1/2721/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2020	585,00	I Gede Rai Ardiana	311.250.000,00					311.250.000,00	311.250.000,00	
13	01.01.01.02.003	000047	Tanah Bangunan Gudang	22.03.05.16.4.00005	Badung/Mengwi/Kel. Abianbase		Perjanjian Sewa oleh I Bagus Putra Wainawa No. 593.1/8667/PPA.Aset tgl 23 Oktober 2014 Perpanjangan I No 593.1/5416/UPTD.PBMD tgl 4 Desember 2019	480,00	I Bagus Putra Wainawa	3.718.000,00					3.718.000,00	3.718.000,00	
14	01.01.01.02.003	000045	Tanah Bangunan Gudang	22.01.02.06.4.00019	Ds. Baler Bale Agung Kec.Negara Kab. Jembrana		Perjanjian Sewa dengan Pemkab Jembrana No. B.13.032/4364/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Desember 2022	2.770,00	Pemkab Jembrana	8.300.000,00					8.300.000,00	8.300.000,00	
15	01.01.01.02.003	000017	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.09.4.00068	Jln.Moh. Yamin Denpasar		Perjanjian Sewa dengan A.A. Ngurah Anom ST, Perpanjangan II nomor 593.1/2020/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Oktober 2020	369,00	A.A. Ngurah Anom ST	13.284.000,00					13.284.000,00	13.284.000,00	
16	01.01.01.02.003	000015	Tanah Bangunan Gudang	22.03.04.08.4.00010	Badung/Kuta/Kel. Legian/Subak/Legian		Perjanjian Sewa dengan I Wayan Rumanik, Perpanjangan II no B.13.032/1820/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 16 Juni 2022	65,00	I Wayan Rumanik	25.610.000,00					25.610.000,00	25.610.000,00	
17	01.01.01.02.003	000018	Tanah Bangunan Gudang	22.03.04.12.4.00013	Badung/Kuta/Kel. Seminyak		Perjanjian sewa dengan I Wayan Adnyana No. 593.1/19567/PPA.Aset tgl 10 Desember 2014 perpanjangan I nomor 593.1/1276/UPTD.PBMD tgl 10 Juli 2020	290,00	I Wayan Adnyana	155.730.000,00					155.730.000,00	155.730.000,00	
18	01.01.01.02.003	000007	Tanah Bangunan Gudang	22.03.04.15.4.00002	Badung/Kuta/Kel. Legian/Jln.Dewi Sri Gang I		Perjanjian Sewa dengan Komang Armoni, Perpanjangan II No 593.1/2718/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2020	1.255,00	Komang Armoni	494.470.000,00					494.470.000,00	494.470.000,00	
19	01.01.01.02.003	000008	Tanah Bangunan Gudang	22.09.04.11.4.00054	Jln. Mawar No.8 Denpasar		Perjanjian Sewa dengan Yayasan Pertiwi Dewata, Perpanjangan II nomor 593.1/2720/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2020	1.300,00	Yayasan Pertiwi Dewata	798.200.000,00					798.200.000,00	798.200.000,00	

L

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023		
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompetibel	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompetibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
20	01.01.01.02.003	000051	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.09.4.00122	Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar	870,00	PT Bali Ekspres Intermedia	1.000.231.170,00				1.000.231.170,00				1.000.231.170,00
21	01.01.01.02.003	000005	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.05.3.00138	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Daging Puri KlodJln. Tantular	2.003,00	Gd. Mahardika	1.013.518.000,00				1.013.518.000,00				1.013.518.000,00
22	01.01.01.02.003	000037	Tanah Bangunan Gudang	22.09.01.02.4.00095	Denpasar/Denpasar Barat/Ds. Dauh Puri Kaja/Jln. Ayani Denpasar	3.191,00	Pos Bali	3.366.384.000,00				3.366.384.000,00				3.366.384.000,00
23	01.01.01.02.006	000005	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	22.09.03.08.5.00001	Denpasar/Denpasar Selatan/Kel. Sanur Kauh	26.000,00	PT. Industri Pariwisata Surya Beach/PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk, Perubahan II nomor B.13.593.1/3100/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 14 September 2021	4.160.000.000,00				4.160.000.000,00				4.160.000.000,00
24	01.01.01.02.006	000006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	22.03.02.12.5.00001	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Kesiman Kertalangu	120.450,00	PT Graha Nusantara Aji	4.336.200.000,00				4.336.200.000,00				4.336.200.000,00
25	01.01.01.02.007	000001	Tanah Bangunan Terminal Darat	22.03.04.04.5.00003	Badung/Kuta/Kel. Kuta	29.985,00	PT. Kuta Central Manunggal, Addendum Akta Nolaris 35 tanggal 26 Februari 2014	22.473.750.000,00				22.473.750.000,00				22.473.750.000,00
26	01.01.01.04.001	000228	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.07.02.27.4.00027	Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Bangli	1.015,00	INengah Wardana, ST No. B.13.593.1/0647/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Nopember 2021	21.822.500,00				21.822.500,00				21.822.500,00
27	01.01.01.04.001	000078	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.02.06.4.00039	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta	790,00	IKetut Mandia, SE	3.282.450.000,00				3.282.450.000,00				3.282.450.000,00
28	01.01.02.01.003	000003	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	22.08.05.01.4.00010	Karangasem/Sidemem/Ds. Sidemen	1.825,00	Perbekel Sinduwati No. 593.1/4588/UPT.P2.BPKAD tanggal 21 September 2018	13.048.750,00				13.048.750,00				13.048.750,00
29	01.01.02.01.005	000752	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00025	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya	160,00	Kades Sidakarya	20.480.000,00				20.480.000,00				20.480.000,00
30	01.01.02.01.005	001700	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.02.4.00053	Badung/Mengwi/Ds. Baha	105,00	PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung	25.777.500,00				25.777.500,00				25.777.500,00
31	01.01.02.01.005	000760	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00034	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya	235,00	Kades Sidakarya	30.080.000,00				30.080.000,00				30.080.000,00
32	01.01.02.01.005	001197	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00035	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung	1.240,00	Lakhsmi Dipil Patel	45.880.000,00				45.880.000,00				45.880.000,00
33	01.01.02.01.005	000754	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00027	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya/Jl. Kerta Winangun II No.1	365,00	KSU Dana Rahayu, perpanjangan I no 593.1/1395/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Juli 2020	46.720.000,00				46.720.000,00				46.720.000,00
34	01.01.02.01.005	000448	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00049	Klungkung/Banjarsangkan/Ds. Takmung	1.190,00	I. Pande Nyoman Merdana No. B.13.032/2563/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Agustus 2022	54.740.000,00				54.740.000,00				54.740.000,00
35	01.01.02.01.005	001459	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00059	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng/Subak.Tibubeneng	1.200,00	IMd. Wiranatha, perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	76.800.000,00				76.800.000,00				76.800.000,00
36	01.01.02.01.005	001481	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.16.4.00003	Subak/Dusun Tebe,Desa/Br.Abian Basa,Kec.Mengwi,Kab.Badung	940,00	IBP Whainsawa,SE	77.080.000,00				77.080.000,00				77.080.000,00
37	01.01.02.01.005	000755	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00028	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya/Jl. Sidakarya	610,00	IKI. Sublayasa, Perpanjangan II nomor 593.1/1109/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 28 April 2021	78.080.000,00				78.080.000,00				78.080.000,00
38	01.01.02.01.005	001211	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.14.4.00009	Badung/Mengwi/Ds. Sading	915,00	I Gusti Bagus Suka No. 593.1/1165/UPTD.PBMD tgl 15 Januari 2020	79.605.000,00				79.605.000,00				79.605.000,00
39	01.01.02.01.005	000738	Tanah Sawah Irigasi	22.09.01.16.4.00004	Denpasar/Denpasar Utara/Ds. Ubung Kaja	740,00	Yayasan Pendidikan Nusantara No. B.13.593.1/3358/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Oktober 2021	118.400.000,00				118.400.000,00				118.400.000,00
40	01.01.02.01.005	001198	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00036	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung	3.400,00	Lakhsmi Dipil Patel No. B.13.032/4256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	125.800.000,00				125.800.000,00				125.800.000,00

1

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023		
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
41	01.01.02.01.005	000750	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00021	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya	1.120,00	Yayasan Universal School	143.360.000,00				143.360.000,00				143.360.000,00
42	01.01.02.01.005	000743	Tanah Sawah Irigasi	22.09.01.22.4.00016	Denpasar/Denpasar Utara/Ds. Peguyangan/Jl.A.Yani Gang Merpati	310,00	Pasemeton Pasek Telangan	143.840.000,00				143.840.000,00				143.840.000,00
43	01.01.02.01.005	001225	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00054	Denpasar/Denpasar Selatan/Ds. Mengwi,Kab. Badung	2.650,00	Ida Gede Kresna Budi	145.948.750,00				145.948.750,00				145.948.750,00
44	01.01.02.01.005	001458	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00058	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	3.395,00	IMd. Wiranatha	217.280.000,00				217.280.000,00				217.280.000,00
45	01.01.02.01.005	001814	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00008	Badung/Kuta Utara/Ds. Canggus	900,00	Lakhsmi Dipil Patel	247.950.000,00				247.950.000,00				247.950.000,00
46	01.01.02.01.005	001689	Tanah Sawah Irigasi	22.03.04.07.4.00029	Badung/Kuta/Ds. Seminyak	140,00	G. Manggala Perdana Jaya, SH	748.860.000,00				748.860.000,00				748.860.000,00
47	01.01.02.01.005	001453	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00054	Subak Tibubeneng/Br. Tibubeneng/Kec. Kuta Utara/Badung	3.080,00	Rai Irma Santini	842.380.000,00				842.380.000,00				842.380.000,00
48	01.01.02.01.005	001718	Tanah Sawah Irigasi	22.03.04.04.4.00155	Persimpangan Jln. Imam Bonjol dan Sunset Road, Kel. Kuta Badung	400,00	Ketut Sri Sudarminiani	1.347.800.000,00				1.347.800.000,00				1.347.800.000,00
49	01.01.02.01.005	001151	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00004	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	1.505,00	Gede Ray Ardiyan Mancini Yasa	1.505.000.000,00				1.505.000.000,00				1.505.000.000,00
50	01.01.02.01.005	001479	Tanah Sawah Irigasi	22.09.02.12.4.00030	Des. Kesiman Kertalangu/Kec. Denlim/Denpasar	642,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	1.885.554.000,00				1.885.554.000,00				1.885.554.000,00
51	01.01.02.01.005	001692	Tanah Sawah Irigasi	22.03.09.01.4.00135	Badung/Kuta Utara/Ds. Jimbaran	1.435,00	IB Gde Budi Hartawan dan I Wayan Supartama	2.283.085.000,00				2.283.085.000,00				2.283.085.000,00
52	01.01.02.01.005	001687	Tanah Sawah Irigasi	22.03.09.05.4.00012	Badung/Kuta Selatan/Ds. Tanjung Benca	2.400,00	PT. Genta Buana	4.062.000.000,00				4.062.000.000,00				4.062.000.000,00
53	01.01.02.01.005	001690	Tanah Sawah Irigasi	22.03.04.07.4.00027	Badung/Kuta/Ds. Seminyak	800,00	G. Manggala Perdana Jaya, SH, Kadek yasa dan Dewa Kresna Mahaputra	4.279.200.000,00				4.279.200.000,00				4.279.200.000,00
54	01.01.02.02.001	001758	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00065	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	20,00	PT. Empora Dhanalaksmi	49.000,00				49.000,00				49.000,00
55	01.01.02.02.001	001747	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00054	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	195,00	PT. Empora Dhanalaksmi	477.750,00				477.750,00				477.750,00
56	01.01.02.02.001	001746	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00053	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	250,00	PT. Empora Dhanalaksmi	612.500,00				612.500,00				612.500,00
57	01.01.02.02.001	001765	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00072	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	250,00	PT. Empora Dhanalaksmi	612.500,00				612.500,00				612.500,00
58	01.01.02.02.001	001601	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00054	Klungkung/Dawan/Ds. Pesinggahan	26,00	PT. Empora Dhanalaksmi	689.000,00				689.000,00				689.000,00

1

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomortgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023				
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku		
59	01.01.02.02.001	001756	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00063	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	305,00	PT. Empora Dhanalaksmi	747.250,00			747.250,00				747.250,00		747.250,00
60	01.01.02.02.001	001754	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00061	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	320,00	PT. Empora Dhanalaksmi	784.000,00			784.000,00				784.000,00		784.000,00
61	01.01.02.02.001	001738	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00045	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	380,00	PT. Empora Dhanalaksmi	931.000,00			931.000,00				931.000,00		931.000,00
62	01.01.02.02.001	001750	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00057	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	410,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.004.500,00			1.004.500,00				1.004.500,00		1.004.500,00
63	01.01.02.02.001	001757	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00064	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	495,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.212.750,00			1.212.750,00				1.212.750,00		1.212.750,00
64	01.01.02.02.001	001729	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00036	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.274.000,00			1.274.000,00				1.274.000,00		1.274.000,00
65	01.01.02.02.001	001730	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00037	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.274.000,00			1.274.000,00				1.274.000,00		1.274.000,00
66	01.01.02.02.001	001735	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00042	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	580,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.421.000,00			1.421.000,00				1.421.000,00		1.421.000,00
67	01.01.02.02.001	001598	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00051	Klungkung/Dawan/Ds. Pesiinggahan	Perjanjian Sewa dengan NI Nengah Rapag No. B.13.032/2709/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 September 2023	59,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.563.500,00			1.563.500,00				1.563.500,00		1.563.500,00
68	01.01.02.02.001	001766	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00073	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	790,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.935.500,00			1.935.500,00				1.935.500,00		1.935.500,00
69	01.01.02.02.001	001723	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00030	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	800,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.960.000,00			1.960.000,00				1.960.000,00		1.960.000,00
70	01.01.02.02.001	001727	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00034	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	800,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.960.000,00			1.960.000,00				1.960.000,00		1.960.000,00
71	01.01.02.02.001	001725	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00032	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	890,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.180.500,00			2.180.500,00				2.180.500,00		2.180.500,00
72	01.01.02.02.001	001771	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00078	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	925,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.266.250,00			2.266.250,00				2.266.250,00		2.266.250,00
73	01.01.02.02.001	000625	Tanah Tegalan	22.05.01.04.4.00009	Gianyari/Gianyari/Ds. Lebih	Perjanjian Sewa dengan Drs. I Nyoman Bawa No. 593.1/4294/UPT.P2.BPKAD tanggal 9 Agustus 2018	350,00	Drs. I Nyoman Bawa	2.502.500,00			2.502.500,00				2.502.500,00		2.502.500,00
74	01.01.02.02.001	001773	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00080	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.100,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.695.000,00			2.695.000,00				2.695.000,00		2.695.000,00
75	01.01.02.02.001	001737	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00044	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.105,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.707.250,00			2.707.250,00				2.707.250,00		2.707.250,00
76	01.01.02.02.001	001748	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00055	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.160,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.842.000,00			2.842.000,00				2.842.000,00		2.842.000,00

4

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomortgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023		
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
77	01.01.02.02.001	001770	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00077	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.240,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.038.000,00				3.038.000,00			3.038.000,00
78	01.01.02.02.001	001749	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00056	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.305,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.197.250,00				3.197.250,00			3.197.250,00
79	01.01.02.02.001	001728	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00035	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.315,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.221.750,00				3.221.750,00			3.221.750,00
80	01.01.02.02.001	001719	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00026	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021	470,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.290.000,00				3.290.000,00			3.290.000,00
81	01.01.02.02.001	001762	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00069	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.350,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.307.500,00				3.307.500,00			3.307.500,00
82	01.01.02.02.001	001755	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00062	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.385,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.393.250,00				3.393.250,00			3.393.250,00
83	01.01.02.02.001	001731	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00038	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.550,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.797.500,00				3.797.500,00			3.797.500,00
84	01.01.02.02.001	001734	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00041	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.550,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.797.500,00				3.797.500,00			3.797.500,00
85	01.01.02.02.001	001764	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00071	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.690,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.140.500,00				4.140.500,00			4.140.500,00
86	01.01.02.02.001	001752	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00059	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.850,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.532.500,00				4.532.500,00			4.532.500,00
87	01.01.02.02.001	001761	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00068	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.930,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.728.500,00				4.728.500,00			4.728.500,00
88	01.01.02.02.001	001721	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00028	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00				4.900.000,00			4.900.000,00
89	01.01.02.02.001	001739	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00046	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00				4.900.000,00			4.900.000,00
90	01.01.02.02.001	001742	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00049	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00				4.900.000,00			4.900.000,00
91	01.01.02.02.001	001743	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00050	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00				4.900.000,00			4.900.000,00
92	01.01.02.02.001	001744	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00051	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00				4.900.000,00			4.900.000,00
93	01.01.02.02.001	001769	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00076	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00				4.900.000,00			4.900.000,00
94	01.01.02.02.001	001759	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00066	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.030,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.973.500,00				4.973.500,00			4.973.500,00

4

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomortgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
95	01.01.02.02.001	001736	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00043	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.290,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.610.500,00				5.610.500,00				5.610.500,00
96	01.01.02.02.001	001753	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00060	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.360,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.782.000,00				5.782.000,00				5.782.000,00
97	01.01.02.02.001	001741	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00048	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.400,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.880.000,00				5.880.000,00				5.880.000,00
98	01.01.02.02.001	001733	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00040	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.174.000,00				6.174.000,00				6.174.000,00
99	01.01.02.02.001	001745	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00052	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.174.000,00				6.174.000,00				6.174.000,00
100	01.01.02.02.001	001740	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00047	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.590,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.345.500,00				6.345.500,00				6.345.500,00
101	01.01.02.02.001	001767	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00074	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.630,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.443.500,00				6.443.500,00				6.443.500,00
102	01.01.02.02.001	001763	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00070	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.640,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.468.000,00				6.468.000,00				6.468.000,00
103	01.01.02.02.001	001768	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00075	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.970,00	PT. Empora Dhanalaksmi	7.276.500,00				7.276.500,00				7.276.500,00
104	01.01.02.02.001	001720	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00027	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.300,00	PT. Empora Dhanalaksmi	8.085.000,00				8.085.000,00				8.085.000,00
105	01.01.02.02.001	001732	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00039	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.635,00	PT. Empora Dhanalaksmi	8.905.750,00				8.905.750,00				8.905.750,00
106	01.01.02.02.001	001718	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00025	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.760,00	PT. Empora Dhanalaksmi	9.212.000,00				9.212.000,00				9.212.000,00
107	01.01.02.02.001	001726	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00033	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.930,00	PT. Empora Dhanalaksmi	9.628.500,00				9.628.500,00				9.628.500,00
108	01.01.02.02.001	000369	Tanah Tegalan	22.03.06.06.5.00027	Badung/Abiansemal/Ds. Abiansemal	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung No. 593.1/1/006/UPTD.PBMD tanggal 2 Mei 2019	158,00	PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung	10.676.850,00				10.676.850,00				10.676.850,00
109	01.01.02.02.001	001760	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00067	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perjanjian I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	4.375,00	PT. Empora Dhanalaksmi	10.718.750,00				10.718.750,00				10.718.750,00
110	01.01.02.02.001	000106	Tanah Tegalan	22.03.05.21.4.00001	Badung/Mengwi/Ds. Kuwum	Perjanjian Sewa dengan Bendesa Adat Kuwum Nyelati No. 593.1/5/221/UPT.P2.BPKAD tgl 11 Desember 2018	1.200,00	Bendesa Adat Kuwum Nyelati	11.400.000,00				11.400.000,00				11.400.000,00
111	01.01.02.02.001	001600	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00053	Klungkung/Dawan/Ds. Pesinggahan	Perjanjian Sewa dengan Ketut Resmiyasa No. B.13.593.1/2004/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 23-8-2021	431,00	Ketut Resmiyasa	11.421.500,00				11.421.500,00				11.421.500,00
112	01.01.02.02.001	001597	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00050	Klungkung/Dawan/Ds. Pesinggahan	Perjanjian Sewa dengan Suci Ambarsari No. 593.1/1624/UPTD.PBMD tanggal 1 Juli 2019	600,00	Suci Ambarsari	15.900.000,00				15.900.000,00				15.900.000,00
113	01.01.02.02.001	002058	Tanah Tegalan	22.09.01.11.4.00036	Dempasar/Dempasar Barat/Padang Sambian Klod	Perjanjian Sewa dengan Oka Marokeh Rachmat Nomor B.13.032/3038/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 20 September 2022	120,00	Oka Marokeh Rachmat	23.940.000,00				23.940.000,00				23.940.000,00

1

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompartibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompartibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
114	01.01.02.02.001	000843	Tanah Tegalan	22.05.05.04.4.00003	Gilanyar/Payangan/Ds. Bukan	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Sanjiwani No. 593.1/479/UPTD.PBMD tgl 11 Februari 2020	670,00	PDAM Tirta Sanjiwani	71.690.000,00				71.690.000,00			71.690.000,00	
115	01.01.02.02.001	001869	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00135	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan No. 593.1/2679/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Desember 2020	65,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	75.920.000,00				75.920.000,00			75.920.000,00	
116	01.01.02.02.001	001866	Tanah Tegalan	22.09.02.05.4.00124	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangan Puri Klod/Jl. Raya Pupulan Belangan RM Bumbu Desa	Perjanjian perpanjangan II sewa dengan Kl. Tompel nomor B.13.032/2903/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 November 2022	182,00	Kl. Tompel	84.448.000,00				84.448.000,00			84.448.000,00	
117	01.01.02.02.001	001885	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00152	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Putu Mahardika, Perpanjangan I No. B.13.593.1/103/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 18 Januari 2022	220,00	Putu Mahardika	111.320.000,00				111.320.000,00			111.320.000,00	
118	01.01.02.02.001	000006	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00105	Badung/Kuta Tengah/Kel. Kuta	Perjanjian Sewa dengan Ananditha Paramaningrum Perpanjangan I nomor B.13.593.1/303/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Januari 2022	165,00	Ananditha Paramaningrum	123.750.000,00				123.750.000,00			123.750.000,00	
119	01.01.02.02.001	001879	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00146	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan DPD Partai Gerindra, Perpanjangan I No. 593.1/1502/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 18 Agustus 2020	272,00	DPD Partai Gerindra	137.632.000,00				137.632.000,00			137.632.000,00	
120	01.01.02.02.001	002072	Tanah Tegalan	22.09.01.02.4.00093	Denpasar/Denpasar Utara/Ds. Dauh Puri Kaja	Perjanjian Sewa dengan Ni Made Ayu Sinyanti No.593.1/1522/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 24 Agustus 2020	273,00	Ni Made Ayu Sinyanti	191.646.000,00				191.646.000,00			191.646.000,00	
121	01.01.02.02.001	001852	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00079	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Klod	Perjanjian Sewa dengan Ni Komang Devi, Perpanjangan I No.593.1/1878/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 19 Oktober 2020	414,00	Ni Komang Devi	192.096.000,00				192.096.000,00			192.096.000,00	
122	01.01.02.02.001	002135	Tanah Tegalan	Belum Sertifikat	Gilanyar/Kec. Blahbath/Desa Keramas	Perjanjian Sewa dengan Gusti Putu Karyawan No. 593.1/566/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22 2-2021	200,00	Gusti Putu Karyawan	200.000.000,00				200.000.000,00			200.000.000,00	
123	01.01.02.02.001	001847	Tanah Tegalan	22.09.02.01.4.00064	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kelod/Jl. Hayam Wuruk 102	Perjanjian Sewa dengan I Wayan Tinggen, Perpanjangan II No. B.13.593.1/1430/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Juni 2021	435,00	I Wayan Tinggen	201.840.000,00				201.840.000,00			201.840.000,00	
124	01.01.02.02.001	001878	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00145	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangan Puri Klod/Jl.Raya Pupulan	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan, Peranhan I No. 593.1/4678/PPA.Aset tgl 8 Juni 2015	400,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	202.400.000,00				202.400.000,00			202.400.000,00	
125	01.01.02.02.001	001851	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00078	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kelod	Sewa Desak Amertani perjl I no.593.1/2541/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 14-12-2020 (174 m2) Sewa I Gusti Lanang Ngurah Biasama No. 593.1/2662/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-12-2020 (174m2) Sewa Dewi Sinaryati no. B.13.032/1586/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 27-5-2022 (101 m2)	449,00	Desak Amertani, Gusti Lanang Ngurah Biasama dan Dewi Sinaryati	208.336.000,00				208.336.000,00			208.336.000,00	
126	01.01.02.02.001	001875	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00142	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. 593.1/3634/PPA.Aset tgl 15 September 2016	425,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	215.050.000,00				215.050.000,00			215.050.000,00	
127	01.01.02.02.001	000001	Tanah Tegalan	22.03.04.04.5.00096	Badung/Kuta Tengah/Kel. Kula/BY Pass Ngurah Rai Simpang Sur	Perjanjian Sewa dengan Cahaya Wirawan Hadi Perpanjangan II No B.13.593.1/3646/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 25 November 2021	325,00	Cahaya Wirawan Hadi	243.750.000,00				243.750.000,00			243.750.000,00	
128	01.01.02.02.001	001800	Tanah Tegalan	22.09.01.08.4.00015	Denpasar/Denpasar Barat/Ds. Pemecutan Klod	Perjanjian Sewa dengan SMA PGRI 2 Denpasar, Perpanjangan II 593.1/3569/UPTD.PBMD tgl 23 Desember 2019	490,00	SMA PGRI 2 Denpasar	263.130.000,00				263.130.000,00			263.130.000,00	
129	01.01.02.02.001	001877	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00144	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. 593.1/2122/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	245,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	286.160.000,00				286.160.000,00			286.160.000,00	
130	01.01.02.02.001	000844	Tanah Tegalan	22.05.05.04.4.00004	Gilanyar/Payangan/Ds. Bukan	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Sanjiwani No. 593.1/479/UPTD.PBMD tgl 11 Februari 2020	2.750,00	PDAM Tirta Sanjiwani	294.250.000,00				294.250.000,00			294.250.000,00	
131	01.01.02.02.001	002111	Tanah Tegalan	22.03.09.01.4.00048	Badung/Kuta Selatan/Kel. Jimbaran/JL. Bay Pass Ngurah Rai	Perjanjian Sewa dengan Yudi Kurnianingsih, Perpanjangan I nomor 593.1/1006/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 19 April 2021	420,00	Yudi Kurnianingsih	302.400.000,00				302.400.000,00			302.400.000,00	
132	01.01.02.02.001	001886	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00153	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. 593.1/1568/PPA.Aset tanggal 7 Mei 2012 perpanjangan I 593.1/912/UPT.P2.BPKAD tgl 27 Februari 2018 perpanjangan II nomor B.13.593.1/1362/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 11 Mei 2022	670,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	339.020.000,00				339.020.000,00			339.020.000,00	
133	01.01.02.02.001	000023	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00006	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan PT. Bali Pawiwahan No. 593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.310,00	PT. Bali Pawiwahan	358.285.000,00				358.285.000,00			358.285.000,00	

4

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023				
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompetibel	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompetibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku		
134	01.01.02.02.001	000015	Tanah Tegalan	22.03.04.15.4.00004	Badung/Kuta Tengah/Kel. Legian	Sewa Oleh 1 Nengah Tamba No. 593.1/19548/PPA Aset tgl 15 Desember 2014 dan perpanjangan I nomor 593.1/21144/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 9 November 2020	560,00	1 Nengah Tamba	420.000.000,00			420.000.000,00				420.000.000,00		420.000.000,00
135	01.01.02.02.001	000024	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00008	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan PT. Bali Pawwahan No. 593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.730,00	PT. Bali Pawwahan	473.155.000,00			473.155.000,00				473.155.000,00		473.155.000,00
136	01.01.02.02.001	001871	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00137	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perpanjangan II Perjanjian sewa dengan DPD PDIP Prov.Bali nomor B.13.032/2147/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 Juli 2022	1.002,00	DPD PDIP Prov.Bali	507.012.000,00			507.012.000,00				507.012.000,00		507.012.000,00
137	01.01.02.02.001	000003	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00101	Badung/Kuta/Kel. Kutaj.Jl. Sunset Road	Perjanjian Sewa dengan Rudy Alianto No. 593.1/1668/UPTD.PBMD tanggal 15 Juli 2019	900,00	Rudy Alianto	675.000.000,00			675.000.000,00				675.000.000,00		675.000.000,00
138	01.01.02.02.001	002118	Tanah Tegalan	58	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	860,00	PT Nil	877.200.000,00			877.200.000,00				877.200.000,00		877.200.000,00
139	01.01.02.02.001	002050	Tanah Tegalan	22.09.02.06.4.00038	Denpasar/Denpasar Timur/Sumerta	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Korpri/Universitas Warmadewa No. 593.1/7619/PPA Aset tgl 24 Juli 2014 perpanjangan I nomor 593.1/11324/UPTD.PBMD tanggal 21 Juli 2020	2.085,00	Yayasan Korpri/Universitas Warmadewa	967.440.000,00			967.440.000,00				967.440.000,00		967.440.000,00
140	01.01.02.02.001	000021	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00003	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.810,00	I Made Wiranatha	1.042.035.000,00			1.042.035.000,00				1.042.035.000,00		1.042.035.000,00
141	01.01.02.02.001	000004	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00102	Badung/Kuta Tengah/Kel. Kuta	Perjanjian Sewa dengan Anak Agung Ketut Sumawidanta No. 593.1/473/PPA Aset tgl 22 Januari 2015, Pengalihan nomor 593.1/5653/UPT.P2.BPKAD tgl 22 Januari 2018	1.420,00	Anak Agung Ketut Sumawidanta	1.065.000.000,00			1.065.000.000,00				1.065.000.000,00		1.065.000.000,00
142	01.01.02.02.001	001858	Tanah Tegalan	22.03.02.05.4.00079	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangan Puri Klod	Perjanjian Perpanjangan I Sewa dengan Suka Duka Korpri Provinsi Bali B.13.032/2729/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Agustus 2022	1.120,00	Suka Duka Korpri Provinsi Bali	1.284.640.000,00			1.284.640.000,00				1.284.640.000,00		1.284.640.000,00
143	01.01.02.02.001	000025	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00009	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan PT. Bali Pawwahan No. 593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	5.170,00	PT. Bali Pawwahan	1.413.995.000,00			1.413.995.000,00				1.413.995.000,00		1.413.995.000,00
144	01.01.02.02.001	002116	Tanah Tegalan	50	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	2.000,00	PT Nil	2.040.000.000,00			2.040.000.000,00				2.040.000.000,00		2.040.000.000,00
145	01.01.02.02.001	001848	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00066	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kelod	Perjanjian Sewa dengan I Gusti Ngurah Arie, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/1823/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Juli 2021 dan Sewa oleh Yayasan Korpri, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/1858/UPTD.PBMD/BPKAD	5.188,00	I Gusti Ngurah Arie dan Yayasan Korpri	2.407.232.000,00			2.407.232.000,00				2.407.232.000,00		2.407.232.000,00
146	01.01.02.02.001	000027	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00011	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.635,00	I Made Wiranatha	3.635.000.000,00			3.635.000.000,00				3.635.000.000,00		3.635.000.000,00
147	01.01.02.02.001	000028	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00012	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.045,00	I Made Wiranatha	4.045.000.000,00			4.045.000.000,00				4.045.000.000,00		4.045.000.000,00
148	01.01.02.02.001	000029	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00013	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.280,00	I Made Wiranatha	4.280.000.000,00			4.280.000.000,00				4.280.000.000,00		4.280.000.000,00
149	01.01.02.02.001	002117	Tanah Tegalan	52	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	7.500,00	PT Nil	7.650.000.000,00			7.650.000.000,00				7.650.000.000,00		7.650.000.000,00
150	01.01.02.02.001	002119	Tanah Tegalan	61	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	12.270,00	PT Nil	12.515.400.000,00			12.515.400.000,00				12.515.400.000,00		12.515.400.000,00
151	01.01.02.02.001	002121	Tanah Tegalan	22.03.04.09.4.00094	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT PRBL, Perubahan Akta Notaris No. 5 tanggal 13 April 2015	18.800,00	PT PRBL	19.176.000.000,00			19.176.000.000,00				19.176.000.000,00		19.176.000.000,00
152	01.01.02.02.001	002120	Tanah Tegalan	85	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	89.560,00	PT Nil	91.351.200.000,00			91.351.200.000,00				91.351.200.000,00		91.351.200.000,00
153	01.01.02.02.001	002114	Tanah Tegalan	15	Ds. Benoa/Kuta Selatan/Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	108.150,00	PT Nil	110.313.000.000,00			110.313.000.000,00				110.313.000.000,00		110.313.000.000,00
154	01.01.01.04.001	000261	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.06.70.09.4.00109	Jalan Karini No 3 Klungkung	Perjanjian Sewa dengan I Ketut Juliarta B.13.032/2928/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 September 2022	400,00	I Ketut Juliarta	68.000.000,00			68.000.000,00				68.000.000,00		68.000.000,00
155	01.01.02.02.001	002115	Tanah Tegalan	18	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	178.650,00	PT Nil	182.223.000.000,00			182.223.000.000,00				182.223.000.000,00		182.223.000.000,00
156	01.01.02.02.002	000003	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	121	Ds.Kuta,Kc.Kuta,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Gusti Ketut Merta No. 593.1/528/UPT.P2.BPKAD tgl 1 Maret 2017	140,00	Gusti Ketut Merta	222.740.000,00			222.740.000,00				222.740.000,00		222.740.000,00

1

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
157	01.01.02.02.002	000005	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.09.01.17.4.00015	Denpasar/Denpasar Barat/Desa Tegai Kerta	2.120,00	Yayasan Corti	2.608.660.000,00				2.608.660.000,00				2.608.660.000,00	2.608.660.000,00
158	01.01.02.02.002	000003	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.03.08.06.4.00081	Badung/Kuta Utara/Desa Tibubeneng	2.100,00	Idm. Wiranatha	13.983.900.000,00				13.983.900.000,00				13.983.900.000,00	13.983.900.000,00
159	01.01.03.01.025	000002	Tanah Lapangan Lainnya	22.03.08.05.4.00394	Badung/Kuta Tengah/Kel Seminyak	986,00	I Wayan Sadia	721.752.000,00				721.752.000,00				721.752.000,00	721.752.000,00
160	01.01.03.01.025	000001	Tanah Lapangan Lainnya	22.03.08.05.4.00384	Badung/Kuta Utara/Kerobokan Klod	1.200,00	Komang Gilang Pradnya Taksu	878.400.000,00				878.400.000,00				878.400.000,00	878.400.000,00
161	01.01.03.02.006	000004	Tanah Lapangan Apel/Upacara	22.09.01.08.4.00050	Subak Semila/Kel.Pemecutan/Kec. Denbar	850,00	SMA PGRI 2 Denpasar	687.600.000,00				687.600.000,00				687.600.000,00	687.600.000,00
162	01.01.03.07.001	000082	Tanah Untuk Jalan Nasional	22.03.04.04.4.00104	Badung /Kuta Tengah/Kel Kuta Jin. Sunset Road Simpang Siur Kuta	380,00	AAP Syafrudin	285.000.000,00				285.000.000,00				285.000.000,00	285.000.000,00
163	01.01.03.07.001	000081	Tanah Untuk Jalan Nasional	22.03.02.05.4.00062	Denpasar/Dentim/Kel. Dangin Puri Klod/Jl.Tjok Agung Kresna	1.125,00	Kota Denpasar	1.290.375.000,00				1.290.375.000,00				1.290.375.000,00	1.290.375.000,00
164	01.01.03.08.006	000001	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	22.03.06.05.4.00097	Badung/Abiansemal/Desa Ayunan	200,00	PDAM Badung	94.500.000,00				94.500.000,00				94.500.000,00	94.500.000,00
165	01.01.03.08.006	000002	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	22.03.06.05.4.00098	Badung/Abiansemal/Desa ayunan	300,00	PDAM Badung	141.750.000,00				141.750.000,00				141.750.000,00	141.750.000,00
166	01.01.02.01.005	001255	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00091	Ds.Munggu.Kc.Mengwi.Kab. Badung	1.180,00	Somvir	0,00			64.988.500,00				64.988.500,00	64.988.500,00	
167	01.01.02.01.005	001698	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00062	Badung/Kuta Utara/Ds. Cangu	3.700,00	IB Marhen	0,00			3.028.450.000,00				3.028.450.000,00	3.028.450.000,00	
168	01.01.01.02.003	000041	Tanah Bangunan Gudang	22.03.08.06.4.00083	Badung/Kuta Utara/Desa Tibubeneng	3.900,00	Shri IB Darmika Marhaen W.P.S	0,00			25.970.100.000,00				25.970.100.000,00	25.970.100.000,00	
169	01.01.01.01.005	000031	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	22.09.02.05.4.00147	Jl. Kapten Tantular Niti Mandala . Kel. Dangin Puri (Klod, Kec. Denpasar Timur (Renon)	277,00	DPD Partai Gerindra	0,00			323.536.000,00				323.536.000,00	323.536.000,00	
170	01.01.02.01.005	001467	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00042	Subak Cangu/Br.Cangu/kec.Kuta Utara/Badung	2.900,00	Rai Irma Santini	0,00			798.950.000,00				798.950.000,00	798.950.000,00	
171	01.01.02.07.001	000001	Tanah Usaha	22.03.05.11.4.00080	Badung/Mengwi/Ds Gulungan	1.440,00	IMade Sudja	0,00			1.900.800.000,00				1.900.800.000,00	1.900.800.000,00	
172	01.01.02.01.005	001232	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00061	Ds.Munggu.Kc.Mengwi.Kab. Badung	1.350,00	Dewa Agung Ayu Indriyani	0,00			74.351.250,00				74.351.250,00	74.351.250,00	
173	01.01.11.05.02	1158	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00014	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Badung	3.225,00	PT. Bali Bounty	0,00			882.037.500,00				882.037.500,00	882.037.500,00	
174	01.01.02.02.001	000077	Tanah Tegalan	22.03.05.09.5.00025	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	845,00	Dewa Made Merta Sedana	0,00			46.538.375,00				46.538.375,00	46.538.375,00	
175	01.01.02.01.005	001703	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00060	Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	3.080,00	Dewa Komang Derdy Antoni	0,00			2.520.980.000,00				2.520.980.000,00	2.520.980.000,00	
176	01.01.01.04.001	000197	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.03.02.09.4.00021	Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Kelurahan Sumertha Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	5.000,00	BPD Bali	0,00			5.697.500.000,00				5.697.500.000,00	5.697.500.000,00	

4

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomortgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
177	01.01.02.02.001	001889	Tanah Tegalan	22.09.03.02.4.00017	Denpasar/Denpasar selatan/Kel. Renon	2.000,00	PT. Sinar Emas Garuda Sukses No. B.13.032/1791/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Juni 2022 (300m2) Perjanjian Sewa dengan I Dewa Gede Wibawa Putra (600m2), Billy Pandiatama (sebagian 300m2), dan I Ketut Suwandhi B.13.032/1126/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 26 April 2023 (800m2)	0,00				1.012.000.000,00			1.012.000.000,00		1.012.000.000,00
178	01.01.02.01.005	001203	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00043	Ds Pererenan,Kec.Mengwi/Kab.Badung	6.380,00	Pengadilan Barus dan Desak Ketut Plavina Dina	0,00				236.060.000,00			236.060.000,00		236.060.000,00
179	01.01.02.01.005	001699	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00061	Badung/Kuta Utara/Ds. Cangg	4.480,00	Gede Ray Ardian Manchini Yasa Perjanjian Nomor B.13.032/2256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023 (1500 m2) dan Dr I Ketut Rochineng SH MH Nomor B.13.032/2256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023 (2980 m2)	0,00				3.666.880.000,00			3.666.880.000,00		3.666.880.000,00
180	01.01.02.02.002	000015	Tanah Koseong Yang Sudah Diperuntukkan	Persil 4	Desa Gunaka, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	800,00	I Ketut Parsana	0,00				21.600.000,00			21.600.000,00		21.600.000,00
181	01.01.03.01.005	000020	Tanah Lapangan Lainnya	SHP 402	Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	195,00	Komang Gilang Pradnya Taksu Natha no. B.13.032/3525/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2023	0,00				156.648.000,00			156.648.000,00		156.648.000,00
182	01.01.02.02.001	000005	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00103	Badung/Kuta Tengah/Kel. Kuta	2.400,00	Dewa Made Mahayadnya	0,00				3.818.400.000,00			3.818.400.000,00		3.818.400.000,00
183	01.01.02.02.002	000001	Tanah Koseong Yang Sudah Diperuntukkan	22.03.04.07.5.00001	Badung/Kuta Selatan/Ds. Unggasan	34.700,00	PT.Garuda Adhimatra	14.261.700.000,00		14.261.700.000,00		804.738.000,00		13.456.962.000,00		13.456.962.000,00	
184	01.01.02.01.005	001150	Tanah Sawah Irigasi	22.03.04.09.5.00045	Badung/Kuta Selatan/Kel. Benoa	8.065,00						8226300000,00			8.226.300.000,00		8.226.300.000,00
185	01.01.02.01.005	001403	Tanah Sawah Irigasi	22.03.06.09.4.00013	Subak,Uma Buni/Br.Angantaka/Kec.Abia nsemal/Badung	6.920,00						578.339.000,00			578.339.000,00		578.339.000,00
186	01.01.02.01.005	001463	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00040	Subak.Canggur/Br.Canggur/Kec.Kuta utara/Badung	6.000,00						1.653.000.000,00			1.653.000.000,00		1.653.000.000,00
187	01.01.02.01.005	001702	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00065	Badung/Kuta Utara/Ds. Cangg	6.700,00						5.483.950.000,00			5.483.950.000,00		5.483.950.000,00
188	01.01.02.02.001	000020	Tanah Tegalan	22.03.04.09.5.00044	Badung/Kuta Selatan/Kel. Benoa	8.750,00						7.905.000.000,00			7.905.000.000,00		7.905.000.000,00
189	01.01.02.02.001	000033	Tanah Tegalan	22.03.05.02.5.00016	Badung/Mengwi/Ds. Baha	5.151,00						54.471.825,00			54.471.825,00		54.471.825,00
190	01.01.02.02.001	000051	Tanah Tegalan	22.03.05.05.4.00013	Badung/Mengwi/Ds. Kapal	5.690,00						403.990.000,00			403.990.000,00		403.990.000,00
191	01.01.02.02.001	000173	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00063	Badung/Mengwi/Ds. Sobangan	5.063,00						43.415.225,00			43.415.225,00		43.415.225,00
192	01.01.02.02.001	000405	Tanah Tegalan	22.03.06.14.4.00012	Badung/Abiansemal/Ds. Punggu	7.350,00						69.825.000,00			69.825.000,00		69.825.000,00
193	01.01.02.02.001	000422	Tanah Tegalan	22.03.07.04.4.00012	Badung/Petang/Ds. Carangsari	5.240,00						39.300.000,00			39.300.000,00		39.300.000,00
194	01.01.02.02.001	000455	Tanah Tegalan	22.03.07.07.4.00012	Badung/Petang/Ds. Getasan	6.705,00						50.287.500,00			50.287.500,00		50.287.500,00
195	01.01.02.02.001	000675	Tanah Tegalan	22.05.01.16.4.00001	Gianyar/Gianyar/Ds. Sumita	8.340,00						258.540.000,00			258.540.000,00		258.540.000,00
196	01.01.02.02.001	000804	Tanah Tegalan	22.05.05.02.4.00013	Gianyar/Payangan/Ds. Kerta	5.330,00						559.650.000,00			559.650.000,00		559.650.000,00
197	01.01.02.02.001	000817	Tanah Tegalan	22.05.05.02.4.00026	Gianyar/Payangan/Ds. Kerta	12.600,00						1.323.000.000,00			1.323.000.000,00		1.323.000.000,00
198	01.01.02.02.001	000818	Tanah Tegalan	22.05.05.02.4.00027	Gianyar/Payangan/Ds. Kerta	5.510,00						578.550.000,00			578.550.000,00		578.550.000,00
199	01.01.02.02.001	000858	Tanah Tegalan	22.05.05.07.4.00003	Gianyar/Payangan/Ds. Melinggih Klod	8.250,00						882.750.000,00			882.750.000,00		882.750.000,00
200	01.01.02.02.001	000471	Tanah Tegalan	22.07.01.05.4.00010	Bangli/Bangli/Ds. Kayubih	8.900,00						351.105.000,00			351.105.000,00		351.105.000,00
201	01.01.02.02.001	000472	Tanah Tegalan	22.07.01.08.4.00009	Bangli/Bangli/Ds. Kayubih	6.000,00						236.700.000,00			236.700.000,00		236.700.000,00
202	01.01.02.02.001	000473	Tanah Tegalan	22.07.01.05.4.00022	Bangli/Bangli/Ds. Kayubih	6.100,00						240.645.000,00			240.645.000,00		240.645.000,00
203	01.01.02.02.001	000562	Tanah Tegalan	9	Bangli/Tembuku/Ds. Tembuku	7.930,00						146.308.500,00			146.308.500,00		146.308.500,00
204	01.01.02.02.001	000603	Tanah Tegalan	22.04.01.05.4.00007	Buleleng/Gerokgak/Ds. Patas	11.500,00						304.750.000,00			304.750.000,00		304.750.000,00
205	01.01.02.02.001	000608	Tanah Tegalan	22.04.06.01.1.00003	Buleleng/Sukasada/Ds. Sukasada	33.700,00						850.925.000,00			850.925.000,00		850.925.000,00
206	01.01.02.02.001	000609	Tanah Tegalan	22.04.06.01.1.00004	Buleleng/Sukasada/Ds. Sukasada	22.500,00						568.125.000,00			568.125.000,00		568.125.000,00

4

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomortgl Perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Ekstra Kompatibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel Nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
207	01.01.02.01.005	000363	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.02.4.00036	Klungkung/Banjarangkan/Ds. Timuhun	5.250,00									97.125.000,00		97.125.000,00
208	01.01.02.01.005	000574	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.11.4.00039	Klungkung/Banjarangkan/Ds. Nyailai	5.040,00									52.920.000,00		52.920.000,00
209	01.01.02.01.005	000621	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.08.4.00056	Klungkung/Banjarangkan/Ds. Banjarangkan	5.150,00									301.275.000,00		301.275.000,00
210	01.01.02.01.005	001174	Tanah Sawah Irigasi	22.06.02.01.4.00004	Des. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung	7.530,00									199.545.000,00		199.545.000,00
211	01.01.02.01.005	001175	Tanah Sawah Irigasi	22.06.02.01.4.00005	Des. Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung	17.320,00									458.980.000,00		458.980.000,00
212	01.01.02.01.005	001584	Tanah Sawah Irigasi	22.06.01.05.4.00073	Klungkung/Klungkung/Ds. Akah	5.470,00									319.995.000,00		319.995.000,00
213	01.01.02.02.001	001624	Tanah Tegalan	22.06.02.07.4.00037	Klungkung/Dawan/Ds. Kusamba	6.388,00									169.282.000,00		169.282.000,00
214	01.01.02.02.001	001637	Tanah Tegalan	22.06.02.08.4.00046	Klungkung/Dawan/Ds. Gunaksa	6.340,00									168.010.000,00		168.010.000,00
215	01.01.02.02.001	001638	Tanah Tegalan	22.06.02.08.4.00047	Klungkung/Dawan/Ds. Gunaksa	6.445,00									170.792.500,00		170.792.500,00
216	01.01.02.02.001	001669	Tanah Tegalan	22.06.02.11.4.00012	Klungkung/Dawan/Ds. Paksiabali	6.810,00									180.465.000,00		180.465.000,00
217	01.01.02.07.001	000003	Tanah Usaha	22.09.02.06.4.00089	Jin. Anyelir No. 1 Denpasar	400,00									153.200.000,00		153.200.000,00
218	01.01.02.01.005	000746	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.03.4.00024	Denpasar/Denpasar selatan/Kel. Panjer	2.053,00									2.132.040.500,00		2.132.040.500,00
219	01.01.02.02.001	001305	Tanah Tegalan	22.08.08.07.4.00006	Karangasem/Kubu/Ds. Baturinggit	8.400,00									117.600.000,00		117.600.000,00
220	01.01.02.02.001	001891	Tanah Tegalan	22.09.03.05.4.00025	Denpasar/Denpasar selatan/Kel. Pedungan	295,00									197.355.000,00		197.355.000,00
221	01.01.02.02.001	001892	Tanah Tegalan	22.09.03.05.4.00029	Denpasar/Denpasar selatan/Kel. Pedungan	225,00									28.800.000,00		28.800.000,00
222	01.01.02.02.001	001895	Tanah Tegalan	22.09.03.05.4.00036	Denpasar/Denpasar selatan/Kel. Pedungan	2.972,00									1.988.268.000,00		1.988.268.000,00
223	01.01.02.02.001	001896	Tanah Tegalan	22.03.03.08.4.00008	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sanur kauh	2.020,00									1.494.800.000,00		1.494.800.000,00
224	01.01.02.02.001	001897	Tanah Tegalan	22.03.03.08.4.00009	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sanur kauh	4.000,00									2.960.000.000,00		2.960.000.000,00
225	01.01.02.03.002	000007	Tanah Kebun Induk	174	Kabupaten Karangasem Kecamatan Kubu Desa Tulamben	97.500,00									88.725.000,00		88.725.000,00
Gedung Dikerjasamakan						2.115,00											
2	03.01.01.01.001	000025	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Ahmad Yani Denpasar	1.106,00											
3	03.01.01.09.001	000007	Bangunan Gedung Perlemuan Permanen		Jl. Pahlawan Korpri Denpasar	70											
4	03.01.01.01.001	000040	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jin. IR. Juanda	70,8											
5	03.01.01.01.001	000041	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jin. Juanda No. 2 renon Denpasar	270,15											
7	03.01.01.01.001	000085	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jin. Pudak No. 3 A Denpasar	100											
8	03.01.01.01.001	000054	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Imamborjol Km.7 Denpasar	120											
9	03.01.01.08.001	000004	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		Jin. Hayam Wuruk No.151 Denpasar												
10	03.01.01.01.001	000087	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jin. Cok Agung Tresna Renon Denpasar	150											
11	03.01.01.14.001	000001	Gedung Garasi/Pool Permanen		Jin. Moh. Yamin Denpasar	369											
12	03.01.01.01.001	000014	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jin. Hayam Wuruk No.151 Denpasar	200											
13	03.01.01.12.004	000001	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)		Jin. Anyelir No. 1 Dps	100											
13	03.01.01.12.004	000001	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)		Jin. Anyelir No. 1 Dps	100											
						2.115,00											
						3.693.868.478,00											
						(1.429.882.867,97)											
						19.074.369,00											
						3.693.868.478,00											
						295700000											
						-											
						19.074.369,00											
						4.014.588.478,00											
						(1.788.378.890,97)											
						2.169.149.140,00											
						(784.508.938,97)											
						1.384.640.201,03											

4

**Rincian Kemitraan dengan Pihak ketiga Sewa
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023		
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Jumlah Aset Tetap Dikerjasamakan								567.472.530.696,00	(1.801.952.532,47)	19.074.369,00	567.472.530.696,00	50.515.519.625,00	10.289.484.700,00	19.074.369,00	607.698.565.623,00	(1.543.201.760,97)	606.155.363.862,03
Jumlah Aset Tetap Tanah Dikerjasamakan						924.077,00	562.602.744.520,00	-	-	562.602.744.520,00	50.219.819.625,00	9.113.567.000,00	-	603.708.997.145,00	-	603.708.997.145,00	
1	01.01.01.01.002	000027	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.09.02.07.4.00036	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kauh/Jalan Puskak/Kamboja	130,00	DPW Iktan Media Online	91.455.000,00			91.455.000,00			91.455.000,00		91.455.000,00	
2	01.01.01.01.002	000042	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.09.03.04.4.00046	Jln. Gurita Seletan Denpasar	301,00	Ni Ketut Supadmi	139.200.000,00			139.200.000,00			139.200.000,00		139.200.000,00	
3	01.01.01.01.002	000022	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.04.05.14.4.00086	Buleleng/Buleleng/Kel. Banjar Bali	1.800,00	DPC Organda	540.000.000,00			540.000.000,00			540.000.000,00		540.000.000,00	
4	01.01.01.01.002	000020	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	22.03.04.04.4.00122	Badung/Kuta/Kel. Kuta	440,00	Gana Pramananda	1.647.800.000,00			1.647.800.000,00			1.647.800.000,00		1.647.800.000,00	
5	01.01.01.01.005	000018	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	21	Badung/Kuta/Ds. Kuta/Kel.Kuta ex asrama Transito Jln. Imabonjol	400,00	Putu Kangen Disastra	1.525.000,00			1.525.000,00			1.525.000,00		1.525.000,00	
6	01.01.01.01.005	000017	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	20	Badung/Kuta/Ds. Kuta/Kel.Kuta ex asrama Transito Jln. Imabonjol	600,00	Putu Kangen Disastra	2.913.000,00			2.913.000,00			2.913.000,00		2.913.000,00	
7	01.01.01.01.005	000015	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	18	Badung/Kuta/Ds. Kuta/Kel.Kuta Ex-Asrama Transito Jln. Imabonjol	2.000,00	Putu Kangen Disastra	7.260.000,00			7.260.000,00			7.260.000,00		7.260.000,00	
8	01.01.01.01.005	000016	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	17	Badung/Kuta/Ds. Kuta/Kel.Kuta ex asrama Transito Jln. Imabonjol	3.000,00	Putu Kangen Disastra	9.000.000,00			9.000.000,00			9.000.000,00		9.000.000,00	
9	01.01.01.01.005	000019	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	115	Tabanan/Baturiti/Ds.Candikuning	7.050,00	Gde Ketut Nugrahita Pendit	24.675.000,00			24.675.000,00			24.675.000,00		24.675.000,00	
10	01.01.01.01.005	000020	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	116	Tabanan/Baturiti/Ds.Candikuning	14.300,00	Gde Ketut Nugrahita Pendit	50.050.000,00			50.050.000,00			50.050.000,00		50.050.000,00	
11	01.01.01.01.006	000001	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage	22.03.08.02.5.00005	Badung/Kuta Utara/Ds. Cangu	3.677,00	PT Citrakarya Sukses	3.677.000.000,00			3.677.000.000,00			3.677.000.000,00		3.677.000.000,00	
12	01.01.01.01.012	000003	Tanah Kavelling (dist)	22.03.04.15.4.00003	Badung/Kuta/Kel. Legian/Uln.Nakula (Depan Pura Utun Tanjung)	585,00	I Gede Rai Ardiana	311.250.000,00			311.250.000,00			311.250.000,00		311.250.000,00	
13	01.01.01.02.003	000047	Tanah Bangunan Gudang	22.03.05.16.4.00005	Badung/Mengwi/Kel. Abianbase	480,00	I Bagus Putra Wainawa	3.718.000,00			3.718.000,00			3.718.000,00		3.718.000,00	
14	01.01.01.02.003	000045	Tanah Bangunan Gudang	22.01.02.06.4.00019	Ds. Baler Bale Agung Kec.Negara Kab. Jembrana	2.770,00	Pemkab Jembrana	8.300.000,00			8.300.000,00			8.300.000,00		8.300.000,00	
15	01.01.01.02.003	000017	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.09.4.00068	Jln.Moh. Yamin Denpasar	369,00	A.A. Ngurah Anom ST	13.284.000,00			13.284.000,00			13.284.000,00		13.284.000,00	
16	01.01.01.02.003	000015	Tanah Bangunan Gudang	22.03.04.08.4.00010	Badung/Kuta/Kel. Legian/Subak/Legian	65,00	I Wayan Rumanik	25.610.000,00			25.610.000,00			25.610.000,00		25.610.000,00	
17	01.01.01.02.003	000018	Tanah Bangunan Gudang	22.03.04.12.4.00013	Badung/Kuta/Kel. Seminyak	290,00	I Wayan Adnyana	155.730.000,00			155.730.000,00			155.730.000,00		155.730.000,00	

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
																		Nilai
18	01.01.01.02.003	000007	Tanah Bangunan Gudang	22.03.04.15.4.00002	Badung/Kuta/Kel. Legian/Ulin.Dewi Sri Gang I	Perjanjian Sewa dengan Komang Armoni. Perpanjangan II No. 593.1/2718/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2020	1.255,00	Komang Armoni	494.470.000,00			494.470.000,00				494.470.000,00		494.470.000,00
19	01.01.01.02.003	000008	Tanah Bangunan Gudang	22.09.04.11.4.00054	Jln. Mawar No.8 Denpasar	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Peritwi Dewata. Perpanjangan II nomor 593.1/2720/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Desember 2020	1.300,00	Yayasan Peritwi Dewata	798.200.000,00			798.200.000,00				798.200.000,00		798.200.000,00
20	01.01.01.02.003	000051	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.09.4.00122	Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar	Perpanjangan I Perjanjian Sewa dengan PT Bali Ekspres Intermedia No. B.13.032/2024/UPTD.PBMD.BPKAD tanggal 30 September 2022	870,00	PT Bali Ekspres Intermedia	1.000.231.170,00			1.000.231.170,00				1.000.231.170,00		1.000.231.170,00
21	01.01.01.02.003	000005	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.05.3.00138	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangin Puri Klot/Ulin. Tantular	Perjanjian Sewa dengan I Gd. Mahardika. Perpanjangan II perjanjian 593.1/1543/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 26 Agustus 2020	2.003,00	I Gd. Mahardika	1.013.518.000,00			1.013.518.000,00				1.013.518.000,00		1.013.518.000,00
22	01.01.01.02.003	000037	Tanah Bangunan Gudang	22.09.01.02.4.00095	Denpasar/Denpasar Barat/Ds. Dauh Puri Kaja/Ulin. Ayani Denpasar	Perjanjian Sewa oleh Pos Bali 593.1/1721/PPA.Aset tgl 19 Mei 2016, Perpanjangan I no B.13.593.1/1490/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Juni 2021	3.191,00	Pos Bali	3.366.384.000,00			3.366.384.000,00				3.366.384.000,00		3.366.384.000,00
23	01.01.01.02.006	000005	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/ Motel	22.09.03.08.5.00001	Denpasar/Denpasar Selatan/Kel. Sanur Kauh	Perjanjian Sewa dengan PT. Industri Perhotelan Surya Beach/PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. Perubahan II nomor B.13.593.1/3100/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 14 September 2021	26.000,00	PT. Industri Perhotelan Surya Beach/PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk	4.160.000.000,00			4.160.000.000,00				4.160.000.000,00		4.160.000.000,00
24	01.01.01.02.006	000006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/ Motel	22.03.02.12.5.00001	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Kesiman Kertalangu	Perjanjian Sewa dengan PT Graha Nusantara Aji, perubahan II No. 593.1/1864/PPA.Aset (002/GNAV/2013/PT GNA) tgl 16 Mei 2013	120.450,00	PT Graha Nusantara Aji	4.336.200.000,00			4.336.200.000,00				4.336.200.000,00		4.336.200.000,00
25	01.01.01.02.007	000001	Tanah Bangunan Terminal Darat	22.03.04.04.5.00003	Badung/Kuta/Kel. Kuta	Perjanjian Sewa dengan PT. Kuta Central Manunggal, Addendum Akta Notaris 35 tanggal 26 Februari 2014	29.965,00	PT. Kuta Central Manunggal	22.473.750.000,00			22.473.750.000,00				22.473.750.000,00		22.473.750.000,00
26	01.01.01.04.001	000228	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.07.02.27.4.00027	Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Bangli	Perjanjian Sewa dengan I Nengah Wardana, ST No. B.13.593.1/0647/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 25 Nopember 2021	1.015,00	I Nengah Wardana, ST	21.822.500,00			21.822.500,00				21.822.500,00		21.822.500,00
27	01.01.01.04.001	000078	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.02.06.4.00039	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta	Perpanjangan II Perjanjian Sewa dengan I Ketut Mandia, SE No. B.13.032/2020/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 11 Desember 2022	790,00	I Ketut Mandia, SE	3.282.450.000,00			3.282.450.000,00				3.282.450.000,00		3.282.450.000,00
28	01.01.02.01.003	000003	Tanah Tambak/Empang/K dalam Ikan/Akuarium	22.08.05.01.4.00010	Karangasem/Sidemem/Ds. Sidemem	Perjanjian Sewa dengan Perbekel Sinduwati No. 593.1/4588/UPT.P2.BPKAD tanggal 21 September 2018	1.825,00	Perbekel Sinduwati	13.048.750,00			13.048.750,00				13.048.750,00		13.048.750,00
29	01.01.02.01.005	000752	Tanah Sawah Irgasi	22.09.03.09.4.00025	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya	Perjanjian Sewa dengan Kades Sidakarya No. 59.1/289/PPA.Aset tanggal 12-1-2016, perpanjangan I 593.1/572/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-2-2021	160,00	Kades Sidakarya	20.480.000,00			20.480.000,00				20.480.000,00		20.480.000,00
30	01.01.02.01.005	001700	Tanah Sawah Irgasi	22.03.05.02.4.00053	Badung/Mengwi/Ds. Baha	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Mangulama Kabupaten Badung No. 593.1/1006/UPTD.PBMD tanggal 2 Mei 2019	105,00	PDAM Tirta Mangulama Kabupaten Badung	25.777.500,00			25.777.500,00				25.777.500,00		25.777.500,00
31	01.01.02.01.005	000760	Tanah Sawah Irgasi	22.09.03.09.4.00034	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya	Perjanjian Sewa dengan Kades Sidakarya No. 59.1/289/PPA.Aset tanggal 12-1-2016, perpanjangan I 593.1/572/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-2-2021	235,00	Kades Sidakarya	30.080.000,00			30.080.000,00				30.080.000,00		30.080.000,00
32	01.01.02.01.005	001197	Tanah Sawah Irgasi	22.03.05.18.4.00035	Ds.Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Lakshmi Dipil Patel No. B.13.032/256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	1.240,00	Lakshmi Dipil Patel	45.880.000,00			45.880.000,00				45.880.000,00		45.880.000,00
33	01.01.02.01.005	000754	Tanah Sawah Irgasi	22.09.03.09.4.00027	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya/Ul.Kerta Winangun II No.1	Perjanjian Sewa dengan KSU Dana Rahayu, perpanjangan I no 593.1/1395/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 29 Juli 2020	365,00	KSU Dana Rahayu	46.720.000,00			46.720.000,00				46.720.000,00		46.720.000,00
34	01.01.02.01.005	000448	Tanah Sawah Irgasi	22.06.03.06.4.00049	Klungkung/Banjarangkini/Ds. Taklung	Perjanjian Sewa dengan Ir. Pande Nyoman Merdana No. B.13.032/2563/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Agustus 2022	1.190,00	Ir. Pande Nyoman Merdana	54.740.000,00			54.740.000,00				54.740.000,00		54.740.000,00
35	01.01.02.01.005	001459	Tanah Sawah Irgasi	22.03.08.06.4.00059	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng/Subak.Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Md. Wiranatha, perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	1.200,00	I Md. Wiranatha	76.800.000,00			76.800.000,00				76.800.000,00		76.800.000,00
36	01.01.02.01.005	001481	Tanah Sawah Irgasi	22.03.05.16.4.00003	Subak/Dusun Tebe,Desa/Br.Ablan Basa,Kec.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan IBP Whaisnawa,SE perpanjangan II nomor 593.1/1032/UPTD.PBMD tgl 5 Mei 2019	940,00	IBP Whaisnawa,SE	77.080.000,00			77.080.000,00				77.080.000,00		77.080.000,00

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023		
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompartibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
37	01.01.02.01.005	000755	Tanah Sawah Iigasi	22.09.03.09.4.00028	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya/Jl. Sidakarya	Perjanjian Sewa dengan I Kt. Subitayasa, Perpanjangan I nomor 593.1/1109/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 28 April 2021	610,00	I Kt. Subitayasa	78.080.000,00				78.080.000,00			78.080.000,00	
38	01.01.02.01.005	001211	Tanah Sawah Iigasi	22.03.05.14.4.00009	Badung/Mengwi/Ds. Sading	Perjanjian Sewa dengan I Gusti Bagus Suka No. 593.1/185/UPTD.PBMD tgl 15 Januari 2020	915,00	I Gusti Bagus Suka	79.605.000,00				79.605.000,00			79.605.000,00	
39	01.01.02.01.005	000738	Tanah Sawah Iigasi	22.09.01.16.4.00004	Denpasar/Denpasar Utara/Ds. Ubung Kaja	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Pendidikan, perpanjangan I perjanjian nomor B.13.593.1/3358/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Oktober 2021	740,00	Yayasan Pendidikan Nusantara	118.400.000,00				118.400.000,00			118.400.000,00	
40	01.01.02.01.005	001198	Tanah Sawah Iigasi	22.03.05.18.4.00036	Ds. Pererenan,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Lakhmi Dipil Patel No. B.13.032/4256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	3.400,00	Lakhmi Dipil Patel	125.800.000,00				125.800.000,00			125.800.000,00	
41	01.01.02.01.005	000750	Tanah Sawah Iigasi	22.09.03.09.4.00021	Denpasar/Denpasar selatan/Ds. Sidakarya	Perpanjangan I Perjanjian Sewa dengan Yayasan Universal School No B.13.032/2743/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 30 Agustus 2022	1.120,00	Yayasan Universal School	143.360.000,00				143.360.000,00			143.360.000,00	
42	01.01.02.01.005	000743	Tanah Sawah Iigasi	22.09.01.22.4.00016	Denpasar/Denpasar Utara/Ds. Peguyangan,Jl.A.Yani Gang Merpati	Perjanjian Sewa dengan Pasemeton Pasek Telengan No. 593.1/1475/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 12 Agustus 2020	310,00	Pasemeton Pasek Telengan	143.840.000,00				143.840.000,00			143.840.000,00	
43	01.01.02.01.005	001225	Tanah Sawah Iigasi	22.03.05.09.4.00054	Ds.Munggu,Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Ida Gede Kresna Budi Nomor B.13.032/1355/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Februari 2023	2.650,00	Ida Gede Kresna Budi	145.948.750,00				145.948.750,00			145.948.750,00	
44	01.01.02.01.005	001458	Tanah Sawah Iigasi	22.03.08.06.4.00058	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Md. Wiranatha, perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	3.395,00	I Md. Wiranatha	217.280.000,00				217.280.000,00			217.280.000,00	
45	01.01.02.01.005	001814	Tanah Sawah Iigasi	22.03.08.02.4.00008	Badung/Kuta Utara/Ds. Cangu	Perjanjian Sewa dengan Lakhmi Dipil Patel No. B.13.032/4256/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Desember 2022	900,00	Lakhmi Dipil Patel	247.950.000,00				247.950.000,00			247.950.000,00	
46	01.01.02.01.005	001689	Tanah Sawah Iigasi	22.03.04.07.4.00029	Badung/Kuta/Ds. Seminyak	Perjanjian sewa dengan G. Manggala Perdana Jaya, SH B.13.032/1213/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 4 Mei 2023	140,00	G. Manggala Perdana Jaya, SH	748.860.000,00				748.860.000,00			748.860.000,00	
47	01.01.02.01.005	001453	Tanah Sawah Iigasi	22.03.08.06.4.00054	Subak.Tibubeneng/Br.Tibubeneng/Kec.Kuta Utara/Badung	Perjanjian Sewa dengan Rai Irma Santini No. B.13.032/4386/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Desember 2022	3.080,00	Rai Irma Santini	842.380.000,00				842.380.000,00			842.380.000,00	
48	01.01.02.01.005	001718	Tanah Sawah Iigasi	22.03.04.04.1.00155	Persimpangan Jln. Imam Bonjol dan Sunset Road, Kel. Kuta Badung	Perjanjian Sewa dengan Ketut Sri Sudaminiani No. B.593.1/1673/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 23 September 2022 dan Perjanjian Sewa dengan Gena Pramananda Perpanjangan I No. 13.593.1/300/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Januari 2022	400,00	Ketut Sri Sudaminiani	1.347.800.000,00				1.347.800.000,00			1.347.800.000,00	
49	01.01.02.01.005	001151	Tanah Sawah Iigasi	22.03.08.06.4.00004	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan Gede Ray Ardian Mancini Yasa, Perpanjangan I Nomor B.13.593.1/1857/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Juli 2021	1.505,00	Gede Ray Ardian Mancini Yasa	1.505.000.000,00				1.505.000.000,00			1.505.000.000,00	
50	01.01.02.01.005	001479	Tanah Sawah Iigasi	22.09.02.12.4.00030	Des.Kesiman Kertalangu/Kec.Dentim/Denpasar	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. B.13.593.1/78/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 Januari 2022	642,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	1.885.554.000,00				1.885.554.000,00			1.885.554.000,00	
51	01.01.02.01.005	001692	Tanah Sawah Iigasi	22.03.09.01.4.00135	Badung/Kuta Utara/Ds. Jimbaran	Perjanjian Perpanjangan Sewa dengan I B Gede Budi Hartawan B.13.032/2733/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Agustus 2022 dan Perjanjian Sewa IWayan Supartama B.13.032/2310/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 6 Juli 2022	1.435,00	I B Gede Budi Hartawan dan I Wayan Supartama	2.283.085.000,00				2.283.085.000,00			2.283.085.000,00	
52	01.01.02.01.005	001687	Tanah Sawah Iigasi	22.03.09.05.4.00012	Badung/Kuta Selatan/Ds. Tanjung Benoa	Perjanjian Sewa dengan PT. Genta Buana, perpanjangan I no. 593.1/2830/UPTD.PBMD tgl 28 Oktober 2019	2.400,00	PT. Genta Buana	4.062.000.000,00				4.062.000.000,00			4.062.000.000,00	
53	01.01.02.01.005	001690	Tanah Sawah Iigasi	22.03.04.07.4.00027	Badung/Kuta/Ds. Seminyak	Perjanjian sewa dengan G. Manggala Perdana Jaya, SH, Kadek yasa dan Dewa Kresna Mahaputra B.13.032/1213/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 4 Mei 2023 (sewa sebagian luas 146 m2), 593.1/5084/UPT.P2.BPKAD tgl 28 Nopember 2018 (300m2), 13.593.1/1942/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 5 Agustus 2021 (346m2)	800,00	G. Manggala Perdana Jaya, SH, Kadek yasa dan Dewa Kresna Mahaputra	4.279.200.000,00				4.279.200.000,00			4.279.200.000,00	

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompartibel nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
																		Nilai
54	01.01.02.02.001	001758	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00065	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	20,00	PT. Empora Dhanalaksmi	49.000,00			49.000,00				49.000,00		49.000,00
55	01.01.02.02.001	001747	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00054	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	195,00	PT. Empora Dhanalaksmi	477.750,00			477.750,00				477.750,00		477.750,00
56	01.01.02.02.001	001746	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00053	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	250,00	PT. Empora Dhanalaksmi	612.500,00			612.500,00				612.500,00		612.500,00
57	01.01.02.02.001	001765	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00072	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	250,00	PT. Empora Dhanalaksmi	612.500,00			612.500,00				612.500,00		612.500,00
58	01.01.02.02.001	001601	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00054	Klungkung/Dawan/Ds. Pesinggahan	Perjanjian Sewa dengan Ni Nengah Rapag No. B.13.032/2709/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 September 2023	26,00	PT. Empora Dhanalaksmi	689.000,00			689.000,00				689.000,00		689.000,00
59	01.01.02.02.001	001756	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00063	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	305,00	PT. Empora Dhanalaksmi	747.250,00			747.250,00				747.250,00		747.250,00
60	01.01.02.02.001	001754	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00061	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	320,00	PT. Empora Dhanalaksmi	784.000,00			784.000,00				784.000,00		784.000,00
61	01.01.02.02.001	001738	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00045	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	380,00	PT. Empora Dhanalaksmi	931.000,00			931.000,00				931.000,00		931.000,00
62	01.01.02.02.001	001750	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00057	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	410,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.004.500,00			1.004.500,00				1.004.500,00		1.004.500,00
63	01.01.02.02.001	001757	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00064	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	495,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.212.750,00			1.212.750,00				1.212.750,00		1.212.750,00
64	01.01.02.02.001	001729	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00036	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.274.000,00			1.274.000,00				1.274.000,00		1.274.000,00
65	01.01.02.02.001	001730	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00037	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.274.000,00			1.274.000,00				1.274.000,00		1.274.000,00
66	01.01.02.02.001	001735	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00042	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	580,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.421.000,00			1.421.000,00				1.421.000,00		1.421.000,00
67	01.01.02.02.001	001598	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00051	Klungkung/Dawan/Ds. Pesinggahan	Perjanjian Sewa dengan Ni Nengah Rapag No. B.13.032/2709/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 September 2023	59,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.563.500,00			1.563.500,00				1.563.500,00		1.563.500,00
68	01.01.02.02.001	001766	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00073	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	790,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.935.500,00			1.935.500,00				1.935.500,00		1.935.500,00
69	01.01.02.02.001	001723	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00030	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	800,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.960.000,00			1.960.000,00				1.960.000,00		1.960.000,00
70	01.01.02.02.001	001727	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00034	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	800,00	PT. Empora Dhanalaksmi	1.960.000,00			1.960.000,00				1.960.000,00		1.960.000,00

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompartibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
																		Nilai
71	01.01.02.02.001	001725	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00032	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	890,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.180.500,00			2.180.500,00				2.180.500,00		2.180.500,00
72	01.01.02.02.001	001771	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00078	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	925,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.266.250,00			2.266.250,00				2.266.250,00		2.266.250,00
73	01.01.02.02.001	000625	Tanah Tegalan	22.05.01.04.4.00009	Gianyar/Gianyar/Ds. Lebih	Perjanjian Sewa dengan Drs. I Nyoman Bawa No. 593.1/4239/UPT.P2.BPKAD tanggal 9 Agustus 2018	350,00	Drs. I Nyoman Bawa	2.502.500,00			2.502.500,00				2.502.500,00		2.502.500,00
74	01.01.02.02.001	001773	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00080	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.100,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.695.000,00			2.695.000,00				2.695.000,00		2.695.000,00
75	01.01.02.02.001	001737	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00044	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.105,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.707.250,00			2.707.250,00				2.707.250,00		2.707.250,00
76	01.01.02.02.001	001748	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00055	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.160,00	PT. Empora Dhanalaksmi	2.842.000,00			2.842.000,00				2.842.000,00		2.842.000,00
77	01.01.02.02.001	001770	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00077	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.240,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.038.000,00			3.038.000,00				3.038.000,00		3.038.000,00
78	01.01.02.02.001	001749	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00056	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.305,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.197.250,00			3.197.250,00				3.197.250,00		3.197.250,00
79	01.01.02.02.001	001728	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00035	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.315,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.221.750,00			3.221.750,00				3.221.750,00		3.221.750,00
80	01.01.02.02.001	001719	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00026	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021	470,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.290.000,00			3.290.000,00				3.290.000,00		3.290.000,00
81	01.01.02.02.001	001762	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00069	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.350,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.307.500,00			3.307.500,00				3.307.500,00		3.307.500,00
82	01.01.02.02.001	001755	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00062	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.385,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.393.250,00			3.393.250,00				3.393.250,00		3.393.250,00
83	01.01.02.02.001	001731	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00038	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.550,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.797.500,00			3.797.500,00				3.797.500,00		3.797.500,00
84	01.01.02.02.001	001734	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00041	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.550,00	PT. Empora Dhanalaksmi	3.797.500,00			3.797.500,00				3.797.500,00		3.797.500,00
85	01.01.02.02.001	001764	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00071	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.690,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.140.500,00			4.140.500,00				4.140.500,00		4.140.500,00
86	01.01.02.02.001	001752	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00059	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.850,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.532.500,00			4.532.500,00				4.532.500,00		4.532.500,00
87	01.01.02.02.001	001761	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00068	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	1.930,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.728.500,00			4.728.500,00				4.728.500,00		4.728.500,00

1

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompartibel nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
																		Nilai
88	01.01.02.02.001	001721	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00028	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
89	01.01.02.02.001	001739	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00046	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
90	01.01.02.02.001	001742	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00049	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
91	01.01.02.02.001	001743	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00050	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
92	01.01.02.02.001	001744	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00051	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
93	01.01.02.02.001	001769	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00076	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.000,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.900.000,00			4.900.000,00				4.900.000,00		4.900.000,00
94	01.01.02.02.001	001759	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00066	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.030,00	PT. Empora Dhanalaksmi	4.973.500,00			4.973.500,00				4.973.500,00		4.973.500,00
95	01.01.02.02.001	001736	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00043	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.290,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.610.500,00			5.610.500,00				5.610.500,00		5.610.500,00
96	01.01.02.02.001	001753	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00060	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.360,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.782.000,00			5.782.000,00				5.782.000,00		5.782.000,00
97	01.01.02.02.001	001741	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00048	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.400,00	PT. Empora Dhanalaksmi	5.880.000,00			5.880.000,00				5.880.000,00		5.880.000,00
98	01.01.02.02.001	001733	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00040	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.174.000,00			6.174.000,00				6.174.000,00		6.174.000,00
99	01.01.02.02.001	001745	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00052	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.520,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.174.000,00			6.174.000,00				6.174.000,00		6.174.000,00
100	01.01.02.02.001	001740	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00047	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.590,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.345.500,00			6.345.500,00				6.345.500,00		6.345.500,00
101	01.01.02.02.001	001767	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00074	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.630,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.443.500,00			6.443.500,00				6.443.500,00		6.443.500,00
102	01.01.02.02.001	001763	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00070	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.640,00	PT. Empora Dhanalaksmi	6.468.000,00			6.468.000,00				6.468.000,00		6.468.000,00
103	01.01.02.02.001	001768	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00075	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalaksmi, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	2.970,00	PT. Empora Dhanalaksmi	7.276.500,00			7.276.500,00				7.276.500,00		7.276.500,00

1

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
																		Nilai
104	01.01.02.02.001	001720	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00027	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalakami, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.300,00	PT. Empora Dhanalakami	8.085.000,00			8.085.000,00				8.085.000,00		8.085.000,00
105	01.01.02.02.001	001732	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00039	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalakami, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.635,00	PT. Empora Dhanalakami	8.905.750,00			8.905.750,00				8.905.750,00		8.905.750,00
106	01.01.02.02.001	001718	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00025	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalakami, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.760,00	PT. Empora Dhanalakami	9.212.000,00			9.212.000,00				9.212.000,00		9.212.000,00
107	01.01.02.02.001	001726	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00033	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalakami, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	3.930,00	PT. Empora Dhanalakami	9.628.500,00			9.628.500,00				9.628.500,00		9.628.500,00
108	01.01.02.02.001	000369	Tanah Tegalan	22.03.06.06.5.00027	Badung/Abiansemal/Ds. Abiansemal	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Mangulama Kabupaten Badung No. 593.1/1006/UPTD.PBMD tanggal 2 Mei 2019	158,00	PDAM Tirta Mangulama Kabupaten Badung	10.676.850,00			10.676.850,00				10.676.850,00		10.676.850,00
109	01.01.02.02.001	001760	Tanah Tegalan	22.06.04.11.4.00067	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Sakti	Perjanjian Sewa dengan PT. Empora Dhanalakami, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/3840/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2021 (akses jalan, taman, dll)	4.375,00	PT. Empora Dhanalakami	10.718.750,00			10.718.750,00				10.718.750,00		10.718.750,00
110	01.01.02.02.001	000106	Tanah Tegalan	22.03.05.21.4.00001	Badung/Mengwi/Ds. Kuwum	Perjanjian Sewa dengan Bendesa Adat Kuwum Nyelati No. 593.1/5221/UPT.P2.BPKAD tgl 11 Desember 2018	1.200,00	Bendesa Adat Kuwum Nyelati	11.400.000,00			11.400.000,00				11.400.000,00		11.400.000,00
111	01.01.02.02.001	001600	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00053	Klungkung/Dawan/Ds. Pesinggahan	Perjanjian Sewa dengan Ketul Resmiyasa No. B.13.593.1/2004/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 23-8-2021	431,00	Ketul Resmiyasa	11.421.500,00			11.421.500,00				11.421.500,00		11.421.500,00
112	01.01.02.02.001	001597	Tanah Tegalan	22.06.02.05.4.00050	Klungkung/Dawan/Ds. Pesinggahan	Perjanjian Sewa dengan Suci Ambarsari No. 593.1/1624/UPTD.PBMD tanggal 1 Juli 2019	600,00	Suci Ambarsari	15.900.000,00			15.900.000,00				15.900.000,00		15.900.000,00
113	01.01.02.02.001	002058	Tanah Tegalan	22.09.01.11.4.00036	Denpasar/Denpasar Barat/Padang Sambian Klod	Perjanjian Sewa dengan Oke Marokeh Rachmat Nomor B.13.032/3038/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 20 September 2022	120,00	Oke Marokeh Rachmat	23.940.000,00			23.940.000,00				23.940.000,00		23.940.000,00
114	01.01.02.02.001	000843	Tanah Tegalan	22.05.05.04.4.00003	Gianyar/Payangan/Ds. Bukian	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Sanjiwani No. 593.1/479/UPTD.PBMD tgl 11 Februari 2020	670,00	PDAM Tirta Sanjiwani	71.690.000,00			71.690.000,00				71.690.000,00		71.690.000,00
115	01.01.02.02.001	001869	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00135	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan No. 593.1/2879/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 Desember 2020	65,00	Yayasan Kepustakaan Bung Kamo	75.920.000,00			75.920.000,00				75.920.000,00		75.920.000,00
116	01.01.02.02.001	001866	Tanah Tegalan	22.09.02.05.4.00124	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangan Puri Klod/Jl. Raya Puputan Belangan RM Bumbu Desa	Perjanjian perpanjangan II Sewa dengan Kl. Tompel nomor B.13.032/3903/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 November 2022	182,00	Kl. Tompel	84.448.000,00			84.448.000,00				84.448.000,00		84.448.000,00
117	01.01.02.02.001	001885	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00152	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Putu Mahardika, Perpanjangan I No. B.13.593.1/103/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 18 Januari 2022	220,00	Putu Mahardika	111.320.000,00			111.320.000,00				111.320.000,00		111.320.000,00
118	01.01.02.02.001	000006	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00105	Badung/Kuta Tengah/Kel. Kuta	Perjanjian Sewa dengan Ananditha Paramaningrum Perpanjangan I nomor B.13.593.1/903/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Januari 2022	165,00	Ananditha Paramaningrum	123.750.000,00			123.750.000,00				123.750.000,00		123.750.000,00
119	01.01.02.02.001	001879	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00146	Denpasar/Denpasar Timur/Kel Dangan Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan DPD Partai Gerindra, Perpanjangan I No. 593.1/1502/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 18 Agustus 2020	272,00	DPD Partai Gerindra	137.632.000,00			137.632.000,00				137.632.000,00		137.632.000,00
120	01.01.02.02.001	002072	Tanah Tegalan	22.09.01.02.4.00093	Denpasar/Denpasar Utara/Ds. Daah Puri Kaja	Perjanjian Sewa dengan Ni Made Ayu Sriyanti No.593.1/1522/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 24 Agustus 2020	273,00	Ni Made Ayu Sriyanti	191.646.000,00			191.646.000,00				191.646.000,00		191.646.000,00
121	01.01.02.02.001	001852	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00079	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Klod	Perjanjian Sewa dengan Ni Komang Devi, Perpanjangan I No.593.1/1878/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 19 Oktober 2020	414,00	Ni Komang Devi	192.096.000,00			192.096.000,00				192.096.000,00		192.096.000,00
122	01.01.02.02.001	002135	Tanah Tegalan	Belum Sertifikat	Gianyar/Kec. Blahbatuh/Desa Keramas	Perjanjian Sewa dengan Gusti Putu Karyawan No. 593.1/566/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-2-2021	200,00	Gusti Putu Karyawan	200.000.000,00			200.000.000,00				200.000.000,00		200.000.000,00
123	01.01.02.02.001	001847	Tanah Tegalan	22.09.02.01.4.00064	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kelod/Jl. Hayam Wuruk 102	Perjanjian Sewa dengan I Wayan Tinggen, Perpanjangan II No. B.13.593.1/1430/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Juni 2021	435,00	I Wayan Tinggen	201.840.000,00			201.840.000,00				201.840.000,00		201.840.000,00

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompartibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
																		Nilai
124	01.01.02.02.001	001878	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00145	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangin Puri Klod/Jln.Raya Puputan	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan, Perubahan I No 593.1/4678/PPA.Aset tgl 8 Juni 2015	400,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	202.400.000,00			202.400.000,00				202.400.000,00		202.400.000,00
125	01.01.02.02.001	001851	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00078	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kelod	Sewa Desak Amertani perijl no.593.1/2541/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 14-12-2020 (174 m2) Sewa 1 Gusti Lanang Ngurah Biasama No. 593.1/2662/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 22-12-2020 (174m2) Sewa Dewi Sinaryati no. B.13.032/1586/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 27-6-2022 (101 m2)	449,00	Desak Amertani, Gusti Lanang Ngurah Biasama dan Dewi Sinaryati	208.336.000,00			208.336.000,00				208.336.000,00		208.336.000,00
126	01.01.02.02.001	001875	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00142	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangin Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. 593.1/3634/PPA.Aset tgl 15 September 2016	425,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	215.050.000,00			215.050.000,00				215.050.000,00		215.050.000,00
127	01.01.02.02.001	000001	Tanah Tegalan	22.03.04.04.5.00096	Badung/Kuta Tengah/Kel. Kuta/By Pass Ngurah Rai Simpang Siur	Perjanjian Sewa dengan Cahaya Wirawan Hadi Perpanjangan II No B.13.593.1/3646/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 25 November 2021	325,00	Cahaya Wirawan Hadi	243.750.000,00			243.750.000,00				243.750.000,00		243.750.000,00
128	01.01.02.02.001	001800	Tanah Tegalan	22.09.01.08.4.00015	Denpasar/Denpasar Barat/Ds. Pemecutan Klod	Perjanjian Sewa dengan SMA PGRI 2 Denpasar, Perpanjangan II 593.1/3568/UPTD.PBMD tgl 23 Desember 2019	490,00	SMA PGRI 2 Denpasar	263.130.000,00			263.130.000,00				263.130.000,00		263.130.000,00
129	01.01.02.02.001	001877	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00144	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangin Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. 593.1/2122/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	245,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	286.160.000,00			286.160.000,00				286.160.000,00		286.160.000,00
130	01.01.02.02.001	000844	Tanah Tegalan	22.05.05.04.4.00004	Gianyar/Payangan/Ds. Bukian	Perjanjian Sewa dengan PDAM Tirta Sanjwani No. 593.1/479/UPTD.PBMD tgl 11 Februari 2020	2.750,00	PDAM Tirta Sanjwani	294.250.000,00			294.250.000,00				294.250.000,00		294.250.000,00
131	01.01.02.02.001	002111	Tanah Tegalan	22.03.09.01.4.00048	Badung/Kuta Selatan/Kel. Jimbaran/JL. Bay Pass Ngurah Rai	Perjanjian Sewa dengan Yudi Kurnianingsih, Perpanjangan I nomor 593.1/1006/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 19 April 2021	420,00	Yudi Kurnianingsih	302.400.000,00			302.400.000,00				302.400.000,00		302.400.000,00
132	01.01.02.02.001	001886	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00153	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangin Puri Klod	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno No. 593.1/1568/PPA.Aset tanggal 7 Mei 2012 perpanjangan I 593.1/912/UPT.P2.BPKAD tgl 27 Februari 2018 perpanjangan II nomor B.13.593.1/1362/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 11 Mei 2022	670,00	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	339.020.000,00			339.020.000,00				339.020.000,00		339.020.000,00
133	01.01.02.02.001	000023	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00006	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan PT. Bali Pawiwahan No. 593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.310,00	PT. Bali Pawiwahan	358.285.000,00			358.285.000,00				358.285.000,00		358.285.000,00
134	01.01.02.02.001	000015	Tanah Tegalan	22.03.04.15.4.00004	Badung/Kuta Tengah/Kel. Legian	Sewa Oleh I Nengah Tamba No. 593.1/19548/PPA.Aset tgl 15 Desember 2014 dan perpanjangan I nomor 593.1/2114/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 9 November 2020	560,00	I Nengah Tamba	420.000.000,00			420.000.000,00				420.000.000,00		420.000.000,00
135	01.01.02.02.001	000024	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00008	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan PT. Bali Pawiwahan No. 593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	1.730,00	PT. Bali Pawiwahan	473.155.000,00			473.155.000,00				473.155.000,00		473.155.000,00
136	01.01.02.02.001	001871	Tanah Tegalan	22.09.02.05.3.00137	Denpasar/Denpasar Timur/Kel. Dangin Puri Klod	Perpanjangan II Perjanjian sewa dengan DPD PDIP Prov.Bali nomor B.13.032/2147/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 Juli 2022	1.002,00	DPD PDIP Prov.Bali	507.012.000,00			507.012.000,00				507.012.000,00		507.012.000,00
137	01.01.02.02.001	000003	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00101	Badung/Kuta/Kel. Kuta/Jl. Sunset Road	Perjanjian Sewa dengan Rudy Alianto No. 593.1/1666/UPTD.PBMD tanggal 15 Juli 2019	900,00	Rudy Alianto	675.000.000,00			675.000.000,00				675.000.000,00		675.000.000,00
138	01.01.02.02.001	002118	Tanah Tegalan	58	Ds. Bena Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	860,00	PT Nil	877.200.000,00			877.200.000,00				877.200.000,00		877.200.000,00
139	01.01.02.02.001	002050	Tanah Tegalan	22.09.02.06.4.00038	Denpasar/Denpasar Timur/Sumerta	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Korpri/Universitas Warmadewa No. 593.1/7619/PPA.Aset tgl 24 Juli 2014 perpanjangan I nomor 593.1/1324/UPTD.PBMD tanggal 21 Juli 2020	2.085,00	Yayasan Korpri/Universitas Warmadewa	967.440.000,00			967.440.000,00				967.440.000,00		967.440.000,00
140	01.01.02.02.001	000021	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00003	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.810,00	I Made Wiranatha	1.042.035.000,00			1.042.035.000,00				1.042.035.000,00		1.042.035.000,00
141	01.01.02.02.001	000004	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00102	Badung/Kuta Tengah/Kel. Kuta	Perjanjian Sewa dengan Anak Agung Ketut Sumawidanta No. 593.1/473/PPA.Aset tgl 22 Januari 2015, Pengalihan nomor 593.1/5653/UPT.P2.BPKAD tgl 22 Januari 2018	1.420,00	Anak Agung Ketut Sumawidanta	1.065.000.000,00			1.065.000.000,00				1.065.000.000,00		1.065.000.000,00

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023			
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
																		Nilai
142	01.01.02.02.001	001858	Tanah Tegalan	22.03.02.05.4.00079	Dempasar/Dempasar Timur/Kel. Dangin Puri Klod	Perjanjian Perpanjangan I Sewa dengan Suka Duka Korpri Provinsi Bali B.13.032/2729/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Agustus 2022	1.120,00	Suka Duka Korpri Provinsi Bali	1.284.640.000,00			1.284.640.000,00				1.284.640.000,00		1.284.640.000,00
143	01.01.02.02.001	000025	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00009	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan PT. Bali Pawiwahan No. 593.1/2669/UPTD.PBMD tanggal 15 Oktober 2019	5.170,00	PT. Bali Pawiwahan	1.413.995.000,00			1.413.995.000,00				1.413.995.000,00		1.413.995.000,00
144	01.01.02.02.001	002116	Tanah Tegalan	50	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	2.000,00	PT Nil	2.040.000.000,00			2.040.000.000,00				2.040.000.000,00		2.040.000.000,00
145	01.01.02.02.001	001848	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00066	Dempasar/Dempasar Timur/Ds. Sumerta Kelod	Perjanjian Sewa dengan I Gusti Ngurah Arie, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/1623/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Juli 2021 dan Sewa oleh Yayasan Korpri, Perpanjangan I nomor B.13.593.1/1858/UPTD.PBMD/BPKAD	5.188,00	I Gusti Ngurah Arie dan Yayasan Korpri	2.407.232.000,00			2.407.232.000,00				2.407.232.000,00		2.407.232.000,00
146	01.01.02.02.001	000027	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00011	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	3.635,00	I Made Wiranatha	3.635.000.000,00			3.635.000.000,00				3.635.000.000,00		3.635.000.000,00
147	01.01.02.02.001	000028	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00012	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.045,00	I Made Wiranatha	4.045.000.000,00			4.045.000.000,00				4.045.000.000,00		4.045.000.000,00
148	01.01.02.02.001	000029	Tanah Tegalan	22.03.08.06.4.00013	Badung/Kuta Utara/Ds. Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Made Wiranatha, Perpanjangan I perjanjian nomor 593.1/2130/UPTD.PBMD tanggal 2 September 2019	4.280,00	I Made Wiranatha	4.280.000.000,00			4.280.000.000,00				4.280.000.000,00		4.280.000.000,00
149	01.01.02.02.001	002117	Tanah Tegalan	62	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	7.500,00	PT Nil	7.650.000.000,00			7.650.000.000,00				7.650.000.000,00		7.650.000.000,00
150	01.01.02.02.001	002119	Tanah Tegalan	61	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	12.270,00	PT Nil	12.515.400.000,00			12.515.400.000,00				12.515.400.000,00		12.515.400.000,00
151	01.01.02.02.001	002121	Tanah Tegalan	22.03.04.09.4.00094	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT PRBL, Perubahan Akta Notaris No. 5 tanggal 13 April 2015	18.800,00	PT PRBL	19.176.000.000,00			19.176.000.000,00				19.176.000.000,00		19.176.000.000,00
152	01.01.02.02.001	002120	Tanah Tegalan	85	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	89.560,00	PT Nil	91.351.200.000,00			91.351.200.000,00				91.351.200.000,00		91.351.200.000,00
153	01.01.02.02.001	002114	Tanah Tegalan	15	Ds. Benoa/Kuta Selatan/Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	108.150,00	PT Nil	110.313.000.000,00			110.313.000.000,00				110.313.000.000,00		110.313.000.000,00
154	01.01.01.04.001	000281	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.06.70.09.4.00109	Jalan Kartini No 3 Klungkung	Perjanjian Sewa dengan I Ketut Juliarta B.13.032/2928/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 September 2022	400,00	I Ketut Juliarta	68.000.000,00			68.000.000,00				68.000.000,00		68.000.000,00
155	01.01.02.02.001	002115	Tanah Tegalan	18	Ds. Benoa Kec Kuta Selatan Badung	Perjanjian Sewa dengan PT Nil, amandemen IV tanggal 18 September 2017	178.650,00	PT Nil	182.223.000.000,00			182.223.000.000,00				182.223.000.000,00		182.223.000.000,00
156	01.01.02.02.002	000003	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	121	Ds.Kuta.Kc.Kuta.Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Gusti Ketut Merta No. 593.1/528/UPT.P2.BPKAD tgl 1 Maret 2017	140,00	Gusti Ketut Merta	222.740.000,00			222.740.000,00				222.740.000,00		222.740.000,00
157	01.01.02.02.002	000005	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.09.01.17.4.00015	Dempasar/Dempasar Barat/Desa Yang Suda	Perjanjian Sewa dengan Yayasan Corti No. 593.1/2648/UPTD.PBMD tgl 14 Oktober 2019	2.120,00	Yayasan Corti	2.608.660.000,00			2.608.660.000,00				2.608.660.000,00		2.608.660.000,00
158	01.01.02.02.002	000003	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.03.08.06.4.00081	Badung/Kuta Utara/Desa Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan I Md. Wiranatha, Perpanjangan I no 593.1/2020/UPTD.PBMD tgl 27 Agustus 2019	2.100,00	I Md. Wiranatha	13.983.900.000,00			13.983.900.000,00				13.983.900.000,00		13.983.900.000,00
159	01.01.03.01.025	000002	Tanah Lapangan Lainnya	22.03.08.05.4.00394	Badung/Kuta Tengah/Kel Seminyak	Perjanjian Sewa dengan I Wayan Sadia No. B.13.032/2855/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 7 September 2022 (666 m2) dan Perjanjian Sewa dengan Paguyuban Taman Merhaendi Transport No. B.13.593.1/1419/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 2 Juni 2022 (320 m2)	986,00	I Wayan Sadia	721.752.000,00			721.752.000,00				721.752.000,00		721.752.000,00
160	01.01.03.01.025	000001	Tanah Lapangan Lainnya	22.03.08.05.4.00384	Badung/Kuta Utara/Kerobokan Klod	Perjanjian sewa dengan Komang Gilang Pradnya Taksu Naha no. B.13.032/3525/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2023	1.200,00	Komang Gilang Pradnya Taksu	878.400.000,00			878.400.000,00				878.400.000,00		878.400.000,00
161	01.01.03.02.006	000004	Tanah Lapangan Apel/Upacara	22.09.01.08.4.00050	Subak Semila/Kel.Pemecutan/Kec.Denbar	Perjanjian Sewa dengan SMA PGRI 2 Dempasar, Perpanjangan II 593.1/3569/UPTD.PBMD tgl 23 Desember 2019	850,00	SMA PGRI 2 Dempasar	687.600.000,00			687.600.000,00				687.600.000,00		687.600.000,00
162	01.01.03.07.001	000082	Tanah Untuk Jalan Nasional	22.03.04.04.4.00104	Badung /Kuta Tengah/Kel Kuta Jin. Sunset Road Simpang Siur Kuta	Perjanjian Sewa dengan AAP Syafrudin, Perpanjangan II No. B.13.593.1/2025/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 27 Agustus 2021	380,00	AAP Syafrudin	285.000.000,00			285.000.000,00				285.000.000,00		285.000.000,00

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023		
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompartibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
163	01.01.03.07.001	000081	Tanah Untuk Jalan Nasional	22.03.02.05.4.00062	Denpasar/Dentim/Kel. Dangin Puri Klod/Jl.Tjok Agung Kresna	Perjanjian Sewa Kerjasama Pengelolaan Pasir dg Kota Denpasar, addendum II no 075/1673/KB/B.Tapem Tanggal 8 Januari 2015	1.125,00	Kota Denpasar	1.290.375.000,00				1.290.375.000,00			1.290.375.000,00	
164	01.01.03.08.006	000001	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	22.03.06.05.4.00097	Badung/Abiansemal/Desa Ayunan	Perjanjian Sewa dengan PDAM Badung, Perpanjangan II no B.13.032/1639/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 31 Mei 2022	200,00	PDAM Badung	94.500.000,00				94.500.000,00			94.500.000,00	
165	01.01.03.08.006	000002	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	22.03.06.05.4.00098	Badung/Abiansemal/Desa ayunan	Perjanjian Sewa dengan PDAM Badung, Perpanjangan II no B.13.032/1639/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 31 Mei 2022	300,00	PDAM Badung	141.750.000,00				141.750.000,00			141.750.000,00	
166	01.01.02.01.005	001255	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00091	Ds.Munggu.Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Somvir Nomor B.13.032/456/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Februari 2023	1.180,00	Somvir	0,00			64.988.500,00			64.988.500,00	64.988.500,00	
167	01.01.02.01.005	001698	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00062	Badung/Kuta Utara/Ds. Canguu	Perjanjian Sewa dengan IB Marhen Nomor B.13.032/1023/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 13 April 2023	3.700,00	IB Marhen	0,00			3.028.450.000,00			3.028.450.000,00	3.028.450.000,00	
168	01.01.01.02.003	000041	Tanah Bangunan Gudang	22.03.08.06.4.00083	Badung/Kuta Utara/Desa Tibubeneng	Perjanjian Sewa dengan Shri IB Darmika Marhaen W.P.S No.B.13.032/1031/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 April 2023	3.900,00	Shri IB Darmika Marhaen W.P.S	0,00			25.970.100.000,00			25.970.100.000,00	25.970.100.000,00	
169	01.01.01.01.005	000031	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	22.09.02.05.4.00147	Jl. Kapten Tantular Niti Mandala . Kel. Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur (Renon)	Perjanjian Sewa dengan DPD Partai Gerindra No. B.13.032/1939/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023	277,00	DPD Partai Gerindra	0,00			323.536.000,00			323.536.000,00	323.536.000,00	
170	01.01.02.01.005	001467	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00042	Subak Canguu/Br.Canguu/Kec.Kuta Utara/Badung	Perjanjian Sewa dengan Rai Irma Santini B.13.032/2415/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 28 Agustus 2023	2.900,00	Rai Irma Santini	0,00			798.950.000,00			798.950.000,00	798.950.000,00	
171	01.01.02.07.001	000001	Tanah Usaha	22.03.05.11.4.00080	Badung/Mengwi/Ds Gulungan	Perjanjian Sewa dengan I Made Sudja No. B.13.032/2313/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Agustus 2023	1.440,00	I Made Sudja	0,00			1.900.800.000,00			1.900.800.000,00	1.900.800.000,00	
172	01.01.02.01.005	001232	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.09.4.00061	Ds.Munggu.Kc.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan I Dewa Agung Ayu Indriyani No. B.13.032/2439/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 29 Agustus 2023	1.350,00	I Dewa Agung Ayu Indriyani	0,00			74.351.250,00			74.351.250,00	74.351.250,00	
173	01.01.11.05.02	1158	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.06.4.00014	Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Badung	Perjanjian sewa menyewa dengan PT. Bali Bounty No.593.14542/UPT.P2.BPKAD tanggal 9 Oktober 2017, Perpanjangan I Perjanjian B.13.032/373/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 8 Februari 2023	3.225,00	PT. Bali Bounty	0,00			882.037.500,00			882.037.500,00	882.037.500,00	
174	01.01.02.02.001	000077	Tanah Tegalan	22.03.05.09.5.00025	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Perjanjian sewa dengan Dewa Made Merta Sedana Nomor B.13.032/3266/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 15 November 2023	845,00	Dewa Made Merta Sedana	0,00			46.538.375,00			46.538.375,00	46.538.375,00	
175	01.01.02.01.005	001703	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00060	Desa Canguu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Perjanjian sewa dengan Dewa Komang Derdy Antoni Nomor B.13.032/2922/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 9 Oktober 2023	3.080,00	Dewa Komang Derdy Antoni	0,00			2.520.980.000,00			2.520.980.000,00	2.520.980.000,00	
176	01.01.01.04.001	000197	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.03.02.09.4.00021	Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Kelurahan Sumertha Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	Sewa oleh BPD dengan Akta Notaris No. 14 tanggal 04-09-2023	5.000,00	BPD Bali	0,00			5.697.500.000,00			5.697.500.000,00	5.697.500.000,00	
177	01.01.02.02.001	001889	Tanah Tegalan	22.09.03.02.4.00017	Denpasar/Denpasar selatan/Kel. Renon	Perjanjian Sewa dengan PT. Sinar Emas Garuda Sukses No. B.13.032/1791/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Juni 2022 (300m2) Perjanjian Sewa dengan I Dewa Gede Wibawa Putra (600m2), Billy Pandiatama (sebagian 300m2), dan I Ketut Suwandhi B.13.032/1126/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 26 April 2023 (800m2)	2.000,00	PT. Sinar Emas Garuda Sukses, I Dewa Gede Wibawa Putra, Billy Pandiatama dan I Ketut Suwandhi	0,00			1.012.000.000,00			1.012.000.000,00	1.012.000.000,00	
178	01.01.02.01.005	001203	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00043	Ds.Pererenan,Kec.Mengwi,Kab.Badung	Perjanjian Sewa dengan Pengadilan Barus No.B.13.032/9411/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 4 April 2022 (Sewa Sebagian Luas 4880m2) dan Desak Ketut Plavina Dina B.13.032/2332/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 Agustus 2023 (1500 m2)	6.380,00	Pengadilan Barus dan Desak Ketut Plavina Dina	0,00			236.060.000,00			236.060.000,00	236.060.000,00	

Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023		
								Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
179	01.01.02.01.005	001699	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.4.00061	Badung/Kuta Utara/Ds. Cangu	4.480,00	Gede Ray Ardiyan Manchini Yasa Perjanjian Nomor B.13.032/2258/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023 (1500 m2) dan Dr I Ketut Rochineng SH MH Nomor B.13.032/2258/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 10 Agustus 2023 (2980 m2)	0,00			-	3.666.880.000,00			3.666.880.000,00		3.666.880.000,00
180	01.01.02.02.002	000015	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Persil 4	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	800,00	Ketut Parsana	0,00			-	21.600.000,00			21.600.000,00		21.600.000,00
181	01.01.03.01.005	000020	Tanah Lapangan Lainnya	SHP 402	Kelurahan Kerobok Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	195,00	Komang Gilang Pradnya Taksu Natha no. B.13.032/3525/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Desember 2023	0,00			-	156.648.000,00			156.648.000,00		156.648.000,00
182	01.01.02.02.001	000005	Tanah Tegalan	22.03.04.04.4.00103	Badung/Kuta Tengah/Kel. Kuta	2.400,00	Perjanjian Sewa dengan Dewa Made Mahayadnya B.13.032/3630/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Juli 2023	0,00			-	3.818.400.000,00			3.818.400.000,00		3.818.400.000,00
183	01.01.02.02.002	000001	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22.03.04.07.5.00001	Badung/Kuta Selatan/Ds. Unggassan	34.700,00	Perjanjian Sewa dengan PT.Garuda Adhinatra, Perpanjangan I perjanjian nomor B.13.593.1/3987/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 Desember 2021	14.261.700.000,00	PT.Garuda Adhinatra	14.261.700.000,00		804.738.000,00		13.456.962.000,00		13.456.962.000,00	
184	01.01.02.01.005	001713	Tanah Sawah Irigasi	22.03.08.02.5.00001	Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	28.200,00	Perjanjian Sewa dengan ASPEHORTI BALI No. 593.1/1849/UPT.P2.BPKAD tanggal 18 April 2018	7.769.100.000,00	ASPEHORTI BALI	7.769.100.000,00		7.769.100.000,00		-		-	
185	01.01.01.04.001	000106	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.02.01.4.00036	Jln. Surapati Sesetan Denpasar	967,00	Perjanjian Sewa dengan PT.Jamkrida Bali, Perubahan I nomor 593.1/3203/UPT.P2.BPKAD tanggal 9 Juni 2017	519.729.000,00	PT.Jamkrida Bali	519.729.000,00		519.729.000,00		-		-	
186	01.01.01.02.008	000001	Tanah Bangunan Terminal Laut	Belum Sertifikat	Desa Pengambengan,Kec. Negara	1.000,00	Perjanjian Sewa dengan PT. Intan Sakti addendum II no 593/4223/UPT.P2.BPKAD tgl 6 agustus 2018	20.000.000,00	PT. Intan Sakti	20.000.000,00		20.000.000,00		-		-	
Jumlah Aset Tetap Gedung Dikerjasamakan						2.746,20		4.869.786.176,00	(1.801.952.532,47)	19.074.369,00	4.869.786.176,00	295.700.000,00	1.175.917.700,00	19.074.369,00	3.999.568.476,00	(1.543.201.760,97)	2.446.366.717,03
1	03.01.01.01.001	000024	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Surapati Denpasar	593.1/5043/PPA Aset tgl 15 Desember 2016	531,2	PT. Jamkrida Bali Mandara	1.061.147.700,00	(277.666.981,50)	1.061.147.700,00		1061147700		-		-
2	03.01.01.01.001	000025	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Ahmad Yani Denpasar (Gedung Wanita Karya Graha)	Perpanjangan I Perjanjian Sewa No. B.13.593.1/1490/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 2 Juni 2021 dan Perjanjian No. B.13.593.1/13616/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 23 November 2021	1106	PT. Sinar Bali Media Cemerlang, PT. Bio Green	2.169.149.140,00	(567.594.024,97)	2.169.149.140,00		2.169.149.140,00		(567.594.024,97)		1.601.555.115,03
3	03.01.01.09.001	000007	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		Jalan Puduk	Perjanjian Sewa No. 593.1/1665/UPTD.PBMD tgl 21 September 2020	70	DPW Iktan Media Online	33.675.000,00	(33.675.000,00)	33.675.000,00		33.675.000,00		(33.675.000,00)		-
4	03.01.01.01.001	000040	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. IR. Juanda	Perpanjangan I Perjanjian Sewa No. 593.1/101/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 11 Januari 2021	70,8	DPD Partai Demokrat	153.049.776,00	(79.840.969,00)	153.049.776,00		153.049.776,00		(79.840.969,00)		73.208.807,00
5	03.01.01.01.001	000041	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Juanda No. 2 renon Denpasar	Perpanjangan I Perjanjian Sewa No. 593.1/101/UPTD.PBMD/BPKAD tgl 11 Januari 2021	270,15	DPD Partai Demokrat	861.112.562,00	(449.213.724,00)	861.112.562,00		861.112.562,00		(449.213.724,00)		411.898.838,00
6	03.01.02.02.004	000053	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen		Jln. Puduk No. 3 Dps	Dikeluarkan dari daftar sewa dikarenakan gedung yang disewa IDEYANA adalah gedung di Jln. Puduk 3A	100	Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)	114.770.000,00	(94.302.683,00)	114.770.000,00		114770000		-		-
7	03.01.01.01.001	000085	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Pudiak No. 3 A Denpasar	Perjanjian Sewa No. B.13.593.1/1389/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 2-6-2021	100	Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)			-	295.700.000,00		295.700.000,00		(113.218.893,00)	182.481.107,00
8	03.01.01.01.001	000054	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Imambonjol Km.7 Denpasar	Perjanjian Sewa No. 593.1/1269/UPTD.PBMD tanggal 10 Juni 2019	120	Gana Pramananda Sudibya	295.680.000,00	(194.163.200,00)	295.680.000,00		295.680.000,00		(194.163.200,00)		101.516.800,00

No	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Penyewa	Posisi Per 1 Januari 2023			Harga Perolehan	Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023			Posisi Per 31 Desember 2023		
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel		penambahan	pengurangan	ekstra kompatibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
9	03.01.01.08.001	000004	Bangunan Gedung Tempat Bedah Permanen		Jln.Hayam Wuruk No.151 Denpasar	Perpanjangan II No. B.13.032/3951/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 November 2022		PT.Klinik Semesta Mandiri	37.000.000	(37.000.000,00)		37.000.000,00				37.000.000,00	(37.000.000,00)	-
10	03.01.01.01.001	000087	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Cok Agung Tresna Renon Denpasar	Perpanjangan I No. B.13.032/3204/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 30 September 2022	150	Bali Ekspres Intermedia	144.202.000	(68.495.950,00)		144.202.000,00				144.202.000,00	(68.495.950,00)	75.706.050,00
11	03.01.01.14.001	000001	Gedung Garasi/Pool Permanen		Jln. Moh. Yamin Denpasar Renon	perpanjangan II nomor 593.1/2020/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Oktober 2020	369	A.A. Ngurah Anom ST			16.081.369,00							
12	03.01.01.01.001	000014	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln.Hayam Wuruk No.151 Denpasar	Perpanjangan II No. B.13.032/3951/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 21 November 2022	200	PT.Klinik Semesta Mandiri			2.993.000,00							

**Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Saldo Awal	UNIT	Saldo Awal Amortisasi	Saldo Awal Netto	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Saldo Akhir	UNIT	Saldo Akhir Amortisasi	Saldo Akhir Netto
						Belanja Modal	UNIT	Penerimaan Hibah	UNIT	Reklasifikasi		Penghapusan	UNIT				
										Dari Aset Tetap	UNIT						
	Jumlah	24.352.871.621,65	1.308	14.523.595.547,00	9.829.276.074,65	895.500.000,00	2	6.275.000,00	11	403.811.687,00	58,00	167.695.550,00	-	25.490.762.758,65	1.379	17.950.219.235,17	7.540.543.523,48
1	Sekretariat DPRD	20.372.000,00	1,00	20.372.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.372.000,00	1	20.372.000,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	1.429.160.493,00	-	936.337.080,00	492.823.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.429.160.493,00	-	1.138.449.940,00	290.710.553
5	Dinas Perhubungan	1.365.950.000,00	3,00	36.749.166,00	1.329.200.834,00	895.500.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	2.261.450.000,00	5	344.772.500,00	1.916.677.500
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	748.033.800,00	10,00	535.055.911,00	212.977.889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	748.033.800,00	10	661.208.030,00	86.825.770
7	Dinas Kesehatan	6.341.205.057,65	59,00	4.715.973.622,00	1.625.231.435,65	-	-	-	-	276.588.514,00	2,00	-	-	6.617.793.571,65	61	5.440.237.819,00	1.177.555.753
8	Dinas Kebudayaan	88.200.000,00	3,00	49.820.000,00	38.380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.200.000,00	3	65.660.000,00	22.540.000
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pisp	464.625.000,00	2,00	157.816.667,00	306.808.333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	464.625.000,00	2	250.741.667,00	213.883.333
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	324.456.600,00	11,00	282.212.415,00	42.244.185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	324.456.600,00	11	307.773.266,00	16.683.334
14	Inspektorat	337.186.000,00	7,00	220.087.334,00	117.098.666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	337.186.000,00	7	272.784.534,00	64.401.466
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.009.198.500,00	9,00	979.000.108,00	30.198.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009.198.500,00	9	990.689.808,00	18.508.692
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	652.985.000,00	5,00	460.492.000,00	192.493.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	652.985.000,00	5	546.460.000,00	106.525.000
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	702.078.000,00	5,00	162.269.800,00	539.808.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	702.078.000,00	5	302.685.400,00	399.392.600
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	144.896.700,00	4,00	90.902.202,00	53.994.498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	144.896.700,00	4	119.184.875,00	25.711.825
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.303.220.395,00	8,00	4.192.025.263,00	111.195.132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.303.220.395,00	8	4.246.277.643,00	56.942.752
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	5.599.851.586,00	1.130,00	977.967.635,00	4.621.883.951,00	-	-	6.275.000,00	11,00	127.223.173,00	56,00	-	-	5.733.349.759,00	1.197	2.652.982.475,17	3.080.367.284
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	1	1.100.000,00	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	86.900.000,00	42,00	86.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.900.000,00	42	86.900.000,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	634.452.490,00	6,00	557.464.344,00	76.988.146,00	-	-	-	-	-	-	167.695.550,00	-	466.756.940,00	6	421.089.278,00	45.667.662
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	99.000.000,00	2,00	61.050.000,00	37.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.000.000,00	2	80.850.000,00	18.150.000

L

**Rincian Mutasi Aset Tetap Rusak Berat
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2023**

No	SKPD	SALDO AWAL	UNIT	Saldo Awal									
				PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	TOTAL AKUM RB	TOTAL RB NETTO
	Jumlah	37.049.408.706,37	5.712	24.766.183.505,97	4.175	6.637.369.050,40	55	166.173.650,00	9	5.479.682.500,00	1.473	27.442.495.310,55	9.606.913.395,82
1	Sekretariat DPRD	72.000.000,00	6,00	72.000.000,00	6,00	-	-	-	-	-	-	72.000.000,00	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	863.564.016,92	103,00	810.390.366,92	102,00	-	-	53.173.650,00	1,00	-	-	779.042.210,00	84.521.806,92
5	Dinas Perhubungan	45.635.000,00	13,00	45.635.000,00	13,00	-	-	-	-	-	-	45.635.000,00	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	35.000.000,00	-
7	Dinas Kesehatan	1.688.061.849,00	27,00	381.183.489,00	14,00	1.306.428.360,00	13,00	450.000,00	-	-	-	642.367.397,00	1.045.694.452,00
8	Dinas Kebudayaan	228.783.850,00	9,00	228.783.850,00	9,00	-	-	-	-	-	-	228.783.850,00	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	55.837.000,00	10,00	55.837.000,00	10,00	-	-	-	-	-	-	55.837.000,00	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	143.030.375,00	24,00	141.126.375,00	20,00	-	-	-	-	1.904.000,00	4,00	141.126.375,00	1.904.000,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	120.231.000,00	-	120.231.000,00	-	-	-	-	-	-	-	120.231.000,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	817.802.250,00	19,00	58.242.250,00	13,00	759.560.000,00	6,00	-	-	-	-	394.510.685,00	423.291.565,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	11.578.000,00	2,00	11.578.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	11.578.000,00	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	392.017.566,00	126,00	392.017.566,00	126,00	-	-	-	-	-	-	392.017.566,00	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	180.979.334,00	33,00	172.079.334,00	32,00	-	-	8.900.000,00	1,00	-	-	172.895.167,00	8.084.167,00
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	94.390.000,00	12,00	19.813.000,00	5,00	64.700.000,00	3,00	9.877.000,00	4,00	-	-	39.842.435,00	54.547.565,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	135.027.300,00	6,00	135.027.300,00	6,00	-	-	-	-	-	-	135.027.300,00	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	28.375.414.153,45	4.876,00	18.785.066.763,05	3.394,00	4.266.405.890,40	27,00	91.783.000,00	2,00	5.232.158.500,00	1.453,00	20.843.542.035,55	7.531.872.117,90
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.632.662.754,00	146,00	1.387.042.754,00	130,00	-	-	-	-	245.620.000,00	16,00	1.371.623.117,00	261.039.637,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	170.070.900,00	22,00	170.070.900,00	22,00	-	-	-	-	-	-	170.070.900,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	630.441.758,00	73,00	628.451.758,00	72,00	-	-	1.990.000,00	1,00	-	-	629.247.758,00	1.194.000,00
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	1.356.881.600,00	204,00	1.116.606.800,00	198,00	240.274.800,00	6,00	-	-	-	-	1.162.117.515,00	194.764.085,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Mutasi Tambah																					
		Reklasifikasi dari Aset Tetap Kondisi Baik								Penerimaan Hibah		Antar Aset Tetap Tahun Berjalan								Koreksi Pencatatan Sa			
		PM	UNIT	GB	UNIT	JJU	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JJU	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT
	Jumlah	22.423.989.429,70	2.157	1.576.464.724,00	4	-	-	177.677.746,00	100	83.265.000,00	11	15.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	79.212.265,00	23	-	-
1	Sekretariat DPRD	1.102.752.538,00	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	699.791.089,86	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	112.271.500,00	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	2.989.615.265,33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	2.951.594.793,95	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	2.812.209.904,00	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	93.004.236,00	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	1.105.529.735,01	172	261.050.464,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	603.354.009,67	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	575.037.100,00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	195.237.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	409.656.049,00	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	501.774.500,00	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	71.395.000,00	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	228.965.088,00	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	55.528.890,00	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	154.714.075,00	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	819.880.827,00	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	4.558.775.695,55	641	1.315.414.260,00	-	-	-	177.677.746	100	-	-	15.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	79.212.265,00	23,00	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	881.860.900,00	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	408.387.833,33	59	-	-	-	-	-	-	83.265.000	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	1.067.652.450,00	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	25.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1

No	SKPD	do Awal												Mutasi Antar Perangkat Daerah												Pengeluaran Hibah											
		do Awal				PM				GB				UNIT				PM				GB				UNIT											
		JJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT														
	Jumlah	-	-	-	-	45.000.000,00	1	415.755.720,00	5	-	-	-	-	-	415.755.720,00	5	-	-	-	-	25.250.508.259,46	2.611															
1	Sekretariat DPRD																				1.114.752.538,00	103,00															
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali																				699.791.089,86	95,00															
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali																				112.271.500,00	9,00															
4	Sekretariat Daerah					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.755.005.632,25	134,00															
5	Dinas Perhubungan																				45.635.000,00	13,00															
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik																				-	-															
7	Dinas Kesehatan																				1.837.626.178,67	44,00															
8	Dinas Kebudayaan																				3.040.993.754,00	119,00															
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan																				-	-															
10	Dinas Koperasi Dan Ukm																				141.126.375,00	20,00															
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp																				93.004.236,00	17,00															
12	Badan Pendapatan																				983.003.235,01	157,00															
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah							415.755.720,00	5,00						415.755.720,00	5,00				661.596.259,67	90,00																
14	Inspektorat																				-	-															
15	Dinas Pariwisata																				143.697.900,00	29,00															
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																				-	-															
17	Satuan Polisi Pamong Praja																				781.673.615,00	162,00															
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																				172.079.334,00	32,00															
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia																				501.774.500,00	153,00															
20	Badan Penghubung Provinsi Bali																				71.395.000,00	37,00															
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali																				228.965.088,00	23,00															
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali																				55.528.890,00	15,00															
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa																				154.714.075,00	-															
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Permukiman																				839.693.827,00	186,00															
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																				-	-															
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga				-	45.000.000,00	1,00														7.954.620.774,00	975,00															
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan																				848.516.900,00	112,00															
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral																				33.460.400,00	8,00															
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																				628.451.758,00	72,00															
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup												-	-	-	-	-	-	-	-	326.130.400,00	5,00															
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan																				25.000.000,00	1,00															

No	SKPD	Mutasi Kurang																					
		Penghapusan						Reklasifikasi ke Aset Tetap						Antar Aset Tetap Tahun Berjalan									
		GB	UNIT	JJJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JJJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JJJ	UNIT	ATL	UNIT
	Jumlah	3.612.634.820,00	19	10.890.000,00	2	506.032.373,00	106	201.115.000,00	2	-	-	-	-	-	-	15.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	890.672.640,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	1.904.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	28.156.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	694.290.000,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	172.195.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	8.900.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	64.700.000,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.934.816.180,00	2,00	-	-	504.128.373,00	102,00	-	-	-	-	-	-	-	15.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	1.990.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	28.920.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1

No	SKPD	Koreksi Pencatatan Saldo Awal														Mutasi Antar Perangkat Daerah		PM	UNIT
		PM		GB		JIJ		UNIT		ATL		UNIT		ATL		UNIT			
		PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT		
	Jumlah	95.000.000,00	6	65.270.000,00	1	53.173.650,00	1	-	-	45.000.000,00	1	415.755.720,00	5	-	-	-	-	21.806.026.941,21	3.747
1	Sekretariat DPRD	60.000.000,00	5,00															-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali																	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali																	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	53.173.650,00	1,00	-	-	45.000.000,00	1,00							-	-
5	Dinas Perhubungan																	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	35.000.000,00	1,00															-	-
7	Dinas Kesehatan											415.755.720,00	5,00					1.495.152.104,28	87,00
8	Dinas Kebudayaan																	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan																	55.837.000,00	10,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm																	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp																	-	-
12	Badan Pendapatan																	242.757.500,00	15,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			65.270.000,00	1,00													0,00	-
14	Inspektorat																	-	-
15	Dinas Pariwisata																	270.722.200,00	2,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																	195.237.950,00	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja																	20.000.000,00	1,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia																	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali																	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali																	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali																	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa																	-	18,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan Dan Kawasan Perm	-	-															0,00	-
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																	135.027.300,00	6,00
26	Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-													15.513.433.949,60	3.084,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan																	1.420.386.754,00	128,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral																	628.263.333,33	84,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup																	1.829.208.850,00	312,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan																	-	-

No	SKPD	Saldo Akhir									
		GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL AKUM RB	TOTAL RB NETTO
	Jumlah	4.120.173.234,40	34	102.110.000,00	6	5.151.327.873,00	1.467	31.179.638.048,61	5.254	24.064.854.777,71	7.114.783.270,90
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan	-	-	450.000,00	-	-	-	1.495.602.104,28	87,00	1.495.352.580,28	249.524,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	55.837.000,00	10,00	55.837.000,00	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	232.894.464,00	3,00	-	-	-	-	475.651.964,00	18,00	396.749.237,00	78.902.727,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	270.722.200,00	2,00	270.722.200,00	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	195.237.950,00	-	195.237.950,00	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	4.609.269,00	- 4.609.269,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	18,00	135.027.300,00	- 135.027.300,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	9.877.000,00	4,00	-	-	9.877.000,00	4,00	17.667.074.226,10	- 17.657.197.226,10
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	135.027.300,00	6,00	1.404.967.117,00	- 1.269.939.817,00
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	3.647.003.970,40	25,00	91.783.000,00	2,00	4.905.707.873,00	1.451,00	24.157.928.793,00	4.562,00	544.558.333,33	23.613.370.459,67
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	245.620.000,00	16,00	1.666.006.754,00	144,00	-	1.666.006.754,00
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	628.263.333,33	84,00	1.874.719.565,00	- 1.246.456.231,67
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	240.274.800,00	6,00	-	-	-	-	2.069.483.650,00	318,00	-	2.069.483.650,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4

**Rincian Aset Tanah dan Gedung yang Dioperasionalkan Pihak Lain
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

Tanah

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2003	14.000.000,00	Hibah	028/513/SET/DPMA	26/01/2021	Desa Duda Kec. Selat, Kab. Karangasem	1.000	Hak Pakai	SHP 9	23/09/2003	Bandesa Alitan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Selat	Dinas PMA
2	Tanah Sawah Irigasi	1954	18.000.000,00	Hibah	B.27.028/11767/SET/DPMA	08/11/2021	Jalan Raya Manduang Selisihan Kangin, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	500	Hak Pakai	Persil 95		Kelihan Subak Selisihan Kangin	Dinas PMA
3	Tanah Sawah Irigasi	1954	5.287.500,00	Hibah	593/1846/IV/DPMA	13/04/2020	Desa Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung	500	Hak Pakai	SHP 37	20/12/2002	Kelihan Subak Abian Jaga Satru	Dinas PMA
4	Tanah Tegalan	1954	50.460.000,00	Hibah	B.27.028/12608/SET/DPMA	08/12/2021	Gianyar/Gianyar/ Ds. Siangan	580	Hak Pakai	SHP 2	07/05/2007	Pekaseh Subak Delod Siangan	Dinas PMA
5	Tanah Untuk Bangunan Pura	1954	405.250.000,00	Hibah	B.27.028/11294/SET/DPMA	20/10/2021	Jalan Nagasari Dusun Taman, Desa Penatih, Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	500	Hak Pakai	SHP 1	09/08/1998	Pekaseh Subak Taman	Dinas PMA
6	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	85.000.000,00	Hibah	B.27.028/12304/SET/DPMA	30/11/2021	Desa sempidi, Kec. Mengwi Kab. Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 29	31/01/2011	Bandesa Adat Sempidi	Dinas PMA
7	Tanah Sawah Irigasi	2014	871.200.000,00	Hibah	B.27.028/12503/SET/DPMA	03/12/2021	Tabanan/Kediri/ Ds. Banjar Anyar	1.200	Hak Pakai	SHP 44	29/12/2014	Pekaseh/Kelihan Subak Senapahan	Dinas PMA
8	Tanah Tegalan	1954	7.000.000,00	Hibah	B.27.028/972/SET/DPMA	01/03/2023	Karangasem/Abang/ Ds. Tista	2.000	Hak Pakai	SHP 13	04/12/2002	Bandesa Adat Basangalas	Dinas PMA
9	Tanah Sawah Irigasi	2010	97.750.000,00	Hibah	B.27.028/4817/SET/DPMA	03/07/2023	Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung	1.150	Hak Pakai	SHP 3	31/01/2011	Kantor Majelis Subak Sempidi	Dinas PMA
10	Tanah Tegalan	2002	3.500.000,00	Hibah	B.27.028/973/SET/DPMA	01/03/2023	Desa tista, Kab. karangasem	1.000	Hak Pakai	SHP 10	04/12/2002	Bandesa Adat Ngis	Dinas PMA
11	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst.)	1999	3.566.200.000,00	Hibah	B.18.028/7087/UMUM.KEPEG/DISKES	18-Aug-21	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar	4.400	Hak Pakai	SHP 10	2 Agustus 2022	PMI Canter	Dinas Kesehatan
12	Tanah Bangunan	2022	2.629.344.000,00	Pembelian	B.18.028/5563/UMUM DISKES/2022	15-Sep-22	Seminyak Kuta	3.592	Hak Pakai	SHP 47	12 Agustus 2022	Gudang PBR	Dinas Kesehatan
13	Tanah Bangunan	2022	916.464.000,00	Pembelian	B.18.028/5563/UMUM DISKES/2022	15-Sep-22	Seminyak Kuta	1.252	Hak Pakai	SHP 48	12 Agustus 2022	Asrama	Dinas Kesehatan
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya (dst)	2022	418.218.000,00	Hibah	No : B.24.032/19687/SEKRET/D.KOMINFOS	06 Nopember 2023	Jl. Trengguli I Penatih-Denpasar	516	Hak Pakai	SHP 10	27/09/1999	ORARI Daerah Bali	DISKOMINFOS
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1982	510.000,00	Hibah	19.593/7481/III/DISPMD DUKCAPIL,	03-03- 2020	Desa Tumbu/Karangasem/Karangasem	300	Hak Pakai	SHP 10	21/08/1982	Pemerintah Desa Tumbu	Dinas PMDDUKCAPIL
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1964	10.000.000,00	Pembelian	593/6500/II/DISPMD DUKCAPIL,	24-Apr-20	Desa Menanga Rendang Karangasem Pondok Kerja	500	Hak Pakai	SHP 9	23/10/2007	Pemerintah Desa Menanga	Dinas PMDDUKCAPIL
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2020	70.470.000,00	Pembelian	19.593/25069/II/Dispmd DUKCAPIL,	01-Sep-20	Kabupaten Gianyar, Kecamatan Tampak Siring, Ds. Pejeng Kangin	290	Hak Pakai	SHP 11	11/08/2022	Pemerintah Desa Pejeng Kangin	Dinas PMDDUKCAPIL
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2021	36.000.000,00	Hibah	B/28.593/14302/II/ISPMD DUKCAPIL,	8 Juni 2021	Desa Selat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	850	Hak Pakai	SHP 19	19/01/2005	Pemerintah Desa Selat	Dinas PMDDUKCAPIL
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1954	43.500.000,00	Hibah	B.28.593/839/II/DPMD DUKCAPIL,	09-Mar-22	Desa Bongan, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP 12	25/07/2007	Pemerintah Desa Bongan	Dinas PMDDUKCAPIL
20	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathan	2010	10.045.750,00	Hibah	B.28.028/636/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	09-Mar-22	Kec. Belayu Kab. Tabanan	1.405	Hak Pakai	SHP 10	19/02/2010	Pemerintah Desa Cau Belayu	Dinas PMDDUKCAPIL
21	Tanah Bangunan Poliklinik	2015	23.175.000,00	Hibah	19.593/29209/II/ISPMD DUKCAPIL,	02/11/2020	Kab. Tabanan, Kec. Selemadeg, Desa Berembeng	900	Hak Pakai	SHP 19	22/01/2015	Pemerintah Desa Berembeng	Dinas PMDDUKCAPIL
22	Tanah Sawah Irigasi	1954	22.700.000,00	Pembelian	593/19937/III/Dispmd,	04-Nov-19	Desa Bona Kec. Blahbatuh Gianyar	200	Hak Pakai	SHP 4	18/11/2002	Pemerintah Desa Bona	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Tanah Sawah Irigasi	1954	21.870.000,00	Hibah	593/24513/III/Dispmd,	18-Dec-19	Tabanan\Penebel\Ds.Riang Gede	3.600	Pakai	SHP 18	17/09/2002	Pemerintah Desa Riang Gede	Dinas PMDDUKCAPIL
24	Tanah Sawah Irigasi	1954	8.019.000,00	Hibah	593/24513/III/Dispmd,	18-Dec-19	Tabanan\Penebel\Ds.Riang Gede	1.320	Pakai	SHP 19	17/09/2002	Pemerintah Desa Riang Gede	Dinas PMDDUKCAPIL
25	Tanah Sawah Irigasi	2010	1.210.166.000,00	Hibah	593/25909/II/Dispmd Dukcapil,	29 September 2020	Ds.Buduk,Kc.Mengwi,Kab.Badung	14.480	Hak Pakai	SHP 28	26/01/2011	Pemerintah Desa Buduk	Dinas PMDDUKCAPIL
26	Tanah Sawah Irigasi	2010	65.188.500,00	Hibah	593/25909/II/Dispmd Dukcapil,	29 September 2020	Ds.Buduk,Kc.Mengwi,Kec.Badung	780	Hak Pakai	SHP 25	26/01/2011	Pemerintah Desa Buduk	Dinas PMDDUKCAPIL
27	Tanah Sawah Irigasi	1954	41.040.000,00	Hibah	19.593/2067/III/Dispmd Dukcapil,	2 Pebruari 2021	Tabanan\Tabanan\Ds.Gubug	760	Pakai	SHP 75	08/11/1995	Pemerintah Desa Gubug	Dinas PMDDUKCAPIL
28	Tanah Sawah Irigasi	2015	336.600.000,00	Hibah	19.593/32313/II/Dispmd Dukcapil,	18 Desember 2020	Tabanan\Kerambitan\Ds. Samsam	3.740	Hak Pakai	SHP 24	23/04/2015	Pemerintah Desa Samsam	Dinas PMDDUKCAPIL
29	Tanah Sawah Irigasi	1954	14.012.500,00	Hibah	B.28.028/539/II/DPMD DUKCAPIL,	16-Feb-22	Tabanan\Penebel\Ds.Jegu	1.475	Pakai	SHP 1	17/09/2002	Pemerintah Desa Jegu	Dinas PMDDUKCAPIL
30	Tanah Sawah Irigasi	2010	110.400.000,00	Hibah	B.28.593/977/II/DPMD DUKCAPIL,	16 Pebruari 2022	Subak.Sibang Gede/Br.Sibang/Kec.Abiansemal/Badung	1.600	Hak Pakai	SHP 24	08/12/2011	Pemerintah Desa Sibang Gede	Dinas PMDDUKCAPIL
31	Tanah Sawah Irigasi	1954	762.660.000,00	Hibah	B.28.028/2502/III/DPMD DUKCAPIL,	22-04-2022	Denpasar\Denpasar selatan\Ds. Sidakarya	1.140	Pakai	SHP 22	19/12/2002	Pemerintah Desa Sidakarya	Dinas PMDDUKCAPIL
32	Tanah Tegalan	2020	18.900.000,00	Hibah	593/4110/III/Dispmd DUKCAPIL,	03-Feb-20	Desa Budakeling, Kec Bebandem, Kab. Karangasem	1.000	Hak Pakai	Persil 51 Pupil 106		Pemerintah Desa Budakeling	Dinas PMDDUKCAPIL
33	Tanah Tegalan	1954	106.275.000,00	Hibah	B.28.593/628/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar\Gianyar\Ds. Babakan	1.950	Pakai	SHP 3	25/06/2007	Pemerintah Desa Babakan	Dinas PMDDUKCAPIL
34	Tanah Tegalan	1954	36.105.000,00	Hibah	B.28.593/628/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Gianyar\Gianyar\Ds. Siangan	415	Pakai	SHP 5	24/05/2007	Pemerintah Desa Siangan	Dinas PMDDUKCAPIL
35	Tanah Tegalan	1954	31.850.000,00	Hibah	B.28.593/637/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Gianyar\Tampaksiring\Ds. Tampaksiring	490	Pakai	SHP 16	18/11/2002	Pemerintah Desa Tampaksiring	Dinas PMDDUKCAPIL
36	Tanah Tegalan	1954	81.900.000,00	Hibah	B.28.593/653/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Gianyar\Payangan\Ds. Kerta	780	Pakai	SHP 19	11/04/2006	Pemerintah Desa Kerta	Dinas PMDDUKCAPIL
37	Tanah Tegalan	1954	42.000.000,00	Hibah	B.28.593/653/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Gianyar\Payangan\Ds. Kerta	400	Pakai	SHP 18	11/04/2006	Pemerintah Desa Kerta	Dinas PMDDUKCAPIL
38	Tanah Tegalan	1954	213.132.500,00	Hibah	B.28.593/494/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Gianyar\Sukawati\Ds. Sukawati	665	Pakai	SHP 41	23/09/2005	Pemerintah Desa Sukawati	Dinas PMDDUKCAPIL
39	Tanah Tegalan	1954	20.800.000,00	Hibah	B.28.028/537/II/DPMD DUKCAPIL,	16-02-2022	Tabanan\Kerambitan\Ds.Kelating	1.300	Pakai	SHP 5	17/09/2002	Pemerintah Desa Kelating	Dinas PMDDUKCAPIL
40	Tanah Tegalan	1954	6.004.250,00	Hibah	B.28.593/938/II/DPMD DUKCAPIL,	16-Feb-22	Tabanan\Penebel\Ds.Pitra	730	Pakai	SHP 10	27/04/2006	Pemerintah Desa Pitra	Dinas PMDDUKCAPIL
41	Tanah Tegalan	1954	18.225.000,00	Hibah	B.28.028/547/II/DPMD DUKCAPIL,	16-Feb-22	Klungkung\Banjarangkan\Ds. Bungbungan	1.350	Pakai	SHP 23	01/11/2002	Pemerintah Desa Bungbungan	Dinas PMDDUKCAPIL
42	Tanah Tegalan	2015	25.750.000,00	Hibah	B.28.028/638/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	09-03-2022	Desa Berembeng, Kec.Selemedeg, Kab.Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP 18	22/01/2015	Pemerintah Desa Berembeng	Dinas PMDDUKCAPIL
43	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	159.910.234,54	Hibah	19.593/2067/II/Dispmd Dukcapil,	2 Pebruari 2021	Jln Pesiapan Yeh Gangga, Ds. Gubug, Kab. Tabanan	4.230	Hak Pakai	SHP 43 dan SHP 44	12/04/2022	Pemerintah Desa Gubug	Dinas PMDDUKCAPIL
44	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	53.362.500,00	Hibah	B.28.593/19015/II/DPMD DUKCAPIL,	18-08-2021	Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	1.500	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Baturiti	Dinas PMDDUKCAPIL
45	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	53.362.500,00	Hibah	B.28.593/19015/II/DPMD DUKCAPIL,	18-08-2021	Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	1.500	Hak Pakai	SHP 13	29/12/2014	Pemerintah Desa Baturiti	Dinas PMDDUKCAPIL
46	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	40.643.750,00	Hibah	B.28.593/3822/III/Dispmd DUKCAPIL,	2 Maret 2021	Desa batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	1.750	Hak Pakai	SHP 14	17/09/2002	Pemerintah Desa Batuaji	Dinas PMDDUKCAPIL
47	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2021	47.987.500,00	Hibah	Nomor B.28.593/11025/II/Dpmd Dukcapil,	15 Juni 2021	Desa Selat, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Klungkung	1.745	Hak Pakai	SHP 57	24/12/2002	Pemerintah Desa Selat	Dinas PMDDUKCAPIL
48	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	4.900.000,00	Hibah	B.28.593/25303/II/DPMD DUKCAPIL,	23-Nov-21	Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem	2.000	Hak Pakai	SHP 17	04/12/2002	Pemerintah Desa Nongan	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	669.000.000,00	Hibah	B.28.593/900/II/DPMD DUKCAPIL,	14-01-2022	Jalan Kerta Dalem GG XXI Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan	1.000	Hak Pakai	SHP 20	19/12/2020	Pemerintah Desa Sidakarya	Dinas PMDDUKCAPIL
50	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1989	1.480.000.000,00	Pembelian	B.28.593/902/II/DPMD DUKCAPIL,	14-Jan-22	Jalan Danau Tempe I Desa Sanur Kauh	2.000	Hak Pakai	SHP 22	14/12/1989	Pemerintah Desa Sanur Kauh	Dinas PMDDUKCAPIL
51	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	54.000.000,00	Hibah	B.28.593/904/II/DPMD DUKCAPIL,	03-01-2022	Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP 30	12/02/2004	Pemerintah Desa Lalanglinggah	Dinas PMDDUKCAPIL
52	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	10.250.000,00	Pembelian	B.28.593/908/II/DPMD DUKCAPIL,	03-01-2022	BBI Luwus Tabanan	500	Hak Pakai	SHP 35	25/07/2007	Pemerintah Desa Luwus	Dinas PMDDUKCAPIL
53	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	1.750.000,00	Pembelian	B.28.593/910/II/DPMD DUKCAPIL,	03-Jan-22	Desa Batunya, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan	500	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Batunya	Dinas PMDDUKCAPIL
54	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	138.238.250,00	Hibah	B.28.593/21815/II/DPMD DUKCAPIL,	28-Sep-21	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	2.510	Hak Pakai	SHP 58	26/01/2011	Pemerintah Desa Munggu	Dinas PMDDUKCAPIL
55	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	121.165.000,00	Hibah	B.28.593/21815/II/DPMD DUKCAPIL,	28-Sep-21	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, kabupaten badung	2.200	Hak Pakai	SHP 65	01/02/2011	Pemerintah Desa Munggu	Dinas PMDDUKCAPIL
56	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	86.921.250,00	Hibah	B.28.593/906/II/DPMD DUKCAPIL,	03-Jan-22	Desa Belalang, Kecamatan Kediri, kabupaten tabanan	1.950	Hak Pakai	SHP 4	26/11/1990	Pemerintah Desa Belalang	Dinas PMDDUKCAPIL
57	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	85.680.000,00	Hibah	B.28.593/601/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Desa Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar	800	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Celuk	Dinas PMDDUKCAPIL
58	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	27.000.000,00	Hibah	B.28.593/603/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Desa Singapadu, Kec Sukawati, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 24	31/12/2010	Pemerintah Desa Singapadu	Dinas PMDDUKCAPIL
59	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	36.000.000,00	Hibah	B.28.593/618/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Medahaan, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	Persil 93		Pemerintah Desa Medahaan	Dinas PMDDUKCAPIL
60	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	45.630.000,00	Hibah	B.28.593/620/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Banjar Prajamukti Desa Bona, Kec Blahbatuh, Kab Gianyar	1.500	Hak Pakai	persil 56 SDJ		Pemerintah Desa Bona	Dinas PMDDUKCAPIL
61	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	131.500.000,00	Hibah	B.28.593/622/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Lebih, Kec Gianyar, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 12	24/05/2007	Pemerintah Desa Lebih	Dinas PMDDUKCAPIL
62	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	7.150.000,00	Hibah	B.28.593/624/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Desa Temesi, Kec Gianyar, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 7	31/12/2002	Pemerintah Desa Temesi	Dinas PMDDUKCAPIL
63	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	181.000.000,00	Hibah	B.28.593/632/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Kelurahan Samplangan, Desa Tegal Tugu, Kec Gianyar, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 17	14/06/2007	Pemerintah Desa Tegal Tugu	Dinas PMDDUKCAPIL
64	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	65.000.000,00	Hibah	B.28.593/657/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Pejeng kaja, Kec Tampaksiring, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 2	26/08/1994	Pemerintah Desa Pejeng kaja	Dinas PMDDUKCAPIL
65	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	107.000.000,00	Hibah	B.28.593/649/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Desa Melinggih, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 12	22/03/2006	Pemerintah Desa Melinggih	Dinas PMDDUKCAPIL
66	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	48.000.000,00	Hibah	B.28.593/651/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Desa Kelusa, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 13	27/01/2006	Pemerintah Desa Kelusa	Dinas PMDDUKCAPIL
67	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	107.000.000,00	Hibah	B.28.593/643/II/DPMD DUKCAPIL,	03-02- 2022	Desa Bukian, Kec Payangan, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 6	23/01/2006	Pemerintah Desa Bukian	Dinas PMDDUKCAPIL
68	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	27.000.000,00	Hibah	B.28.593/647/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Buah, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	persil 78		Pemerintah Desa Buah	Dinas PMDDUKCAPIL
69	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	31.050.000,00	Hibah	B.28.593/641/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Buah Kaja, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	persil 77		Pemerintah Desa Buah Kaja	Dinas PMDDUKCAPIL
70	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	65.000.000,00	Hibah	B.28.593/639/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Singapadu kaler, Kec Sukawati, Kab Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 10	22/09/2005	Pemerintah Desa Singapadu kaler	Dinas PMDDUKCAPIL
71	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	14.000.000,00	Hibah	Nomor B.28.593/889/II/DPMD DUKcapil,	08 Februari 2022	Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kab. Klungkung	1.000	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Jumpai	Dinas PMDDUKCAPIL
72	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	7.500.000,00	Hibah	B.28.593/277/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Subak Getasan Banjar Getasan Kec Petang, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 23	28/12/2011	Pemerintah Desa Getasan	Dinas PMDDUKCAPIL
73	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	69.000.000,00	Hibah	B.28.593/288/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Subak Darmasaba Banjar Darmasaba Kec Abiansemal, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 23	21/12/2011	Pemerintah Desa Darmasaba	Dinas PMDDUKCAPIL
74	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	10.575.000,00	Hibah	B.28.593/288/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Subak Uma Tegal Desa Sembung Kec Mengwi, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 39	20/01/2002	Pemerintah Desa Sembung	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	1.722.000.000,00	Hibah	B.28.593/385/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Subak Tungkuh Munduk Delod sema, Kec Mengwi, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Mengwi	Dinas PMDDUKCAPIL
76	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	83.575.000,00	Hibah	B.28.593/297/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Subak Dukuh Banjar WerdiBuana Kec Mengwi, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 34	20/12/2011	Pemerintah Desa WerdiBuana	Dinas PMDDUKCAPIL
77	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	8.575.000,00	Hibah	B.28.593/293/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Desa Selat Kec.Abiansemal, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 3	08/02/2005	Pemerintah Desa Selat	Dinas PMDDUKCAPIL
78	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	18.462.000,00	Hibah	B.28.593/203/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Ds. Gulungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung	1.360	Hak Pakai	SHP 15	26/01/2011	Pemerintah Desa Gulungan	Dinas PMDDUKCAPIL
79	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	10.588.500,00	Hibah	B.28.593/203/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Desa Gulungan Kec Mengwi, Kab Badung	780	Hak Pakai	SHP 14	27/01/2011	Pemerintah Desa Gulungan	Dinas PMDDUKCAPIL
80	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	7.602.000,00	Hibah	B.28.593/203/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Desa Gulungan Kec Mengwi, Kab Badung	560	Hak Pakai	SHP 16	28/01/2011	Pemerintah Desa Gulungan	Dinas PMDDUKCAPIL
81	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	136.227.250,00	Hibah	B.28.593/374/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Subak Cemagi Let Desa Cemagi Kec Mengwi, Kab Badung	1.630	Hak Pakai	SHP 8	31/01/2005	Pemerintah Desa Cemagi	Dinas PMDDUKCAPIL
82	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	8.775.000,00	Hibah	B.28.593/680/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Banjar Batulantang Desa Sulanggai Kec Petang, Kab Badung	1.170	Hak Pakai	SHP 6	08/02/2005	Pemerintah Desa Sulanggai	Dinas PMDDUKCAPIL
83	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	2.475.000,00	Hibah	B.28.593/680/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Banjar Batulantang Desa Sulanggai Kec Petang, Kab Badung	330	Hak Pakai	SHP 8	08/02/2005	Pemerintah Desa Sulanggai	Dinas PMDDUKCAPIL
84	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	405.000,00	Hibah	B.28.593/680/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Banjar Batulantang Desa Sulanggai Kec Petang, Kab Badung	54	Hak Pakai	SHP 9	08/02/2005	Pemerintah Desa Sulanggai	Dinas PMDDUKCAPIL
85	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	11.850.000,00	Hibah	B.28.593/675/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Desa Bongkasa Pertiwi Kec Abiansemal, Kab Badung	1.580	Hak Pakai	SHP 12	08/02/2012	Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi	Dinas PMDDUKCAPIL
86	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	14.400.000,00	Hibah	B.28.593/673/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Desa Bongkasa Kec Abiansemal, Kab Badung	1.920	Hak Pakai	SHP 14	08/02/2005	Pemerintah Desa Bongkasa	Dinas PMDDUKCAPIL
87	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2010	139.200.000,00	Hibah	B.28.593/678/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Desa Mengwitani Kec Mengwi, Kab Badung	1.600	Hak Pakai	SHP 11	02/02/2011	Pemerintah Desa Mengwitani	Dinas PMDDUKCAPIL
88	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	9.517.500,00	Hibah	B.28.593/295/II/DPMD DUKCAPIL,	14 Jan 2022	Desa Baha Kec.Mengwi, Kab Badung	900	Hak Pakai	SHP 21	20/12/2002	Pemerintah Desa Baha	Dinas PMDDUKCAPIL
89	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	131.200.000,00	Hibah	B.28.593/645/II/DPMD DUKCAPIL,	03/02/2022	Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar	1.600	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Buruan	Dinas PMDDUKCAPIL
90	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	35.100.000,00	Pembelian	B.28.028/545/II/DPMD DUKCAPIL,	16-02-2022	Dusun Selat, Desa Banjarangkan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung	600	Hak Pakai	SHP 75	03/12/2002	Pemerintah Desa Banjarangkan	Dinas PMDDUKCAPIL
91	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	67.575.000,00	Hibah	B.28.593/916/II/DPMD DUKCAPIL,	16 Feb 2022	Banjar Dirgahayu, Desa Adat Gerih, Kec. Abiansemal, Kab Badung	1.000	Hak Pakai	SHP 33	08/02/2005	Pemerintah Desa Gerih	Dinas PMDDUKCAPIL
92	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	6.300.000,00	Hibah	B.28.028/543/II/DPMD DUKCAPIL,	16-02-2022	Desa Bakas, Kec.Banjarangkan Kab.Klungkung	600	Hak Pakai	SHP 3	01/11/2002	Pemerintah Desa Bakas	Dinas PMDDUKCAPIL
93	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	9.000.000,00	Hibah	B.28.028/541/II/DPMD DUKCAPIL,	16-Feb-22	Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kec.Banjarangkan, Kab.Klungkung	600	Hak Pakai	SHP 56	24/10/2002	Pemerintah Desa Aan	Dinas PMDDUKCAPIL
94	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	12.500.000,00	Hibah	B.28.028/634/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	09-03-2022	Desa Rejasa, Kec.Penebel, Kab.Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP 19	27/04/2006	Pemerintah Desa Rejasa	Dinas PMDDUKCAPIL
95	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	153.725.000,00	Hibah	B.28.028/4420/II/DPMD DUKCAPIL,	17-Jun-22	Desa Mendoyo Dauh Tukad, Jembrana	21.500	Hak Pakai	SHP 21	21/02/2005	Pemerintah Desa Mendoyo	Dinas PMDDUKCAPIL
96	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2022	14.000.000,00	Hibah	B.28.028/795/Umum/DPMD DUKCAPIL,	31-03-2022	Subak Kacang Dewa Dawa, Desa Kamasan, Kec.Klungkung	1.000	Hak Pakai	Persil 51		Pemerintah Desa Kamasan	Dinas PMDDUKCAPIL
97	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2022	30.000.000,00	Hibah	B.28.593/975/II/DPMD DUKCAPIL,	31-03-2022	Subak Kedampal, Desa Mengesta, Kec.Penebel, Kab.Tabanan	1.500	Hak Pakai	Persil 13		Pemerintah Desa Mengesta	Dinas PMDDUKCAPIL
98	Tanah Sawah Irigasi	2022	20.000.000,00	Hibah	B.28.593/975/II/DPMD DUKCAPIL,	31-03-2022	Subak Kedampal, Desa Mangesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan	1.000	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Mengesta	Dinas PMDDUKCAPIL
99	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	179.550.000,00	Hibah	B.28.593/195/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	04-01-2022	Desa Padangsambian Kelod	900	Hak Pakai	SHP 12.	19 Desember 2002	Pemerintah Desa Padangsambian Kelod	Dinas PMDDUKCAPIL
100	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1998	810.500.000,00	Hibah	B.28.028/7566/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	03-Oct-22	Desa Penatih Dangin Puri, Kota Denpasar	1.000	Hak Pakai	SHP 1.	9 Agustus 1998	Pemerintah Desa Penatih Dangin Puri	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	Tanah Sawah Irigasi	1954	1.925.000,00	Hibah	B.28.028/640/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	09-03-2022	Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	550	Hak Pakai	SHP No.3	30-01-1990	Pemerintah Desa Beraban	Dinas PMDDUKCAPIL
102	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1986	24.000.000,00	Pembelian	B.28.028/7562/SET/DPMD DUKCAPIL,	03-10-2022	Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan	1.500	Hak Pakai	SHP No.7	18 Desember 1986	Pemerintah Desa Timpag	Dinas PMDDUKCAPIL
103	Tanah Tegalan	2022	36.450.000,00	Hibah	B.28.028/680/SET/DPMD DUKCAPIL,	31-03-2022	Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan	1.350	Hak Pakai	Persil 7		Pemerintah Desa Kuwum	Dinas PMDDUKCAPIL
104	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2015	18.500.000,00	Hibah	B.28.028/5899/SET/DPMD DUKCAPIL,	03-08-2022	Desa Biaung, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan	1.000	Hak Pakai	SHP No.11	13 Mei 2015	Pemerintah Desa Biaung	Dinas PMDDUKCAPIL
105	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	4.630.500,00	Hibah	B.28.028/7628/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	4 Oktober 2022	Desa Sobangan Kec Mengwi, Kab Badung	540	Hak Pakai	SHP 87	20 Desember 2002	Pemerintah Desa Sobangan	Dinas PMDDUKCAPIL
106	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	8.746.500,00	Hibah	B.28.028/7628/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	4 Oktober 2022	Desa Sobangan Kec Mengwi, Kab Badung	1.020	Hak Pakai	SHP 128	20 Desember 2002	Pemerintah Desa Sobangan	Dinas PMDDUKCAPIL
107	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	4.973.500,00	Hibah	B.28.028/7628/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	4 Oktober 2022	Desa Sobangan Kec Mengwi, Kab Badung	580	Hak Pakai	SHP 129	20 Desember 2002	Pemerintah Desa Sobangan	Dinas PMDDUKCAPIL
108	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1996	14.000.000,00	Hibah	B.28.028/6658/SET/DPMD DUKCAPIL,	5 September 2022	Desa Munduk, Kec Banjar Kab Buleleng	500	Hak Pakai	SHP 4	22/02/1996	Pemerintah Desa Munduk	Dinas PMDDUKCAPIL
109	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	107.000.000,00	Hibah	B.28.028/6680/SET/DPMD DUKCAPIL,	6-09-2022	Desa Kedisan, Kec.Tegalalang Kab.Gianyar	1.000	Hak Pakai	SHP 3	17-1-2006	Pemerintah Desa Kedisan	Dinas PMDDUKCAPIL
110	Tanah Sawah Irigasi	2015	181.980.000,00	Hibah	B.28.028/6682/SET/DPMD DUKCAPIL,	6-09-2022	Desa Belega, Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar	1.348	Hak Pakai	SHP 13	28/12/2012	Pemerintah Desa Belega	Dinas PMDDUKCAPIL
111	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	11.100.000,00	Hibah	B.28.028/7447/SET/DPMD DUKCAPIL,	29-Sep-22	Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung	600	Hak Pakai	SHP No. 6.	29-11-2002	Pemerintah Desa Timuhun	Dinas PMDDUKCAPIL
112	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2002	26.500.000,00	Hibah	B.28.028/5894/UMUM/DPMD DUKCAPIL,	03-Aug-22	Desa Dawan Kaler, Dawan, Klungkung	1.000	Hak Pakai	No. 5.	29-10-2002	Pemerintah Desa Dawan Kaler	Dinas PMDDUKCAPIL

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	41.340.000,00	Hibah	B.28.028/5894/UMUM/DPMD DUKCAPIL.	03-Aug-22	Desa Dawan Kaler, Dawan, Klungkung	1.560	Hak Pakai	No.16.	29-10-2002	Pemerintah Desa Dawan Kaler	Dinas PMDDUKCAPIL
114	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1954	36.835.000,00	Hibah	B.28.028/5894/UMUM/DPMD DUKCAPIL.	03-Aug-22	Desa Dawan Kaler, Dawan, Klungkung	1.390	Hak Pakai	No.18.	30-12-2002	Pemerintah Desa Dawan Kaler	Dinas PMDDUKCAPIL
115	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2022	14.000.000,00	Hibah	B.28.028/5928/SET/DPMD DUKCAPIL.	04-08-2022	Subak Selat Br. Dinas Bajing, Desa Tegak, Klungkung	1.000	Hak Pakai	belum sertifikat		Pemerintah Desa Tegak	Dinas PMDDUKCAPIL
116	Tanah Sawah Irigasi	1954	10.987.500,00	Hibah	B.28.028/5892/SET/DPMD DUKCAPIL.	03-Aug-22	Desa Selisihan, Klungkung	1.465	Hak Pakai	No.17.	24-12-2002	Pemerintah Desa Selisihan	Dinas PMDDUKCAPIL
117	Tanah bangunan kantor pemerintah	2020	116.640.000,00	Pembelian	19.593/25069/II/Dispmnd DUKCAPIL	01-Sep-20	Desa Pejeng Kangin, Kec. Tampaksiring Kab.Gianyar	480	Hak Pakai	No.12	11 Agustus 2022	Pemerintah Desa Pejeng Kangin	Dinas PMDDUKCAPIL
118	Tanah Tegalan	2022	78.900.000,00	Hibah	B.28.028/6161/Set/DPMD DUKCAPIL	15-08-2022	Desa Pengotan Kec Bangli, Kab Bangli	2.000	Hak Pakai	No.6	18/09/2002	Pemerintah Desa Pengotan	Dinas PMDDUKCAPIL
119	Tanah Sawah Irigasi	2010	63.887.000,00	Hibah	B.13.028/2429/PBMD.BPKAD	27-Mar-23	Ds.Munggu,Kc.Mengwi,Kab.Badung	1.160	Hak Pakai	No. 62	28/02/2011	Perbekel Desa Munggu,	Dinas PMDDUKCAPIL
120	Tanah Sawah Irigasi	2015	303.020.000,00	Hibah	B.13.028/2895/PBMD.BPKAD	12-Apr-23	TabananTabananDs. Subamia	5.560	Hak Pakai	No. 7	30/12/2015	Perbekel Desa Subamia,	Dinas PMDDUKCAPIL
121	Tanah Sawah Irigasi	2010	68.310.000,00	Hibah	B.13.028/2895/PBMD.BPKAD	12-Apr-23	Ds.Tumbuh Bayuh,Kec.Mengwi,Kab.Badung	990	Hak Pakai	No. 7	02/02/2011	Perbekel Desa Tumbuh Bayuh,	Dinas PMDDUKCAPIL
122	Tanah Sawah Irigasi	1954	23.423.625,00	Hibah	B.13.028/6781/PBMD.BPKAD	04-Sep-23	BadungMengwiDs. Sembung	2.215	Hak Pakai	No.11	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dinas PMDDUKCAPIL
123	Tanah Sawah Irigasi	1954	21.097.125,00	Hibah	B.13.028/6781/PBMD.BPKAD	04-Sep-23	BadungMengwiDs. Sembung	1.995	Hak Pakai	No.12	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dinas PMDDUKCAPIL
124	Tanah Sawah Irigasi	1954	49.120.875,00	Hibah	B.13.028/6781/PBMD.BPKAD	04-Sep-23	BadungMengwiDs. Sembung	4.645	Hak Pakai	No.13	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dinas PMDDUKCAPIL
125	Tanah Sawah Irigasi	1954	20.039.625,00	Hibah	B.13.028/6781/PBMD.BPKAD	04-Sep-23	BadungMengwiDs. Sembung	1.895	Hak Pakai	No.14	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dinas PMDDUKCAPIL
126	Tanah Sawah Irigasi	1954	23.846.625,00	Hibah	B.13.028/6781/PBMD.BPKAD	04-Sep-23	BadungMengwiDs. Sembung	2.255	Hak Pakai	No.16.	20/12/2002	Pemerintah Desa Kuwum	Dinas PMDDUKCAPIL
127	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2010	1.680.000.000,00	Pembelian	027/39856/UK/Disikpora	29-Jun-20	DenpasarDenpasar TimurDs. Sumerta Klod (Jl. Kapten Tantular No. 11 Niti Mandala Bonon Denpasar)	1.500	Hak Pakai	No. 131	14/04/2005	Kwartir Daerah	Dinas Pendidikan
128	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	1985	663.200.000,00	Hibah	B.31.593/49024/UK/DIKPORA	06-Jul-21	Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung	1.600	Hak Pakai	No. 8	12/09/2007	Pencak Silat Kertha Wisesa	Dinas Pendidikan
129	Tanah Sawah Irigasi	2020	596.117.250,00	Hibah	027/39857/UK/Disikpora	29-Jun-20	TabananMargalDs. Marga Dauh Puri	27.630	Hak Pakai	No. 1	30/12/2015	Kwartir Daerah	Dinas Pendidikan
130	Tanah Sawah Irigasi	2021	178.350.000,00	Hibah	B.31.593/51390/UK/DIKPORA	06-Jul-21	Ds.Sading,Kc.Mengwi,Kab.Badung	2.050	Hak Pakai	No. 8	26/01/2011	Pencak Silat Bhakti Negara	Dinas Pendidikan
131	Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Aspal	1954	165.800.000,00	Hibah	B.31.593/49024/UK/DIKPORA	06-Jul-21	Kelurahan kerobokan Kaca, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung	400	Hak Pakai	47/HP/BP N-51.03/2020		Pencak Silat Kertha Wisesa	Dinas Pendidikan
			24.699.370.359,54										

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gedung

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	2.085.624.000,00	Hibah	B.18.028/4676/UMUM.KEPEG/DISKES	02-Aug-22	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar					PMI Canter	Dinas Kesehatan
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	441.411.000,00	Hibah	B.18.028/4676/UMUM.KEPEG/DISKES	02-Aug-22	Jalan Trengguli Kelurahan Penatih Denpasar					PMI Canter	Dinas Kesehatan
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	167.049.200,00	Hibah	B.13.028/4716/PBMD.BPKAD	23-Nov-23	JL. HAYAM WURUK NO. 151 DPS					Komite Nasional Pemuda Indonesia	Dinas Pendidikan
4	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2010	734.712.000,00	Pembelian	027/39856/UK/Disikpora	29-Jun-23	Desa Marga, Tabanan					Kwartir Daerah	Dinas Pendidikan
5	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	2012	2.320.020.750,00	Pembelian	B.29.028/8858/SEKRET/PUPRKM	02-Aug-23	Padepokan Perisai Diri Bali di Denpasar					Pencak Silat Perisai Diri	Dinas Pendidikan
			5.748.816.950,00										

Peralatan dan Mesin

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	Hak Tanah	SHP No.	Tanggal Sertifikat	Penyewa/Pemimjam	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Station Wagon	2013	150.000.000,00	Hibah	B.31.020/15854/UK/DIKPORA	10-Feb-22	-					Kwartir Daerah	Dinas Pendidikan
2	Mini Bus	2008	193.616.000,00	Pembelian	B.31.020/15854/UK/DIKPORA	10-Feb-22	-					Kwartir Daerah	Dinas Pendidikan
3	Sepeda Motor	2013	15.656.800,00	Hibah	B.31.020/15854/UK/DIKPORA	10-Feb-22	-					Kwartir Daerah	Dinas Pendidikan
			359.272.800,00										

2

**Rincian Aset Pinjam Pakai
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022					
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompatibel	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompatibel nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku			
																		Nilai	Nilai	nilai
Jumlah Aset di Pinjam Pakai																				
Jumlah Aset Tetap Tanah di Pinjam Pakai																				
							554.981,00			50.979.467.145,00			50.979.467.145,00	33.755.934.650,00	36.260.405.345,00		48.474.996.450,00	(6.347.890.049,00)	62.631.753.081,00	
1	01.01.03.09.005	000001	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	22.04.01.08.3.00001	Buleleng/Gerokgak/D s. Musi	Pinjam Pakai Dengan BPP Kementerian PUPR No. 593/G209/UPTD.PBMD Tanggal 19 Nopember 2019	28.900,00	Kementerian PUPR	1.028.117.500,00			1.028.117.500,00	33.755.934.650,00	36.260.405.345,00		1.028.117.500,00			48.474.996.450,00	
2	01.01.02.02.001	000973	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00011	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	11.620,00	Pemkab Jembrana	162.680.000,00			162.680.000,00				162.680.000,00				
3	01.01.02.02.001	000974	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00012	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.790,00	Pemkab Jembrana	81.060.000,00			81.060.000,00				81.060.000,00				
4	01.01.02.02.001	000975	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00013	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.080,00	Pemkab Jembrana	71.120.000,00			71.120.000,00				71.120.000,00				
5	01.01.02.02.001	000976	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00014	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.600,00	Pemkab Jembrana	78.400.000,00			78.400.000,00				78.400.000,00				
6	01.01.02.02.001	000977	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00015	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.050,00	Pemkab Jembrana	70.700.000,00			70.700.000,00				70.700.000,00				
7	01.01.02.02.001	000978	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00016	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	7.200,00	Pemkab Jembrana	100.800.000,00			100.800.000,00				100.800.000,00				
8	01.01.02.02.001	000979	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00017	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.150,00	Pemkab Jembrana	72.100.000,00			72.100.000,00				72.100.000,00				
9	01.01.02.02.001	000980	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00018	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	5.000,00	Pemkab Jembrana	70.000.000,00			70.000.000,00				70.000.000,00				
10	01.01.02.02.001	000982	Tanah Tegalan	22.01.02.21.4.00020	Jembrana/Negara/Ds. Sangkaragung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	8.640,00	Pemkab Jembrana	120.960.000,00			120.960.000,00				120.960.000,00				
11	01.01.01.02.003	000041	Tanah Bangunan Gudang	22.03.08.06.4.00083	Badung/Kuta Utara/Desa Tibubeneng	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. 593/4789/UPT.P2.BPKAD tanggal 10 Nopember 2018 (Kantor UPT Aboretum Pusat Pembibitan Tanaman Perhutanan & Perkeunanan dan Pos Pemadam Kebakaran)	3.900,00	Pemkab Badung	25.970.100.000,00			25.970.100.000,00		25.970.100.000,00		0,00				
12	01.01.02.02.001	000432	Tanah Tegalan	22.03.07.05.4.00010	Badung/Petang/Ds. Pangsari	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. 593/3781/UPT.P2.BPKAD tanggal 2 Juli 2018	2.020,00	Pemkab Badung	19.190.000,00			19.190.000,00				19.190.000,00				
13	01.01.02.01.005	001390	Tanah Sawah Irigasi	22.03.06.04.4.00030	Subak Blahkiuh/B. Blahkiuh/Kec. Abiansem al/Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. 593/3781/UPT.P2.BPKAD tanggal 2 Juli 2018	14.340,00	Pemkab Badung	125.475.000,00			125.475.000,00				125.475.000,00				
14	01.01.02.02.001	001081	Tanah Tegalan	22.08.02.04.4.00062	Karangasem/Manggis/Ds. Antiga Klod	Perjanjian pinjam pakai dengan Pemkab Karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	1.410,00	Pemkab Karangasem	4.935.000,00			4.935.000,00				4.935.000,00				
15	01.01.02.02.001	001082	Tanah Tegalan	22.08.02.04.4.00066	Karangasem/Manggis/Ds. Antiga Klod	Perjanjian pinjam pakai dengan Pemkab Karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	4.920,00	Pemkab Karangasem	17.220.000,00			17.220.000,00				17.220.000,00				
16	01.01.02.02.001	001189	Tanah Tegalan	22.08.03.05.4.00013	Karangasem/Rendang/Ds. Nongan	Perjanjian pinjam pakai dengan Pemkab Karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	3.440,00	Pemkab Karangasem	8.428.000,00			8.428.000,00				8.428.000,00				
17	01.01.01.04.003	000016	Tanah Bangunan Rumah Sakit	shp 229	Jln. Singaraja Karangasem/Ds. Kubu ,Kec.Kubu,Kab.Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan Pemkab Karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	880,00	Pemkab Karangasem	12.320.000,00			12.320.000,00				12.320.000,00				

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompartibel nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
18	01.01.01.02.003	000039	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.05.4.00109	Jl. Kapten Tjok Agung Tresna No. 8 Dps.	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019	1.209,00	KPU Provinsi Bali	1.354.080.000,00				1.354.080.000,00					
19	01.01.01.02.003	000040	Tanah Bangunan Gudang	22.09.02.09.4.00046	Jl. Kapten Tjok Agung Tresna, No. 8 Dps.	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019	1.325,00	KPU Provinsi Bali	1.484.000.000,00				1.484.000.000,00					
20	01.01.01.04.001	000085	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.03.04.4.00077	Des.Sesetan,Kec.Den sel,Kota Dps	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Universitas Terbuka No. B.13.593/1878/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 26 Juli 2021	1.975,00	Universitas Terbuka	1.060.575.000,00				1.060.575.000,00					
21	01.01.02.02.001	001257	Tanah Tegalan	22.08.07.01.4.00021	Karangasem/AbangD s. Tista	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor: 593/1039/UPTD.PBMD tanggal 6 Mei 2019	2.870,00	Pemkab Karangasem	10.045.000,00				10.045.000,00					
22	01.01.02.02.001	001256	Tanah Tegalan	22.08.07.01.4.00020	Karangasem/AbangD s. Tista	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor: 593/1038/UPTD.PBMD tanggal 6 Mei 2019 dan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor: 593/610/UPTD.PBMD tanggal 24 Februari 2020	3.620,00	Pemkab Karangasem	12.670.000,00				12.670.000,00					
23	01.01.02.02.001	001258	Tanah Tegalan	22.08.07.01.4.00022	Karangasem/AbangD s. Tista	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor: 593/610/UPTD.PBMD tanggal 24 Februari 2020	4.050,00	Pemkab Karangasem	14.175.000,00				14.175.000,00					
24	01.01.02.02.001	000043	Tanah Tegalan	22.03.05.02.4.00026	Badung/Mengwi/Ds. Baha	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor : 593/2718/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019	3.480,00	Pemkab Badung	36.801.000,00				36.801.000,00					
25	01.01.02.02.001	000044	Tanah Tegalan	22.03.05.02.4.00027	Badung/Mengwi/Ds. Baha	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor : 593/2718/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019	3.330,00	Pemkab Badung	35.214.750,00				35.214.750,00					
26	01.01.02.02.001	000045	Tanah Tegalan	22.03.05.02.4.00028	Badung/Mengwi/Ds. Baha	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor : 593/2718/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019	1.330,00	Pemkab Badung	14.064.750,00				14.064.750,00					
27	01.01.02.01.005	000111	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00007	Badung/Mengwi/Ds. Cemagi	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.935,00	Pemkab Badung	161.717.625,00				161.717.625,00					
28	01.01.02.01.005	000115	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00011	Badung/Mengwi/Ds. Cemagi	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.115,00	Pemkab Badung	93.186.125,00				93.186.125,00					
29	01.01.02.01.005	000119	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00015	Badung/Mengwi/Ds. Cemagi	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.035,00	Pemkab Badung	86.500.125,00				86.500.125,00					
30	01.01.02.01.005	001333	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.10.4.00053	Subak.Cemagi/Ds.Ce magi/Kec.Mengwi/Ba dung	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.640,00	Pemkab Badung	137.063.000,00				137.063.000,00					
31	01.01.02.01.005	001334	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00052	Subak.Cemagi/Br.Ce magi/Kec.Mengwi/Ba dung	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.050,00	Pemkab Badung	87.753.750,00				87.753.750,00					
32	01.01.02.01.005	001805	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.19.4.00078	Badung/Kuta Utara/Desa Cemagi	Perubahan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. B.13.032/892/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 31 Maret 2022	1.415,00	Pemkab Badung	179.874.800,00				179.874.800,00					
33	01.01.02.02.001	001481	Tanah Tegalan	22.06.01.05.4.00046	Klungkung/Klungkung I/Ds. Akah	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor: 593/1536/UPTD.PBMD tanggal 8 Juli 2019	2.376,00	Pemkab Klungkung	87.912.000,00				87.912.000,00					
34	01.01.02.01.005	000519	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.09.4.00042	Klungkung/Banjarang kan/Ds. Tusan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	1.005,00	Pemkab Klungkung	29.145.000,00				29.145.000,00					
35	01.01.02.01.005	000520	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.09.4.00043	Klungkung/Banjarang kan/Ds. Tusan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	3.265,00	Pemkab Klungkung	94.685.000,00				94.685.000,00					

1

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SH/	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompartibel nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
36	01.01.02.01.005	000521	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.09.4.00044	Klungkung/Banjarang kan/Ds. Tusan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	1.840,00	Pemkab Klungkung	53.360.000,00				53.360.000,00					
37	01.01.02.01.005	000491	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.09.4.00014	Klungkung/Banjarang kan/Ds. Tusan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	2.420,00	Pemkab Klungkung	70.180.000,00				70.180.000,00					
38	01.01.01.02.003	000034	Tanah Bangunan Gudang	16	Desa Bebalang, Kab. Bangli	Perpanjangan I Perjanjian Pinjam Pakai dengan dengan Kodim 1626/Bangli No. B. 13.032/714/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Maret 2022	500,00	Kodim 1626/Bangli	13.500.000,00				13.500.000,00					
39	01.01.02.01.005	001568	Tanah Sawah Irigasi	22.01.03.11.4.00024	Jembrana/Mendoyo/D s. Yeh Embang Kangin	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B. 13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	10.300,00	Pemkab Jembrana	448.050.000,00				448.050.000,00					
40	01.01.02.01.005	001572	Tanah Sawah Irigasi	22.01.03.11.4.00023	Jembrana/Mendoyo/D s. Yeh Embang Kangin	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B. 13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	17.800,00	Pemkab Jembrana	774.300.000,00				774.300.000,00					
41	01.01.02.03.002	000002	Tanah Kebun Induk	shp 4	Kec.Melaya,Ds. Melaya ,Kab Jembrana	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B. 13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	13.090,00	Pemkab Jembrana	353.430.000,00				353.430.000,00					
42	01.01.02.03.002	000003	Tanah Kebun Induk	shp 3	Kec.Melaya,Ds. Melaya ,Kab Jembrana	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Jembrana No. B. 13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 19 Januari 2022	46.270,00	Pemkab Jembrana	1.249.290.000,00				1.249.290.000,00					
43	01.01.01.04.001	000082	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.04.11.4.00056	Des.Dangin Puri Kangin,Kec.Dps.Utara,Kota Dps	Perjanjian Pinjam Pakai dengan BNN Kota Denpasar No. B. 13.539/3893/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Januari 2022	1.160,00	BNN Kota Denpasar	930.320.000,00				930.320.000,00					
44	01.01.02.01.005	001199	Tanah Sawah Irigasi	22.03.05.18.4.00039	Ds.Pererenan,Kc.Me ngwi,Kab.Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor : 593.1659/UPTD.PBMD Tanggal 21 Maret 2019	2.430,00	Pemkab Badung	89.910.000,00				89.910.000,00					
45	01.01.02.01.005	001601	Tanah Sawah Irigasi	22.06.04.13.4.00043	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	2.860,00	Pemkab Klungkung	20.020.000,00				20.020.000,00					
46	01.01.02.02.001	001776	Tanah Tegalan	22.06.04.13.4.00015	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	2.800,00	Pemkab Klungkung	19.600.000,00				19.600.000,00					
47	01.01.02.02.001	001777	Tanah Tegalan	22.06.04.13.4.00016	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	3.100,00	Pemkab Klungkung	21.700.000,00				21.700.000,00					
48	01.01.02.02.001	001778	Tanah Tegalan	22.06.04.13.4.00017	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	2.650,00	Pemkab Klungkung	18.550.000,00				18.550.000,00					
49	01.01.02.02.001	001779	Tanah Tegalan	22.06.04.13.4.00018	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/613/UPTD.PBMD tanggal 24 Pebruari 2020	3.000,00	Pemkab Klungkung	21.000.000,00				21.000.000,00					
50	01.01.02.05.005	000001	Tanah Tandus lainnya	22.06.04.4.00044	Klungkung/Nusa Penida/Ds. Ped	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor. B. 13.593/1975/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 10 Agustus 2021	16.865,00	Pemkab Klungkung	751.757.375,00				751.757.375,00					
51	01.01.01.04.001	000251	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Belum Sertifikat	Jalan Melati Nomor 18 Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar No. B. 13.032/3835/UPTD.PBMD BPKAD tanggal 15 November 2022	1.108,00	Bawaslu Kota Denpasar	2.606.016.000,00				2.606.016.000,00					
52	01.01.02.02.001	000695	Tanah Tegalan	22.05.01.15.4.00015	Gianyar/Gianyar/Ds. Temesi	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Gianyar Nomor : B. 13.593/1646/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 25-06-2021	1.940,00	Pemkab Gianyar	255.110.000,00				255.110.000,00					
53	01.01.01.04.001	000018	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.02.08.02.4.00014	Tabanan/Tabanan/Ds ,Bongan	Pinjam Pakai dengan Kepolisian RI No. B. 13.032/3010/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 18 Oktober 2023	7.250,00	Kepolisian RI	315.375.000,00			315.375.000,00	315.375.000,00					
54	01.01.02.01.005	001787	Tanah Sawah Irigasi	Belum Sertifikat	Badung/Kuta Utara/Ds. Cangu	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Konaksi Tambah Catah EAST No. 593/1904/BPKAD/Selida Tahun 2019	6.591,00	Pemkab Badung	1.815.820.500,00			1.815.820.500,00	1.815.820.500,00			0,00		

4

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel	Harga Perolehan	Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompartibel nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
55	01.01.02.01.005	001789	Tanah Sawah Irigasi	Belum Sertifikat	Badung/Kuta Utara/Ds. Cangu	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Selda Tahun 2019	500,00	Pemkab Badung	137.750.000,00			137.750.000,00			0,00			
56	01.01.02.01.005	001783	Tanah Sawah Irigasi	Belum Sertifikat	Badung/Mengwi/Ds. Kapal	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Selda Tahun 2019	2.250,00	Pemkab Badung	159.750.000,00			159.750.000,00			0,00			
57	01.01.02.01.005	001786	Tanah Sawah Irigasi	Belum Sertifikat	Badung/Mengwi/Ds. Kapal	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Selda Tahun 2019	1.000,00	Pemkab Badung	71.000.000,00			71.000.000,00			0,00			
58	01.01.02.01.005	001792	Tanah Sawah Irigasi	Persil 51	Badung/Mengwi/Kel. Sading	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Selda Tahun 2019 dan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Badung No. 028/12/2/PPA.Aset tanggal 17 Mei 2017	3.550,00	Pemkab Badung	308.850.000,00			308.850.000,00			0,00			
59	01.01.02.01.005	001794	Tanah Sawah Irigasi	Belum Sertifikat	Badung/Mengwi/Ds. Gulingan	Pinjam Pakai dengan Kabupaten, Koreksi Tambah Catat BAST No. 593/1904/BPKAD/Selda Tahun 2019	375,00	Pemkab Badung	5.090.625,00			5.090.625,00			0,00			
60	01.01.02.02.001	001814	Tanah Tegalan	22.09.01.11.4.00031	Denpasar/Denpasar Barat/Ds. Padangsambian Klod Subak Tegai Lantang	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kota Denpasar No. 028/1065/UPT.P2.BPKAD tanggal 5 Maret 2016	1.965,00	Pemkot Denpasar	392.017.500,00			392.017.500,00			0,00			
61	01.01.02.02.001	001843	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00056	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kelod	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. 028/4095/PPA.Aset Tanggal 22 Agustus 2017	1.040,00	Pemkot Denpasar	1.164.800.000,00			1.164.800.000,00			0,00			
62	01.01.02.02.002	000005	Tanah Kocong Yang Sudah Diperuntukkan	HP 8	Kab. Gianyar, Kec. Blahbatuh Ds Bedulu (Sebelah Pura Samuan Tiga)	PP 028/11265/PPA.Aset tgl 28-12-2015 utk Plut Kopras, Perjanjian Pinjam Pakai dgn pemkab Gianyar no 028/3665/PPA.Aset Tgl. 19 -9-2016 dan PPP No B.13.593/2045/UPTD.PBMD/BPKAD Tgl 31-08-2021(Pekams200m2, Knt Perbekel 200m2, TPS2500m2 & Gd PLUT1500m2)	5.470,00	Pemkab Gianyar	853.320.000,00			853.320.000,00			0,00			
63	01.01.02.02.001	001605	Tanah Tegalan	22.06.02.07.4.00017	Klungkung/Dawan/Ds . Kusamba	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/4114/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018	7.980,00	Pemkab Klungkung	211.470.000,00			211.470.000,00			0,00			
64	01.01.02.02.001	001606	Tanah Tegalan	22.06.02.07.4.00018	Klungkung/Dawan/Ds . Kusamba	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/4114/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018	520,00	Pemkab Klungkung	13.780.000,00			13.780.000,00			0,00			
65	01.01.02.02.001	001607	Tanah Tegalan	22.06.02.07.4.00019	Klungkung/Dawan/Ds . Kusamba	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/4114/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018	5.600,00	Pemkab Klungkung	148.400.000,00			148.400.000,00			0,00			
66	01.01.02.02.001	001608	Tanah Tegalan	22.06.02.07.4.00020	Klungkung/Dawan/Ds . Kusamba	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/4114/UPT.P2.BPKAD tanggal 17 September 2018	5.665,00	Pemkab Klungkung	150.122.500,00			150.122.500,00			0,00			
67	01.01.02.02.001	001620	Tanah Tegalan	22.06.02.07.4.00033	Klungkung/Dawan/Ds . Kusamba	Pinjam Pakai No. 028/11269/PPA.Aset tanggal 28 Desember 2016 Digunakan untuk Balai Benih Utama (BBU)	5.000,00	Pemkab Klungkung	132.500.000,00			132.500.000,00			0,00			
68	01.01.02.02.001	001621	Tanah Tegalan	22.06.02.07.4.00034	Klungkung/Dawan/Ds . Kusamba	Pinjam Pakai No. 028/11269/PPA.Aset tanggal 28 Desember 2016 Digunakan untuk Balai Benih Utama (BBU)	4.000,00	Pemkab Klungkung	106.000.000,00			106.000.000,00			0,00			
69	01.01.02.01.005	000482	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00083	Klungkung/Banjarang kan/Ds. Takmung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung No. 028/4838/PPA.Aset Tanggal 30 Nopember 2016	1.635,00	Pemkab Klungkung	75.210.000,00			75.210.000,00			0,00			
70	01.01.02.01.005	000483	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.06.4.00084	Klungkung/Banjarang kan/Ds. Takmung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung No. 028/4838/PPA.Aset Tanggal 30 Nopember 2016	883,00	Pemkab Klungkung	40.618.000,00			40.618.000,00			0,00			

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompetibel nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
71	01.01.02.01.005	000689	Tanah Sawah Irigasi	22.06.03.03.4.00044	Klungkung/Banjarang kan.Ds. Aan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Klungkung Nomor 593/3709/UPT.P2.BPKAD tanggal 26 Juni 2018(Perluasan Pura Dalam Prajapati Desa Pakraman Sengkidung)	1.840,00	Pemkab Klungkung	27.600.000,00			27.600.000,00			27.600.000,00			
72	01.01.02.02.001	001156	Tanah Tegalan	22.08.03.03.4.00015	Karangasem/RendangDs. Rendang	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor 593/1552/UPT.P2.BPKAD tanggal 20 Maret 2018	1.485,00	Pemkab Karangasem	3.638.250,00			3.638.250,00			3.638.250,00			
73	01.01.02.02.001	001172	Tanah Tegalan	22.08.03.03.4.00031	Karangasem/RendangDs. Rendang	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 27 Februari 2023	5.300,00	Pemkab Karangasem	12.985.000,00			12.985.000,00	12.985.000,00		12.985.000,00			
74	01.01.01.04.001	000001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.08.04.01.4.00010	Karangasem/SelatDs. Selat	Pinjam Pakai No. 028/7208/PPA.Aset 25 Deseber 2014 Di Gunakan Untuk Kantor Kepala Desa	550,00	Pemkab Karangasem	935.000,00			935.000,00			935.000,00			
75	01.01.01.04.001	000003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.08.04.04.4.00003	Karangasem/SelatDs. Duda Timur	Pinjam Pakai No. 028/7208/PPA.Aset 25 Deseber 2014 Di Gunakan Untuk Kantor Kepala Desa	590,00	Pemkab Karangasem	5.900.000,00			5.900.000,00			5.900.000,00			
76	01.01.02.02.001	002139	Tanah Tegalan	22.05.01.15.4.00014	Desa Temesi, Kec. Gianyar, Gianyar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Gianyar Nomor : B.13.593/1646/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 25-06-2021	1.500,00	Pemkab Gianyar	197.250.000,00			197.250.000,00			197.250.000,00			
77	01.01.02.02.001	002140	Tanah Tegalan	22.05.01.15.4.00016	Desa Temesi, Kec. Gianyar, Gianyar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Gianyar Nomor : B.13.593/1646/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 25-06-2021	400,00	Pemkab Gianyar	52.600.000,00			52.600.000,00			52.600.000,00			
78	01.01.01.01.005	000021	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Arama	25	Badung/KutaDs. KutaJln. Raya Kuta No.104 Tuban	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor : B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 29 November 2021	2.500,00	BPK RI	1.616.718.000,00			1.616.718.000,00			1.616.718.000,00			
79	01.01.02.01.005	000866	Tanah Sawah Irigasi	22.02.04.02.4.00007	Tabanan/MargalDs.B eringkit	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Tabanan Nomor: 593/601/UPT.P2.BPKAD tanggal 12 Pebruari 2018	700,00	Pemkab Tabanan	39.200.000,00			39.200.000,00			39.200.000,00			
80	01.01.02.01.005	000771	Tanah Sawah Irigasi	22.09.03.09.4.00047	Jl. Mertasari Sidakarya Denpasar/Denpasar selatanDs. Sidakarya	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kota Denpasar, Nomor: 593.1/56/UPT.P2.BPKAD, Tanggal 10 Januari 2019	370,00	Pemkot Denpasar	247.530.000,00			247.530.000,00			247.530.000,00			
81	01.01.02.02.001	001845	Tanah Tegalan	22.09.02.09.4.00058	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Sumerta Kelod	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar Nomor 593.1/1026/UPTD.PBMD tanggal 5 Juni 2020	1.100,00	Pemkot Denpasar	1.232.000.000,00			1.232.000.000,00			1.232.000.000,00			
82	01.01.01.04.001	000096	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.09.02.04.4.00037	Denpasar/Denpasar Timur/Ds. Dangin Puri Kangin/Uln. KambaJa Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan BNN Prov. Bali No. B.13.032/702/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 Maret 2022	1.487,00	BNN Provinsi Bali	10.011.970,00			10.011.970,00			10.011.970,00			
83	01.01.02.02.001	001193	Tanah Tegalan	22.08.03.05.4.00017	Karangasem/RendangDs. Nongan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkab Karangasem Nomor 593/1552/UPT.P2.BPKAD tanggal 20 Maret 2018	15.440,00	Pemkab Karangasem	37.828.000,00			37.828.000,00			37.828.000,00			
84	01.01.02.02.001	002125	Tanah Tegalan	22.09.01.11.4.00016	Denpasar/Denpasar Barat/Ds. Padangsambian Klod	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kota Denpasar No. 028/1065/UPT.P2.BPKAD tanggal 5 Maret 2018	3.530,00	Pemkot Denpasar	704.235.000,00			704.235.000,00			704.235.000,00			
85	01.01.01.04.003	000033	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Belum Sertifikat	Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansamal, Kabupaten Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor 593.1/132/UPT.P2.BPKAD, Tanggal 14 Januari 2019	11.800,00	Pemkab Badung				3.540.000.000,00			3.540.000.000,00			
86	01.01.02.02.001	002198	Tanah Tegalan	Persil 13	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	12.400,00	Pemkab Klungkung				6.981.200.000,00			6.981.200.000,00			
87	01.01.02.02.001	002199	Tanah Tegalan	Sdj 15	Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Nomor : 593/1536/UPTD.PBMD, Tanggal 8 Juli 2019	15.000,00	Pemkab Klungkung				720.000.000,00			720.000.000,00			
88	01.01.02.02.001	002084	Tanah Tegalan	22.03.07.02.4.00003	Badung/PetanglDs.P elaga	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	8.275,00	Pemkab Badung				55.856.250,00			55.856.250,00			

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022						
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel	Penambahan	Pengurangan	Ekstra Kompartibel	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku				
																		Nilai	Nilai	nilai	
89	01.01.02.02.001	002101	Tanah Tegalan	22.03.05.07.4.00093	Ds.Sembung/Kec.Mengwi/Kab.Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	15.000,00	Pemkab Badung				158.625.000,00				158.625.000,00					
90	01.01.02.02.001	000133	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00022	Badung/Mengwi/Ds. Sobangan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	2.206,00	Pemkab Badung				18.916.450,00				18.916.450,00					
91	01.01.02.02.001	000137	Tanah Tegalan	22.03.05.13.5.00026	Badung/Mengwi/Ds. Sobangan	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	2.846,00	Pemkab Badung				24.404.450,00				24.404.450,00					
92	01.01.01.04.001	000266	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SHP 376	Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Nomor B.13/032/3502/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 21 Oktober 2022	1.050,00	Pemkab Badung				5.906.250.000,00				5.906.250.000,00					
93	01.01.01.04.001	000159	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	shp 4	Kec.Mendoyo/Ds. Poh Santen, Kab Jembrana	Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Nomor : B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 19/01/2022	10.735,00	Pemkab Jembrana				53.675.000,00				53.675.000,00					
94	01.01.02.02.001	001018	Tanah Tegalan	22.01.03.11.4.00013	Jembrana/Mendoyo/Ds. Yehembang Kangin	Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Nomor : B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 19/01/2022	4.400,00	Pemkab Jembrana				44.000.000,00				44.000.000,00					
95	01.01.02.03.002	000008	Tanah Kebun Induk	2	Jembrana/Melaya/Ds. nusasari	Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Nomor : B.13.593/122/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 19/01/2022	42.980,00	Pemkab Jembrana				601.720.000,00				601.720.000,00					
96	01.01.01.04.001	000131	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	shp 15	Jin. Amiapura,Ulakan,Manngis,Kab.Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	500,00	Pemkab Karangasem				7.000.000,00				7.000.000,00					
97	01.01.02.01.005	001757	Tanah Sawah Irigasi	Belum Sertifikat	desa menanga kecamatan rendang kabupaten karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	600,00	Pemkab Karangasem				1.020.000,00				1.020.000,00					
98	01.01.02.02.001	001194	Tanah Tegalan	22.08.03.02.4.00010	Karangasem/Rendang/Ds. Pempatan	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	250,00	Pemkab Karangasem				425.000,00				425.000,00					
99	01.01.01.04.001	000209	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	24	Karangasem/Karangasem/Kel. Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	1.000,00	Pemkab Karangasem				48.710.000,00				48.710.000,00					
100	01.01.01.04.001	000127	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.08.01.01.4.00186	Jin. Bayangkara,RT. Bayangkara,Kab.Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	4.420,00	Pemkab Karangasem				212.160.000,00				212.160.000,00					
101	01.01.01.04.001	000203	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22.08.07.02.4.00018	Karangasem/Abang/Ds. Abang	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	1.430,00	Pemkab Karangasem				18.000.000,00				18.000.000,00					
102	01.01.01.04.001	000132	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	shp 4	Ds.Amed,Purwekerti, Abang,Culik,Kab.Karangasem	Perjanjian pinjam pakai dengan pemkab karangasem No. B.13.032/552/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 27 Februari 2023	1.110,00	Pemkab Karangasem				3.885.000,00				3.885.000,00					
103	01.01.03.01.025	000017	Tanah Lapangan Lainnya	Belum Sertifikat	Denpasar/Denpasar Barat/Kel. Tegai Kertha	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemkot Denpasar No. B.13.032/463/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 17 Februari 2023	30.000,00	Pemkot Denpasar				13.920.000.000,00				13.920.000.000,00					
104	01.01.02.02.001	001541	Tanah Tegalan	22.06.01.16.4.00006	Klungkung/Klungkung/Ds. Tangkas	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kepolisan Negara Republik Indonesia Resor Klungkung Nomor B.13.032/1518/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 05-06-2023	1.715,00	Kepolisan Negara Republik Indonesia				31.727.500,00				31.727.500,00					
105	01.01.02.02.001	000016	Tanah Tegalan	22.03.09.01.4.00047	Badung/Kuta Selatan/Ds. Jimbaran	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : B.13.032/1756/UPTD.PBMD/BPKAD, Tanggal 22 Juni 2023	1.500,00	Kementertian Hukum dan HAM				1.080.000.000,00				1.080.000.000,00					
Jumlah Aset Tetap Gedung di Pinjam Pakai							994,00					23.762.057.443,00	(6.198.651.964,60)	6.505.648,00	23.762.057.443,00	1.393.308.000,00	7.437.256.940,00	- 6.505.648,00	17.718.108.503,00	- 6.163.277.681,00	12.564.830.822,00

1

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompartibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompartibel nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	03.01.01.18.001	000001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	1075	Kementerian Perhubungan	5.244.862.000,00	(1.197.576.823)		5.244.862.000,00				5.244.862.000,00	(1.197.576.823)	4.047.285.177
2	03.01.01.18.001	000002	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	908,14	Kementerian Perhubungan	2.063.548.430,00	(429.905.921)		2.063.548.430,00				2.063.548.430,00	(429.905.921)	1.633.642.509
3	03.01.01.18.001	000003	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	152,46	Kementerian Perhubungan	545.136.000,00	(113.570.000)		545.136.000,00				545.136.000,00	(113.570.000)	431.566.000
4	03.01.01.18.001	000004	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	476,58	Kementerian Perhubungan	2.443.956.000,00	(509.157.500)		2.443.956.000,00				2.443.956.000,00	(509.157.500)	1.934.798.500
5	03.01.01.18.001	000005	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	6,3	Kementerian Perhubungan	155.810.000,00	(32.460.417)		155.810.000,00				155.810.000,00	(32.460.417)	123.349.583
6	03.01.01.18.001	000006	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	50,2	Kementerian Perhubungan	366.198.673,00	(76.291.392)		366.198.673,00				366.198.673,00	(76.291.392)	289.907.281
7	03.01.01.18.001	000007	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	50,81	Kementerian Perhubungan	226.109.000,00	(47.106.042)		226.109.000,00				226.109.000,00	(47.106.042)	179.002.958
8	03.01.01.18.001	000008	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	259,62	Kementerian Perhubungan	1.730.746.000,00	(360.572.083)		1.730.746.000,00				1.730.746.000,00	(360.572.083)	1.370.173.917
9	03.01.01.18.001	000009	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	56	Kementerian Perhubungan	174.563.000,00	(36.367.292)		174.563.000,00				174.563.000,00	(36.367.292)	138.195.708
10	03.01.01.18.001	000010	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018		Kementerian Perhubungan	518.215.000,00	(84.641.783)		518.215.000,00				518.215.000,00	(84.641.783)	433.573.217
11	03.01.01.18.001	000011	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018	10952	Kementerian Perhubungan	1.432.147.500,00	(274.494.938)		1.432.147.500,00				1.432.147.500,00	(274.494.938)	1.157.652.562
12	03.01.01.18.001	000012	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B andara Permanen		Tanah Ampo Karangasem	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.593/003/UPT.P2.BPKAD Tanggal 2 Januari 2018		Kementerian Perhubungan	143.174.900,00	(27.441.856)		143.174.900,00				143.174.900,00	(27.441.856)	115.733.044
13	03.01.01.01.001	000035	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Kapten Cok. Agung Tresna No. 8 Dps.	Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019 penggunaan Kantor KPU Provinsi Bali	600	KPU Provinsi Bali	320.867.000,00	(176.476.850)		320.867.000,00				320.867.000,00	(176.476.850)	144.390.150
14	03.01.01.01.001	000036	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Kapten Cok. Agung Tresna No. 8 Dps.	Nomor : 593/2782/UPTD.PBMD Tanggal 21 Oktober 2019 penggunaan Kantor KPU Provinsi Bali	600	KPU Provinsi Bali	320.867.000,00	(176.476.850)		320.867.000,00				320.867.000,00	(176.476.850)	144.390.150
15	03.01.01.01.001	000051	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Melati No. 21 Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai dengan BNN Kota Denpasar No. B.13.593/3893/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 Januari 2022	330	BNN Kota Denpasar	226.600.000,00	(106.502.000)		226.600.000,00				226.600.000,00	(106.502.000)	120.098.000
16	03.01.01.01.001	000055	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Melati 18 Dps	Perjanjian Pinjam Pakai dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar No. B.13.032/3835/UPTD.PBMD.BPKAD tanggal 15 November 2022	630	Bawaslu Kota Denpasar	412.000.000,00	(180.593.334)		412.000.000,00				412.000.000,00	(180.593.334)	231.406.666
17	03.01.01.01.001	000047	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Raya Kuta No.104 Tuban Badung	No.B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BPK AD, 29 Nopember 2021	70	BPK RI	182.200.000,00	(139.079.333)		182.200.000,00	182.200.000,00			-	-	-
18	03.01.01.01.001	000048	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Raya Kuta No.104 Tuban Badung	No.B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BPK AD, 29 Nopember 2021	70	BPK RI	182.200.000,00	(139.079.333)		182.200.000,00	182.200.000,00			-	-	-
19	03.01.01.01.001	000049	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Raya Kuta No.104 Tuban	No.B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BPK AD, 29 Nopember 2021	70	BPK RI	182.200.000,00	(139.079.333)		182.200.000,00	182.200.000,00			-	-	-

No.	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Jenis Aset Tetap	Dok. Kepemilikan/SHP	Lokasi Aset Tetap	Nomor/tgl perjanjian	Luas (M2)	Peminjam	Posisi Per 1 Januari 2022			Mutasi/Perubahan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2022			Posisi Per 31 Desember 2022			
									Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	ekstra kompetibel	Harga Perolehan	Penambahan Nilai	Pengurangan Nilai	Ekstra Kompetibel nilai	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
20	03.01.01.01.001	000056	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. Raya Kuta No.104 Tuban Badung	No.B.13.593/3653/UPTD.PBMD/BPKAD, 29 Nopember.2021	70	BPK RI	258.282.000,00	(197.155.260)		258.282.000,00			258.282.000,00	-	-	-
21	03.01.01.01.001	000081	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar(Jl Melati Denpasar)	Pinjam Pakai dengan Kemenhankam RI No. 593/4468/UPT.P.BPKAD tgl 3 Oktober 2017	656,00	Kemenhankam RI	5.888.788.460,00	(649.282.205)		5.888.788.460,00			5.888.788.460,00	-	-	-
22	03.01.01.01.001	000042	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl.Menuh No.06 Kreneng-Denpasar	NOMOR : 593 /920/ UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 30/03/2021 penggunaan Bangunan Kantor UPT. Tahura Ngurah Rai	338,00	Pemkot Denpasar	743.586.480,00	(105.341.420)		743.586.480,00			743.586.480,00	-	-	-
23	03.01.01.01.001	000016	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jln. Kamboja No.57 Denpasar	Perjanjian Pinjam Pakai Dengan BABINMINVETCADDAM IXUDAYANA NOMOR : B.13.032/3265/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 14 November 2023	380	BABINMINVET CADDAM IXUDAYANA				-	1.393.308.000,00		1.393.308.000,00		(1.323.642.600)	69.665.400
24	03.01.01.04.006	000001	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain		Rest Area Rambut Siwi/Kab.Jembrana	Bast.No.021.1/246/V/Dispar.Tgl.9-2-2011. Perjanjian Pinjam pakai dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor. 593.1/4415/UPT.P2.BPKAD Tanggal 27 Agustus 2018, untuk Pembangunan Anjungan Cerdas Tahun Perolehan 1998.	7.29	Kementerian PUPR			6.505.648,00			(6.505.648)				
Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Pinjam Pakai									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02.06.02.06.50.00	000048	Eskalator			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	410.750.000,00	410.750.000,00				410.750.000,00		410.750.000,00		75.269.808,00
2	02.06.02.06.50.00	000049	Eskalator			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	410.750.000,00	410.750.000,00				410.750.000,00		410.750.000,00		-
3	02.09.03.06.01.00	000001	Generator Set			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	148.885.327,00	73.615.519,00				148.885.327,00		73.615.519,00		75.269.808,00
Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Pinjam Pakai									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	04.03.06.01.002	00001	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	1.177.613.000,00	218.349.077,00				1.177.613.000,00		218.349.077,00		959.263.923,00
2	04.03.06.02.002	00001	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang			Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 593/003/UPT.P2.BPKAD & PJ.22 TH.2018		Kementerian Perhubungan	638.539.850,00	81.147.772,00				638.539.850,00		81.147.772,00		557.392.078,00

1

**Rincian Aset Tetap Tanah Yang Akan D hibahkan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	Jenis Barang (per Golongan)	Tahun/Perolehan	Harga Rp.	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Tanah (Desa/Kec./Kab.)	Luas M ²	SHP No.	Penggunaan Tanah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2003	8.024.800.000	B.13.028/9946/P.BMD/B PKAD	29/12/2023	Denpasar\Denpasar Timur\Ds. Sumerta Klod	7.165,00	No. 81/Kel.Sumerta Klod	Akan dihibahkan untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian PUPR Republik Indonesia
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2022	147.696.000	B.13.028/9946/P.BMD/B PKAD	29/12/2023	Klungkung\Klungkung\Kelurahan Semarapura Kangin	3.077,00	No. 53/Kel. Semarapura Kangin	Akan dihibahkan untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian PUPR Republik Indonesia
	Jumlah		8.172.496.000,00				10.242		

**Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Gedung dan Bangunan yang akan Dihilangkan
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
							Tahun	Bulan			
						179.070.603.999,00			78.720.403.329,00	100.350.200.670,00	
	Jumlah					178.583.075.999,00			78.604.522.838,00	99.978.553.161,00	
1	4.13.1.2.1	31	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Darmawangsa (Semarapura)	12	2000	257.400.000,00	0	0	257.400.000,00	0,00
2	4.13.1.2.1	32	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Jempiring (Semarapura)	12	2000	471.900.000,00	0	0	471.900.000,00	0,00
3	4.13.1.2.1	36	Jalan Propinsi Kelas I	Simp Mengwi-Blahkiuh	12	2000	11.932.362.000,00	0	0	11.932.362.000,00	0,00
4	4.13.1.2.1	59	Jalan Propinsi Kelas I	Jimbaran-Uluwatu	12	2000	1.796.342.000,00	0	0	1.796.342.000,00	0,00
5	4.13.1.2.1	62	Jalan Propinsi Kelas I	Jl Gunung Merapi (Semarapura)	12	2000	546.975.000,00	0	0	546.975.000,00	0,00
6	4.13.1.2.1	77	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Nusa Lembongan	12	2006	250.000.000,00	0	0	250.000.000,00	0,00
7	4.13.1.2.1	83	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan dan Jembatan Tangkup (lanjutan)	12	2007	2.678.357.000,00	0	0	2.678.357.000,00	0,00
8	4.13.1.2.1	84	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Menuju Pura Bisbis	12	2007	1.740.000.000,00	0	0	1.740.000.000,00	0,00
9	4.13.1.2.1	85	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Menuju Pura Taman sari/Toh Langkir	12	2007	2.980.000.000,00	0	0	2.980.000.000,00	0,00
10	4.13.1.2.1	86	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Pujungan	12	2007	749.999.000,00	0	0	749.999.000,00	0,00
11	4.13.1.2.1	89	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan Tampaksiring - Selat	12	2007	5.348.957.000,00	0	0	5.348.957.000,00	0,00
12	4.13.1.2.1	91	Jalan Propinsi Kelas I	Jln. Menuju SD No.8 Seraya , areal parkir Pura Bisbis	12	2007	119.652.000,00	0	0	119.652.000,00	0,00
13	4.13.1.2.1	92	Jalan Propinsi Kelas I	Dusun Kubukelod Desa Bungkulan	12	2007	308.104.000,00	0	0	308.104.000,00	0,00
14	4.13.1.2.1	103	Jalan Propinsi Kelas I	Kampus UNHI Denpasar	12	2008	56.746.000,00	0	0	56.746.000,00	0,00
15	4.13.1.2.1	110	Jalan Propinsi Kelas I	Jalan lintas Undisan-Pura Dalem Undisan di Kabupaten	12	2008	565.635.000,00	0	0	565.635.000,00	0,00
16	4.13.1.2.1	113	Jalan Propinsi Kelas I	Bangli	12	2009	213.552.454,00	0	11	193.976.813,00	19.575.641,00
17	4.13.1.2.1	123	Jalan Propinsi Kelas I		12	2011	1.873.803.000,00	2	11	1.327.277.125,00	546.525.875,00
18	4.13.1.2.8	2	Jalan Propinsi Lokal	Kampus Universitas Udayana Denpasar	12	2008	745.359.000,00	0	0	745.359.000,00	0,00
19	4.13.1.2.10	2	Jalan Propinsi Lain-lain	Buleleng	12	2009	49.515.000,00	0	11	44.976.125,00	4.538.875,00
20	4.13.1.2.11	1	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12	2006	920.000.000,00	0	0	920.000.000,00	0,00
21	4.13.1.2.11	3	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12	2007	56.032.000,00	0	0	56.032.000,00	0,00
22	4.13.1.2.11	4	Lampu Lalulintas dan Marka Jalan Provinsi	Tohpati - Kusamba	12	2007	932.500.000,00	0	0	932.500.000,00	0,00
23	4.13.1.3.6	1	Jalan Kabupaten Lokal	Jalan Arteri Sanglah-Sumuh	12	1995	583.718.000,00	0	0	583.718.000,00	0,00
24	4.13.1.3.6	3	Jalan Kabupaten Lokal	Bangli/Sidem Bunut	12	1997	94.887.000,00	0	0	94.887.000,00	0,00
25	4.13.1.3.6	4	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Pengaringan	12	1997	37.906.000,00	0	0	37.906.000,00	0,00
26	4.13.1.3.6	6	Jalan Kabupaten Lokal	Gianyar / Medahan	12	1997	28.400.000,00	0	0	28.400.000,00	0,00
27	4.13.1.3.6	7	Jalan Kabupaten Lokal	Klungkung/Banjarangkang	12	1997	94.880.000,00	0	0	94.880.000,00	0,00
28	4.13.1.3.6	8	Jalan Kabupaten Lokal	Tabanan Sungsang	12	1997	70.150.000,00	0	0	70.150.000,00	0,00
29	4.13.1.3.6	10	Jalan Kabupaten Lokal	Jembrana /Sidem Bunut	12	2000	117.660.000,00	0	0	117.660.000,00	0,00
30	4.13.1.3.6	11	Jalan Kabupaten Lokal	Jembrana /Tibu Beleng	12	2000	151.536.000,00	0	0	151.536.000,00	0,00
31	4.13.1.3.6	12	Jalan Kabupaten Lokal	Klungkung/ Aan Dangin	12	2000	67.000.000,00	0	0	67.000.000,00	0,00
32	4.13.1.3.6	14	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Busungbiu/tunju	12	2001	236.600.000,00	0	0	236.600.000,00	0,00
33	4.13.1.3.6	15	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Puluran&Badung Bulian	12	2001	187.230.000,00	0	0	187.230.000,00	0,00
34	4.13.1.3.6	16	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Sankan Gunung	12	2001	123.173.000,00	0	0	123.173.000,00	0,00
35	4.13.1.3.6	17	Jalan Kabupaten Lokal	Buleleng/Tirta Gangga	12	2001	117.625.000,00	0	0	117.625.000,00	0,00
36	4.13.1.3.6	18	Jalan Kabupaten Lokal	Sinagaraja	12	2001	88.000.000,00	0	0	88.000.000,00	0,00
37	4.13.1.3.6	19	Jalan Kabupaten Lokal	Belok-Sidan II	12	2002	14.111.300.000,00	0	0	14.111.300.000,00	0,00
38	4.13.1.3.6	22	Jalan Kabupaten Lokal	Kedungdung Menange	12	2002	1.592.019.000,00	0	0	1.592.019.000,00	0,00
39	4.13.1.3.6	24	Jalan Kabupaten Lokal	Lingkar Bukit (Badung)	12	2002	2.403.098.000,00	0	0	2.403.098.000,00	0,00

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
					Tahun	Bulan		Tahun	Bulan			
40	4.13.1.3.6	25	Jalan Kabupaten Lokal	Tohpati - Kusamba	12	2002	1.604.805.000,00	0	0	1.604.805.000,00	0,00	
41	4.13.1.3.6	28	Jalan Kabupaten Lokal	Jln. Tegalinggah-Pura Muncak Sari Km.36.80 & Km.39.70	12	2007	64.718.000,00	0	0	64.718.000,00	0,00	
42	4.13.2.2.1	2	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bukit Titiles	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
43	4.13.2.2.1	6	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Asri II	12	1954	129.910.000,00	0	0	129.910.000,00	0,00	
44	4.13.2.2.1	7	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombang II	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
45	4.13.2.2.1	8	Jembatan Beton Propinsi	Tk Groggak II	12	1954	69.500.000,00	0	0	69.500.000,00	0,00	
46	4.13.2.2.1	9	Jembatan Beton Propinsi	Tk Groggak III	12	1954	12.100.000,00	0	0	12.100.000,00	0,00	
47	4.13.2.2.1	10	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pemuteran	12	1954	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0,00	
48	4.13.2.2.1	11	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejarakan I	12	1954	17.200.000,00	0	0	17.200.000,00	0,00	
49	4.13.2.2.1	12	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejarakan II	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
50	4.13.2.2.1	13	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pejarakan III	12	1954	16.000.000,00	0	0	16.000.000,00	0,00	
51	4.13.2.2.1	14	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegal Muara	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
52	4.13.2.2.1	15	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lebuah Lalang	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
53	4.13.2.2.1	16	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok III	12	1954	49.861.000,00	0	0	49.861.000,00	0,00	
54	4.13.2.2.1	17	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok IV	12	1954	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0,00	
55	4.13.2.2.1	18	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gondol I	12	1954	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
56	4.13.2.2.1	19	Jembatan Beton Propinsi	Tk Yeh Aya	12	1954	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0,00	
57	4.13.2.2.1	23	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyumala	12	1954	92.500.000,00	0	0	92.500.000,00	0,00	
58	4.13.2.2.1	24	Jembatan Beton Propinsi	Tk Yeh Kuning	12	1954	8.391.000,00	0	0	8.391.000,00	0,00	
59	4.13.2.2.1	25	Jembatan Beton Propinsi	Tk Temukus I	12	1954	8.391.000,00	0	0	8.391.000,00	0,00	
60	4.13.2.2.1	26	Jembatan Beton Propinsi	Tk Langking	12	1954	23.500.000,00	0	0	23.500.000,00	0,00	
61	4.13.2.2.1	27	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bangka	12	1954	84.376.000,00	0	0	84.376.000,00	0,00	
62	4.13.2.2.1	28	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tubuh	12	1954	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00	0,00	
63	4.13.2.2.1	29	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bedugul	12	1954	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0,00	
64	4.13.2.2.1	30	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kambing	12	1954	17.157.000,00	0	0	17.157.000,00	0,00	
65	4.13.2.2.1	31	Jembatan Beton Propinsi	Tk Celincing	12	1954	2.500.000,00	0	0	2.500.000,00	0,00	
66	4.13.2.2.1	32	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cangu	12	1954	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0,00	
67	4.13.2.2.1	33	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batang	12	1954	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0,00	
68	4.13.2.2.1	34	Jembatan Beton Propinsi	Tk Galar	12	1954	35.600.000,00	0	0	35.600.000,00	0,00	
69	4.13.2.2.1	35	Jembatan Beton Propinsi	Tk Biu	12	1954	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00	0,00	
70	4.13.2.2.1	36	Jembatan Beton Propinsi	Bon Biu	12	1954	24.600.000,00	0	0	24.600.000,00	0,00	
71	4.13.2.2.1	37	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tambak	12	1954	10.500.000,00	0	0	10.500.000,00	0,00	
72	4.13.2.2.1	38	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puseh	12	1954	13.500.000,00	0	0	13.500.000,00	0,00	
73	4.13.2.2.1	40	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pintu	12	1954	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
74	4.13.2.2.1	41	Jembatan Beton Propinsi	Tk Praya	12	1954	31.775.000,00	0	0	31.775.000,00	0,00	
75	4.13.2.2.1	42	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengawan	12	1954	30.750.000,00	0	0	30.750.000,00	0,00	
76	4.13.2.2.1	43	Jembatan Beton Propinsi	Tk Eya	12	1954	9.000.000,00	0	0	9.000.000,00	0,00	
77	4.13.2.2.1	44	Jembatan Beton Propinsi	Tk Berata	12	1954	10.886.000,00	0	0	10.886.000,00	0,00	
78	4.13.2.2.1	45	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tenga	12	1954	9.977.000,00	0	0	9.977.000,00	0,00	
79	4.13.2.2.1	46	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banda	12	1958	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
80	4.13.2.2.1	47	Jembatan Beton Propinsi	Tk Takmung I	12	1958	11.000.000,00	0	0	11.000.000,00	0,00	
81	4.13.2.2.1	48	Jembatan Beton Propinsi	Tk Takmung II	12	1958	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
82	4.13.2.2.1	49	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tib Cau	12	1958	38.000.000,00	0	0	38.000.000,00	0,00	
83	4.13.2.2.1	50	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pendem	12	1958	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0,00	
84	4.13.2.2.1	51	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cutak	12	1958	14.000.000,00	0	0	14.000.000,00	0,00	
85	4.13.2.2.1	52	Jembatan Beton Propinsi	Tk Delod Pangeh	12	1958	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	
86	4.13.2.2.1	53	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kutuh	12	1958	26.500.000,00	0	0	26.500.000,00	0,00	
87	4.13.2.2.1	54	Jembatan Beton Propinsi	Tk Candi Negara	12	1958	33.000.000,00	0	0	33.000.000,00	0,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
					Tahun	Bulan		Tahun	Bulan			
88	4.13.2.2.1	57	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengumbahan	12	1958	116.000.000,00	0	0	116.000.000,00	0,00	
89	4.13.2.2.1	58	Jembatan Beton Propinsi	Tk Buluh	12	1958	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0,00	
90	4.13.2.2.1	59	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengojongan	12	1958	19.200.000,00	0	0	19.200.000,00	0,00	
91	4.13.2.2.1	60	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pedung	12	1958	27.000.000,00	0	0	27.000.000,00	0,00	
92	4.13.2.2.1	61	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lawan	12	1958	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00	0,00	
93	4.13.2.2.1	62	Jembatan Beton Propinsi	Tk Teluk Terima I	12	1959	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0,00	
94	4.13.2.2.1	63	Jembatan Beton Propinsi	Tk Teluk Terima II	12	1959	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	
95	4.13.2.2.1	64	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok I	12	1959	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0,00	
96	4.13.2.2.1	65	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok II	12	1959	72.420.000,00	0	0	72.420.000,00	0,00	
97	4.13.2.2.1	66	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegay	12	1959	26.750.000,00	0	0	26.750.000,00	0,00	
98	4.13.2.2.1	67	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tk Teluk Terima	12	1960	84.000.000,00	0	0	84.000.000,00	0,00	
99	4.13.2.2.1	68	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ketapang	12	1960	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0,00	
100	4.13.2.2.1	69	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sampalan	12	1965	35.000.000,00	0	0	35.000.000,00	0,00	
101	4.13.2.2.1	72	Jembatan Beton Propinsi	Tk Hee	12	1968	24.000.000,00	0	0	24.000.000,00	0,00	
102	4.13.2.2.1	73	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kali Untu	12	1969	16.250.000,00	0	11	15.952.083,00	297.917,00	
103	4.13.2.2.1	74	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bugbug	12	1974	96.000.000,00	5	11	84.640.000,00	11.360.000,00	
104	4.13.2.2.1	76	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok V	12	1975	25.000.000,00	6	11	21.541.667,00	3.458.333,00	
105	4.13.2.2.1	77	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VI	12	1975	35.496.000,00	6	11	30.585.720,00	4.910.280,00	
106	4.13.2.2.1	78	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VII	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
107	4.13.2.2.1	79	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok VIII	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
108	4.13.2.2.1	80	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumber Batok IX	12	1975	66.500.000,00	6	11	57.300.833,00	9.199.167,00	
109	4.13.2.2.1	81	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batok	12	1975	25.000.000,00	6	11	21.541.667,00	3.458.333,00	
110	4.13.2.2.1	82	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok I	12	1975	21.000.000,00	6	11	18.095.000,00	2.905.000,00	
111	4.13.2.2.1	83	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok II	12	1975	25.000.000,00	6	11	21.541.667,00	3.458.333,00	
112	4.13.2.2.1	84	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok III	12	1975	26.000.000,00	6	11	22.403.333,00	3.596.667,00	
113	4.13.2.2.1	85	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kelompok IV	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
114	4.13.2.2.1	86	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bunut Panggang	12	1975	20.700.000,00	6	11	17.836.500,00	2.863.500,00	
115	4.13.2.2.1	87	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sawah Ketapang	12	1975	15.000.000,00	6	11	12.925.000,00	2.075.000,00	
116	4.13.2.2.1	88	Jembatan Beton Propinsi	Tk Padang Kerta	12	1975	179.161.000,00	6	11	154.377.062,00	24.783.938,00	
117	4.13.2.2.1	89	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gelulung	12	1977	22.700.000,00	8	11	18.651.833,00	4.048.167,00	
118	4.13.2.2.1	90	Jembatan Beton Propinsi	Tk Jinah	12	1977	96.000.000,00	8	11	78.880.000,00	17.120.000,00	
119	4.13.2.2.1	92	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Mumbul	12	1977	7.883.000,00	8	11	6.477.198,00	1.405.802,00	
120	4.13.2.2.1	96	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pulu	12	1977	12.100.000,00	8	11	9.942.167,00	2.157.833,00	
121	4.13.2.2.1	97	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyupoh	12	1977	18.000.000,00	8	11	14.790.000,00	3.210.000,00	
122	4.13.2.2.1	98	Jembatan Beton Propinsi	Tk Uma Parji	12	1977	10.349.000,00	8	11	8.503.428,00	1.845.572,00	
123	4.13.2.2.1	99	Jembatan Beton Propinsi	Tk Manuk	12	1977	8.218.000,00	8	11	6.752.457,00	1.465.543,00	
124	4.13.2.2.1	100	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanjung Sangiang	12	1977	30.234.000,00	8	11	24.842.270,00	5.391.730,00	
125	4.13.2.2.1	101	Jembatan Beton Propinsi	Tk Temukus II	12	1977	20.000.000,00	8	11	16.433.333,00	3.566.667,00	
126	4.13.2.2.1	102	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tampak	12	1977	9.440.000,00	8	11	7.756.533,00	1.683.467,00	
127	4.13.2.2.1	103	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mendaung	12	1977	31.395.000,00	8	11	25.796.225,00	5.598.775,00	
128	4.13.2.2.1	104	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mumbul	12	1977	10.000.000,00	8	11	8.216.667,00	1.783.333,00	
129	4.13.2.2.1	105	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tirta Gangga	12	1977	11.244.000,00	8	11	9.238.820,00	2.005.180,00	
130	4.13.2.2.1	106	Jembatan Beton Propinsi	Tk Uma Anyar	12	1978	24.000.000,00	9	11	19.240.000,00	4.760.000,00	
131	4.13.2.2.1	107	Jembatan Beton Propinsi	Tk Carik Desa	12	1978	11.150.000,00	9	11	8.938.583,00	2.211.417,00	
132	4.13.2.2.1	108	Jembatan Beton Propinsi	Tk Musi I	12	1978	12.280.000,00	9	11	9.844.467,00	2.435.533,00	
133	4.13.2.2.1	109	Jembatan Beton Propinsi	Tk Musi II	12	1978	12.280.000,00	9	11	9.844.467,00	2.435.533,00	
134	4.13.2.2.1	110	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penyabangan	12	1978	43.855.000,00	9	11	35.157.092,00	8.697.908,00	
135	4.13.2.2.1	111	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengiris	12	1978	9.230.000,00	9	11	7.399.383,00	1.830.617,00	
136	4.13.2.2.1	112	Jembatan Beton Propinsi	Tk Serumbang	12	1978	13.844.000,00	9	11	11.098.273,00	2.745.727,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
					Tahun	Bulan		Tahun	Bulan			
137	4.13.2.2.1	113	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cangging	12	1978	9.703.000,00	9	11	7.778.572,00	1.924.428,00	
138	4.13.2.2.1	114	Jembatan Beton Propinsi	Tk Culuk	12	1978	15.331.000,00	9	11	12.290.352,00	3.040.648,00	
139	4.13.2.2.1	115	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kali Genit	12	1978	5.000.000,00	9	11	4.008.333,00	991.667,00	
140	4.13.2.2.1	116	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penitis	12	1978	27.000.000,00	9	11	21.645.000,00	5.355.000,00	
141	4.13.2.2.1	119	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar I	12	1979	32.500.000,00	10	11	25.404.167,00	7.095.833,00	
142	4.13.2.2.1	122	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Asri I	12	1979	11.200.000,00	10	11	8.754.667,00	2.445.333,00	
143	4.13.2.2.1	123	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gondol II	12	1979	12.500.000,00	10	11	9.770.833,00	2.729.167,00	
144	4.13.2.2.1	124	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batan Bekul	12	1979	18.761.000,00	10	11	14.664.848,00	4.096.152,00	
145	4.13.2.2.1	125	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ababi	12	1979	19.000.000,00	10	11	14.851.667,00	4.148.333,00	
146	4.13.2.2.1	126	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lodpah	12	1980	16.000.000,00	11	11	12.186.667,00	3.813.333,00	
147	4.13.2.2.1	127	Jembatan Beton Propinsi	Tk Samplan	12	1980	16.975.000,00	11	11	12.929.292,00	4.045.708,00	
148	4.13.2.2.1	128	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombang I	12	1980	18.000.000,00	11	11	13.710.000,00	4.290.000,00	
149	4.13.2.2.1	129	Jembatan Beton Propinsi	Tk Patas	12	1980	25.000.000,00	11	11	19.041.667,00	5.958.333,00	
150	4.13.2.2.1	130	Jembatan Beton Propinsi	Tk Batu Pulu	12	1980	36.052.000,00	11	11	27.459.607,00	8.592.393,00	
151	4.13.2.2.1	131	Jembatan Beton Propinsi	Tk Peladung	12	1980	32.695.000,00	11	11	24.902.692,00	7.792.308,00	
152	4.13.2.2.1	132	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanke	12	1980	6.000.000,00	11	11	4.570.000,00	1.430.000,00	
153	4.13.2.2.1	133	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tinga-Tinga	12	1981	59.710.000,00	12	11	44.284.917,00	15.425.083,00	
154	4.13.2.2.1	135	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar II	12	1982	45.000.000,00	13	11	32.475.000,00	12.525.000,00	
155	4.13.2.2.1	137	Jembatan Beton Propinsi	Tk Anyar	12	1982	29.000.000,00	13	11	20.928.333,00	8.071.667,00	
156	4.13.2.2.1	138	Jembatan Beton Propinsi	Tk Mangga	12	1982	149.048.000,00	13	11	107.562.973,00	41.485.027,00	
157	4.13.2.2.1	139	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pengapalan	12	1982	16.775.000,00	13	11	12.105.958,00	4.669.042,00	
158	4.13.2.2.1	140	Jembatan Beton Propinsi	Tk Desa II	12	1982	28.000.000,00	13	11	20.206.667,00	7.793.333,00	
159	4.13.2.2.1	141	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puana	12	1982	20.000.000,00	13	11	14.433.333,00	5.566.667,00	
160	4.13.2.2.1	143	Jembatan Beton Propinsi	Tk Prakpak	12	1983	67.180.000,00	14	11	47.137.967,00	20.042.033,00	
161	4.13.2.2.1	144	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banges	12	1983	67.180.000,00	14	11	47.137.967,00	20.042.033,00	
162	4.13.2.2.1	145	Jembatan Beton Propinsi	Tk Cicing	12	1984	70.690.000,00	15	11	48.187.017,00	22.502.983,00	
163	4.13.2.2.1	146	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tanahampo	12	1984	53.990.000,00	15	11	36.803.183,00	17.186.817,00	
164	4.13.2.2.1	147	Jembatan Beton Propinsi	Tk Manggis	12	1984	140.648.000,00	15	11	95.875.053,00	44.772.947,00	
165	4.13.2.2.1	148	Jembatan Beton Propinsi	Pacuan	12	1984	38.857.000,00	15	11	26.487.522,00	12.369.478,00	
166	4.13.2.2.1	149	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pati	12	1984	119.890.000,00	15	11	81.725.017,00	38.164.983,00	
167	4.13.2.2.1	150	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ambangan	12	1984	36.000.000,00	15	11	24.540.000,00	11.460.000,00	
168	4.13.2.2.1	151	Jembatan Beton Propinsi	Pesedahan	12	1985	34.500.000,00	16	11	22.827.500,00	11.672.500,00	
169	4.13.2.2.1	152	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sakenan Jasi	12	1985	139.590.000,00	16	11	92.362.050,00	47.227.950,00	
170	4.13.2.2.1	153	Jembatan Beton Propinsi	Tk Kubu Jati	12	1985	92.354.000,00	16	11	61.107.563,00	31.246.437,00	
171	4.13.2.2.1	154	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ampo	12	1985	53.990.000,00	16	11	35.723.383,00	18.266.617,00	
172	4.13.2.2.1	155	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pacuan II	12	1985	38.857.000,00	16	11	25.710.382,00	13.146.618,00	
173	4.13.2.2.1	156	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pesedahan	12	1985	34.500.000,00	16	11	22.827.500,00	11.672.500,00	
174	4.13.2.2.1	159	Jembatan Beton Propinsi	Tk Panes	12	1985	160.000.000,00	16	11	105.866.667,00	54.133.333,00	
175	4.13.2.2.1	160	Jembatan Beton Propinsi	Tk Baas	12	1986	234.952.000,00	17	11	150.760.867,00	84.191.133,00	
176	4.13.2.2.1	161	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pangpang	12	1986	38.510.000,00	17	11	24.710.583,00	13.799.417,00	
177	4.13.2.2.1	162	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bubuh	12	1986	320.000.000,00	17	11	205.333.333,00	114.666.667,00	
178	4.13.2.2.1	165	Jembatan Beton Propinsi	Yeh Tagtag	12	1986	76.819.000,00	17	11	49.292.192,00	27.526.808,00	
179	4.13.2.2.1	166	Jembatan Beton Propinsi	Tk Petiwasan	12	1988	501.486.000,00	19	11	301.727.410,00	199.758.590,00	
180	4.13.2.2.1	167	Jembatan Beton Propinsi	Tk Groggak I	12	1988	111.829.000,00	19	11	67.283.782,00	44.545.218,00	
181	4.13.2.2.1	168	Jembatan Beton Propinsi	Tk Asangan	12	1988	210.760.000,00	19	11	126.807.267,00	83.952.733,00	
182	4.13.2.2.1	169	Jembatan Beton Propinsi	Tk Groggak	12	1988	111.829.000,00	19	11	67.283.782,00	44.545.218,00	
183	4.13.2.2.1	171	Jembatan Beton Propinsi	Tk Area	12	1989	76.500.000,00	20	11	44.497.500,00	32.002.500,00	
184	4.13.2.2.1	172	Jembatan Beton Propinsi	Tk Embang	12	1989	311.000.000,00	20	11	180.898.333,00	130.101.667,00	
185	4.13.2.2.1	173	Jembatan Beton Propinsi	Tk Banyu Raras	12	1989	174.026.000,00	20	11	101.225.123,00	72.800.877,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
					Tahun	Bulan		Tahun	Bulan			
186	4.13.2.2.1	174	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bindu	12	1989	150.000.000,00	20	11	87.250.000,00	62.750.000,00	
187	4.13.2.2.1	175	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penatih	12	1989	150.000.000,00	20	11	87.250.000,00	62.750.000,00	
188	4.13.2.2.1	178	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bakah	12	1990	310.000.000,00	21	11	174.116.667,00	135.883.333,00	
189	4.13.2.2.1	179	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bangkeh II	12	1990	10.000.000,00	21	11	5.616.667,00	4.383.333,00	
190	4.13.2.2.1	180	Jembatan Beton Propinsi	Tk Ejekan Kebo	12	1990	22.800.000,00	21	11	12.806.000,00	9.994.000,00	
191	4.13.2.2.1	181	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penarukan	12	1990	426.686.000,00	21	11	239.655.303,00	187.030.697,00	
192	4.13.2.2.1	182	Jembatan Beton Propinsi	Tk Brombong III	12	1990	76.332.000,00	21	11	42.873.140,00	33.458.860,00	
193	4.13.2.2.1	183	Jembatan Beton Propinsi	Tk Lalang	12	1992	40.000.000,00	23	11	20.866.667,00	19.133.333,00	
194	4.13.2.2.1	184	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bumbung	12	1992	32.000.000,00	23	11	16.693.333,00	15.306.667,00	
195	4.13.2.2.1	185	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bayad	12	1992	11.500.000,00	23	11	5.999.167,00	5.500.833,00	
196	4.13.2.2.1	186	Jembatan Beton Propinsi	Tk Glebeg	12	1992	9.000.000,00	23	11	4.695.000,00	4.305.000,00	
197	4.13.2.2.1	187	Jembatan Beton Propinsi	Tk Puyung	12	1992	52.000.000,00	23	11	27.126.667,00	24.873.333,00	
198	4.13.2.2.1	188	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bila	12	1992	13.000.000,00	23	11	6.781.667,00	6.218.333,00	
199	4.13.2.2.1	189	Jembatan Beton Propinsi	Tk Menanga	12	1992	26.000.000,00	23	11	13.563.333,00	12.436.667,00	
200	4.13.2.2.1	190	Jembatan Beton Propinsi	Tk Penyusuan	12	1992	7.000.000,00	23	11	3.651.667,00	3.348.333,00	
201	4.13.2.2.1	191	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes	12	1993	9.340.000,00	24	11	4.685.567,00	4.654.433,00	
202	4.13.2.2.1	192	Jembatan Beton Propinsi	Tk Gelantang	12	1993	6.000.000,00	24	11	3.010.000,00	2.990.000,00	
203	4.13.2.2.1	193	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes II	12	1993	8.000.000,00	24	11	4.013.333,00	3.986.667,00	
204	4.13.2.2.1	194	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bantes	12	1993	9.340.000,00	24	11	4.685.567,00	4.654.433,00	
205	4.13.2.2.1	195	Jembatan Beton Propinsi	Tk Tegallinggah	12	1994	16.800.000,00	25	11	8.092.000,00	8.708.000,00	
206	4.13.2.2.1	196	Jembatan Beton Propinsi	Tk Sumaga	12	1995	53.900.000,00	26	11	24.883.833,00	29.016.167,00	
207	4.13.2.2.1	197	Jembatan Beton Propinsi	Tk Bulakan	12	1995	26.400.000,00	26	11	12.188.000,00	14.212.000,00	
208	4.13.2.2.1	198	Jembatan Beton Propinsi	Tk Les	12	1995	12.750.000,00	26	11	5.886.250,00	6.863.750,00	
209	4.13.2.2.1	199	Jembatan Beton Propinsi	Tk Pojok Batu	12	1995	12.500.000,00	26	11	5.770.833,00	6.729.167,00	
210	4.13.2.2.2	1	Jembatan Baja Propinsi	Tk Unda	12	1985	390.031.000,00	16	11	258.070.512,00	131.960.488,00	
211	4.14.1.2.2	1	Bendung dengan Pintu Bilas	Gianyar	6	2009	262.000.000,00	40	5	50.216.667,00	211.783.333,00	
212	4.14.1.3.2	1	Saluran Induk	Gianyar/Medahan	12	1997	28.400.000,00	28	11	11.975.333,00	16.424.667,00	
213	4.14.1.3.2	6	Saluran Induk	Tabanan/Sungsang	12	1997	70.150.000,00	28	11	29.579.917,00	40.570.083,00	
214	4.14.1.3.2	10	Saluran Induk	Gianyar/Ubud	12	2000	114.825.000,00	31	11	41.528.375,00	73.296.625,00	
215	4.14.1.3.2	11	Saluran Induk	Buleleng/Sangkan Gunung	12	2001	123.173.000,00	32	11	42.084.108,00	81.088.892,00	
216	4.14.1.3.2	12	Saluran Induk	Buleleng/Busungbiu Tunju	12	2001	236.600.000,00	32	11	80.838.333,00	155.761.667,00	
217	4.14.1.3.2	13	Saluran Induk	Buleleng/Tirta Gangga	12	2001	117.625.000,00	32	11	40.188.542,00	77.436.458,00	
218	4.14.1.3.2	15	Saluran Induk	Gianyar	12	2002	194.000.000,00	33	11	62.403.333,00	131.596.667,00	
219	4.14.1.3.2	16	Saluran Induk	Gianyar	12	2002	143.000.000,00	33	11	45.998.333,00	97.001.667,00	
220	4.14.1.3.2	18	Saluran Induk	Tabanan	12	2002	93.000.000,00	33	11	29.915.000,00	63.085.000,00	
221	4.14.1.3.2	19	Saluran Induk	Tabanan	12	2002	172.000.000,00	33	11	55.326.667,00	116.673.333,00	
222	4.14.1.3.2	22	Saluran Induk	Karangasem	12	2003	216.000.000,00	34	11	65.160.000,00	150.840.000,00	
223	4.14.1.3.2	27	Saluran Induk	Tabanan	12	2004	114.002.000,00	35	11	32.110.563,00	81.891.437,00	
224	4.14.1.3.2	28	Saluran Induk	Gianyar	12	2004	143.493.000,00	35	11	40.417.195,00	103.075.805,00	
225	4.14.1.3.2	29	Saluran Induk	Karangasem	12	2005	166.692.000,00	36	11	43.617.740,00	123.074.260,00	
226	4.14.1.3.2	31	Saluran Induk	Tabanan	12	2005	360.887.000,00	36	11	94.432.098,00	266.454.902,00	
227	4.14.1.3.2	34	Saluran Induk	Gianyar	12	2006	1.181.697.000,00	37	11	285.576.775,00	896.120.225,00	
228	4.14.1.3.2	35	Saluran Induk	Karangasem	12	2006	85.255.000,00	37	11	20.603.292,00	64.651.708,00	
229	4.14.1.3.2	43	Saluran Induk	Tabanan	12	2007	379.968.000,00	38	11	84.226.240,00	295.741.760,00	
230	4.14.1.3.2	44	Saluran Induk	Gianyar	12	2007	292.675.000,00	38	11	64.876.292,00	227.798.708,00	
231	4.14.1.3.2	45	Saluran Induk	Gianyar	12	2007	209.042.000,00	38	11	46.337.643,00	162.704.357,00	
232	4.14.1.3.2	46	Saluran Induk	Tabanan	12	2007	90.214.000,00	38	11	19.997.437,00	70.216.563,00	
233	4.14.1.3.2	54	Saluran Induk	Badung	12	2008	1.979.982.000,00	39	11	399.296.370,00	1.580.685.630,00	
234	4.14.1.3.2	63	Saluran Induk	Tabanan	12	2008	94.158.000,00	39	11	18.988.530,00	75.169.470,00	

No	Kode Aset	No. Register	Jenis Aset	Lokasi	Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Manfaat		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku	Keterangan
								Tahun	Bulan			
235	4.14.1.3.2	65	Saluran Induk	Buleleng	12	2008	4.650.000.000,00	39	11	937.750.000,00	3.712.250.000,00	
236	4.14.1.3.2	67	Saluran Induk	Tk. Ayung (DI Tumbak Bayuh)	12	2008	1.699.934.000,00	39	11	342.820.023,00	1.357.113.977,00	
237	4.14.1.3.2	68	Saluran Induk	Tk. Daya	12	2008	470.656.000,00	39	11	94.915.627,00	375.740.373,00	
238	4.14.1.3.2	69	Saluran Induk	Tk. Banyuning	12	2008	909.875.000,00	39	11	183.491.458,00	726.383.542,00	
239	4.14.1.3.2	70	Saluran Induk	Tukad Candigara	12	2008	2.183.998.000,00	39	11	440.439.597,00	1.743.558.403,00	
240	4.14.1.3.2	88	Saluran Induk	Nusa Penida Klungkung	12	2014	4.115.843.000,00	45	11	149.028.974,00	3.966.814.026,00	
241	4.14.1.3.2	90	Saluran Induk	Kabupaten Badung dan Kota Denpasar	12	2014	4.849.194.000,00	45	11	396.017.510,00	4.453.176.490,00	
242	4.14.1.3.2	106	Saluran Induk		12	2014	49.556.000,00	45	11	4.047.073,00	45.508.927,00	
243	4.14.1.3.2	107	Saluran Induk		12	2014	73.917.800,00	45	11	6.036.620,00	67.881.180,00	
244	4.14.1.3.2	108	Saluran Induk		12	2014	49.785.000,00	45	11	4.065.775,00	45.719.225,00	
245	4.14.1.3.2	109	Saluran Induk		12	2014	48.200.000,00	45	11	3.936.333,00	44.263.667,00	
246	4.14.1.3.2	110	Saluran Induk		12	2014	48.680.000,00	45	11	3.975.533,00	44.704.467,00	
247	4.14.1.3.2	115	Saluran Induk	spam penet	12	2014	33.618.101.970,00	45	11	2.745.478.328,00	30.872.623.642,00	
248	4.14.1.3.2	128	Saluran Induk	D.I. Caguh	12	2006	4.127.319.000,00	37	11	934.276.914,00	3.193.042.086,00	
249	4.14.1.3.2	129	Saluran Induk	D.I. Cangi	12	2008	2.829.399.600,00	39	11	559.057.074,00	2.270.342.526,00	
250	4.14.1.3.2	130	Saluran Induk	D.I. Gadungan Lambuk	12	2008	3.336.147.400,00	39	11	601.040.202,00	2.735.107.198,00	
251	4.14.1.3.2	131	Saluran Induk	D.I. Luwus Carangsari	12	2008	3.442.410.600,00	39	11	658.699.972,00	2.783.710.628,00	
252	4.14.1.3.2	132	Saluran Induk	D.I. Pame Palean	12	2008	4.378.804.800,00	39	11	869.001.592,00	3.509.803.208,00	
253	4.14.1.3.2	133	Saluran Induk	D.I. Pejeng	12	2007	1.735.169.000,00	38	11	318141892	1417027108	
254	4.14.1.3.2	134	Saluran Induk	D.I. Tengkulak Mawang	12	2008	3.815.808.000,00	39	11	758.909.608,00	3.056.898.392,00	
255	4.14.1.3.2	135	Saluran Induk	D.I. Tinjak Menjangan	12	30/06/1905	2.169.351.200,00	39	11	428.676.709,00	1.740.674.491,00	
256	4.14.1.3.2	136	Saluran Induk	D.I. Tungku	12	29/06/1905	20.604.041.175,00	40	8	2.122.086.656,00	18.481.954.519,00	
257	4.14.1.5.3	4	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain		12	02/07/1905	5.379.701.000,00	41	11	869.718.328,00	4.509.982.672,00	
258	4.14.3.3.2	1	Saluran Induk	Tabanan	8	01/07/1905	98.591.000,00	15	7	37.135.943,00	61.455.057,00	
259	4.14.4.2.1	1	Bangunan Pengambilan Pengamanan sungai	Jembrana	5	01/07/1905	1.263.090.000,00	0	4	1.220.987.000,00	42.103.000,00	
260	4.15.7.1.4	2	Instalasi		12	04/07/1905	809.950.000,00	23	11	164.239.862,00	645.710.138,00	
Gedung Intra												
Jumlah							487.528.000,00			115.880.491,00	371.647.509,00	
2	3.11.1.21.1	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		12	2011	219.499.000,00	0		39.875.652,00	179.623.348,00	PUPRKIM
3	3.11.1.21.1	2	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen		12	2011	176.762.000,00	0		32111763	144650237	PUPRKIM
4	3.12.1.1.2	5	Lain-lain		7	2009	45.767.000,00	0		10526410	35240590	PUPRKIM
12	3.1.1.6.11	20	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Kab.Tabanan			45.500.000,00			33366666	12133334	BPKAD
Gedung Ekstra												
Jumlah							12.795.000,00				12795000	
1	3.1.1.6.11	18	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Kec. Penebel , Kab.Tabanan			12.795.000,00		0		12795000	BPKAD

**DAFTAR ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan yang akan dihibahkan
Pemerintah Provinsi Bali
per 31 Desember 2023**

NO	NAMA BARANG	TAHUN ANGGARAN	NILAI ASET
1	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	2009	3.636.180.000
2	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	2010	3.834.392.000
3	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	2012	4.829.037.000
4	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	2013	2.209.859.000
5	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	2014	11.636.202.000
6	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	2015	902.836.000
TOTAL			27.048.506.000

**Rincian Aset Tetap Lainnya - Buku Yang Tidak Ditemukan Fisiknya
Di Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	Nama Unit	Nama UPB	Kode Barang	Nomor Register	Judul	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	SMAN 3 Singaraja	5.17.1.5.4	3	-	1.359.150,00	Buku Tidak Ditemukan
2	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	SMAN 3 Singaraja	5.17.1.5.4	4	-	1.481.350,00	Buku Tidak Ditemukan
3	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	SMAN 3 Singaraja	5.17.1.5.4	5	-	1.470.000,00	Buku Tidak Ditemukan
4	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	SMAN 1 Sukasada	5.17.1.6.10	29	Fisika Kelas 1	5.070.000,00	Barang Tidak Ditemukan
5	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	SMAN 1 Sukasada	5.17.1.6.10	30	Biologi Kelas 1	3.240.000,00	Barang Tidak Ditemukan
6	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	SMAN 1 Sukasada	5.17.1.1.10	38	Ekonometri	2.875.000,00	Barang Tidak Ditemukan
7	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	SMAN 1 Sukasada	5.17.1.6.10	31	Biologi kelas 1	2.016.000,00	Barang Tidak Ditemukan
8	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	SMAN 1 Sukasada	5.17.1.1.10	44	Ekonometri	2.875.000,00	Barang Tidak Ditemukan
9	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	SLB N 1 Jembrana	5.17.1.1.10	1	Buku Cerita Bergambar	2.115.000,00	Banyak Buku Yang Dirusak Sama Abk.
Total						22.501.500,00	

**Rincian Aset Lain Lainnya - Kapal Penangkap Ikan
Di Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	Nama Unit	Jenis Barang>Nama Barang	Spesifikasi Lokasi	Merk/Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga (Rp)
1	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali	Kapal Kayu Inka Mina 906	Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur	Bahan Kayu	RB	2014	1	4.940.980,00
2	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali	Kapal Kayu Inka Mina 907	Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur	Bahan Kayu	RB	2014	1	4.942.217,00
3	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali	Kapal Kayu Inka Mina 908	Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur	Bahan Kayu	RB	2014	1	4.910.321,00
4	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali	Kapal Kayu Inka Mina 909	Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur	Bahan Kayu	RB	2014	1	4.910.321,00
							Nilai Objek	19.703.839,00
							Dibulatkan	19.704.000,00

**Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2023**

No	SKPD	SALDO AWAL	UNIT	Saldo Awal									
				TANAH	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ	UNIT	ATL	UNIT
	Jumlah	354.275.365.052,63	815,00	84.598.503.729,00	216,00	3.490.980.527,00	8,00	31.362.158.013,00	68,00	199.223.356.869,00	266,00	4.526.299.914,63	246,00
1	Sekretariat Dprd	-	-										
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-										
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-										
4	Sekretariat Daerah	578.924.500,00	155,00									578.924.500,00	155,00
5	Dinas Perhubungan	27.048.506.000,00	1,00										
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-										
7	Dinas Kesehatan	9.639.043.000,00	5,00	7.112.008.000,00	3,00			2.527.035.000,00	2,00				
8	Dinas Kebudayaan	-	-										
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.520.595.200,00	5,00			2.520.595.200,00	5,00						
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-										
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-										
12	Badan Pendapatan	-	-										
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	112.359.414.939,00	163,00	64.210.163.729,00	99,00	970.385.327,00	3,00	26.538.585.013,00	55,00	20.640.280.870,00	6,00		
14	Inspektorat	-	-										
15	Dinas Pariwisata	-	-										
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-										
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-										
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-										
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-										
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-										
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-										
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	1.449.197.500,00	7,00	1.449.197.500,00	7,00								
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	11.827.134.500,00	107,00	11.827.134.500,00	107,00								
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	184.905.173.999,00	281,00					2.296.538.000,00	11,00	178.583.075.999,00	260,00		
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-										
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-	-									-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-										
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	3.947.375.414,63	91,00									3.947.375.414,63	91,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-										
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-										
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-										

No	SKPD	KDP	UNIT	SALDO AWAL PENYUSUTAN	SALDO AWAL NETTO	Reklasifikasi dari Aset Tetap Kondisi Baik									
						TANAH	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JJ	UNIT	ATL	UNIT
	Jumlah	31.074.066.000,00	11,00	106.339.755.861,62	247.935.609.191,01	45.359.110.775,00	34,00	3.221.781.950,00	-	1.752.580.800,00	1,00	-	-	-	-
1	Sekretariat Dprd			-	-										
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali			-	-										
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali			-	-										
4	Sekretariat Daerah			-	578.924.500,00										
5	Dinas Perhubungan	27.048.506.000,00	1,00	-	27.048.506.000,00										
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik			-	-	418.218.000,00	1,00								
7	Dinas Kesehatan			1.145.589.200,00	8.493.453.800,00	-									
8	Dinas Kebudayaan			-	-										
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan			-	2.520.595.200,00										
10	Dinas Koperasi Dan Ukm			-	-										
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp			-	-										
12	Badan Pendapatan			-	-										
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			26.269.573.951,62	86.089.840.987,38	41.084.680.650,00	25,00			1.393.308.000,00	1,00				
14	Inspektorat			-	-										
15	Dinas Pariwisata			-	-										
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			-	-										
17	Satuan Polisi Pamong Praja			-	-										
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			-	-										
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			-	-										
20	Badan Penghubung Provinsi Bali			-	-										
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali			-	-										
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali			-	1.449.197.500,00										
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa			-	11.827.134.500,00	572.744.875,00	8,00								
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.025.560.000,00	10,00	78.924.592.710,00	105.980.581.289,00										
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			-	-										
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			-	-	3.283.467.250,00	-	3.221.781.950,00	-	359.272.800,00	-				
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan			-	-										
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral			-	3.947.375.414,63										
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			-	-										
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup			-	-										
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan			-	-										

6

No	SKPD	Mutasi Tambah														Reklasifikasi ke Antar Aset Tetap Tahun Berjalan							
		Reklasifikasi Antar Aset Lainnya Tahun Berjalan				Mutasi Antar SKPD						Koreksi Pencatatan Saldo Awal											
		TANAH	UNIT	GB	UNIT	PM	GB	JJJ	ATL	KDP	ATB	TANAH	GB	JJJ	ATL	KDP	ATB	PM	GB	UNIT	JJJ	ATL	KDP
	Jumlah	8.573.838.000,00	2,00	804.882.000,00	4,00	-	-	-	-	-	-	843.750.000,00	-	-	-	-	-	804.882.000,00	4,00	-	-	-	-
1	Sekretariat Dprd																						
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali																						
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali																						
4	Sekretariat Daerah																						
5	Dinas Perhubungan																						
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik																						
7	Dinas Kesehatan																						
8	Dinas Kebudayaan																						
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan																						
10	Dinas Koperasi Dan Ukm																						
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp																						
12	Badan Pendapatan																						
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	8.573.838.000,00	2,00	804.882.000,00	4,00							843.750.000,00						804.882.000,00	4,00				
14	Inspektorat																						
15	Dinas Pariwisata																						
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																						
17	Satuan Polisi Pamong Praja																						
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
20	Badan Penghubung Provinsi Bali																						
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali																						
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali																						
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa																						
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman																						
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																						
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga																						
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan																						
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral																						
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																						
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup																						
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan																						

6

No	SKPD	Penghapusan															
		TANAH	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JJ	UNIT	ATL	UNIT	KDP	UNIT	TANAH	UNIT	PM	UNIT
	Jumlah	2.932.225.000,00	1,00	348.531.200,00	1,00	799.831.000,00	3,00	-	-	346.854.377,12	10,00	4.025.560.000,00	10,00	17.389.765,46	-	2.152.360.000,00	-
1	Sekretariat Dprd																
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali																
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali																
4	Sekretariat Daerah																
5	Dinas Perhubungan																
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik																
7	Dinas Kesehatan																
8	Dinas Kebudayaan																
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan			348.531.200,00	1,00											2.152.360.000,00	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm																
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp																
12	Badan Pendapatan																
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.932.225.000,00	1,00														
14	Inspektorat																
15	Dinas Pariwisata																
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																
17	Satuan Polisi Pamong Praja																
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia																
20	Badan Penghubung Provinsi Bali																
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali																
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali																
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa													17.389.765,46	-		
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman					799.831.000,00	3,00					4.025.560.000,00	10,00				
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga																
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan																
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral									346.854.377,12	10,00						
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup																
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan																

6

No	SKPD	Mutasi Kurang																
		Koreksi Saldo Awal					Pengeluaran Hibah											
		GB	UNIT	JJ	UNIT	ATL	UNIT	TANAH	UNIT	PM	GB	UNIT	JJ	UNIT	ATL	KDP	ATB	TANAH
	Jumlah	1.054.679.000,00	5,00	-	-	578.924.500,00	155,00	16.961.659.584,00	15,00	-	3.535.909.570,00	36,00	18.824.128.020,00	4,00	-	-	-	38.225.315.345,00
1	Sekretariat Dprd																	
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali																	
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali																	
4	Sekretariat Daerah					578.924.500,00	155,00											
5	Dinas Perhubungan																	
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik																	
7	Dinas Kesehatan																	
8	Dinas Kebudayaan																	
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan																	
10	Dinas Koperasi Dan Ukm																	
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp																	
12	Badan Pendapatan																	
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah							16.961.659.584,00	15,00		3.535.909.570,00	36,00	18.824.128.020,00	4,00				38.171.055.345,00
14	Inspektorat																	
15	Dinas Pariwisata																	
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																	
17	Satuan Polisi Pamong Praja																	
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia																	
20	Badan Penghubung Provinsi Bali																	
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali																	
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali																	
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa																	54.260.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.054.679.000,00	5,00															
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																	
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga																	
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan																	
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral																	
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																	
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup																	
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan																	

6

No	SKPD	Reklasifikasi ke Aset Tetap								TANAH	UNIT	PM	UNIT	GB	UNIT	JIJ
		UNIT	PM	GB	UNIT	JIJ	ATL	KDP	ATB							
	Jumlah	37,00	-	6.632.374.940,00	2,00	-	-	-	-	81.238.612.809,54	199,00	4.211.871.277,00	7,00	21.091.944.303,00	23,00	180.399.228.849,00
1	Sekretariat Dprd									-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali									-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali									-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah									-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan									-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik									418.218.000,00	1,00	-	-	-	-	-
7	Dinas Kesehatan									7.112.008.000,00	3,00	-	-	2.527.035.000,00	2,00	-
8	Dinas Kebudayaan									-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan									-	-	19.704.000,00	4,00	-	-	-
10	Dinas Koperasi Dan Ukm									-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp									-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan									-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	34,00		6.632.374.940,00	2,00					56.647.492.450,00	76,00	970.385.327,00	3,00	17.763.608.503,00	18,00	1.816.152.850,00
14	Inspektorat									-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata									-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja									-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia									-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali									-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali									-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali									1.449.197.500,00	7,00	-	-	-	-	-
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	3,00								12.328.229.609,54	112,00	-	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman									-	-	-	-	442.028.000,00	3,00	178.583.075.999,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga									3.283.467.250,00	-	3.221.781.950,00	-	359.272.800,00	-	-
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan									-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral									-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup									-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan									-	-	-	-	-	-	-

6

No	SKPD	Saldo Akhir								
		UNIT	ATL	UNIT	KDP	UNIT	TOTAL	UNIT	SALDO AKHIR PENYUSUTAN	SALDO AKHIR NETTO
	Jumlah	262,00	3.600.521.037,51	81,00	27.048.506.000,00	1,00	317.590.684.276,05	573,00	86.895.824.324,00	230.694.859.952,05
1	Sekretariat Dprd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Jabatan Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	27.048.506.000,00	1,00	27.048.506.000,00	1,00	-	27.048.506.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	-	-	-	-	-	418.218.000,00	1,00	-	418.218.000,00
7	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	9.639.043.000,00	5,00	1.145.589.200,00	8.493.453.800,00
8	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	19.704.000,00	4,00	-	19.704.000,00
10	Dinas Koperasi Dan Ukm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2,00	-	-	-	-	77.197.639.130,00	99,00	6.381.256.715,00	70.816.382.415,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	-	-	-	-	-	1.449.197.500,00	7,00	-	1.449.197.500,00
23	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa	-	-	-	-	-	12.328.229.609,54	112,00	-	12.328.229.609,54
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	260,00	-	-	-	-	179.025.103.999,00	263,00	78.686.299.950,00	100.338.804.049,00
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	6.864.522.000,00	-	682.678.459,00	6.181.843.541,00
27	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	-	3.600.521.037,51	81,00	-	-	3.600.521.037,51	81,00	-	3.600.521.037,51
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6

**RINCIAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2023**

REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI TAHUN 2022		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG		BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	KEWAJIBAN	1.918.450.086.845,55	138.367.042,51	162.013.955,32	1.918.426.439.932,74	1.199.935.525.042,37	807.939.813.642,74	2.316.395.044.545,73
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	566.202.341.952,92	138.367.042,51	162.013.955,32	566.178.695.040,11	1.199.935.525.042,37	554.883.752.656,62	1.217.203.360.639,22
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.728.160,90	0,00	0,00	60.728.160,90	161.434.041,00	60.728.160,90	161.434.041,00
2.1.01.01	Utang Taspen	60.728.160,90	0,00	0,00	60.728.160,90	161.434.041,00	60.728.160,90	161.434.041,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	145.201.591.122,00	0,00	0,00	145.201.591.122,00	252.856.677.414,00	154.593.470.448,00	243.464.798.088,00
2.1.04.01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	145.201.591.122,00	0,00	0,00	145.201.591.122,00	252.856.677.414,00	154.593.470.448,00	243.464.798.088,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	93.259.015.787,91	0,00	149.691,00	93.258.866.096,91	20.106.063.989,72	94.350.989.118,53	19.013.940.968,10
2.1.05.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	93.259.015.787,91	0,00	149.691,00	93.258.866.096,91	4.503.993.477,41	94.329.686.986,04	3.433.172.588,28
2.1.05.02	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602.070.512,31	21.302.132,49	15.580.768.379,82
2.1.06	Utang Belanja	327.681.006.882,11	138.367.042,51	161.864.264,32	327.657.509.660,30	948.796.251.245,83	321.890.573.364,01	954.563.187.542,12
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	83.529.914.256,12	12.842,50	23.510.564,32	83.506.416.534,30	123.564.344.596,80	77.835.754.403,01	129.235.006.728,09
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	7.448.427.873,99	138.354.200,01	138.353.700,00	7.448.428.374,00	27.087.478.575,00	6.487.589.943,00	28.048.317.006,00
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	891.277.020,00	0,00	0,00	891.277.020,00	149.648.189.345,00	891.277.020,00	149.648.189.345,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.926.152,00	368.663.000,00	3.060.263.152,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	57.341.659.872,03	199.334.332,00	57.142.325.540,03
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335.518.118,00	1,00	23.335.518.117,00
2.1.06.12	Utang Belanja Bagi Hasil	235.811.387.732,00	0,00	0,00	235.811.387.732,00	362.814.553.542,00	235.811.387.732,00	362.814.553.542,00
2.1.06.13	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	201.575.581.045,00	296.566.933,00	201.279.014.112,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.352.247.744.892,63	0,00	0,00	1.352.247.744.892,63	0,00	253.056.060.986,12	1.099.191.683.906,51
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	1.348.300.369.478,00	0,00	0,00	1.348.300.369.478,00	0,00	252.709.206.609,00	1.095.591.162.869,00
2.2.01.01	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	1.348.300.369.478,00	0,00	0,00	1.348.300.369.478,00	0,00	252.709.206.609,00	1.095.591.162.869,00
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.947.375.414,63	0,00	0,00	3.947.375.414,63	0,00	346.854.377,12	3.600.521.037,51
2.2.03.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta	3.947.375.414,63	0,00	0,00	3.947.375.414,63	0,00	346.854.377,12	3.600.521.037,51

L

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											7.621.477.522,23	19.013.940.968,03
1	IMTA	AMICHAJ SHLOMO GANIEL	PT. PURI SARI LESTARI	PROVINSI BALI	18/10/2022	12 Bulan	11/01/2023	10/01/2024	18.120.000,00	49.643,84	365	17.623.561,64	496.438,36
2	IMTA	BENJAMIN ARTHUR SORS	PT. PURI SARI LESTARI	PROVINSI BALI	18/10/2022	12 Bulan	15/01/2023	14/01/2024	18.120.000,00	49.643,84	365	17.424.986,30	695.013,70
3	IMTA	RANDOLFH KEVIN KLOER	PT. BALI HOMES MANAJEMEN	PROVINSI BALI	19/10/2022	12 Bulan	23/02/2023	22/02/2024	18.120.000,00	49.643,84	365	15.488.876,71	2.631.123,29
4	IMTA	VALENTINA RAMIREZ OCHOA	PT. APNEA BALI FREEDIVING	PROVINSI BALI	26/10/2022	12 Bulan	30/01/2023	29/01/2024	18.300.000,00	50.136,99	365	16.846.027,40	1.453.972,60
5	IMTA	ALAN WILLIAM PORTEOUS	BALI HOMES MANAJEMEN PT	PROVINSI BALI	22/11/2022	12 Bulan	31/01/2023	30/01/2024	18.420.000,00	50.465,75	365	16.906.027,40	1.513.972,60
6	IMTA	EYGENY FEKLISTOV	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	24/11/2022	12 Bulan	20/01/2023	19/01/2024	18.420.000,00	50.465,75	365	17.461.150,68	958.849,32
7	IMTA	DAVID MARCUS MARTIN NUETZEL	DESTINATION ASIA PT	PROVINSI BALI	24/11/2022	12 Bulan	20/01/2023	19/01/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	17.404.273,97	955.726,03
8	IMTA	BLAINE TREVOR TOMS	BALI MOON, PT.	PROVINSI BALI	08/12/2022	12 Bulan	05/01/2023	04/01/2024	18.060.000,00	49.479,45	365	17.862.082,19	197.917,81
9	IMTA	MICHAEL CHRISTOPHER KING	PT BUMI NATA LINDO	PROVINSI BALI	08/12/2022	12 Bulan	05/01/2023	04/01/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	18.158.794,52	201.205,48
10	IMTA	TEJADA EDWIN ALEX LORICO	PT MILLIE UTAMA SAKTI	PROVINSI BALI	08/12/2022	12 Bulan	15/01/2023	14/01/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	17.655.780,82	704.219,18
11	IMTA	ANASTASIA TITOVA	PT ALAMI OILAND SEMESTA	PROVINSI BALI	08/12/2022	12 Bulan	01/02/2023	31/01/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	16.800.657,53	1.559.342,47
12	IMTA	AKI KOZEKI	PURI ZUONI PT	PROVINSI BALI	08/12/2022	12 Bulan	13/01/2023	12/01/2024	18.295.450,00	50.124,52	365	17.893.955,75	601.494,25
13	IMTA	ANNA MARIE RICHARDSON	PT. TIRTA SEMARA	PROVINSI BALI	09/12/2022	12 Bulan	22/01/2023	21/01/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	17.303.671,23	1.056.328,77
14	IMTA	JESUS GISBERT CARBONELL	HOTEL PANDAN ARUM PT	PROVINSI BALI	20/12/2022	12 Bulan	15/01/2023	14/01/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	17.655.780,82	704.219,18
15	IMTA	PHILIPPE LOUIS MAURICE BONFILS	BALI AGUNG WATERS PT.	PROVINSI BALI	20/12/2022	12 Bulan	06/02/2023	05/02/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	16.549.150,68	1.810.849,32
16	IMTA	NICOLAS FRANCOIS KARL LIOT	Concepts Selam Indonesia PT	PROVINSI BALI	26/12/2022	12 Bulan	22/01/2023	21/01/2024	18.300.000,00	50.136,99	365	17.247.123,29	1.052.876,71
17	IMTA	NICOLAS JEAN PAUL DENIS PATRICK SENES	BALI GIRIKENCANA PT	PROVINSI BALI	26/12/2022	12 Bulan	15/02/2023	14/02/2024	18.300.000,00	50.136,99	365	16.043.835,62	2.256.164,38
18	IMTA	HERBERT MARLIN WATTS	ANUGRAH MERTA SARI SEDANA PT	PROVINSI BALI	28/12/2022	12 Bulan	19/02/2023	18/02/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	15.895.232,88	2.464.767,12
19	IMTA	LEANNE GAYE WINCH	BALI 66 CITRA PERSADA PT	PROVINSI BALI	28/12/2022	12 Bulan	27/01/2023	26/01/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	17.302.164,38	1.307.835,62
20	IMTA	CYRIL OBOJTEK	ATLANTIS INTERNATIONAL PT	PROVINSI BALI	29/12/2022	12 Bulan	01/02/2023	31/01/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	16.800.657,53	1.559.342,47
21	IMTA	RAEL SEBASTIAN HUTCHISON	PT ASIA CONCIERGE INDONESIA	PROVINSI BALI	29/12/2022	12 Bulan	08/02/2023	07/02/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	16.448.547,95	1.911.452,05
22	PTKA	SUSAN BAKER	PT. TRI PRABU LOKA	PROVINSI BALI	02/01/2023	12 Bulan	13/01/2023	12/01/2024	18.360.000,00	50.301,37	365	17.756.383,56	603.616,44
23	PTKA	AMANDA JULIE GALE	PT. SHAMBALA PYG. INDAH	PROVINSI BALI	02/01/2023	12 Bulan	15/03/2023	14/03/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	14.647.868,85	3.712.131,15
24	PTKA	EMMA JO ROSS	PT. ELEVATION BARN IND.	PROVINSI BALI	12/01/2023	12 Bulan	17/02/2023	16/02/2024	18.300.000,00	50.136,99	365	15.943.561,64	2.356.438,36
25	PTKA	ASHLEY LEONARD GARVEY	PT. SHAN RESTORAN BALI	PROVINSI BALI	17/01/2023	12 Bulan	20/02/2023	19/02/2024	17.640.000,00	48.328,77	365	15.223.561,64	2.416.438,36
26	PTKA	CARL ERIKSON. M. GICA	PT. SHAN RESTORAN BALI	PROVINSI BALI	17/01/2023	12 Bulan	06/02/2023	05/02/2024	17.640.000,00	48.328,77	365	15.900.164,38	1.739.835,62
27	PTKA	MICHAEL KARL BUGDOLL	PT. SMART ADV. SOLUTIONS	PROVINSI BALI	19/01/2023	12 Bulan	12/02/2023	11/02/2024	17.820.000,00	48.821,92	365	15.769.479,45	2.050.520,55
28	PTKA	YONES RAHMATI	PT. MACHINE INSPIRED ART	PROVINSI BALI	19/01/2023	12 Bulan	20/01/2023	19/01/2024	17.820.000,00	48.821,92	365	16.892.383,56	927.616,44
29	PTKA	NGO MAY CHAU	PT. GAIRAH SCUBA INDO	PROVINSI BALI	25/01/2023	12 Bulan	28/01/2023	27/01/2024	18.120.000,00	49.643,84	365	16.779.616,44	1.340.383,56
30	PTKA	NAOKO FUJIKAWA	PT. HARMONI BALI SEJAHTERA	PROVINSI BALI	25/01/2023	12 Bulan	29/01/2023	28/01/2024	17.640.000,00	48.328,77	365	16.286.794,52	1.353.205,48
31	PTKA	IVAN DAVID LAVELLE	PT. PUTRA SMDR. MENYELAM	PROVINSI BALI	25/01/2023	12 Bulan	16/02/2023	15/02/2024	17.640.000,00	48.328,77	365	15.416.876,71	2.223.123,29
32	PTKA	GEORGE EPHRAIM EWTON	PT. MILLIE UTAMA SAKTI	PROVINSI BALI	27/01/2023	12 Bulan	04/02/2023	03/02/2024	17.520.000,00	48.000,00	365	15.888.000,00	1.632.000,00
33	PTKA	WELH LEAH JANE	PT. SHAN RESTORAN BALI	PROVINSI BALI	27/01/2023	12 Bulan	21/02/2023	20/02/2024	17.520.000,00	48.000,00	365	15.072.000,00	2.448.000,00
34	PTKA	CARRIE BRADFORD JAMES	PT. SHAN RESTORAN BALI	PROVINSI BALI	27/01/2023	12 Bulan	19/02/2023	18/02/2024	17.520.000,00	48.000,00	365	15.168.000,00	2.352.000,00
35	PTKA	NOURA BEN SALAH	PT. ELEVEN HOSPITALITY GRUP.	PROVINSI BALI	27/01/2023	12 Bulan	22/01/2023	21/01/2024	17.580.000,00	48.164,38	365	16.568.547,95	1.011.452,05
36	PTKA	ANDREI OVCHINNIKOV	PT. ACCESS ASIA HOLIDAY	PROVINSI BALI	20/01/2023	12 Bulan	11/01/2023	10/01/2024	17.327.700,00	47.473,15	365	16.852.968,49	474.731,51
37	PTKA	DANIELLE FRANCES WAGNER	PT. SURRYA MIMPI	PROVINSI BALI	01/02/2023	12 Bulan	06/02/2023	05/02/2024	17.580.000,00	48.164,38	365	15.846.082,19	1.733.917,81
38	PTKA	CHARLES K.S. STAMBOLIEFF	PT. SARANA PANTAI M. SENTOSA	PROVINSI BALI	01/02/2023	12 Bulan	09/02/2023	08/02/2024	17.580.000,00	48.164,38	365	15.701.589,04	1.878.410,96
39	PTKA	KIRAN BEENA VIJAY	PT. INDAH PERMATA PULAU	PROVINSI BALI	03/02/2023	12 Bulan	20/02/2023	19/02/2024	17.460.000,00	47.835,62	365	15.068.219,18	2.391.780,82
40	PTKA	KYLIE LAURETTE TURNER	PT. BALI OCEAN MAGIC	PROVINSI BALI	07/02/2023	12 Bulan	02/03/2023	01/03/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	14.700.000,00	2.940.000,00
41	PTKA	PAOLO ZANCANARO	PT. NAMU CEMPAKA BALI	PROVINSI BALI	09/02/2023	12 Bulan	03/03/2023	02/03/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	14.751.475,41	3.008.524,59
42	PTKA	TANYA ALISA WATSON	PT. PUTRA NADI WIBAWA	PROVINSI BALI	09/02/2023	12 Bulan	14/02/2023	13/02/2024	17.760.000,00	48.657,53	365	15.619.068,49	2.140.931,51
43	PTKA	ALEXANDR SAVITSKII	PT. BALI YOGA PROFESIONAL	PROVINSI BALI	09/02/2023	12 Bulan	17/02/2023	16/02/2024	17.760.000,00	48.657,53	365	15.473.095,89	2.286.904,11
44	PTKA	DARREN CARL WARBURTON	PT. DIVE RESORT INTERNASIONAL	PROVINSI BALI	09/02/2023	12 Bulan	06/02/2023	05/02/2024	17.760.000,00	48.657,53	365	16.008.328,77	1.751.671,23
45	PTKA	DAVINA JAYNE STEPHENS	PT. ANUGRAH MERTASARI SEDANA	PROVINSI BALI	13/02/2023	12 Bulan	24/03/2023	23/03/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	13.732.459,02	4.027.540,98
46	PTKA	THOMAS MAURICE RETUREAU	PT. SOLAR POWER INDONESIA	PROVINSI BALI	10/02/2023	12 Bulan	17/04/2023	16/04/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	12.567.868,85	5.192.131,15
47	PTKA	MARK ALEXANDER TULLOCH	PT. PESONA AUSTINA PROPERTY	PROVINSI BALI	10/02/2023	12 Bulan	23/03/2023	22/03/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	13.780.983,61	3.979.016,39
48	PTKA	HIRAM SALVADOR GARCIA RIOS	PT. YUME DAPOR BALI	PROVINSI BALI	14/02/2023	12 Bulan	06/03/2023	05/03/2024	17.820.000,00	48.888,52	366	14.655.245,90	3.164.754,10
49	PTKA	HOLGER MESSERLE	PT. MILLIE UTAMA SAKTI	PROVINSI BALI	16/02/2023	12 Bulan	14/02/2023	13/02/2024	17.820.000,00	48.821,92	365	15.671.835,62	2.148.164,38
50	PTKA	DARIO PETRINO	PT. PARAS AGUNG BALI	PROVINSI BALI	17/02/2023	12 Bulan	08/02/2023	07/02/2024	17.820.000,00	48.821,92	365	15.964.767,12	1.855.232,88
51	PTKA	EDGAR DE LUNA BERNAL	PT. KOMUNITAS LAUT NUSANTARA	PROVINSI BALI	22/02/2023	12 Bulan	22/02/2023	21/02/2024	17.820.000,00	48.821,92	365	15.281.260,27	2.538.739,73
52	PTKA	PANWAR MAGAN SINGH	PT. INDILA BALI JAYA	PROVINSI BALI	23/02/2023	12 Bulan	13/03/2023	12/03/2024	17.820.000,00	48.888,52	366	14.314.426,23	3.505.573,77
53	PTKA	ZACHARY JOHN HOLTMAN	PT. DWI MITRA NUSANTARA	PROVINSI BALI	24/02/2023	12 Bulan	07/03/2023	06/03/2024	17.820.000,00	48.888,52	366	14.606.557,38	3.213.442,62
54	PTKA	CHEN JIAOJIAO	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	24/02/2023	12 Bulan	12/02/2023	11/02/2024	17.820.000,00	48.821,92	365	15.769.479,45	2.050.520,55
55	PTKA	NOELLA MARIA L. MARBAIX	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	24/02/2023	12 Bulan	04/02/2023	03/02/2024	17.820.000,00	48.821,92	365	16.160.054,79	1.659.945,21
56	PTKA	IAN RODGERS BELKNAP	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	24/02/2023	12 Bulan	16/03/2023	15/03/2024	17.820.000,00	48.888,52	366	14.168.360,66	3.651.639,34
57	PTKA	EYGENY KRUTSCHKH	PT. MUAYTHAI AND MIXED ARTS.	PROVINSI BALI	28/02/2023	12 Bulan	12/04/2023	11/04/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	12.897.049,18	4.982.950,82
58	PTKA	LAWSON JAMES CALLAWAY	PT. OCEAN BLUE MUTIARA	PROVINSI BALI	28/02/2023	12 Bulan	13/03/2023	12/03/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	14.362.622,95	3.517.377,05
59	PTKA	ADRIEN BRUNO M DEULIN	PT. LIMAJARI INTERBUJANA	PROVINSI BALI	28/02/2023	12 Bulan	14/05/2023	13/05/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	11.333.770,49	6.546.229,51
60	PTKA	BENOIT. CLAUDINE. MARIE DESTRESSE	SPEEDOC PTE. LTD										

No.	Uraian	NAMA PENYEWAJ/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											7.621.477.622,23	19.013.940.968,03
71	PTKA	WILLIAMS STEPHEN LEONARD NIGEL	BRAZILIAN AUSSIE BBQ, PT.	PROVINSI BALI	28/03/2023	12 Bulan	21/04/2023	20/04/2024	17.820.000,00	48.688,52	366	12.415.573,77	5.404.426,23
72	PTKA	ANDREA ABIAN CERVELLO	PT. GURU YOGA CANGGU	PROVINSI BALI	30/03/2023	12 Bulan	26/06/2023	25/06/2024	17.700.000,00	48.360,66	366	9.140.163,93	8.559.836,07
73	PTKA	ROBERT SHARAFUTDINOV	PT. WOODEN FISH VILLAGE	PROVINSI BALI	31/03/2023	12 Bulan	15/04/2023	14/04/2024	17.700.000,00	48.360,66	366	12.622.131,15	5.077.868,85
74	PTKA	ARNE HANSEN	PT. GRIYA SEVA NUSANTARA	PROVINSI BALI	31/03/2023	12 Bulan	22/03/2023	21/03/2024	17.700.000,00	48.360,66	366	13.782.786,89	3.917.213,11
75	PTKA	FABIO ALDERIGI	PT. KULINER ARTISAN ITALIA	PROVINSI BALI	31/03/2023	12 Bulan	19/06/2023	18/06/2024	17.700.000,00	48.360,66	366	9.478.688,52	8.221.311,48
76	PTKA	OSAMU FUJIKAWA	HARMONI BALI SEJAHTERA, PT.	PROVINSI BALI	05/04/2023	12 Bulan	23/04/2023	22/04/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	12.152.295,08	5.427.704,92
77	PTKA	JAMES HENDY	JAROSITE, PT	PROVINSI BALI	06/04/2023	12 Bulan	13/07/2023	12/07/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	8.261.639,34	9.318.360,66
78	PTKA	CHRISTINA RENSCHE	THE TROVE GROUP	PROVINSI BALI	11/04/2023	12 Bulan	19/05/2023	18/05/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	10.934.442,62	6.676.557,38
79	PTKA	RANDY NOBORU SHIMABUKU	BALI GIRIKENCANA, PT.	PROVINSI BALI	12/04/2023	12 Bulan	19/06/2023	18/06/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	9.382.295,08	8.137.704,92
80	PTKA	LIAM JAMES MICHAEL NEALEON	BALI GIRIKENCANA, PT.	PROVINSI BALI	12/04/2023	12 Bulan	28/06/2023	27/06/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	8.951.475,41	8.568.524,59
81	PTKA	ORIN ALEXANDER NEALBERTON HARDY	BAMBOO PURE, PT	PROVINSI BALI	13/04/2023	12 Bulan	23/04/2023	22/04/2024	17.460.000,00	47.704,92	366	12.069.344,26	5.390.655,74
82	PTKA	ARTUR MUSTAEV	PT PURE DIVE RESORT	PROVINSI BALI	14/04/2023	12 Bulan	11/05/2023	10/05/2024	17.280.000,00	47.213,11	366	11.095.081,97	6.184.918,03
83	PTKA	KAYU KOGAKE VIANNA	PT SETIAP HARI HARUM	PROVINSI BALI	18/04/2023	12 Bulan	01/05/2023	30/04/2024	17.400.000,00	47.540,98	366	11.647.540,98	5.752.459,02
84	PTKA	ELIANA HARUMI KOGAKE	PT SETIAP HARI HARUM	PROVINSI BALI	18/04/2023	12 Bulan	01/05/2023	30/04/2024	17.400.000,00	47.540,98	366	11.647.540,98	5.752.459,02
85	PTKA	KAORI ISHINO	DEMONIA PERKASA, PT.	PROVINSI BALI	28/04/2023	12 Bulan	02/05/2023	01/05/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	11.680.000,00	5.840.000,00
86	PTKA	HENRY GIOVANNI SCOTT	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	28/04/2023	12 Bulan	21/06/2023	20/06/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	9.286.557,38	8.233.442,62
87	PTKA	MAX WILLIAM CHARLES MUNRO	PT. BALI YOGA PROFESIONAL	PROVINSI BALI	27/04/2023	12 Bulan	19/06/2023	18/06/2024	17.460.000,00	47.704,92	366	9.350.163,93	8.109.836,07
88	PTKA	ANDREIS SENKOV	PT. SKY STARS VILLA	PROVINSI BALI	27/04/2023	12 Bulan	07/05/2023	06/05/2024	17.460.000,00	47.704,92	366	11.401.475,41	6.058.524,59
89	PTKA	PAUL KEVIN TANNER	PADI ASIA PASIFIC INDONESIA, PT.	PROVINSI BALI	02/05/2023	12 Bulan	23/05/2023	22/05/2024	17.280.000,00	47.213,11	366	10.528.524,59	6.751.475,41
90	PTKA	LAURA RUIZ MONFORT	PT. BALI INTERIOR PERSADA	PROVINSI BALI	03/05/2023	12 Bulan	13/05/2023	12/05/2024	17.220.000,00	47.049,18	366	10.962.459,02	6.257.540,98
91	PTKA	YUKARI MATSUEDA	AMANDA ARUMDHANI, PT.	PROVINSI BALI	04/05/2023	12 Bulan	19/02/2023	18/02/2024	17.280.000,00	47.342,47	365	14.960.219,18	2.319.780,82
92	PTKA	CLEMENT YANNICK JEAN CLAUDE	PT. MANIK SEKECAP BALI	PROVINSI BALI	04/05/2023	12 Bulan	06/05/2023	05/05/2024	17.280.000,00	47.213,11	366	11.331.147,54	5.948.852,46
93	PTKA	MCKNIGHT LISA JANE	TUBUH PIKIRAN SEHAT PT.	PROVINSI BALI	05/05/2023	12 Bulan	10/05/2023	09/05/2024	17.160.000,00	46.885,25	366	11.064.918,03	6.095.081,97
94	PTKA	MIAN ANTON VAN SHALCKWYK	PT. BUMI MATA LINDO	PROVINSI BALI	09/05/2023	12 Bulan	23/05/2023	22/05/2024	17.280.000,00	47.213,11	366	10.528.524,59	6.751.475,41
95	PTKA	GUILLEMO ALCARAZ LINARES	PT. ALCARAZ MARMERINDO JAYA	PROVINSI BALI	09/05/2023	12 Bulan	05/05/2023	04/05/2024	17.280.000,00	47.213,11	366	11.378.360,66	5.901.639,34
96	PTKA	MARC JOSEPH BERNARD LETARTE	BALI BACI PT	PROVINSI BALI	10/05/2023	12 Bulan	19/07/2023	18/07/2024	17.340.000,00	47.377,05	366	7.864.590,16	9.475.409,84
97	PTKA	JESSIE NOY LITTLE	SINAR SAMUDRA SEMPURNA, PT.	PROVINSI BALI	10/05/2023	12 Bulan	12/05/2023	11/05/2024	17.340.000,00	47.377,05	366	11.086.229,51	6.253.770,49
98	PTKA	REBECCA AUDREY ROWEY ROBERTS	MANGGALA BALI KREASI, PT.	PROVINSI BALI	10/05/2023	12 Bulan	18/05/2023	17/05/2024	17.340.000,00	47.377,05	366	10.801.967,21	6.538.032,79
99	PTKA	SANDRO RUDY MEDRANO MONTERO	PURI ZIQUIN, PT	PROVINSI BALI	12/05/2023	12 Bulan	31/05/2023	30/05/2024	17.280.000,00	47.213,11	366	10.150.819,67	7.129.180,33
100	PTKA	CHRISTOPER JOHN SALAS	MUZAIC PT	PROVINSI BALI	19/05/2023	12 Bulan	05/07/2023	04/07/2024	17.460.000,00	47.704,92	366	8.586.885,25	8.873.114,75
101	PTKA	DENNIS ROBERT WALKER	BAMBU BAMBU PT	PROVINSI BALI	22/05/2023	12 Bulan	07/08/2023	06/08/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	7.036.721,31	10.483.278,69
102	PTKA	GIANNI COSTA	AMANDA ARUMDHANI, PT.	PROVINSI BALI	23/05/2023	12 Bulan	02/07/2023	01/07/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	8.760.000,00	8.760.000,00
103	PTKA	KARIN VAN BEECK	ACTIVE WATERS PT	PROVINSI BALI	24/05/2023	12 Bulan	01/07/2023	30/06/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	8.807.868,85	8.712.131,15
104	PTKA	SHANE ANDREW VEENSTRA	SHAMBALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	24/05/2023	12 Bulan	06/06/2023	05/06/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	10.004.590,16	7.515.409,84
105	PTKA	CAMERON MARK FIDLER	PT. EFFICIENT ENERGY SOLUTIONS	PROVINSI BALI	24/05/2023	12 Bulan	26/05/2023	25/05/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	10.531.147,54	8.868.852,46
106	PTKA	LIUSA ANDERSON	BALI GIRIKENCANA PT	PROVINSI BALI	25/05/2023	12 Bulan	14/07/2023	13/07/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	8.185.573,77	9.334.426,23
107	PTKA	RAFFAELE BRUGNONO	BALI GIRIKENCANA PT	PROVINSI BALI	25/05/2023	12 Bulan	09/07/2023	08/07/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	8.424.918,03	9.095.081,97
108	PTKA	MARLENE KYROENON	PT. PARAS AGUNG BALI	PROVINSI BALI	25/05/2023	12 Bulan	15/06/2023	14/06/2024	17.520.000,00	49.772,73	352	9.954.545,45	7.565.454,55
109	PTKA	BEATRICE FLORENCE BOUVIER	PT. KARMA KOMA ORIGIN	PROVINSI BALI	26/05/2023	12 Bulan	03/08/2023	02/08/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	7.252.950,82	10.327.049,18
110	PTKA	TEREZA FILIPOVA	SHAMBALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	26/05/2023	12 Bulan	06/06/2023	05/06/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	10.038.852,46	7.541.147,54
111	PTKA	JOHN TAGE GRINDLAY NIELSEN	FIVELEMENTS PT/PURI AHIMSA	PROVINSI BALI	29/05/2023	12 Bulan	28/06/2023	27/06/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	8.982.131,15	8.597.868,85
112	PTKA	PAMELA CORREA		PROVINSI BALI	29/05/2023	12 Bulan	19/08/2023	18/08/2024	17.730.000,00	48.442,62	366	6.539.754,10	11.190.245,90
113	PTKA	CHRISTOPER JOHN JAMES	BILLABONG INDONESIA PT	PROVINSI BALI	30/05/2023	12 Bulan	14/04/2023	13/04/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	12.584.590,16	4.995.409,84
114	PTKA	SASKIA ANNA ADRIANA WERTHER	PT. TEMMAX FIRE INVESTMENTS	PROVINSI BALI	30/05/2023	12 Bulan	04/07/2023	03/07/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	8.693.934,43	8.886.065,57
115	PTKA	NATHAN MARK RYAN	PESONA ALAM NIRWANA PROPERTY, PT.	PROVINSI BALI	31/05/2023	12 Bulan	05/06/2023	04/06/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	10.086.885,25	7.493.114,75
116	PTKA	ANNA NEBOSOVA	PT. WOODEN FISH VILLAGE	PROVINSI BALI	31/05/2023	12 Bulan	14/07/2023	13/07/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	8.213.606,56	9.366.393,44
117	PTKA	LUCIANO ANTONIO DA SILVA	BRAZILIAN AUSSIE BBQ, PT.	PROVINSI BALI	31/05/2023	12 Bulan	23/06/2023	22/06/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	9.222.295,08	8.357.704,92
118	PTKA	MAKOTO NAKAMURA	PT. KIZUNA JEPANG INDONESIA	PROVINSI BALI	05/06/2023	12 Bulan	28/08/2023	27/08/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	6.072.786,89	11.567.213,11
119	PTKA	DAVID SHWAN MAC LEAN	WYNNCOR BALI, PT.	PROVINSI BALI	05/06/2023	12 Bulan	14/06/2023	13/06/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	9.687.540,98	7.952.459,02
120	PTKA	SHAE MICHAEL ROBERT MACNAMARA	PT. SEBELUM BADAI TENANG	PROVINSI BALI	05/06/2023	12 Bulan	15/07/2023	14/07/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	8.193.442,62	9.446.557,38
121	PTKA	NICHOLE SHAAKIRA HEYDER	PT. HOLISTIK YOGA LESTARI	PROVINSI BALI	09/06/2023	12 Bulan	11/07/2023	10/07/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	8.329.180,33	9.190.819,67
122	PTKA	AMELIA RUMMEL	ANGELIQUES YOGA STUDIO, PT.	PROVINSI BALI	09/06/2023	12 Bulan	28/07/2023	27/07/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	7.515.409,84	10.004.590,16
123	PTKA	SIMONETTA QUARTI	QUARZIA BATIK BALI, PT.	PROVINSI BALI	15/06/2023	12 Bulan	06/07/2023	05/07/2024	17.460.000,00	47.704,92	366	8.539.180,33	8.920.819,67
124	PTKA	MARCO LASTRUCCI	QUARZIA BATIK BALI, PT.	PROVINSI BALI	15/06/2023	12 Bulan	03/08/2023	02/08/2024	17.460.000,00	47.704,92	366	7.203.442,62	10.256.557,38
125	PTKA	PETR HINDRICH	YAYASAN GREEN BOOKS INDONESIA	PROVINSI BALI	19/06/2023	12 Bulan	28/07/2023	27/07/2024	17.520.000,00	47.868,85	366	7.515.409,84	10.004.590,16
126	PTKA	RICHARDS DRARG MARK	JIWA DIMANGKOK BALI, PT.	PROVINSI BALI	21/06/2023	12 Bulan	13/08/2023	12/08/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	6.795.737,70	10.844.262,30
127	PTKA	QUIRLIN ALPHONS REGNAULD RADEMAKER	BALI 66 CITRA PERSADA PT.	PROVINSI BALI	22/06/2023	12 Bulan	02/08/2023	01/08/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	7.325.901,64	10.314.098,36
128	PTKA	GREEN CLAIRE LOUISE	PT. YOGA SELAM INDONESIA	PROVINSI BALI	23/06/2023	6 Bulan	12/07/2023	11/01/2024	8.790.000,00	47.771,74	184	8.264.510,87	525.489,13
129	PTKA	ARADHANA KAISHI IYER VOHRA	VOHRA PTE. LTD	PROVINSI BALI	23/06/2023	12 Bulan	20/07/2023	19/07/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	7.925.409,84	9.654.590,16
130	PTKA	CHRISTOPHER NAUDE	BALI OCEAN ADVENTURE, PT.	PROVINSI BALI	23/06/2023	6 Bulan	05/07/2023	04/01/2024	8.790.000,00	47.771,74	184	8.598.913,04	191.086,9

No.	Uraian	NAMA PENYEWAJ/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											7.621.477.622,23	19.013.940.968,03
146	PTKA	JULIEN ALBERIC R. BOGAERTS	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT.	PROVINSI BALI	13/07/2023	6 Bulan	13/07/2023	12/01/2024	8.244.782,61	47.934,78	184	8.244.782,61	575.217,39
147	PTKA	EVGENIYA SUPRNN	PT. ORIENTAL BALI CONSULTING	PROVINSI BALI	13/07/2023	12 Bulan	07/09/2023	06/09/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	5.590.819,67	12.049.180,33
148	PTKA	ALEXANDER VASKOV	PT LOTUS BALI CONSULTING	PROVINSI BALI	13/07/2023	12 Bulan	22/07/2023	21/07/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	7.856.065,57	9.783.934,43
149	PTKA	MICHAEL BRIAN LANGILLE	YAYASAN JEMBATAN BUDAYA	PROVINSI BALI	13/07/2023	12 Bulan	11/08/2023	10/08/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	6.892.131,15	10.747.868,85
150	PTKA	PIERRE ALEXANDRE GONZALES	PT. BOLD ELECTRIC BIKES	PROVINSI BALI	14/07/2023	12 Bulan	25/07/2023	24/07/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	7.685.245,90	9.894.754,10
151	PTKA	NICHOLAS MARTINE DELACRESSONNIERE	PT. SUMBER AIR DEWA	PROVINSI BALI	14/07/2023	12 Bulan	31/07/2023	30/07/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	7.397.049,18	10.182.950,82
152	PTKA	SARATH SASHIDARAN	KARYA TANGAN SENI, PT.	PROVINSI BALI	17/07/2023	12 Bulan	20/08/2023	19/08/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	6.436.393,44	11.143.606,56
153	PTKA	ENG BOON CHIENG	INTI DUFREE PROMOSINDO, PT.	PROVINSI BALI	18/07/2023	12 Bulan	17/08/2023	16/08/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	6.580.491,80	10.999.508,20
154	PTKA	SPENCER WILLIAM HANSEN	PT. BALI SAFARI BUMI	PROVINSI BALI	18/07/2023	12 Bulan	08/08/2023	07/08/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	7.012.786,89	10.567.213,11
155	PTKA	MITCHELL JOHN RILETT	HARMONI INDAH BALI, PT.	PROVINSI BALI	18/07/2023	12 Bulan	03/08/2023	02/08/2024	17.580.000,00	48.032,79	366	7.252.950,82	10.327.049,18
156	PTKA	BOB ENDRIKO HARING	PT. LUMINARY DIGITAL BALI	PROVINSI BALI	21/07/2023	12 Bulan	13/08/2023	12/08/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	6.795.737,70	10.844.262,30
157	PTKA	FABRICE BRUTO	PT. THE CRISPY TOC TOC	PROVINSI BALI	21/07/2023	12 Bulan	30/07/2023	29/07/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	7.470.491,80	10.169.508,20
158	PTKA	GERALDINE CAROLE JAPY	PT. NEO PAPAZIAN BERNIAGA	PROVINSI BALI	24/07/2023	12 Bulan	26/07/2023	25/07/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	7.663.278,69	9.976.721,31
159	PTKA	CHRISTOPHER JAMES NEWBOULD	SOLUSI TIMUR BARAT, PT.	PROVINSI BALI	24/07/2023	12 Bulan	26/07/2023	25/07/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	7.663.278,69	9.976.721,31
160	PTKA	NICOLAS PIERRE ANTOINE GRAZIANA	PT. ORIENTAL BALI CONSULTING	PROVINSI BALI	25/07/2023	12 Bulan	27/09/2023	26/09/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	4.626.885,25	13.013.114,75
161	PTKA	BENGOT PAL KRISTEL ASKANER	PT. BALI TANPA BATAS	PROVINSI BALI	25/07/2023	12 Bulan	17/08/2023	16/08/2024	17.640.000,00	48.196,72	366	6.602.950,82	11.037.049,18
162	PTKA	PHAM PHUOC QUOC	PT. GARAH SCUBA INDO	PROVINSI BALI	04/08/2023	12 Bulan	19/08/2023	18/08/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	6.550.819,67	11.209.180,33
163	PTKA	VIKRAM SINGH	PT. BOLLYWOOD INDIAN CUISINE	PROVINSI BALI	04/08/2023	12 Bulan	12/09/2023	11/09/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	5.386.229,51	12.373.770,49
164	PTKA	BRETT SORENSEN	PT. SINAR CERAH BERLIAN	PROVINSI BALI	04/08/2023	12 Bulan	17/08/2023	16/08/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	6.647.868,85	11.112.131,15
165	PTKA	RAE ANNE JANET GOUYETTE	TRAVLR GUIDES INDONESIA, PT.	PROVINSI BALI	07/08/2023	12 Bulan	16/09/2023	15/09/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	5.192.131,15	12.567.868,85
166	PTKA	LEAH MICHELE PERRON	TRAVLR GUIDES INDONESIA, PT.	PROVINSI BALI	07/08/2023	12 Bulan	13/09/2023	12/09/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	5.337.704,92	12.222.295,08
167	PTKA	LAIN CHARLES NEISH	PT. SEA SIX ENERGY INDONESIA	PROVINSI BALI	07/08/2023	12 Bulan	05/10/2023	04/10/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	4.270.163,93	13.489.836,07
168	PTKA	MAXINE CAROL ANN SYLVESTER	BALI OCEAN ADVENTURE, PT.	PROVINSI BALI	07/08/2023	12 Bulan	12/08/2023	11/08/2024	17.760.000,00	48.524,59	366	6.890.491,80	10.869.508,20
169	PTKA	ULRIKE MARIA REINHOLD	BALI MEDIA KOMERSIAL, PT.	PROVINSI BALI	08/08/2023	12 Bulan	29/08/2023	28/08/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	6.106.557,38	11.773.442,62
170	PTKA	NORHIKO YAMAMOTO	YAYASAN PERSAHABATAN JEPANG BALI	PROVINSI BALI	08/08/2023	12 Bulan	02/09/2023	01/09/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	5.911.147,54	11.968.852,46
171	PTKA	MARIE ROSE MAURICIO ESPANOL	PT. GLOBAL VISA INTERNATIONAL	PROVINSI BALI	08/08/2023	12 Bulan	07/10/2023	06/10/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	4.201.311,48	13.678.688,52
172	PTKA	BRETT ANTONY CHITTENDEN	SARANA PANTAI MITRA SENTOSA, PT	PROVINSI BALI	09/08/2023	12 Bulan	27/08/2023	26/08/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	6.204.262,30	11.675.737,70
173	PTKA	AUDREY ISABELLE GABARD	PT. YOGA SELAM INDONESIA	PROVINSI BALI	10/08/2023	12 Bulan	21/08/2023	20/08/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	6.497.377,05	11.382.622,95
174	PTKA	BENJAMIN WAKEFIELD	PT. USADA ALAMI BAGUS	PROVINSI BALI	10/08/2023	12 Bulan	29/08/2023	28/08/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	6.106.557,38	11.773.442,62
175	PTKA	CARISSA ANN DZADOWICZ	PT. AKSI HEWAN BAGUS	PROVINSI BALI	14/08/2023	12 Bulan	23/09/2023	22/09/2024	17.940.000,00	49.016,39	366	4.901.639,34	13.038.360,66
176	PTKA	MANON MEERTENS	DESTINATION ASIA, PT	PROVINSI BALI	15/08/2023	12 Bulan	14/08/2023	13/08/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	6.885.245,90	11.114.754,10
177	PTKA	FINBARR MAGNUS IRVIN STUBBS	PT. SOLUSI BERLAYAR CEMERLANG	PROVINSI BALI	15/08/2023	12 Bulan	14/09/2023	13/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	5.360.655,74	12.639.344,26
178	PTKA	MATTHEW JOHN MBYE	PT. SANTAI RECOVERY SPA	PROVINSI BALI	15/08/2023	12 Bulan	02/09/2023	01/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	5.950.819,67	12.049.180,33
179	PTKA	CARLA MAE LOIS GABRIEL PISCOCO	PT. LOTUS BALI CONSULTING	PROVINSI BALI	16/08/2023	12 Bulan	03/09/2023	02/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	5.901.639,34	12.098.360,66
180	PTKA	ADITYA KUMAR MEHTA	BALI GIRIKENCANA, PT.	PROVINSI BALI	16/08/2023	12 Bulan	24/09/2023	23/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	4.868.852,46	13.131.147,54
181	PTKA	SCHAEFER MARC CHRISTIAN J	MIMI NYATA BALI, PT.	PROVINSI BALI	18/08/2023	12 Bulan	26/08/2023	25/08/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	6.295.081,97	11.704.819,67
182	PTKA	SVETLANA LININA	PT. MIMPI MANIS INDONESIA	PROVINSI BALI	18/08/2023	12 Bulan	16/09/2023	15/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	5.262.295,08	12.737.704,92
183	PTKA	PIT KUIJPER	YAYASAN NEDERLANDSE TAALEN CULTUUR	PROVINSI BALI	21/08/2023	12 Bulan	25/10/2023	24/10/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	3.344.262,30	14.655.737,70
184	PTKA	REGIS CRESPO	PT. FRENCH KISS DIVERS	PROVINSI BALI	22/08/2023	12 Bulan	09/09/2023	08/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	5.606.557,38	12.393.442,62
185	PTKA	JOHN CHARLES BECKER	PT RASA DUNIA BARU	PROVINSI BALI	22/08/2023	12 Bulan	16/09/2023	15/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	5.262.295,08	12.737.704,92
186	PTKA	STEVEN WILES	PT TWO FISI BALI	PROVINSI BALI	24/08/2023	12 Bulan	01/10/2023	30/09/2024	17.940.000,00	49.016,39	366	4.509.508,20	13.430.491,80
187	PTKA	MASAHIRO OISHI	TAMAN LAUT WISATA TIRTA PT.	PROVINSI BALI	25/08/2023	12 Bulan	07/09/2023	06/09/2024	17.940.000,00	49.016,39	366	5.685.901,64	12.254.098,36
188	PTKA	ANDRE FOURIE	BALI CRUISES NUSANTARA, PT.	PROVINSI BALI	29/08/2023	12 Bulan	07/12/2023	06/12/2024	17.940.000,00	49.016,39	366	1.225.409,84	16.714.590,16
189	PTKA	ARIEL BLENN BRUSAS	PT. EMERHUB EVENT MANAGEMENT	PROVINSI BALI	29/08/2023	12 Bulan	12/10/2023	11/10/2024	17.940.000,00	49.016,39	366	3.970.327,87	13.969.672,13
190	PTKA	OCTAVIAN LOGHIN	LIMAJARI INTERBUJANA, PT.	PROVINSI BALI	30/08/2023	12 Bulan	14/11/2023	13/11/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	2.344.918,03	15.535.081,97
191	PTKA	ICHIHARA KAZUO	GLORY RETAILINDO, PT.	PROVINSI BALI	31/08/2023	6 Bulan	27/09/2023	26/03/2024	8.940.000,00	49.120,88	182	4.715.604,40	4.224.395,60
192	PTKA	SHARAD SINHA	PT. AKO MICE AND LEISURE	PROVINSI BALI	04/09/2023	12 Bulan	25/10/2023	24/10/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	3.321.967,21	14.558.032,79
193	PTKA	AXELLE MARIE, ALIX BRESSON	MAGALI PASCAL, PT.	PROVINSI BALI	04/09/2023	12 Bulan	17/09/2023	16/09/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	5.178.360,66	12.701.639,34
194	PTKA	JUNNOSUKE NAKAMURA	APPKEY PT	PROVINSI BALI	04/09/2023	12 Bulan	29/09/2023	28/09/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	4.592.131,15	13.287.868,85
195	PTKA	DJANE JOHN MORTON	PT. BUMI MATALINDO	PROVINSI BALI	05/09/2023	12 Bulan	17/09/2023	16/09/2024	17.880.000,00	48.852,46	366	5.178.360,66	12.701.639,34
196	PTKA	FABIO DONATI	ACTIVE WATERS, PT	PROVINSI BALI	06/09/2023	12 Bulan	19/11/2023	18/11/2024	17.940.000,00	49.016,39	366	2.107.704,92	15.832.295,08
197	PTKA	GREGORY ALEXANDER GEORGE ELOY	SAWAH CANTIK SEKALI, PT	PROVINSI BALI	06/09/2023	12 Bulan	28/09/2023	27/09/2024	17.940.000,00	49.016,39	366	4.656.557,38	13.283.442,62
198	PTKA	MARIA PILAR NEBREDIA	PT. YOGA SELAM INDONESIA	PROVINSI BALI	07/09/2023	12 Bulan	27/09/2023	26/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	4.721.311,48	13.278.688,52
199	PTKA	ANDREA BAKKER	DESTANTION ASIA, PT.	PROVINSI BALI	07/09/2023	12 Bulan	01/10/2023	30/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	4.524.590,16	13.475.409,84
200	PTKA	ANDREAS JOERG GROSSKINSKY	PT. ASIA CONCIERGE INDONESIA	PROVINSI BALI	08/09/2023	12 Bulan	16/11/2023	15/11/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	2.262.295,08	15.737.704,92
201	PTKA	SERGIO CRESPO DEL RIO	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS	PROVINSI BALI	11/09/2023	12 Bulan	01/10/2023	30/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	4.524.590,16	13.475.409,84
202	PTKA	CARLOTTA MARIE ANNE DYEVE	PT. SMART ADVISORY SOLUTIONS	PROVINSI BALI	11/09/2023	12 Bulan	26/09/2023	25/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	4.770.491,80	13.229.508,20
203	PTKA	BLAKE OWEN THORLEY	MOZAIC, PT.	PROVINSI BALI	12/09/2023	12 Bulan	28/10/2023	27/10/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	3.196.721,31	14.803.278,69
204	PTKA	YASMIN AZURA CHURCH	CONCEPTS SELAM INDONESIA, PT.	PROVINSI BALI	13/09/2023	12 Bulan	27/09/2023	26/09/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	4.721.311,48	13.278.688,52
205	PTKA	DAVID IAN FIELD	FIELDWORKS, PT.	PROVINSI BALI	13/09/2023	12 Bulan	28/08/2023	27/08/2024	18.000.000,00	49.180,33	366	6.196.721,31	11.803.278,69
206	PTKA	BETRAND MARIE JACQUES MESLIN	LIMAJARI INTERBUJANA, PT.	PROVINSI BALI	15/09/2023	4 Bulan	25/10/2023	24/02/2024	6.020.130,08	48.943,09	123	3.328.130,08	2.691.869,92
207	PTKA	JAN JURECKA	BALI GIRIKENCANA, PT.	PROVINSI BALI	15/09/2023	12 Bulan	22/10/2023	21/10/2024	18.060.000,00	49.344,26	366	3.503.442,62	14.556.557,38
208	PTKA	ANASTASIA POPOVA	PT. MITRA JEMBA MANAJEMEN	PROVINSI BALI	15/09/2023	12 Bulan	20/10/2023	19/10/2024	18.060.000,00	49.344,26	366	3.602.131,15	14.457.868,85
209	PTKA	DAVID JOHN O BOYLE	PT. PUTRA BUANA NUSA	PROVINSI BALI	15/09/2023	12 Bulan	19/10/2023	18/10/2024	18.060.000,00	49.344,26	366	3.651.475,41	14.408.524,59
210	PTKA	JEANNE WELSH	PT. USADA ALAMI BAGUS	PROVINSI BALI	15/09/2023	12 Bulan	27/09/2023	26/09/2024	18.060.000,00	49.344,26	366	4.737.049,1	

No.	Uraian	NAMA PENYEWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
JUMLAH												7.621.477.622,23	19.013.940.968,03
221	PTKA	JOEL HINDSON	PT MAKANAN VEGAN MAJU	PROVINSI BALI	26/09/2023	12 Bulan	05/11/2023	04/11/2024	18.120.000,00	49.508,20	366	2.821.967,21	15.298.032,79
222	PTKA	FABRIZIO FERRANTE	PT. LUMINARY DIGITAL BALI	PROVINSI BALI	02/10/2023	12 Bulan	18/11/2023	17/11/2024	18.180.000,00	49.672,13	366	2.185.573,77	15.994.426,23
223	PTKA	HENSBY ROBERT GORDON	MITRA PRODIN, PT.	PROVINSI BALI	02/10/2023	12 Bulan	01/11/2023	31/10/2024	18.180.000,00	49.672,13	366	3.030.000,00	15.150.000,00
224	PTKA	AJIT KUMAR KHATAI	ULUWATU, PT.	PROVINSI BALI	03/10/2023	12 Bulan	10/10/2023	09/10/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	4.150.000,00	14.150.000,00
225	PTKA	RAVINDRA RAWAT	NEW DELHI INDIAN RESTAURANT, PT.	PROVINSI BALI	03/10/2023	12 Bulan	01/11/2023	31/10/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	3.050.000,00	15.250.000,00
226	PTKA	SEAN MICHAEL GILL	PT. BALI LEGAL INTERNATIONAL	PROVINSI BALI	03/10/2023	12 Bulan	02/11/2023	01/11/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	3.000.000,00	15.300.000,00
227	PTKA	SKYLER LEE GRANT	SUPA DUPA SPICE, PT	PROVINSI BALI	05/10/2023	12 Bulan	05/11/2023	04/11/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	2.850.000,00	15.450.000,00
228	PTKA	YEN CHEN CHANG	WYNNCOR BALI, PT	PROVINSI BALI	09/10/2023	12 Bulan	04/11/2023	03/11/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	2.909.508,20	15.450.491,80
229	PTKA	HERVE RICHARD RENE MAZELLA	WYNNCOR BALI, PT	PROVINSI BALI	09/10/2023	12 Bulan	23/12/2023	22/12/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	451.475,41	17.908.524,59
230	PTKA	ALEKSANDER DOMINIK MAJEWSKI TREFALL	POSITIVE GAMING BALL, PT.	PROVINSI BALI	09/10/2023	12 Bulan	19/11/2023	18/11/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	2.157.049,18	16.202.950,82
231	PTKA	NDRANIL RAMCHANDRA KHADAE	BALI GIRIKENCANA, PT.	PROVINSI BALI	09/10/2023	12 Bulan	03/11/2023	02/11/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	2.959.672,13	15.400.327,87
232	PTKA	ARTEM TIMOFEEV	KERAJAAN GARUDA, PT.	PROVINSI BALI	10/10/2023	12 Bulan	04/12/2023	03/12/2024	18.420.000,00	50.327,87	366	1.409.180,33	17.010.819,67
233	PTKA	AMY HELENA BENNET	PT. COMPLETE ISLAND LIVING	PROVINSI BALI	10/10/2023	12 Bulan	19/01/2024	18/01/2025	18.420.000,00	50.327,87	366	-	18.420.000,00
234	PTKA	MANFRED KARL HEINZ OSEINBRUGGE	PARADISE DIVING INDONESIA, PT.	PROVINSI BALI	11/10/2023	12 Bulan	01/12/2023	30/11/2024	18.480.000,00	50.491,80	366	1.565.245,90	16.914.754,10
235	PTKA	VINOD SINGH PANWAR	NEW DELHI INDIAN RESTAURANT, PT.	PROVINSI BALI	11/10/2023	12 Bulan	13/10/2023	12/10/2024	18.480.000,00	50.491,80	366	4.039.344,26	14.440.655,74
236	PTKA	EKREM REYHANCIOGLU	NAUTIC ASIA LIMITED	PROVINSI BALI	12/10/2023	12 Bulan	02/11/2023	01/11/2024	18.420.000,00	50.327,87	366	3.019.672,13	15.400.327,87
237	PTKA	SELMA EV VAN DOKKUM	PT. SMOXY ROSE QUARTZ	PROVINSI BALI	12/10/2023	12 Bulan	07/11/2023	06/11/2024	18.420.000,00	50.327,87	366	2.788.032,79	15.651.967,21
238	PTKA	CALEB CHAPELET	PT. PLASTIC BANK INDONESIA	PROVINSI BALI	16/10/2023	12 Bulan	19/01/2024	18/01/2025	18.420.000,00	50.327,87	366	-	18.420.000,00
239	PTKA	YOSHIYO KONNO (ITTO)	BALI CRUISES NUSANTARA, PT.	PROVINSI BALI	17/10/2023	12 Bulan	19/11/2023	18/11/2024	18.420.000,00	50.327,87	366	2.164.098,36	16.255.901,64
240	PTKA	MARTINUS LAURENTIUS DE SWART	BIRO PERJALANAN WISATA IS INDONESIA, PT	PROVINSI BALI	17/10/2023	12 Bulan	06/11/2023	05/11/2024	18.420.000,00	50.327,87	366	2.818.360,66	15.601.639,34
241	PTKA	KENJI SASAKI	PT. KAPS ART DIRECTOR	PROVINSI BALI	18/10/2023	12 Bulan	29/10/2023	28/10/2024	18.480.000,00	50.491,80	366	3.231.475,41	15.248.524,59
242	PTKA	JULIEN BEQUET	PT. JULIEN TAHAR DAN PANDAWA INVESTASI	PROVINSI BALI	18/10/2023	12 Bulan	20/10/2023	19/10/2024	18.480.000,00	50.491,80	366	3.685.901,64	14.794.098,36
243	PTKA	SAMARA	BOGA INTERNUSA RAYA PT	PROVINSI BALI	26/10/2023	12 Bulan	26/10/2023	25/10/2024	19.609.875,00	53.578,89	366	3.589.785,86	16.020.089,14
244	PTKA	NGUYEN HOANG AHN THU	PT. GARAH SCUBA INDO	PROVINSI BALI	24/10/2023	12 Bulan	25/10/2023	24/10/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	3.466.885,25	15.193.114,75
245	PTKA	ARLEEN SAMONTE	PT. BALI LEGAL INTERNATIONAL	PROVINSI BALI	24/10/2023	12 Bulan	04/11/2023	03/11/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	2.957.049,18	15.702.950,82
246	PTKA	SUROJ SK	PT. PERHIASAN UBUD BALI	PROVINSI BALI	25/10/2023	12 Bulan	05/11/2023	04/11/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	2.906.065,57	15.753.934,43
247	PTKA	KENNETH JAMES WICKES	PT. SHAN RESTORAN BALI	PROVINSI BALI	25/10/2023	12 Bulan	26/11/2023	25/11/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	1.835.409,84	16.824.590,16
248	PTKA	JAMES ROBERT IRELAND	PT. PUTRA NADI BAWA	PROVINSI BALI	25/10/2023	12 Bulan	03/11/2023	02/11/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	3.008.032,79	15.651.967,21
249	PTKA	VIJAY PRAKASH RATURI	INDHA BALI JAYA, PT.	PROVINSI BALI	25/10/2023	12 Bulan	26/11/2023	25/11/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	1.835.409,84	16.824.590,16
250	PTKA	MOHIT KUMAR PANT	INDHA BALI JAYA, PT.	PROVINSI BALI	25/10/2023	12 Bulan	26/11/2023	25/11/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	1.835.409,84	16.824.590,16
251	PTKA	KIM HAZEL SPENCER	SHAMBALA PAYANGAN INDAH, PT	PROVINSI BALI	26/10/2023	12 Bulan	02/11/2023	01/11/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	3.059.016,39	15.600.983,61
252	PTKA	ANICE BOKRAA	PT. THE NEXT LEADER LAMORA	PROVINSI BALI	26/10/2023	12 Bulan	19/11/2023	18/11/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	2.192.295,08	16.467.704,92
253	PTKA	CLAY RIGHTER GIBBS	PT. JIWA DARI WAKTU LUANG	PROVINSI BALI	26/10/2023	12 Bulan	10/12/2023	09/12/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	1.121.639,34	17.538.360,66
254	PTKA	BRAM BREPERO	BARUNA ORCA JOINT VENTURE COMPANY, PT.	PROVINSI BALI	27/10/2023	12 Bulan	04/11/2023	03/11/2024	18.720.000,00	51.147,54	366	2.966.557,38	15.753.442,62
255	PTKA	IBRAHIM MOHAMMAD ISMAIL	PT. BALI LEGAL INTERNATIONAL	PROVINSI BALI	30/10/2023	12 Bulan	18/11/2023	17/11/2024	18.720.000,00	51.147,54	366	2.250.491,80	16.469.508,20
256	PTKA	REEM DAHIR ISMAIL	PT. BALI LEGAL INTERNATIONAL	PROVINSI BALI	30/10/2023	12 Bulan	18/11/2023	17/11/2024	18.720.000,00	51.147,54	366	2.250.491,80	16.469.508,20
257	PTKA	ARKADHI ALMENDIEIEV	PT. PURE DIVE RESORT	PROVINSI BALI	31/10/2023	12 Bulan	30/12/2023	29/12/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	1.01.967,21	18.558.032,79
258	PTKA	MATTHIAS MISOF	DIVING 4 IMAGES PT	PROVINSI BALI	01/11/2023	12 Bulan	01/01/2024	31/12/2024	18.720.000,00	51.147,54	366	-	18.720.000,00
259	PTKA	MAKIKO OKI	PT. BALI BAGUS BAHANA	PROVINSI BALI	01/11/2023	12 Bulan	17/12/2023	16/12/2024	18.720.000,00	51.147,54	366	767.213,11	17.952.786,89
260	PTKA	EMMANUEL JACQUES ARTHUR LALLEMENT	SAN JUAN VENTURES BALI, PT	PROVINSI BALI	01/11/2023	12 Bulan	25/11/2023	24/11/2024	18.720.000,00	51.147,54	366	1.892.459,02	16.827.540,98
261	PTKA	THORSTEN WOLFGANG MEINHOLZ	MITRA PRESTASI GEMILANG, PT	PROVINSI BALI	02/11/2023	12 Bulan	06/11/2023	05/11/2024	18.660.000,00	50.983,61	366	2.855.081,97	15.804.918,03
262	PTKA	MACHANDO DE ANDRADE JOAO FELIPE	PT. RUMAH TORAJA BAMBUI	PROVINSI BALI	02/11/2023	12 Bulan	01/01/2024	31/12/2025	18.660.000,00	25.526,68	731	-	18.660.000,00
263	PTKA	ALEXIS GUILLAUME CHRISTIAN LECOLIVE	PT. FRENCH KISS DIVERS	PROVINSI BALI	03/11/2023	12 Bulan	07/11/2023	06/11/2024	18.600.000,00	50.819,67	366	2.795.081,97	15.804.918,03
264	PTKA	AMICHAÏ SLOMO GANIEL	PT. PURI SARI LESTARI	PROVINSI BALI	06/11/2023	12 Bulan	11/01/2024	10/01/2025	18.360.000,00	50.163,93	366	-	18.360.000,00
265	PTKA	BENJAMIN ARTHUR SORS	PT. PURI SARI LESTARI	PROVINSI BALI	06/11/2023	12 Bulan	15/11/2023	14/11/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	2.357.704,92	16.002.295,08
266	PTKA	SHOKO TERAOKA	GLORY RETAILINDO, PT.	PROVINSI BALI	06/11/2023	12 Bulan	10/10/2023	09/10/2024	7.650.000,00	20.901,64	366	1.734.836,07	5.915.163,93
267	PTKA	THORSTEN DHEUREUSE	PT. TROPICLAND DESAIN KONSULTAN	PROVINSI BALI	07/11/2023	12 Bulan	03/12/2023	02/12/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	1.450.000,00	16.850.000,00
268	PTKA	NG MEI LING SERENA	PT. BLUE PALM MANAGEMENT	PROVINSI BALI	07/11/2023	12 Bulan	27/11/2023	26/11/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	1.750.000,00	16.550.000,00
269	PTKA	MICHAEL CHRISTOPHER KING	PT. BUMI MATA LINDO	PROVINSI BALI	08/11/2023	12 Bulan	05/01/2024	04/01/2025	18.360.000,00	50.163,93	366	-	18.360.000,00
270	PTKA	RIA RAMBLAN TEMPLER	SUPA DUPA SPICE PT	PROVINSI BALI	08/11/2023	12 Bulan	31/12/2023	30/12/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	50.163,93	18.309.836,07
271	PTKA	JOSHUA SAMUEL MEYER	PT. BALI SHINE SERVICE	PROVINSI BALI	08/11/2023	12 Bulan	05/11/2023	04/11/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	2.859.344,26	15.500.655,74
272	PTKA	KTISTIE LOUISE SCOTT	PT. RANDU EMAS BALI SEJAHTERA	PROVINSI BALI	08/11/2023	12 Bulan	12/11/2023	11/11/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	2.508.196,72	15.851.803,28
273	PTKA	JAMES ALFRED SCOTT	PT. RANDU EMAS BALI SEJAHTERA	PROVINSI BALI	08/11/2023	12 Bulan	12/11/2023	11/11/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	2.508.196,72	15.851.803,28
274	PTKA	SEAN BRIAN MCALONEY	PT. MILLIE UTAMA SAKTI	PROVINSI BALI	08/11/2023	12 Bulan	22/12/2023	21/12/2024	18.360.000,00	50.163,93	366	501.639,34	17.858.360,66
275	PTKA	VALENTINA RAMIREZ OCHOA	PT. APNEA BALI FREEDIVING	PROVINSI BALI	09/11/2023	12 Bulan	30/01/2024	29/01/2025	18.360.000,00	50.163,93	366	-	18.360.000,00
276	PTKA	BRYAN CHIA ZHEN WEI	PT. NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA	PROVINSI BALI	10/11/2023	12 Bulan	29/12/2023	28/12/2024	18.420.000,00	50.327,87	366	150.983,61	18.269.016,39
277	PTKA	LIZA MARIE GERREYN	REGIONAL SALES MANAGER	PROVINSI BALI	13/11/2023	12 Bulan	15/01/2024	14/01/2025	18.420.000,00	50.327,87	366	-	18.420.000,00
278	PTKA	JESUS GISBERT CARBONELL	HOTEL PANDAN ARUM, PT.	PROVINSI BALI	16/11/2023	12 Bulan	15/01/2024	14/01/2025	18.300.000,00	50.000,00	366	-	18.300.000,00
279	PTKA	MATTHIEU PAUL ALEXANDRE HOREAU	IMPERIAL INDO MULIA, PT.	PROVINSI BALI	16/11/2023	12 Bulan	06/12/2023	05/12/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	1.300.000,00	17.000.000,00
280	PTKA	JAN CHRISTIAN GREYLING	PT. BOGA INTERNUSA RAYA	PROVINSI BALI	20/11/2023	12 Bulan	22/12/2023	21/12/2024	18.960.000,00	51.803,28	366	518.032,79	18.441.967,21
281	PTKA	ZENG MIN	PT. LOTUS BALI CONSULTING	PROVINSI BALI	21/11/2023	12 Bulan	22/12/2023	21/12/2024	18.060.000,00	49.344,26	366	493.442,62	17.566.557,38
282	PTKA	DONALD RICHARD CARLO CLAUS	MUAY THAI AND MIXED MARTIAL ARTS, PT.	PROVINSI BALI	21/11/2023	12 Bulan	08/12/2023	07/12/2024	18.060.000,00	49.344,26	366	1.184.262,30	16.875.737,70
283	PTKA	AVALONE MERU CARVENTER	PT. DJANU DJATI DJAYA	PROVINSI BALI	23/11/2023	12 Bulan	16/12/2023	15/12/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	800.000,00	17.500.000,00
284	PTKA	MARTIN MALNOU CASTETBON	PT. GAJA PLASTIK RECYCLING	PROVINSI BALI	23/11/2023	12 Bulan	16/12/2023	15/12/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	800.000,00	17.500.000,00
285	PTKA	MELNIKOVA ALEXSANDRA	PT. INDO SARANA BALI WISATA	PROVINSI BALI	24/11/2023	12 Bulan	17/12/2023	16/12/2024	18.300.000,00	50.000,00	366	750.000,00	17.550.000,00
286	PTKA	ANNA POZNYAK	PT. ORIENTAL BALI CONSULTING	PROVINSI BALI	27/11/2023	12 Bulan	29/01/2024	28/0					

No.	Uraian	NAMA PENYEWAJ/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH										7.621.477.622,23	19.013.940.968,03	
296	PTKA	XAVIER SEBASTIEN MARTINEAU	PT. FRENCH KISS DIVERS	PROVINSI BALI	13/12/2023	12 Bulan	17/02/2024	16/02/2025	18.360.000,00	50.163,93	366	-	18.360.000,00
297	PTKA	EMMA JO ROSS	PT. ELEVATION BARN INDONESIA	PROVINSI BALI	18/12/2023	12 Bulan	22/01/2024	23/01/2025	18.180.000,00	49.402,17	366	-	18.180.000,00
298	PTKA	EVGENY FEKLSTOV	SHAMBHALA PAYANGAN INDAH, PT.	PROVINSI BALI	18/12/2023	12 Bulan	20/01/2024	19/01/2025	18.180.000,00	49.672,13	366	-	18.180.000,00
299	PTKA	VALENTINA TSURIKOVA	PT. BALI BUSINESS CONSULTING	PROVINSI BALI	19/12/2023	12 Bulan	22/01/2024	21/01/2025	18.240.000,00	49.836,07	366	-	18.240.000,00
300	PTKA	KIRAN BEENA VIJAY	INDAH PERMATA PULAU, PT	PROVINSI BALI	20/12/2023	12 Bulan	20/01/2024	19/01/2025	18.240.000,00	49.836,07	366	-	18.240.000,00
301	PTKA	ANNA MARIE RICHARDSON	PT. TIRTA SEMARA	PROVINSI BALI	20/12/2023	12 Bulan	20/02/2024	19/02/2025	18.240.000,00	49.836,07	366	-	18.240.000,00
302	PTKA	ELISABETTA VIDALI	PT. INCENSE TRAINING CENTER	PROVINSI BALI	27/12/2023	12 Bulan	28/12/2023	27/12/2024	18.180.000,00	49.672,13	366	198.688,52	17.981.311,48
303	PTKA	RANDOLF KEVIN KLOER	BALI HOMES MANAJEMEN, PT	PROVINSI BALI	28/12/2023	12 Bulan	23/02/2024	22/02/2025	18.120.000,00	49.508,20	366	-	18.120.000,00
304	PTKA	PANG YOON HWA	PT. PURI ZUCNI	PROVINSI BALI	28/12/2023	12 Bulan	11/02/2024	10/02/2025	18.120.000,00	49.508,20	366	-	18.120.000,00
305	PTKA	EDWARD ARTHUR GRIFFITH	PT. ORIENT CONSULTING INDONESIA	PROVINSI BALI	28/12/2023	12 Bulan	31/01/2024	30/01/2025	18.120.000,00	49.508,20	366	-	18.120.000,00
306	PTKA	KISHAN SINGH	QUEENS TANDOOR, PT.	PROVINSI BALI	28/12/2023	12 Bulan	20/01/2024	19/01/2025	18.120.000,00	49.508,20	366	-	18.120.000,00
307	PTKA	CHILKIT PAREEK	QUEENS TANDOOR, PT.	PROVINSI BALI	28/12/2023	12 Bulan	14/01/2024	13/01/2025	18.120.000,00	49.508,20	366	-	18.120.000,00
308	PTKA	YONES RAHMATI	PT. MACHINE INSPIRED ART	PROVINSI BALI	28/12/2023	12 Bulan	07/01/2024	06/01/2025	18.120.000,00	49.508,20	366	-	18.120.000,00
309	PTKA	SEAN CHRISTOPER FONTE	BALI GIRI KENCANA, PT	PROVINSI BALI	29/12/2023	12 Bulan	15/01/2024	14/01/2025	18.060.000,00	49.344,26	366	-	18.060.000,00
310	PTKA	CAMILLA CHAIM HUI LEE	BALI GIRI KENCANA, PT	PROVINSI BALI	29/12/2023	12 Bulan	30/01/2024	29/01/2025	18.060.000,00	49.344,26	366	-	18.060.000,00
311	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH JAYA-63	PROVINSI BALI	05/01/2022	12 Bulan	04/01/2022	04/01/2023	2.100.000,00	5.737,70	366	22.950,82	0,00
312	IZIN PERIKANAN	TARNO	SIPI KM NAGA MAS PERKASA -57	PROVINSI BALI	17/01/2022	12 Bulan	14/01/2022	14/01/2023	2.250.000,00	6.147,54	366	86.065,57	(0,00)
313	IZIN PERIKANAN	TONI	SIPI KM. ALAM PRIMA	PROVINSI BALI	17/01/2022	12 Bulan	14/01/2022	14/01/2023	2.175.000,00	5.942,62	366	83.196,72	0,00
314	IZIN PERIKANAN	CHARLES	SIPI KM. OMEGA JAYA	PROVINSI BALI	19/01/2022	12 Bulan	18/01/2022	18/01/2023	2.175.000,00	5.942,62	366	106.967,21	0,00
315	IZIN PERIKANAN	PT. INTIMAS SURYA	SIPI KM. SEJAHTERA -03	PROVINSI BALI	19/01/2022	12 Bulan	18/01/2022	18/01/2023	1.000.000,00	2.732,24	366	49.180,33	0,00
316	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA -1	PROVINSI BALI	24/01/2022	12 Bulan	14/02/2022	14/02/2023	2.250.000,00	6.147,54	366	276.639,34	0,00
317	IZIN PERIKANAN	AGUS SALIM HINDRATO	SIPI KM. ALAM INDAH	PROVINSI BALI	26/01/2022	12 Bulan	25/01/2022	25/01/2023	2.100.000,00	5.737,70	366	143.442,62	0,00
318	IZIN PERIKANAN	AGUS SALIM HINDRATO	SIPI KM JALASENA - 22	PROVINSI BALI	26/01/2022	12 Bulan	25/01/2022	25/01/2023	1.950.000,00	5.327,87	366	133.196,72	0,00
319	IZIN PERIKANAN	AGUS SALIM HINDRATO	SIPI KM SERBA PRIMA -12	PROVINSI BALI	26/01/2022	12 Bulan	25/01/2022	25/01/2023	2.175.000,00	5.942,62	366	148.565,57	0,00
320	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA -11	PROVINSI BALI	26/01/2022	12 Bulan	25/01/2022	25/01/2023	1.050.000,00	2.868,85	366	71.721,31	0,00
321	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 21	PROVINSI BALI	27/01/2022	12 Bulan	26/01/2022	26/01/2023	2.100.000,00	5.737,70	366	149.180,33	0,00
322	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 20	PROVINSI BALI	27/01/2022	12 Bulan	26/01/2022	26/01/2023	1.950.000,00	5.327,87	366	138.524,59	0,00
323	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA - 22	PROVINSI BALI	04/02/2022	12 Bulan	04/02/2022	04/02/2023	2.025.000,00	5.532,79	366	193.647,54	0,00
324	IZIN PERIKANAN	PT. IAMBEU MINA UTAMA	SIPI KM. IAMBEU TUAKILANG	PROVINSI BALI	09/02/2022	12 Bulan	08/02/2022	08/02/2023	2.025.000,00	5.532,79	366	215.778,69	0,00
325	IZIN PERIKANAN	I WAYAN SADRU	SIPI KM. HASIL SEGARA - 57	PROVINSI BALI	11/02/2022	12 Bulan	10/02/2022	10/02/2023	1.000.000,00	2.732,24	366	112.021,86	0,00
326	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN TAMU	SIPI KM. HARAPAN BERSAMA -88	PROVINSI BALI	11/02/2022	12 Bulan	10/02/2022	10/02/2023	1.000.000,00	2.732,24	366	112.021,86	0,00
327	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA - I	PROVINSI BALI	15/02/2022	12 Bulan	14/02/2022	14/02/2023	2.250.000,00	6.147,54	366	276.639,34	0,00
328	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN	SIPI KM. PERINTIS JAYA 16	PROVINSI BALI	01/03/2022	12 Bulan	25/02/2022	25/02/2023	2.100.000,00	5.737,70	366	321.311,48	0,00
329	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN	SIPI KM. PERINTIS JAYA 26	PROVINSI BALI	01/03/2022	12 Bulan	25/02/2022	25/02/2023	2.100.000,00	5.737,70	366	321.311,48	0,00
330	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN	SIPI KM. PERINTIS JAYA 23	PROVINSI BALI	08/03/2022	12 Bulan	07/03/2022	07/03/2023	2.175.000,00	5.942,62	366	392.213,11	0,00
331	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN	SIPI KM. PERINTIS JAYA 27	PROVINSI BALI	08/03/2022	12 Bulan	07/03/2022	07/03/2023	2.100.000,00	5.737,70	366	378.688,52	0,00
332	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA, 202	PROVINSI BALI	14/04/2022	12 Bulan	13/04/2022	13/04/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	1.183.374,32	0,00
333	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA, 12	PROVINSI BALI	14/04/2022	12 Bulan	13/04/2022	13/04/2023	4.060.000,00	11.092,90	366	1.142.568,31	0,00
334	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA, 273	PROVINSI BALI	14/04/2022	12 Bulan	13/04/2022	13/04/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	1.183.374,32	0,00
335	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA II	PROVINSI BALI	14/04/2022	12 Bulan	13/04/2022	13/04/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	1.224.180,33	0,00
336	IZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA V	PROVINSI BALI	14/04/2022	12 Bulan	13/04/2022	13/04/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	1.183.374,32	0,00
337	IZIN PERIKANAN	PT. SUMBER MINA SMDR.	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA 8	PROVINSI BALI	14/04/2022	12 Bulan	13/04/2022	13/04/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	1.224.180,33	0,00
338	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH -88	PROVINSI BALI	14/04/2022	12 Bulan	13/04/2022	13/04/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	1.183.374,32	0,00
339	IZIN PERIKANAN	DETA OKTA. SUKMAWATI	SIPI KM. AYU JAYA	PROVINSI BALI	19/04/2022	12 Bulan	18/04/2022	18/04/2023	3.915.000,00	10.696,72	366	1.155.245,90	0,00
340	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. HEN - 6	PROVINSI BALI	21/04/2022	12 Bulan	20/04/2022	20/04/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	1.263.797,81	0,00
341	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. TUNA SEGAR - 8	PROVINSI BALI	21/04/2022	12 Bulan	20/04/2022	20/04/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	1.307.377,05	0,00
342	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. TUNA SEGAR - 18	PROVINSI BALI	21/04/2022	12 Bulan	20/04/2022	20/04/2023	4.060.000,00	11.092,90	366	1.220.218,58	0,00
343	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA, 29	PROVINSI BALI	28/04/2022	12 Bulan	27/04/2022	27/04/2023	3.915.000,00	10.696,72	366	1.251.516,39	0,00
344	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA, 868	PROVINSI BALI	28/04/2022	12 Bulan	27/04/2022	27/04/2023	2.755.000,00	7527.322404	366	880.696,72	0,00
345	IZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. TUNA SEGAR - 88	PROVINSI BALI	28/04/2022	12 Bulan	27/04/2022	27/04/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	1.344.221,31	0,00
346	IZIN PERIKANAN	ANDI RAHMAN	SIUP, 2 KAPAL, a' 19 GT	PROVINSI BALI	22/04/2022	30 Tahun	21/04/2022	21/04/2052	1.178.000,00	107,49	10959	39.234,42	1.111.355,23
347	IZIN PERIKANAN	SUBHAN	SIUP, 1 KAPAL, 30 GT	PROVINSI BALI	22/04/2022	30 Tahun	21/04/2022	21/04/2052	930.000,00	84,86	10959	30.974,54	877.385,71
348	IZIN PERIKANAN	AHMAD NURIADI	SIUP, 1 KAPAL, 14 GT	PROVINSI BALI	28/04/2022	30 Tahun	27/04/2022	27/04/2052	434.000,00	39,60	10959	14.454,79	409.684,27
349	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JY. INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA 98	PROVINSI BALI	13/05/2022	12 Bulan	12/05/2022	12/05/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	1.516.557,38	0,00
350	IZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JY. INTERN.	SIPI KM. PERINTIS JAYA 28	PROVINSI BALI	13/05/2022	12 Bulan	12/05/2022	12/05/2023	4.060.000,00	11.092,90	366	1.464.262,30	0,00
351	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENDO UTAMA	SIPI KM. PUTRA BHR. PRATAMA 14	PROVINSI BALI	17/05/2022	12 Bulan	13/05/2022	13/05/2023	3.567.000,00	9.745,90	366	1.296.204,92	0,00
352	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENDO UTAMA	SIPI KM. PUTRA BHR. PRATAMA 25	PROVINSI BALI	17/05/2022	12 Bulan	13/05/2022	13/05/2023	3.567.000,00	9.745,90	366	1.296.204,92	0,00
353	IZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH 70	PROVINSI BALI	24/05/2022	12 Bulan	23/05/2022	23/05/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	1.642.937,16	0,00
354	IZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENDO UTAMA	SIPI KM. SAMARU 05	PROVINSI BALI	25/05/2022	12 Bulan	24/05/2022	24/05/2023	2.706.000,00	7.393,44	366	1.064.655,74	0,00
355	IZIN PERIKANAN	PT. IAMBEU MINA UTAMA	SIPI KM. IAMBEU PESANGGARAN 11	PROVINSI BALI	27/05/2022	12 Bulan	25/05/2022	25/05/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	1.723.360,66	0,00
356	IZIN PERIKANAN	FEBRYANTO	SIUP 1 KAPAL, 30 GT	PROVINSI BALI	13/05/2022	30 Tahun	12/05/2022	12/05/2052	1.320.000,00	120,45	10959	43.963,87	1.247.851,08
357	IZIN PERIKANAN	ROBY	SIUP 1 KAPAL, 30 GT	PROVINSI BALI	17/05/2022	30 Tahun	13/05/2022	13/05/2052	1.320.000,00	120,45	10959	43.963,87	1.247.971,53
358	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. LINGGAR PETAK 89	PROVINSI BALI	17/06/2022	12 Bulan	16/06/2022	16/06/2023	4.205.000,00	11.303,76	372	1.887.728,49	0,00
359	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA 69	PROVINSI BALI	17/06/2022	12 Bulan	16/06/2022	16/06/2023	4.350.000,00	11.693,55	372	1.952.822,58	0,00
360	IZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA 68	PROVINSI BALI	17/06/2022	12 Bulan	16/06/2022	16/06/2023	4.350.000,00	11.693,55	372	1.952.822,58	0,00
361	IZIN PERIKANAN	NURUDIN	SIUP 1 KAPAL, 25 GT	PROVINSI BALI	06/06/2022	30 Tahun	03/06/2022	03/06/2052	775.000,00	70,72	10959	25.812,12	734.195,64
362	IZIN PERIKANAN	AHMAD SOYAN HABIBI	SIUP, 2 KAPAL, 21,18 GT	PROVINSI BALI	21/06/2022	30 Tahun	20/06/2022	20/06/2052	1.209.000,00	110,32	10959	40.266,90	1.147.220,64
363	IZIN PERIKANAN	I KT SUASTIKA YASA	SIUP, 2 KAPAL, 25,28 GT	PROVINSI BALI	21/06/2022	30 Tahun	20/06/2022	20/06/2052	1.843.000				

No.	Uraian	NAMA PENYEWAI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH										7.621.477.622,23	19.013.940.968,03	
371	ZIN PERIKANAN	NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 268	PROVINSI BALI	07/07/2022	12 bulan	06/07/2022	06/07/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	2.148.456,28	0,00
372	ZIN PERIKANAN	I KETUT SUWIRYA	SIPI KM. PARISUDHA 815	PROVINSI BALI	07/07/2022	12 bulan	06/07/2022	06/07/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	2.222.540,98	0,00
373	ZIN PERIKANAN	FEBRYANTO	SIPI KM. HALDY I	PROVINSI BALI	08/07/2022	12 bulan	07/07/2022	07/07/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	2.234.426,23	0,00
374	ZIN PERIKANAN	TONI	SIPI KM. PRIMUS INDAH	PROVINSI BALI	21/07/2022	12 bulan	20/07/2022	20/07/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	2.309.303,28	0,00
375	ZIN PERIKANAN	JOVEN	SIPI KM. BAHARI NUSANTARA 63	PROVINSI BALI	29/07/2022	12 bulan	28/07/2022	28/07/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	2.484.016,39	0,00
376	ZIN PERIKANAN	I KETUT WARTA	SIUP 2 KAPAL, 17,25 GT	PROVINSI BALI	07/07/2022	30 Tahun	06/07/2022	06/07/2052	1.302.000,00	118,81	10959	43.364,36	1.237.369,28
377	ZIN PERIKANAN	YAHYA A NOER	SIUP 2 KAPAL, 17,18 GT	PROVINSI BALI	08/07/2022	30 Tahun	07/07/2022	07/07/2052	1.209.000,00	110,32	10959	40.266,90	1.149.096,09
378	ZIN PERIKANAN	H. SURADI	SIUP 1 KAPAL 28 GT	PROVINSI BALI	08/07/2022	30 Tahun	07/07/2022	07/07/2052	868.000,00	79,20	10959	28.909,57	824.992,06
379	ZIN PERIKANAN	RUDI SYAIFUL ANAM	ANDON KM. SUMBER RAHMAD I	PROVINSI BALI	26/07/2022	6 Bulan	26/07/2022	26/01/2023	1.830.000,00	9.891,89	185	257.189,19	0,00
380	ZIN PERIKANAN	SOFYAN	ANDON KM. DUJA PUTRI 14	PROVINSI BALI	28/07/2022	6 Bulan	27/07/2022	27/01/2023	1.525.000,00	8.243,24	185	222.567,57	0,00
381	ZIN PERIKANAN	ZAINURI	ANDON KM. SAHABAT	PROVINSI BALI	28/07/2022	6 Bulan	27/07/2022	27/01/2023	976.000,00	5.275,68	185	142.443,24	0,00
382	ZIN PERIKANAN	WAGIMAN	ANDON KM. ANUGERAH ILLAHI	PROVINSI BALI	29/07/2022	6 Bulan	28/07/2022	28/01/2023	1.220.000,00	6.594,59	185	184.648,65	0,00
383	ZIN PERIKANAN	SALAHUDDIN	ANDON KM. LAROSA - 02	PROVINSI BALI	29/07/2022	6 Bulan	28/07/2022	28/01/2023	1.464.000,00	7.913,51	185	221.578,38	0,00
384	ZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 668	PROVINSI BALI	24/08/2022	12 Bulan	23/08/2022	23/08/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	2.793.032,79	0,00
385	ZIN PERIKANAN	KAMARUDDIN	ANDON KM.KAIRA 01	PROVINSI BALI	03/08/2022	6 Bulan	02/08/2022	02/02/2023	1.769.000,00	9.562,16	185	315.551,35	0,00
386	ZIN PERIKANAN	ARMAN T	ANDON KM. RYANG 28	PROVINSI BALI	10/08/2022	6 Bulan	09/08/2022	09/02/2023	1.586.000,00	8.572,97	185	342.918,92	0,00
387	ZIN PERIKANAN	SUNAL ARIF	ANDON KM. SUMBER MULYO	PROVINSI BALI	24/08/2022	6 Bulan	23/08/2022	23/02/2023	1.220.000,00	6.594,59	185	356.108,11	0,00
388	ZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIUP 11 KAPAL, 30 GT	PROVINSI BALI	16/08/2022	30 Tahun	08/05/2022	08/05/2052	10.015.000,00	913,86	10959	333.559,18	9.463.941,96
389	ZIN PERIKANAN	AHMAD NURIADI	SIUP 2 KAPAL, 15 GT	PROVINSI BALI	31/08/2022	30 Tahun	30/08/2022	30/08/2052	930.000,00	84,86	10959	30.974,54	888.502,80
390	ZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIUP 10 KAPAL,	PROVINSI BALI	05/09/2022	30 Tahun	09/02/2022	09/02/2052	12.364.000,00	1.128,31	10959	411.832,45	11.584.339,11
391	ZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIUP, 6 KAPAL	PROVINSI BALI	05/09/2022	30 Tahun	09/02/2022	09/02/2052	7.788.000,00	710,71	10959	259.410,48	7.296.898,88
392	ZIN PERIKANAN	TARNO	SIUP, 2 KAPAL	PROVINSI BALI	05/09/2022	30 Tahun	09/02/2022	09/02/2052	2.640.000,00	240,92	10959	87.935,75	2.473.524,37
393	ZIN PERIKANAN	PT. SUMBER MINA SMD.	SIUP, 3 KAPAL	PROVINSI BALI	05/09/2022	30 Tahun	09/02/2022	09/02/2052	3.916.000,00	357,36	10959	130.438,04	3.669.061,14
394	ZIN PERIKANAN	ALDI FERDIANSYAH HSN	SIUP, 2 KAPAL	PROVINSI BALI	12/09/2022	30 Tahun	09/09/2022	09/09/2052	930.000,00	84,86	10959	30.974,54	889.351,22
395	ZIN PERIKANAN	I GST ARYA EMAN HMW.	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	20/09/2022	30 Tahun	20/09/2022	20/09/2052	1.232.000,00	112,42	10959	41.032,94	1.179.387,90
396	ZIN PERIKANAN	PT. INTIMAS SURYA	SIUP, 4 KAPAL	PROVINSI BALI	23/09/2022	30 Tahun	22/09/2022	22/09/2052	1.922.000,00	175,38	10959	64.014,05	1.840.272,47
397	ZIN PERIKANAN	TONI	SIUP, 3 KAPAL	PROVINSI BALI	23/09/2022	30 Tahun	22/09/2022	22/09/2052	3.872.000,00	353,32	10959	128.960,67	3.707.354,32
398	ZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA	SIUP, 8 KAPAL	PROVINSI BALI	23/09/2022	30 Tahun	22/09/2022	22/09/2052	5.828.000,00	531,80	10959	194.107,13	5.580.181,03
399	ZIN PERIKANAN	ASMANDI	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	29/09/2022	30 Tahun	28/09/2022	28/09/2052	713.000,00	65,06	10959	23.747,15	683.072,09
400	ZIN PERIKANAN	I WAYAN SUDRA B	SIUP, 3 KAPAL	PROVINSI BALI	29/09/2022	30 Tahun	28/09/2022	28/09/2052	2.573.000,00	234,78	10959	85.696,23	2.464.999,27
401	ZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. ALAM SUTERA	PROVINSI BALI	12/09/2022	12 Bulan	09/09/2022	09/09/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	2.995.081,97	0,00
402	ZIN PERIKANAN	TARNO	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA XII	PROVINSI BALI	12/09/2022	12 Bulan	09/09/2022	09/09/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	2.995.081,97	0,00
403	ZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. BINTANG KEJORA NO.2	PROVINSI BALI	29/09/2022	12 Bulan	28/09/2022	28/09/2023	2.829.000,00	7.729,51	366	2.094.696,72	0,00
404	ZIN PERIKANAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	SIPI KM. DAMARINA 17	PROVINSI BALI	29/09/2022	12 Bulan	28/09/2022	28/09/2023	2.091.000,00	5.713,11	366	1.548.254,10	0,00
405	ZIN PERIKANAN	PT. SUMBER MINA SDR.	SIPI KM. MULJA	PROVINSI BALI	29/09/2022	12 Bulan	28/09/2022	28/09/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	3.113.536,25	0,00
406	ZIN PERIKANAN	PT. INTIMAS SURYA	SIPI KM. MUARA TUNA RAYA 02	PROVINSI BALI	03/10/2022	12 Bulan	30/09/2022	30/09/2023	1.968.000,00	5.377,05	366	1.467.934,43	0,00
407	ZIN PERIKANAN	I WAYAN SUDRA B	SIPI KM. UPIN	PROVINSI BALI	03/10/2022	12 Bulan	30/09/2022	30/09/2023	3.444.000,00	9.409,84	366	2.568.885,25	0,00
408	ZIN PERIKANAN	I WAYAN SUDRA B	SIPI KM. IPIN	PROVINSI BALI	03/10/2022	12 Bulan	30/09/2022	30/09/2023	3.444.000,00	9.409,84	366	2.568.885,25	0,00
409	ZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INT.	SIPI KM. PERINTIS JAYA -9	PROVINSI BALI	14/10/2022	12 Bulan	13/10/2022	13/10/2023	3.335.000,00	9.112,02	366	2.606.038,25	0,00
410	ZIN PERIKANAN	I KETUT SUWIRYA	SIPI KM. LINGGAR PETAK	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	3.354.808,74	0,00
411	ZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 168	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	3.354.808,74	0,00
412	ZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. LAYARI NUSANTARA	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	3.354.808,74	0,00
413	ZIN PERIKANAN	I NYOMAN MORIS	SIPI KM. NUSANTARA 368	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	3.354.808,74	0,00
414	ZIN PERIKANAN	I GST ARYA HIMAWAN	SIPI KM PATRIA MULIA 02	PROVINSI BALI	20/10/2022	12 Bulan	19/10/2022	19/10/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	3.470.491,80	0,00
415	ZIN PERIKANAN	SALIM	SIPI KM. INTAN LAUT -VI	PROVINSI BALI	31/10/2022	12 Bulan	28/10/2022	28/10/2023	2.755.000,00	7.527,32	366	2.265.724,04	0,00
416	ZIN PERIKANAN	TARNO	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA 57	PROVINSI BALI	31/10/2022	12 Bulan	28/10/2022	28/10/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	3.577.456,02	0,00
417	ZIN PERIKANAN	PT. PERINTIS JAYA INTERN.	SIUP, 16 KAPAL	PROVINSI BALI	05/10/2022	30 Tahun	04/10/2022	04/10/2052	18.348.000,00	1.674,24	10959	611.097,73	17.587.894,88
418	ZIN PERIKANAN	I KETUT SUWIRYA	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	05/10/2022	30 Tahun	22/11/2022	22/11/2052	1.276.000,00	116,43	10959	42.498,40	1.228.844,24
419	ZIN PERIKANAN	SALIM	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	20/10/2022	30 Tahun	19/10/2022	19/10/2052	836.000,00	76,28	10959	27.843,78	802.511,18
420	ZIN PERIKANAN	RUDIANTO	ANDON KM. SETIA JAYA	PROVINSI BALI	20/10/2022	6 Bulan	19/10/2022	19/04/2023	1.769.000,00	9.666,67	183	1.053.666,67	0,00
421	ZIN PERIKANAN	M. IRFAN	ANDON KM. VANECHA	PROVINSI BALI	20/10/2022	6 Bulan	19/10/2022	19/04/2023	1.159.000,00	6.333,33	183	690.333,33	0,00
422	ZIN PERIKANAN	ALDI FERDIANSYAH HASAN	SIPI KM. PUTRI AYU II AF	PROVINSI BALI	02/11/2022	12 Bulan	01/11/2022	01/11/2023	1.230.000,00	3.360,66	366	1.025.000,00	0,00
423	ZIN PERIKANAN	ALDI FERDIANSYAH HASAN	SIPI KM. PUTRI AYU I AF	PROVINSI BALI	02/11/2022	12 Bulan	01/11/2022	01/11/2023	2.460.000,00	6.721,31	366	2.050.000,00	0,00
424	ZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH - 82	PROVINSI BALI	02/11/2022	12 Bulan	01/11/2022	01/11/2023	1.845.000,00	5.040,98	366	1.537.500,00	0,00
425	ZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH - 88	PROVINSI BALI	02/11/2022	12 Bulan	01/11/2022	01/11/2023	3.567.000,00	9.745,90	366	2.972.500,00	0,00
426	ZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. KUPANG JAYA - III	PROVINSI BALI	02/11/2022	12 Bulan	01/11/2022	01/11/2023	3.198.000,00	8.737,70	366	2.665.000,00	0,00
427	ZIN PERIKANAN	TARNO	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA IX	PROVINSI BALI	17/11/2022	12 Bulan	16/11/2022	16/11/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	3.803.278,69	0,00
428	ZIN PERIKANAN	CAHYADI T	SIPI KM. NAGA MAS PERKASA 26	PROVINSI BALI	18/11/2022	12 Bulan	17/11/2022	17/11/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	3.815.163,93	0,00
429	ZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. DAMARINA. 81	PROVINSI BALI	18/11/2022	12 Bulan	17/11/2022	17/11/2023	1.968.000,00	5.377,05	366	1.726.032,79	0,00
430	ZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. KUPANG JAYA - II	PROVINSI BALI	18/11/2022	12 Bulan	17/11/2022	17/11/2023	3.321.000,00	9.073,77	366	2.912.680,33	0,00
431	ZIN PERIKANAN	HENDRIK KOSASIH	SIPI KM. ANUGRAH -33	PROVINSI BALI	18/11/2022	12 Bulan	17/11/2022	17/11/2023	4.205.000,00	11.489,07	366	3.687.991,80	0,00
432	ZIN PERIKANAN	DARTO	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	17/11/2022	30 Tahun	16/11/2022	16/11/2052	1.232.000,00	112,42	10959	41.032,94	1.185.795,79
433	ZIN PERIKANAN	I K.T. SUWIRYA	SIUP, 3 KAPAL	PROVINSI BALI	23/11/2022	30 Tahun	22/11/2022	22/11/2052	5.236.000,00	477,78	10959	174.390,00	5.042.498,77
434	ZIN PERIKANAN	JOVEN	SIUP, 4 KAPAL	PROVINSI BALI	25/11/2022	30 Tahun	24/11/2022	24/11/2052	5.236.000,00	477,78	10959	174.390,00	5.043.454,33
435	ZIN PERIKANAN	ROBY	SIPI KM. UTAMA MAJU	PROVINSI BALI	26/11/2022	12 Bulan	07/12/2022	07/12/2023	4.350.000,00	11.885,25	366	4.052.868,85	0,00
436	ZIN PERIKANAN	AGUS SALIM HINDRATO	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	27/11/2022	30 Tahun	05/12/2022	05/12/2052	3.652.000,00	333,24	10959	121.633,30	3.521.369,10
437	ZIN PERIKANAN	CHARLES	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	28/11/2022	30 Tahun	29/12/2022	29/12/2052	1.276.000,00	116,43	10959	42.498,40	1.233.152,30
438	ZIN PERIKANAN	I Wayan Sadru	SIUP, 1 KAPAL	PROVINSI BALI	01/02/2023	30 Tahun	01/02/2023	01/02/2053	744.000,00	67,89	10959	22.675,06	721324,94
439	ZIN PERIKANAN												

No.	Uraian	NAMA PENYEWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											7.621.477.622,23	19.013.940.968,03
446	IZIN PERIKAMAN	PT.PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM.PERINTIS JAYA 21	PROVINSI BALI	25/1/2023	12 Bulan	25/01/2023	25/01/2024	4.060.000,00	11.092,90	366	3.782.677,60	277.322,40
447	IZIN PERIKAMAN	CAHYADI T	KM BAHARI NUSANTARA I	PROVINSI BALI	25/1/2023	12 Bulan	25/01/2023	25/01/2024	4.350.000,00	11.885,25	366	4.052.868,85	297.131,15
448	IZIN PERIKAMAN	PT. IAMBEU MINA UTAMA	SIUP. 1 kapal (I AM BE U TUAKILANG)	PROVINSI BALI	25/1/2023	30 Tahun	25/01/2023	25/01/2053	1.188.000,00	108,40	10959	36.965,78	1.151.034,22
449	IZIN PERIKAMAN	I NYOMAN TAMU	KM HARAPAN BERSAMA 88	PROVINSI BALI	25/1/2023	12 Bulan	25/01/2023	25/01/2024	2.829.000,00	7.729,51	366	2.635.762,30	193.237,70
450	IZIN PERIKAMAN	PT.PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM.PERINTIS JAYA 11	PROVINSI BALI	26/1/2023	12 Bulan	26/01/2023	26/01/2024	2.030.000,00	5.546,45	366	1.885.792,35	144.207,65
451	IZIN PERIKAMAN	PT. INTIMAS SURYA	KM SEJAHTERA 02	PROVINSI BALI	31/1/2023	12 Bulan	31/01/2023	31/01/2024	1.968.000,00	5.377,05	366	1.801.311,48	166.688,52
452	IZIN PERIKAMAN	PT. INTIMAS SURYA	KM SEJAHTERA 05	PROVINSI BALI	31/1/2023	12 Bulan	31/01/2023	31/01/2024	1.722.000,00	4.704,92	366	1.576.147,54	145.852,46
453	IZIN PERIKAMAN	PT. IAMBEU MINA UTAMA	I AM BE U TUAKILANG	PROVINSI BALI	31/1/2023	12 Bulan	31/01/2023	31/01/2024	3.915.000,00	10.696,72	366	3.583.401,64	331.598,36
454	IZIN PERIKAMAN	CHARLES	KM OMEGA JAYA	PROVINSI BALI	25/1/2023	12 Bulan	01/02/2023	01/02/2024	4.205.000,00	11.489,07	366	3.837.349,73	367.650,27
455	IZIN PERIKAMAN	PT.PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM.PERINTIS JAYA 22	PROVINSI BALI	02/01/2023	12 Bulan	01/02/2023	01/02/2024	3.915.000,00	10.696,72	366	3.572.704,92	342.295,08
456	IZIN PERIKAMAN	I WAYAN SUDRA B	KM SEGARA PUTRA 868	PROVINSI BALI	02/01/2023	12 Bulan	01/02/2023	01/02/2024	3.321.000,00	9.073,77	366	3.030.839,34	290.360,66
457	IZIN PERIKAMAN	I WAYAN SADRU	HASIL SEGARA 57	PROVINSI BALI	02/01/2023	12 Bulan	01/02/2023	01/02/2024	2.952.000,00	8.065,57	366	2.693.901,64	258.098,36
458	IZIN PERIKAMAN	AHMAD NURIADI	KM SINAR BAHARI 1	PROVINSI BALI	02/03/2023	12 Bulan	03/02/2023	03/02/2024	1.722.000,00	4.704,92	366	1.562.032,79	159.967,21
459	IZIN PERIKAMAN	AHMAD NURIADI	KM SINAR BAHARI 2	PROVINSI BALI	02/03/2023	12 Bulan	03/02/2023	03/02/2024	1.968.000,00	5.377,05	366	1.785.180,33	182.819,67
460	IZIN PERIKAMAN	HENDRIK KOSASIH	KM ANUGRAH JAYA 63	PROVINSI BALI	15/2/2023	12 Bulan	15/02/2023	15/02/2024	4.060.000,00	11.092,90	366	3.549.726,78	510.273,22
461	IZIN PERIKAMAN	PT.PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM.PERINTIS JAYA 16	PROVINSI BALI	16/2/2023	12 Bulan	16/02/2023	16/02/2024	4.060.000,00	11.092,90	366	3.538.633,88	521.366,12
462	IZIN PERIKAMAN	TONI	KM ALAM PRIMA	PROVINSI BALI	16/2/2023	12 Bulan	16/02/2023	16/02/2024	4.205.000,00	11.489,07	366	3.865.013,66	539.986,34
463	IZIN PERIKAMAN	PT.PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM.PERINTIS JAYA 23	PROVINSI BALI	23/2/2023	12 Bulan	23/02/2023	23/02/2024	4.205.000,00	11.489,07	366	3.584.590,16	620.409,84
464	IZIN PERIKAMAN	PT.PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM.PERINTIS JAYA 20	PROVINSI BALI	23/2/2023	12 Bulan	23/02/2023	23/02/2024	3.770.000,00	10.300,55	366	3.213.770,49	556.229,51
465	IZIN PERIKAMAN	TONI	KM PRIMUS JAYA II	PROVINSI BALI	23/2/2023	12 Bulan	23/02/2023	23/02/2024	4.350.000,00	11.885,25	366	3.708.196,72	641.803,28
466	IZIN PERIKAMAN	PT. SUMBER MINA SAMUDRA	KM NAGA MAS PERKASA 8	PROVINSI BALI	27/2/2023	12 Bulan	27/02/2023	27/02/2024	4.350.000,00	11.885,25	366	3.860.655,74	689.344,26
467	IZIN PERIKAMAN	PT. INTIMAS SURYA	KM SEJAHTERA 03	PROVINSI BALI	28/2/2023	12 Bulan	28/02/2023	28/02/2024	1.968.000,00	5.377,05	366	1.850.754,10	317.245,90
468	IZIN PERIKAMAN	MUH SADAR	ANDON AISAH 35	PROVINSI BALI	28/2/2023	6 Bulan	28/02/2023	28/08/2024	1.342.000,00	2.448,91	548	751.813,87	590.186,13
469	IZIN PERIKAMAN	BAHAR	ANDON RESTU ALAM 01	PROVINSI BALI	03/10/2023	6 Bulan	10/03/2023	10/09/2023	1.464.000,00	7.913,51	185	1.464.000,00	0,00
470	IZIN PERIKAMAN	ARMAN T	ANDON RIYANG 04	PROVINSI BALI	03/10/2023	6 Bulan	10/03/2023	10/09/2023	1.220.000,00	6.594,59	185	1.220.000,00	0,00
471	IZIN PERIKAMAN	MUHAMMAD TIRO	ANDON TIRO JAYA 3	PROVINSI BALI	01/02/2023	6 Bulan	10/03/2023	10/09/2023	1.098.000,00	5.935,14	185	1.098.000,00	0,00
472	IZIN PERIKAMAN	MUHAMMAD TIRO	ANDON TIRO JAYA 01	PROVINSI BALI	01/02/2023	6 Bulan	10/03/2023	10/09/2023	915.000,00	4.945,95	185	915.000,00	0,00
473	IZIN PERIKAMAN	AHMADI R	IBRA 1	PROVINSI BALI	01/06/2023	6 Bulan	14/03/2023	14/09/2023	1.037.000,00	5.605,41	185	1.037.000,00	0,00
474	IZIN PERIKAMAN	MARTEN	DUTA LOSARI 08	PROVINSI BALI	01/06/2023	6 Bulan	14/03/2023	14/09/2023	1.464.000,00	7.913,51	185	1.464.000,00	0,00
475	IZIN PERIKAMAN	MARTEN	DUTA LOSARI 07	PROVINSI BALI	01/06/2023	6 Bulan	14/03/2023	14/09/2023	1.220.000,00	6.594,59	185	1.220.000,00	0,00
476	IZIN PERIKAMAN	MARTEN	DUTA LOSARI 06	PROVINSI BALI	01/06/2023	6 Bulan	14/03/2023	14/09/2023	1.159.000,00	6.264,86	185	1.159.000,00	0,00
477	IZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 01	PROVINSI BALI	01/06/2023	6 Bulan	14/03/2023	14/09/2023	1.220.000,00	6.594,59	185	1.220.000,00	0,00
478	IZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 05	PROVINSI BALI	01/06/2023	6 Bulan	14/03/2023	14/09/2023	915.000,00	4.945,95	185	915.000,00	0,00
479	IZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 02	PROVINSI BALI	01/06/2023	6 Bulan	14/03/2023	14/09/2023	1.098.000,00	5.935,14	185	1.098.000,00	0,00
480	IZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 03	PROVINSI BALI	01/06/2023	6 Bulan	14/03/2023	14/09/2023	1.586.000,00	8.572,97	185	1.586.000,00	0,00
481	IZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 09	PROVINSI BALI	01/06/2023	6 Bulan	14/03/2023	14/09/2023	1.525.000,00	8.243,24	185	1.525.000,00	0,00
482	IZIN PERIKAMAN	PT.PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM PERINTIS JAYA 26	PROVINSI BALI	14/3/2023	12 Bulan	14/03/2023	14/03/2024	4.060.000,00	11.062,67	367	3.241.362,40	818.637,60
483	IZIN PERIKAMAN	PT.PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM PERINTIS JAYA 27	PROVINSI BALI	14/3/2023	12 Bulan	14/03/2023	14/03/2024	4.060.000,00	11.062,67	367	3.241.362,40	818.637,60
484	IZIN PERIKAMAN	MUH SADAR	AISAH 27	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	6.924.32	1.281.000,00	185	1.281.000,00	0,00
485	IZIN PERIKAMAN	RUDIANTO	SETIA JAYA ST 05	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.769.000,00	9.562,16	185	1.769.000,00	0,00
486	IZIN PERIKAMAN	ARDI	AISAH 48	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.647.000,00	8.902,70	185	1.647.000,00	0,00
487	IZIN PERIKAMAN	NASIR	AISAH 49	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.525.000,00	8.243,24	185	1.525.000,00	0,00
488	IZIN PERIKAMAN	MARDIANTO	FAUSAN 01	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.708.000,00	9.232,43	185	1.708.000,00	0,00
489	IZIN PERIKAMAN	MUH SADAR	AISAH 28	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.403.000,00	7.583,78	185	1.403.000,00	0,00
490	IZIN PERIKAMAN	SANGKALA	SINAR BAHARI 07	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.098.000,00	5.935,14	185	1.098.000,00	0,00
491	IZIN PERIKAMAN	SAHIRMAN	HAERUL SAMUDRA 04	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.586.000,00	8.572,97	185	1.586.000,00	0,00
492	IZIN PERIKAMAN	SAHIRMAN	HAERUL SAMUDRA 07	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.464.000,00	7.913,51	185	1.464.000,00	0,00
493	IZIN PERIKAMAN	SAHIRMAN	HAERUL SAMUDRA 08	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.769.000,00	9.562,16	185	1.769.000,00	0,00
494	IZIN PERIKAMAN	SAHIRMAN	HAERUL SAMUDRA 09	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.769.000,00	9.562,16	185	1.769.000,00	0,00
495	IZIN PERIKAMAN	SAHIRMAN	HAERUL SAMUDRA 10	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.769.000,00	9.562,16	185	1.769.000,00	0,00
496	IZIN PERIKAMAN	NURDIN	SARINAH 02	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.342.000,00	7.254,05	185	1.342.000,00	0,00
497	IZIN PERIKAMAN	AMBOTANG	DOA IBU 1A	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.037.000,00	5.605,41	185	1.037.000,00	0,00
498	IZIN PERIKAMAN	AMBOTANG	DOA IBU 2A	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.098.000,00	5.935,14	185	1.098.000,00	0,00
499	IZIN PERIKAMAN	ARWIN	ARKA	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.159.000,00	6.264,86	185	1.159.000,00	0,00
500	IZIN PERIKAMAN	M LUBIS	SINAR PULAU SEMBILAN	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.342.000,00	7.254,05	185	1.342.000,00	0,00
501	IZIN PERIKAMAN	AHAR	RESKI AMANDA 03	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.037.000,00	5.605,41	185	1.037.000,00	0,00
502	IZIN PERIKAMAN	JUNAID	BUMA 1 A	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.769.000,00	9.562,16	185	1.769.000,00	0,00
503	IZIN PERIKAMAN	ASHAR	SARO MASE 05	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.098.000,00	5.935,14	185	1.098.000,00	0,00
504	IZIN PERIKAMAN	ASDI	RAHIMA ABADI	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.403.000,00	7.583,78	185	1.403.000,00	0,00
505	IZIN PERIKAMAN	MUHAMMAD ALI	SINAR PULAU SEMBILAN 02	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.342.000,00	7.254,05	185	1.342.000,00	0,00
506	IZIN PERIKAMAN	FUDDIN	INDRIANI 03	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.220.000,00	6.594,59	185	1.220.000,00	0,00
507	IZIN PERIKAMAN	M SUPARDI	KARUNIA TERATAI	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.159.000,00	6.264,86	185	1.159.000,00	0,00
508	IZIN PERIKAMAN	KAMARUDDIN	ARGA PALAH 02	PROVINSI BALI	17/3/2023	6 Bulan	17/03/2023	17/09/2023	1.037.000,00	5.605,41	185	1.037.000,00	0,00
509	IZIN PERIKAMAN	I NYOMAN MORIS	KM TUNA SEGAR 8	PROVINSI BALI	20/3/2023	12 Bulan	20/03/2023	20/03/2024	4.350.000,00	11.852,86	367	3.401.771,12	948.228,88
510	IZIN PERIKAMAN	I NYOMAN MORIS	KM TUNA SEGAR 88	PROVINSI BALI	20/3/2023	12 Bulan	20/03/2023	20/03/2024	4.205.000,00	11.457,77	367	3.288.378,75	916.621,25
511	IZIN PERIKAMAN	PT. PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM PERINTIS JAYA 273	PROVINSI BALI	04/05/2023	12 Bulan	04/05/2023	04/05/2024	4.205.000,00	11.457,77	367	2.772.778,29	1.432.220,71
512	IZIN PERIKAMAN	I NYOMAN MORIS	KM TUNA SEGAR 18	PROVINSI BALI	04/06/2023	12 Bulan	04/06/2023	04/06/2024	4.060.000,00	11.062,67	367	2.334.223,43	1.725.776,57
513	IZIN PERIKAMAN	I NYOMAN MORIS	KM NUSANTARA 868	PROVINSI BALI	04/06/2023	12 Bulan	04/06/2023	04/06/2024	2.755.000,00	7.506,81	367	1.583.937,33	1.171.062,67
514	IZIN PERIKAMAN	CAHYADI T	KM NAGA MAS PERKASA II	PROVINSI BALI	04/06/2023	12 Bulan	04/06/2023	04/06/					

No.	Uraian	NAMA PENYEWAWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											7.621.477.622,23	19.013.940.968,03
521	ZIN PERIKAMAN	PT. PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM PERINTIS JAYA 28	PROVINSI BALI	05/02/2023	12 Bulan	02/05/2023	02/05/2024	4.060.000,00	11.062,67	367	2.699.291,55	1.360.708,45
522	ZIN PERIKAMAN	PT. PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM PERINTIS JAYA 98	PROVINSI BALI	05/02/2023	12 Bulan	02/05/2023	02/05/2024	4.205.000,00	11.457,77	367	2.795.694,82	1.409.305,18
523	ZIN PERIKAMAN	PT. PERINTIS JAYA INTERNASIONAL	KM PERINTIS JAYA 12	PROVINSI BALI	05/02/2023	12 Bulan	02/05/2023	02/05/2024	4.060.000,00	11.062,67	367	2.699.291,55	1.360.708,45
524	ZIN PERIKAMAN	RUDI SYAIFUL ANAM	KM SUMBER RAHMAD 1	PROVINSI BALI	30/03/2023	6 Bulan	30/03/2023	30/09/2023	1.830.000,00	9.891,89	185	1.830.000,00	0,00
525	ZIN PERIKAMAN	MU'ARI	GOD BLESS	PROVINSI BALI	26/1/2023	6 Bulan	19/05/2023	19/11/2023	1.830.000,00	9.891,89	185	1.830.000,00	0,00
526	ZIN PERIKAMAN	AHMAD YONO	TIRTO KENCONO 1	PROVINSI BALI	29/3/2023	6 Bulan	19/05/2023	19/11/2023	1.525.000,00	8.243,24	185	1.525.000,00	0,00
527	ZIN PERIKAMAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	KM SANJAYA 33	PROVINSI BALI	06/12/2023	12 Bulan	12/06/2023	12/06/2024	3.321.000,00	9.049,05	367	1.836.956,40	1.484.043,60
528	ZIN PERIKAMAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	KM BINTANG KEJORA NO.1	PROVINSI BALI	06/12/2023	12 Bulan	12/06/2023	12/06/2024	3.567.000,00	9.719,35	367	1.973.027,25	1.593.972,75
529	ZIN PERIKAMAN	PT. SENTRAL BENOA UTAMA	KM PUTRA BAHARI 14	PROVINSI BALI	06/12/2023	12 Bulan	12/06/2023	12/06/2024	3.567.000,00	9.719,35	367	1.973.027,25	1.593.972,75
530	ZIN PERIKAMAN	WAGIMAN	ANUGERAH ILLAHI 1	PROVINSI BALI	14/06/2023	6 Bulan	08/06/2024	08/12/2024	1.220.000,00	6.630,43	184	-	1.220.000,00
531	ZIN PERIKAMAN	SITI JURIAH	RAJAWALI	PROVINSI BALI	14/06/2023	6 Bulan	08/06/2024	08/12/2024	1.830.000,00	9.945,65	184	-	1.830.000,00
532	ZIN PERIKAMAN	NURKAMIN	BARU SAKTI	PROVINSI BALI	26/6/2023	6 Bulan	08/03/2023	08/09/2024	1.464.000,00	2.656,99	551	794.439,20	669.560,80
533	ZIN PERIKAMAN	MARTEN	DUTA LOSARI 08	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.464.000,00	7.913,51	185	1.416.518,92	47.481,08
534	ZIN PERIKAMAN	MARTEN	DUTA LOSARI 07	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.220.000,00	6.594,59	185	1.180.432,43	39.567,57
535	ZIN PERIKAMAN	MARTEN	DUTA LOSARI 06	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.159.000,00	6.264,86	185	1.121.410,81	37.589,19
536	ZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 01	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.220.000,00	6.594,59	185	1.180.432,43	39.567,57
537	ZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 02	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.098.000,00	5.935,14	185	1.062.389,19	35.610,81
538	ZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 03	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.586.000,00	8.572,97	185	1.534.562,16	51.437,84
539	ZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 05	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	915.000,00	4.945,95	185	885.324,32	29.675,68
540	ZIN PERIKAMAN	DACING	DUTA LOSARI 09	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.525.000,00	8.243,24	185	1.475.540,54	49.459,46
541	ZIN PERIKAMAN	AHMADI R	IBRA 1	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.037.000,00	5.605,41	185	1.003.367,57	33.632,43
542	ZIN PERIKAMAN	MUH.HATTA	HARAPAN HR 01	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.037.000,00	5.605,41	185	1.003.367,57	33.632,43
543	ZIN PERIKAMAN	MUH.HATTA	HARAPAN HR 02	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.586.000,00	8.572,97	185	1.534.562,16	51.437,84
544	ZIN PERIKAMAN	IDHAM	FILZA 01	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.464.000,00	7.913,51	185	1.416.518,92	47.481,08
545	ZIN PERIKAMAN	IDHAM	FILZA 03	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.647.000,00	8.902,70	185	1.593.583,78	53.416,22
546	ZIN PERIKAMAN	MANSAR	ANUGRAH ICHSAN 07	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.220.000,00	6.594,59	185	1.180.432,43	39.567,57
547	ZIN PERIKAMAN	SOFYAN	DUA PUTRI 14	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.525.000,00	8.243,24	185	1.475.540,54	49.459,46
548	ZIN PERIKAMAN	FIRMAN	TRIBUN TIMUR 11	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.464.000,00	7.913,51	185	1.416.518,92	47.481,08
549	ZIN PERIKAMAN	FIRMAN	TRIBUN TRIMUR 12	PROVINSI BALI	29/05/2023	6 Bulan	06/07/2023	06/01/2024	1.525.000,00	8.243,24	185	1.475.540,54	49.459,46
550	ZIN PERIKAMAN	HASAN BASRI	SIUP. 1 KAPAL (BINTANG LAGI 02)	PROVINSI BALI	20/07/2023	30 Tahun	20/07/2023	20/07/2053	930.000,00	84,86	10959	14.002,19	916.997,81
551	ZIN PERIKAMAN	SULAIMIK	SIUP. 1 KAPAL (BINTANG NARMADA II S)	PROVINSI BALI	25/07/2023	30 Tahun	25/07/2023	25/07/2053	930.000,00	84,86	10959	13.577,88	916.422,12
552	ZIN PERIKAMAN	TAJIRIN	MALVINAS 04	PROVINSI BALI	07/06/2023	12 Bulan	16/08/2023	16/08/2024	1.098.000,00	2.991,83	367	412.871,93	685.128,07
553	ZIN PERIKAMAN	ANTONG	SANG SURYA 04	PROVINSI BALI	07/06/2023	12 Bulan	16/08/2023	16/08/2024	1.281.000,00	3.490,46	367	481.683,92	799.316,08
554	ZIN PERIKAMAN	SUARDI	MUTIARA BURUNGLOHE 01	PROVINSI BALI	07/06/2023	12 Bulan	16/08/2023	16/08/2024	1.220.000,00	3.324,25	367	458.746,59	761.253,41
555	ZIN PERIKAMAN	BAHTIAR C	CAHAYA REZKY 77	PROVINSI BALI	07/06/2023	12 Bulan	16/08/2023	16/08/2024	1.586.000,00	4.321,53	367	596.370,57	989.629,43
556	ZIN PERIKAMAN	ABD.LATIF	ARYA PUTRA 77	PROVINSI BALI	07/06/2023	12 Bulan	16/08/2023	16/08/2024	1.403.000,00	3.822,89	367	527.558,58	875.441,42
557	ZIN PERIKAMAN	RISNAWATI	DERMAGA STAR 03	PROVINSI BALI	07/06/2023	12 Bulan	16/08/2023	16/08/2024	1.464.000,00	3.989,10	367	550.495,91	913.504,09
558	ZIN PERIKAMAN	DULLAH	ADI JAYA 03	PROVINSI BALI	07/06/2023	12 Bulan	16/08/2023	16/08/2024	1.159.000,00	3.158,04	367	435.809,26	723.190,74
559	ZIN PERIKAMAN	ASRUL	NAGINA SNI 01	PROVINSI BALI	07/10/2023	6 Bulan	24/08/2023	24/02/2024	1.769.000,00	9.562,16	185	1.243.081,08	525.918,92
560	ZIN PERIKAMAN	IRVANDI	BALIHUKO 05	PROVINSI BALI	07/10/2023	6 Bulan	24/08/2023	24/02/2024	1.525.000,00	8.243,24	185	1.071.621,62	453.378,38
561	ZIN PERIKAMAN	SADAR	NUSA INDAH BL 01	PROVINSI BALI	07/10/2023	6 Bulan	24/08/2023	24/02/2024	1.464.000,00	7.913,51	185	1.028.756,76	435.243,24
562	ZIN PERIKAMAN	ABD.RASYID	NURLALELA 01	PROVINSI BALI	07/10/2023	6 Bulan	24/08/2023	24/02/2024	978.000,00	5.275,68	185	685.837,84	290.162,16
563	ZIN PERIKAMAN	SYAHRUL IHSAN	ANDON (BRASIL IC 05)	PROVINSI BALI	09/08/2023	6 Bulan	08/09/2023	03/08/2024	1.220.000,00	3.685,80	331	423.867,07	796.132,93
564	ZIN PERIKAMAN	AWAL	ANDON (AWAL USAHA RA)	PROVINSI BALI	09/08/2023	6 Bulan	08/09/2023	03/08/2024	1.403.000,00	4.236,67	331	487.447,13	915.552,87
565	ZIN PERIKAMAN	AWAL	ANDON (AWAL USAHA RB)	PROVINSI BALI	09/08/2023	6 Bulan	08/09/2023	03/08/2024	1.708.000,00	5.160,12	331	593.413,90	1.114.586,10
566	ZIN PERIKAMAN	ALDI FERDIANSYAH HASAN	KM PUTRI AYU I AF	PROVINSI BALI	11/03/2023	12 Bulan	03/11/2023	03/11/2024	2.460.000,00	6.703,00	367	395.476,84	2.064.523,16
567	ZIN PERIKAMAN	ALDI FERDIANSYAH HASAN	KM PUTRI AYU II AF	PROVINSI BALI	11/03/2023	12 Bulan	03/11/2023	03/11/2024	1.230.000,00	3.351,50	367	197.738,42	1.032.261,58
568	ZIN PERIKAMAN	MIFTAH SURGANNA	SIUP (BINTANG AMANAH 01)	PROVINSI BALI	23/11/2023	30 Tahun	23/11/2023	23/11/2053	930.000,00	84,86	10959	3.309,61	926.690,39
569	ZIN PERIKAMAN	NUR BARO'AH	SIUP (MAJU JAYA I NB & MAJU JAYA II NB)	PROVINSI BALI	12/08/2023	30 Tahun	08/12/2023	08/12/2053	1.736.000,00	158,41	10959	3.801,81	1.732.198,19
570	ZIN PERIKAMAN	ANDRI SUBAHTIAR	SIUP (BINTANG ANUGRAH II AS)	PROVINSI BALI	14/12/2023	30 Tahun	14/12/2023	14/12/2053	930.000,00	84,86	10959	1.527,51	928.472,49
571	ZIN PERIKAMAN	MASKANAH	SIUP (BINTANG GALAXI II)	PROVINSI BALI	14/12/2023	30 Tahun	14/12/2023	14/12/2053	930.000,00	84,86	10959	1.527,51	928.472,49
572	ZIN PERIKAMAN	NURUL FAWAID	SIUP (BERLIAN NURVA I & BERLIAN NURVA II)	PROVINSI BALI	20/12/2023	30 Tahun	20/12/2023	20/12/2053	1.674.000,00	152,75	10959	1.833,01	1.672.166,99
573	ZIN PERIKAMAN	SUBHAN	SIUP (ISTAMBUL 01 & ISTAMBUL II)	PROVINSI BALI	21/12/2023	30 Tahun	21/12/2023	21/12/2053	1.736.000,00	158,41	10959	1.742,49	1.734.257,51
574	ZIN PERIKAMAN	AVENT YACOB	SIUP CERIA ISTAMBUL I & CERIA ISTAMBUL II	PROVINSI BALI	21/12/2023	30 Tahun	21/12/2023	21/12/2053	1.860.000,00	169,72	10959	1.866,96	1.858.133,04
575	ZIN PERIKAMAN	DEVA MARTHA	BUNGA ISTAMBUL 1 & BUNGA ISTAMBUL 2	PROVINSI BALI	21/12/2023	30 Tahun	21/12/2023	21/12/2053	1.829.000,00	166,89	10959	1.835,84	1.827.164,16
576	ZIN PERIKAMAN	HERI HUMAINI	INTAN ISTAMBUL II BINTAN ISTAMBUL 03	PROVINSI BALI	21/12/2023	30 Tahun	21/12/2023	21/12/2053	1.860.000,00	169,72	10959	1.866,96	1.858.133,04
577	ZIN PERIKAMAN	ANDI RAHMAN	NIKMAT LAGI 01 AR & NIKMAT LAGI 02 AR	PROVINSI BALI	21/12/2023	30 Tahun	21/12/2023	21/12/2053	1.178.000,00	107,49	10959	1.182,41	1.176.817,59
578	ZIN PERIKAMAN	IMAM TAJUDIN NUR	DINDA ISTAMBUL I DAN DINDA ISTAMBUL II	PROVINSI BALI	21/12/2023	30 Tahun	27/12/2023	27/12/2053	1.829.000,00	166,89	10959	834,47	1.828.165,53
579	RSUD Bali Mandara	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan ATM	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	03/10/2022	5 Tahun	03/10/2022	03/10/2027	50.000.000,00	27.367,27	1.827	9.989.053,09	37.547.892,72
580	RSUD Bali Mandara	PT Bank Negara Indonesia	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan ATM	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	12/09/2022	2 Tahun	12/09/2022	12/09/2024	20.000.000,00	27.322,40	732	9.972.677,60	6.994.535,51
581	RSUD Bali Mandara	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan ATM	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	02/01/2023	1 Tahun	02/01/2023	02/01/2024	10.000.000,00	27.322,40	366	9.945.355,19	54.644,81
582	RSUD Bali Mandara	PT Bank Mandiri	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	30/12/2022	3 Tahun	02/01/2021	02/01/2024	30.0				

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
JUMLAH													
586	RSUD Bali Mandara	KKPN Tambak Sari Husada (50.215 m2)	Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Ruang	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	01/11/2023	1 Tahun	01/11/2023	01/11/2024	46.500.000,00	126.703,00	367	7.621.477.622,23	19.013.940.968,03
587	RSUD Bali Mandara	KKPN Tambak Sari Husada (65 m2)	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	30/12/2022	1 Tahun	01/01/2023	01/01/2024	67.000.000,00	183.060,11	366	7.728.882,83	183.060,11
588	RSUD Bali Mandara	KKPN Tambak Sari Husada (20 m2)	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	01/09/2023	1 Tahun	01/09/2023	01/09/2024	17.200.000,00	46.866,49	367	66.816.939,89	11.482.288,83
589	RSUD Bali Mandara	PT Premiera Nusantara	Perjanjian Sewa Menyewa	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	22/6/2023	1 Tahun	22/6/2023	22/1/2024	4.700.000,00	21.860,47	215	5.717.711,17	480.930,23
590	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	BPD BALI	Sewa menyewa atas ruang ATM	RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali	02/01/2020	5 Tahun	02/01/2020	02/01/2025	60.000.000,00	32.822,76	1828	4.219.069,77	12.078.774,81
591	Hasil Sewa BMD	PT. TOWER BERSAMA	Sewa Menyewa Atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	Di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur	17/09/2018	5 Tahun	07/07/2019	07/07/2024	202.500.000,00	110.776,81	1828	11.980.306,35	20.936.816,19
592	Hasil Sewa BMD	PT. TELEKOMUNIKASI SELULER	Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Untuk Pemasangan Selter Besert Jaringan Penguat Sinyal	Di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur	12/29/2020	5 Tahun	29/12/2020	29/12/2025	150.000.000,00	82101.80624	1827	29.967.159,28	59.852.216,75
593	Hasil Sewa BMD	KOPERASI PEKAWAI PRAJA	Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Untuk Usaha Koperasi Dengan Koperasi Pegawai Praja	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permenan dan Sebagian Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain Yang Terletak Di Lingkungan Kantor Gubernur Bali, Di Jalan Basuki Rahmat-Niti Mandala-Renon-Denpasar, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Sebagai Tempat Usaha Koperasi	03/01/2021	5 Tahun	01/03/2021	01/03/2026	37.340.000,00	20.437,88	1827	7.459.824,85	16.166.360,15
594	Hasil Sewa BMD	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Sewa Menyewa Atas Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Dan Ruang Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Tanah Seluas 7,81 m dari Keseluruhan Luas Tanah Seluas 68.120 m dan Ruang Pada Gedung Wiswa Sabha Seluas 40 m. Yang Terletak Di Lingkungan Kantor Gubernur Bali Jalan Basuki Rahmat - Niti Mandala - Renon - Denpasar, Desak Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.	4/19/2022	5 Tahun	19/04/2022	19/04/2027	78.657.500,00	43.052,82	1827	15.714.278,87	51.878.646,69
595	Hasil Sewa BMD	Ir. Hendarlo Tjokro Setio	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	05/05/2006	per 30 tahun	05/05/2006	05/05/2036	551.550.000,00	50.328,50	10.959,00	18.369.901,45	226.931.193,54
596	Hasil Sewa BMD	PT Danau Winata Indah	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	14/03/2007	per 30 tahun	14/03/2007	14/03/2037	4.715.800.000,00	430.312,98	10.959,00	157.064.239,44	2.074.969.212,52
597	Hasil Sewa BMD	Gde Ketut Nugrahita Pendi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	16/02/2013	tiap 5 tahun	16/02/2013	16/02/2018	21.600.000,00	11.822,66	1.827,00	-	0,00
598	Hasil Sewa BMD	I Wayan Tinggen	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/08/2011	per 5 tahun	15/08/2011	15/08/2016	21.750.000,00	11.898,25	1.828,00	-	0,00
599	Hasil Sewa BMD	I Wayan Rumanik	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	27/01/2012	per 5 tahun	27/01/2012	27/01/2017	6.500.000,00	3.555,80	1.828,00	-	0,00
600	Hasil Sewa BMD	Rudy Alianto	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	22/01/2013	per 5 tahun	22/01/2013	22/01/2018	173.700.000,00	95.073,89	1.827,00	-	0,00
601	Hasil Sewa BMD	PT Sanatana Swasmita	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	16/04/2013	per 5 tahun	16/04/2013	16/04/2018	80.300.000,00	43.951,83	1.827,00	-	0,00
602	Hasil Sewa BMD	Warga Telengan di Karangasem Denpasar	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	03/02/2014	per 5 tahun	03/02/2014	03/02/2019	26.443.000,00	14.473,45	1.827,00	-	0,00
603	Hasil Sewa BMD	Tower Bersama	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	07/07/2014	per 5 tahun	07/07/2014	07/07/2019	200.000.000,00	109.469,07	1.827,00	-	0,00
604	Hasil Sewa BMD	Yayasan Korpri/Universitas Warmadewa	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	24/07/2014	per 5 tahun	24/07/2014	24/07/2019	156.375.000,00	85.591,13	1.827,00	-	0,00
605	Hasil Sewa BMD	PT. Genta Buana Lestari	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/10/2014	per 5 tahun	10/10/2014	10/10/2019	1.559.424.000,00	853.543,51	1.827,00	-	0,00
606	Hasil Sewa BMD	Andreas Tanudjaja	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/09/2014	per 5 tahun	15/09/2014	15/09/2019	262.500.000,00	143.678,16	1.827,00	-	0,00
607	Hasil Sewa BMD	KSI Bina Prestasi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	20/11/2014	per 5 tahun	20/11/2014	20/11/2019	40.950.000,00	22.413,79	1.827,00	-	0,00
608	Hasil Sewa BMD	I Wayan Adnyana	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/12/2014	per 5 tahun	10/12/2014	10/12/2019	72.500.000,00	39.682,54	1.827,00	-	0,00
609	Hasil Sewa BMD	PT WIKA	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	26/12/2014	per 5 tahun	26/12/2014	26/12/2019	1.934.250.000,00	1.058.702,79	1.827,00	-	0,00
610	Hasil Sewa BMD	TPST Desa Adat Seminyak	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	11/02/2015	per 5 tahun	11/02/2015	11/02/2020	42.750.000,00	23.399,01	1.827,00	-	0,00
611	Hasil Sewa BMD	A.A. Ngurah Manik Sumarajaya	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	27/03/2015	per 5 tahun	27/03/2015	27/03/2020	60.000.000,00	32.822,76	1.828,00	-	0,00
612	Hasil Sewa BMD	DFD Partai Gerindra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	11/03/2015	per 5 tahun	11/03/2015	11/03/2020	27.200.000,00	14.879,65	1.828,00	-	0,00
613	Hasil Sewa BMD	Anak Agung Gede Agung	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	04/03/2015	per 5 tahun	04/03/2015	04/03/2020	70.500.000,00	38.566,74	1.828,00	-	0,00
614	Hasil Sewa BMD	Ketut Sri Sudarmani	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	24/06/2015	per 5 tahun	24/06/2015	24/06/2020	13.420.000,00	7.341,36	1.828,00	-	0,00
615	Hasil Sewa BMD	PT. Quadratel Persada/PT. Telkom	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	28/12/2015	per 5 tahun	28/12/2015	28/12/2020	126.676.753,00	69.298,00	1.828,00	-	0,00
616	Hasil Sewa BMD	LPD Desa Beraban	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/02/2016	per 5 tahun	15/02/2016	15/02/2021	7.500.000,00	4.102,84	1.828,00	-	0,00
617	Hasil Sewa BMD	I Wayan Tinggen	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/08/2016	per 5 tahun	15/08/2016	15/08/2021	43.500.000,00	23.809,52	1.827,00	-	0,00
618	Hasil Sewa BMD	Koperasi Krama Subak Lumbung Sari Desa Temesi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/02/2016	per 5 tahun	15/02/2016	15/02/2021	7.500.000,00	4.102,84	1.828,00	-	0,00
619	Hasil Sewa BMD	I Made Surasta	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	14/08/2016	per 5 tahun	14/08/2016	14/08/2021	125.000.000,00	68.418,17	1.827,00	-	0,00
620	Hasil Sewa BMD	I Gede Putu Agus Wistama Putra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	17/11/2016	per 5 tahun	17/11/2016	17/11/2021	75.000.000,00	41.050,90	1.827,00	-	0,00
621	Hasil Sewa BMD	Yayasan Pendidikan Nusantara	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	31/10/2016	per 5 tahun	31/10/2016	31/10/2021	74.000.000,00	40.503,56	1.827,00	-	0,00
622	Hasil Sewa BMD	Badan Pengelola Air Minum Desa Akah	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	01/12/2016	per 5 tahun	01/12/2016	01/12/2021	7.500.000,00	4.105,09	1.827,00	-	0,00
623	Hasil Sewa BMD	PT. Garuda Adhmatra Indonesia	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	29/12/2016	per 5 tahun	29/12/2016	29/12/2021	5.205.000.000,00	2.848.932,68	1.827,00	-	0,00
624	Hasil Sewa BMD	DPD PDIP Provinsi Bali	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/05/2016	per 5 tahun	12/05/2016	12/05/2021	100.200.000,00	54.844,01	1.827,00	-	0,00
625	Hasil Sewa BMD	Ki Tompel	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/01/2017	per 5 tahun	12/01/2017	12/01/2022	18.200.000,00	9.961,69	1.827,00	-	0,00
626	Hasil Sewa BMD	Rambias Sastra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	19/01/2017	per 5 tahun	19/01/2017	19/01/2022	125.000.000,00	68.418,17	1.827,00	-	0,00
627	Hasil Sewa BMD	putu mahardika	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	18/01/2017	per 5 tahun	18/01/2017	18/01/2022	27.500.000,00	15.052,00	1.827,00	-	0,00
628	Hasil Sewa BMD	BPD Bali	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	19/04/2017	tiap 5 tahun	19/04/2017	19/04/2022	78.657.500,00	43.052,82	1.827,00	-	0,00
629	Hasil Sewa BMD	Gusti Ketut Merta	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	01/03/2017	tiap 5 tahun	01/03/2017	01/03/2022	68.250.000,00	37.356,32	1.827,00	-	0,00
630	Hasil Sewa BMD	I B Gde Budi Hartawan	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	18/09/2017	tiap 5 tahun	18/09/2017	18/09/2022	250.000.000,00	136.836,34	1.827,00	-	0,00
631	Hasil Sewa BMD	I Wayan Sutama Asmara	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	19/09/2017	tiap 5 tahun	19/09/2017	19/09/2022	108.750.000,00	59.523,81	1.827,00	-	0,00
632	Hasil Sewa BMD	I Wayan Rumanik	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	27/01/2017	tiap 5 tahun	27/01/2017	27/01/2022	8.125.000,00	4.447,18	1.827,00	-	0,00
633	Hasil Sewa BMD	Ketut Masrining	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	17/01/2018	5 tahun	17/01/2018	17/01/2023	37.500.000,00	20.525,45	1.827,00	348.932,680	0,00
634	Hasil Sewa BMD	Ni Nengah Rapeg	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	28/02/2018	5 tahun	28/02/2018	28/02/2023	8.500.000,00	4.652,44	1.827,00	274.493,71	0,00
635	Hasil Sewa BMD	I Wayan Leser	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	24/01/2018	5 tahun	24/01/2018	24/01/2023	3.200.000,00	1.751,51	1.827,00	42.036,12	0,00

No.	Uraian	NAMA PENYEWAJ/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											7.621.477.622,23	19.013.940.968,03
636	Hasil Sewa BMD	I Wayan Lugra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	24/01/2018	5 tahun	24/01/2018	24/01/2023	6.100.000,00	3.338,81	1.827,00	80.131,36	0,00
637	Hasil Sewa BMD	Wayan Sudiarzana	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	28/02/2018	5 tahun	28/02/2018	28/02/2023	10.200.000,00	5.582,92	1.827,00	329.392,45	0,00
638	Hasil Sewa BMD	I Nyoman Adhyana SH, MH	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	28/02/2018	5 tahun	28/02/2018	28/02/2023	37.500.000,00	20.525,45	1.827,00	1.211.001,64	0,00
639	Hasil Sewa BMD	I Gede Raka Adnyana	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/05/2018	bayar tiga tahun nunggak th 4 dan th 5	21/05/2018	21/05/2021	24.000.000,00	21.877,85	1.097,00	-	0,00
640	Hasil Sewa BMD	Drs. I Nyoman Bawa	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	09/08/2018	5 tahun	09/08/2018	09/08/2023	8.750.000,00	4.789,27	1.827,00	1.058.429,12	0,00
641	Hasil Sewa BMD	PDAM Gianyar	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	07/09/2018	5 tahun	07/09/2018	07/09/2023	48.750.000,00	26.683,09	1.827,00	6.670.771,76	0,00
642	Hasil Sewa BMD	DPC Giranda	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	13/08/2018	bayar tiga tahun nunggak th 4 dan th 5	13/08/2018	13/08/2021	103.953.000,00	94.761,17	1.097,00	-	0,00
643	Hasil Sewa BMD	Gde Ketut Nugraha Pendi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	16/02/2018	tiap 5 tahun	16/02/2018	16/02/2023	770.250.000,00	421.592,78	1.827,00	19.814.860,43	0,00
644	Hasil Sewa BMD	Desa Adat Pakraman Sesetan	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	24/09/2018	bayar dua tahun nunggak th 3, 4 dan th 5	24/09/2018	24/09/2020	32.300.000,00	44.125,68	732,00	-	0,00
645	Hasil Sewa BMD	Ida Bagus Kompyang Gede	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	22/10/2018	per 5 tahun	22/10/2018	22/10/2023	37.500.000,00	20.525,45	1.827,00	6.055.008,21	0,00
646	Hasil Sewa BMD	I Made Sukarta	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/09/2018	per 5 tahun	21/09/2018	21/09/2023	3.000.000,00	1.642,04	1.827,00	433.497,54	0,00
647	Hasil Sewa BMD	IBP Whainawa,SE	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/12/2018	per 5 tahun	21/12/2018	21/12/2023	117.500.000,00	64.313,08	1.827,00	22.831.143,95	0,00
648	Hasil Sewa BMD	Gana Paramananda	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/06/2019	per 5 tahun	10/06/2019	10/06/2024	133.090.000,00	72.806,35	1.828,00	26.574.316,19	11.794.628,01
649	Hasil Sewa BMD	PDAM tirta mangutama Badung	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	02/05/2019	per 5 tahun	02/05/2019	02/05/2024	40.000.000,00	21.881,84	1.828,00	7.986.870,90	2.691.466,08
650	Hasil Sewa BMD	Yudi Kurnianingsih	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	18/04/2019	per tahun	18/04/2019	18/04/2021	29.400.000,00	40.163,93	732,00	-	0,00
651	Hasil Sewa BMD	PT. Genta Buana Lestari	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/10/2019	per 5 tahun	10/10/2019	10/10/2024	960.000.000,00	525.164,11	1.828,00	191.684.901,53	149.146.608,32
652	Hasil Sewa BMD	I Bagus Putra Whainawa	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	23/10/2019	per 5 tahun	23/10/2019	23/10/2024	62.400.000,00	34.135,67	1.828,00	12.459.518,60	10.138.293,22
653	Hasil Sewa BMD	Ida Bagus Pada Kesuma	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	16/12/2019	per 5 tahun	16/12/2019	16/12/2024	15.000.000,00	8.205,69	1.828,00	2.995.076,59	2.880.196,93
654	Hasil Sewa BMD	Komang Artisti Sekar Linuwih	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/07/2019	per 5 tahun	10/07/2019	10/07/2024	12.500.000,00	6.838,07	1.828,00	2.495.897,16	1.312.910,28
655	Hasil Sewa BMD	Suci Ambarsari	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	01/07/2019	per 5 tahun	01/07/2019	01/07/2024	60.000.000,00	32.822,76	1.828,00	11.980.396,35	6.006.564,55
656	Hasil Sewa BMD	TPST Desa Adat Seminyak	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/07/2019	per 5 tahun	10/07/2019	10/07/2024	52.500.000,00	28.719,91	1.828,00	10.482.768,05	5.514.223,20
657	Hasil Sewa BMD	Rudy Alianto	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/07/2019	per 5 tahun	15/07/2019	15/07/2024	112.500.000,00	61.542,67	1.828,00	22.463.074,40	12.123.990,91
658	Hasil Sewa BMD	Dewa Komang Indra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/10/2019	per 5 tahun	15/10/2019	15/10/2024	175.000.000,00	95.733,04	1.828,00	34.942.560,18	27.666.849,01
659	Hasil Sewa BMD	PT. Bali Pawwahan	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/10/2019	per 5 tahun	15/10/2019	15/10/2024	3.899.750.000,00	2.133.342,45	1.828,00	778.669.994,53	616.535.968,27
660	Hasil Sewa BMD	I Kadek Andy Asmarajaya	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/11/2019	per 5 tahun	12/11/2019	12/11/2024	105.000.000,00	57.439,82	1.828,00	20.965.536,11	18.208.424,50
661	Hasil Sewa BMD	Yayasan Corti	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	14/10/2019	per 5 tahun	14/10/2019	14/10/2024	106.000.000,00	57.986,87	1.828,00	21.165.207,88	16.700.218,82
662	Hasil Sewa BMD	PT. Wisnukarya Internasional	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	27/01/2020	per 5 tahun	27/01/2020	27/01/2025	120.083.600,00	65.691,25	1.828,00	23.977.305,25	25.816.660,18
663	Hasil Sewa BMD	I Gusti Bagus Suka Arjawa	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/01/2020	per 5 tahun	15/01/2020	15/01/2025	13.725.000,00	7.508,21	1.828,00	2.740.495,08	2.860.626,36
664	Hasil Sewa BMD	PDAM Tirta Sanjani	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	11/02/2020	per 5 tahun	11/02/2020	11/02/2025	256.500.000,00	140.317,29	1.828,00	51.215.809,63	57.249.452,95
665	Hasil Sewa BMD	Yayasan Korpri	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	24/07/2019	per 5 tahun	24/07/2019	24/07/2024	156.375.000,00	85.544,31	1.828,00	31.223.673,41	17.622.128,01
666	Hasil Sewa BMD	I Wayan Adnyana	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/12/2019	per 5 tahun	10/12/2019	10/12/2024	72.500.000,00	39.860,83	1.828,00	14.476.203,50	13.682.986,87
667	Hasil Sewa BMD	Gapensi Tabanan	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/08/2020	per 5 tahun	10/08/2020	10/08/2025	28.000.000,00	15.325,67	1.827,00	5.593.869,73	9.011.494,25
668	Hasil Sewa BMD	Ni Made Ayu Sriyanti	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	24/08/2020	per 5 tahun	24/08/2020	24/08/2025	34.125.000,00	18.678,16	1.827,00	6.817.528,74	11.244.252,87
669	Hasil Sewa BMD	Bali Ekspres	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	11/10/2020	per 2 tahun	11/10/2020	11/10/2022	99.233.072,00	135.749,76	731,00	-	0,00
670	Hasil Sewa BMD	I Wayan Wide	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	19/10/2020	per 5 tahun	19/10/2020	19/10/2025	16.500.000,00	9.031,20	1.827,00	3.296.387,52	5.942.528,74
671	Hasil Sewa BMD	I Nyoman Nuryana	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	02/05/2019	per 5 tahun	02/05/2019	02/05/2024	88.200.000,00	48.249,45	1.828,00	17.611.050,33	5.934.682,71
672	Hasil Sewa BMD	Pengadilan Barus	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	17/02/2020	per 5 tahun	17/02/2020	17/02/2025	57.600.000,00	31.509,85	1.828,00	11.501.094,09	13.045.076,59
673	Hasil Sewa BMD	Ida Bagus Oka Suyatra Wibawa, SE	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	11/08/2019	per 5 tahun	11/08/2019	11/08/2024	74.400.000,00	40.700,22	1.828,00	14.855.579,87	9.116.849,01
674	Hasil Sewa BMD	DPW IMO (Iktan Media Online)	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/09/2020	per 5 tahun	21/09/2020	21/09/2025	30.160.000,00	16.507,94	1.827,00	6.025.396,83	10.400.000,00
675	Hasil Sewa BMD	Putu Wiha	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	13/10/2020	per 5 tahun	13/10/2020	13/10/2025	37.750.000,00	20.662,29	1.827,00	7.541.735,08	13.471.811,72
676	Hasil Sewa BMD	I Ketut Kertayasa	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/10/2020	per 2 tahun	21/10/2020	21/10/2022	5.070.000,00	6.935,70	731,00	-	0,00
677	Hasil Sewa BMD	I B Gde Budi Hartawan	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	09/12/2019	per 5 tahun	09/12/2019	09/12/2024	140.000.000,00	76.586,43	1.828,00	27.954.048,14	26.345.733,04
678	Hasil Sewa BMD	Ketut Sri Sudarmiani	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	24/06/2020	per 5 tahun	24/06/2020	24/06/2025	70.400.000,00	38.533,11	1.827,00	14.064.586,75	20.846.414,89
679	Hasil Sewa BMD	DPD Partai Gerindra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	11/03/2020	per 3 tahun	11/03/2020	11/03/2025	27.200.000,00	14.887,79	1.827,00	5.434.044,88	6.491.078,27
680	Hasil Sewa BMD	Thomas Sutrisno	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/10/2020	per 3 tahun	21/10/2020	21/10/2023	8.268.000,00	7.543,80	1.096,00	2.217.875,91	0,00
681	Hasil Sewa BMD	Moh. Shodikin	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	26/11/2020	per 5 tahun	26/11/2020	26/11/2025	15.000.000,00	8.210,18	1.827,00	2.996.715,93	5.714.285,71
682	Hasil Sewa BMD	PT. Citrakarya Sukses Bersama	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/04/2020	per 5 tahun	10/04/2020	10/04/2025	1.158.255.000,00	633.965,52	1.827,00	231.397.413,79	295.427.931,04
683	Hasil Sewa BMD	Pemerintah Desa Lebih	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	20/10/2019	per 5 tahun	20/10/2019	20/10/2024	15.000.000,00	8.205,69	1.828,00	2.995.076,59	2.412.472,64
684	Hasil Sewa BMD	Pasemetonan Pasek Telangan	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/08/2020	per 5 tahun	12/08/2020	12/08/2025	2.545,16	1.827,00	928.981,94	1.501.642,64	0,00
685	Hasil Sewa BMD	I Gede Purana	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	27/03/2020	per 5 tahun	27/03/2020	27/03/2025	44.400.000,00	24.302,13	1.827,00	8.870.279,15	10.984.564,86
686	Hasil Sewa BMD	I Nengah Tamba	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/12/2019	per 5 tahun	15/12/2019	15/12/2024	176.960.000,00	96.805,25	1.828,00	35.333.916,85	33.881.838,07
687	Hasil Sewa BMD	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	23/12/2020	per 5 tahun	23/12/2020	23/12/2025	3.250.000,00	1.778,87	1.827,00	649.288,45	1.286.124,80
688	Hasil Sewa BMD	I Gusti Lanang Ngurah Biasama	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	22/12/2020	per 5 tahun	22/12/2020	22/12/2025	34.800.000,00	19.047,62	1.827,00	6.852.380,95	13.752.380,95
689	Hasil Sewa BMD	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	30/12/2020	per 5 tahun	30/12/2020	30/12/2025	150.000.000,00	82.101,81	1.827,00	29.967.158,28	59.934.318,55
690	Hasil Sewa BMD	Gusti Agus Erman Jaya	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/10/2020	per 2 tahun	12/10/2020	12/10/2022	6.700.000,00	9.165,53	731,00	-	0,00
691	Hasil Sewa BMD	Ketut Sudibya	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/10/2020	per 2 tahun	12/10/2020	12/10/2022	6.800.000,00	9.302,33	731,00	-	0,00
692	Hasil Sewa BMD	I Ki Subhayasa SE	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	23/06/2021	per 5 tahun	23/06/2021	23/06/2026	76.250.000,00	41.735,08	1.827,00	15.233.305,97	37.770.251,77
693	Hasil Sewa BMD	Yudi Kurnianingsih	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	18/04/2021	per tahun	18/04/2021	18/04/2026	84.000.000,00	45.977,01	1.827,00	16.781.609,20	38.574.712,64
694	Hasil Sewa BMD	G. Manggala Perdana Jaya, SH	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	22/03/2021	per 5 tahun	22/03/2021	22/03/2026	25.000.000,00	13.683,63	1.827,00	4.994.526,55	11.111.111,11
695	Hasil Sewa BMD	I Ketut Sandra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	02/03/2021	per 5 tahun	02/03/2021	02/03/2026	55.600.000,00	30.432,40	1.827,00	11.107.827,04	24.102.

No.	Uraian	NAMA PENYEWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											7.621.477.822,23	19.013.940.968,03
707	Hasil Sewa BMD	Yayasan Korpri	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	18/10/2021	per 5 tahun	18/10/2021	18/10/2026	250.000.000,00	136.836,34	1.827,00	49.945.265,46	139.846.743,30
708	Hasil Sewa BMD	Yayasan Pendidikan Nusanarta	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	31/10/2021	per 5 tahun	31/10/2021	31/10/2026	74.000.000,00	40.503,56	1.827,00	14.783.798,58	41.921.182,26
709	Hasil Sewa BMD	Dewa Gede Kresna Mahaputra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	05/08/2021	per 5 tahun	05/08/2021	05/08/2026	43.250.000,00	23.672,69	1.827,00	8.640.530,93	22.441.707,71
710	Hasil Sewa BMD	Drs. I Made Gede Nuada	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	27/08/2021	per 5 tahun	27/08/2021	27/08/2026	20.000.000,00	10.946,91	1.827,00	3.995.621,24	10.618.500,27
711	Hasil Sewa BMD	PT. Pembangunan Perumahan (PP)	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	13/10/2021	per 2 tahun	13/10/2021	13/10/2023	45.000.000,00	61.559,51	731,00	17.606.019,15	0,00
712	Hasil Sewa BMD	Desy Heryani Parwatha	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	01/10/2021	per 5 tahun	01/10/2021	01/10/2026	25.000.000,00	13.683,63	1.827,00	4.994.526,55	13.752.052,54
713	Hasil Sewa BMD	Pratisentana Bandesa Manik Mas Pusat	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	22/09/2021	per 5 tahun	22/09/2021	22/09/2026	20.736.000,00	11.349,75	1.827,00	4.142.660,10	11.304.354,68
714	Hasil Sewa BMD	Dewa Komang Indra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/11/2021	per 5 tahun	12/11/2021	12/11/2026	80.000.000,00	43.787,63	1.827,00	15.982.484,95	45.845.648,60
715	Hasil Sewa BMD	I Made Sugiantara	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	05/11/2021	per 5 tahun	05/11/2021	05/11/2026	165.750.000,00	90.722,50	1.827,00	33.113.711,00	94.351.395,73
716	Hasil Sewa BMD	Angga Syafril Prasetyo	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	05/11/2021	per 5 tahun	05/11/2021	05/11/2026	189.000.000,00	103.448,28	1.827,00	37.758.620,69	107.586.206,90
717	Hasil Sewa BMD	I Nengah Wardana, ST	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	25/11/2021	per 5 tahun	25/11/2021	25/11/2026	101.500.000,00	55.555,56	1.827,00	20.277.777,78	58.888.888,89
718	Hasil Sewa BMD	Wasita TJ S KSO	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	23/12/2021	per 2 tahun	23/12/2021	23/12/2023	16.500.000,00	22.571,82	731,00	8.058.139,53	0,00
719	Hasil Sewa BMD	Perusahaan Daerah Provinsi Bali	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	29/12/2021	per 5 tahun	29/12/2021	29/12/2026	362.480.000,00	198.401,75	1.827,00	72.416.639,30	217.051.516,15
720	Hasil Sewa BMD	Pemerintah Desa Gubug	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/12/2021	per 5 tahun	21/12/2021	21/12/2026	28.125.000,00	15.394,09	1.827,00	5.618.842,36	16.717.980,30
721	Hasil Sewa BMD	Ki Tompel	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/01/2022	per 5 tahun	12/01/2022	12/01/2027	18.200.000,00	9.961,69	1.827,00	3.636.015,33	11.037.547,89
722	Hasil Sewa BMD	I Wayan Rumanik	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	27/01/2022	per tahun	27/01/2022	27/01/2027	8.125.000,00	4.447,18	1.827,00	1.623.221,13	4.994.184,45
723	Hasil Sewa BMD	Yayasan Kepustakaan Bung Karno Lötak mess	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	07/05/2022	per 5 tahun	07/05/2022	07/05/2027	67.000.000,00	36.672,14	1.827,00	13.385.331,14	44.850.027,37
724	Hasil Sewa BMD	PDAM lirta mangutana Badung	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	28/05/2022	per 5 tahun	28/05/2022	28/05/2027	78.905.000,00	43.188,29	1.827,00	15.763.724,69	53.726.228,79
725	Hasil Sewa BMD	PT. Garuda Adhirmata Indonesia	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	29/12/2021	per 5 tahun	29/12/2021	29/12/2026	5.205.000.000,00	2.848.932,68	1.827,00	1.039.860.426,93	3.116.732.348,11
726	Hasil Sewa BMD	putu mahardika	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	18/01/2022	per 5 tahun	18/01/2022	18/01/2027	27.500.000,00	15.052,00	1.827,00	5.493.979,20	16.767.925,56
727	Hasil Sewa BMD	Gusti Ketut Merta	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	01/03/2022	per 5 tahun	01/03/2022	01/03/2027	68.250.000,00	37.356,32	1.827,00	13.635.057,47	43.183.908,05
728	Hasil Sewa BMD	dewa all suandana	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/04/2022	per 5 tahun	21/04/2022	21/04/2027	25.250.000,00	13.820,47	1.827,00	5.044.471,81	16.681.308,16
729	Hasil Sewa BMD	Ikatan Doktor Ekonomi Udayana (IDEYANA)	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	02/06/2021	per 5 tahun	02/06/2021	02/06/2026	10.066.000,00	5.509,58	1.827,00	2.010.996,17	4.870.467,43
730	Hasil Sewa BMD	PT. Berawa Bali Utama	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	23/03/2022	per 5 tahun	23/03/2022	23/03/2027	791.250.000,00	433.087,03	1.827,00	158.076.765,19	510.176.518,88
731	Hasil Sewa BMD	Ketut Suartika	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/02/2022	per 5 tahun	10/02/2022	10/02/2027	26.475.000,00	14.490,97	1.827,00	5.289.203,61	14.676.231,53
732	Hasil Sewa BMD	Drs. Made Ngarah Artana	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/05/2022	per 5 tahun	12/05/2022	12/05/2027	215.250.000,00	117.816,09	1.827,00	43.002.873,56	144.678.160,92
733	Hasil Sewa BMD	Dewi Sinarwati	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	27/05/2022	per 5 tahun	27/05/2022	27/05/2027	6.312.500,00	3.455,12	1.827,00	1.261.117,95	4.294.711,28
734	Hasil Sewa BMD	I Wayan Supartama	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	19/09/2022	per 5 tahun	19/09/2022	19/09/2027	108.750.000,00	59.523,81	1.827,00	21.726.190,48	80.833.333,33
735	Hasil Sewa BMD	I Gede Billy Pandiatama	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	02/08/2022	per 5 tahun	02/08/2022	02/08/2027	22.500.000,00	12.315,27	1.827,00	4.495.073,89	16.133.004,93
736	Hasil Sewa BMD	I Ketut Juliarta	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	13/09/2022	per 5 tahun	13/09/2022	13/09/2027	30.000.000,00	16.420,36	1.827,00	5.993.431,86	22.200.328,40
737	Hasil Sewa BMD	I Wayan Sada	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	07/09/2022	per 5 tahun	07/09/2022	07/09/2027	166.500.000,00	91.133,00	1.827,00	33.263.546,80	122.665.024,63
738	Hasil Sewa BMD	Oke Marokeh Rachmat	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	20/09/2022	per 5 tahun	20/09/2022	20/09/2027	15.000.000,00	8.210,18	1.827,00	2.996.715,93	11.157.635,47
739	Hasil Sewa BMD	Pemerintah Desa Tibubeneng	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/11/2022	per 5 tahun	21/11/2022	21/11/2027	160.000.000,00	87.575,26	1.827,00	31.964.969,90	124.444.444,44
740	Hasil Sewa BMD	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	29/11/2022	per 5 tahun	29/11/2022	29/11/2027	150.000.000,00	82.101,81	1.827,00	29.967.159,28	117.323.481,11
741	Hasil Sewa BMD	Laksmi Dilip Patel	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	19/12/2022	per 5 tahun	19/12/2022	19/12/2027	1.037.000.000,00	113.556,72	9.132,00	41.448.204,12	994.075.558,47
742	Hasil Sewa BMD	G. Manggala Perdana Jaya, SH	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	04/05/2023	per 5 tahun	04/05/2023	04/05/2028	37.500.000,00	20.514,22	1.828,00	4.964.442,01	32.535.557,99
743	Hasil Sewa BMD	Made Arie Satriawan	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	16/07/2023	per 5 tahun	16/07/2023	16/07/2028	140.000.000,00	76.586,43	1.828,00	12.943.107,22	127.056.892,78
744	Hasil Sewa BMD	Ida Gede Kresna Budi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	17/05/2023	per 5 tahun	17/05/2023	17/05/2028	198.750.000,00	108.725,38	1.828,00	24.898.112,69	173.851.887,31
745	Hasil Sewa BMD	Somvir	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	23/02/2023	per 5 tahun	23/02/2023	23/02/2028	206.500.000,00	113.026,82	1.827,00	35.264.367,82	171.235.632,18
746	Hasil Sewa BMD	PLN	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	06/02/2023	per 5 tahun	06/02/2023	06/02/2028	16.875.000,00	9.236,45	1.827,00	3.038.793,10	13.836.206,90
747	Hasil Sewa BMD	Gde Ketut Nugrahita Pendi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	13/06/2023	per 5 tahun	13/06/2023	13/06/2028	35.900.000,00	19.146,61	1.828,00	3.867.614,88	31.132.385,12
748	Hasil Sewa BMD	Gede Ray Ardian Marchini Yasa	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/08/2023	per 5 tahun	10/08/2023	10/08/2028	187.500.000,00	102.571,12	1.828,00	14.770.240,70	172.729.759,30
749	Hasil Sewa BMD	Dr I Ketut Rochingeng SH MH	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/08/2023	per 5 tahun	10/08/2023	10/08/2028	372.500.000,00	203.774,62	1.828,00	29.343.544,86	343.156.455,14
750	Hasil Sewa BMD	I Ketut Parsana	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	12/10/2023	per 5 tahun	12/10/2023	12/10/2028	30.000.000,00	16.411,38	1.828,00	1.329.321,66	28.670.678,34
751	Hasil Sewa BMD	Dewa Komang Derdy Antoni	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	09/10/2023	per 5 tahun	09/10/2023	09/10/2028	616.000.000,00	336.980,31	1.828,00	28.306.345,73	587.693.654,27
752	Hasil Sewa BMD	I Dewa Nyoman Rai Dharmadi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	15/09/2023	per 5 tahun	15/09/2023	15/09/2028	68.239.482,00	37.330,13	1.828,00	4.031.654,30	64.207.827,70
753	Hasil Sewa BMD	Desak Ketut Plavina Dina	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	21/08/2023	per 5 tahun	21/08/2023	21/08/2028	262.500.000,00	143.599,56	1.828,00	19.098.741,79	243.401.258,21
754	Hasil Sewa BMD	I Rai Putra Sudenta	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	14/12/2023	per 5 tahun	14/12/2023	14/12/2028	150.000.000,00	82.056,89	1.828,00	1.477.024,07	148.522.975,93
755	Hasil Sewa BMD	Komang Gilang Pradnya Taksu Natha	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	14/12/2023	per 5 tahun	14/12/2023	14/12/2028	174.375.000,00	95.391,14	1.828,00	1.717.040,48	172.657.959,52
756	Hasil Sewa BMD	BPD Bali	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	01/09/2023	per 5 tahun	01/09/2023	01/09/2028	875.000.000,00	478.665,21	1.828,00	58.397.155,36	816.602.844,64
757	Hasil Sewa BMD	I Made Sudja	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	16/08/2023	per 5 tahun	16/08/2023	16/08/2028	43.000.000,00	23.522,98	1.828,00	3.246.170,68	39.753.829,32
758	Hasil Sewa BMD	DPD Partai Gerindra	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	10/07/2023	per 5 tahun	10/07/2023	10/07/2028	34.625.000,00	18.941,47	1.828,00	3.314.756,56	31.310.243,44
759	Hasil Sewa BMD	I Dewa Agung Ayu Indriyani	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	29/08/2023	per 5 tahun	29/08/2023	29/08/2028	135.000.000,00	73.851,20	1.828,00	9.231.400,44	125.768.599,56
760	Hasil Sewa BMD	Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	31/07/2023	per 5 tahun	31/07/2023	31/07/2028	103.838.000,00	56.804,16	1.828,00	8.747.840,26	95.090.159,74
761	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Nyoman Darmi	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	22/06/2022	12 bulan	27/07/2022	26/07/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.554.098,36	2.045.901,64
762	Pendapatan Rumah Dinas	Ibrahim, SH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	23/05/2022	11 bulan	30/04/2023	30/03/2024	4.950.000,00	14.732,14	336	3.624.107,14	1.325.892,86
763	Pendapatan Rumah Dinas	Luh Putu Darmiasih	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	07/09/2022	12 bulan	15/08/2023	14/08/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.367.213,11	2.232.786,89
764	Pendapatan Rumah Dinas	I Putu Tista Negara	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	09/08/2022	12 bulan	19/07/2023	18/07/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.632.786,89	1.967.213,11
765	Pendapatan Rumah Dinas	Ketut Widari	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	09/08/2022	12 bulan	19/08/2023	18/08/2024	3.60				

No.	Uraian	NAMA PENYEWI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN I O TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											7.621.477.622,23	19.013.940.968,03
782	Pendapatan Rumah Dinas	I Wayan Budiasa	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	17/02/2023	12 bulan	25/02/2023	24/02/2024	7.800.000,00	21.369,86	365	6.624.657,53	1.175.342,47
783	Pendapatan Rumah Dinas	I Gede Supartawan, S.STP, M.AP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	31/01/2024	12 bulan	26/01/2023	25/01/2024	5.400.000,00	14.794,52	365	5.030.136,99	369.863,01
784	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Luh Ayu Nusantini, S.Psi, M.Par	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	05/07/2022	12 bulan	05/07/2023	04/07/2024	5.400.000,00	14.754,10	366	2.655.737,70	2.744.262,30
785	Pendapatan Rumah Dinas	Anak Agung Bagus Suryawan, AP, MAP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	22/06/2022	11 bulan	08/07/2023	07/06/2024	3.300.000,00	9.821,43	336	1.738.392,86	1.561.607,14
786	Pendapatan Rumah Dinas	Pande Made Suparja, SE	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	25/03/2023	14 bulan	23/01/2023	22/03/2024	2.800.000,00	6.588,24	425	2.259.764,71	540.235,29
787	Pendapatan Rumah Dinas	I Nyoman Darmayasa	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	19/12/2022	24 bulan	08/12/2022	07/12/2023	4.800.000,00	13.150,68	365	4.484.383,56	0,00
788	Pendapatan Rumah Dinas	I Gede Kardiyasa, ST, M.Si	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	08/01/2024	12 bulan	01/11/2023	31/10/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	600.000,00	3.000.000,00
789	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Kadek Indah Sudartini	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	12/06/2023	12 bulan	06/04/2023	05/04/2024	1.200.000,00	3.278,69	366	885.245,90	314.754,10
790	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Made Arya Dwi Damayanti	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	27/10/2023	16 bulan	01/01/2023	31/03/2024	1.600.000,00	3.508,77	456	1.280.701,75	319.298,25
791	Pendapatan Rumah Dinas	I Komang Rai Sujana	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	10/09/2023	20 bulan	08/01/2023	07/09/2024	2.000.000,00	3.284,07	609	1.175.697,87	824.302,13
792	Pendapatan Rumah Dinas	Ketut Rai Minarniwati Dewli, SE	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	14/11/2022	12 bulan	12/11/2023	11/11/2024	1.200.000,00	3.278,69	366	163.934,43	1.036.065,57
793	Pendapatan Rumah Dinas	I Gede Adi Arnawa, SH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	25/11/2022	10 bulan	07/09/2023	07/07/2024	3.000.000,00	9.836,07	305	1.140.983,61	1.859.016,39
794	Pendapatan Rumah Dinas	I Made Sukariawan Bandem, S.STP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	15/03/2022	12 bulan	14/04/2023	13/04/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	2.577.049,18	1.022.950,82
795	Pendapatan Rumah Dinas	I Putu Irfan Eka Ferdian, S.STP, M.AP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	18/03/2022	12 bulan	18/03/2023	17/03/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	2.842.622,95	757.377,05
796	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Wayan Ana Pradiya Dewi, ST, M.Par	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	28/01/2022	12 bulan	24/02/2023	23/02/2024	3.600.000,00	9.863,01	365	3.067.397,26	532.602,74
797	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Made Kertiasih, SH, M.AP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	06/06/2022	12 bulan	27/06/2023	26/06/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.849.180,33	1.750.819,67
798	Pendapatan Rumah Dinas	Sang Ayu Putu Prismaniyanti	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	13/09/2022	12 bulan	06/09/2023	05/09/2024	2.400.000,00	6.557,38	366	767.213,11	1.632.786,89
799	Pendapatan Rumah Dinas	I Nengah Warta	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	19/05/2022	11 bulan	16/06/2023	15/05/2024	2.200.000,00	6.567,16	335	1.306.865,67	893.134,33
800	Pendapatan Rumah Dinas	I Ketut Wijaya	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	25/03/2023	14 bulan	23/01/2023	22/03/2024	2.800.000,00	6.588,24	425	2.259.764,71	540.235,29
801	Pendapatan Rumah Dinas	Wahyuddin	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	10/05/2022	12 bulan	10/05/2023	09/05/2024	2.400.000,00	6.557,38	366	1.547.540,98	852.459,02
802	Pendapatan Rumah Dinas	I Wayan Purna	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	10/09/2023	21 bulan	08/01/2023	07/09/2024	6.300.000,00	10.344,83	609	3.703.448,28	2.596.551,72
803	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Wayan Ariani, SH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	13/09/2023	21 bulan	09/12/2022	08/09/2024	2.100.000,00	3.281,25	640	1.197.656,25	826.875,00
804	Pendapatan Rumah Dinas	Niko Trisnawati, SE	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	18/05/2022	12 bulan	16/05/2023	15/05/2024	5.400.000,00	14.754,10	366	3.393.442,62	2.006.557,38
805	Pendapatan Rumah Dinas	Ngakan Made Gari Gargita, SIP, MH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	06/06/2022	12 bulan	06/06/2023	05/06/2024	2.400.000,00	6.557,38	366	1.370.491,80	1.029.508,20
806	Pendapatan Rumah Dinas	I Made Adi Sathya Pratama, S.STP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	30/11/2023	12 bulan	08/11/2023	07/11/2024	2.400.000,00	6.557,38	366	354.098,36	2.045.901,64
807	Pendapatan Rumah Dinas	Dw Gd Aditya Nova Pravisandi	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	05/09/2023	12 bulan	25/08/2023	24/08/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.268.852,46	2.331.147,54
808	Pendapatan Rumah Dinas	I Gusti Putu Wijayadaya	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	01/11/2023	12 bulan	26/10/2023	25/10/2024	2.400.000,00	6.557,38	366	439.344,26	1.960.655,74
809	Pendapatan Rumah Dinas	Ir. Nyoman Suastika, M.Si	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	18/09/2023	12 bulan	08/09/2023	07/09/2024	2.400.000,00	6.557,38	366	754.098,36	1.645.901,64
810	Pendapatan Rumah Dinas	I Dewa Gede Suharta, S.Sos	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	27/10/2023	21 bulan	21/12/2022	20/09/2024	9.450.000,00	14.765,63	640	5.389.453,13	3.898.124,99
811	Pendapatan Rumah Dinas	Ida Bagus Kade Ganda Susila, SH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	28/07/2022	12 bulan	09/05/2023	08/05/2024	1.200.000,00	3.278,69	366	777.049,18	422.950,82
812	Pendapatan Rumah Dinas	I Made Arnata	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	23/06/2022	18 bulan	27/12/2022	26/06/2024	1.800.000,00	3.284,67	548	1.198.905,11	584.671,53
813	Pendapatan Rumah Dinas	Made Gita Heryadi, S.TP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	06/03/2023	12 bulan	03/03/2023	02/03/2024	5.400.000,00	14.754,10	366	4.485.245,90	914.754,10
814	Pendapatan Rumah Dinas	Ketut Ngurah Darma Adnyana, SE, MM	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	31/07/2023	24 bulan	26/07/2023	25/07/2025	10.800.000,00	14.774,28	731	2.349.110,81	8.450.889,19
815	Pendapatan Rumah Dinas	Luh Nyoman Widiatmikawati, SH,MH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	27/11/2023	12 bulan	10/11/2023	09/11/2024	5.400.000,00	14.754,10	366	767.213,11	4.632.786,89
816	Pendapatan Rumah Dinas	Drg. Made Widya Utami	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	03/09/2023	12 bulan	01/09/2023	31/08/2024	5.400.000,00	14.754,10	366	1.800.000,00	3.600.000,00
817	Pendapatan Rumah Dinas	I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	25/02/2022	14 bulan	20/12/2022	20/02/2024	6.300.000,00	14.719,63	428	5.372.663,55	750.700,94
818	Pendapatan Rumah Dinas	Gede Suralaga, S.IP, M.Si	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	13/12/2023	12 bulan	04/08/2023	03/08/2024	7.800.000,00	21.311,48	366	3.196.721,31	4.603.278,69
819	Pendapatan Rumah Dinas	Komang Sriasih, SH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	20/09/2023	21 bulan	19/12/2022	18/09/2024	6.300.000,00	9.843,75	640	3.592.968,75	2.579.062,50
820	Pendapatan Rumah Dinas	I Gede Made Dwidhadpradnya Wira Putra, SH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	20/09/2023	12 bulan	20/09/2023	19/09/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.013.114,75	2.586.885,25
821	Pendapatan Rumah Dinas	Ir. IGW Samsi Gunarta, M.Angl.Sc	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	22/06/2022	12 bulan	08/06/2023	07/06/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	2.036.065,57	1.563.934,43
822	Pendapatan Rumah Dinas	Komang Nopariawan, S.IP, M.AP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	09/01/2023	12 bulan	19/01/2023	18/01/2024	3.600.000,00	9.863,01	365	3.422.465,75	177.534,25
823	Pendapatan Rumah Dinas	I Putu Irfan Ade Candra P, S.STP, M.AP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	11/08/2022	12 bulan	11/08/2022	10/08/2023	3.600.000,00	9.863,01	365	2.189.589,04	0,00
824	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Wayan Sunadi	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	21/04/2022	12 bulan	21/04/2023	20/04/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	2.508.196,72	1.091.803,28
825	Pendapatan Rumah Dinas	I Gusti Ngurah Kusuma Wijaya, S.STP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	22/06/2023	12 bulan	20/06/2023	19/06/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.918.032,79	1.681.967,21
826	Pendapatan Rumah Dinas	Ketut Nilon	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	27/11/2023	12 bulan	08/11/2023	07/11/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	531.147,54	3.068.852,46
827	Pendapatan Rumah Dinas	I Made Purnama Putera S.STP, M.AP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	07/12/2023	24 bulan	11/11/2022	10/11/2024	7.200.000,00	9.849,52	731	3.595.075,24	3.102.599,18
828	Pendapatan Rumah Dinas	I Gede Agus Sumanika, SH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	22/06/2022	12 bulan	27/06/2023	26/06/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.849.180,33	1.750.819,67
829	Pendapatan Rumah Dinas	I Made Winarta, S.E	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	12/04/2023	12 bulan	12/04/2023	11/04/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	2.596.721,31	1.003.278,69
830	Pendapatan Rumah Dinas	Agus Budi Arthana	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	24/03/2022	14 bulan	16/12/2022	15/02/2024	4.200.000,00	9.836,07	427	3.590.163,93	452.459,02
831	Pendapatan Rumah Dinas	Putu Eka Triyana	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	28/07/2023	12 bulan	28/07/2023	27/07/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.544.262,30	2.055.737,70
832	Pendapatan Rumah Dinas	Luh Sri Wedaningih, S.Si	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	07/06/2022	12 bulan	08/06/2023	07/06/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	2.036.065,57	1.563.934,43
833	Pendapatan Rumah Dinas	I Putu Agus Sudiwartana, S.STP,MAP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	25/11/2022	12 bulan	24/11/2023	23/11/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	373.770,49	3.226.229,51
834	Pendapatan Rumah Dinas	I Kadek Adi Mahendra, S.STP,MAP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	15/03/2022	12 bulan	22/01/2023	21/01/2024	2.400.000,00	6.575,34	365	2.261.917,81	138.082,19
835	Pendapatan Rumah Dinas	I Gusti Putu Sathya Widnyana, S.IP,MAP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	29/12/2023	12 bulan	30/12/2023	29/12/2024	2.400.000,00	6.557,38	366	13.114,75	2.386.885,25
836	Pendapatan Rumah Dinas	Luh Widastini, A.Md.Keb	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	23/05/2022	12 bulan	16/05/2023	15/05/2024	1.200.000,00	3.278,69	366	754.098,36	445.901,64
837	Pendapatan Rumah Dinas	Gede Pancratia Kweranata, S.STP, M.AP	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	09/08/2023	12 bulan	09/08/2023	08/08/2024	3.600.000,00	9.836,07	366	1.426.229,51	2.173.770,49
838	Pendapatan Rumah Dinas	I Wayan Adi Sucita, S.IP, MH	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	06/06/2022	12 bulan	24/02/2023	23/02/2024	3.600.000,00	9.863,01	365	3.067.397,26	532.602,74
839	Pendapatan Rumah Dinas	Korlina Horo	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	05/12/2023	12 bulan	05/12/2023	03/12/2024	2.400.000,00	6.575,34	365	177.534,25	2.222.465,75
840	Pendapatan Rumah Dinas	Ida Ayu Nyoman Nandari Patni, S.Sos	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	06/10/2023	21 bulan	09/12/2022	08/09/2024	6.300.000,00	9.843,75	640	3.592.968,75	2.480.625,00
841	Pendapatan Rumah Dinas	Ida Ayu Gede Wartini, SKM	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	04/10/2023	24 bulan	10/09/2023	09/09/2025	2.400.000,00	3.283,17	731	370.998,63	2.029.001,37
842	Pendapatan Rumah Dinas	I Ketut Sukita, SE	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	12/06/2023	16 bulan	20/12/2022	19/04/2024	1.600.000,00	3.285,42	487	1.199.178,64	361.396,31
843	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Nyoman Puspadi	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	26/09/2022	12 bulan	30/10/2023	29/10/2024	1.200.000,00	3.278,69	366	206.557,38	993.442,62
844	Pendapatan Rumah Dinas	Ni Luh Kusniati Giri, S.Sos	SIP Rumah Dinas	Provinsi Bali	30/1								

No.	Uraian	NAMA PENYEWAI/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH											7.621.477.622,23	19.013.940.968,03
854	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak Ketiga	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Bali Nusa Tenggara	Sewa menyewa atas bangunan dermaga seluas 40m X 12m di Pelabuhan Celukan Bawang	Pelabuhan Celukan Bawang	31/08/2022	5 Tahun	01/09/2022	31/08/2027	1.025.000.000,00	561.336,25	1826	204.887.732,75	751.629.244,25
855	Hasil Sewa BMD	1 Wayan Tinggen	Hasil Sewa BMD	Provinsi Bali	02/06/2021	per 5 tahun	02/06/2021	02/06/2026	54.375.000,00	29.761,90	1.827,00	10.863.095,24	26.309.523,81
856	RSUD Bali Mandara	ATM BRI	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan ATM	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	02/01/2018	5 Tahun	02/01/2018	02/01/2023	50.000.000,00	27.367,27	1.827,00	54.734,54	0,00
857	RSUD Bali Mandara	PT Bank Pembangunan Daerah Bali (KPK)	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kegiatan Pelayanan Kas Rumah Sakit Bali Mandara	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	09/05/2018	5 Tahun	09/05/2018	09/05/2023	59.920.000,00	32.796,93	1.827,00	4.230.804,60	0,00
858	RSUD Bali Mandara	KKPN TAKSU (50.215 m2)	Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Ruangan	Jalan By Pass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar - Bali	31/10/2022	1 Tahun	31/10/2022	31/10/2023	48.900.000,00	133.606,56	366,00	40.616.393,44	0,00

1

**Pemerintah Provinsi Bali
Rincian Utang Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023**

No.	OPD	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah
	Jumlah	1.897.743.546,31	47.516.650.518,00	79.820.612.663,78	129.235.006.728,09
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	656.898.642,00	17.146.631.718,00	22.693.814.280,00	40.497.344.640,00
2	Dinas Kesehatan	460.587.715,31	7.802.860.152,00	32.222.473.470,78	40.485.921.338,09
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.489.383,00	1.044.551.208,00	-	1.078.040.591,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	24.203.085,00	781.567.076,00	-	805.770.161,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.296.273,00	510.587.942,00	-	525.884.215,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	20.802.202,00	674.692.548,00	-	695.494.750,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	51.967.971,00	1.147.004.703,00	33.300.000,00	1.232.272.674,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	10.961.250,00	426.022.384,00	-	436.983.634,00
9	Dinas Perhubungan	20.471.376,00	705.420.402,00	-	725.891.778,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	31.331.201,00	567.087.529,00	-	598.418.730,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.595.041,00	486.671.057,00	-	500.266.098,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.559.354,00	456.915.461,00	-	470.474.815,00
13	Dinas Kebudayaan	26.163.286,00	812.721.655,00	-	838.884.941,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	9.244.877,00	454.012.665,00	-	463.257.542,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.175.136,00	827.430.821,00	-	851.605.957,00
16	Dinas Pariwisata	25.273.801,00	586.994.896,00	-	612.268.697,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	107.053.714,00	1.697.772.601,00	-	1.804.826.315,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45.432.197,00	2.143.988.295,00	-	2.189.420.492,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.125.657,00	581.739.735,00	-	597.865.392,00
20	Sekretariat DPRD	11.090.451,00	452.311.651,00	-	463.402.102,00
21	Sekretariat Daerah	62.548.748,00	2.568.214.042,00	198.412.429,00	2.829.175.219,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.138.082,00	517.048.517,00	-	530.186.599,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46.322.194,00	715.925.221,00	-	762.247.415,00
24	Badan Pendapatan Daerah	55.985.186,00	1.487.972.403,00	24.672.612.484,00	26.216.570.073,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.588.422,00	1.143.758.298,00	-	1.176.346.720,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.421.446,00	371.820.989,00	-	381.242.435,00
27	Badan Penghubung	3.342.554,00	102.225.356,00	-	105.567.910,00
28	Inspektorat	47.543.882,00	950.866.466,00	-	998.410.348,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.130.420,00	351.834.727,00	-	360.965.147,00

Pemerintah Provinsi Bali
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023

No.	OPD	Utang Belanja Barang	Utang Belanja Jasa	Utang Belanja Pemeliharaan	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Jumlah
	Jumlah	16.559.067.647,00	4.726.135.795,00	4.110.234.716,00	2.652.878.848,00	28.048.317.006,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	1.139.822.134,00	-	-	1.139.822.134,00
2	Dinas Kesehatan	16.559.067.647,00	925.762.835,00	4.110.234.716,00	2.278.147.969,00	23.873.213.167,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.705.130.717,00	-	-	1.705.130.717,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	9.848.764,00	-	-	9.848.764,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	23.092.501,00	-	-	23.092.501,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	27.618.471,00	-	374.730.879,00	402.349.350,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	25.024.193,00	-	-	25.024.193,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	12.152.274,00	-	-	12.152.274,00
9	Dinas Perhubungan	-	17.952.682,00	-	-	17.952.682,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	19.996.832,00	-	-	19.996.832,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	16.518.409,00	-	-	16.518.409,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	10.968.277,00	-	-	10.968.277,00
13	Dinas Kebudayaan	-	112.560.866,00	-	-	112.560.866,00
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	-	12.223.472,00	-	-	12.223.472,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	277.500,00	-	-	277.500,00
16	Dinas Pariwisata	-	12.047.679,00	-	-	12.047.679,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	68.222.760,00	-	-	68.222.760,00
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	29.967.395,00	-	-	29.967.395,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	8.378.167,00	-	-	8.378.167,00
20	Sekretariat DPRD	-	46.144.952,00	-	-	46.144.952,00
21	Sekretariat Daerah	-	176.920.093,00	-	-	176.920.093,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	15.427.442,00	-	-	15.427.442,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	21.218.973,00	-	-	21.218.973,00
24	Badan Pendapatan Daerah	-	184.275.179,00	-	-	184.275.179,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	54.474.663,00	-	-	54.474.663,00
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	9.890.544,00	-	-	9.890.544,00
27	Badan Penghubung	-	16.516.621,00	-	-	16.516.621,00
28	Inspektorat	-	15.106.768,00	-	-	15.106.768,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	8.594.632,00	-	-	8.594.632,00

**Rincian Utang Belanja Bagi Hasil per Jenis Pajak
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) (Rp)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) (Rp)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) (Rp)	PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	BULELENG	18.241.574.491,00	15.379.961.609,00	15.453.559.150,00	92.168.282,00	49.167.263.532,00
2.	JEMBRANA	12.108.942.735,00	10.209.374.990,00	8.441.307.664,00	56.182.391,00	30.815.807.780,00
3.	TABANAN	14.968.675.758,00	12.620.492.744,00	11.258.611.564,00	72.314.031,00	38.920.094.097,00
5.	GIANYAR	15.503.567.043,00	13.071.473.959,00	12.007.726.329,00	58.898.486,00	40.641.665.817,00
6.	BANGLI	10.796.256.394,00	9.102.613.864,00	6.952.254.835,00	38.817.657,00	26.889.942.750,00
7.	KLUNGKUNG	10.528.502.598,00	8.876.863.444,00	6.842.690.007,00	32.034.544,00	26.280.090.593,00
8.	KARANGASEM	14.381.661.525,00	12.125.565.271,00	10.897.009.403,00	58.211.218,00	37.462.447.417,00
9.	DENPASAR	22.493.480.813,00	18.964.858.078,00	17.224.535.590,00	67.690.180,00	58.750.564.661,00
	Jumlah	139.359.289.409,00	117.497.561.520,00	105.406.314.202,00	551.388.411,00	362.814.553.542,00

**DATA NOMINAL PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PER AKHIR TAHUN 2023
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Nama Perusahaan/Pemilik IUP-OP	Lokasi	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditetapkan (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2022 Pokok + Bunga (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2023 Pokok + Bunga (Rp.)
1	PT. BUMI PASIR MANDIRI 540/9925/IV/BPMP, tanggal 23 Juni 2016	Desa Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	195.000.000,00	245.974.078,00	250.930.587,00
2	PT. DHARMA BUANA KARYA 540/17354/IV/BPMP, tanggal 21 Des 2016	Br. Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	44.976.568,00	53.578.614,00	54.467.733,00
3	PT. DHARMA BUANA KARYA 540/17352/IV/BPMP, tanggal 21 Des 2016	Br. Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	57.769.651,00	68.818.508,00	69.960.552,00
4	PT. BALE DHANA 540/17350/IV/BPMP, tanggal 21 Desember 2016	Br. Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	91.261.952,00	108.716.310,00	110.520.445,00
5	SUANTARA 540/15690/IV/BPMP, tanggal 16 Nopember 2016	Br. Dinas Nusu, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.	29.501.449,00	35.143.714,00	35.726.929,00
6	ADI GUNA 540/14322/IV/BPMP, tanggal 11 Oktober 2016	Br. Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem.	50.208.819,00	59.811.478,00	Dicairkan bulan Juni 2023
7	LILIGUNDI 540/14324/IV/BPMP, tanggal 11 Oktober 2016	Karangasem Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	27.367.125,00	32.601.184,00	33.142.279,00
8	SUMBER BATU 540/15176/IV/BPMP, tanggal 1 Nopember 2016	Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem.	27.688.116,00	32.983.500,00	33.530.837,00
9	I KETUT DAYUH (ABU PASIR INDAH) 540/16953/IV/BPMP, tanggal 9 Desember 2016	Br. Dinas Batudawa, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	19.519.374,00	23.054.364,00	23.436.932,00
10	UD. Parmana I (I Wayan Parka) 540/14322/IV/BPMP	Br. Dinas Tihingan Kangin, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	55.574.244,00	65.638.961,00	66.728.195,00
11	ADI PRATAMA I (I PUTU GUSTIKA) 540/15275/IV/BPMP, tanggal 7 Nopember 2016	Br. Dinas Umanyar, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	41.918.698,00	49.230.272,00	Dicairkan bulan Agustus 2023
12	ADI PRATAMA II (I PUTU GUSTIKA) 540/15276/IV/BPMP, tanggal 7 November 2016	Br. Dinas Butus, Desa Buana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem.	22.048.076,00	25.893.786,00	26.323.479,00
13	GEMPITA (I WAYAN SUKADANA) 540/14945/IV/BPMP, tanggal '25 Oktober 2016	Br. Liligundi, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	27.989.146,00	32.871.027,00	33.416.494,00
14	PT. SURYA MAS JAYA RAYA (Damianus Yosaphat Sungkono) 540/13352/IV/BPMP	Br. Dinas Nusu, Desa Sukadana Kec. Kubu, Kab. Karangasem	42.685.259,00	49.843.589,00	50.748.214,00
15	HARTA RASIH (I NYOMAN TARKA) 540/15619/IV/BPMP	Br. Dinas Nusu, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	22.308.644,00	26.275.470,00	26.711.504,00
16	CV. SUAS KARYA (I NENGGAH WIRTA) 540/16952/IV/BPMP	Banjar Dinas Batu Dawa, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	59.175.083,00	69.697.211,00	70.853.854,00

No	Nama Perusahaan/Pemilik IUP-OP	Lokasi	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditetapkan (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2022 Pokok + Bunga (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2023 Pokok + Bunga (Rp.)
17	NI KETUT SASTRA SRI WIDIANI 540/5651/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Kundalini, Ds. Umeanyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	38.605.655,00	43.708.244,00	44.501.492,00
18	I NENGGAH KOMPIANG DARMAWAN 540/7069/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Lebah, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	16.506.802,00	18.738.853,00	19.049.809,00
19	I MADE SUDARSANA (4,46 Ha) 540/4687/IV-B/DISPMPT	Br. Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem Kab. Karangasem	103.902.815,00	117.952.311,00	119.909.725,00
20	I MADE SUDARSANA (1,77 Ha) 540/7068/IV-B/DISPMPT	Br. Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem Kab. Karangasem	35.131.686,00	39.882.133,00	40.543.981,00
21	I NYOMAN DANA KERTI 540/7207/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	10.448.899,00	11.825.870,00	Dicairkan bulan Oktober 2023
22	I MADE MUSTARA 540/7266/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Kundalini, Ds. Umeanyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	30.206.324,00	34.180.429,00	34.747.662,00
23	I MADE GARA 540/6288/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	45.562.623,00	51.557.047,00	Dicairkan bulan Februari 2023
24	I GEDE SUMERTA, SE 540/6289/IV-B/DISPMPT	Br. Cucut, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	60.048.258,00	67.948.616,00	Dicairkan bulan Juni 2023
25	GEDE RUSWIDHIARTANA 540/7485/IV-B/DISPMPT	Br. Kayuaya, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	31.265.740,00	35.379.244,00	35.966.347,00
26	I KETUT DARSANA 540/7265/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Kundalini, Ds. Umeanyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	21.555.845,00	24.391.867,00	24.796.660,00
27	I NYOMAN WASTIKA 540/7737/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Tegal Sari, Ds. Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	27.753.148,00	31.306.708,00	31.826.207,00
28	I PUTU SASTRA PUJAWAN, SH 540/7300/IV-B/DISPMPT	Jln. Laba Sari Tegal Amben, Br. Dinas Dajan Rurung, Ds. Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	14.852.588,00	16.758.734,00	17.062.904,00
29	I KETUT POLIH 540/8399/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Kembang Sari, Ds. Pangkung Paruk, Kec. Seririt, Kab. Buleleng	19.325.000,00	21.667.342,00	22.060.671,00
30	CV. NS (NENGGAH SUBRATA) 540/8767/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Darmawinangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.769.257,00	26.472.052,00	26.911.343,00
31	I KOMANG SERINTEN 540/1197/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Pangleg, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	24.500.000,00	26.962.080,00	27.451.404,00
32	I MADE PARNAWA 540/1683/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Untalan, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	11.200.000,00	12.280.533,00	12.484.316,00
33	PT. DHARMA BUANA KARYA 540/2021/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Butus, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	88.053.164,42	96.484.960,42	98.086.112,00
	I NYOMAN DANGIN SANJAYA	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri,			

No	Nama Perusahaan/Pemilik IUP-OP	Lokasi	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditetapkan (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2022 Pokok + Bunga (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2023 Pokok + Bunga (Rp.)
34	540/2022/IV-B/DISPMPT	Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	43.872.487,30	48.073.592,30	48.871.399,00
35	I NYOMAN TUNAS 540/2023/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	31.979.480,37	35.041.754,37	35.623.244,00
36	I NYOMAN SUARTA 540/2024/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Butus, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	58.873.685,20	64.511.289,20	65.581.841,00
37	I NYOMAN SUAMA 540/2261/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Luluh Kauh, Ds. Peringsari, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	34.194.192,00	37.136.487,94	37.752.763,00
38	I GUSTI LANANG PUTU 540/2835/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Badeg Klodan, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	38.831.000,00	42.175.869,00	42.941.281,00
39	I NYOMAN SUARTA ADNYANA 540/2900/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Siladumi, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	26.260.000,00	28.522.020,00	29.039.668,00
40	I KADEK SUGATA 540/2928/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	17.515.000,00	19.022.059,00	19.337.728,00
41	I NYOMAN LANUS 540/2929/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	43.700.000,00	47.460.206,00	48.247.811,00
42	I NYOMAN RENTEN 540/2930/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	22.655.000,00	24.604.401,00	25.012.719,00
43	I NENGAH OKA 540/2931/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	18.155.000,00	19.717.215,00	20.044.422,00
44	I NYOMAN KEMPEN 540/3144 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Badeg Klodan, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	25.210.000,00	27.301.160,00	27.796.664,00
45	I NYOMAN SUASTIKA DWIYANA (RATU BAGUS CAMPANG) 540/2838/IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	52.524.746,00	56.881.629,00	Dicairkan bulan April 2023
46	I GEDE ARIANA (PANCA PANDAWA) 540/8505 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Darmawinangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.796.257,00	25.770.136,00	26.237.852,00
47	I NYOMAN ARYA (PASIR REJEKI) 540/8266 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.796.257,00	25.770.136,00	26.237.852,00
48	I KETUT ARDIKA (CV. ZERO) 540/8265 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Darmawinangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.796.257,00	25.770.136,00	26.237.852,00
49	I MADE WARSA 540/3365 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Lebih, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	22.118.000,00	23.871.391,00	24.304.676,00
50	I KOMANG WIRAWAN (CV. AGUNG PERMATA) 540/2839 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	24.888.404,00	26.866.223,00	27.353.843,00
51	PT. LION JOBS INDONESIA 540/5633 /IV-B/DISPMPT	Br. Dinas Muntig, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	82.776.000,00	89.338.261,00	90.959.686,00
	I KETUT ARDANA	Br. Dinas Badeg Klodan, Ds. Sebudi,			

No	Nama Perusahaan/Pemilik IUP-OP	Lokasi	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditetapkan (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2022 Pokok + Bunga (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2023 Pokok + Bunga (Rp.)
52	540/2262 /IV-B/ DISPMPT	Kec. Selat, Kab. Karangasem	38.950.455,39	42.034.641,39	42.732.197,00
53	TUNIK SUGIANTO 540/5703 /IV-B/ DISPMPT	Br. Dinas Pura, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	96.354.000,00	103.983.456,00	105.709.079,00
54	I MADE MANGKU TIRTA 540/5702 /IV-B/ DISPMPT	Br. Dinas Badeg Tengah, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	29.405.000,00	31.733.288,00	32.259.954,00
55	I GEDE NGURAH KUSUMA YUDA 540/5701 /IV-B/ DISPMPT	Br. Dinas Butus, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	38.912.000,00	41.993.063,00	42.689.987,00
56	PT ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA 540/5704 /IV-B/ DISPMPT	Br. Dinas Madan, Ds. Musi, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	8.043.244,00	8.680.180,00	8.824.229,00
57	I NYOMAN TODIYASA 540/6084 /IV-B/ DISPMPT	Br. Dinas Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	25.210.000,00	27.118.597,00	Dicairkan bulan Februari 2023
58	I NYOMAN SUASTIKA DWIYANA 540/1316 /IV-B/ DISPMPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	92.522.363,00	99.527.246,00	101.178.924,00
59	I WAYAN WAHYU PRAYOGA 540/114 /IV-C/ DISPMPT	Br. Dinas Badeg Tengah, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	43.892.000,00	47.064.236,00	47.918.448,00
60	I KOMANG PUTU 540/3208 /IV-B/ DISPMPT	Br. Dinas Lusuh Kauh, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	30.683.280,00	32.612.965,00	33.204.829,00
61	I NYOMAN MANGKU LEBIH 540/195 /Izin C/ DISPMPT	Br. Dinas Lebah, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	25.376.000,00	27.209.407,00	27.660.939,00
62	PT. SARI MINERAL PUTRA BALI 540/2182/ Izin C/ DISPMPT	Br. Dinas Untalan, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	18.415.000,00	19.945.001,65	20.542.345,07
63	I MADE TARSU ADIPA 540/34/IV-C/ DISPMPT	Br. Dinas Kayuaya, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	85.361.000,00	92.140.606,48	94.625.227,78
64	I MADE SUWECA (PANDAWA JAYA) 540/8400/IV-B/ DISPMPT	Br. Dinas Darmawinangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	17.001.928,00	18.421.488,01	18.915.770,64
65	PT. KEMBANG SERONI ABADI 540/1040/ Izin C/ DISPMPT	Br. Dinas Baturinggih Kelod, Ds. Baturinggih Kec. Kubu, Kab. Karangasem	96.049.206,00	103.668.289,69	106.455.575,05
66	I KOMANG SANTIKA WIBAWA 540/2183/ Izin C/ DISPMPT	Br. Dinas Yeha, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	18.415.000,00	19.942.728,72	20.533.658,06
67	I GUSTI GEDE LANANG ADNYANA 540/1318/IV-B/ DISPMPT	Br. Dinas Umanyar, Ds. Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem	61.508.298,00	66.422.075,55	68.240.211,86
68	HASAN YANDI, ST.,M.SC 540/94/ Izin C/ DISPMPT	Br. Dinas Pamesan, Ds. Lokapaksa kec. Seririt, Kab. Buleleng	35.919.000,00	38.817.026,87	39.902.329,06
69	NENGAH GINATRA 540/252/ Izin C/ DISPMPT	Br. Dinas Yeha, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	28.461.000,00	31.044.350,64	31.873.792,23

No	Nama Perusahaan/Pemilik IUP-OP	Lokasi	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditetapkan (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2022 Pokok + Bunga (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2023 Pokok + Bunga (Rp.)
70	I KADEK SUDIARTANA 540/3349/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Sebudi, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	27.857.000,00	30.032.504,09	30.889.285,38
71	I WAYAN MALIASA ADNYANA 540/3350/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Sebudi, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	51.371.000,00	55.313.559,79	56.835.545,55
72	I KOMANG DUDUN 540/3284/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Bukit, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	40.500.000,00	43.625.469,05	44.839.862,68
73	DRS. I KETUT GIRI 540/3768/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Caniga, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	41.320.000,00	44.507.069,92	Dicairkan bulan Oktober 2023
74	AA KURNIAWAN 540/3770/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Muntig, Ds. Amerta Bhuana, Kec. Selat, Kab. Karangasem	30.257.000,00	32.612.754,46	33.537.379,05
75	I NYOMAN SEPIL 540/4361/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Keladian, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	28.443.000,00	30.666.544,54	31.541.000,41
76	I KETUT NGURAH SUBRATA 540/3283/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Butus, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	16.625.000,00	17.960.357,67	18.500.442,12
77	I MADE WARSA 540/173/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Lebih, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	29.709.000,00	31.931.186,17	32.840.146,76
78	I GEDE CIDRA 540/4360 /Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	22.548.000,00	24.255.249,81	24.961.669,56
79	I GEDE PUTRA 540/863/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Cucut, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	23.287.800,00	25.048.211,47	Dicairkan bulan April 2023
80	I PUTU GUSTIKA 540/4022/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas umanyar, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	36.672.000,00	39.394.635,70	40.500.438,35
81	PT. LION JOBS INDONESIA (2) 540/4024/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Muntig, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	50.993.000,00	54.745.276,44	56.256.073,38
82	I KADEK ARTANADI 540/172/IV-C/DISPMPPT	Br. Dinas Sebudi, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	30.773.000,00	32.902.228,00	32.902.228,00
83	I NYOMAN SUTAWAN 540/3799/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Mekarsari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	45.530.000,00	48.889.301,03	Dicairkan bulan Juli 2023
84	I KOMANG DANA 540/4733/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Galih, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	26.728.000,00	28.652.896,29	29.477.277,63
85	PT. PALGUNA JAYA 540/4359/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas Mekar Sari, Ds. Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	32.029.000,00	34.417.815,98	35.392.309,26
86	I MADE SUJATI WIRA KUSUMA 540/5018/Lzin C/DISPMPPT	Br. Dinas ancute, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	18.237.000,00	19.582.869,24	20.168.198,66

No	Nama Perusahaan/Pemilik IUP-OP	Lokasi	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditetapkan (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2022 Pokok + Bunga (Rp.)	Nilai Jaminan Reklamasi per akhir 2023 Pokok + Bunga (Rp.)
87	PT. PASIR TOYA ANYAR KUBU 540/5502/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Bukit, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	86.508.000,00	92.259.106,92	94.772.639,64
88	I GEDE MERTHAYASA 540/3769/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Tukad Sabuh, Ds. Duda Utara, Kec. Selat, Kab. Karangasem	33.630.000,00	35.923.206,28	36.942.338,54
89	I WAYAN PUTU 540/4309/Izin C/DISPMPPT	Br. Dinas Pura, Ds. Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem	19.104.000,00	20.389.194,03	20.997.639,32
90	KOPERASI YEHSAH BHUWANA BALI 540/6309/Izin C/DISPMPPT	Br. Batusesa, Ds. Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (areal sungai Yehsah)	24.805.000,00	26.444.275,52	27.213.682,84
			3.540.027.348,68	3.947.375.414,63	Reklamasi+Eksplorasi 3.575.313.620,88

**RINCIAN PENDAPATAN HIBAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
Total Pendapatan Hibah LO						650.207.509.377,44	16.346.891.612,00	633.860.617.765,44
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO					595.095.276.331,25	16.322.759.469,00	578.772.516.862,25
1	DINAS KESEHATAN					116.197.943.987,75	0,00	116.197.943.987,75
		Kementerian Kesehatan	1587/D/IFP/XII/2022	6 Januari 2023	Persediaan	25.163.280,00	0,00	25.163.280,00
		Kementerian Kesehatan	1587/D/IFP/XII/2022	6 Januari 2023	Persediaan	1.725.300,00	0,00	1.725.300,00
		Kementerian Kesehatan	1587/D/IFP/XII/2022	6 Januari 2023	Persediaan	94.800,00	0,00	94.800,00
		Kementerian Kesehatan	385/01/BL/XII/2022	6 Januari 2023	Persediaan	5.558.784,00	0,00	5.558.784,00
		Kementerian Kesehatan	385/01/BL/XII/2022	6 Januari 2023	Persediaan	1.038.240,00	0,00	1.038.240,00
		Kementerian Kesehatan	385/01/BL/XII/2022	6 Januari 2023	Persediaan	2.063.040,00	0,00	2.063.040,00
		Kementerian Kesehatan	017/DNR-VAKSINI/2023	10 Januari 2023	Persediaan	1.656.428.016,00	0,00	1.656.428.016,00
		Kementerian Kesehatan	30/D/IFP/I/2023	17 Januari 2023	Persediaan	12.548.550,00	0,00	12.548.550,00
		Kementerian Kesehatan	399/03/BL/I/2023	24 Januari 2023	Persediaan	1.031.520,00	0,00	1.031.520,00
		Kementerian Kesehatan	399/03/BL/I/2023	24 Januari 2023	Persediaan	6.574.176,00	0,00	6.574.176,00
		Kementerian Kesehatan	46/D/IFP/I/2023	24 Januari 2023	Persediaan	48.132,00	0,00	48.132,00
		Kementerian Kesehatan	46/D/IFP/I/2023	24 Januari 2023	Persediaan	227.040,00	0,00	227.040,00
		Kementerian Kesehatan	46/D/IFP/I/2023	24 Januari 2023	Persediaan	285.000,00	0,00	285.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/31.01.03/2023	31 Januari 2023	Persediaan	596.976,00	0,00	596.976,00
		Kementerian Kesehatan	85/D/IFP/II/2023	6 Februari 2023	Persediaan	27.378.000,00	0,00	27.378.000,00
		Kementerian Kesehatan	85/D/IFP/II/2023	6 Februari 2023	Persediaan	55.887.000,00	0,00	55.887.000,00
		Kementerian Kesehatan	76/D/IFP/II/2023	6 Februari 2023	Persediaan	55.083.404,00	0,00	55.083.404,00
		Kementerian Kesehatan	76/D/IFP/II/2023	6 Februari 2023	Persediaan	197.206.996,00	0,00	197.206.996,00
		Kementerian Kesehatan	P70131502LJE	9 Pebruari 2023	Persediaan	304.612.000,00	0,00	304.612.000,00
		Kementerian Kesehatan	'00047107	9 Pebruari 2023	Persediaan	419.634.629,76	0,00	419.634.629,76
		Kementerian Kesehatan	'00049935	9 Pebruari 2023	Persediaan	601.191.372,39	0,00	601.191.372,39
		Kementerian Kesehatan	'00047098	9 Pebruari 2023	Persediaan	560.345.141,25	0,00	560.345.141,25
		Kementerian Kesehatan	'00048956	9 Pebruari 2023	Persediaan	119.470.609,80	0,00	119.470.609,80
		Kementerian Kesehatan	'00049933	9 Pebruari 2023	Persediaan	147.098.541,50	0,00	147.098.541,50
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/574/2023	9 Pebruari 2023	Persediaan	64.840.500,00	0,00	64.840.500,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/574/2023	9 Pebruari 2023	Persediaan	2.912.880,00	0,00	2.912.880,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/574/2023	9 Pebruari 2023	Persediaan	163.195,00	0,00	163.195,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/574/2023	9 Pebruari 2023	Persediaan	72.825.000,00	0,00	72.825.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/574/2023	9 Pebruari 2023	Persediaan	190.384.256,00	0,00	190.384.256,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/574/2023	9 Pebruari 2023	Persediaan	435.879.744,00	0,00	435.879.744,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00050402	16 Pebruari 2023	Persediaan	1.742.812.554,00	0,00	1.742.812.554,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/27.2.21/2023	27 Pebruari 2023	Persediaan	127.416,00	0,00	127.416,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/27.2.21/2023	27 Pebruari 2023	Persediaan	2.489.184,00	0,00	2.489.184,00
		Kementerian Kesehatan	SKY-01783/SPBK-DPS/BUFFER	7 Maret 2023	Persediaan	26.516.500,00	0,00	26.516.500,00
		Kementerian Kesehatan	SKY-01783/SPBK-DPS/BUFFER	7 Maret 2023	Persediaan	258.111.000,00	0,00	258.111.000,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00048956	10 Maret 2023	Persediaan	135.010.654,20	0,00	135.010.654,20
		Kementerian Kesehatan	PS-00048954	10 Maret 2023	Persediaan	69.796.489,20	0,00	69.796.489,20
		Kementerian Kesehatan	PS-00049934	10 Maret 2023	Persediaan	508.310.237,61	0,00	508.310.237,61
		Kementerian Kesehatan	PS-00049727	10 Maret 2023	Persediaan	355.710.600,00	0,00	355.710.600,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00047098	10 Maret 2023	Persediaan	470.174.658,75	0,00	470.174.658,75
		Kementerian Kesehatan	PS-00047107	10 Maret 2023	Persediaan	266.363.130,24	0,00	266.363.130,24

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
		Kementerian Kesehatan	PS-NN-10323	10 Maret 2023	Persediaan	116.424.000,00	0,00	116.424.000,00
		Kementerian Kesehatan	162/MUP-JKT1/EXT/III/2023	13 Maret 2023	Persediaan	6.902.271,00	0,00	6.902.271,00
		Kementerian Kesehatan	195/MUP-JKT1/EXT/III/2023	16 Maret 2023	Persediaan	85.156.000,00	0,00	85.156.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/20.3/2023	20 Maret 2023	Persediaan	102.553.454,00	0,00	102.553.454,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/1032.05/2023	20 Maret 2023	Persediaan	158.879.600,00	0,00	158.879.600,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/29.3/2023	29 Maret 2023	Persediaan	122.390.908,00	0,00	122.390.908,00
		Kementerian Kesehatan	3469	30 Maret 2023	Persediaan	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
		Kementerian Kesehatan	179/D/IFP/IV/2023	10-Apr-23	Persediaan	226.157.560,00	0,00	226.157.560,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00051122	11-Apr-23	Persediaan	121.049.950,00	0,00	121.049.950,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/12.4/2023	12-Apr-23	Persediaan	18.451.000,00	0,00	18.451.000,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00051155	13-Apr-23	Persediaan	1.748.250.000,00	0,00	1.748.250.000,00
		Kementerian Kesehatan	193/D/IFP/IV/2023	14-Apr-23	Persediaan	963.140,00	0,00	963.140,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/1985/2023	17-Apr-23	Persediaan	467.206.200,00	0,00	467.206.200,00
		Kementerian Kesehatan	OB/04/IFK-H/IV/2023	17-Apr-23	Persediaan	1.564.992,00	0,00	1.564.992,00
		Kementerian Kesehatan	233/D/IFP/IV/2023	03 Mei 2023	Persediaan	10.359.976,00	0,00	10.359.976,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/1743.13/2023	03 Mei 2023	Persediaan	7.471.040,00	0,00	7.471.040,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/1744.07/2023	08 Mei 2023	Persediaan	450.720.000,00	0,00	450.720.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/1205.10/2023	12 Mei 2023	Persediaan	21.630.000,00	0,00	21.630.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/2732.10/2023	19 Mei 2023	Persediaan	218.468.250,00	0,00	218.468.250,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/2674/2023	19 Mei 2023	Persediaan	609.231.500,00	0,00	609.231.500,00
		Kementerian Kesehatan	295/D/IFP/IV/2023	22 Mei 2023	Persediaan	30.795.618,00	0,00	30.795.618,00
		Kementerian Kesehatan	289/D/IFP/IV/2023	22 Mei 2023	Persediaan	153.584.700,00	0,00	153.584.700,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/2591/2023	23 Mei 2023	Persediaan	216.450.000,00	0,00	216.450.000,00
		Kementerian Kesehatan	1905/BUR-DIBKES/019	23 Mei 2023	Persediaan	12.013.515,00	0,00	12.013.515,00
		Kementerian Kesehatan	326/D/IFP/IV/2023	2 Juni 2023	Persediaan	12.348.000,00	0,00	12.348.000,00
		Kementerian Kesehatan	516/01/BL/VI/2023	5 Juni 2023	Persediaan	278.536.100,00	0,00	278.536.100,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00051511	6 Juni 2023	Persediaan	259.462.500,00	0,00	259.462.500,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00051510	6 Juni 2023	Persediaan	48.419.820,00	0,00	48.419.820,00
		Kementerian Kesehatan	PS-PBF-023-06782	6 Juni 2023	Persediaan	848.540.000,00	0,00	848.540.000,00
		Kementerian Kesehatan	2860000200	6 Juni 2023	Persediaan	539.168.600,00	0,00	539.168.600,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/09.06/2023	9 Juni 2023	Persediaan	65.538.000,00	0,00	65.538.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/0906.15/2023	9 Juni 2023	Persediaan	52.946.550,00	0,00	52.946.550,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/3104.13/2023	9 Juni 2023	Persediaan	29.821.920,00	0,00	29.821.920,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.07/C.V/0906/2023	9 Juni 2023	Persediaan	888.365,00	0,00	888.365,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/0906.15/2023	12 Juni 2023	Persediaan	146.460.211,00	0,00	146.460.211,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00049951	14 Juni 2023	Persediaan	711.421.200,00	0,00	711.421.200,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00051552	14 Juni 2023	Persediaan	1.498.500.000,00	0,00	1.498.500.000,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00048956	14 Juni 2023	Persediaan	162.701.136,00	0,00	162.701.136,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00048044	14 Juni 2023	Persediaan	257.629.950,00	0,00	257.629.950,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/3004/2023	16 Juni 2023	Persediaan	369.408.480,00	0,00	369.408.480,00
		Kementerian Kesehatan	212/00/KR/UKL/06/2023	26 Juni 2023	Persediaan	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/3344/2023	28 Juni 2023	Persediaan	1.152.720.000,00	0,00	1.152.720.000,00
		Kementerian Kesehatan	025/BPB-ADS/APBN/PLPV/VI/2023	3 Juli 2023	Persediaan	84.915.000,00	0,00	84.915.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/3421.17/2023	6 Juli 2023	Persediaan	852.500.000,00	0,00	852.500.000,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00051843	17 Juli 2023	Persediaan	715.078.650,00	0,00	715.078.650,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00051909	24 Juli 2023	Persediaan	7.942.756.250,00	0,00	7.942.756.250,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00051892	24 Juli 2023	Persediaan	969.030.000,00	0,00	969.030.000,00
		Kementerian Kesehatan	101.02/KMKS/L/VI/2023	28 Juli 2023	Persediaan	108.250.221,00	0,00	108.250.221,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/1/3604.17/2023;	31/07/2023	Persediaan	1.767.253.350,00	0,00	1.767.253.350,00

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
		Kementerian Kesehatan	0014/DNR-VAKSIN/VIII/2023	4 Agustus 2023	Persediaan	2.287.884.000,00	0,00	2.287.884.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/4.3/708.148/2023	7 Agustus 2023	Persediaan	53.720.080,00	0,00	53.720.080,00
		Kementerian Kesehatan	067/BPB-ADS/APBN/PLPV/VII/2023	8 Agustus 2023	Persediaan	104.980.050,00	0,00	104.980.050,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00052123	15 Agustus 2023	Persediaan	2.647.466.250,00	0,00	2.647.466.250,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00052175	22 Agustus 2023	Persediaan	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00052165	22 Agustus 2023	Persediaan	349.218.028,30	0,00	349.218.028,30
		Kementerian Kesehatan	PS-00052161	22 Agustus 2023	Persediaan	217.405.710,20	0,00	217.405.710,20
		Kementerian Kesehatan	KN.01.05/6/1488-PK/202	24 Agustus 2023	Persediaan	1.424.705.646,00	0,00	1.424.705.646,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00052242	01-Sep-23	Persediaan	1.307.028.379,95	0,00	1.307.028.379,95
		Kementerian Kesehatan	PS-00052273	05-Sep-23	Persediaan	2.522.475.000,00	0,00	2.522.475.000,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00052268	05-Sep-23	Persediaan	1.288.538.000,00	0,00	1.288.538.000,00
		Kementerian Kesehatan	099/BPB-ADS/APBN/GAVI/IX/2023	18-Sep-23	Persediaan	33.557.184,00	0,00	33.557.184,00
		Kementerian Kesehatan	PS-0052407	21-Sep-23	Persediaan	267.832.500,00	0,00	267.832.500,00
		Kementerian Kesehatan	2009BALIHPV	21-Sep-23	Persediaan	774.523.750,00	0,00	774.523.750,00
		Kementerian Kesehatan	0024/DNR-VAKSIN/IX/2023	21-Sep-23	Persediaan	2.287.884.000,00	0,00	2.287.884.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/C.1.5/0409.09/2023; 442/4374/102.5/HIV/IX/2023; 565/D/IFP/IX/2023;	30-Sep-23	Persediaan	12.318.945.976,50	0,00	12.318.945.976,50
		Kementerian Kesehatan	PS-00052541	6 Oktober 2023	Persediaan	7.785.218,06	0,00	7.785.218,06
		Kementerian Kesehatan	PS-00052579	11 Oktober 2023	Persediaan	2.034.713.250,00	0,00	2.034.713.250,00
		Kementerian Kesehatan	1010BALIBCG	11 Oktober 2023	Persediaan	342.179.145,00	0,00	342.179.145,00
		Kementerian Kesehatan	1010BALIMR	11 Oktober 2023	Persediaan	1.689.455.964,00	0,00	1.689.455.964,00
		Kementerian Kesehatan	1010BOPBALI	11 Oktober 2023	Persediaan	196.246.178,94	0,00	196.246.178,94
		Kementerian Kesehatan	PS-00052666	23 Oktober 2023	Persediaan	688.775.657,55	0,00	688.775.657,55
		Kementerian Kesehatan	662/D/IFP/X/2023	26 Oktober 2023	Persediaan	319.753.000,00	0,00	319.753.000,00
		Kementerian Kesehatan	133/BPB-ADS/APBN/PLPV/X/2023	27 Oktober 2023	Persediaan	206.826.600,00	0,00	206.826.600,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/C.1.5/5138.22/2023; KN.02.03/4.3/0510.23/2023; 614/D/IFP/X/2023;	31 Oktober 2023	Persediaan	2.947.629.170,90	0,00	2.947.629.170,90
		Kementerian Kesehatan	PS-00052762	03-Nov-23	Persediaan	134.206.468,23	0,00	134.206.468,23
		Kementerian Kesehatan	010/BAP/2215/XI/2023/ROO	14-Nov-23	Persediaan	2.287.884.000,00	0,00	2.287.884.000,00
		Kementerian Kesehatan	2122BALIMR	22-Nov-23	Persediaan	866.409.390,00	0,00	866.409.390,00
		Kementerian Kesehatan	2111BALIBOP	22-Nov-23	Persediaan	169.469.930,00	0,00	169.469.930,00
		Kementerian Kesehatan	2111BALIIPV	22-Nov-23	Persediaan	2.141.228.622,45	0,00	2.141.228.622,45
		Kementerian Kesehatan	2111BALIBCG	22-Nov-23	Persediaan	192.002.250,00	0,00	192.002.250,00
		Kementerian Kesehatan	PS-00052957	30-Nov-23	Persediaan	227.350.405,77	0,00	227.350.405,77
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/4.3/6034.17/2023; KN.01.02/C.III/8881.15/2023; 017/IHSG/11/2023;	30/11/2023	Persediaan	2.504.956.936,45	0,00	2.504.956.936,45
		Kementerian Kesehatan	PS-00053038	5 Desember 2023	Persediaan	1.377.551.315,10	0,00	1.377.551.315,10
		Kementerian Kesehatan	0412BALIDT	5 Desember 2023	Persediaan	100.324.975,00	0,00	100.324.975,00
		Kementerian Kesehatan	011/BAP/2215/XII/2023/ROO	18 Desember 2023	Persediaan	2.287.884.000,00	0,00	2.287.884.000,00
		Kementerian Kesehatan	1912BALITD	20 Desember 2023	Persediaan	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00
		Kementerian Kesehatan	1912BALIHEP	20 Desember 2023	Persediaan	178.195.887,90	0,00	178.195.887,90
		Kementerian Kesehatan	1912BALIBCG	20 Desember 2023	Persediaan	145.299.000,00	0,00	145.299.000,00
		Kementerian Kesehatan	1912BALIIPV	20 Desember 2023	Persediaan	275.200.080,00	0,00	275.200.080,00
		Kementerian Kesehatan	1912BALIMR	20 Desember 2023	Persediaan	304.894.800,00	0,00	304.894.800,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/C.1.5/6698/2023; 2860000831; KN.02.03/C.1.5/6675/2023; dst	31 Desember 2023	Persediaan	4.929.980.952,75	0,00	4.929.980.952,75
		Kementerian Kesehatan	407/00/KR/UKL/07/2023; KN.01.02/C.III/6815.16/2023;	31 Desember 2023	Persediaan	3.818.364.050,00	0,00	3.818.364.050,00
		Kementerian Kesehatan	NN.23.1/RABIES/2023	23 Januari 2023	Persediaan	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
		Kementerian Kesehatan	16/00/KR/UKL/03/2023	16 Maret 2023	Persediaan	813.120.000,00	0,00	813.120.000,00
		Kementerian Kesehatan	40/00/KR/UKL/03/2023	20 Maret 2023	Persediaan	374.809.600,00	0,00	374.809.600,00
		Kementerian Kesehatan	011/LOG-DIPA/SAR/IV/2023	03-Apr-23	Persediaan	333.685.800,00	0,00	333.685.800,00
		Kementerian Kesehatan	152/00/KR/UKL/05/2023	4 Mei 2023	Persediaan	4.232.870.400,00	0,00	4.232.870.400,00
		Kementerian Kesehatan	225/00/KR/UKL/06/2023	23 Juni 2023	Persediaan	79.409.400,00	0,00	79.409.400,00
		Kementerian Kesehatan	037/LOG-DIPA/SAR/VI/2023	6 Juli 2023	Persediaan	83.421.450,00	0,00	83.421.450,00
		Kementerian Kesehatan	30/00/KR/UKL/07/2023	17 Juli 2023	Persediaan	97.835.400,00	0,00	97.835.400,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/C.15/188/2023	23 Agustus 2023	Persediaan	1.530.000.000,00	0,00	1.530.000.000,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.02/C.1.5/4833/2023	30 Agustus 2023	Persediaan	66.737.160,00	0,00	66.737.160,00
		Kementerian Kesehatan	633/00/KR/UKL/09/2023	19-Sep-23	Persediaan	386.992.500,00	0,00	386.992.500,00
		Kementerian Kesehatan	007/LOG-DIPA/SAR/X/2023	3 Oktober 2023	Persediaan	250.264.350,00	0,00	250.264.350,00
		Kementerian Kesehatan	KN.02.03/C.1.5/5493.01/2023	16-Nov-23	Persediaan	137.079.600,00	0,00	137.079.600,00
		Kementerian Kesehatan	914/00/KR/UKL/11/2023	21-Nov-23	Persediaan	4.798.490.000,00	0,00	4.798.490.000,00
		Kementerian Kesehatan	941/00/KR/11/2023	30-Nov-23	Persediaan	11.268.712.000,00	0,00	11.268.712.000,00
2		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		Kementrian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga	No. 535/BAST/Bb8.14/2023	10 February 2023	Paving Blok (Barang Pakai Habis)	8.000.000,00	0	8.000.000,00
3		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				156.294.001.686,50	536.249,00	156.293.465.437,50
		BNPB	No. 21/BNPB/PUSDALOPS/RT.03.05/03/2023	07/03/2023	PC Desktop,Headset,Router,UPS	26.500.000	536.249,00	25.963.751,00
		BNPB	No. BA.30/BNPB/OJLP/LP.01.03/03/2023	28/03/2023	Persediaan	156.267.501.686,50	0,00	156.267.501.686,50
4		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				2.238.897.600,00	112.272.532,00	2.126.625.068,00
		Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral	30/BAST/BN.07/KPB/2023	10/03/2023	PLTS ROOFTOP 100KWP DAN 30KWP	2.155.632.600,00	112.272.532,00	2.043.360.068,00
		Kementeriaan Ketenagakerjaan	B.23.000/7279/IV/DISNAKER ESDM	05/06/2023	LCD, Layar LCD dan Lap Top	83.265.000,00	0,00	83.265.000,00
5		DINAS PERHUBUNGAN				2.432.019.800,00	526.937.629,00	1.905.082.171,00
		Kementerian Perhubungan	B.34.979/5841/SEKRET/DISHUB	27 October 2023	CCTV	2.432.019.800,00	526.937.629,00	1.905.082.171,00
6		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.448.702.421,00	1.252.483,00	1.447.449.938,00
		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	009/BAST-ADB/03/2023	12/04/2023	Surveillance Speedboat	599.405.250,00	0,00	599.405.250,00
		Peta Laut	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Chair	-	-	-	8.448.000,00	0,00	8.448.000,00
		Maintable	-	-	-	3.108.000,00	0,00	3.108.000,00
		Small Table	-	-	-	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00
		Filling Cabinet	-	-	-	5.816.000,00	0,00	5.816.000,00
		Fan	-	-	-	1.359.200,00	0,00	1.359.200,00
		Signboard	-	-	-	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00
		Handy Talky	-	-	-	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00
		Marine Radio Transceiver	-	-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		Binocular Day Vision	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Binocular Night Vision	-	-	-	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
		PC Deskop	-	-	-	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
		Life Jacket	-	-	-	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
		Pos Pengawasan	-	-	-	751.489.971,00	1.252.483,00	750.237.488,00
7		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				2.897.712.836,00	860.822.317,00	2.036.890.519,00
		Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	678.10/PL.02.03/A/03/2023	13 Maret 2023	Kendaraan Bermotor Penumpang	135.750.000,00	59.794.642,00	75.955.358,00
		Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	677.4/PI.02.03/A/03/2023	13 Maret 2023	Alat Pendingin	487.413.680,00	300.571.770,00	186.841.910,00
		Kemeterian Pertanian	30059/PL.130/F/05/2023	30 Mei 2023	Pertanian	1.425.000.000,00	385.937.500,00	1.039.062.500,00
		Kemeterian Pertanian	30059/PL.130/F/05/2023	30 Mei 2023	Alat Laboratorium Umum	844.710.555,00	114.387.889,00	730.322.666,00
		Kemeterian Pertanian	30059/PL.130/F/05/2023	30 Mei 2023	Penyehatan	963.813,00	130.516,00	833.297,00
		Kemeterian Pertanian	30059/PL.130/F/05/2023	30 Mei 2023	Lainnya	3.874.788	0	3.874.788,00
8		DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				313.577.998.000,00	14.820.938.259,00	298.757.059.741,00

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
		Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR	647.1/BA/Dc/2023 dan B.21.028/3678/Sekret/DKLH	06/07/2023	Pompa	516.578.520,00	301.337.470,00	215.241.050,00
					Liquid	1.853.571.352,00	1.513.749.936,00	339.821.416,00
					Sumber Tenaga	452.748.628,00	184.872.356,00	267.876.272,00
					Perkakas Pabrik Es	642.103.618,00	262.192.311,00	379.911.307,00
					Rambu Bersuar	243.536.955,00	0	243.536.955,00
					Bangunan Gedung Kantor	1.420.743.988,00	116.027.425,00	1.304.716.563,00
					Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	960.594.409,00	78.448.543,00	882.145.866,00
					Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	300.105.534,00	24.508.619,00	275.596.915,00
					Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.268.599.228,00	103.602.270,00	1.164.996.958,00
					Taman	119.105.781.486,00	9.726.972.155,00	109.378.809.331,00
					Pagar	713.426.840,00	58.263.192,00	655.163.648,00
					Jalan Lainnya	18.879.769.242,00	0	18.879.769.242,00
					Sumber Air	163.674.520,00	22.277.920,00	141.396.600,00
					Bangunan Pembuang Air Kotor	7.608.826.049,00	776.734.326,00	6.832.091.723,00
					Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	96.509.693.612,00	0	96.509.693.612,00
					Instalasi Gardu Listrik Induk	2.434.184.459,00	248.489.664,00	2.185.694.795,00
					Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	173.992.606,00	23.682.327,00	150.310.279,00
					Jaringan Listrik Lainnya	143.744.954,00	0	143.744.954,00
		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BA. 292/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/8/2023	01/08/2023	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00
		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SETJEN/ROUM/KAP.3/11/2023	30/11/2023	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	51.252.600.000,00	0	51.252.600.000,00
					Bangunan Gedung Kantor	6.371.598.000,00	1.285.873.074,00	5.085.724.926,00
					Bangunan Gedung Tempat Ibadah	180.850.000,00	36.471.417,00	144.378.583,00
					Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	80.457.000,00	14.641.807,00	65.815.193,00
					Bangunan Gedung Garasi/Pool	139.562.000,00	26.843.447,00	112.718.553,00
		Kementerian PUPR	BAST BMN No. 028/2469/UPTD.PS/DKLH,	24 November 2023	Excavator	2.145.305.000,00	0,00	2.145.305.000,00
II	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO					32.999.048.788,19	0,00	32.999.048.788,19
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					293.719.773,00	0,00	293.719.773,00
2	DINAS KESEHATAN					1.147.444.015,19	0,00	1.147.444.015,19
		KABUPATEN BULELENG	028/023.9/II/2023	028/023.9/VII/2023	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	293.719.773,00	0,00	293.719.773,00
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar	NN.07.2/RABIES/2023	7 Februari 2023	Persediaan	459.000.000,00	0,00	459.000.000,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/2/C/BAPB/GFK/2023	11 January 2023	Persediaan	833.392,00	0,00	833.392,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/1/C/BAPB/GFK/2023	28 Pebruari 2023	Persediaan	416.696,00	0,00	416.696,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/3/C/BAPB/GFK/2023	8 May 2023	Persediaan	420.484,00	0,00	420.484,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/4/C/BAPB/GFK/2023	6 June 2023	Persediaan	228.800,00	0,00	228.800,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/5/C/BAPB/GFK/2023	8 June 2023	Persediaan	1.175.894,00	0,00	1.175.894,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/6/C/BAPB/GFK/2023	3 July 2023	Persediaan	420.484,00	0,00	420.484,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/7/C/BAPB/GFK/2023	12 July 2023	Persediaan	209.775,00	0,00	209.775,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/8/C/BAPB/GFK/2023	14 July 2023	Persediaan	278.250,00	0,00	278.250,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/9/C/BAPB/GFK/2023	17 July 2023	Persediaan	548.865,00	0,00	548.865,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/10/C/BAPB/GFK/2023	25 September 2023	Persediaan	530.025,00	0,00	530.025,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/11/C/BAPB/GFK/2023	4 October 2023	Persediaan	530.025,00	0,00	530.025,00
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	027/12/C/BAPB/GFK/2023	21 November 2023	Persediaan	164.110,00	0,00	164.110,00
		Dinas Kesehatan Kota Denpasar	-	31 December 2023	Persediaan	682.687.215,19	0,00	682.687.215,19
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					31.497.885.000,00	0,00	31.497.885.000,00
		Pemerintah Kabupaten Badung	B.22.523.43/053/UPTD.PP/Diskelkan	30 March 2023	Bangunan Pemecah Gelombang	17.787.832.000,00	0,00	17.787.832.000,00
					Bangunan Dermaga	13.710.053.000,00	0,00	13.710.053.000,00
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
		Pemerintah Kabupaten Karangasem	BAST BMD Pemkab Karangasem No:	25 January 2023	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
			000.2.3.2/173/BPKAD/PBMD/SETDA					
III		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO				3.695.333.394,00	0,00	3.695.333.394,00
1		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3.681.533.394,00	0,00	3.681.533.394,00
		KOMITE SMAN 1 PETANG	04/XI/KOMITE SMAN 1 PETANG/2023	20 November 2023	Amplifier	14.650.000	0,00	14.650.000
		KOMITE SMAN 1 PETANG	03/III/KOMITESMAN 1 PETANG/2023	31 March 2023	COLUMN SPEAKER	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		KOMITE SMAN 1 PETANG	03/VIII/KOMITE SMAN 1 PETANG/2023	23 August 2023	SPEAKER PORTABLE	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		KOMITE SMKN 1 KUTA SELATAN	B.31.421.5/10208/SMKN 1 KUTSEL/DIKPORA	30 NOVEMBER 2023	CCTV	2.556.000	0,00	2.556.000
		KOMITE SMKN 1 KUTA SELATAN	B.31.421.5/10208/SMKN 1 KUTSEL/DIKPORA	30 NOVEMBER 2023	CCTV	1.200.000	0,00	1.200.000
		KOMITE SMKN 1 KUTA SELATAN	B.31.421.5/10208/SMKN 1 KUTSEL/DIKPORA	30 NOVEMBER 2023	DVR	5.035.000	0,00	5.035.000
		KOMITE SMKN 1 KUTA SELATAN	B.31.421.5/10206/SMKN 1 KUTSEL/DIKPORA	30 NOVEMBER 2023	ROUTER	27.750.000	0,00	27.750.000
		KOMITE SMKN 1 KUTA SELATAN	B.31.421.5/10204/SMKN 1 KUTSEL/DIKPORA	30 NOVEMBER 2023	SERVER	115.500.000	0,00	115.500.000
		KOMITE SMKN 1 KUTA SELATAN	B.31.421.5/10205/SMKN 1 KUTSEL/DIKPORA	30 NOVEMBER 2023	UPS WEARNES	23.575.000	0,00	23.575.000
		KOMITE SMAN 1 BANJAR	01/BMD/SMAN 1 BANJAR/2023	1 March 2023	BEL OTOMATIS	3.525.000	0,00	3.525.000
		KOMITE SMAN 1 BANJAR	02/BMD/SMAN 1 BANJAR/2023	16 May 2023	AC SPILT 1 PK (SHARP)	4.500.000	0,00	4.500.000
		KOMITE SMAN 1 BANJAR	07/BMD/SMAN1BANJAR/2023	30 December 2023	KOMPUTER ALL IN ONE ASUS A3202WBAK - BA585W	118.980.000	0,00	118.980.000
		KOMITE SMAN 1 SUKASADA	B.253.900/TU/SMAN 1 SKSD/DIKPORA	23 October 2023	CCTV (TV Polytron)	4.000.000	0,00	4.000.000,00
		KOMITE SMAN 2 SINGARAJA	B.31.900/928/SMAN 2 SGR/DIKPORA	24 March 2023	PRINTER EPSON L.3250	4.420.000	0	4.420.000
		KOMITE SMAN 2 SINGARAJA	B.31.900/2885/SMAN 2 SGR/DIKPORA	04-Sep-23	PRINTER EPSON L.5290	15.975.000	0	15.975.000
		KOMITE SMAN 2 SINGARAJA	B.31.900/1479/SMAN 2 SGR/DIKPORA	3 May 2023	RAK SERVER	7.650.000	0	7.650.000
		KOMITE SMAN 2 SINGARAJA	B.31.900/1475/SMAN 2 SGR/DIKPORA	3 May 2023	Tangga Lipat	2.000.000	0	2.000.000
		KOMITE SMAN 2 SINGARAJA	B.31.900/1475/SMAN 2 SGR/DIKPORA	3 May 2023	Tangga Panjang	3.110.000	0	3.110.000
		KOMITE SMKN 1 SINGARAJA	B.31.425.3/331/SMKN 1 SGR/DIKPORA	11 May 2023	A.C Gree 2 PK	7.925.000	0	7.925.000
		KOMITE SMKN 1 SINGARAJA	B.31.027/918/SMKN 1 SGR/DIKPORA	08-Nov-23	CCTV HIKVISION Indoor	3.732.500	0	3.732.500
		KOMITE SMKN 1 SINGARAJA	B.31.027/918/SMKN 1 SGR/DIKPORA	08-Nov-23	CCTV HIKVISION Indoor	3.307.500	0	3.307.500
		KOMITE SMKN 1 SINGARAJA	B.31.027/918/SMKN 1 SGR/DIKPORA	08-Nov-23	AC Gree 2PK	22.770.000	0	22.770.000
		KOMITE SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	B.31.027/3734/SMAN 1 KBT/DIKPORA	2 May 2023	Kursi Putar	2.700.000	0	2.700.000
		KOMITE SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	B.31.027/3735/SMAN 1 KBT/DIKPORA	2 May 2023	Speaker Sedang	5.000.000	0	5.000.000
		KOMITE SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	B.31.027/3735/SMAN 1 KBT/DIKPORA	2 May 2023	Speaker Besar	15.000.000	0	15.000.000
		KOMITE SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	B.31.027/3756/SMAN 1 KBT/DIKPORA	2 May 2023	Podium	3.750.000	0	3.750.000
		KOMITE SMAN 1 SUKAWATI	027/682/SMA.SUK.2023	17-Nov-23	AC Split	43.028.000	0	43.028.000
		KOMITE SMAN 1 SUKAWATI	027/682/SMA.SUK.2023	17-Nov-23	Lemari Penyimpanan	7.697.000	0	7.697.000
		KOMITE SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	B.31.027/5066/SMAN 1 KBT/DIKPORA	13 June 2023	Rehabilitasi TRRC	64.868.000	0	64.868.000
		KOMITE SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	B.31.027/5707/SMAN 1 KBT/DIKPORA	3 July 2023	Rehabilitasi Kantin	133.880.000	0	133.880.000
		KOMITE SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	B.31.027/5706/SMAN 1 KBT/DIKPORA	3 July 2023	Rehabilitasi Parkir	87.300.000	0	87.300.000
		KOMITE SMAN 1 AMLAPURA	B.31.028/6925/SMAN 1 AMLAPURA/DIKPORA	29-Nov-23	Patung arjuna	29.000.000	0	29.000.000
		KOMITE SMAN 1 RENDANG	B.31.028/24/SMAN 1 RENDANG/DIKPORA	2 January 2023	Bangunan Tempat Parkir	197.500.000	0	197.500.000
		KOMITE SMAN 1 SUKAWATI	027/682/SMA.SUK.2023	17-Nov-23	Kantin Sekolah	30.000.000	0	30.000.000
		KOMITE SMKN 1 KUTA SELATAN	B.31.421.5/10207/SMKN 1 KUTSEL/DIKPORA	30 NOVEMBER 2023	Bangunan Secepat (Balai Bengong)	12.500.000	0	12.500.000
		KOMITE SMAN 2 BUSUNGBIU	B.31.420/5399/SMAN 2 BUSUNG BIU/DIKPORA	27-Nov-23	Gedung Lantai Dua	317.421.876	0	317.421.876
		KOMITE SMAN 1 SUKASADA	B.253.027/1278/TU/SMAN 1 SKSD/DIKPORA	26-Apr-23	Gong Kebyar Jegog	132.000.000	0	132.000.000
		KOMITE SMAN 1 SINGARAJA	B.31.425/4408/SMAN 1 SGR/DISKIPORA	11-Nov-23	Kursi Besi	66.500.000	0	66.500.000
		KOMITE SMAN 1 SINGARAJA	B.31.425/4408/SMAN 1 SGR/DISKIPORA	11-Nov-23	PC all in one	147.550.000	0	147.550.000
		KOMITE SMKN 1 GEROKGAK	B.31.028/1374/SMKN 1 GRK/DIKPORA	10-Apr-23	Sepeda Motor	10.800.000	0	10.800.000
		KOMITE SMAN 4 SINGARAJA	027/280/SMAN 4 SGR	17 May 2023	CCTV	30.864.807	0	30.864.807
		KOMITE SMAN 4 SINGARAJA	027/280/SMAN 4 SGR	17 May 2023	PROJECTOR EPSON EB-W06	64.000.000	0	64.000.000
		KOMITE SMAN 4 SINGARAJA	027/280/SMAN 4 SGR	17 May 2023	Bracket Projector	510.000	0	510.000
		KOMITE SMAN 4 SINGARAJA	027/280/SMAN 4 SGR	17 May 2023	Peralatan Sound Sistem	23.580.000	0	23.580.000

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
		KOMITE SMAN 4 SINGARAJA	027/280/SMAN 4 SGR	17 May 2023	Kamera Digital	33.453.000	0	33.453.000
		KOMITE SMAN 4 SINGARAJA	027/280/SMAN 4 SGR	17 May 2023	Dron	32.980.000	0	32.980.000
		KOMITE SMAN 4 SINGARAJA	027/280/SMAN 4 SGR	17 May 2023	Laptop	53.640.000	0	53.640.000
		KOMITE SMAN 4 SINGARAJA	027/280/SMAN 4 SGR	17 May 2023	Jaringan Internet	12.460.500	0	12.460.500
		KOMITE SMAN 2 GEROKGAK	B.31.032/24/SMAN 2 Grk.BLL/DIKPORA	04-Apr-23	Gerobak Sampah	2.700.000	0	2.700.000
		KOMITE SMAN 2 GEROKGAK	B.31.420/450/SMAN 2 Grk.BLL/DIKPORA	15 March 2023	Mesin Potong Rumput	3.995.000	0	3.995.000
		KOMITE SMAN 4 DENPASAR	B.31.425/193/SMAN 4 DPS/DIKPORA	2 January 2023	AC	121.299.400	0	121.299.400
		KOMITE SMAN 4 DENPASAR	B.31.425/193/SMAN 4 DPS/DIKPORA	2 January 2023	Papan Nama hadir Kepala Sekolah, Waka, dan Analis SDM	4.800.000	0	4.800.000
		KOMITE SMAN 1 SIDEMEN	B.31.421.3/5149/SMAN 1 SIDEMEN/DIKPORA	1 December 2023	CCTV	19.957.500	0	19.957.500
		KOMITE SMAN 1 SIDEMEN	B.31.421.3/5149/SMAN 1 SIDEMEN/DIKPORA	1 December 2023	Meja Kursi	21.500.000	0	21.500.000
		KOMITE SMKN 1 MAS UBUD	B.31.421.5/4074/SMKN 1 MAS UBUD/DIKPORA	16-Nov-23	STAND	1.425.000	0	1.425.000
		KOMITE SMKN 1 MAS UBUD	B.31.421.5/4074/SMKN 1 MAS UBUD/DIKPORA	16-Nov-23	KOMPUTER	103.850.000	0	103.850.000
		KOMITE SMAN 1 UBUD	B.31.425/150/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	31 January 2023	Kursi Napoly Plastik	16.650.000	0	16.650.000
		KOMITE SMAN 1 UBUD	B.31.425/602/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	11-Apr-23	Kursi Pejabat	2.850.000	0	2.850.000
		KOMITE SMAN 1 UBUD	B.31.425/621/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	13-Apr-23	Lemari Arsip	5.910.000	0	5.910.000
		KOMITE SMAN 1 UBUD	B.31.425/89/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	19 January 2023	FIBER	61.827.000	0	61.827.000
		KOMITE SMAN 1 UBUD	B.31.425/712/SMAN 1 UBUD/DIKPORA	5 May 2023	FIBER	50.070.000	0	50.070.000
		KOMITE SMAN 1 MARGA	B.31425/2438/SMAN 1 MARGA/DIKPORA	12 May 2023	Baner dan Stig Aula	33.270.000	0	33.270.000
		KOMITE SMAN 1 MARGA	B.31425/1890/SMAN 1 MARGA/DIKPORA	17-Apr	Gapura	50.300.000	0	50.300.000
		KOMITE SMAN 2 GEROKGAK	B.31.032/24/SMAN 2 Grk.BLL/DIKPORA	04-Apr-23	Patung Dewi Saraswati	27.000.000	0	27.000.000
		KOMITE SMKN 1 GEROKGAK	B.31.000/1815/SMKN 1 Grk/DIKPORA	22 May 2023	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	7.500.000	0	7.500.000
		KOMITE SMKN 1 GEROKGAK	B.31.996/1739/SMKN 1 Grk/DIKPORA	15 May 2023	Tugu/tanda batas lainnya	4.800.000	0	4.800.000
		KOMITE SMKN 1 GEROKGAK	B.31.996/14/SMKN 1 GRK/DIKPORA	3 January 2023	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	87.000.000	0	87.000.000
		KOMITE SMAN 1 SIDEMEN	B.31.421.3/5149/SMAN 1 SIDEMEN/DIKPORA	1 December 2023	Alat Musik Tradisional Bali	75.500.000	0	75.500.000
		KOMITE SMAN 4 SINGARAJA	027/280/SMAN 4 SGR	17 May 2023	Peralatan Seni Muusik	48.480.000	0	48.480.000
		KOMITE SMAN 1 TEMBUKU	B.98.031/108/SMAN 1 TBK/DIKPORA	15 March 2023	Meja setengah Biro	37.050.000	0	37.050.000
		KOMITE SMAN 1 TEMBUKU	B.98.031/108/SMAN 1 TBK/DIKPORA	15 March 2023	Meja Kepsek	7.000.000	0	7.000.000
		KOMITE SMAN 1 TEMBUKU	B.98.031/108/SMAN 1 TBK/DIKPORA	15 March 2023	Meja Resepsion	7.000.000	0	7.000.000
		KOMITE SMAN 1 TEMBUKU	B.98.031/108/SMAN 1 TBK/DIKPORA	15 March 2023	Lap Top LENOVO	14.875.000	0	14.875.000
		KOMITE SMKN 1 BEBANDEM	002/2023	18 December 2023	1 Set Sofa	22.500.000	0	22.500.000
		KOMITE SMKN 1 BEBANDEM	002/2024	18/12/2023	Meja Tamu	2.500.000	0	2.500.000
		KEMENDIKBUDRISTEK	B.31.996/9/SMKN 2 NEGARA/DIKPORA	09/01/2023	Renovasi Ruang Praktik Siswa	250.000.000	0	250.000.000
		DITJEN PPKL KLHK	BA.5/SETPPKL/KKDTL/KAP.3/B/12/2023	15/12/2023	IPAL	196.377.000	0	196.377.000
		KEMENDIKBUDRISTEK	S10005199121	27-Nov-23	Brefille barista pro coff machine epresos maker kopi	23.310.000	0	23.310.000
		KEMENDIKBUDRISTEK	S10005231954	18/10/2023	Ice Cream Maker	20.313.000	0	20.313.000
		KEMENDIKBUDRISTEK	S10005225677	23/10/2023	Mesin kompor gas burner 4 tunngu kdp pkmksd5	12.543.000	0	12.543.000
		KEMENDIKBUDRISTEK	S10005235632	20/10/2023	electric proofer	9.490.500	0	9.490.500
		KEMENDIKBUDRISTEK	S10005222634	18/10/2023	Mixer bakery	12.109.091	0	12.109.091
		GURU SMKN 1 TEMBUKU	B.31.425.3/4927/SMKN 1 TBK/Dikpora	15/09/2023	Speaker Corong beserta penyangga besi	1.350.000	0	1.350.000
		THE WESTIN RESORT NUSA DUA BALI	B.31.032/118/SLBN 1 BDG/DIKPORA	06-Jan-23	AC 1,5 PK GREE and installation	4.000.000	0	4.000.000
		PT. SEJAHTERA INDOBALI TRADA	-	08-Nov-23	MOBIL SUZUKI ERTIGA AV1414 AT TRA	95.000.000	0	95.000.000
		PT. ASTRA INTERNASIONAL	056/AI-ISO/DPS/II/2023	13/02/2023	Mobil Pick Up Isuzu Traga	226.000.000	0	226.000.000
		TELKOM INDONESIA	-	23/10/2023	PC LENOVO (All in One)	21.733.720	0	21.733.720

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
		TELKOM INDONESIA	-	23/10/2023	Orbit modem star AI	479.000	0	479.000
		KOMITE	-	-	Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.275.000	0	6.275.000
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
		I Gusti Ngurah Made Sinar Darma Yasa, S.Sos., MAP (Ketua Kelas Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	B.10.028/2080/UPTD.PKSDM/BKPSDM	5 July 2023	Karya Grafika (Graphic Material)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Ida Bagus Komang Yudi Sutawan, S.IP., MAP (Ketua Kelas Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I	B.10.028/2079/UPTD.PKSDM/BKPSDM	18 July 2023	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
		I Wayan Eka Sanjaya Putra, S.IP., MAP (Ketua Kelas Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Prov. Bali	B.10.028/2632/UPTD.PKSDM/BKPSDM	20 July 2023	Karya Grafika (Graphic Material)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Putu Agustaja Pramascita, S.STP., M.Sc (Ketua Kelas Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Prov.	B.10.028/2081/UPTD.PKSDM/BKPSDM	30 August 2023	Remote Speaker Mikropone (Alat Keamanan)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Kadek Verryana, SE (Ketua Kelas Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Prov. Bali Tahun	B.10.028/2941/UPTD.PKSDM/BKPSDM	1 November 2023	Pahatan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Gde Hendra Pranata, S.STP., M.Si. (Ketua Kelas Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V Prov. Bali	B.10.028/3070/UPTD.PKSDM/BKPSDM	8 November 2023	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
IV	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO					18.412.673.364,00	24.132.143,00	18.388.541.221,00
1	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA					265.311.564,00	0,00	265.311.564,00
		Hibah ke SMA 1 Bangli	-	-	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	183.210.000,00	0,00	183.210.000,00
					Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	82.101.564,00	0,00	82.101.564,00
1	DINAS KESEHATAN					389.884.950,00	0,00	389.884.950,00
		PT. Bank BPD Bali	1869/BA/UMA/CSR/2023	25 October 2023	Peralatan dan Mesin	30.898.000,00	0,00	30.898.000,00
		PT Swakarya Mitra Gemilang	002-PT.SMG-1-203	23 January 2023	Peralatan dan Mesin	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00
		PT Gamma Mitra Lestari	B.37.027/23302.23/IP/RBMB	27 October 2024	Peralatan dan Mesin	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00
		PT Swakarya Mitra Gemilang; PT Honoris Industri	003-PT.SMG-II-2023	2 Pebruari 2023	Persediaan	188.339.400,00	0,00	188.339.400,00
		PT Elo Karsa Utama	1270/SU-EKU/2023	30 June 2023	Persediaan	121.749.550,00	0,00	121.749.550,00
		PT Mensa Bina Sukses	252/DPS1/MBS/VII/2023	30 June 2023	Persediaan	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK					22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
		PT FOHOWAY	-	-	Laptop dan PC	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
		PT FOHOWAY	-	-	Printer	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					32.994.750,00	0,00	32.994.750,00
		Bank BPD Bali	B-0377/RNO/DJA/2023	10 November 2023	PC Lab	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
					Laptop	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
					PC AIO	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
					Monitor	975.000,00	0,00	975.000,00
					PPN 11%	3.269.750,00	0,00	3.269.750,00
4	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					700.000.000,00	7.000.000,00	693.000.000,00
		PT. Reksa Tiga Mitra	006.1/RTM/I/2023	9 January 2023	Bangunan Peternakan/Perikanan	350.000.000,00	3.500.000,00	346.500.000,00
		CV. Pasang Indah	09.1/PI/I/2023	9 January 2023	Bangunan Peternakan/Perikanan	350.000.000,00	3.500.000,00	346.500.000,00
5	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					488.557.800,00	17.132.143,00	471.425.657,00
		PT. PLN (Persero) UIT JBM	001/010.PJ/BAST/TJBM/KI/2023 dan B.21.032/502/TAHURA/DKLH	11 October 2023	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	479.700.000,00	17.132.143,00	462.567.857,00
					Alat Tulis Kantor	4.773.000,00	0,00	4.773.000,00
					Kertas dan Cover	4.084.800,00	0,00	4.084.800,00
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					15.644.800.000,00	0,00	15.644.800.000,00

NO	OPD	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
		PT Jasa Raharja	0001/4.3.01.04.01.0001/BPKAD/2023	22/08/2023	Kas di Kas Daerah	3.030.300.000,00	0,00	3.030.300.000,00
		PT Jasa Raharja	0002/4.3.01.04.01.0001/BPKAD/2023	15/09/2023	Kas di Kas Daerah	432.900.000,00	0,00	432.900.000,00
		PT Jasa Raharja	0003/4.3.01.04.01.0001/BPKAD/2023	11/10/2023	Kas di Kas Daerah	432.900.000,00	0,00	432.900.000,00
		PT Jasa Raharja	0004/4.3.01.04.01.0001/BPKAD/2023	16/11/2023	Kas di Kas Daerah	432.900.000,00	0,00	432.900.000,00
		PT Jasa Raharja	0005/4.3.01.04.01.0001/BPKAD/2023	22/12/2023	Kas di Kas Daerah	865.800.000,00	0,00	865.800.000,00
		Kertha Bali Saguna kepada Pemprov Bali	0056/PAJE/5.02.0.00.0.00.02.0000/2023	31/12/2023	Tanah Kering	10.450.000.000,00	0,00	10.450.000.000,00
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH					868.724.300,00	0,00	868.724.300,00
		PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.	B.14.011/1881/SET/BAPENDA	12/06/2023	Bangunan Gedung Samsat Drive Thru	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00
		PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.	BAST Hasil Pekerjaan No.	20 September 2023	Bangunan Gedung Kantor	206.156.000,00	0,00	206.156.000,00
					Jalan Khusus	148.879.000,00	0,00	148.879.000,00
		PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.	BAST Barang & Hasil Pekerjaan No. 1868/BA/DIR/UMA/2023 dan 2636 Tahun 2023		Mebel	29.759.100,00	0,00	29.759.100,00
					Alat Pendingin	10.212.000,00	0,00	10.212.000,00
					Jalan Khusus	242.302.000,00	0,00	242.302.000,00
					Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.416.200,00	0,00	11.416.200,00
V	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO					5.177.500,00	0,00	5.177.500,00
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					5.177.500,00	0,00	5.177.500,00
		Kontribusi Wisatawan	0001/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	13/01/2023	Kas di Kas Daerah	85.000,00	0,00	85.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0002/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	16/01/2023	Kas di Kas Daerah	5.000,00	0,00	5.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0003/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	17/01/2023	Kas di Kas Daerah	32.000,00	0,00	32.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0004/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	18/01/2023	Kas di Kas Daerah	7.000,00	0,00	7.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0005/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	19/01/2023	Kas di Kas Daerah	15.000,00	0,00	15.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0006/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	31/01/2023	Kas di Kas Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0007/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	02/02/2023	Kas di Kas Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0008/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	06/02/2023	Kas di Kas Daerah	650.000,00	0,00	650.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0009/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	08/02/2023	Kas di Kas Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0011/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	31/03/2023	Kas di Kas Daerah	286.500,00	0,00	286.500,00
		Kontribusi Wisatawan	0010/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	31/03/2023	Kas di Kas Daerah	96.000,00	0,00	96.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0012/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	20/06/2023	Kas di Kas Daerah	362.625,00	0,00	362.625,00
		Kontribusi Wisatawan	0013/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	22/06/2023	Kas di Kas Daerah	216.375,00	0,00	216.375,00
		Kontribusi Wisatawan	0014/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	18/07/2023	Kas di Kas Daerah	972.000,00	0,00	972.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0015/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	15/08/2023	Kas di Kas Daerah	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Kontribusi Wisatawan	0016/4.3.01.05.01.0001/BPKAD/2023	05/09/2023	Kas di Kas Daerah	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

4

RINCIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2023

REKAPITULASI PENERIMAAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

URAIAN PFK	BUD	BLUD								JUMLAH BLUD	TOTAL
		RS JIWA	RS MATA BM	RSBM	PAL PUPR	PAM PUPR	BAPELKESMAS	PKSDM BKPSDM	LABKES		
Penerimaan BPJS Kesehatan	48.270.932.451,00							60.372.144,00		60.372.144,00	48.331.304.595,00
Penerimaan IWP 8%	40.035.410.752,00									0,00	40.035.410.752,00
Potongan JKK	1.180.374.470,00							3.396.960,00		3.396.960,00	1.183.771.430,00
Potongan JKM	3.541.108.698,00							56.615.328,00		56.615.328,00	3.597.724.026,00
Penerimaan IWP 1%	5.916.229.592,00									0,00	5.916.229.592,00
Penerimaan Taperum	0,00									0,00	0,00
Penerimaan PPh 21	0,00									0,00	0,00
Pajak Penghasilan 21	91.202.845.105,00	76.970.164,00	1.886.686.338,00	1.562.916.397,00	22.010.536,00	10.154.176,00	65.495.000,00	222.635.000,00	810.000,00	3.847.677.611,00	95.050.522.716,00
Pajak Pertambahan Nilai	87.304.620.332,00	1.030.102.347,00	3.422.415.494,00	8.169.330.257,00	269.207.158,00	810.294.328,00	93.133.843,00	335.684.172,00	165.182.555,00	14.295.350.154,00	101.599.970.486,00
Pajak Penghasilan 23	3.634.125.736,00	17.899.494,00	75.361.868,00	682.498.062,00	41.873.422,00	42.947.194,60	46.459.417,00	81.886.180,00	5.484.010,00	994.409.647,60	4.628.535.383,60
Pajak Penghasilan 25	19.820,00									0,00	19.820,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	17.267.198.815,00	13.825.806,00		445.582.117,00		6.960.000,00	5.523.038,00		519.174,00	472.410.135,00	17.739.608.950,00
Pajak Penghasilan 22	5.066.441.052,00	146.105.702,00	397.188.749,00	782.596.170,00	6.183.984,00	80.188.002,00	5.094.855,00	6.461.591,00	18.260.156,00	1.442.079.209,00	6.508.520.261,00
PPnBM Dalam Negeri	197.671.803,00										197.671.803,00
JUMLAH	303.616.978.626,00	1.284.903.513,00	5.781.652.449,00	11.642.923.003,00	339.275.100,00	950.543.700,60	215.706.153,00	767.051.375,00	190.255.895,00	21.172.311.188,60	324.789.289.814,60

REKAPITULASI PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

URAIAN PFK	PEMDA	BLUD								JUMLAH	TOTAL
		RS JIWA	RS MATA BM	RSBM	PAL PUPR	PAM PUPR	BAPELKESMAS	PKSDM BKPSDM	LABKES		
Penerimaan BPJS Kesehatan	48.270.932.451,00							60.372.144,00		60.372.144,00	48.331.304.595,00
Penerimaan IWP 8%	40.035.410.752,00									0,00	40.035.410.752,00
Potongan JKK	1.180.374.470,00							3.396.960,00		3.396.960,00	1.183.771.430,00
Potongan JKM	3.541.108.698,00							56.615.328,00		56.615.328,00	3.597.724.026,00
Penerimaan IWP 1%	5.916.229.592,00									0,00	5.916.229.592,00
Penerimaan Taperum	0,00									0,00	0,00
Penerimaan PPh 21	0,00									0,00	0,00
Pajak Penghasilan 21	91.202.845.105,00	76.970.164,00	1.886.686.338,00	1.562.916.397,00	22.010.536,00	10.154.176,00	65.495.000,00	222.635.000,00	810.000,00	3.847.677.611,00	95.050.522.716,00
Pajak Pertambahan Nilai	87.304.620.332,00	1.030.102.347,00	3.422.415.494,00	8.169.330.257,00	269.207.158,00	810.294.328,00	93.133.843,00	335.684.172,00	165.182.555,00	14.295.350.154,00	101.599.970.486,00
Pajak Penghasilan 23	3.634.125.736,00	17.899.494,00	75.361.868,00	682.498.062,00	41.873.422,00	42.947.194,60	46.459.417,00	81.886.180,00	5.484.010,00	994.409.647,60	4.628.535.383,60
Pajak Penghasilan 25	19.820,00									0,00	19.820,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	17.267.198.815,00	13.825.806,00		445.582.117,00		6.960.000,00	5.523.038,00		519.174,00	472.410.135,00	17.739.608.950,00
Pajak Penghasilan 22	5.066.441.052,00	146.105.702,00	397.188.749,00	782.596.170,00	6.183.984,00	80.188.002,00	5.094.855,00	6.461.591,00	18.260.156,00	1.442.079.209,00	6.508.520.261,00
PPnBM Dalam Negeri	197.671.803,00										197.671.803,00
JUMLAH	303.616.978.626,00	1.284.903.513,00	5.781.652.449,00	11.642.923.003,00	339.275.100,00	950.543.700,60	215.706.153,00	767.051.375,00	190.255.895,00	21.172.311.188,60	324.789.289.814,60

PT PURI RAHARJA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



PT PURI RAHARJA
Jl. WR. Supratman 14 dan 19 80233 Bali
Telp. 222013 (Hunting), 240583, 240584 Fax.: (0361) 242537
Website: www.puriraharja.com, Email: puriraharja@yahoo.co.id



PT PURI RAHARJA
Sehatlah Hidup Sehat

RUMAH SAKIT UMUM PURI RAHARJA

Jl.WR. Supratman No 14 & 19 DPS 80233 BALI Telp. 222013 / 229118 Fax. (0361) 242537
website : www.puriraharja.com / email : puriraharja@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DENGAN ANGKA PEMBANDING UNTUK TAHUN 2022 PT PURI RAHARJA

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : dr. Gede Bagus Darmayasa, M.M.,M.Repro
Alamat Kantor : Jl. W.R. Supratman No. 14 & 19 Denpasar
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : dr. Anak Agung Made Nardipa, MARS
Alamat Kantor : Jl. W.R. Supratman No. 14 & 19 Denpasar
Jabatan : Direktur Pelayanan, Keperawatan dan Marketing
3. Nama : dr. I Dewa Putu Bagus Supriadi, MARS
Alamat Kantor : Jl. W.R. Supratman No. 14 & 19 Denpasar
Jabatan : Direktur SDM, Umum dan Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.
2. Laporan Keuangan PT Puri Raharja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.



PURI RAHARJA
Sehat. Hidup. Sehat.

රුමා ශාකිනි ජාලයේ පුරි රාහරජා RUMAH SAKIT UMUM PURI RAHARJA

Jl.WR. Supratman No 14 & 19 DPS 80233 BALI Telp. 222013 / 229118 Fax. (0361) 242537
website : www.puriraharja.com / email : puriraharja@yahoo.co.id

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Untuk dan atas nama Direksi PT Puri Raharja,

Denpasar, 6 Maret 2024



dr. Gede Bagus Darmayasa, M.M.,M.Repro
Direktur Utama


dr. Anak Agung Made Naradipa, MARS
Direktur Pelayanan, Keperawatan dan Marketing


dr. I Dewa Putu Bagus Supriadi, MARS
Direktur SDM, Umum dan Keuangan



Laporan No: 00014/2.1274/AU.2/05/0463-3/1/III/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
PT Puri Raharja**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Puri Raharja, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2023, serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Puri Raharja tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 6 Maret 2024

PT PURI RAHARJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u> (disajikan kembali)
ASET			
ASET LANCAR			
- Kas	4.1	209.242.554,68	426.915.464,65
- Bank	4.2	18.895.842.931,75	18.444.620.729,53
- Piutang	4.3	9.144.873.597,50	7.850.548.256,37
- Cadangan Penghapusan Piutang	4.3	(740.128.354,14)	(993.145.537,62)
- Piutang Non Usaha	4.3	43.676.346,00	364.499.999,00
- Persediaan	4.4	2.395.422.228,85	2.204.593.152,89
- Uang Muka Pajak	4.5	2.309.420.782,55	1.308.060.861,40
- Beban Dibayar Dimuka	4.6	853.997.926,44	568.572.761,85
Jumlah Aset Lancar		<u>33.112.348.013,64</u>	<u>30.174.665.688,08</u>
ASET TIDAK LANCAR			
- Aset Tetap	4.7		
- Tanah	4.7.1)	8.856.838.120,00	8.856.838.120,00
- Bangunan RS dan Kantin	4.7.2)	15.299.622.374,87	14.828.221.374,87
- Bangunan Rawat Jalan	4.7.3)	13.371.527.926,00	13.284.109.926,00
- Peralatan Kantor	4.7.4)	7.599.675.426,32	7.118.128.767,12
- Perlengkapan Rumah Sakit	4.7.5)	658.601.451,00	658.601.451,00
- Alat Medik	4.7.6)	19.538.631.021,37	16.985.502.919,27
- Kendaraan	4.7.7)	863.975.000,00	853.675.000,00
- Inventaris Poliklinik	4.7.8)	2.323.394.593,58	1.909.225.042,58
Jml. Biaya Perolehan Aset Tetap		<u>68.512.265.913,14</u>	<u>64.494.302.600,84</u>
- Akumulasi Penyusutan		<u>(36.241.532.770,48)</u>	<u>(32.528.908.868,65)</u>
Nilai Buku Aset Tetap		<u>32.270.733.142,66</u>	<u>31.965.393.732,19</u>
Aset Lainnya	4.8	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		<u>32.270.733.142,66</u>	<u>31.965.393.732,19</u>
JUMLAH ASET		<u>65.383.081.156,29</u>	<u>62.140.059.420,27</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
UTANG LANCAR			
- Utang Usaha	4.9	4.574.848.158,62	3.658.195.156,53
- Kewajiban Segera	4.10	1.756.098.339,80	1.138.829.854,80
- Utang Pajak	4.11	320.186.624,86	220.502.782,88
- Utang Bank	4.12	419.612.277,29	318.673.992,29
- Utang Lancar Lainnya	4.13	926.721.225,20	259.354.958,22
Jumlah Utang Lancar		<u>7.997.466.625,77</u>	<u>5.595.556.744,72</u>
UTANG JANGKA PANJANG			
- Utang Bank	4.14	3.157.999.998,00	4.345.999.998,00
- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	4.15	3.582.880.836,22	3.314.706.106,30
Jumlah Utang Jangka Panjang		<u>6.740.880.834,22</u>	<u>7.660.706.104,30</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>14.738.347.459,99</u>	<u>13.256.262.849,02</u>
MODAL			
Modal saham	4.16.1)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Saldo Laba	4.16.2)		
- Cadangan Umum		6.242.816.201,20	6.242.816.201,20
- Belum Ditentukan Tujuannya		29.401.917.495,10	27.640.980.370,05
Jumlah Modal		<u>50.644.733.696,30</u>	<u>48.883.796.571,26</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL		<u>65.383.081.156,30</u>	<u>62.140.059.420,28</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 6 Maret 2024
PT PURI RAHARJA
PERSEROAN TERBATAS
PURI RAHARJA
DENPASAR - BALI
dr. Gede Bagus Darmayana, MM., M.Repro
Direktur Utama

PT PURI RAHARJA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	2023	2022 <i>(disajikan kembali)</i>
PENDAPATAN USAHA	5.1.		
- Pendapatan Rawat Darurat	5.1.1)	4.162.401.393,00	3.613.160.963,00
- Pendapatan Rawat Jalan	5.1.2)	32.331.109.570,00	23.655.168.954,00
- Pendapatan Rawat Inap	5.1.3)	39.248.057.473,00	35.691.431.446,00
- Pendapatan Lainnya	5.1.4)	2.239.791.785,93	1.823.062.184,53
- Pengurang Pendapatan	5.1.5)	(653.286.173,00)	(540.798.547,00)
- Koreksi Pendapatan	5.1.6)	83.683.211,00	1.020.410.015,62
- Keuntungan/(Kerugian) Pasien JKN	5.1.7)	13.627.451.972,00	8.866.619.740,00
- Keuntungan/(Kerugian) Pasien Kemenkes	5.1.8)	26.765.510,00	926.363.667,00
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>91.065.974.741,93</u>	<u>75.055.418.423,15</u>
Harga Pokok Penjualan/Beban Langsung	5.2.		
- Beban Langsung Jasa	5.2.1)	23.322.235.799,20	19.226.173.990,67
- HPP Obat dan BHP	5.2.2)	23.007.158.514,05	20.358.100.933,63
- HPP Rontgen	5.2.3)	244.599.895,50	206.445.993,40
- HPP Laboratorium	5.2.4)	1.222.186.870,04	1.243.212.941,62
- HPP Hemodialisa	5.2.5)	2.421.767.736,50	2.018.746.167,64
- HPP Dapur/Gizi	5.2.6)	1.222.287.722,00	1.194.398.875,00
- HPP Barang Umum	5.2.7)	701.570.698,00	893.580.567,09
- HPP Barang BDRS	5.2.8)	271.799.315,00	-
Jumlah Harga Pokok Penjualan/Beban Langsung		<u>52.413.606.550,29</u>	<u>45.140.659.469,05</u>
LABA/RUGI KOTOR PENJUALAN		<u>38.652.368.191,64</u>	<u>29.914.758.954,10</u>
BEBAN OPERASIONAL	5.3.		
- Beban Pemasaran	5.3.1)	12.155.830,00	15.450.147,00
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5.3.2)	3.948.105.643,79	3.769.485.074,49
- Beban Administrasi dan Umum	5.3.3)	28.413.005.368,94	25.237.960.251,89
- Beban Penyusutan	5.3.4)	3.714.303.589,00	3.193.362.606,00
- Beban Cadangan Penghapusan Piutang	5.3.5)	608.981.432,52	-
Jumlah Beban Operasional		<u>36.696.551.864,25</u>	<u>32.216.258.079,38</u>
LABA KOTOR USAHA		<u>1.955.816.327,39</u>	<u>(2.301.499.125,28)</u>
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	5.4.		
- Pendapatan Non Operasional	5.4.1)	914.189.539,26	1.286.008.860,87
- Beban Non Operasional	5.4.2)	264.851.324,60	473.326.666,79
Jumlah Pendapatan (beban) Non Operasional		<u>649.338.214,66</u>	<u>812.682.194,08</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak		<u>2.605.154.542,05</u>	<u>(1.488.816.931,20)</u>
- Beban Pajak Penghasilan		77.619.960,00	-
Laba Bersih Setelah Pajak		<u>2.527.534.582,05</u>	<u>(1.488.816.931,20)</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 6 Maret 2024

PT PURI RAHARJA



PERSTORAN TERBATAS
PURI RAHARJA
DENPAGAR - BALI

dr. Gede Bagus Darmayasa, MM., M.Repro
Direktur Utama

PT PURI RAHARJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Modal disetor	Saldo Laba		Jumlah
		Cadangan Umum	Belum Ditentukan Tujuannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	15.000.000.000,00	6.242.816.201,00	33.783.891.316,15	55.026.707.517,15
Pembagian Laba:				
- Deviden	-	-	(4.465.636.499,07)	(4.465.636.499,07)
Koreksi atas laba ditahan	-	-	(188.457.516,00)	(188.457.516,00)
Laba/(Rugi) selama tahun berjalan	-	-	(1.488.816.931,20)	(1.488.816.931,20)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	15.000.000.000,00	6.242.816.201,00	27.640.980.369,88	48.883.796.570,88
Pembagian Laba:				
- Deviden	-	-	(766.597.456,79)	(766.597.456,79)
Koreksi atas laba ditahan	-	-	-	-
Laba/(Rugi) selama tahun berjalan	-	-	2.527.534.582,05	2.527.534.582,05
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	15.000.000.000,00	6.242.816.201,00	29.401.917.495,14	50.644.733.696,14

PT PURI RAHARJA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2022
(disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2023</u>	<u>2022</u> (disajikan kembali)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Bersih	2.527.534.582,05	(1.488.816.931,20)
Penyesuaian untuk Rekonsiliasi Laba (Rugi) Bersih menjadi Kas bersih diperoleh dari kegiatan usaha		
- Penyesuaian Akumulasi Penyesuaian Aset Tetap		
- Beban Penyusutan Aset Tetap	3.714.303.589,00	2.614.248.322,95
- Penghapusan Aset Tetap	(1.679.687,50)	-
- Penyesuaian Cadangan Penghapusan Piutang		
- Beban Cadangan Penghapusan Piutang	(253.017.183,48)	-
- Pembalikan Cadangan Penghapusan Piutang	-	(24.884.596,99)
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi:		
- (Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	(1.294.325.341,13)	312.812.621,43
- (Kenaikan) Penurunan Piutang Lainnya	320.823.653,00	(364.499.999,00)
- (Kenaikan) Penurunan Persediaan	(190.829.075,96)	(156.318.671,25)
- (Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pajak	(1.001.359.921,15)	(926.675.893,01)
- (Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar di Muka	(285.425.164,59)	(189.648.629,85)
- (Kenaikan) Penurunan Hak atas Sewa	-	-
- Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	916.653.002,09	216.892.254,25
- Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Segera	617.268.485,00	61.993.926,00
- Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	99.683.841,98	(5.410.389.426,57)
- Kenaikan (Penurunan) Utang Bank	100.938.285,00	153.802.392,00
- Kenaikan (Penurunan) Utang Lancar Lainnya	667.366.266,98	(3.798.749.872,32)
- Kenaikan (Penurunan) Imbalan Pascakerja	268.174.729,92	498.449.942,88
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>6.206.110.061,43</u>	<u>(8.501.784.560,69)</u>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:		
- Pengadaan Aset Tetap	(4.017.963.312,30)	(4.799.495.018,59)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>(4.017.963.312,30)</u>	<u>(4.799.495.018,59)</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
- Kenaikan (Penurunan) Utang Jangka Panjang	(1.188.000.000,00)	(4.736.262.553,00)
- Kenaikan (Penurunan) Dividen	(766.597.456,79)	(4.465.636.499,07)
- Kenaikan (Penurunan) Tantiem, Jaspro, CSR	-	-
- Kenaikan (Penurunan) Koreksi Awal Tahun	-	(188.457.516,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<u>(1.954.597.456,79)</u>	<u>(9.390.356.568,07)</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	<u>233.549.292,34</u>	<u>(22.691.636.147,35)</u>
Kas dan Setara Kas Awal Periode	<u>18.871.536.193,97</u>	<u>41.563.172.341,32</u>
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	<u>19.105.085.486,32</u>	<u>18.871.536.193,97</u>
Kas dan Setara Kas terdiri dari		
- Kas	209.242.554,68	426.915.464,65
- Bank	18.895.842.931,75	18.444.620.729,53
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Periode	<u>19.105.085.486,43</u>	<u>18.871.536.194,18</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAK**

**LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN**



PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda) DAN ENTITAS ANAK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Alamat Kantor : Jalan Surapati No. 8 Denpasar
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Alamat Kantor : Jalan Surapati No. 8 Denpasar
Jabatan : Direktur

Untuk dan atas nama Direksi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.
Denpasar, 19 Februari 2024



I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Direktur Utama

I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00005/3.0225/AU.1/09/1756-1/1/II/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian **PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak ("Perusahaan dan Entitas Anak")**, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian **PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak** tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan dan Entitas Anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai, kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan dan Entitas Anak atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.



PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan dan Entitas Anak.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan dan Entitas Anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN

NIU-KAP: KEP-1011/KM.1/2010

I Wayan Wirawan, S.E., CPA
NRAP AP. 1756

Denpasar, 19 Februari 2024




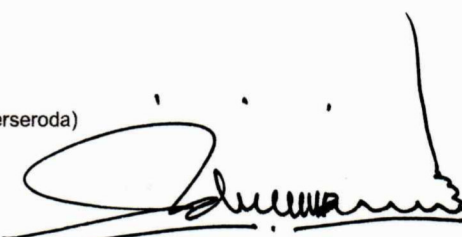
1

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2023	2022
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2d,4	158.195.109.122	133.937.291.764
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(189.894.700)	-
Deposito Berjangka	5	22.290.000.000	29.090.000.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(3.846.900.000)	(4.846.900.000)
Piutang Co-Guarantee	2e,6	59.746.526.461	40.074.625.913
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(19.313.757.770)	(10.487.117.063)
Piutang Usaha	2e,7	1.669.514.401	2.971.378.651
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(185.948.507)	(250.150.737)
Piutang Lain-Lain	8	182.576.045	24.249.552
Uang Muka	9	384.363.501	133.313.658
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Lancar	2f,10	11.921.479.104	123.553.032.899
Jumlah Aset Lancar		230.853.067.657	314.199.724.636
ASET TIDAK LANCAR			
Efek	2g,11	81.846.635.501	67.577.306.763
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(3.144.223.833)	(1.550.000.000)
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar	2f,10	96.278.219.411	-
Aset Lain-Lain	12	25.198.954.160	-
Aset Tetap dan Inventaris	2h,13	6.364.920.203	2.821.986.051
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(3.453.945.007)	(1.281.190.052)
Aset Tidak Berwujud	2i,14	722.788.673	456.364.897
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(397.805.512)	(302.287.463)
Aset Pajak Tangguhan	2r,15	59.183.961	42.099.255
Jumlah Aset Tidak Lancar		203.474.727.557	67.764.279.450
JUMLAH ASET		434.327.795.214	381.964.004.086

Mengetahui,
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)


Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Direktur Utama



Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Direktur

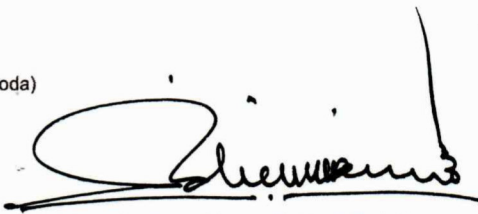
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2023	2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Klaim	2m,16	1.758.639.729	625.086.840
Utang Pajak	2r,17	131.103.396	200.234.870
Utang Co-Guarantee	18	-	1.278.934.912
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2n,19	3.948.537.958	3.260.618.029
Utang Lancar Lainnya	20	1.417.897.493	794.332.751
Penampungan Sementara Jasa Jaminan	2o,21	1.952.412.471	1.337.321.505
Dana Cadangan Klaim	2m,22	29.373.262.357	26.182.306.392
Corporate Social Responsibility (CSR)	23	502.453.588	381.717.534
Utang Setoran Modal Pemegang Saham	24	1.000.000.000	1.250.000.000
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Pendek	2p,26	26.577.836.411	179.950.717.190
Liabilitas Lain-Lain - Bagian Jangka Pendek	25	4.967.128.946	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		71.629.272.349	215.261.270.023
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Panjang	2p,26	163.377.572.694	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2q,27	243.158.899	191.360.245
Liabilitas Lain-Lain - Bagian Jangka Panjang	25	2.848.240.024	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		166.468.971.617	191.360.245
JUMLAH LIABILITAS		238.098.243.966	215.452.630.268
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebanyak 165.775 dan 149.025 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham	28	165.775.000.000	149.025.000.000
Cadangan Umum	28	8.036.333.787	6.842.716.517
Cadangan Tujuan	28	2.570.244.700	1.615.350.884
Saldo Laba	28	10.028.530.177	9.028.306.417
Jumlah		186.410.108.664	166.511.373.818
Kepentingan Non-Pengendali	28	9.819.442.584	-
JUMLAH EKUITAS		196.229.551.248	166.511.373.818
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		434.327.795.214	381.964.004.086

Mengetahui,
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)


I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Direktur Utama


I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Direktur

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

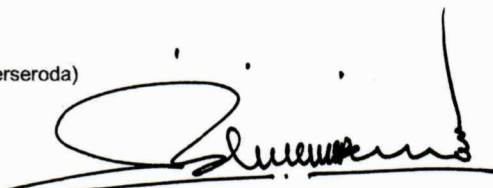
	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN USAHA	2k,29	90.614.773.265	89.595.268.232
BEBAN USAHA	2k,30	(86.909.854.322)	(87.007.658.431)
LABA BRUTO		3.704.918.944	2.587.609.800
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK			
Pendapatan di Luar Usaha Pokok	31	1.604.343.173	2.529.573.623
Beban di Luar Usaha Pokok	32	(99.941.107)	(105.330.608)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK		1.504.402.065	2.424.243.015
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		5.209.321.009	5.011.852.816
BEBAN PAJAK			
Kini	17	-	-
Tangguhan	15	11.395.705	(237.383.737)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		5.220.716.714	4.774.469.078
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN		(400.917.692)	192.981.220
LABA BERSIH KOMPREHENSIF		4.819.799.022	4.967.450.298

Mengetahui,

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)



I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Direktur Utama





I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Direktur


Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Disetor	Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya			Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Lainnya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	148.725.000.000	5.993.900.765	936.298.282	-	6.777.066.527	-	162.432.265.573
Penambahan Modal Disetor	300.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000
Pembentukan Cadangan Umum	-	848.815.753	-	-	(848.815.753)	-	-
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	679.052.602	-	(679.052.602)	-	-
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(1.018.578.903)	-	(1.018.578.903)
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	(169.763.151)	-	(169.763.151)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	4.967.450.298	-	4.967.450.298
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	149.025.000.000	6.842.716.517	1.615.350.884	-	9.028.306.417	-	166.511.373.818
Penambahan Modal Disetor	16.750.000.000	-	-	-	-	-	16.750.000.000
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.193.617.270	-	-	(1.193.617.270)	-	-
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	954.893.816	-	(954.893.816)	-	-
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(1.432.340.723)	-	(1.432.340.723)
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	(238.723.454)	-	(238.723.454)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	4.819.799.022	-	4.819.799.022
Kepentingan Non-Pengendali Setelah Akuisisi Entitas Anak	-	-	-	-	-	9.819.442.584	9.819.442.584
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	165.775.000.000	8.036.333.787	2.570.244.700	-	10.028.530.177	9.819.442.584	196.229.551.248



Ketut Widiana Karya, S.E., MBA,
Direktur Utama

Mengetahui,
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)


Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM,
Direktur

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

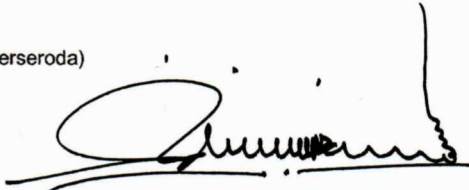
PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan	76.703.296.045	74.249.457.068
Penerimaan Piutang Subrogasi	3.739.673.793	2.036.282.176
Penerimaan R/I Com atas Reasuransi Penjaminan	7.067.353.671	13.712.248.769
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	2.323.387.617	1.128.054.205
Pembayaran IJP Co-guarantee/IJP/Premi Reasuransi	(44.633.273.715)	(52.382.495.739)
Pembayaran Klaim pada Terjamin	(20.844.893.365)	(21.987.255.443)
Pembayaran Biaya-biaya	(12.126.822.713)	(9.214.018.710)
Pembayaran untuk Aktivitas Lainnya	(99.941.107)	(107.470.723)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>12.128.780.225</u>	<u>7.434.801.603</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari Investasi	9.464.457.447	7.636.345.320
Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(6.296.857.000)	(30.046.500.000)
Akuisisi Entitas Anak	(6.731.113.000)	-
Kas Diperoleh dari Akuisisi Entitas Anak	1.419.978.464	-
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	(556.364.601)	(423.042.109)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	<u>(2.699.898.689)</u>	<u>(22.833.196.789)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Setoran Modal	16.500.000.000	1.250.000.000
Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan Lainnya	2.148.511.086	1.527.868.355
Pembayaran Deviden dan Pembagian Laba	(3.819.575.263)	(2.716.210.408)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>14.828.935.823</u>	<u>61.657.947</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	<u>24.257.817.358</u>	<u>(15.336.737.240)</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>133.937.291.764</u>	<u>149.274.029.004</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>158.195.109.122</u>	<u>133.937.291.764</u>

Mengetahui,
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)



I Ketut Widiana Kanya, S.E., MBA
Direktur Utama


I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., MM.
Direktur

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BANK BPD BALI

Laporan Keuangan (*Financial Statement*)

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023





SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI*

Yang bertanda tangan di bawah ini :/ *We, the undersigned :*

Nama/ *Name* : I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Alamat Kantor/ *Office address* : Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali
Jabatan/ *Position* : Direktur Utama/*President Director*

Nama/ *Name* : Ida Bagus Gede Setia Yasa
Alamat Kantor/ *Office address* : Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali
Jabatan/ *Position* : Direktur Operasional & TI/*Director Operational & IT*

Menyatakan bahwa :

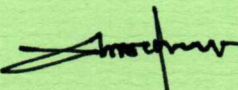
State that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023;
 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.
1. *We are responsible for preparation and presentation of the Entity financial statements for the year ended December 31, 2023;*
 2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
 3. a. *All information contained in the financial statements is complete and correct;*
b. *The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
 4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement letter is made truthfully.*

Denpasar, 15 Januari/ *January 15, 2024*

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Directors*


I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama/*President Director*


Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Operasional & TI/*Director Operational & IT*



Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No/Ref. : 00001/2.1127/AU.1/07/0336-1/1/I/2024

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

***To the Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI***

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Bali (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

Penjelasan atas hal audit utama:

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Pada tanggal 31 Desember 2023, pinjaman yang diberikan mencerminkan 58% dari jumlah aset. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp336.861.975.904 dengan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.232.527.296.112 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian (“KKE”) berdasarkan PSAK 71, “Instrumen Keuangan” (“PSAK 71”).

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of the most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Description of the key audit matter:

Allowance for impairment credit loss of loans

As of December 31, 2023, the loans represent 58% of the total assets. The Bank provides an allowance for impairment losses on loans amounting to Rp336,861,975,904 with an accumulated allowance for impairment losses of Rp1,232,527,296,112 for the year ended December 31, 2023.

These allowance for impairment losses for loans measured at amortized cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses (“ECL”) framework under SFAS 71, “Financial Instruments” (“SFAS 71”).

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan. Bank menghitung KKE dengan menggunakan beberapa parameter seperti *probability of default*, *loss given default*, *exposure at default* dan tingkat diskonto. Bank juga menggunakan asumsi dalam menentukan exposure seperti arus kas masa depan yang diharapkan dan faktor makro ekonomi masa akan datang, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat, mengingat ketidakpastian ekonomi yang timbul di masa yang akan datang.

Pengungkapan Bank mengenai cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dijelaskan pada Catatan 2d dan 11 atas laporan keuangan.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama:

- Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Bank yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan rating internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen pinjaman.
- Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.
- Kami mengevaluasi keakuratan, kelengkapan data dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 71. Kami juga mengevaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia.

As disclosed in Note 3 to the financial statements, this assessment involves significant management judgment and estimation. The Bank calculates ECL using several parameters such as the probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate. The Bank also uses assumptions in determining exposures such as expected future cash flows and future macroeconomic factors, several weighted probability scenarios and ECL overlay adjustments made, given the economic uncertainties that may arise in the future.

The Bank's disclosures regarding allowance for impairment losses on loans are explained in Notes 2d and 11 to the financial statements.

How our audit addressed this Key Audit Matter :

- *We have carried out procedures by understanding and evaluating the design and implementation of Bank relevant internal controls for the identification of financial assets with significant increased in credit risk or objective evidence of impairment, through testing of internal rating determination controls and conducting sampling examinations of loan documents.*
- *We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*
- *We evaluate the accuracy, completeness of data and significant modeling assumptions used in the ECL model, including the determination of the probability of default, loss given default and exposure at default, which are applied to the requirements of SFAS 71. We also evaluate the reasonableness of Indonesia's macroeconomic forecasts.*

- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilainya dinilai secara individual berdasarkan sampel.
 - Kami juga menilai apakah pengungkapan laporan keuangan secara memadai dan Bank eksposur mencerminkan tepat terhadap risiko kredit.
 - Kami juga melibatkan spesialis pemodelan kredit dan teknologi informasi dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan
- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis.*
 - *We also assessed whether the financial statement disclosures adequately and appropriately reflect the Bank's exposures to credit risk.*
 - *We also involved our credit modeling and information technology specialists in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.*

Penjelasan atas hal audit utama:

Description of the key audit matter:

Penilaian atas beban imbalan kerja dan keuntungan aktuarial pada pendapatan komprehensif lainnya

Valuation of post-employment benefit cost and actuarial gain in other comprehensive Income

Bank telah mengakui beban atas imbalan kerja sebesar Rp25.059.590.501 dan keuntungan aktuarial pada penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp1.725.689.570 pada tanggal 31 Desember 2023. Asumsi yang mendasar penilaian keuntungan aktuarial merupakan hal penting, dan juga subjektif, pertimbangan karena saldo tidak stabil dan mempengaruhi komponen ekuitas lainnya Bank. Manajemen telah memperoleh saran dari ahli aktuarial untuk menghitung jumlah aktuarial ini. Penilaian aktuarial ini sensitif terhadap asumsi utama seperti tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kematian. Mengingat pertimbangan diperlukan oleh Bank dalam menetapkan asumsi ini, volatilitas dapat diakibatkan oleh perubahan asumsi dan signifikansi saldo terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dinyatakan dalam catatan 24 dalam laporan keuangan.

Bank's has recognized the post employment benefit cost of Rp25,059,590,501 and actuarial gain in other comprehensive income amounting to Rp1,725,689,570 as of December 31, 2023. The assumptions that underpin the valuation of the actuarial gain are important, and also subjective, judgments as the balance is volatile and affects Bank's other equity component. Management has obtained advice from actuarial specialists in order to calculate this actuarial amount. These actuarial valuations are sensitive to key assumptions such as discount rates, inflation rates and mortality rates. Given the judgment required by Bank's in setting these assumptions, the volatility can result from changes in assumptions and the significance of the balances to the financial statements as a whole, as stated in Note 24 to the financial statements.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami mengevaluasi penilaian Bank atas asumsi yang digunakan dalam penilaian beban atas imbalan kerja dan keuntungan aktuarial termasuk informasi yang terkandung dalam laporan penilaian aktuarial untuk setiap program. Kami juga menilai desain dan implementasi kontrol sehubungan dengan proses penilaian untuk program manfaat pensiun.

Kami mereviu ruang lingkup penilaian yang dilakukan dan kami mengevaluasi keahlian dan independensi aktuaris Bank. Ini termasuk penilaian dan penyelidikan untuk asumsi utama yang diterapkan, *benchmarking*, tingkat diskonto, inflasi, dan tingkat kematian, terhadap data eksternal jika tersedia dan membentuk ekspektasi independen kami sendiri berdasarkan pengetahuan kami tentang praktik pasar lokal.

Kami juga menilai kecukupan dan kelengkapan pengungkapan manfaat pensiun terkait dalam laporan keuangan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

How our audit addressed this Key Audit Matter

We evaluated Bank's assessment of the assumptions used in the valuation of post employment benefit cost and actuarial gain including the information contained within the actuarial valuation reports for each plan. We also assessed the design and implementation of controls in respect of the valuation process for retirement benefit plans.

We reviewed the scope of valuations performed and we evaluated the expertise and independence of Bank's actuary. This included assessment and inquiry for the key assumptions applied, benchmarking, discount rates, inflation, and mortality rates, against external data where available and forming our own independent expectations based on our knowledge of local market practices.

We also assessed the adequacy and completeness of the related retirement benefit disclosures in the financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*
 - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO



HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO
Registered Public Accountants

Iskariman Supardjo, CPA

No. Ijin Akuntan Publik / *Public Accountant License Number*: AP. 0336

Jakarta, 15 Januari 2024/*January 15, 2024*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
ASET				ASSETS
Kas	4	569.570.584.235	519.162.055.853	Cash
Giro Pada				Current Accounts with Bank
Bank Indonesia	5	2.393.875.393.891	2.689.636.624.578	Indonesia
Giro Pada Bank Lain	6			Current Accounts with Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		70.100.633.360	52.690.921.094	Third Parties -
Jumlah Giro Pada				Total Current Accounts with
Bank Lain		70.100.633.360	52.690.921.094	Other Banks
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		(19.246.250)	(17.233.223)	Impairment Losses
		70.081.387.110	52.673.687.871	
Penempatan pada Bank Indonesia				Placements with Bank Indonesia
dan Bank Lain	7			and Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		2.528.810.312.334	1.293.578.592.454	Third Parties -
Jumlah Penempatan pada Bank				Total Placements with Bank
Indonesia dan Bank Lainnya		2.528.810.312.334	1.293.578.592.454	Indonesia and Other Banks
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		(2.062.877.735)	(378.944.000)	Impairment Losses
		2.526.747.434.599	1.293.199.648.454	
Efek - Efek	8			Securities
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		4.356.036.203.645	2.749.145.971.702	Third Parties -
Jumlah Efek - Efek		4.356.036.203.645	2.749.145.971.702	Total Securities
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		(28.500.000)	(235.314.100)	Impairment Losses
		4.356.007.703.645	2.748.910.657.602	
Efek - Efek yang Dibeli dengan				Marketable Securities Purchased
Janji Dijual Kembali	9			Under Resale Agreement
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		3.965.877.652.040	5.255.177.840.155	Third Parties -
Total Efek - Efek yang Dibeli dengan		3.965.877.652.040	5.255.177.840.155	Total Marketable Securities Purchased
Janji Dijual Kembali				Under Resale Agreement
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		--	--	Impairment Losses
		3.965.877.652.040	5.255.177.840.155	
Efek - Efek yang Dijual dengan				Marketable Securities sold under
Janji Dibeli Kembali	10			repurchase agreement
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		--	199.985.298.142	Third Parties -
Total Efek - Efek yang Dijual dengan		--	199.985.298.142	Total Marketable Securities Sold
Janji Dibeli Kembali				Under Repurchase Agreement
Pinjaman yang Diberikan	11			Loans
- Pihak Berelasi		27.441.865.094	28.932.700.510	Related Parties -
- Pihak Ketiga		21.123.139.140.393	20.039.396.219.431	Third Parties -
Total Pinjaman yang Diberikan		21.150.581.005.487	20.068.328.919.941	Total Loans
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		(1.232.527.296.112)	(1.105.305.454.920)	Impairment Loss
		19.918.053.709.375	18.963.023.465.021	
Penyertaan Saham	12	--	500.000.000	Investment in Shares
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		--	(75.000.000)	Impairment Loss
		--	425.000.000	
Aset Tetap	13	354.229.899.644	321.534.533.096	Fixed Assets
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(230.787.039.690)	(225.350.422.523)	Less: Accumulated Depreciation
		123.442.859.954	96.184.110.573	
Aset Takberwujud	14	47.769.374.582	41.632.775.742	Intangible Assets
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(39.561.514.110)	(35.819.694.171)	Less: Accumulated Amortization
		8.207.860.472	5.813.081.571	
Aset Hak Guna	15	75.524.319.101	77.964.945.493	Right-of-Use Assets
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(34.506.384.099)	(34.595.459.510)	Less: Accumulated Depreciation
		41.017.935.002	43.369.485.983	
Aset Lain - lain	16	213.233.323.524	184.459.768.490	Other Assets
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	22d	124.596.517.717	108.661.732.109	Deferred Tax Assets - Net
TOTAL ASET		34.310.712.361.564	32.160.682.456.402	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

	Catatan / Notes	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Segera	17	103.394.989.302	196.858.567.288	Liabilities Due Immediately
Simpanan dari Nasabah	18a			Deposits from Customers
- Pihak Berelasi		162.498.501.657	1.498.706.173.497	Related Parties -
- Pihak Ketiga		27.785.918.801.211	24.954.290.408.706	Third Parties -
		<u>27.948.417.302.868</u>	<u>26.452.996.582.203</u>	
Simpanan dari Bank Lain	19a			Deposits from Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		1.550.582.212.168	1.113.897.572.212	Third Parties -
		<u>1.550.582.212.168</u>	<u>1.113.897.572.212</u>	
Liabilitas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	20	--	192.219.962.033	Liability for Securities Sold Under Repurchase Agreement
Pinjaman yang Diterima	21	66.730.442.083	57.216.440.132	Borrowings
Utang Pajak	22a	117.286.572.343	50.981.759.450	Taxes Payable
Beban yang Masih Harus Dibayar	23	20.024.705.770	22.201.050.374	Accrued Expense
Liabilitas Imbalan Kerja	24	232.261.218.444	226.673.898.187	Post-Employment Benefit Obligation
Liabilitas Sewa	25	13.576.233.846	16.213.804.103	Lease Liabilities
Liabilitas Lain - lain	26	268.269.989.232	240.248.263.972	Other Liabilities
TOTAL LIABILITAS		30.320.543.666.056	28.569.507.899.954	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share Capital
nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Rp1,000,000 (full amount) par value per share
Modal Dasar :				Authorized Capital :
4.000.000 saham				4,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:	27			Issued and fully paid capital:
- 2023 : 2.050.257 saham		2.050.257.000.000	--	2022 : 2,050,257 shares -
- 2022 : 1.938.200 saham		--	1.938.200.000.000	2021 : 1,938,200 shares -
Tambahan Modal Disetor	28	2.340.338	2.340.338	Additional Paid-In Capital
Pengukuran Kembali atas Imbalan Pasca Kerja		(59.219.202.346)	(60.565.240.211)	Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligation
Saldo laba				Retained Earnings
- Telah Ditentukan Penggunaannya		1.260.900.248.199	1.110.021.178.825	Appropriated -
- Belum Ditentukan Penggunaannya		738.228.309.317	603.516.277.496	Unappropriated -
TOTAL EKUITAS		3.990.168.695.508	3.591.174.556.448	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		34.310.712.361.564	32.160.682.456.402	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023

(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
PENDAPATAN BUNGA				INTEREST INCOME
Pendapatan Bunga	30	3.100.965.514.184	2.595.112.121.429	Interest Income
Beban Bunga	31	(859.296.954.147)	(856.956.756.566)	Interest Expense
Jumlah Pendapatan Bunga Bersih		2.241.668.560.037	1.738.155.364.863	Net Interest Income
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan Operasional	32	171.571.821.970	137.154.094.747	Operating Income
Provisi dan Komisi	32	8.763.715.438	7.640.356.938	Provision and Commission
Lainnya	32	988.475.730	1.214.089.981	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		181.324.013.138	146.008.541.666	Total Other Operating Income
PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				RECOVERY (PROVISION) FOR IMPAIRMENT LOSSES
Aset Keuangan	33	(338.266.108.566)	(185.715.297.796)	Financial Assets
Transaksi Rekening Administratif	26	3.632.610.096	(520.380.111)	Transactions of Administrative Accounts
Jumlah Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		(334.633.498.470)	(186.235.677.907)	Total Provision for Impairment Losses
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan Tunjangan Karyawan	34	(648.632.271.633)	(549.688.096.414)	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	35	(341.057.663.712)	(283.646.748.694)	General and Administrative
Beban Modifikasi		(25.032.450.991)	(12.740.444.705)	Modification Expenses
Jumlah Beban Operasional Lainnya		(1.014.722.386.336)	(846.075.289.813)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL		1.073.636.688.369	851.852.938.809	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non Operasional	36	5.323.370.621	5.857.896.696	Non-Operating Income
Beban Non Operasional	36	(10.803.762.142)	(47.845.636.508)	Non-Operating Expenses
Jumlah Beban Non Operasional		(5.480.391.521)	(41.987.739.812)	Total Non Operating Expense
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		1.068.156.296.848	809.865.198.997	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN (BEBAN)				INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
Kini	22b	(346.242.424.844)	(223.706.574.720)	Current Tax
Tangguhan	22d	16.314.437.313	17.357.653.219	Deferred Tax
Jumlah Beban Pajak		(329.927.987.531)	(206.348.921.501)	Total Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		738.228.309.317	603.516.277.496	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laporan Laba Rugi				Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	24	1.725.689.570	4.141.961.305	Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligation
- Pajak Penghasilan Terkait	22d	(379.651.705)	(911.231.487)	Related Income Tax
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain		1.346.037.865	3.230.729.818	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		739.574.347.182	606.747.007.314	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM	48	366.234	321.772	EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Issued and Fully Paid-up Capital</i>	Tambahannya Modal Disetor / <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ <i>Remeasurement of post employment benefit Obligation- After Tax</i>	Saldo Laba / <i>Retained Earnings</i>			Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>
				Cadangan Umum/ <i>General Reserve</i>	Cadangan Tujuan/ <i>Specific Reserve</i>	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	
Saldo 1 Januari 2023 / <i>Balance as of January 1, 2023</i>	1.938.200.000.000	2.340.338	(60.565.240.211)	1.110.021.178.825	--	603.516.277.496	3.591.174.556.448
Laba tahun berjalan/ <i>Profit for the year</i>	--	--	--	--	--	738.228.309.317	738.228.309.317
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ <i>Remeasurement of post employment benefit obligation</i>	24	--	1.346.037.865	--	--	--	1.346.037.865
Setoran modal/ <i>Issuance of share capital</i>	28	112.057.000.000	--	--	--	--	112.057.000.000
Pembagian laba/ <i>Distribution of net income :</i>							
Cadangan umum/ <i>General reserve</i>	29	--	--	150.879.069.374	--	(150.879.069.374)	--
Dividen / <i>Dividends</i>	29	--	--	--	--	(452.637.208.122)	(452.637.208.122)
Saldo 31 Desember 2023 / <i>Balance as of December 31, 2023</i>	2.050.257.000.000	2.340.338	(59.219.202.346)	1.260.900.248.199	--	738.228.309.317	3.990.168.695.508

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-up Capital	Tambahkan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ Remeasurement of post employment benefit Obligation- After Tax	Saldo Laba / Retained Earnings			Jumlah Ekuitas/ Total Equity
					Telah Ditentukan penggunaannya/ Appropriated		Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	
					Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Tujuan/ Specific Reserve		
Saldo 1 Januari 2022 / Balance as of January 1, 2022		1.861.250.000.000	2.340.338	(63.795.970.029)	972.732.912.252	-	549.153.066.294	3.319.342.348.855
Laba tahun berjalan/ Profit for the year		--	--	--	--	--	603.516.277.496	603.516.277.496
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ Remeasurament of post employment benefit obligation	24	--	--	3.230.729.818	--	--	--	3.230.729.818
Setoran modal/ Issuance of share capital	28	76.950.000.000	--	--	--	--	--	76.950.000.000
Pembagian laba/ Distribution of net income :								
Cadangan umum/ General reserve	29	--	--	--	137.288.266.573	--	(137.288.266.573)	--
Dividen / Dividends	29	--	--	--	--	--	(411.864.799.721)	(411.864.799.721)
Saldo 31 Desember 2022/ Balance as of December 31, 2022		1.938.200.000.000	2.340.338	(60.565.240.211)	1.110.021.178.825	--	603.516.277.496	3.591.174.556.448

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal		
	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari Pendapatan Bunga, Provisi, dan Komisi	3.100.642.282.763	2.612.429.603.021	Receipts from Interest Income, Fee and Commissions
Pembayaran Bunga	(861.473.298.751)	(861.045.999.422)	Payments of Interest Expense
Pembayaran Beban Tenaga Kerja	(785.985.321.725)	(666.519.906.732)	Payments of Employee Expense
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(297.711.053.041)	(248.473.162.698)	Payments of General and Administrative Expense
Penerimaan dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional Lainnya	177.340.033.780	144.481.273.159	Receipts from Other Operating Income and Other Non-Operating Income
Pembayaran Beban Non Operasional	(10.803.762.141)	(47.845.636.508)	Non Operating Expense Paid
Arus Kas Sebelum Perubahan Pada	1.322.008.880.885	933.026.170.820	Cash Flows Before Changes to
Aset dan Liabilitas Operasi			Operating Assets and Liabilities
(Kenaikan) / Penurunan dalam Aset Operasi			(Increase) / Decrease In Operating Assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7 (9.105.092.751)	39.958.834.245	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	9 1.289.300.188.115	(912.787.570.037)	Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
Pinjaman yang Diberikan	11 (1.309.647.005.243)	(354.942.840.397)	Loans
Aset Lain-lain	16 (19.686.608.175)	24.861.387.818	Other Assets
Kenaikan / (Penurunan) Liabilitas Operasi			(Increase) / Decrease In Operating Liabilities
Liabilitas Segera	17 (93.463.577.986)	46.660.557.157	Liabilities Due Immediately
Simpanan Nasabah	18 1.495.420.720.665	3.075.904.845.280	Deposits from Costumers
Simpanan dari Bank Lain	19 436.684.639.956	(179.209.702.729)	Deposits from Other Banks
Liabilitas Lain-lain	26 169.042.729.268	176.296.777.773	Other Liabilities
Utang Pajak	22 65.698.690.769	(63.794.253)	Taxes Payable
Pembayaran Pajak Penghasilan	22 (345.636.302.720)	(217.316.244.013)	Payment of Income Tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	3.000.617.262.783	2.632.388.421.664	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Efek-efek	8 (1.599.124.895.834)	(976.834.503.172)	Acquisition from Marketable Securities
Penyertaan Saham	12 799.291.000	-	Proceeds from Investment in Shares
Pembelian Aset Tetap	13 (49.430.211.986)	(33.603.886.597)	Acquisitions of Fixed Assets
Penjualan Aset Tetap	13 246.918.650	-	Proceeds from Sale of Fixed Assets
Pembelian Aset Takberwujud	14 (6.136.598.840)	(4.818.520.432)	Acquisitions of Intangible Assets
Pembayaran Aset Hak Guna	(17.721.922.512)	(16.075.017.599)	Payment of Right-of-Use Assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.671.367.419.522)	(1.031.331.927.800)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan Setoran Modal	27, 28 112.057.000.000	76.950.000.000	Proceeds from Issuance of Share Capital
Penerimaan Pinjaman yang Diterima	21 10.000.000.000	20.000.000.000	Receipt of Borrowings
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	21 (485.998.049)	(312.070.265)	Payments of Borrowings
Pembayaran Dividen	29 (452.637.208.122)	(411.864.799.721)	Dividend Paid
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(331.066.206.171)	(315.226.869.986)	Net Cash Used in Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas dan	998.183.637.090	1.285.829.623.878	Net Increase Cash and
Setara Kas			Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	4.535.373.282.433	3.249.543.658.555	Cash and Cash Equivalents at
			Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	5.533.556.919.523	4.535.373.282.433	Cash and Cash Equivalents at
			End of the Year
Komponen Kas dan Setara Kas:			Components of Cash and Cash Equivalents:
Kas	4 569.570.584.235	519.162.055.853	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5 2.393.875.393.891	2.689.636.624.578	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	6 70.100.633.360	52.690.921.094	Current Account with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Jangka Waktu Jatuh Tempo Tiga Bulan atau Kurang Sejak Tanggal Perolehan	7 2.500.010.308.037	1.273.883.680.908	Placement with Bank Indonesia and Other Banks - Maturing within Three Months Since Acquisition Date
Jumlah Kas dan Setara Kas	5.533.556.919.523	4.535.373.282.433	Total Cash and Cash Equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT JASAMARGA BALI TOL

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT JASAMARGA BALI TOL**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | I Ketut Adiputra Karang |
| Alamat Kantor | : | Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No.2 Pesanggaran
Denpasar Selatan, Bali |
| Alamat Domisili Sesuai KTP
atau Kartu Identitas Lain | : | Jl. Cipinang Baru I No.34 A |
| Nomor Telpn | : | (0361) 725326 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| | | |
| 2. Nama | : | I Wayan Eka Saputra |
| Alamat Kantor | : | Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No.2 Pesanggaran
Denpasar Selatan, Bali |
| Alamat Domisili Sesuai KTP
atau Kartu Identitas Lain | : | Jl. Selat Bali No.7, Br/Link. Pesanggaran |
| Nomor Telpn | : | (0361) 725326 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

Menyatakan bahwa :

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jasamarga Bali Tol;
- Laporan keuangan interim telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
 - Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 16 Februari 2024

 I Ketut Adiputra Karang Direktur Utama	 I Wayan Eka Saputra Direktur Keuangan
---	---

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor : 00121/2.1030/AU.1/06/0181-2/1/II/2024

RSMIndonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Laporan Auditor Independen

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jasamarga Bali Tol

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan tahun 2023, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan tahun 2023 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2023, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181

Jakarta, 16 Februari 2024



00121

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u> <u>Rp</u>	<u>2022</u> <u>Rp</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	4,26	59.430	41.794
Dana Dibatasi Penggunaannya	5,26	7.610	4.838
Piutang Usaha dan Lain-lain	6,26	1.228	1.076
Biaya Dibayar di Muka	7	372	1.392
JUMLAH ASET LANCAR		68.640	49.100
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	8	660	328
Hak Pengusahaan Jalan Tol	9	1.853.804	1.855.631
Dana Dibatasi Penggunaannya	5,26	17.320	4.105
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		1.871.784	1.860.064
JUMLAH ASET		1.940.424	1.909.164

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023 Rp	2022*) Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	10,26	22.307	4.905
Pihak Ketiga	10	2.929	404
Utang Lain-lain	11,26	5.299	5.299
Beban Akrual	12,26	34.880	8.215
Utang Retensi		--	13
Pendapatan Diterima di Muka		234	143
Utang Bank Jangka Panjang yang			
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	13, 26	167.981	149.008
Utang Pemegang Saham	14,28	629.000	480.000
Utang Pajak	16	2.622	3.647
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		865.252	651.634
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi			
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	13,26	613.631	781.265
Beban Akrual	12,26	127.861	71.952
Provisi Pelapisan Jalan Tol	15	19.276	33.644
Liabilitas Pajak Tangguhan	16.e	171.249	153.722
Liabilitas Imbalan Pascakerja	17	4.466	4.471
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		936.483	1.045.054
JUMLAH LIABILITAS		1.801.735	1.696.688
EKUITAS			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000			
(Rupiah Penuh) per Saham			
Modal Dasar - 1.440.434 Saham			
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh -			
945.434 Saham	18	945.434	945.434
Tambahan Modal Disetor	19	112.102	112.102
Akumulasi Rugi		(918.767)	(844.754)
Pengukuran Kembali Program			
Imbalan Pasti		(80)	(306)
JUMLAH EKUITAS		138.689	212.476
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.940.424	1.909.164

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 28

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Tol	20	145.784	91.329
Pendapatan Lainnya	21	1.485	1.801
BEBAN POKOK PENDAPATAN			
Beban Tol	22,26	(64.050)	(49.720)
LABA BRUTO			
		83.219	43.410
Beban Umum dan Administrasi	23	(21.966)	(22.261)
Beban Lain-lain		(731)	(10.212)
LABA USAHA			
		60.522	10.937
Penghasilan Keuangan	25,26	956	719
Beban Keuangan	24	(117.964)	(97.255)
RUGI SEBELUM PAJAK			
		(56.486)	(85.599)
BEBAN PAJAK TANGGUHAN			
	16.e	(17.527)	(17.417)
RUGI TAHUN BERJALAN			
		(74.013)	(103.016)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Pengkukuran Kembali Program			
Imbalan Pasti	17	226	(206)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			
		(73.787)	(103.222)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Akumulasi Kerugian Rp	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Rp	Total Ekuitas Rp
Saldo 31 Desember 2021		945.434	112.102	(741.738)	(100)	315.698
Rugi Tahun Berjalan		--	--	(103.016)	--	(103.016)
Penghasilan Komprehensif Lain	17	--	--	--	(206)	(206)
Saldo 31 Desember 2022		945.434	112.102	(844.754)	(306)	212.476
Rugi Tahun Berjalan		--	--	(74.013)	--	(74.013)
Penghasilan Komprehensif Lain	17	--	--	--	226	226
Saldo 31 Desember 2023		945.434	112.102	(918.767)	(80)	138.689

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN ARUS KAS

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

<u>Catatan</u>	<u>2023</u> <u>Rp</u>	<u>2022</u> <u>Rp</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pendapatan Tol	145.632	91.615
Penerimaan Kas dari Pendapatan Usaha Lainnya	1.485	1.801
Pembayaran kepada Pemasok	(50.599)	(33.941)
Pembayaran kepada Pegawai	(12.540)	(17.817)
Penerimaan Bunga	956	719
Pembayaran Bunga dan Keuangan	(48.648)	(65.757)
Pembayaran Pekerjaan Pelapisan Jalan Tol	--	(18.000)
Kas Bersih yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	36.286	(41.380)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Hak Pengusahaan Jalan Tol	(2.655)	(80.331)
Penambahan Dana Dibatasi Penggunaannya	(15.987)	(2.068)
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(18.642)	(82.399)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Liabilitas Sewa	--	(79)
Penerimaan Utang Pemegang Saham	149.000	275.000
Pembayaran Utang Bank	13 (149.008)	(130.382)
Kas Bersih yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(8)	144.539
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	17.636	20.760
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	41.794	21.034
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	59.430	41.794

Informasi Non Kas dan Rekonsiliasi Aktivitas Pendanaan
 Disajikan di Catatan 32

PERUSAHAAN UMUM DAERAH *KERTA BALI SAGUNA*

**LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



ඔබ්බිලිපුරාධිකාරිකාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
බලකර්මාලය
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
කර්මාලය
KERTA BALI SAGUNA

රජයේ සේවයේ නියමයට අනුව (020000) පිහිටි
Jalan Kamboja Nomor 15 Denpasar – Telepon: (0361)236201

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Peraturan Daerah No.2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah dengan perubahannya sesuai Peraturan Daerah No.5 Tahun 1985, dan perubahan terakhir sesuai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022, maka dengan kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
Alamat Rumah : Perum Taman Buana Permai E3, Br/Link. Buana Desa,
(sesuai KTP) Padangsambian, Denpasar Barat
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
Alamat Rumah : Jalan Katrangan No. 19 Denpasar, Br/Link. Ketapian,
(sesuai KTP) Sumerta, Denpasar Timur
Jabatan : Direktur Operasional
3. Nama : Drs. Ida Bagus Gede Pumamabawa
Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
Alamat Rumah : Jalan Cekomaria No. C 151, Br/Link. Cengkilung,
(sesuai KTP) Peguyangan Kangin, Denpasar Utara
Jabatan : Direktur Keuangan
4. Nama : Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Alamat Kantor : Jalan Kamboja No.15, Denpasar
Alamat Rumah : Jalan Kerta Usada No. 15 Denpasar, Br/Link. Kertaraharja,
(sesuai KTP) Sidakarya, Denpasar Selatan
Jabatan : Direktur Pengembangan Usaha

Menyatakan bahwa :

1. Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna* adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna*.



ඔස්සේ කළුප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ඔස්සේ කළුප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය පාලන
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ඔස්සේ කළුප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය පාලන
KERTA BALI SAGUNA

කළුප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය පාලන සංස්ථා - රාජ්‍ය පාලන ක්‍රියා (02062) භූමි මුද්‍රා
Jalan Kamboja Nomor 15 Denpasar – Telepon: (0361)236201

3. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
4. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan Keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu Perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu Perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 20 Maret 2024

Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna



Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Direktur Utama


Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional


Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan


Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00017/3.0225/AU.2/05/1756-1/1/III/2024

Dewan Pengawas dan Direksi

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna* terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang telah dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Perusahaan belum mencatat Investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), investasi awalnya diakui pada nilai perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba atau rugi dari entitas anak. Hal ini diatur dalam SAK ETAP Bab 12 mengenai Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai, kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



KAP JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN

NIU-KAP/Licence : KEP-1011/KM.1/2010

I Wayan Wirawan, S.E., CPA.

NRAP: AP.1756

Denpasar, 20 Maret 2024



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2023	2022
ASET LANCAR			
Kas	3	153.159.997	44.441.462
Bank	4	38.368.264.292	20.248.348.328
Piutang Usaha	2b, 5	1.946.292.247	2.400.106.902
Dikurangi: Cadangan Kerugian Piutang		-	-
Piutang Lain-Lain	6	2.963.524.650	75.959.529.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian Piutang		-	-
Persediaan	2c, 7	1.349.159.167	640.124.367
Jumlah Aset Lancar		44.780.400.354	99.292.550.059
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan	2a, 8	3.650.000.000	3.650.000.000
Tanaman Perkebunan	2d, 9		
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)		-	-
Tanaman Menghasilkan (TM)		1.157.289.862	1.437.102.472
Akumulasi Penyusutan Tanaman Menghasilkan		(321.227.274)	(458.747.564)
Jumlah Tercatat Tanaman Perkebunan		836.062.588	978.354.908
Aset Tetap	2e, 10		
Harga Perolehan		12.694.762.434	2.882.527.240
Akumulasi Penyusutan		(1.431.911.170)	(938.973.746)
Jumlah Tercatat Aset Tetap		11.262.851.264	1.943.553.494
Jumlah Aset Tidak Lancar		15.748.913.852	6.571.908.402
JUMLAH ASET		60.529.314.206	105.864.458.461
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Utang Usaha	11	47.128.300	247.884.050
Biaya yang Masih Harus Dibayar	12	3.054	670.437
Utang Pajak	13	272.675.471	237.678.742
Pendapatan Diterima di Muka	14	41.748.050.602	4.669.231.520
Utang - Uang Muka (Deposit)	15	985.557.506	4.634.475.602
Utang Bank Jangka Pendek	16	825.768.079	1.931.938
Jumlah Kewajiban Lancar		43.879.183.012	9.791.872.289
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang	17	144.900.000	193.200.000
Imbalan Pascakerja	18	436.192.032	443.010.596
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		581.092.032	636.210.596
Jumlah Kewajiban		44.460.275.045	10.428.082.885
EKUITAS			
Modal Disetor	19	5.282.769.658	5.282.769.658
Cadangan Umum		8.356.313.965	996.444.920
Cadangan Tujuan		1.297.045.953	612.795.953
Saldo Laba (Rugi) Belum Ditentukan Penggunaannya		-	(13.355.403.467)
Labanya (Rugi) Periode Berjalan		1.132.909.585	101.899.768.512
Jumlah Ekuitas		16.069.039.161	95.436.375.576
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		60.529.314.206	105.864.458.461

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna



Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Direktur Utama

Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional

Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan

Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan Operasional	20		
Pendapatan Swakelola		12.064.745.778	11.757.576.138
Pendapatan Kerjasama Operasi (KSO)		7.439.921.500	10.262.138.769
Jumlah Pendapatan Operasional		19.504.667.278	22.019.714.907
Harga Pokok Penjualan	21	(11.669.089.484)	(10.944.888.246)
Beban PPh atas KSO/Final	22	(303.177.665)	(2.698.610.597)
Laba Kotor		7.532.400.129	8.376.216.064
Beban Operasional	23		
Beban Pemasaran		(70.658.787)	(51.108.729)
Beban Administrasi dan Umum		(5.633.549.907)	(5.947.285.398)
Jumlah Beban Operasional		(5.704.208.694)	(5.998.394.127)
LABA (RUGI) USAHA		1.828.191.434	2.377.821.937
Pendapatan (Beban) Non Operasional	24		
Pendapatan Non Operasional		834.517.993	104.155.072.935
Beban Non Operasional		(1.529.799.842)	(4.633.126.360)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(695.281.849)	99.521.946.575
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		1.132.909.585	101.899.768.512
Beban Pajak			
Pajak Kini		-	-
Total Beban Pajak		-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		1.132.909.585	101.899.768.512

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna



Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Direktur Utama

Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional

Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan

Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTA BALI SAGUNA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

KETERANGAN	Saldo Laba (Rugi)				Jumlah Ekuitas
	Setoran Modal	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2021	5.282.769.658	996.444.920	612.795.953	(13.355.403.467)	(6.463.392.935)
Tambahan Modal	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-	-
Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-
Penggunaan Saldo Laba :	-	-	-	-	-
- Dana Pembangunan Daerah/PAD	-	-	-	-	-
- Jasa Produksi	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	101.899.768.512	101.899.768.512
Saldo per 31 Desember 2022	5.282.769.658	996.444.920	612.795.953	88.544.365.045	95.436.375.577
Tambahan Modal	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	7.359.869.045	-	(7.359.869.045)	-
Cadangan Tujuan	-	-	684.250.000	(684.250.000)	-
Penggunaan Saldo Laba :	-	-	-	-	-
- Dana Pembangunan Daerah/PAD	-	-	-	(75.331.193.680)	(75.331.193.680)
- Jasa Produksi	-	-	-	(3.653.302.320)	(3.653.302.320)
- CSR	-	-	-	(1.515.750.000)	(1.515.750.000)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	1.132.909.585	1.132.909.585
Saldo per 31 Desember 2022	5.282.769.658	8.356.313.965	1.297.045.953	1.132.909.586	16.069.039.161

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


Mengetahui,
Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna



Nyoman Kami Artana, S.T., M.Si.
Direktur Utama


Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional


Drs. Ida Bagus Gede Pumamabawa
Direktur Keuangan


Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha

PERUSAHAAN DAERAH KERTA BALI SAGUNA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.132.909.585	101.899.768.512
Penyesuaian Untuk Merekonsiliasi Laba Bersih Menjadi Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		
- Cadangan Kerugian Piutang Usaha	-	(339.600.000)
- Cadangan Kerugian Piutang Lain-Lain	-	(1.746.590.796)
- Penyusutan Tanaman Perkebunan	(137.520.290)	32.469.404
- Penyusutan Aset Tetap	492.937.424	(1.010.277.985)
Penurunan (Peningkatan) pada :		
- Piutang Usaha	453.814.655	(688.728.431)
- Piutang Lain-Lain	72.996.004.350	(70.668.062.704)
- Persediaan	(709.034.800)	(426.712.345)
Peningkatan (Penurunan) pada:		
- Utang Usaha	(200.755.750)	78.199.040
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(667.383)	(2.836.658.271)
- Utang Pajak	34.996.729	(1.606.340.408)
- Pendapatan Diterima Dimuka	37.078.819.082	2.900.923.986
- Utang Bank Jangka Pendek	823.836.141	(953.127.255)
- Utang Bank Jangka Panjang	(48.300.000)	(44.275.000)
- Utang Uang Muka (Deposit)	(3.648.918.096)	(9.407.748.398)
- Kewajiban Imbalan Pascakerja	(6.818.564)	443.010.596
Kas Bersih Yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	108.261.303.084	15.626.249.945
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- (Kenaikan) / Penurunan Penyertaan	-	(2.159.200.000)
- (Kenaikan) / Penurunan Investasi Aset Tanaman Perkebunan	279.812.610	296.104.136
- (Kenaikan) / Penurunan Aset Tetap	(9.812.235.194)	(16.624.218)
Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(9.532.422.584)	(1.879.720.082)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Cadangan Umum	-	-
- Cadangan Tujuan	-	-
- Pembayaran Dana Pembangunan Daerah/PAD	(75.331.193.680)	-
- Pembayaran Jasa Produksi	(3.653.302.320)	-
- CSR	(1.515.750.000)	-
Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(80.500.246.000)	-
PENURUNAN KAS BERSIH	18.228.634.500	13.746.529.863
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	20.292.789.790	6.546.259.926
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	38.521.424.290	20.292.789.790
SALDO AKHIR PERIODE TERDIRI DARI:		
Kas	153.159.997	44.441.462
Bank	38.368.264.292	20.248.348.328
TOTAL	38.521.424.290	20.292.789.790

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direksi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna



[Signature]
Agung Dwi Astika, S.H., M.H.
Direktur Operasional

[Signature]
Drs. Ida Bagus Gede Purnamabawa
Direktur Keuangan

[Signature]
Bagus Gede Ananta Wijaya Karna, S.T.
Direktur Pengembangan Usaha



KERTHI BALI SANTHI



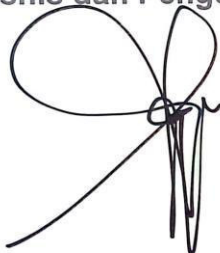
LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN BUKU 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KERTHI BALI SANTHI



**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* TAHUN BUKU 2023
PERUSAHAAN UMUM DAERAH *KERTHI BALI SANTHI***

Direktur Bisnis dan Pengembangan Digital



Putu Agus Bayu C.D.E, S.T

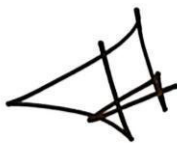
Direktur Utama



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KERTHI BALI SANTHI**

Alit Putra C.M.S, S.T., M.Sc

**Dewan Pengawas
Pejabat Pemerintah Daerah**



Tjok Bagus Pelayun, A.Par., M.M

**Dewan Pengawas
Unsur Independen**



Putu Gede Wiwin Gunawasika, S.E., M.M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga Perusahaan Umum Daerah *Kerthi Bali Santhi* (Perumda KBS) dapat menyelesaikan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2023. Perumda Kerthi Bali Santhi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Perumda *Kerthi Bali Santhi*. Selain itu, laporan keuangan *audited* ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*)

Proses penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2023 ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kinerja Perumda *Kerthi Bali Santhi*. Kerja keras dan kerja sama tim yang luar biasa dari seluruh jajaran telah menjadi pilar utama dalam merumuskan laporan keuangan *audited* perusahaan. Laporan ini juga merupakan komitmen Perumda *Kerthi Bali Santhi* untuk memberikan yang terbaik bagi Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat.

Berkat kerja keras dan dedikasi perusahaan, Perumda *Kerthi Bali Santhi* dapat terus berkembang untuk menjadi perusahaan yang mandiri, berdaya saing, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Semoga Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2023 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi kemajuan Perumda *Kerthi Bali Santhi* di masa mendatang.

Denpasar, 6 Februari 2024

Perusahaan Umum Daerah *Kerthi Bali Santhi*

Direktur Utama



PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KERTHI BALI SANTHI

(Alit Putra C.M.S, S.T., M.Sc)



ບໍລິຫານລັດ ງາບາບີລຽນ ທາເນີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ບໍລິຫານລາເອລີ ທຽຍຸຍີ ທາເນີ
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ລັດຊິວ ທາເນີ ສະໜີ
KERTHI BALI SANTHI
ເຈນລີ ເອລາລີເອ ງາວາຍວ ຫຼື ໂຄລລາ ທາເນີ ງຸໂຫຼ່າງ
Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar Bali, 80239
Website: www.kbsdigital.co.id



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alit Putra Christ M.S., M.Sc
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar Bali, 80239

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP)
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 05 Februari 2024



**(Alit Putra Christ M.S.,ST.,M.Sc)
Direktur Utama**

6



KETUT BUDIARTHA DAN ANGGIRIAWAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

LICENSE 321/KM.1/2019

Jalan Padang Mekar II, No. 22
Padangsambian, Denpasar
Bali 80117

Tlp. 0361-9078774
E. Info@kapbud.com
www.kapbud.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00005/2.1266/AU.2/05/1612-1/1/II/2024

Kepada
Yth. Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi
Denpasar – Bali

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi**, yang terdiri atas neraca tanggal 31 Desember 2023, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca **Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi** tanggal 31 Desember 2023, kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan Umum Daerah berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan Umum Daerah dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan Umum Daerah atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan Umum Daerah.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan Umum Daerah.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan Umum Daerah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan Umum Daerah tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



Putu Budi Anggiriawan, SE., M.Si., CPA., ASEAN CPA.
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1612

Denpasar, 05 Februari 2024

1

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023

	Catatan	31-Des-2023
		Rp
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	3.b ; 4.a	6.933.689.047
Persediaan	3.d ; 4.b	550.000
Pembayaran dimuka	3.e ; 4.c	447.511.217
Sewa Dibayar Dimuka	3.e ; 4.d	<u>95.184.835</u>
Jumlah Aset Lancar		<u>7.476.935.098</u>
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap	3.f ; 4.e	<u>734.614.537</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>734.614.537</u>
JUMLAH ASET		<u>8.211.549.635</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Biaya yang masih harus dibayar	4.f	9.810.000
Utang pajak	4.g	12.091.860
Utang Pembiayaan	4.h	<u>251.397.816</u>
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>273.299.676</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>273.299.676</u>
EKUITAS		
Modal	4.i	10.000.000.000
Saldo Laba	4.j	<u>(2.061.750.041)</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>7.938.249.959</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>8.211.549.635</u>

Denpasar, 05 Februari 2024


**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KERTHI BALI SANTHI**

Alit Putra Christ M.S., S.T., M.Sc
 Direktur Utama

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
 Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023

	<u>Catatan</u>	<u>31-Des-2023</u>
		Rp
Pendapatan	3.h ; 4.k	6.059.750
Harga Pokok Penjualan	3.h ; 4.l	4.772.500
Laba Kotor		<u>1.287.250</u>
Beban Operasional		
Beban Pemasaran	3.h ; 4.m	13.482.867
Beban Administrasi dan Umum	3.h ; 4.m	2.147.561.107
Jumlah Beban Operasional		<u>2.161.043.974</u>
Laba (Rugi) Operasional		<u>(2.159.756.724)</u>
Pendapatan (Beban) Non Operasional	4.n	98.006.682
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		<u>(2.061.750.041)</u>
Pajak Penghasilan		-
Laba (Rugi) Setelah Pajak		<u><u>(2.061.750.041)</u></u>

Denpasar, 05 Februari 2024



Alit Putra Christ M.S., S.T., M.Sc
 Direktur Utama

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
 Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023

	<u>Modal Disetor</u>	<u>Saldo laba</u>	<u>Jumlah</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Saldo per 01 Januari 2023	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Modal Disetor	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	(2.061.750.041)	(2.061.750.041)
Saldo 31 Desember 2023	<u>10.000.000.000</u>	<u>(2.061.750.041)</u>	<u>7.938.249.959</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
 Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023

	31-Des-2023
	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Laba (rugi) setelah pajak	(2.061.750.041)
Penyesuaian untuk merelokasi Laba (Rugi)	
Menjadi Kas bersih diperoleh dari Aktivasi Operasi	
Penyusutan Aset	63.224.574
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi	
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	(550.000)
Penurunan (Kenaikan) Biaya Dibayar Dimuka	(447.511.217)
Penurunan (Kenaikan) Sewa Dibayar Dimuka	(95.184.835)
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	12.091.860
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	9.810.000
JUMLAH AKTIVITAS OPERASI	(2.519.869.659)
 ARUS KAS DIHASILKAN DARI AKTIVITAS INVESTASI :	
Aset Tetap	(797.839.111)
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(797.839.111)
 ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN :	
Utang Pembiayaan	251.397.816
Modal Disetor	10.000.000.000
KAS DAN SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :	10.251.397.816
 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	6.933.689.047
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	6.933.689.047
 SALDO AKHIR TERDIRI DARI:	
Bank	6.933.689.047
 JUMLAH	6.933.689.047

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan





PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nonot Haryoto
Alamat Kantor : Askrida Tower
Jl. Pramuka Raya Kav. 151,
Jakarta Timur 13120
Nomor Telepon : (021) 819-1212
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Wawan Mulyawan
Alamat Kantor : Askrida Tower
Jl. Pramuka Raya Kav. 151,
Jakarta Timur 13120
Nomor Telepon : (021) 819-1212
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Asuransi Bangun Askrida ("Perseroan");
2. Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Maret 2024

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Direktur Utama



Direktur

(Nonot Haryoto)

(Wawan Mulyawan)

KANTOR PUSAT :

ASKRIDA TOWER, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 8191212 (Hunting) Fax. (021) 29827215, 29827216, 29827217 E-mail : info@askrida.co.id
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. B. 0018.2002

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : 00060/3.0260/AU.1/08/1660-2/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Asuransi Bangun Askrida

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi Bangun Askrida ("Perseroan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian atas liabilitas kontrak asuransi

Cadangan teknis asuransi yaitu cadangan klaim (termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR)) dan cadangan premi. Pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan teknis asuransi signifikan terhadap jumlah liabilitas Perseroan. Jumlah liabilitas asuransi dan aset reasuransi adalah sebesar Rp2.456.183.719.917 dan Rp605.039.107.299, seperti yang dijelaskan dalam catatan 11 pada laporan keuangan, penentuan cadangan melibatkan pertimbangan yang signifikan atas hasil di masa depan yang tidak pasti terkait dengan pembayaran kerugian dan perubahan eksposur risiko bisnis, termasuk penyelesaian penuh atas kewajiban pemegang polis jangka panjang.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan teknis asuransi ditentukan berdasarkan asumsi-asumsi aktuarial yang ditetapkan oleh Perseroan termasuk hasil investasi, tingkat diskonto, biaya-biaya dan inflasi. Asumsi-asumsi ini ditentukan berdasarkan pengalaman aktual dan studi pengalaman Perseroan.

Karena ketidakpastian estimasi yang signifikan terkait dengan penentuan cadangan teknis asuransi, maka hal ini kami anggap sebagai hal audit utama.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 1)

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami memahami dan telah mengevaluasi penilaian atas liabilitas kontrak asuransi, dimana kami telah melibatkan pakar aktuaria independen dan melakukan pengujian substantif. Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons Hal Audit Utama ini:

- Karena ada area yang membutuhkan pertimbangan manajemen dengan estimasi dan kriteria perhitungan cadangan teknisnya, maka kami menganggap liabilitas asuransi dan aset reasuransi sebagai hal audit utama.
- Kami telah melaksanakan prosedur memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian internal Perseroan yang relevan sehubungan dengan liabilitas asuransi dan aset reasuransi.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi serta pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Kami memeriksa dan menguji metodologi dan asumsi atas liabilitas kontrak asuransi termasuk konsistensi penerapan asumsi dalam perhitungan, seperti: tingkat diskonto, inflasi, tingkat lapse dan alokasi biaya.
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan matematis ulang secara independen atas *Gross Premium Reserve (GPV)* dan aset reasuransi pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan PSAK 62, "Kontrak Asuransi" ("PSAK 62").
- Kami melakukan pemeriksaan atas perhitungan matematis, berdasarkan sampel, atas nilai cadangan kotor dan bersih terhadap klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (*IBNR*) dan metodologi yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan PSAK 62.
- Kami melakukan perhitungan matematis ulang secara independen atas Pengujian Kecukupan Liabilitas (*Liability Adequacy Testing*) sesuai dengan PSAK dan melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan cadangan teknis pada tanggal 31 Desember 2023.
- Kami melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan akurasi data yang digunakan untuk menghitung cadangan teknis dengan melakukan rekonsiliasi antara laporan aktuaria dengan angka dalam dokumen pendukung pada tanggal 31 Desember 2023.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada catatan 18 atas akun Utang Klaim pada laporan keuangan terlampir, bahwa Perseroan memiliki perjanjian pembayaran tuntutan klaim kepada pihak tertanggung yang terpisah dari prosedur penanganan klaim pada umumnya. Kami tidak dalam memastikan besaran resiko atas tidak terhitungnya penanganan klaim tersebut didalam perhitungan cadangan teknis yang dilakukan.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Informasi keuangan terlampir yang terdiri dari analisa kekayaan yang diperkenankan dan perhitungan solvabilitas per tanggal 31 Desember 2023 dalam lampiran disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan induk tersendiri untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan tersebut yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tingkat solvabilitas tersebut merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan langsung dengan laporan keuangan induk tersendiri tersebut disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 5 Tahun 2023.

Perseroan telah menyusun satu set laporan keuangan konsolidasi terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang menyajikan informasi tambahan laporan keuangan terlampir, dan disajikan untuk tujuan analisis tambahan, serta bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk terlampir merupakan tanggung-jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Atas laporan keuangan konsolidasi tersebut kami telah menerbitkan laporan auditor bertanggal 28 Maret 2024 secara terpisah.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 2)

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan masalah tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perseroan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perseroan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 3)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perseroan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**Kantor Akuntan Publik
S. Mannan, Ardiansyah & Rekan**



Nur Eko Saputro, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1660

28 Maret 2024



PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

A S E T	Catatan	2 0 2 3	2 0 2 2
Kas dan bank	2 (4), 2 (8), 6	238.004.722.766	294.840.471.690
Piutang premi - bersih	7	228.643.554.123	134.444.278.248
Piutang hasil investasi	2 (9), 8	7.892.998.415	8.377.914.311
Piutang reasuransi - bersih	2 (12), 2 (13), 9	388.820.977.785	129.273.931.337
Deposito berjangka	2 (5), 10a, 10b	1.281.497.123.645	1.200.349.239.695
Efek ekuitas yang diperdagangkan	2 (5), 10c	9.125.175.000	5.149.875.000
Efek utang tersedia untuk dijual	2 (5), 10d	495.263.123.519	429.921.364.001
Aset reasuransi	2 (12), 2 (13), 11	605.039.107.299	707.710.729.642
Investasi pada properti, setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 19.702.545.376 dan Rp 17.848.900.960	2 (7), 10f	51.777.491.786	53.631.136.202
Biaya dibayar di muka	2 (10), 12	26.290.825.154	94.844.940.262
Penyertaan langsung	10e	321.080.869.948	283.650.998.585
Piutang lain-lain	13	46.873.138.503	49.720.882.709
Aset hak guna	14	740.721.012	1.268.809.897
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 109.631.240.407 dan Rp 100.946.275.004	2 (11), 15	117.172.972.126	113.891.216.279
Aset tak berwujud	2 (18), 16	821.746.877	213.380.092
Aset lain-lain	17	9.253.197.692	12.638.654.035
Aset pajak tangguhan	2 (14), 20c, 20d	34.137.316.131	30.234.119.147
JUMLAH ASET		<u>3.862.435.061.781</u>	<u>3.550.161.941.132</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN - Lanjutan
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2 0 2 3	2 0 2 2
LIABILITAS			
Utang klaim	18	42.229.143.991	140.698.293.807
Utang reasuransi	2(12), 19	9.972.036.228	71.658.667.546
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2 (16), 22	58.030.310.814	47.053.865.353
Premi yang belum merupakan pendapatan	2 (12), 2 (13), 11b	55.436.957.232	49.897.395.870
Utang komisi		47.067.756.951	39.881.300.815
Utang pajak	2 (14), 20a	12.116.999.617	8.155.896.033
Biaya yang masih harus dibayar	21	17.802.070.538	15.034.188.804
Estimasi liabilitas klaim	2 (12), 2 (13), 11a	178.123.333.761	165.501.091.400
Liabilitas kontrak asuransi jangka panjang	2 (12), 2 (13), 11c	2.222.623.428.924	1.805.264.580.344
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2 (16), 22	43.810.913.924	45.673.199.711
Utang lain-lain	23	94.245.448.475	158.540.442.407
JUMLAH LIABILITAS		<u>2.781.458.400.455</u>	<u>2.547.358.922.090</u>
EKUITAS			
Modal saham,	24	318.950.000.000	312.530.000.000
Modal dasar - 40.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar. Pada tahun 2023 dan 2022 telah ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 31.895 dan 31.253 lembar saham.			
Titipan modal disetor (saham)	24	5.770.000.000	6.420.000.000
Cadangan khusus	25a	110.000.000	110.000.000
Tambahan modal disetor (<i>Tax amnesty</i>)	20e	18.285.906.904	18.285.906.904
Penghasilan komprehensif lain		21.875.753.319	4.080.859.910
Saldo laba	25b		
Sudah ditentukan penggunaannya		603.703.696.125	568.356.000.449
Belum ditentukan penggunaannya		112.281.304.978	93.020.251.779
JUMLAH EKUITAS		<u>1.080.976.661.326</u>	<u>1.002.803.019.042</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>3.862.435.061.781</u>	<u>3.550.161.941.132</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
PENDAPATAN UNDERWRITING			
Pendapatan premi			
Premi bruto	2 (12), 2 (13), 26, 36	5.512.190.530.264	5.219.577.867.385
Premi reasuransi	2 (12), 2 (13), 27, 36	(635.207.913.562)	(749.876.658.173)
Mutasi atas premi yang belum merupakan pendapatan	2 (12), 2 (13), 36	(501.080.474.244)	(181.877.284.689)
Jumlah pendapatan underwriting		4.375.902.142.458	4.287.823.924.523
BEBAN UNDERWRITING			
Beban klaim			
Klaim bruto	2 (12), 2 (13), 28, 36	(3.548.065.388.085)	(3.295.891.555.164)
Klaim reasuransi	2 (12), 2 (13), 29, 36	525.893.268.824	446.099.690.384
Mutasi estimasi liabilitas klaim	2 (12), 2 (13), 36	(37.111.800.431)	(6.059.862.480)
Jumlah beban klaim		(3.059.283.919.692)	(2.855.851.727.260)
Beban komisi bersih	30, 36	(842.900.874.602)	(965.685.392.946)
Beban underwriting lainnya	36	(60.873.130.183)	(56.027.916.746)
Jumlah beban underwriting		(3.963.057.924.477)	(3.877.565.036.952)
HASIL UNDERWRITING	36	412.844.217.981	410.258.887.571
Hasil investasi	2 (9), 31	134.441.827.503	102.839.671.662
Beban usaha	2 (15), 32	(417.250.536.816)	(405.241.279.168)
LABA USAHA		130.035.508.668	107.857.280.065
Pendapatan (beban) lain-lain	33	(10.148.781.825)	(4.183.129.291)
Pengaruh pajak final dari hasil investasi	31	(10.200.219.270)	(8.353.806.696)
LABA SEBELUM PAJAK		109.686.507.573	95.320.344.078
Pajak penghasilan :	2 (14), 20		
Pajak kini		(1.236.214.760)	(886.536.640)
Pajak tangguhan		3.831.012.165	(1.413.555.659)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		112.281.304.978	93.020.251.779

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		112.281.304.978	93.020.251.779
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang dapat direklasifikasi ke laporan laba rugi :			
Investasi tersedia untuk dijual		18.050.821.060	(325.274.449)
Pos yang tidak dapat direklasifikasi ke laporan laba rugi :			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	22a	(328.112.374)	2.555.325.402
Pengaruh pajak penghasilan		72.184.723	(514.058.552)
LABA KOMPREHENSIF		130.076.198.387	94.736.244.180

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Cat.	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Titipan Modal	Cadangan Khusus	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah
							Sudah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2021		297.510.000.000	18.285.906.904	15.020.000.000	110.000.000	2.364.867.509	545.921.753.203	72.368.539.504	951.581.067.120
Tambahan modal disetor	24	15.020.000.000	-	-	-	-	-	-	15.020.000.000
Titipan modal disetor	24	-	-	(8.600.000.000)	-	-	-	-	(8.600.000.000)
Dividen	25b	-	-	-	-	-	-	(48.486.921.468)	(48.486.921.468)
Cadangan umum	25b	-	-	-	-	-	22.434.247.246	(22.434.247.246)	-
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Askrida	25b	-	-	-	-	-	-	(1.447.370.790)	(1.447.370.790)
Laba (rugi) belum direalisasi atas investasi tersedia untuk dijual		-	-	-	-	(325.274.449)	-	-	(325.274.449)
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	22a	-	-	-	-	2.555.325.402	-	-	2.555.325.402
Pajak penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	(514.058.552)	-	-	(514.058.552)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	93.020.251.779	93.020.251.779
Saldo per 31 Desember 2022		312.530.000.000	18.285.906.904	6.420.000.000	110.000.000	4.080.859.910	568.356.000.449	93.020.251.779	1.002.803.019.042
Tambahan modal disetor	24	6.420.000.000	-	-	-	-	-	-	6.420.000.000
Titipan modal disetor	24	-	-	(650.000.000)	-	-	-	-	(650.000.000)
Dividen	25b	-	-	-	-	-	-	(55.812.151.067)	(55.812.151.067)
Cadangan umum	25b	-	-	-	-	-	35.347.695.676	(35.347.695.676)	-
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Askrida	25b	-	-	-	-	-	-	(1.860.405.036)	(1.860.405.036)
Laba (rugi) belum direalisasi atas investasi tersedia untuk dijual		-	-	-	-	18.050.821.060	-	-	18.050.821.060
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	22a	-	-	-	-	(328.112.374)	-	-	(328.112.374)
Pajak penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	72.184.723	-	-	72.184.723
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	112.281.304.978	112.281.304.978
Saldo per 31 Desember 2023		318.950.000.000	18.285.906.904	5.770.000.000	110.000.000	21.875.753.319	603.703.696.125	112.281.304.978	1.080.976.661.326

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus kas masuk		
Penerimaan premi langsung	5.324.230.439.987	5.394.966.655.994
Penerimaan premi tidak langsung	10.997.668.873	17.308.894.000
Penerimaan klaim recovery	373.789.057.385	408.512.896.111
Penerimaan lain	49.137.116.238	224.113.246.348
Jumlah arus kas masuk	5.758.154.282.483	6.044.901.692.453
Arus kas keluar		
Pembayaran premi reasuransi	(601.412.695.941)	(595.381.490.516)
Pembayaran komisi	(956.878.306.720)	(1.022.499.746.593)
Pembayaran klaim	(3.559.786.058.152)	(3.180.822.614.467)
Pembayaran beban usaha	(371.598.652.765)	(368.386.557.727)
Pembayaran pajak	(58.658.165.480)	(54.634.748.420)
Pembayaran lain	(130.929.892.084)	(47.054.022.240)
Jumlah arus kas keluar	(5.679.263.771.142)	(5.268.779.179.963)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	78.890.511.341	776.122.512.490
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus kas masuk		
Pencairan / penjualan investasi	762.018.918.311	1.645.893.738.702
Hasil investasi deposito	29.929.962.148	24.521.171.396
Hasil investasi obligasi	26.833.730.614	13.779.944.085
Hasil penjualan aset keuangan	-	4.799.172.364
Hasil investasi properti	1.664.342.119	1.045.203.563
Hasil penjualan aset tetap	71.110.608	579.600
Jumlah arus kas masuk	820.518.063.800	1.690.039.809.710
Arus kas keluar		
Penempatan investasi	(891.225.762.261)	(2.209.413.162.289)
Pembelian aset tetap	(14.258.975.737)	(4.941.492.006)
Penambahan penyertaan langsung	-	(1.400.000.000)
Pembelian aset lain	(717.435.000)	(126.693.000)
Jumlah arus kas keluar	(906.202.172.998)	(2.215.881.347.295)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(85.684.109.198)	(525.841.537.585)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN ARUS KAS - Lanjutan
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus kas masuk		
Tambahan modal disetor	5.770.000.000	6.420.000.000
Jumlah arus kas masuk	<u>5.770.000.000</u>	<u>6.420.000.000</u>
Arus kas keluar		
Pembayaran dividen	(55.812.151.067)	(48.486.921.468)
Jumlah arus kas keluar	<u>(55.812.151.067)</u>	<u>(48.486.921.468)</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(50.042.151.067)</u>	<u>(42.066.921.468)</u>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	(56.835.748.924)	208.214.053.437
Saldo kas dan bank awal periode	294.840.471.690	86.626.418.253
Saldo Kas dan Bank Akhir Periode	<u><u>238.004.722.766</u></u>	<u><u>294.840.471.690</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

